



Katalog: 4103008
ISSN 2086-1028

STATISTIK PEMUDA INDONESIA

2023

Volume 21, 2023

https://www.bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK





<https://www.bps.go.id>

STATISTIK PEMUDA INDONESIA

2023

Volume 21, 2023

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2023

Volume 21, 2023

Katalog : 4103008

ISSN : 2086-1028

No. Publikasi : 04200.2322

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : I + 412 halaman

Penyusun Naskah : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Desain Kover : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
(modifikasi dari www.freepik.com)

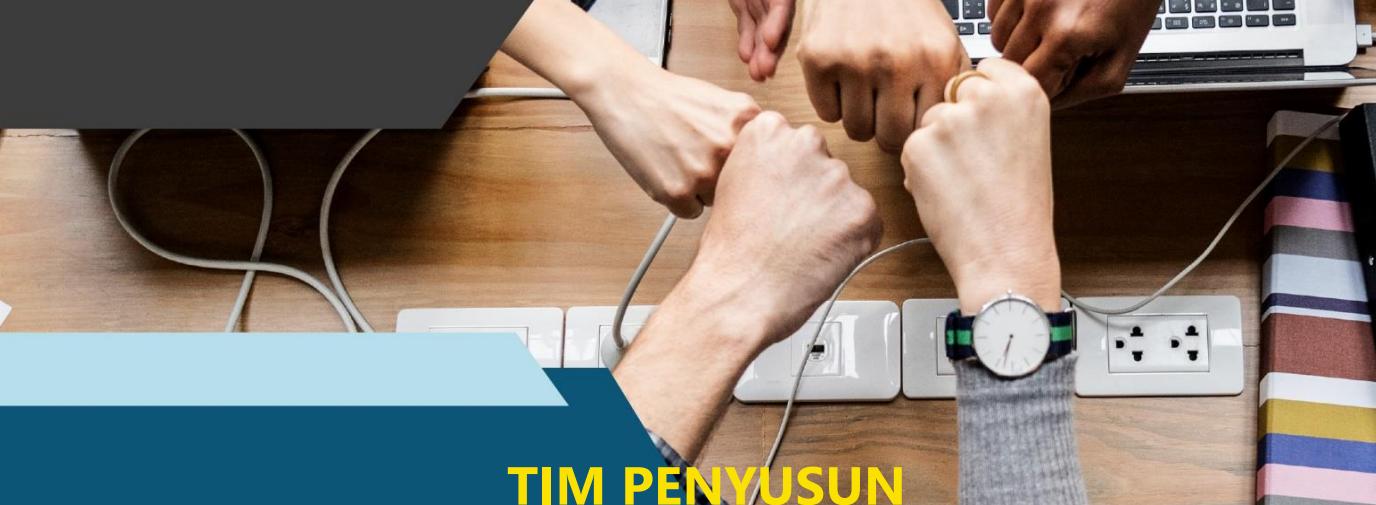
Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik

Sebagian ilustrasi bersumber dari www.freepik.com dan www.canva.com



Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.





TIM PENYUSUN

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2023

Volume 21, 2023

Pengarah:

Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si.

Penanggung Jawab:

Ahmad Avenzora, S.E., M.S.E.

Penyunting:

Wachyu Winarsih, M.Si

Dr. Budi Santoso SST, M.Si

Raden Sinang, SST., M.Si.

Yeni Rachmawati SST., M.Si.

Penulis Naskah:

Karuniawati Dewi Ramadani, S.Si., M.E.K.K.

Andry Poltak L. Girsang, S.ST., M.Ec.Dev.

Mega Silviliyana SST, M.E.K.K.

Nindya Putri Sulistyowati, S.ST.

Kurniawan Tri Yulianto, S.Tr.Stat.

Pengolah Data

Kurniawan Tri Yulianto, S.Tr.Stat.

Heykal, SST

Penata Letak:

Andry Poltak L. Girsang, S.ST., M.Ec.Dev

KATA PENGANTAR

Salah satu agenda strategis pembangunan kepemudaan yakni menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Terlebih lagi adanya peluang bonus demografi menuntut pemuda untuk cerdas dalam mengambil peran dan peluang. Menyadari urgensi peran yang melekat pada pemuda, pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan aktual untuk menunjang keberhasilan pembangunan kepemudaan di Indonesia.

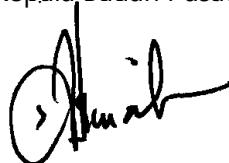
Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2023 berisikan data dan informasi kepemudaan melalui berbagai aspek meliputi: demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi sosial ekonomi, kesehatan reproduksi, dan program kepemudaan. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, dan dilengkapi data sekunder dari Kementerian/Lembaga terkait.

Publikasi tahunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan dan strategi pembangunan di bidang kepemudaan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang kepemudaan.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga hasil karya ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan kepemudaan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2023

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang merupakan periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan. Menurut hasil Susenas tahun 2023, perkiraan persentase pemuda sebesar 23,18 persen atau hampir seperempat dari penduduk Indonesia. Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,42, yang berarti setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan (59,91 persen berbanding 40,09 persen). Berdasarkan distribusi menurut wilayah, lebih dari separuh pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa (54,69 persen). Jika ditinjau dari status perkawinan, sekitar 68,29 persen pemuda belum kawin, sementara yang berstatus kawin sebesar 30,61 persen dan sisanya adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati. Sekitar tujuh dari seratus pemuda telah menjadi kepala rumah tangga, sementara itu tiga dari empat pemuda tinggal bersama keluarga (74,83 persen).

Kualitas pemuda terutama dilihat dari capaian pendidikan dan kesehatannya. Pada tahun 2023, hampir tidak ada pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis. Sekitar 29 dari 100 pemuda tercatat sedang bersekolah, dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 16-18 tahun, 19-24 tahun dan 25-30 tahun masing-masing sebesar 73,42 persen, 26,85 persen dan 5,70 persen. Secara umum, APS pemuda di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.

Mayoritas pemuda telah menamatkan pendidikan hingga SM/sederajat (40,01 persen) dan SMP/sederajat (35,96 persen). Hanya 11,25 persen pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga PT dan sekitar 10,31 persen pemuda yang hanya tamat SD/sederajat, serta sisanya tidak tamat SD atau belum pernah sekolah. Kelompok status ekonomi rumah tangga 20 persen teratas memiliki

persentase pemuda yang menamatkan pendidikan hingga SM/sederajat ke atas yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Selanjutnya, tingkat pendidikan pemuda juga tercermin melalui rata-rata lama sekolah, yaitu sebesar 11,34 tahun atau setara dengan kelas 11 di SM/sederajat. Rata-rata lama sekolah pemuda di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan (11,54 tahun berbanding 10,31 tahun). Terdapat kesenjangan rata-rata lama sekolah yang cukup jauh antara pemuda bukan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas yaitu 11,07 tahun berbanding 7,57 tahun. Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pemuda laki-laki dan perempuan.

Terdapat 96,28 persen pemuda menggunakan HP selama tiga bulan terakhir. Selain itu, terdapat pula sekitar 24,11 persen pemuda yang menggunakan komputer dan 94,16 persen pemuda menggunakan internet selama tiga bulan terakhir. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa (perkotaan/perdesaan), akses terhadap teknologi pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Kesenjangan akses teknologi tersebut juga terlihat dari status disabilitas pemuda, yaitu pemuda penyandang disabilitas cenderung memiliki akses terhadap HP, komputer, dan internet yang lebih kecil dibandingkan bukan penyandang disabilitas.

Apabila dilihat dari status kesehatan, selama tahun 2023 terdapat sekitar 17,21 persen pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dengan angka kesakitan sebesar 6,24 persen. Jika dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya kedua indikator kesehatan ini mengalami penurunan. Kedua kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya perbaikan layanan dan kondisi kesehatan pemuda Indonesia, khususnya setelah 3 tahun berjuang melawan pandemi Covid-19.

Ketika mengalami keluhan kesehatan dan mengalami sakit, pengobatan merupakan salah satu cara yang dapat dipilih untuk meredakan rasa sakit dan keluhan yang dirasakan. Sebagian besar pemuda yaitu 69,31 persen memilih untuk mengobati sendiri, 14,41 persen melakukan kombinasi antara mengobati sendiri dan rawat jalan, serta 11,76 persen melakukan rawat jalan saat mengalami

keluhan kesehatan. Sementara itu, masih terdapat 4,51 persen pemuda yang lebih memilih tidak melakukan pengobatan ketika mengalami keluhan kesehatan. Alasan utama pemuda yang memilih untuk tidak melakukan rawat jalan pada tahun 2023 adalah karena lebih memilih mengobati sendiri (62,25 persen) dan merasa tidak perlu (34,55 persen). Jika dilihat berdasarkan tempat rawat jalan, praktik dokter/bidan masih mendominasi menjadi tempat tujuan rawat jalan pemuda yaitu sekitar 36,06 persen, disusul puskesmas/pustu sekitar 30,04 persen, dan klinik/dokter bersama sekitar 18,94 persen.

Sekitar 3,09 persen pemuda pernah dirawat inap dalam setahun terakhir pada tahun 2023. Berdasarkan tempat/fasilitas kesehatan, rumah sakit swasta dan pemerintah menjadi tujuan rawat inap pemuda dengan persentase tertinggi sebesar 39,69 persen dan 33,39 persen. Tingginya minat masyarakat dalam memilih rumah sakit sebagai tempat rawat inap sejalan dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit yang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, jika dilihat dari rata-rata lama dirawat, sekitar 69,39 persen pemuda dirawat inap rata-rata 1-3 hari dan 25,25 persen selama 4-7 hari.

Pada tahun 2023, terdapat 75,74 persen pemuda yang telah memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki pemuda adalah BPJS PBI (60,34 persen), BPJS non PBI (31,61 persen), dan Jamkesda (3,93 persen). Jika dilihat berdasarkan penggunaannya, penggunaan jaminan kesehatan untuk rawat inap jauh lebih besar dibandingkan untuk rawat jalan yaitu sekitar 77,38 persen berbanding 48,19 persen. BPJS PBI dan BPJS non PBI juga memiliki persentase tertinggi dari sisi penggunaan jaminan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Sementara itu, persentase pemuda yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan jauh lebih tinggi dibandingkan rawat inap yaitu 51,81 persen berbanding 22,62 persen.

Secara umum, terdapat sekitar 22,93 persen pemuda yang merokok setiap hari dan 2,24 persen pemuda yang merokok tidak setiap hari pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sebagian pemuda Indonesia yang masih berisiko tidak teroptimalkan masa mudanya, karena beberapa risiko yang mungkin disebabkan karena kebiasaan merokok tersebut, meskipun sekitar

74,83 persen pemuda lainnya tidak merokok. Persentase tertinggi rata-rata jumlah batang rokok tembakau yang dihisap pemuda merokok yaitu sekitar 7-12 batang perminggu (42,15 persen). Sementara itu, masih terdapat 4,27 persen pemuda yang menghisap rata-rata di atas 24 batang perminggu atau menghisap rata-rata lebih dari 3 batang rokok perhari.

Pemuda berada pada rentang usia yang mencakup usia sekolah dan usia kerja. Hal tersebut menyebabkan kegiatan pemuda lebih terkonsentrasi pada kegiatan pendidikan dan aktivitas ekonomi. Hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda bekerja (55,14 persen), sementara, sekitar 15,21 persen pemuda tidak bekerja dan aktifitas utamanya adalah mengurus rumah tangga.

Indikator *Not in Employment, Education, and Training* (NEET) merupakan indikator yang menggambarkan penduduk usia muda yang tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/kursus) atau tidak terserap pasar kerja. Pada publikasi ini juga dilakukan penghitungan indikator NEET untuk pemuda berusia 16-30 tahun. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, pemuda yang berstatus NEET sebesar 25,80 persen. Adapun persentase pemuda perempuan yang tergolong NEET dua kali lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki (35,77 persen berbanding 16,38 persen). Tantangan yang dihadapi pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pemuda, salah satunya adalah tingkat pengangguran pemuda yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari TPT nasional. Pada tahun 2023, TPT pemuda sebesar 13,41 persen, sementara tingkat pengangguran nasional sebesar 5,32 persen.

Potensi ekonomi dan ketenagakerjaan pemuda dapat dilihat berdasarkan indikator TPAK pemuda. Pada tahun, 2023 TPAK pemuda sebesar 63,68 persen. Berdasarkan jenis kelamin, kesenjangan antara TPAK pemuda laki-laki dengan perempuan masih cukup lebar. Kondisi empiris menunjukkan bahwa TPAK pemuda perempuan selalu di bawah TPAK pemuda laki-laki. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pemahaman bahwa kodrat wanita untuk lebih banyak melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, apalagi setelah memasuki gerbang

pernikahan atau setelah memiliki anak, sehingga menyebabkan TPAK pemuda perempuan masih jauh lebih rendah dibanding TPAK pemuda laki-laki.

Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi beberapa sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda. Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor jasa (56,46 persen). Adapun berdasarkan gambaran pemuda bekerja menurut status pekerjaan utama, struktur pekerjaan pemuda dibagi menjadi sektor formal dan informal. Pekerja formal masih dinilai sebagai status pekerjaan yang layak dengan tingkat upah yang lebih besar dan risiko pemberhentian kerja yang kecil. Lebih dari separuh pemuda bekerja pada sektor formal (55,66 persen), sedangkan sisanya sebesar 44,34 persen pemuda bekerja pada sektor informal.

Tantangan ketenagakerjaan pemuda lainnya adalah sebanyak 52,00 persen pemuda bekerja sebagai pekerja tidak tetap (*precarious employment*). Masih besarnya persentase pemuda yang bekerja dengan penghasilan rendah juga menjadi tantangan sendiri dalam peningkatan kualitas tenaga kerja pemuda mengingat sekitar 49,86 persen pemuda masih bekerja dengan penghasilan kurang dari 2/3 median upah. Selanjutnya dari sisi jumlah jam kerja, masih terdapat sekitar 24,70 persen pemuda yang bekerja dengan jam kerja berlebih/*excessive hours* (jam kerja lebih dari 48 jam seminggu). Sementara itu terdapat 30,30 persen pemuda dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu.

Komposisi status pekerjaan utama pemuda juga dapat dibagi menjadi pemuda bekerja dengan status berusaha dan pemuda bekerja dengan status bukan berusaha. Dari 100 pemuda yang bekerja, 19 pemuda diantaranya merupakan bekerja dengan status berusaha. Pemuda yang berkedudukan berusaha sendiri mendominasi status usaha pemuda, yaitu mencapai 69,83 persen. Hanya sebagian kecil pemuda pengusaha dengan status/kedudukan berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar (6,52 persen). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan usaha pemuda cenderung berada dalam skala kecil yang masih mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja tidak dibayar.

Pemuda berkualitas diperlukan agar tercipta generasi penerus bangsa yang mampu mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kualitas hidup pemuda antara lain dapat dilihat dari status ekonomi rumah tangga pemuda. Pada tahun 2023, persentase pemuda dengan distribusi pengeluaran rumah tangga 20 persen teratas sebesar 21,38 persen. Dikarenakan distribusi pengeluaran rumah tangga pemuda 20 persen teratas telah melebihi 20 persen maka kesejahteraan pemuda terdistribusi ke atas. Dengan kata lain, lebih banyak pemuda yang memiliki status ekonomi yang baik. Selain status ekonomi, kualitas hidup pemuda dapat pula dilihat dari kondisi rumah tempat tinggal pemuda. Pada tahun 2023, mayoritas pemuda tinggal di rumah milik sendiri (84,59 persen). Selanjutnya, sebesar 62,31 persen pemuda tinggal di rumah layak huni.

Adanya kondisi pandemi Covid-19 yang semakin konsisten membaik memberikan dampak pada peningkatan tren pemuda yang bepergian. Sebesar 44,39 persen pemuda bepergian selama tahun 2023. Maksud utama bepergian didominasi untuk tujuan mengunjungi teman/keluarga (45,60 persen) dan berlibur/rekreasi (31,52 persen). Dilihat dari sisi kejahatan atau kriminalitas, selama periode 1 Januari – 31 Desember 2022, sekitar 0,53 persen pemuda pernah mengalami korban kejahatan, dengan mayoritas merupakan korban pencurian (85,61 persen).

Kesehatan reproduksi merupakan suatu hal yang penting bagi pemuda. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya usia kawin pertama memiliki dampak buruk pada kesehatan ibu dan anak, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), tingginya angka kesakitan, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian pada ibu dan anak. Pada tahun 2023 sebesar 18,87 persen pemuda dengan usia kawin pertama di umur 16-18 tahun. Bahkan, masih ada sekitar 2,32 persen yang usia kawin pertamanya kurang dari 16 tahun. Lebih lanjut, sebesar 44,33 persen pemuda perempuan pernah melahirkan di saat umur kurang 21 tahun. Untuk kejadian BBLR, sekitar 12,37 persen pemuda perempuan pernah melahirkan dengan BBLR. Dalam hal proses persalinan, sebesar 91,85 persen pemuda perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan dan 96,46 persen ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada tahun 2023, lebih dari separuh pemuda perempuan pernah kawin sedang menggunakan KB (53,61 persen). Metode yang paling banyak digunakan oleh pemuda pernah kawin adalah suntikan (62,42 persen), sedangkan metode yang paling sedikit digunakan adalah sterilisasi pria/vasektomi/MOP (0,04 persen). Masih besarnya preferensi pemuda perempuan pernah kawin terhadap metode kontrasepsi bukan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (nonMKJP) menunjukkan bahwa cakupan penggunaan MKJP masih perlu ditingkatkan lagi.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI
STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2023
Volume 21, 2023

HALAMAN

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN.....	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxix
METODOLOGI DAN PENJELASAN TEKNIS	xxxv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Pemuda dan Perannya Dalam Pembangunan	3
1.2 Data Kepemudaan untuk Pembangunan	5
BAB 2. DEMOGRAFI	9
2.1 Jumlah Pemuda Indonesia.....	11
2.2 Komposisi Pemuda	14
2.3 Pemuda dalam Rumah Tangga	18
BAB 3. PENDIDIKAN	49
3.1 Kemampuan Baca Tulis Pemuda	51
3.2 Partisipasi Sekolah Pemuda	53
3.3 Tingkat Pendidikan Pemuda	56
3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda.....	58
3.5 Pendidikan dan Pelatihan Kerja untuk Pemuda	59
3.6 Pemuda dan Teknologi	61
BAB 4. KESEHATAN.....	125
4.1 Kondisi Kesehatan Pemuda.....	127
4.2 Perilaku Berobat Pemuda.....	130
4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan oleh Pemuda	140
4.4 Pemuda yang Merokok.....	144
BAB 5. KETENAGAKERJAAN.....	211
5.1 Aktivitas Pemuda.....	213
5.2 Pemuda dalam Pasar Kerja	218

5.3 Pemuda dan Pekerjaan Layak	225
5.4 Jam Kerja Pemuda	227
5.5 Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha.....	229
BAB 6. SOSIAL EKONOMI	281
6.1 Status Ekonomi Pemuda	283
6.2 Kondisi Rumah Tempat Tinggal Pemuda	285
6.3 Kehidupan Sosial Pemuda.....	288
BAB 7. KESEHATAN REPRODUKSI	325
7.1 Usia Kawin Pertama Pemuda.....	327
7.2 Persalinan Pemuda	333
7.3 Keluarga Berencana	335
BAB 8. PROGRAM KEPEMUDAAN	355
DAFTAR PUSTAKA.....	365
LAMPIRAN	375
METADATA	403

DAFTAR TABEL

BAB 2. DEMOGRAFI

HALAMAN

Tabel 2.1	Percentase Penduduk menurut Kelompok Umur, 2023	22
Tabel 2.2	Percentase Pemuda menurut Status Perkawinan, 2023	23
Tabel 2.3	Percentase Pemuda menurut Kedudukan dalam Rumah Tangga, 2023	24
Tabel 2.4	Percentase Pemuda menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2023	25
Tabel 2.5.1	Percentase Penduduk di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	26
Tabel 2.5.2	Percentase Penduduk di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	267
Tabel 2.5.3	Percentase Penduduk Laki-laki menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	268
Tabel 2.5.4	Percentase Penduduk Perempuan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	269
Tabel 2.5.5	Percentase Penduduk menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023	30
Tabel 2.6	Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	31
Tabel 2.7.1	Percentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	32
Tabel 2.7.2	Percentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	323
Tabel 2.7.3	Percentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	324
Tabel 2.7.4	Percentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	325
Tabel 2.7.5	Percentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023....	326
Tabel 2.8.1	Percentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023	37
Tabel 2.8.2	Percentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023	38
Tabel 2.8.3	Percentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023	379

Tabel 2.8.4	Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023	37
Tabel 2.8.5	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023	41
Tabel 2.9	Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	42
Tabel 2.10.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2023	43
Tabel 2.10.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2023	434
Tabel 2.10.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2023	435
Tabel 2.11.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Berstatus Cerai Hidup/Cerai Mati menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	46
Tabel 2.11.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Berstatus Cerai Hidup/Cerai Mati menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	47
Tabel 2.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Menjadi Kepala Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	48

BAB 3. PENDIDIKAN

Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Pemuda, 2023	66
Tabel 3.2	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda menurut Klasifikasi Desa, 2023	67
Tabel 3.3	Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah, 2023	68
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Kelompok Umur, 2023	69
Tabel 3.5	Persentase Pemuda menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	70
Tabel 3.6	Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda, 2023	71
Tabel 3.7	Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda menurut Klasifikasi Desa, 2023.....	72
Tabel 3.8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Nonformal dalam 12 Bulan Terakhir, 2021	73
Tabel 3.9	Persentase Pemuda menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2023	74
Tabel 3.10	Persentase Pemuda Yang Menggunakan Internet menurut Tujuan Penggunaannya, 2023	75
Tabel 3.11	Persentase Pemuda yang Pernah Belajar TIK, 2023	78
Tabel 3.12.1	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	79

Tabel 3.12.2	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	80
Tabel 3.12.3	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	81
Tabel 3.13.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023	82
Tabel 3.13.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023	82
Tabel 3.13.3	Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023	82
Tabel 3.13.4	Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023	82
Tabel 3.13.5	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023	82
Tabel 3.14.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	87
Tabel 3.14.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	87
Tabel 3.14.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	87
Tabel 3.15.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	90
Tabel 3.15.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	901
Tabel 3.15.3	Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	902
Tabel 3.15.4	Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	903
Tabel 3.15.5	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	904
Tabel 3.16	Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda (Tahun) menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	95
Tabel 3.17.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Nonformal dalam 12 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2021	96
Tabel 3.17.2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Nonformal dalam 12 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021.....	967

Tabel 3.18.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023	98
Tabel 3.18.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023	98
Tabel 3.18.3	Persentase Pemuda Laki-laki yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023	100
Tabel 3.18.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023	101
Tabel 3.18.5	Persentase Pemuda yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023	102
Tabel 3.19.1	<i>Sampling Error</i> Partisipasi Sekolah Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2023	103
Tabel 3.19.2	<i>Sampling Error</i> Partisipasi Sekolah Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi, 2023	103
Tabel 3.19.3	<i>Sampling Error</i> Partisipasi Sekolah Pemuda Laki-laki menurut Provinsi, 2023	103
Tabel 3.19.4	<i>Sampling Error</i> Partisipasi Sekolah Pemuda Perempuan menurut Provinsi, 2023	103
	9	
Tabel 3.19.5	<i>Sampling Error</i> Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Provinsi, 2023	103
Tabel 3.20.1	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	113
Tabel 3.20.2	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023	113
Tabel 3.20.3	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	113
Tabel 3.20.4	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	113
Tabel 3.21	<i>Sampling Error</i> Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	121

BAB 4. KESEHATAN

Tabel 4.1	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda dalam Sebulan Terakhir menurut Karakteristik , 2023	147
Tabel 4.2	Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan menurut Karakteristik dan Upaya Pengobatan, 2023	148
Tabel 4.3	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Karakteristik dan Tempat Berobat, 2023	149
Tabel 4.4	Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan yang Tidak Rawat Jalan menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023	151
Tabel 4.5	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2023	152
Tabel 4.6	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap menurut Karakteristik dan Lama Dirawat (Hari), 2023.....	154
Tabel 4.7	Persentase Pemuda menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Jaminan Kesehatan, 2023	155
Tabel 4.8	Persentase Pemuda menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023	156
Tabel 4.9	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023.....	157
Tabel 4.10	Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023.....	158
Tabel 4.11	Persentase Pemuda menurut Karakteristik dan Kebiasaan Merokok Tembakau Sebulan Terakhir, 2023.....	159
Tabel 4.12	Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau menurut Karakteristik dan Rata-rata Jumlah Batang rokok yang Dihisap per Hari, 2023.....	160
Tabel 4.13	Persentase Pemuda yang Pernah Merokok Tembakau Sebelum Sebulan Terakhir menurut Karakteristik dan Frekuensi Kebiasaan Merokok, 2023	161
Tabel 4.14	Persentase Pemuda yang Pernah Merokok Tembakau (Dahulu hingga Sebulan Terakhir) menurut Karakteristik dan Kebiasaan Merokok, 2023	162
Tabel 4.15	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023	163
Tabel 4.16	Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023	164

Tabel 4.17	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Mengobati Sendiri menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023	165
Tabel 4.18	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023	166
Tabel 4.19	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2023	167
Tabel 4.20	Persentase Pemuda yang yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	169
Tabel 4.21	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023	170
Tabel 4.22	Persentase Pemuda yang Tidak Rawat Jalan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023	171
Tabel 4.23	Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	172
Tabel 4.24	Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023	173
Tabel 4.25	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Lama Rawat Inap (Hari), 2023	174
Tabel 4.26	Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023	175
Tabel 4.27	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok Tembakau Sebulan Terakhir, 2023	176
Tabel 4.28	Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau menurut Provinsi dan Rata-Rata Jumlah Batang yang Dihisap per Hari, 2023	177
Tabel 4.29	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok Tembakau Sebelum Sebulan Terakhir, 2023	178
Tabel 4.30	Persentase Pemuda yang Pernah Merokok Tembakau (Dahulu hingga Sebelum Sebulan Terakhir), 2023	179
Tabel 4.31	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	180
Tabel 4.32.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	181
Tabel 4.32.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	181

Tabel 4.33	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2023	183
Tabel 4.34	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023	187
Tabel 4.35	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Tidak Rawat Jalan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023	190
Tabel 4.36.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	191
Tabel 4.36.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	191
Tabel 4.37	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023	193
Tabel 4.38	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Lama Rawat Inap (Hari), 2023	196
Tabel 4.39	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023	198
Tabel 4.40	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok Sebulan Terakhir, 2023	201
Tabel 4.41	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau menurut Rata-Rata Jumlah Batang yang Dihisap per Hari, 2023	203
Tabel 4.42	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda menurut Provinsi yang Merokok Sebelum Sebulan Terakhir, 2023	206
Tabel 4.43	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda menurut Provinsi yang Pernah Merokok (Sebulan Terakhir maupun Sebelum Sebulan Terakhir), 2023	208

BAB 5. KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.1	Persentase Pemuda menurut Karakteristik dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2023	233
Tabel 5.2	Pemuda <i>Not in Employment, Education, and Training</i> (NEET) menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2023	234
Tabel 5.3	Tingkat Pengangguran Pemuda (TPT) Pemuda menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	235
Tabel 5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2023	236

Tabel 5.5	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Karakteristik dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	237
Tabel 5.6	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2023	238
Tabel 5.7	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Karakteristik dan Jenis Pekerjaan Utama, 2023	239
Tabel 5.8	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2023	241
Tabel 5.9	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal) dan Karakteristik, 2023	243
Tabel 5.10	Persentase Pemuda Bekerja yang Termasuk <i>Precarious Employment</i> (Pekerja Tidak Tetap), 2023	244
Tabel 5.11	Persentase Pemuda Bekerja menurut Karakteristik dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023	245
Tabel 5.12	Persentase Pemuda Bekerja menurut Karakteristik dan Penghasilan dalam Sebulan, 2023.....	246
Tabel 5.13	Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Karakteristik dan Median Upah, 2023	247
Tabel 5.14.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023	248
Tabel 5.14.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023	248
Tabel 5.14.3	Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023.....	248
Tabel 5.14.4	Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023	248
Tabel 5.14.5	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023	248
Tabel 5.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	253
Tabel 5.16.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023....	254
Tabel 5.16.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023....	254
Tabel 5.16.3	Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	254
Tabel 5.16.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	254
Tabel 5.16.5	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	254

Tabel 5.17.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023.....	259
Tabel 5.17.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023.....	259
Tabel 5.17.3	Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023.....	259
Tabel 5.17.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023.....	259
Tabel 5.17.5	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023	259
Tabel 5.18.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (<i>White Collar</i> dan <i>Blue Collar</i>), 2023	264
Tabel 5.18.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (<i>White Collar</i> dan <i>Blue Collar</i>), 2023	264
Tabel 5.18.3	Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (<i>White Collar</i> dan <i>Blue Collar</i>), 2023	264
Tabel 5.18.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (<i>White Collar</i> dan <i>Blue Collar</i>), 2023	264
Tabel 5.18.5	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (<i>White Collar</i> dan <i>Blue Collar</i>), 2023	264
Tabel 5.19.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023	269
Tabel 5.19.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023	269
Tabel 5.19.3	Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023	269
	71	
Tabel 5.19.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023	269
Tabel 5.19.5	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023	269
Tabel 5.20.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023	274
Tabel 5.20.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023	274
Tabel 5.20.3	Persentase Pemuda Laki-laki Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023	274

Tabel 5.20.4	Persentase Pemuda Perempuan Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023.....	274
Tabel 5.20.5	Persentase Pemuda Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023	274
Tabel 5.21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	279
Tabel 5.22	Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ¹ , 2023	280

BAB 6. SOSIAL EKONOMI

Tabel 6.1	Persentase Pemuda menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023.....	292
Tabel 6.2	Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan menurut Klasifikasi Desa, 2023	293
Tabel 6.3	Persentase Pemuda menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2023	294
Tabel 6.4	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Klasifikasi Desa, 2023	295
Tabel 6.5	Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian menurut Klasifikasi Desa, 2023.....	296
Tabel 6.6	Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian menurut Maksud Utama Bepergian, 2023	297
Tabel 6.7	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Klasifikasi Desa, 2023	298
Tabel 6.8	Persentase Pemuda yang Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan yang Dialami, 2023	299
Tabel 6.9	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi menurut Klasifikasi Desa, 2023.....	300
Tabel 6.10.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023.....	301
Tabel 6.10.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023.....	302
Tabel 6.10.3	Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023	303
Tabel 6.10.4	Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023	304
Tabel 6.10.5	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023	305
Tabel 6.11	Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	306

Tabel 6.12.1	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023	307
Tabel 6.12.2	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023	307
Tabel 6.12.3	Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023	307
Tabel 6.12.4	Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023	307
Tabel 6.12.5	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023	307
Tabel 6.13	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	312
Tabel 6.14	Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	313
Tabel 6.15	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	314
Tabel 6.16.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2023.....	315
Tabel 6.16.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2023.....	315
Tabel 6.17.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Sewa/Kontrak menurut Klasifikasi Desa, 2023	317
Tabel 6.17.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Sewa/Kontrak menurut Jenis Kelamin, 2023.....	317
Tabel 6.18	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Bebas Sewa menurut Klasifikasi Desa, 2023.....	319
Tabel 6.19.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Dinas/Lainnya menurut Klasifikasi Desa, 2023.....	320
Tabel 6.19.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Dinas/Lainnya menurut Jenis Kelamin, 2023	320
Tabel 6.20.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Klasifikasi Desa, 2023	322
Tabel 6.20.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin, 2023.....	322

BAB 7. KESEHATAN REPRODUKSI

Tabel 7.1	Persentase Pemuda menurut Karakteristik Demografi dan Usia Kawin Pertama, 2023.....	338
-----------	---	-----

Tabel 7.2	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Karakteristik Demografi dan Umur saat Melahirkan Pertama, 2023....	339
Tabel 7.3	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Karakteristik Demografi dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2023	340
Tabel 7.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Karakteristik Demografi dan Penolong Persalinan, 2023	341
Tabel 7.5	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Karakteristik Demografi dan Tempat Persalinan, 2023	342
Tabel 7.6	Persentase Pemuda Perempuan menurut Karakteristik Demografi dan Partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB), 2023.....	343
Tabel 7.7	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Usia Kawin Pertama, 2023	344
Tabel 7.8	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Pemuda menurut Provinsi dan Karakteristik, 2023.....	345
Tabel 7.9	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Provinsi dan Umur saat Melahirkan Pertama, 2023.....	346
Tabel 7.10	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (<2,5 kg) menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	347
Tabel 7.11	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2023	348
Tabel 7.12	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2023	349
Tabel 7.13	Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB), 2023	350
Tabel 7.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (<2,5 kg) menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	351
Tabel 7.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2023	352
Tabel 7.16	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2023	353

DAFTAR GAMBAR

BAB 2. DEMOGRAFI

HALAMAN

Gambar 2.1	Percentase Pemuda Indonesia, 2014-2023	12
Gambar 2.2	Percentase Penduduk menurut Jenis Kelamin, Distribusi Pengeluaran, Klasifikasi Desa, dan Kelompok Umur, 2023	13
Gambar 2.3	Percentase Pemuda Indonesia menurut Provinsi, 2023	14
Gambar 2.4	Distribusi Pemuda menurut Karakteristik, 2023	15
Gambar 2.5	Distribusi Pemuda menurut Pulau di Indonesia, 2023.....	16
Gambar 2.6	Percentase Pemuda Indonesia menurut Status Perkawinan, 2023	17
Gambar 2.7	Percentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga (KRT) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2023	18
Gambar 2.8	Percentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga (KRT) menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan, Distribusi Pengeluaran dan Klasifikasi Desa, 2023.....	20
Gambar 2.9	Percentase Pemuda menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2023	21

BAB 3. PENDIDIKAN

Gambar 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Indonesia menurut Status Disabilitas dan Kelompok Pengeluaran, 2023.....	52
Gambar 3.2	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda menurut Provinsi, 2023	53
Gambar 3.3	Partisipasi Sekolah Pemuda, 2023	54
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Karakteristik, 2023	55
Gambar 3.5	Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	56
Gambar 3.6	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda menurut Karakteristik, 2023	57
Gambar 3.7	Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Karakteristik, 2023	58
Gambar 3.8	Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Provinsi, 2023	59

Gambar 3.9	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Nonformal dalam 12 Bulan Terakhir, 2021	60
Gambar 3.10	Persentase Pemuda Yang Pernah Belajar TIK, 2023	62
Gambar 3.11	Persentase Pemuda menurut Akses Teknologi dan Informasi, 2019-2023	63
Gambar 3.12	Persentase Penggunaan HP, Penggunaan Komputer, dan Akses Internet pada Pemuda menurut Kalsifikasi Desa dan Status Disabilitas, 2023	64
Gambar 3.13	Persentase Pemuda yang Menggunakan Internet menurut Tujuan Penggunaannya, 2023	65

BAB 4. KESEHATAN

Gambar 4.1	Persentase Pemuda menurut Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan, 2016-2023.....	128
Gambar 4.2	Persentase Pemuda menurut Kondisi Kesehatan dan Karakteristik, 2023	129
Gambar 4.3	Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam sebulan terakhir Menurut Upaya Pengobatan, 2023	131
Gambar 4.4	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Karakteristik dan Upaya Pengobatan, 2023	132
Gambar 4.5	Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan yang Tidak Rawat Jalan menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023	133
Gambar 4.6	Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Jalan menurut Tempat Rawat Jalan, 2023	134
Gambar 4.7	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2023	135
Gambar 4.8	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Tempat Rawat Inap, 2023	136
Gambar 4.9	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap di Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, 2020-2023.....	137
Gambar 4.10	Persentase Pemuda yang Rawat Inap Setahun Terakhir menurut Klasifikasi Desa, Kelompok Pengeluaran, dan Tempat Berobat, 2023	138
Gambar 4.11	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap menurut Lama Dirawat (hari), 2023	139
Gambar 4.12	Persentase Pemuda menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Karakteristik, 2023	141
Gambar 4.13	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dan Rawat Inap menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023	142

Gambar 4.14	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dan Rawat Inap menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023.....	142
Gambar 4.15	Persentase Pemuda yang Menggunakan BPJS PBI dan Persentase Pemuda yang tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan ketika Rawat Inap atau Rawat Jalan, 2023	143
Gambar 4.16	Persentase Pemuda menurut Kebiasaan Merokok Tembakau, 2023	145
Gambar 4.17	Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau Menurut Rata-Rata Jumlah Batang yang Dihisap per Hari, 2023.....	146

BAB 5. KETENAGAKERJAAN

Gambar 5.1	Jenis Kegiatan Utama Pemuda, 2023.....	214
Gambar 5.2	Pemuda <i>Not in Employment, Education, and Training</i> (NEET) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2023	216
Gambar 5.3	Perkembangan TPT Pemuda, 2016-2023	216
Gambar 5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2023.....	217
Gambar 5.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda, 2016-2023	219
Gambar 5.6	Persentase Pemuda Bekerja menurut Tingkat Pendidikan, 2023	220
Gambar 5.7	Pemuda Bekerja menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	221
Gambar 5.8	Pemuda Bekerja menurut Lapangan Usaha, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	222
Gambar 5.9	Persentase Pemuda Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan, 2023	223
Gambar 5.10	Pemuda Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	224
Gambar 5.11	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal per Jumlah Pemuda Perempuan, 2016-2023	225
Gambar 5.12	<i>Precarious Employment Rate</i> Pemuda dan <i>Low Pay Rate</i> Pemuda, 2023	227
Gambar 5.13	Persentase Pemuda Bekerja menurut Jam Kerja dalam Seminggu, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin 2023.....	228
Gambar 5.14	Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha menurut Status/Kedudukan dalam Pekerjaan, 2023.....	230
Gambar 5.15	Pemuda Bekerja Berstatus Berusaha menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha, 2023.....	231
Gambar 5.16	Persentase Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha <i>White Collar</i> , 2016-2023.....	232

BAB 6. SOSIAL EKONOMI

Gambar 6.1	Persentase Pemuda menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023.....	283
Gambar 6.2	Persentase Pemuda menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga dan Karakteristik, 2023	284
Gambar 6.3	Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan menurut Karakteristik, 2023.....	285
Gambar 6.4	Persentase Pemuda menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal dan Karakteristik, 2023	286
Gambar 6.5	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Karakteristik Demografi, 2023	287
Gambar 6.6	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Klasifikasi Desa dan Karakteristik Demografi, 2023	288
Gambar 6.7	Persentase Pemuda yang Bepergian, 2021-2023.....	288
Gambar 6.8	Persentase Pemuda yang Bepergian menurut Karakteristik Demografi, 2023	289
Gambar 6.9	Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian menurut Maksud Utama Bepergian, 2023	290
Gambar 6.10	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahanatan, 2020-2023	291
Gambar 6.11	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahanatan menurut Jenis Kejahanatan, 2023	291

BAB 7. KESEHATAN REPRODUKSI

Gambar 7.1	Perkembangan Usia Kawin Pertama Pemuda, 2019-2023.....	328
Gambar 7.2	Usia Kawin Pertama Pemuda menurut Karakeristik, 2023	329
Gambar 7.3	Persentase Pemuda menurut Usia Kawin Pertama dan Kelompok Umur, 2023	330
Gambar 7.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Umur saat Melahirkan dan Klasifikasi Desa, 2023	331
Gambar 7.5	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Umur saat Melahirkan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	332

Gambar 7.6	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Klasifikasi Desa, 2023.....	333
Gambar 7.7	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Klasifikasi Desa, 2023	334
Gambar 7.8	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Klasifikasi Desa, 2023.....	335
Gambar 7.9	Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Partisipasi Program Keluarga Berencana (KB), 2023.....	336
Gambar 7.10	Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Jenis/Alat KB yang Digunakan, 2023	337

<https://www.bps.go.id>

METODOLOGI DAN PENJELASAN TEKNIS

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang meliputi aspek sosial dan ekonomi penduduk. Sejak tahun 2015, pelaksanaan Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Susenas Maret tahun 2023 dengan jumlah sampel mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pencacahan bulan September dengan ukuran sampel kecil mencakup 75.000 rumah tangga sampel untuk menghasilkan data yang representatif untuk estimasi provinsi dan nasional. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Susenas Kor dan Susenas KP (Konsumsi Pengeluaran) yang pelaksanaannya setiap tahun pada bulan Maret dan Susenas Modul (Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan) yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian setiap 3 tahun sekali pada bulan September.

Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional)

merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. BPS telah melaksanakan Sakernas sejak tahun 1976, namun baru dilakukan secara periodik sejak tahun 1986. Mulai tahun 2015, Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Data Sakernas yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil Sakernas besar di bulan Agustus 2023, dengan jumlah sampel sebanyak 300.000 rumah tangga. Selain mengumpulkan data pokok ketenagakerjaan, Sakernas Agustus 2023 juga memotret dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan.

Relative Standard Error

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2023 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non sampling error* dan *sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses baik pengumpulan maupun pengolahan data. Sedangkan *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya sampling error hasil Susenas 2023 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (SE) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25$ persen dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25$ persen tetapi ≤ 50 persen perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50$ persen dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25$ persen. Penghitungan tingkat *sampling error* menggunakan paket pemrograman dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas. Tidak semua tabel RSE ditampilkan. Tabel RSE yang ditampilkan hanya untuk nilai estimasi dengan $RSE > 25$ persen.

Alat/Cara Keluarga Berencana (KB)

merupakan alat/cara yang digunakan untuk menunda atau mencegah kehamilan. Alat/cara KB antara lain:

- a. Sterilisasi Wanita/Tubektomi/Medis Operasi Wanita (MOW)
adalah tindakan operasi menyumbat (mengikat dan atau memotong) saluran keluar ovum, yakni tuba, sehingga perjalanan ovum dari ovarium saat ovulasi tidak sampai ke tempat pembuahan di uterus.
- b. Sterilisasi Pria/Vasektomi/Medis Operasi Pria (MOP)

adalah suatu operasi ringan berupa prosedur klinis untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan mengikat/memotong saluran sperma, sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses pembuahan dengan sel telur tidak terjadi.

- c. Intra Uterus Device(IUD)/Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)/Spiral
adalah alat KB dari bahan plastik atau tembaga, dipasang dalam rongga rahim untuk mencegah kehamilan.
- d. Suntikan
adalah cara KB hormonal dengan cara menyuntikkan hormon progesteron dan atau estrogen.
- e. Susuk KB/implan
adalah alat KB berupa batang susuk, yang tipis dan halus seperti korek api, ditanam di bawah kulit lengan kiri (atau kanan jika kidal) bagian atas perempuan untuk mencegah kehamilan.
- f. Pil
adalah alat KB berupa pil yang mengandung kombinasi progesteron dan estrogen untuk mencegah kehamilan.
- g. Kondom pria/karet KB
adalah alat KB berupa kantong karet tipis dan elastis dipakai oleh pria ketika melakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan.
- h. Intravag/kondom wanita/diafragma
Intravag adalah alat KB berupa tisu yang dimasukkan pada vagina ketika akan melakukan hubungan seksual untuk mencegah kehamilan. Kondom wanita adalah alat/cara KB berupa karet tipis berbentuk tabung yang ujungnya terdapat semacam spons dan dimasukkan ke dalam vagina. Diafragma adalah alat/cara KB yang berbentuk mangkok terbuat dari karet lunak yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menutup mulut rahim agar sperma tidak masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan sel telur.
- i. Metode menyusui alami
adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif (tanpa makanan dan minuman tambahan), belum haid, dan bayi berumur kurang dari 6 bulan.

- j. Pantang berkala/kalender
 - didasarkan pada pemikiran bahwa dengan tidak melakukan senggama pada hari-hari tertentu, yaitu pada masa subur dalam siklus bulanan, seorang perempuan dapat menghindarkan terjadinya kehamilan.
- k. Lainnya
 - misalnya senggama terputus, tidak campur (puasa), jamu, dan urut.

Anak Lahir Hidup (ALH)

merupakan banyaknya kelahiran hidup sekelompok atau beberapa kelompok perempuan pada saat mulai memasuki reproduksi hingga pada saat pengumpulan data dilakukan (LDFE UI, 2010).

Anggota Rumah Tangga (ART)

adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 1 tahun dan tidak berniat pindah. Orang yang telah 1 tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut. Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih).

Angka Partisipasi Sekolah

adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk menurut batasan umur sekolah pada setiap tingkat pendidikan formal dan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SM).

Angka Prevalensi Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate–CPR*)

atau persentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB, merupakan perbandingan jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang saat pencacahan memakai/menggunakan suatu alat/cara KB terhadap jumlah seluruh PUS berumur 15-49 tahun.

Angkatan Kerja Pemuda

adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang kegiatan utamanya bekerja, atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, atau pemuda yang posisinya sedang menganggur (mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha).

Bekerja

adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Bepergian

adalah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 3 jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin.

Berobat jalan

adalah upaya seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.

Bukan Angkatan Kerja Pemuda

adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Buta Aksara/Huruf

adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

Cerai Hidup

adalah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.

Cerai Mati

adalah ditinggal mati oleh suami atauistrinya dan belum kawin lagi.

Dapat Membaca dan Menulis

adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Fasilitas pelayanan kesehatan

adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (PP No.7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah).

a. Rumah sakit

meliputi semua rumah sakit, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta.

b. Puskesmas/pustu/klinik

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau

kelurahan. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan puskesmas di sebagian wilayah kerja puskesmas. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.

c. TKBK/TMK/MUYAN

Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK)/Tim Medis Keliling (TMK)/MUYAN (Mobil Unit Pelayanan) merupakan fasilitas pelayanan KB mobil (bukan statis) yang berfungsi untuk mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat oleh satuan kerja terpadu (KB, kesehatan, dan pihak lain sesuai keperluan) dan mempunyai kemampuan serta kewenangan memberikan pelayanan alat/cara KB seperti pil KB, kondom, suntik KB, IUD, dan implant.

d. Polindes/Poskesdes

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang tempat dan lokasinya berada di desa. Polindes hanya dapat dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa tersebut. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Pelayanan poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terutama bidan dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela.

e. Posyandu/PosKB/PPKBD

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Pos KB adalah sarana pembinaan dan pelayanan KB melalui sistem kelompok-kelompok akseptor KB, yang mulanya timbul atas inisiatif dan kesadaran masyarakat di desa. Pembantu

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah anggota masyarakat yang bekerja sukarela untuk menyukseskan program KB terutama di perdesaan, mereka bekerja keras mensosialisasikan program, mengajak, dan memotivasi yang selanjutnya merekrut pasangan usia subur (PUS) untuk menjadi peserta KB aktif di tingkat dusun/RW.

f. Rumah bersalin

adalah tempat penyelenggaraan kebidanan bagi perempuan hamil bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.

g. Praktik dokter umum/kandungan

Praktik dokter umum adalah tempat praktik dokter umum dokter yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus memiliki spesialisasi tertentu, sehingga memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia. Praktik dokter kandungan adalah tempat praktik dokter yang melayani pemeriksaan ibu hamil, kesehatan balita, dan pelayanan KB.

h. Praktik bidan/bidan di desa/perawat

Praktik bidan adalah praktik pribadi/perorangan, yang dilakukan oleh bidan, yang melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, kesehatan anak di bawah usia lima tahun, dan program KB. Bidan di desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas. Perawat adalah salah satu tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya.

Fertilitas

adalah kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita (fekunditas). Dalam perkembangan ilmu demografi, fertilitas lebih diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata (bayi lahir hidup) dari seorang wanita atau sekelompok wanita.

Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk (Perpres No. 12 Tahun. 2013).

Jenis Pekerjaan

adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang.

Jumlah Jam Kerja

adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja selama seminggu.

Kawin

adalah mempunyai istri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Kegiatan rutin

adalah kegiatan sekolah dan atau bekerja (memperoleh upah/gaji sesuai tugas pokoknya ditempat yang dituju), yang dilakukan secara rutin (reguler), baik frekuensinya, lokasinya, maupun kegiatannya.

Keluarga Berencana

adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antar kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Keluhan kesehatan

adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal, dan lain lain.

Kepala Rumah Tangga (KRT)

adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Klasifikasi Desa

menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan indikator komposit (indikator gabungan) yang skornya didasarkan nilai tiga buah variabel antara lain kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum.

Korban kejahatan

adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Lama hari rawat inap

Lama hari rawat inap adalah jumlah hari menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.

Lahir hidup (*live birth*)

adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan (bayi bernafas, ada denyut jantung, ada denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot).

Lapangan Usaha

adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

Maksud utama bepergian

adalah motif atau yang menjadi sebab utama terjadinya perjalanan/bepergian ke tempat/tujuan utama.

Masih berasekolah

adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu tingkat pendidikan formal dan nonformal (Paket A/B/C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Mempersiapkan Suatu Usaha

adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dan sebagainya.

Mencari Pekerjaan

adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mengobati sendiri

adalah upaya seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra.

Merokok tembakau

merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa. Rokok tembakau meliputi rokok putih, rokok keretek, cerutu, lisong, pipa cangklong/linting/kawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap shisha/waterpipe.

Partisipasi sekolah

adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu tingkat pendidikan formal maupun non formal (program kesetaraan Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional maupun kementerian lainnya. Dikatakan aktif mengikuti program kesetaraan apabila dalam sebulan terakhir pernah mengikuti proses belajar di kegiatan paket A/B/C.

Pemuda

adalah penduduk berumur 16-30 tahun (berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan).

Pendapatan/upah/gaji bersih

adalah imbalan atau penghasilan yang diperoleh seseorang yang bekerja atau sementara tidak bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai, berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian atau pekerja bebas di non pertanian selama sebulan yang lalu.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

adalah tingkat pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau tingkat pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

a. Tidak Tamat SD

adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

b. SD/Sederajat

meliputi tamat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat.

c. SMP/Sederajat

meliputi tamat tingkat pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan, dan yang sederajat.

d. SMA/Sederajat

meliputi tamat tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.

e. Perguruan Tinggi

termasuk menamatkan pendidikan program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana.

Penduduk usia kerja

adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Khusus untuk publikasi ini umur penduduk usia kerja dibatasi 16-30 tahun.

Pengangguran

adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rasio jenis kelamin

adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Rata-rata lama sekolah pemuda

adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk umur 16-30 tahun untuk menempuh semua tingkat pendidikan yang pernah dijalani.

Rawat Inap

adalah upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.

Rawat Jalan

adalah upaya seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.

Rumah layak huni

adalah rumah yang memenuhi 4 kriteria yaitu ketahanan bangunan (atap: beton, genteng, seng, kayu/sirap; dinding: tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, batang kayu; lantai: marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah), luas lantai per kapita (lebih dari sama dengan 7,2 m²); Akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.

Rumah Tangga Biasa

adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Sakit

adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas sehari-harinya terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

Status kepemilikan rumah

adalah status kepemilikan rumah yang dihuni rumah tangga pada waktu pencacahan.

a. Milik sendiri

adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah

tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

b. Kontrak/sewa

Kontrak adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru. Sewa adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

c. Bebas sewa

Status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

d. Dinas

Status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

e. Lainnya

Misalnya rumah adat.

Status Pekerjaan

adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh/karyawan, berusaha dibantu keluarga/pekerja tidak

dibayar, sebagai buruh/karyawan/pegawai, sebagai pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun non pertanian.

Tidak bersekolah lagi

adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu tingkat pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tidak/belum pernah sekolah

adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu tingkat pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

adalah persentase angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, terhadap penduduk angkatan kerja.

Umur perkawinan pertama

adalah umur perempuan pernah kawin ketika pertama kali melakukan perkawinan, yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan.

Unmet need KB

adalah persentase perempuan pernah kawin yang berkeinginan untuk menjarangkan atau membatasi kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB.

Wanita Usia Subur

merupakan wanita yang berusia 15-49 tahun dan wanita pada usia ini masih berpotensi untuk mempunyai keturunan.



Bab 1. Pendahuluan



<https://www.bps.go.id>

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berumur 16 sampai 30 tahun (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Dalam proses pembangunan, pemuda memegang peranan penting sebagai tulang punggung dan penentu masa depan bangsa. Sejarah juga mencatat bahwa pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan kemerdekaan bangsa. Di era modern seperti sekarang ini, pemuda diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen pembaharuan. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, pemuda memiliki pengaruh paling signifikan dan menjadi cerminan baik atau buruknya suatu masyarakat (Prabowo, 2021).

1.1 Pemuda dan Perannya Dalam Pembangunan

Sejarah telah mencatat bagaimana peran pemuda dalam pembangunan, tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama menyadari bahwa imajinasi, cita-cita, dan energi kaum muda sangat penting bagi kelangsungan pembangunan masyarakat tempat mereka tinggal (United Nations 2010, i). Di Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mengakui pentingnya peran pemuda sejak pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, hingga pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal itu membuktikan bahwa pemuda mampu memainkan peran perintis dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Pemuda dianggap penting mengingat posisinya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ide-ide kreatif, dinamis, dan melek intelektual serta semangat yang besar untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Saputra, 2016).

Pemuda merupakan sumber daya manusia utama untuk pembangunan dan agen kunci untuk perubahan sosial, pembangunan ekonomi, dan inovasi teknologi (United Nations, 2010). Lebih lanjut, pemuda merupakan salah satu pilar yang memegang peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dari segala aspek, sehingga jatuh bangunnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi positif pemuda (Prabowo, 2021; Akbar dkk, 2023). Pemikiran dan kontribusi pemuda merupakan pilar utama kebangkitan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana terbukti sepanjang sejarah (Lestari dkk, 2019).

Seiring terjadinya pergeseran struktur penduduk, keberadaan dan peran pemuda menjadi semakin penting. Salah satunya adalah fenomena bonus demografi, yaitu suatu kondisi kependudukan ketika proporsi anak-anak di bawah 15 tahun terus menurun, sedangkan proporsi penduduk usia 15-64 tahun meningkat cukup pesat dan kenaikan proporsi penduduk lansia masih lamban (Adioetomo 2018, 6). Indonesia saat ini didominasi penduduk usia kerja yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi melalui bonus demografi. Kondisi kepemudaan kita adalah kunci untuk dapat ‘memetik’ dan menikmati keuntungan tersebut. Posisi pemuda dalam kondisi ini dapat menjadi modal pembangunan atau sebaliknya beban pembangunan.

Oleh karena itu, penduduk usia muda harus dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan, makanan dan gizi yang cukup, pelayanan kesehatan reproduksi, yang pada gilirannya akan membentuk tenaga kerja yang sehat dan produktif (Adioetomo, 2018). Peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu program strategis untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cukup kuat berperan dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi.

Cukup banyak penelitian yang mengkaji peran pemuda bagi pembangunan. Tingkat intelektualitas masyarakat erat kaitannya dengan minat baca pemuda. Tingkat melek huruf di kalangan pemuda memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam jangka panjang, dan juga berfungsi sebagai pendorong

pertumbuhan generasi intelektual berikutnya (Prabowo, 2021). Keterlibatan pemuda dalam memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan di era new normal menjadikan masyarakat lebih memahami informasi dan meningkatkan kewaspadaan dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 (Prastiwi, 2021). Keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan limbah sampah plastik memberikan dampak positif pada bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kemanfaatan limbah sampah plastik (Waldelmi dkk, 2022).

Pentingnya peran dan fungsi pemuda bagi pembangunan membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat. Disamping perlunya peran aktif dari pemuda itu sendiri, diperlukan pula kerjasama dari berbagai pihak untuk mendayagunakan segenap potensi pada pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di berbagai bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional sehingga tatanan hidup baru dapat terlaksana dengan baik.

1.2 Data Kepemudaan untuk Pembangunan

Peran dan tantangan pemuda semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Isu-isu kepemudaan yang harus dicermati dalam beberapa tahun ke depan antara lain berkaitan dengan partisipasi pemuda dalam struktur ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan angkatan kerja, serta pembangunan infrastruktur menuju transformasi ekonomi digital (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2021, xiii). Kondisi tersebut harus dapat diantisipasi agar pemuda Indonesia dapat memanfaatkan peluang dengan baik. Antisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan perkembangan pembangunan pemuda secara intensif dengan pengukuran capaian pembangunan pemuda setiap tahunnya. Pemantauan perkembangan pembangunan pemuda hanya dapat dilakukan jika data kepemudaan untuk pembangunan tersedia secara komprehensif. Optimalisasi pembangunan kepemudaan dapat dilakukan pada dasarnya dengan

memastikan data dan informasi yang riil dan mencerminkan dinamika kinerja pembangunan pemuda tersedia.

Untuk memetakan situasi dan kondisi terkini, serta mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan dan program kepemudaan, diperlukan data dan informasi terkait pemuda di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun regional. Untuk menyikapi kondisi tersebut, BPS menyusun data dan informasi terkait pemuda dan mengemasnya menjadi suatu bentuk buku publikasi "Statistik Pemuda Indonesia 2023". Publikasi ini memuat informasi pemuda yang dilihat dari berbagai aspek, seperti demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, dan kesehatan reproduksi serta program-program untuk pemuda Indonesia yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang pemuda yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang kepemudaan.

Publikasi "Statistik Pemuda Indonesia 2023" juga disusun untuk mendukung strategi yang tepat bagi pembangunan di bidang kepemudaan dan secara simultan dapat menjawab kebutuhan dengan memberikan informasi seputar indikator capaian pembangunan di bidang kepemudaan. Data-data pada publikasi ini bersumber dari hasil Susenas 2023, Sakernas 2023, dan didukung oleh data sekunder dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara kolektif dan komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kepemudaan di Indonesia dari segala tingkatan, baik tingkat nasional maupun regional.

Publikasi "Statistik Pemuda Indonesia 2023" ini secara struktur disajikan dalam delapan bagian. Bab I menggambarkan peran dan tantangan pemuda khususnya dalam pembangunan. Selanjutnya, Bab II menggambarkan kondisi pemuda Indonesia dilihat dari sudut pandang demografi, diikuti Bab III yang memberikan profil pendidikan pemuda, dan Bab IV tentang kesehatan pemuda sebagai refleksi kualitas hidup sehat masyarakat. Dalam Bab V dijelaskan mengenai ketenagakerjaan pemuda, selanjutnya Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII

berturut turut menggambarkan kondisi sosial ekonomi pemuda, kesehatan reproduksi pemuda, dan program kepemudaan yang pelaksanaannya memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat Indonesia.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>



Bab 2. Demografi



<https://www.bps.go.id>

Salah satu Tujuan Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pemuda. Pembangunan kualitas pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan bangsa karena pemuda merupakan penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan menjadi salah satu penentu optimalisasi bonus demografi (Bappenas 2019, 4). Terdapat tiga fokus pembangunan pemuda yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Ketiga hal tersebut meliputi (i) penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah, (ii) peningkatan partisipasi aktif permuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi, serta (iii) pencegahan perilaku berisiko pemuda termasuk pencegahan perilaku negatif seperti perundungan, intoleransi, HIV, NAPZA, seks bebas, dan lainnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika 2023).

2.1 Jumlah Pemuda Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berumur 16-30 tahun, sehingga pada tahun 2023 yang termasuk dalam pemuda adalah mereka yang lahir pada tahun 1993-2007. Berdasarkan data Susenas 2023, diperkirakan terdapat sekitar 64,16 juta jiwa pemuda (23,18 persen) di Indonesia. Jumlah pemuda yang cukup banyak ini berpotensi menjadi sumber kekuatan bangsa jika dipersiapkan dengan baik.

Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, persentase pemuda di Indonesia menunjukkan tren yang relatif menurun dari sebesar 24,53 persen pada tahun 2014 menjadi 23,18 persen pada tahun 2023 (Gambar 2.1). Penurunan persentase ini diduga terkait fakta adanya tingkat kelahiran penduduk yang

relatif menurun dari waktu ke waktu, dan di sisi lain tingkat kesehatan lansia yang semakin membaik.

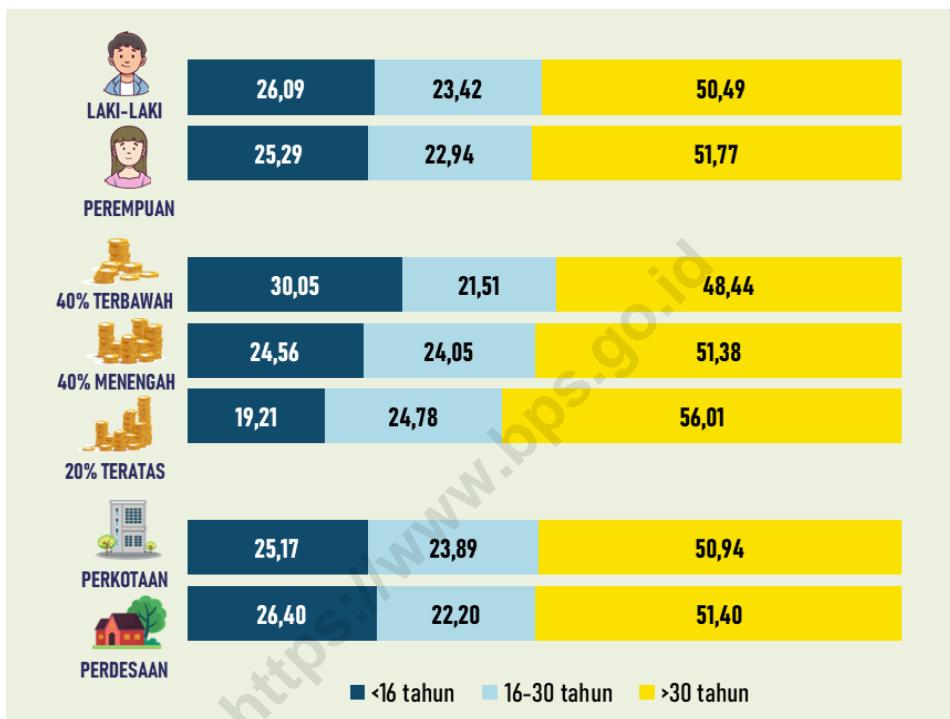


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.1 Persentase Pemuda Indonesia, 2014-2023

Apabila ditinjau menurut jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemuda laki-laki dan perempuan. Persentase pemuda laki-laki sebesar 23,42 persen dari total penduduk laki-laki dan persentase pemuda perempuan sebesar 22,94 persen dari total penduduk perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut klasifikasi desa. Sementara itu, Gambar 2.2 menunjukkan pola peningkatan persentase pemuda semakin seiring dengan meningkatnya kondisi kesejahteraan rumah tangga pemuda yang dilihat melalui pengeluaran rumah tangga. Persentase pemuda pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah sebesar 21,51 persen, pada kelompok 40 persen menengah sebesar

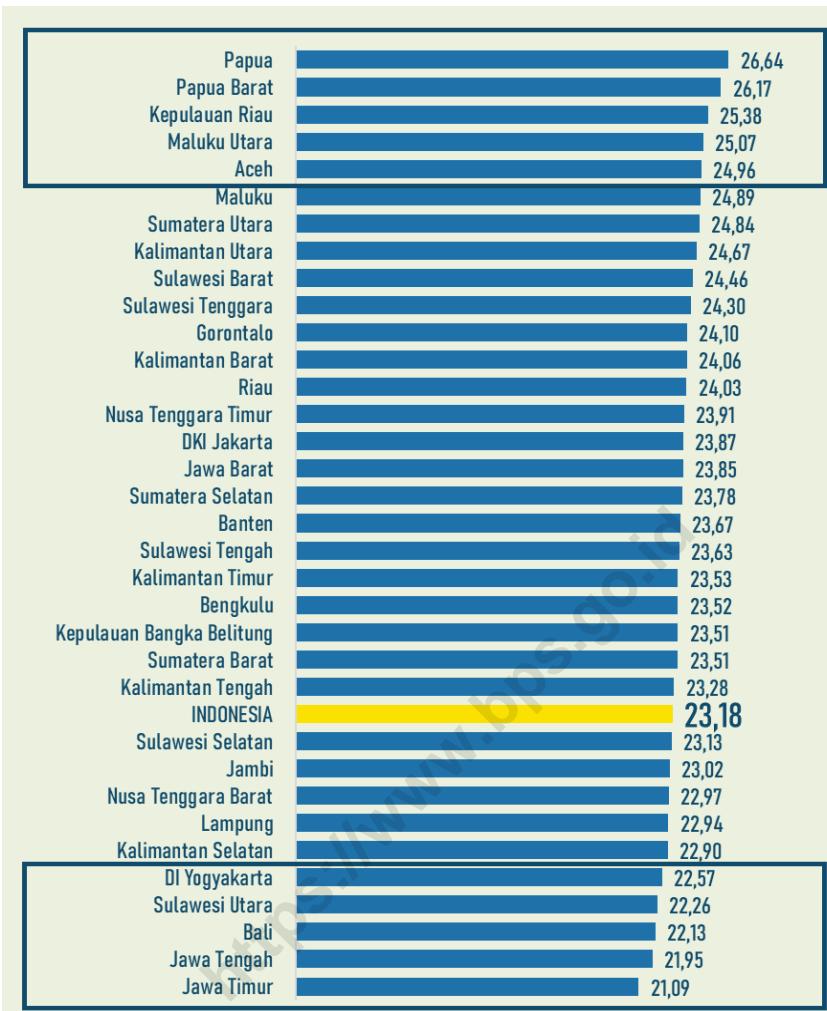
24,05 persen, dan pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas sebanyak 24,78 persen. Fenomena itu diduga karena ketika kondisi kesejahteraan masih rendah, kecenderungan anak banyak, sedangkan tingkat survival rendah sehingga mengakibatkan proporsi pemuda menurun. Kondisi sebaliknya terjadi untuk rumah tangga dengan tingkat kesejahteraanya yang baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.2 Persentase Penduduk menurut Jenis Kelamin, Distribusi Pengeluaran, Klasifikasi Desa, dan Kelompok Umur, 2023

Jika dilihat sebaran pemuda pada masing-masing provinsi, persentase pemuda tertinggi berada di wilayah Indonesia bagian timur yaitu Provinsi Papua (26,64 persen) dan Papua Barat (26,17 persen). Selanjutnya diikuti oleh provinsi Kepulauan Riau (25,38 persen), Maluku Utara (25,07 persen), dan Aceh (24,96 persen). Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki persentase pemuda di atas angka nasional (>23,18 persen). Sementara itu, terdapat sepuluh provinsi dengan persentase pemuda di bawah angka nasional. Jika diamati lebih dalam, provinsi yang memiliki persentase pemuda di bawah angka nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali.



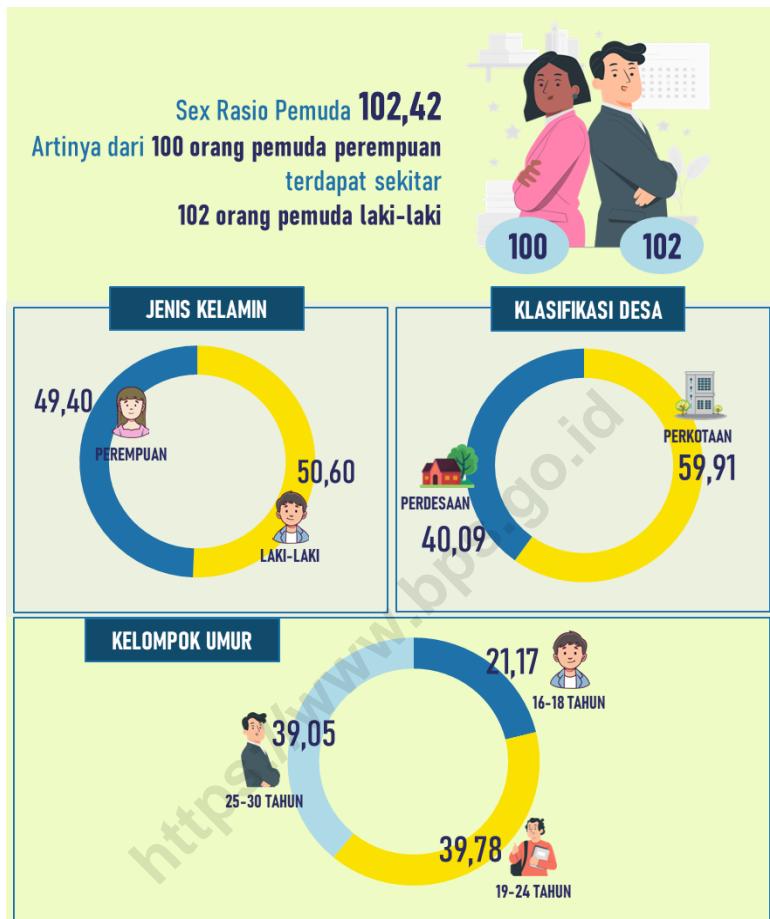
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.3 Persentase Pemuda Indonesia menurut Provinsi, 2023

2.2 Komposisi Pemuda

Pada Gambar 2.4 disajikan komposisi pemuda menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan klasifikasi daerah. Terlihat bahwa komposisi pemuda laki-laki dan perempuan nilainya hampir sama, dengan selisih hanya sebesar 1,20 persen poin. Hal tersebut juga terlihat dari angka rasio jenis kelamin yaitu sebesar 102,42 yang menunjukkan bahwa dari 100 orang pemuda perempuan terdapat sekitar 102 orang pemuda laki-laki. Dengan selisih sebaran pemuda laki-laki dan perempuan yang kecil tersebut diharapkan dapat mendukung

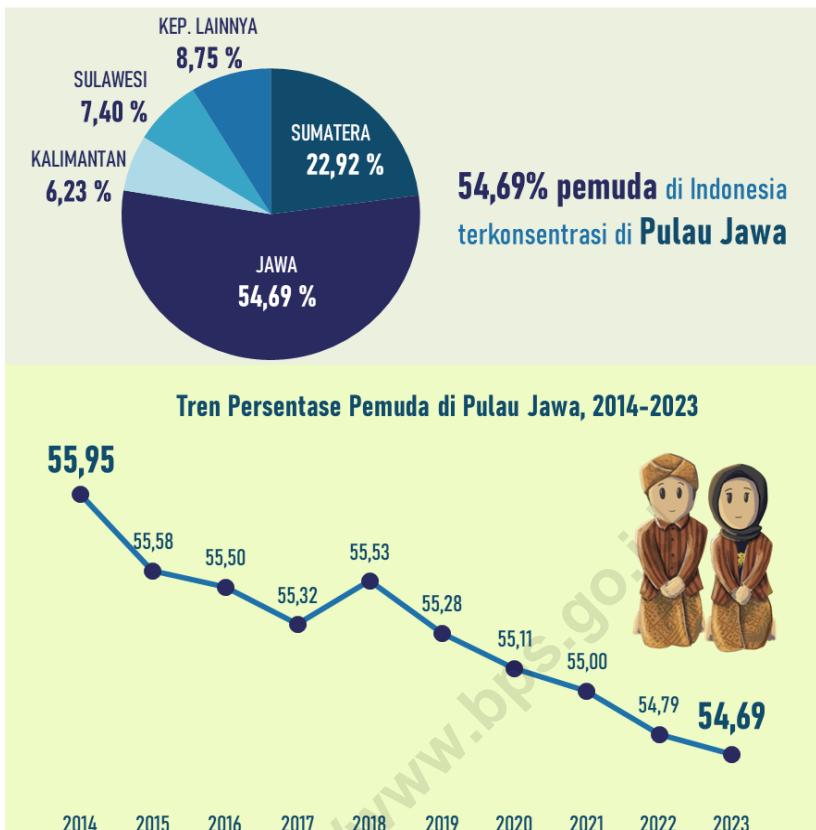
tercapainya kesetaraan gender yang mendorong perempuan berada pada kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam aspek apapun.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.4 Distribusi Pemuda menurut Karakteristik, 2023

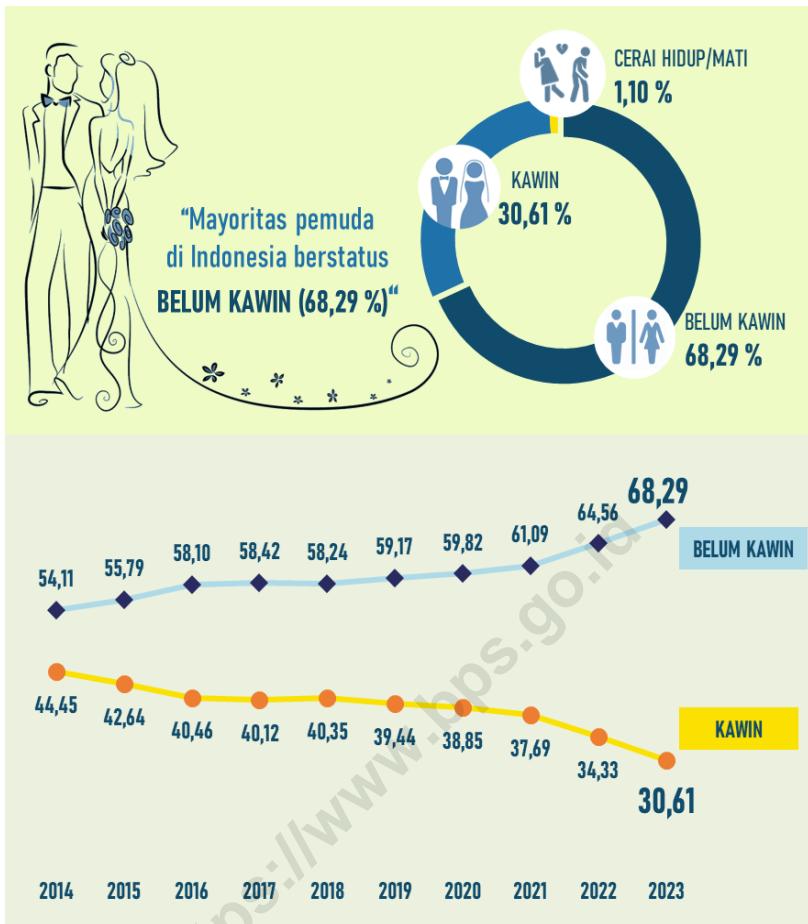
Berdasarkan kelompok umur, pemuda Indonesia paling banyak berada pada kelompok umur 19-24 tahun (39,78 persen). Rentang kelompok umur tersebut merupakan masa pemuda menjalani pendidikan tinggi atau bahkan ada yang sudah bersiap untuk masuk dalam dunia kerja dan perkawinan. Sementara itu, jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, persentase pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (59,91 persen berbanding 40,09 persen). Perkotaan merupakan wilayah yang menjadi sentra kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu daya tarik pemuda untuk tinggal dan mencari penghidupan yang lebih baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.5 Distribusi Pemuda menurut Pulau di Indonesia, 2023

Pada tahun 2023, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan persentase pemuda paling tinggi di Indonesia. Lebih dari separuh (54,69%) pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tren perkembangan persentase pemuda di Pulau Jawa pada Gambar 2.5 menunjukkan adanya penurunan di tahun 2023 (54,69 persen) dibandingkan satu dekade sebelumnya di tahun 2014 (55,95 persen). Fenomena ini bisa terjadi karena adanya upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, sehingga menarik minat masyarakat termasuk pemuda untuk tinggal dan mencari penghidupan di luar Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.6 Persentase Pemuda Indonesia menurut Status Perkawinan, 2023

Selain faktor ekonomi, faktor lain yang dapat menjadi alasan pemuda melakukan migrasi yaitu perkawinan (Husnah 2019, 332). Pasangan yang berasal dari dua daerah yang berbeda, salah satu cenderung akan bermigrasi ke tempat pasangannya untuk tinggal bersama. Peristiwa tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap sebaran pemuda di Indonesia. Gambar 2.6 menunjukkan bahwa sekitar 30,61 persen pemuda berstatus kawin pada tahun 2023. Sementara itu, mayoritas pemuda berstatus belum kawin (68,29 persen).

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan persentase pemuda yang berstatus kawin dan belum kawin bertolak belakang. Persentase pemuda yang berstatus kawin semakin menurun sedangkan pemuda yang belum kawin semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran

usia perkawinan pemuda. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut dapat menjadi penyebab penurunan jumlah pemuda berstatus kawin. Selain itu, adanya faktor-faktor seperti keinginan mengejar kesuksesan dalam pendidikan dan karir, mengembangkan diri, dan kurangnya tekanan dari lingkungan sosial memengaruhi keputusan generasi muda untuk menunda pernikahan (Riska dan Nur Khasanah 2023, 51).

2.3 Pemuda dalam Rumah Tangga

Sebelum menjalani peran sebagai pemimpin bangsa, pemuda pada umumnya akan memulai menjalani peran pertamanya sebagai pemimpin dalam lingkup yang lebih kecil yaitu rumah tangga. Seorang pemuda yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) merupakan seseorang dari sekelompok Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT (BPS, 2023). Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa terdapat 7,00 persen pemuda yang berperan sebagai Kepala Rumah Tangga (KRT).



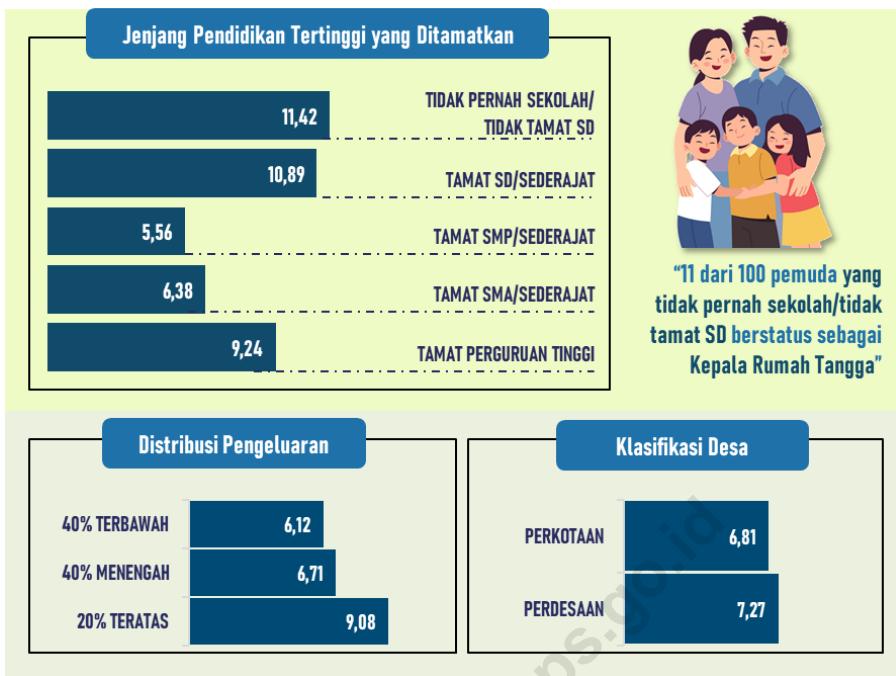
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.7 Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga (KRT) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2023

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pemuda yang berstatus sebagai KRT masih didominasi oleh pemuda laki-laki (12,90 persen). Hal tersebut menandakan masih kuatnya pengaruh budaya dan adat istiadat di Indonesia yang menganggap bahwa pembagian peran dalam keluarga masih dipengaruhi oleh pembagian secara seksual, dimana laki-laki umumnya adalah kepala keluarga dan pencari nafkah, sementara perempuan mengurus rumah tangga dan merawat anak (Putri dan Montessori 2021, 364). Namun demikian, masih terdapat sekitar 0,95 persen pemuda perempuan yang berstatus sebagai KRT.

Jika ditinjau dari kelompok umur, semakin tinggi kelompok umur semakin banyak pemuda yang berperan sebagai KRT. Pemuda yang berperan sebagai KRT pada kelompok umur 25-30 tahun memiliki persentase tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya yaitu sebesar 15,71 persen. Pada kelompok umur tersebut umumnya pemuda sudah memiliki pekerjaan dan bahkan sudah menikah sehingga banyak pemuda yang berperan sebagai KRT. Namun demikian, masih terdapat sekitar 0,12 persen pemuda usia 16-18 tahun dan sekitar 2,10 persen pemuda usia 19-24 tahun yang sudah berstatus sebagai KRT.

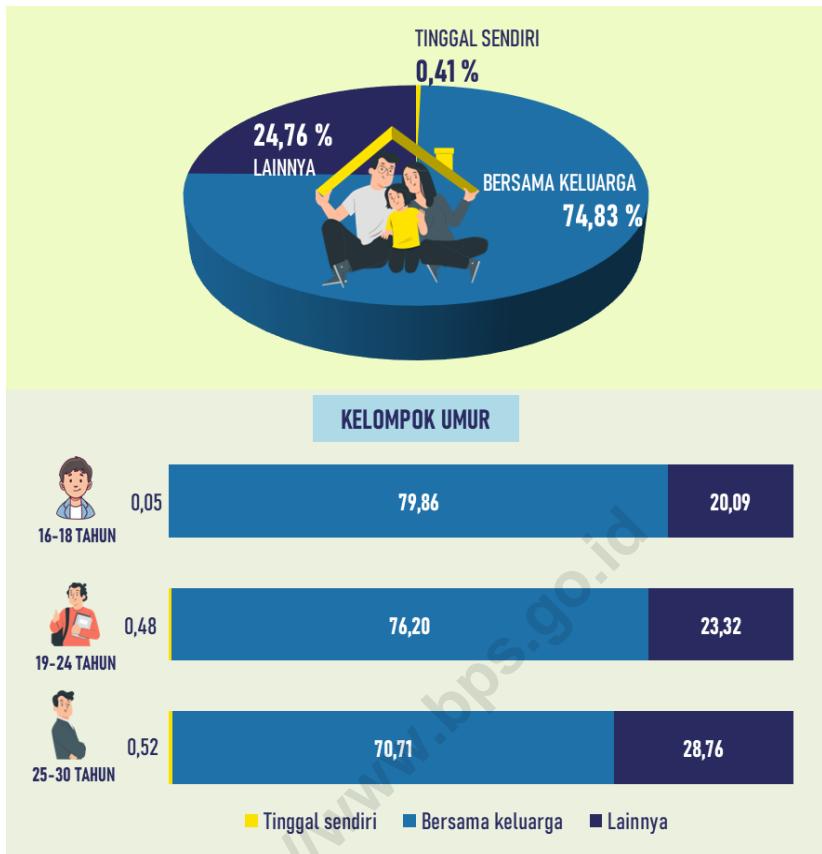
Jika dilihat berdasarkan kondisi sosial ekonominya, komposisi pemuda yang berstatus sebagai KRT berpendidikan rendah, tamatan SD ke bawah. Selanjutnya, komposisi pemuda berstatus sebagai KRT tertinggi berada pada kondisi kesejahteraan yang baik, berasal dari kelompok rumah tangga 20 persen teratas. Analisis komposisi KRT pemuda dengan status pendidikan dan tingkat kesejahteraan, menarik diungkap berkaitan dengan beban pengeluaran rumah tangga sebagai KRT muda yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, notabene pasti penghasilanya rendah. Di sisi lainnya, KRT muda tersebut harus memenuhi setiap kebutuhan anggota keluarganya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.8 Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga (KRT) menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan, Distribusi Pengeluaran dan Klasifikasi Desa, 2023

Pemuda merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, sangat penting untuk mengetahui bagaimana status tinggal pemuda dan cara mereka menghabiskan sebagian besar waktunya. Pada Susenas Maret 2023, konsep klasifikasi status tempat tinggal bersama dibedakan menjadi tinggal sendiri, bersama keluarga, dan lainnya. Pemuda dikatakan tinggal bersama keluarga jika tinggal bersama anak atau orang tua saja, baik didampingi pasangan maupun tidak. Selanjutnya, dikatakan lainnya jika pemuda tinggal bersama tiga generasi atau famili lain. Sementara itu, pemuda yang tinggal sendiri adalah pemuda yang tinggal seorang diri dalam rumah tangganya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2.9 Persentase Pemuda menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2023

Sekitar tiga perempat pemuda tinggal bersama keluarga (74,83 persen). Jika dilihat menurut kelompok umur, semakin tua umur pemuda semakin kecil persentase mereka tinggal bersama keluarga. Persentase pemuda yang tinggal sendiri paling banyak pada usia 25-30 tahun (0,52 persen). Dalam rentang usia tersebut, pemuda umumnya sudah memiliki pekerjaan dan memilih tinggal sendiri apalagi jika lokasi kerja mereka jauh di luar kota.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 Tahun	16-30 Tahun	31 Tahun atau Lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	25,69	23,18	51,13	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	26,09	23,42	50,49	100,00
Perempuan	25,29	22,94	51,77	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD	69,38	1,90	28,72	100,00
Tamat SD/sederajat	18,91	11,06	70,03	100,00
Tamat SMP/sederajat	3,15	48,08	48,77	100,00
Tamat SMA/sederajat	-	40,34	59,66	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	-	33,76	66,24	100,00
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	30,05	21,51	48,44	100,00
40% Menengah	24,56	24,05	51,38	100,00
20% Teratas	19,21	24,78	56,01	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	25,17	23,89	50,94	100,00
Perdesaan	26,40	22,20	51,40	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.2 Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, 2023

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	68,29	30,61	1,10	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	78,20	21,08	0,73	100,00
Perempuan	58,15	40,38	1,47	100,00
Kelompok Umur				
16-18 tahun	98,45	1,43	0,12	100,00
19-24 tahun	81,93	17,38	0,70	100,00
25-30 tahun	38,05	59,92	2,03	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/ tidak tamat SD	61,59	36,30	2,11	100,00
Tamat SD/sederajat	55,36	42,82	1,82	100,00
Tamat SMP/sederajat	72,66	26,40	0,94	100,00
Tamat SMA/sederajat	71,38	27,67	0,94	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	56,66	42,09	1,25	100,00
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	64,04	34,63	1,33	100,00
40% Menengah	69,71	29,29	1,00	100,00
20% Teratas	72,91	26,22	0,86	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	72,52	26,51	0,97	100,00
Perdesaan	61,97	36,75	1,28	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.3 Persentase Pemuda menurut Kedudukan dalam Rumah Tangga, 2023

Karakteristik	Kedudukan dalam Rumah Tangga			Jumlah
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Anggota Rumah Tangga (ART)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Indonesia	7,00	93,00	100,00	
Jenis Kelamin				
Laki-laki	12,90	87,10	100,00	
Perempuan	0,95	99,05	100,00	
Kelompok Umur				
16-18 tahun	0,12	99,88	100,00	
19-24 tahun	2,10	97,90	100,00	
25-30 tahun	15,71	84,29	100,00	
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD	11,42	88,58	100,00	
Tamat SD/sederajat	10,89	89,11	100,00	
Tamat SMP/sederajat	5,56	94,44	100,00	
Tamat SMA/sederajat	6,38	93,62	100,00	
Tamat Perguruan Tinggi	9,24	90,76	100,00	
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	6,12	93,88	100,00	
40% Menengah	6,71	93,29	100,00	
20% Teratas	9,08	90,92	100,00	
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	6,81	93,19	100,00	
Perdesaan	7,27	92,73	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.4 Persentase Pemuda menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2023

Karakteristik	Status Tinggal dalam Rumah Tangga			Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	0,41	74,83	24,76	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	0,49	76,04	23,47	100,00
Perempuan	0,32	73,60	26,09	100,00
Kelompok Umur				
16-18 tahun	0,05	79,86	20,09	100,00
19-24 tahun	0,48	76,20	23,32	100,00
25-30 tahun	0,52	70,71	28,76	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD	0,99	73,42	25,59	100,00
Tamat SD/sederajat	0,30	72,11	27,59	100,00
Tamat SMP/sederajat	0,25	74,92	24,84	100,00
Tamat SMA/sederajat	0,49	76,04	23,47	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	0,57	73,08	26,35	100,00
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	0,01	65,68	34,31	100,00
40% Menengah	0,10	78,70	21,20	100,00
20% Teratas	1,69	83,20	15,10	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,52	77,81	21,67	100,00
Perdesaan	0,24	70,38	29,38	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.5.1 Persentase Penduduk di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	28,95	25,55	45,50	100,00
Sumatera Utara	27,58	25,92	46,50	100,00
Sumatera Barat	28,52	24,58	46,90	100,00
Riau	28,91	25,16	45,93	100,00
Jambi	27,75	22,10	50,16	100,00
Sumatera Selatan	27,11	25,04	47,84	100,00
Bengkulu	25,53	25,47	49,00	100,00
Lampung	26,07	23,68	50,25	100,00
Kep. Bangka Belitung	26,66	23,13	50,21	100,00
Kepulauan Riau	28,26	26,05	45,69	100,00
DKI Jakarta	23,90	23,87	52,23	100,00
Jawa Barat	25,64	24,40	49,96	100,00
Jawa Tengah	23,39	22,48	54,13	100,00
DI Yogyakarta	21,80	24,50	53,70	100,00
Jawa Timur	22,03	21,82	56,15	100,00
Banten	26,00	23,98	50,02	100,00
Bali	23,06	22,96	53,98	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,80	23,70	48,50	100,00
Nusa Tenggara Timur	29,00	27,32	43,68	100,00
Kalimantan Barat	26,70	23,69	49,61	100,00
Kalimantan Tengah	26,67	23,43	49,91	100,00
Kalimantan Selatan	26,92	23,36	49,72	100,00
Kalimantan Timur	26,46	23,96	49,59	100,00
Kalimantan Utara	27,79	25,74	46,47	100,00
Sulawesi Utara	23,61	23,31	53,08	100,00
Sulawesi Tengah	26,86	25,67	47,47	100,00
Sulawesi Selatan	25,43	25,14	49,43	100,00
Sulawesi Tenggara	29,44	26,44	44,11	100,00
Gorontalo	25,41	24,26	50,33	100,00
Sulawesi Barat	28,95	25,28	45,77	100,00
Maluku	27,46	26,83	45,70	100,00
Maluku Utara	26,80	26,92	46,29	100,00
Papua Barat	29,28	26,50	44,22	100,00
Papua	27,05	25,85	47,10	100,00
Indonesia	25,17	23,89	50,94	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.5.2 Persentase Penduduk di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	29,61	24,64	45,75	100,00
Sumatera Utara	31,11	23,43	45,46	100,00
Sumatera Barat	29,88	22,43	47,69	100,00
Riau	30,52	23,27	46,21	100,00
Jambi	26,41	23,48	50,10	100,00
Sumatera Selatan	28,76	23,01	48,23	100,00
Bengkulu	26,22	22,54	51,25	100,00
Lampung	26,48	22,57	50,95	100,00
Kep. Bangka Belitung	26,56	24,03	49,41	100,00
Kepulauan Riau	27,96	20,19	51,85	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	25,08	21,72	53,20	100,00
Jawa Tengah	23,30	21,36	55,34	100,00
DI Yogyakarta	21,48	16,79	61,73	100,00
Jawa Timur	21,71	20,15	58,14	100,00
Banten	28,39	22,59	49,02	100,00
Bali	22,75	19,99	57,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,12	22,20	48,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,26	22,72	45,02	100,00
Kalimantan Barat	27,39	24,29	48,32	100,00
Kalimantan Tengah	26,78	23,16	50,06	100,00
Kalimantan Selatan	27,40	22,44	50,16	100,00
Kalimantan Timur	27,07	22,58	50,35	100,00
Kalimantan Utara	28,88	22,76	48,35	100,00
Sulawesi Utara	25,09	20,99	53,93	100,00
Sulawesi Tengah	28,43	22,65	48,92	100,00
Sulawesi Selatan	25,98	21,37	52,65	100,00
Sulawesi Tenggara	31,18	22,96	45,86	100,00
Gorontalo	26,20	23,97	49,83	100,00
Sulawesi Barat	29,80	24,25	45,95	100,00
Maluku	31,51	23,43	45,06	100,00
Maluku Utara	30,12	24,32	45,56	100,00
Papua Barat	32,34	25,94	41,72	100,00
Papua	27,70	26,97	45,33	100,00
Indonesia	26,40	22,20	51,40	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.5.3 Persentase Penduduk Laki-Laki menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	29,88	25,02	45,10	100,00
Sumatera Utara	29,82	25,16	45,02	100,00
Sumatera Barat	29,78	24,00	46,22	100,00
Riau	29,79	24,42	45,80	100,00
Jambi	27,11	23,23	49,66	100,00
Sumatera Selatan	28,23	23,81	47,96	100,00
Bengkulu	25,93	23,50	50,57	100,00
Lampung	26,11	22,96	50,93	100,00
Kep. Bangka Belitung	26,63	23,19	50,19	100,00
Kepulauan Riau	28,53	25,34	46,13	100,00
DKI Jakarta	24,48	23,50	52,03	100,00
Jawa Barat	25,69	24,20	50,12	100,00
Jawa Tengah	23,88	22,46	53,67	100,00
DI Yogyakarta	22,46	22,71	54,82	100,00
Jawa Timur	22,56	21,29	56,14	100,00
Banten	27,03	23,72	49,25	100,00
Bali	23,33	22,76	53,91	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,31	23,28	47,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,23	24,34	43,43	100,00
Kalimantan Barat	27,21	23,83	48,96	100,00
Kalimantan Tengah	26,37	22,96	50,67	100,00
Kalimantan Selatan	27,49	22,97	49,54	100,00
Kalimantan Timur	26,56	23,43	50,02	100,00
Kalimantan Utara	27,33	24,56	48,11	100,00
Sulawesi Utara	24,17	22,68	53,16	100,00
Sulawesi Tengah	28,19	23,27	48,54	100,00
Sulawesi Selatan	26,60	23,82	49,57	100,00
Sulawesi Tenggara	31,28	24,24	44,48	100,00
Gorontalo	25,97	24,50	49,53	100,00
Sulawesi Barat	29,70	24,59	45,72	100,00
Maluku	30,20	25,15	44,65	100,00
Maluku Utara	29,33	24,95	45,72	100,00
Papua Barat	30,84	25,79	43,36	100,00
Papua	27,16	26,57	46,26	100,00
Indonesia	26,09	23,42	50,49	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.5.4 Persentase Penduduk Perempuan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	28,88	24,89	46,22	100,00
Sumatera Utara	28,39	24,53	47,08	100,00
Sumatera Barat	28,63	23,02	48,36	100,00
Riau	29,97	23,62	46,41	100,00
Jambi	26,60	22,81	50,59	100,00
Sumatera Selatan	28,04	23,75	48,21	100,00
Bengkulu	26,05	23,53	50,42	100,00
Lampung	26,59	22,92	50,49	100,00
Kep. Bangka Belitung	26,60	23,85	49,55	100,00
Kepulauan Riau	27,92	25,42	46,66	100,00
DKI Jakarta	23,33	24,24	52,43	100,00
Jawa Barat	25,37	23,49	51,14	100,00
Jawa Tengah	22,82	21,46	55,72	100,00
DI Yogyakarta	20,99	22,44	56,58	100,00
Jawa Timur	21,24	20,89	57,88	100,00
Banten	26,03	23,61	50,36	100,00
Bali	22,61	21,49	55,90	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,59	22,67	49,74	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,62	23,49	45,89	100,00
Kalimantan Barat	27,05	24,30	48,64	100,00
Kalimantan Tengah	27,11	23,61	49,28	100,00
Kalimantan Selatan	26,83	22,83	50,34	100,00
Kalimantan Timur	26,74	23,64	49,62	100,00
Kalimantan Utara	29,10	24,80	46,10	100,00
Sulawesi Utara	24,39	21,84	53,78	100,00
Sulawesi Tengah	27,65	24,00	48,36	100,00
Sulawesi Selatan	24,88	22,46	52,66	100,00
Sulawesi Tenggara	29,75	24,35	45,90	100,00
Gorontalo	25,73	23,70	50,58	100,00
Sulawesi Barat	29,55	24,33	46,11	100,00
Maluku	29,34	24,63	46,03	100,00
Maluku Utara	28,98	25,20	45,82	100,00
Papua Barat	31,31	26,58	42,11	100,00
Papua	27,89	26,71	45,40	100,00
Indonesia	25,29	22,94	51,77	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.5.5 Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	29,38	24,96	45,66	100,00
Sumatera Utara	29,11	24,84	46,05	100,00
Sumatera Barat	29,20	23,51	47,29	100,00
Riau	29,88	24,03	46,10	100,00
Jambi	26,86	23,02	50,12	100,00
Sumatera Selatan	28,14	23,78	48,08	100,00
Bengkulu	25,99	23,52	50,49	100,00
Lampung	26,34	22,94	50,72	100,00
Kep. Bangka Belitung	26,62	23,51	49,87	100,00
Kepulauan Riau	28,23	25,38	46,39	100,00
DKI Jakarta	23,90	23,87	52,23	100,00
Jawa Barat	25,53	23,85	50,62	100,00
Jawa Tengah	23,34	21,95	54,70	100,00
DI Yogyakarta	21,72	22,57	55,71	100,00
Jawa Timur	21,89	21,09	57,02	100,00
Banten	26,53	23,67	49,80	100,00
Bali	22,97	22,13	54,90	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,44	22,97	48,59	100,00
Nusa Tenggara Timur	31,41	23,91	44,67	100,00
Kalimantan Barat	27,13	24,06	48,80	100,00
Kalimantan Tengah	26,73	23,28	49,99	100,00
Kalimantan Selatan	27,16	22,90	49,94	100,00
Kalimantan Timur	26,65	23,53	49,83	100,00
Kalimantan Utara	28,18	24,67	47,14	100,00
Sulawesi Utara	24,28	22,26	53,46	100,00
Sulawesi Tengah	27,92	23,63	48,45	100,00
Sulawesi Selatan	25,72	23,13	51,15	100,00
Sulawesi Tenggara	30,51	24,30	45,19	100,00
Gorontalo	25,85	24,10	50,05	100,00
Sulawesi Barat	29,63	24,46	45,92	100,00
Maluku	29,77	24,89	45,34	100,00
Maluku Utara	29,16	25,07	45,77	100,00
Papua Barat	31,07	26,17	42,76	100,00
Papua	27,51	26,64	45,85	100,00
Indonesia	25,69	23,18	51,13	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.6 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,25	98,98	99,43
Sumatera Utara	99,48	107,05	102,51
Sumatera Barat	102,08	104,45	103,20
Riau	102,05	110,49	106,85
Jambi	105,00	104,39	104,58
Sumatera Selatan	97,38	106,42	102,72
Bengkulu	96,99	106,71	103,08
Lampung	100,88	105,94	104,17
Kep. Bangka Belitung	97,89	108,17	102,20
Kepulauan Riau	99,01	141,90	102,27
DKI Jakarta	94,72	-	94,72
Jawa Barat	104,89	106,09	105,11
Jawa Tengah	101,62	104,80	103,07
DI Yogyakarta	101,14	92,70	99,52
Jawa Timur	100,87	97,34	99,37
Banten	102,63	100,59	102,19
Bali	106,71	106,69	106,71
Nusa Tenggara Barat	97,50	102,67	99,89
Nusa Tenggara Timur	107,40	98,97	101,40
Kalimantan Barat	93,80	104,73	100,56
Kalimantan Tengah	96,88	108,07	103,08
Kalimantan Selatan	100,84	102,39	101,60
Kalimantan Timur	103,98	108,93	105,43
Kalimantan Utara	102,52	115,75	106,70
Sulawesi Utara	106,92	108,27	107,50
Sulawesi Tengah	91,76	103,79	99,38
Sulawesi Selatan	102,65	100,39	101,53
Sulawesi Tenggara	93,67	102,12	98,50
Gorontalo	97,97	107,54	103,14
Sulawesi Barat	93,51	103,68	101,46
Maluku	101,31	104,69	103,11
Maluku Utara	94,04	103,99	100,80
Papua Barat	103,87	104,40	104,18
Papua	116,93	105,75	108,82
Indonesia	101,61	103,63	102,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.7.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	21,91	39,70	38,38	100,00
Sumatera Utara	21,60	41,07	37,33	100,00
Sumatera Barat	23,21	40,51	36,28	100,00
Riau	24,07	39,40	36,53	100,00
Jambi	24,72	41,04	34,24	100,00
Sumatera Selatan	20,59	40,37	39,03	100,00
Bengkulu	22,42	40,79	36,79	100,00
Lampung	23,26	40,61	36,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	22,44	38,74	38,82	100,00
Kepulauan Riau	18,51	38,02	43,47	100,00
DKI Jakarta	18,08	39,81	42,11	100,00
Jawa Barat	20,52	40,50	38,98	100,00
Jawa Tengah	20,59	40,62	38,79	100,00
DI Yogyakarta	17,44	41,12	41,44	100,00
Jawa Timur	19,63	40,33	40,05	100,00
Banten	21,28	40,74	37,98	100,00
Bali	20,15	38,19	41,66	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,12	40,76	38,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,91	41,99	36,09	100,00
Kalimantan Barat	21,88	39,51	38,61	100,00
Kalimantan Tengah	21,43	40,15	38,42	100,00
Kalimantan Selatan	22,13	40,40	37,47	100,00
Kalimantan Timur	21,28	39,85	38,87	100,00
Kalimantan Utara	20,22	39,62	40,16	100,00
Sulawesi Utara	20,31	41,46	38,23	100,00
Sulawesi Tengah	23,02	40,46	36,52	100,00
Sulawesi Selatan	21,30	40,83	37,87	100,00
Sulawesi Tenggara	22,36	42,83	34,82	100,00
Gorontalo	22,12	39,86	38,02	100,00
Sulawesi Barat	24,39	38,62	36,98	100,00
Maluku	22,86	42,37	34,78	100,00
Maluku Utara	21,21	42,56	36,23	100,00
Papua Barat	20,36	38,05	41,59	100,00
Papua	20,15	41,29	38,57	100,00
Indonesia	20,65	40,42	38,93	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.7.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	22,24	39,11	38,65	100,00
Sumatera Utara	24,47	38,21	37,32	100,00
Sumatera Barat	23,21	36,64	40,15	100,00
Riau	22,67	39,69	37,65	100,00
Jambi	20,88	39,63	39,49	100,00
Sumatera Selatan	21,17	39,41	39,42	100,00
Bengkulu	21,45	38,11	40,44	100,00
Lampung	21,58	38,81	39,61	100,00
Kep. Bangka Belitung	21,79	38,94	39,28	100,00
Kepulauan Riau	23,19	40,01	36,81	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	22,24	39,26	38,50	100,00
Jawa Tengah	22,25	38,67	39,08	100,00
DI Yogyakarta	18,98	33,72	47,30	100,00
Jawa Timur	20,97	39,35	39,68	100,00
Banten	21,71	40,12	38,17	100,00
Bali	21,67	38,56	39,77	100,00
Nusa Tenggara Barat	22,22	37,08	40,70	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,93	38,90	38,17	100,00
Kalimantan Barat	20,92	38,62	40,46	100,00
Kalimantan Tengah	20,97	38,24	40,79	100,00
Kalimantan Selatan	22,57	38,36	39,07	100,00
Kalimantan Timur	19,73	40,50	39,77	100,00
Kalimantan Utara	23,31	37,25	39,44	100,00
Sulawesi Utara	20,09	38,15	41,76	100,00
Sulawesi Tengah	21,79	38,80	39,41	100,00
Sulawesi Selatan	21,59	37,87	40,55	100,00
Sulawesi Tenggara	23,96	37,51	38,53	100,00
Gorontalo	20,25	40,18	39,58	100,00
Sulawesi Barat	20,90	40,17	38,93	100,00
Maluku	22,98	37,87	39,15	100,00
Maluku Utara	22,86	36,68	40,46	100,00
Papua Barat	21,40	37,41	41,19	100,00
Papua	21,53	40,25	38,22	100,00
Indonesia	21,95	38,82	39,23	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.7.3 Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	21,97	39,24	38,79	100,00
Sumatera Utara	22,87	40,49	36,64	100,00
Sumatera Barat	22,76	39,36	37,89	100,00
Riau	23,08	39,26	37,67	100,00
Jambi	22,07	39,77	38,16	100,00
Sumatera Selatan	21,31	40,51	38,17	100,00
Bengkulu	21,39	39,35	39,26	100,00
Lampung	21,93	39,24	38,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	22,31	38,54	39,14	100,00
Kepulauan Riau	19,51	37,70	42,79	100,00
DKI Jakarta	18,27	39,44	42,29	100,00
Jawa Barat	21,39	40,10	38,51	100,00
Jawa Tengah	21,96	39,81	38,22	100,00
DI Yogyakarta	17,86	40,06	42,08	100,00
Jawa Timur	20,46	39,80	39,74	100,00
Banten	20,54	41,29	38,17	100,00
Bali	20,61	38,52	40,87	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,25	39,10	39,65	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,45	40,35	37,20	100,00
Kalimantan Barat	21,80	39,25	38,96	100,00
Kalimantan Tengah	20,91	40,27	38,82	100,00
Kalimantan Selatan	22,07	39,05	38,88	100,00
Kalimantan Timur	20,94	40,95	38,11	100,00
Kalimantan Utara	20,74	39,09	40,17	100,00
Sulawesi Utara	20,96	39,17	39,88	100,00
Sulawesi Tengah	22,02	39,83	38,15	100,00
Sulawesi Selatan	21,63	39,23	39,14	100,00
Sulawesi Tenggara	24,30	39,08	36,63	100,00
Gorontalo	20,46	41,01	38,53	100,00
Sulawesi Barat	22,75	39,21	38,04	100,00
Maluku	22,59	40,15	37,26	100,00
Maluku Utara	22,34	38,40	39,26	100,00
Papua Barat	20,81	37,87	41,31	100,00
Papua	21,11	40,24	38,65	100,00
Indonesia	21,38	39,84	38,79	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.7.4 Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	22,29	39,40	38,32	100,00
Sumatera Utara	22,67	39,30	38,03	100,00
Sumatera Barat	23,68	37,96	38,36	100,00
Riau	23,46	39,89	36,65	100,00
Jambi	22,14	40,41	37,45	100,00
Sumatera Selatan	20,56	39,05	40,39	100,00
Bengkulu	22,23	38,80	38,97	100,00
Lampung	22,40	39,63	37,98	100,00
Kep. Bangka Belitung	21,99	39,12	38,89	100,00
Kepulauan Riau	18,35	38,72	42,93	100,00
DKI Jakarta	17,91	40,16	41,94	100,00
Jawa Barat	20,26	40,44	39,30	100,00
Jawa Tengah	20,71	39,64	39,64	100,00
DI Yogyakarta	17,59	39,42	42,98	100,00
Jawa Timur	19,91	40,04	40,05	100,00
Banten	22,22	39,90	37,88	100,00
Bali	20,45	38,03	41,52	100,00
Nusa Tenggara Barat	22,02	38,96	39,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,81	39,28	37,91	100,00
Kalimantan Barat	20,75	38,65	40,60	100,00
Kalimantan Tengah	21,44	37,82	40,74	100,00
Kalimantan Selatan	22,64	39,73	37,63	100,00
Kalimantan Timur	20,70	39,08	40,22	100,00
Kalimantan Utara	21,76	38,58	39,66	100,00
Sulawesi Utara	19,42	41,01	39,57	100,00
Sulawesi Tengah	22,43	38,94	38,63	100,00
Sulawesi Selatan	21,25	39,51	39,24	100,00
Sulawesi Tenggara	22,30	40,38	37,32	100,00
Gorontalo	21,73	39,03	39,23	100,00
Sulawesi Barat	20,50	40,49	39,01	100,00
Maluku	23,27	39,75	36,99	100,00
Maluku Utara	22,35	38,61	39,04	100,00
Papua Barat	21,12	37,48	41,40	100,00
Papua	21,16	40,88	37,96	100,00
Indonesia	20,97	39,71	39,32	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.7.5 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	22,13	39,32	38,55	100,00
Sumatera Utara	22,77	39,90	37,33	100,00
Sumatera Barat	23,21	38,67	38,12	100,00
Riau	23,26	39,56	37,18	100,00
Jambi	22,10	40,08	37,82	100,00
Sumatera Selatan	20,94	39,79	39,27	100,00
Bengkulu	21,80	39,08	39,12	100,00
Lampung	22,16	39,43	38,41	100,00
Kep. Bangka Belitung	22,16	38,83	39,02	100,00
Kepulauan Riau	18,94	38,20	42,86	100,00
DKI Jakarta	18,08	39,81	42,11	100,00
Jawa Barat	20,84	40,27	38,89	100,00
Jawa Tengah	21,35	39,73	38,92	100,00
DI Yogyakarta	17,73	39,74	42,53	100,00
Jawa Timur	20,19	39,92	39,89	100,00
Banten	21,37	40,60	38,02	100,00
Bali	20,53	38,28	41,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,64	39,03	39,33	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,63	39,82	37,56	100,00
Kalimantan Barat	21,27	38,95	39,78	100,00
Kalimantan Tengah	21,17	39,06	39,77	100,00
Kalimantan Selatan	22,35	39,39	38,26	100,00
Kalimantan Timur	20,82	40,04	39,14	100,00
Kalimantan Utara	21,24	38,84	39,92	100,00
Sulawesi Utara	20,22	40,06	39,73	100,00
Sulawesi Tengah	22,22	39,39	38,39	100,00
Sulawesi Selatan	21,44	39,37	39,19	100,00
Sulawesi Tenggara	23,29	39,73	36,98	100,00
Gorontalo	21,09	40,04	38,88	100,00
Sulawesi Barat	21,63	39,85	38,52	100,00
Maluku	22,92	39,95	37,12	100,00
Maluku Utara	22,35	38,50	39,15	100,00
Papua Barat	20,96	37,68	41,36	100,00
Papua	21,13	40,55	38,32	100,00
Indonesia	21,17	39,78	39,05	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.8.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023

Provinsi	Status perkawinan			Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	76,52	23,18	0,30	100,00
Sumatera Utara	78,04	21,11	0,84	100,00
Sumatera Barat	76,49	22,70	0,80	100,00
Riau	76,78	22,41	0,81	100,00
Jambi	73,79	25,66	0,55	100,00
Sumatera Selatan	71,66	27,25	1,10	100,00
Bengkulu	73,18	25,80	1,02	100,00
Lampung	72,03	27,06	0,90	100,00
Kep. Bangka Belitung	64,35	33,81	1,85	100,00
Kepulauan Riau	72,43	27,08	NA	100,00
DKI Jakarta	80,00	19,48	0,53	100,00
Jawa Barat	73,01	26,11	0,88	100,00
Jawa Tengah	67,75	31,28	0,97	100,00
DI Yogyakarta	70,94	27,96	1,10	100,00
Jawa Timur	67,04	31,63	1,33	100,00
Banten	77,95	21,21	0,84	100,00
Bali	69,63	29,57	0,80	100,00
Nusa Tenggara Barat	64,07	33,81	2,13	100,00
Nusa Tenggara Timur	79,41	19,43	1,16	100,00
Kalimantan Barat	69,97	28,91	1,12	100,00
Kalimantan Tengah	64,73	34,11	1,16	100,00
Kalimantan Selatan	71,80	27,36	0,84	100,00
Kalimantan Timur	71,72	27,26	1,02	100,00
Kalimantan Utara	73,07	26,37	0,56	100,00
Sulawesi Utara	69,83	28,51	1,66	100,00
Sulawesi Tengah	69,38	29,26	1,36	100,00
Sulawesi Selatan	75,09	23,58	1,33	100,00
Sulawesi Tenggara	71,20	27,80	1,00	100,00
Gorontalo	71,71	27,49	0,80	100,00
Sulawesi Barat	68,88	29,33	1,79	100,00
Maluku	78,95	20,38	0,67	100,00
Maluku Utara	74,08	24,62	1,30	100,00
Papua Barat	73,42	25,30	1,28	100,00
Papua	72,63	26,32	1,05	100,00
Indonesia	72,52	26,51	0,97	100,00

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.8.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023

Provinsi	Status perkawinan			Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	75,63	23,95	0,42	100,00
Sumatera Utara	71,64	27,84	0,52	100,00
Sumatera Barat	65,58	33,24	1,18	100,00
Riau	70,82	28,08	1,10	100,00
Jambi	63,10	35,59	1,31	100,00
Sumatera Selatan	60,02	38,64	1,33	100,00
Bengkulu	58,22	40,17	1,60	100,00
Lampung	61,00	38,10	0,90	100,00
Kep. Bangka Belitung	62,27	35,65	2,08	100,00
Kepulauan Riau	74,28	24,65	1,07	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	59,86	38,44	1,70	100,00
Jawa Tengah	58,33	40,62	1,05	100,00
DI Yogyakarta	59,93	39,22	0,86	100,00
Jawa Timur	55,77	42,84	1,39	100,00
Banten	64,83	34,48	0,69	100,00
Bali	57,73	41,87	0,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	55,84	41,56	2,59	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,75	30,93	1,32	100,00
Kalimantan Barat	59,24	39,59	1,17	100,00
Kalimantan Tengah	61,52	37,28	1,20	100,00
Kalimantan Selatan	61,27	37,09	1,63	100,00
Kalimantan Timur	63,78	35,07	1,15	100,00
Kalimantan Utara	69,03	30,30	0,67	100,00
Sulawesi Utara	59,64	38,45	1,91	100,00
Sulawesi Tengah	60,81	37,44	1,75	100,00
Sulawesi Selatan	61,71	36,38	1,91	100,00
Sulawesi Tenggara	61,76	36,90	1,35	100,00
Gorontalo	59,00	39,11	1,88	100,00
Sulawesi Barat	63,95	34,47	1,58	100,00
Maluku	65,73	33,06	1,22	100,00
Maluku Utara	60,29	38,32	1,40	100,00
Papua Barat	60,73	38,15	1,12	100,00
Papua	70,01	27,93	2,06	100,00
Indonesia	61,97	36,75	1,28	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.8.3 Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023

Provinsi	Status perkawinan			Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	85,66	14,24	0,10	100,00
Sumatera Utara	83,12	16,47	0,42	100,00
Sumatera Barat	80,98	18,40	0,62	100,00
Riau	82,09	17,34	0,57	100,00
Jambi	77,10	22,29	0,61	100,00
Sumatera Selatan	75,36	23,94	0,70	100,00
Bengkulu	73,44	25,46	1,09	100,00
Lampung	75,41	23,66	0,93	100,00
Kep. Bangka Belitung	73,31	25,88	0,81	100,00
Kepulauan Riau	79,71	20,16	0,13	100,00
DKI Jakarta	86,54	13,28	NA	100,00
Jawa Barat	80,65	18,76	0,58	100,00
Jawa Tengah	75,63	23,56	0,81	100,00
DI Yogyakarta	77,58	22,00	0,42	100,00
Jawa Timur	73,61	25,35	1,04	100,00
Banten	84,01	15,34	0,65	100,00
Bali	75,20	24,45	0,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	71,07	27,09	1,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	79,97	19,63	0,40	100,00
Kalimantan Barat	73,89	25,34	0,77	100,00
Kalimantan Tengah	73,55	25,53	0,92	100,00
Kalimantan Selatan	76,82	22,34	0,83	100,00
Kalimantan Timur	79,03	19,98	0,99	100,00
Kalimantan Utara	80,51	19,07	0,42	100,00
Sulawesi Utara	75,05	23,85	1,11	100,00
Sulawesi Tengah	72,87	26,26	0,86	100,00
Sulawesi Selatan	76,89	22,01	1,09	100,00
Sulawesi Tenggara	74,77	24,76	0,48	100,00
Gorontalo	73,00	25,76	1,23	100,00
Sulawesi Barat	75,13	23,89	0,98	100,00
Maluku	78,26	21,32	0,42	100,00
Maluku Utara	71,50	27,55	0,95	100,00
Papua Barat	74,78	24,54	0,67	100,00
Papua	78,61	19,90	1,49	100,00
Indonesia	78,20	21,08	0,73	100,00

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.8.4 Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023

Provinsi	Status perkawinan			Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	66,28	33,06	0,66	100,00
Sumatera Utara	67,54	31,44	1,01	100,00
Sumatera Barat	61,29	37,35	1,36	100,00
Riau	63,96	34,62	1,42	100,00
Jambi	55,42	43,02	1,56	100,00
Sumatera Selatan	53,67	44,54	1,79	100,00
Bengkulu	53,54	44,76	1,70	100,00
Lampung	53,73	45,40	0,87	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,38	43,51	3,11	100,00
Kepulauan Riau	65,33	33,70	NA	100,00
DKI Jakarta	73,80	25,34	0,86	100,00
Jawa Barat	59,93	38,56	1,51	100,00
Jawa Tengah	50,85	47,94	1,21	100,00
DI Yogyakarta	60,26	38,07	1,67	100,00
Jawa Timur	51,08	47,25	1,67	100,00
Banten	66,11	32,93	0,97	100,00
Bali	57,49	41,44	1,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,35	47,80	2,85	100,00
Nusa Tenggara Timur	62,34	35,51	2,15	100,00
Kalimantan Barat	52,43	46,04	1,53	100,00
Kalimantan Tengah	51,93	46,61	1,46	100,00
Kalimantan Selatan	56,21	42,15	1,64	100,00
Kalimantan Timur	59,17	39,69	1,13	100,00
Kalimantan Utara	62,38	36,83	0,78	100,00
Sulawesi Utara	55,23	42,30	2,47	100,00
Sulawesi Tengah	54,85	42,80	2,36	100,00
Sulawesi Selatan	59,94	37,90	2,15	100,00
Sulawesi Tenggara	56,77	41,31	1,92	100,00
Gorontalo	56,14	42,30	1,56	100,00
Sulawesi Barat	54,69	43,02	2,28	100,00
Maluku	65,23	33,25	1,52	100,00
Maluku Utara	57,58	40,63	1,79	100,00
Papua Barat	56,99	41,29	1,72	100,00
Papua	62,21	35,71	2,07	100,00
Indonesia	58,15	40,38	1,47	100,00

Catatan :

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.8.5 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2023

Provinsi	Status perkawinan			Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	75,94	23,68	0,38	100,00
Sumatera Utara	75,43	23,86	0,71	100,00
Sumatera Barat	71,29	27,72	0,98	100,00
Riau	73,33	25,69	0,98	100,00
Jambi	66,50	32,43	1,07	100,00
Sumatera Selatan	64,66	34,10	1,24	100,00
Bengkulu	63,64	34,96	1,39	100,00
Lampung	64,79	34,31	0,90	100,00
Kep. Bangka Belitung	63,45	34,60	1,95	100,00
Kepulauan Riau	72,60	26,86	0,54	100,00
DKI Jakarta	80,00	19,48	0,53	100,00
Jawa Barat	70,55	28,41	1,03	100,00
Jawa Tengah	63,43	35,57	1,00	100,00
DI Yogyakarta	68,89	30,06	1,05	100,00
Jawa Timur	62,31	36,33	1,36	100,00
Banten	75,15	24,04	0,81	100,00
Bali	66,63	32,67	0,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	60,21	37,45	2,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,21	27,51	1,27	100,00
Kalimantan Barat	63,19	35,66	1,15	100,00
Kalimantan Tengah	62,91	35,91	1,18	100,00
Kalimantan Selatan	66,60	32,17	1,23	100,00
Kalimantan Timur	69,36	29,58	1,06	100,00
Kalimantan Utara	71,74	27,66	0,60	100,00
Sulawesi Utara	65,50	32,74	1,76	100,00
Sulawesi Tengah	63,83	34,56	1,61	100,00
Sulawesi Selatan	68,48	29,90	1,62	100,00
Sulawesi Tenggara	65,70	33,10	1,20	100,00
Gorontalo	64,70	33,90	1,40	100,00
Sulawesi Barat	64,99	33,39	1,63	100,00
Maluku	71,85	27,19	0,96	100,00
Maluku Utara	64,57	34,06	1,37	100,00
Papua Barat	66,07	32,75	1,19	100,00
Papua	70,76	27,47	1,77	100,00
Indonesia	68,29	30,61	1,10	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.9 Persentase Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,21	4,30	9,11	0,88	4,98
Sumatera Utara	6,17	7,18	12,14	0,89	6,58
Sumatera Barat	6,36	6,06	11,13	1,15	6,22
Riau	5,73	5,33	10,23	0,45	5,50
Jambi	6,27	5,40	10,60	0,53	5,68
Sumatera Selatan	5,65	8,66	14,43	0,31	7,46
Bengkulu	7,58	8,07	14,32	1,28	7,90
Lampung	7,70	7,67	14,40	0,68	7,68
Kep. Bangka Belitung	8,72	6,29	14,14	1,06	7,67
Kepulauan Riau	10,45	6,06	18,81	1,10	10,05
DKI Jakarta	5,71	-	10,86	0,82	5,71
Jawa Barat	6,96	9,26	13,74	0,71	7,39
Jawa Tengah	6,34	7,23	12,49	0,83	6,75
DI Yogyakarta	11,21	4,98	15,00	5,12	10,05
Jawa Timur	6,83	6,31	12,27	0,99	6,61
Banten	4,92	4,74	9,22	0,44	4,88
Bali	8,46	11,44	17,32	0,56	9,21
Nusa Tenggara Barat	12,64	14,77	22,58	4,71	13,64
Nusa Tenggara Timur	8,26	4,40	9,22	1,82	5,55
Kalimantan Barat	5,76	8,81	14,50	0,84	7,69
Kalimantan Tengah	9,71	9,04	17,63	0,77	9,33
Kalimantan Selatan	7,45	8,07	14,87	0,53	7,75
Kalimantan Timur	7,74	5,84	13,18	0,86	7,18
Kalimantan Utara	6,30	5,65	11,05	0,80	6,09
Sulawesi Utara	8,52	7,38	14,55	1,03	8,03
Sulawesi Tengah	6,96	6,14	12,25	0,65	6,43
Sulawesi Selatan	4,95	5,43	9,80	0,50	5,19
Sulawesi Tenggara	5,53	5,84	10,66	0,84	5,71
Gorontalo	6,48	4,82	10,45	0,52	5,56
Sulawesi Barat	5,90	5,66	10,88	0,46	5,71
Maluku	4,59	6,02	10,10	0,47	5,36
Maluku Utara	4,45	6,23	10,92	0,39	5,68
Papua Barat	7,38	10,14	16,51	1,13	8,98
Papua	10,98	14,61	23,35	2,94	13,57
Indonesia	6,81	7,27	12,90	0,95	7,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.10.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Status Tinggal Bersama		
	Tinggal sendiri	Bersama keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,73	79,96	19,30
Sumatera Utara	0,42	82,33	17,25
Sumatera Barat	0,55	73,42	26,03
Riau	0,22	80,23	19,56
Jambi	0,27	77,97	21,76
Sumatera Selatan	0,17	73,72	26,10
Bengkulu	1,19	73,57	25,24
Lampung	0,85	77,71	21,44
Kep. Bangka Belitung	0,38	79,42	20,20
Kepulauan Riau	0,34	85,69	13,98
DKI Jakarta	0,42	87,44	12,15
Jawa Barat	0,29	83,27	16,44
Jawa Tengah	0,40	70,99	28,61
DI Yogyakarta	4,92	67,82	27,25
Jawa Timur	0,47	69,57	29,96
Banten	0,10	85,47	14,43
Bali	0,47	66,13	33,40
Nusa Tenggara Barat	0,43	82,20	17,37
Nusa Tenggara Timur	3,42	67,38	29,20
Kalimantan Barat	0,48	73,97	25,55
Kalimantan Tengah	0,75	81,17	18,08
Kalimantan Selatan	0,22	83,31	16,47
Kalimantan Timur	0,70	75,92	23,38
Kalimantan Utara	0,57	78,09	21,34
Sulawesi Utara	0,62	67,76	31,63
Sulawesi Tengah	0,90	67,12	31,98
Sulawesi Selatan	0,19	71,41	28,40
Sulawesi Tenggara	0,05	69,44	30,51
Gorontalo	0,39	71,25	28,36
Sulawesi Barat	0,20	70,60	29,20
Maluku	0,82	59,68	39,50
Maluku Utara	1,06	66,58	32,35
Papua Barat	1,03	71,55	27,42
Papua	2,52	79,07	18,41
Indonesia	0,52	77,81	21,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.10.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Status Tinggal Bersama		
	Tinggal sendiri	Bersama keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,07	81,75	18,18
Sumatera Utara	0,11	82,46	17,43
Sumatera Barat	0,11	69,63	30,26
Riau	0,04	78,21	21,74
Jambi	0,05	73,10	26,85
Sumatera Selatan	0,10	74,53	25,37
Bengkulu	0,01	70,15	29,84
Lampung	0,09	75,23	24,68
Kep. Bangka Belitung	0,06	74,67	25,27
Kepulauan Riau	0,09	82,16	17,75
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	0,16	78,00	21,84
Jawa Tengah	0,21	66,46	33,33
DI Yogyakarta	0,11	51,93	47,97
Jawa Timur	0,21	60,48	39,30
Banten	0,01	68,50	31,48
Bali	0,45	68,57	30,98
Nusa Tenggara Barat	0,29	78,18	21,54
Nusa Tenggara Timur	0,11	57,74	42,15
Kalimantan Barat	0,13	71,98	27,89
Kalimantan Tengah	0,17	80,72	19,11
Kalimantan Selatan	0,14	74,96	24,90
Kalimantan Timur	0,90	70,31	28,79
Kalimantan Utara	0,11	72,32	27,57
Sulawesi Utara	0,21	64,42	35,38
Sulawesi Tengah	0,04	64,04	35,92
Sulawesi Selatan	0,09	58,83	41,08
Sulawesi Tenggara	0,12	63,68	36,20
Gorontalo	0,01	55,85	44,14
Sulawesi Barat	0,15	66,28	33,57
Maluku	0,15	63,62	36,23
Maluku Utara	0,09	59,42	40,48
Papua Barat	0,67	75,47	23,86
Papua	3,64	88,49	7,87
Indonesia	0,24	70,38	29,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.10.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Status Tinggal Bersama		
	Tinggal sendiri	Bersama keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,31	81,11	18,58
Sumatera Utara	0,29	82,38	17,33
Sumatera Barat	0,34	71,61	28,05
Riau	0,12	79,06	20,82
Jambi	0,12	74,65	25,23
Sumatera Selatan	0,13	74,21	25,66
Bengkulu	0,44	71,39	28,17
Lampung	0,35	76,08	23,57
Kep. Bangka Belitung	0,24	77,37	22,39
Kepulauan Riau	0,31	85,36	14,32
DKI Jakarta	0,42	87,44	12,15
Jawa Barat	0,26	82,28	17,45
Jawa Tengah	0,31	68,91	30,77
DI Yogyakarta	4,03	64,87	31,10
Jawa Timur	0,36	65,76	33,88
Banten	0,08	81,86	18,06
Bali	0,47	66,74	32,79
Nusa Tenggara Barat	0,37	80,31	19,33
Nusa Tenggara Timur	1,09	60,60	38,31
Kalimantan Barat	0,26	72,71	27,03
Kalimantan Tengah	0,42	80,91	18,67
Kalimantan Selatan	0,18	79,19	20,63
Kalimantan Timur	0,76	74,26	24,98
Kalimantan Utara	0,42	76,19	23,39
Sulawesi Utara	0,44	66,34	33,22
Sulawesi Tengah	0,34	65,13	34,53
Sulawesi Selatan	0,14	65,20	34,67
Sulawesi Tenggara	0,09	66,08	33,83
Gorontalo	0,18	62,75	37,07
Sulawesi Barat	0,16	67,19	32,65
Maluku	0,46	61,80	37,74
Maluku Utara	0,39	61,65	37,96
Papua Barat	0,82	73,82	25,36
Papua	3,32	85,81	10,88
Indonesia	0,41	74,83	24,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.11.1 Sampling Error Persentase Pemuda yang Berstatus Cerai Hidup/Cerai Mati menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,30	0,11	0,49	33,05	0,42	0,26	0,59	19,63	0,38	0,25	0,51	16,90
Sumatera Utara	0,84	0,52	1,16	19,40	0,52	0,28	0,75	23,05	0,71	0,50	0,92	15,27
Sumatera Barat	0,80	0,44	1,17	22,93	1,18	0,81	1,55	16,19	0,98	0,72	1,24	13,53
Riau	0,81	0,25	1,38	35,63	1,10	0,69	1,51	18,91	0,98	0,64	1,32	17,50
Jambi	0,55	0,13	0,98	39,17	1,31	0,84	1,79	18,48	1,07	0,72	1,42	16,77
Sumatera Selatan	1,10	0,31	1,89	36,74	1,33	0,91	1,75	15,98	1,24	0,84	1,64	16,55
Bengkulu	1,02	0,41	1,63	30,35	1,60	1,07	2,14	17,02	1,39	0,99	1,80	14,90
Lampung	0,90	0,30	1,51	34,10	0,90	0,55	1,25	19,71	0,90	0,59	1,21	17,46
Kep. Bangka Belitung	1,85	1,02	2,68	22,96	2,08	0,91	3,25	28,62	1,95	1,26	2,64	18,09
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	54,68	1,07	0,26	1,88	38,51	0,54	0,06	1,03	45,38
DKI Jakarta	0,53	0,24	0,81	27,83	-	-	-	-	0,53	0,24	0,81	27,83
Jawa Barat	0,88	0,66	1,10	12,55	1,70	1,27	2,13	13,03	1,03	0,84	1,23	9,58
Jawa Tengah	0,97	0,73	1,20	12,34	1,05	0,80	1,30	12,05	1,00	0,83	1,17	8,64
DI Yogyakarta	1,10	0,51	1,68	27,20	0,86	0,16	1,55	41,47	1,05	0,56	1,54	23,93
Jawa Timur	1,33	1,03	1,64	11,55	1,39	1,10	1,68	10,61	1,36	1,14	1,57	8,01
Banten	0,84	0,45	1,23	23,50	0,69	0,27	1,10	30,81	0,81	0,49	1,12	20,03
Bali	0,80	0,41	1,19	24,71	0,40	0,07	0,72	41,70	0,70	0,40	1,00	21,99
Nusa Tenggara Barat	2,13	1,12	3,14	24,22	2,59	1,54	3,65	20,73	2,35	1,62	3,07	15,84
Nusa Tenggara Timur	1,16	0,50	1,81	29,05	1,32	1,01	1,63	12,02	1,27	0,98	1,56	11,77
Kalimantan Barat	1,12	0,50	1,73	28,11	1,17	0,70	1,64	20,55	1,15	0,77	1,52	16,60
Kalimantan Tengah	1,16	0,58	1,74	25,48	1,20	0,61	1,80	25,35	1,18	0,76	1,61	18,17
Kalimantan Selatan	0,84	0,32	1,36	31,47	1,63	1,10	2,17	16,62	1,23	0,86	1,60	15,39
Kalimantan Timur	1,02	0,50	1,53	25,78	1,15	0,25	2,05	39,75	1,06	0,61	1,51	21,64
Kalimantan Utara	0,56	0,14	0,98	38,69	0,67	0,16	1,17	38,50	0,60	0,27	0,93	28,23
Sulawesi Utara	1,66	0,97	2,34	21,11	1,91	1,23	2,59	18,06	1,76	1,28	2,25	14,11
Sulawesi Tengah	1,36	0,46	2,27	33,78	1,75	1,11	2,39	18,76	1,61	1,09	2,14	16,58
Sulawesi Selatan	1,33	0,95	1,72	14,75	1,91	1,44	2,39	12,68	1,62	1,31	1,92	9,64
Sulawesi Tenggara	1,00	0,10	1,91	45,93	1,35	0,91	1,78	16,66	1,20	0,75	1,66	19,31
Gorontalo	0,80	0,11	1,49	44,10	1,88	1,16	2,60	19,55	1,40	0,89	1,90	18,34
Sulawesi Barat	1,79	0,14	3,45	47,13	1,58	0,82	2,34	24,44	1,63	0,93	2,32	21,74
Maluku	0,67	0,21	1,13	35,11	1,22	0,71	1,72	21,13	0,96	0,62	1,30	18,13
Maluku Utara	1,30	0,49	2,11	31,86	1,40	0,90	1,89	18,11	1,37	0,94	1,79	15,86
Papua Barat	1,28	0,45	2,11	33,02	1,12	0,72	1,52	18,31	1,19	0,77	1,61	18,07
Papua	1,05	0,48	1,62	27,73	2,06	1,52	2,59	13,23	1,77	1,35	2,19	11,98
Indonesia	0,97	0,88	1,06	4,79	1,28	1,19	1,37	3,58	1,10	1,03	1,16	3,05

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.11.2 Sampling Error Persentase Pemuda yang Berstatus Cerai Hidup/Cerai Mati menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,10	0,03	0,17	37,77	0,66	0,42	0,90	18,51	0,38	0,25	0,51	16,90
Sumatera Utara	0,42	0,18	0,65	28,30	1,01	0,65	1,38	18,32	0,71	0,50	0,92	15,27
Sumatera Barat	0,62	0,31	0,93	25,29	1,36	0,95	1,77	15,38	0,98	0,72	1,24	13,53
Riau	0,57	0,18	0,96	34,91	1,42	0,85	1,99	20,43	0,98	0,64	1,32	17,50
Jambi	0,61	0,26	0,95	28,89	1,56	0,92	2,19	20,74	1,07	0,72	1,42	16,77
Sumatera Selatan	0,70	0,43	0,97	19,72	1,79	1,03	2,56	21,71	1,24	0,84	1,64	16,55
Bengkulu	1,09	0,56	1,63	24,88	1,70	1,07	2,34	18,98	1,39	0,99	1,80	14,90
Lampung	0,93	0,53	1,33	21,81	0,87	0,50	1,23	21,44	0,90	0,59	1,21	17,46
Kep. Bangka Belitung	0,81	0,28	1,34	33,39	3,11	1,87	4,34	20,27	1,95	1,26	2,64	18,09
Kepulauan Riau	0,13	0,01	0,25	47,05	NA	NA	NA	51,37	0,54	0,06	1,03	45,38
DKI Jakarta	NA	NA	NA	50,25	0,86	0,32	1,39	31,83	0,53	0,24	0,81	27,83
Jawa Barat	0,58	0,40	0,76	16,14	1,51	1,17	1,85	11,55	1,03	0,84	1,23	9,58
Jawa Tengah	0,81	0,60	1,01	13,26	1,21	0,95	1,47	10,88	1,00	0,83	1,17	8,64
DI Yogyakarta	0,42	0,02	0,83	48,42	1,67	0,80	2,54	26,57	1,05	0,56	1,54	23,93
Jawa Timur	1,04	0,75	1,33	14,24	1,67	1,36	1,98	9,41	1,36	1,14	1,57	8,01
Banten	0,65	0,27	1,03	29,56	0,97	0,44	1,49	27,53	0,81	0,49	1,12	20,03
Bali	0,36	0,04	0,68	45,97	1,07	0,54	1,59	25,26	0,70	0,40	1,00	21,99
Nusa Tenggara Barat	1,84	1,13	2,55	19,61	2,85	1,69	4,01	20,73	2,35	1,62	3,07	15,84
Nusa Tenggara Timur	0,40	0,11	0,69	36,64	2,15	1,65	2,65	11,84	1,27	0,98	1,56	11,77
Kalimantan Barat	0,77	0,36	1,17	27,12	1,53	0,98	2,09	18,50	1,15	0,77	1,52	16,60
Kalimantan Tengah	0,92	0,43	1,40	26,88	1,46	0,83	2,08	21,80	1,18	0,76	1,61	18,17
Kalimantan Selatan	0,83	0,38	1,29	27,78	1,64	1,06	2,22	18,10	1,23	0,86	1,60	15,39
Kalimantan Timur	0,99	0,28	1,70	36,38	1,13	0,55	1,71	26,18	1,06	0,61	1,51	21,64
Kalimantan Utara	0,42	0,07	0,77	42,79	0,78	0,23	1,33	35,74	0,60	0,27	0,93	28,23
Sulawesi Utara	1,11	0,52	1,69	26,87	2,47	1,69	3,26	16,21	1,76	1,28	2,25	14,11
Sulawesi Tengah	0,86	0,41	1,32	26,99	2,36	1,42	3,29	20,25	1,61	1,09	2,14	16,58
Sulawesi Selatan	1,09	0,74	1,45	16,56	2,15	1,66	2,65	11,76	1,62	1,31	1,92	9,64
Sulawesi Tenggara	0,48	0,24	0,72	25,37	1,92	1,06	2,78	22,93	1,20	0,75	1,66	19,31
Gorontalo	1,23	0,55	1,92	28,24	1,56	0,80	2,33	25,07	1,40	0,89	1,90	18,34
Sulawesi Barat	0,98	0,25	1,70	37,83	2,28	1,32	3,25	21,55	1,63	0,93	2,32	21,74
Maluku	0,42	0,05	0,79	44,82	1,52	0,93	2,12	19,98	0,96	0,62	1,30	18,13
Maluku Utara	0,95	0,50	1,40	24,15	1,79	1,08	2,50	20,31	1,37	0,94	1,79	15,86
Papua Barat	0,67	0,14	1,21	40,70	1,72	1,02	2,42	20,68	1,19	0,77	1,61	18,07
Papua	1,49	0,95	2,03	18,41	2,07	1,46	2,69	15,14	1,77	1,35	2,19	11,98
Indonesia	0,73	0,65	0,80	5,06	1,47	1,36	1,58	3,73	1,10	1,03	1,16	3,05

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.12 Sampling Error Persentase Pemuda yang Menjadi Kepala Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	9,11	8,08	10,13	5,75	0,88	0,50	1,25	21,70	4,98	4,41	5,55	5,84
Sumatera Utara	12,14	11,10	13,18	4,38	0,89	0,49	1,28	22,62	6,58	6,04	7,13	4,25
Sumatera Barat	11,13	9,64	12,61	6,81	1,15	0,71	1,59	19,53	6,22	5,45	6,98	6,27
Riau	10,23	9,03	11,43	5,99	0,45	0,21	0,68	27,35	5,50	4,88	6,11	5,71
Jambi	10,60	9,23	11,98	6,63	0,53	0,22	0,84	30,12	5,68	4,97	6,39	6,38
Sumatera Selatan	14,43	12,94	15,92	5,28	0,31	0,15	0,46	26,44	7,46	6,72	8,20	5,05
Bengkulu	14,32	12,50	16,13	6,47	1,28	0,50	2,06	31,12	7,90	6,90	8,89	6,44
Lampung	14,40	12,84	15,97	5,53	0,68	0,23	1,14	34,05	7,68	6,88	8,48	5,33
Kep. Bangka Belitung	14,14	12,04	16,24	7,58	1,06	0,50	1,61	26,83	7,67	6,58	8,76	7,24
Kepulauan Riau	18,81	14,95	22,66	10,46	1,10	0,22	1,88	36,26	10,05	8,03	12,08	10,28
DKI Jakarta	10,86	9,17	12,55	7,94	0,82	0,36	1,29	28,59	5,71	4,83	6,58	7,80
Jawa Barat	13,74	12,79	14,70	3,54	0,71	0,51	0,91	14,30	7,39	6,89	7,89	3,43
Jawa Tengah	12,49	11,65	13,33	3,42	0,88	0,62	1,03	12,55	6,75	6,32	7,17	3,23
DI Yogyakarta	15,00	12,03	17,97	10,10	5,12	3,37	6,87	17,42	10,05	8,34	11,76	8,68
Jawa Timur	12,27	11,43	13,12	3,51	0,99	0,76	1,22	11,84	6,61	6,18	7,04	3,32
Banten	9,22	7,89	10,55	7,34	0,44	0,18	0,71	30,11	4,88	4,22	5,54	6,86
Bali	17,32	14,87	19,76	7,21	0,56	0,18	0,93	34,77	9,21	7,95	10,47	6,96
Nusa Tenggara Barat	22,58	20,12	25,04	5,56	4,71	3,49	5,94	13,26	13,64	12,34	14,94	4,88
Nusa Tenggara Timur	9,22	8,11	10,34	6,16	1,82	0,68	2,96	31,86	5,55	4,71	6,39	7,71
Kalimantan Barat	14,50	12,98	16,03	5,36	0,84	0,47	1,20	22,09	7,69	6,93	8,45	5,04
Kalimantan Tengah	17,63	15,69	19,58	5,62	0,77	0,37	1,16	26,26	9,33	8,35	10,31	5,37
Kalimantan Selatan	14,87	13,10	16,63	6,05	0,58	0,23	0,82	28,55	7,75	6,89	8,62	5,70
Kalimantan Timur	13,18	11,36	14,99	7,02	0,86	0,45	1,26	24,29	7,18	6,23	8,13	6,78
Kalimantan Utara	11,05	8,21	13,78	12,62	0,80	0,28	1,32	33,26	6,09	4,69	7,48	11,70
Sulawesi Utara	14,55	12,89	16,21	5,82	1,08	0,49	1,57	26,66	8,03	7,13	8,93	5,71
Sulawesi Tengah	12,25	10,47	14,02	7,39	0,65	0,31	0,98	26,41	6,43	5,51	7,34	7,26
Sulawesi Selatan	9,80	8,70	10,90	5,73	0,50	0,31	0,70	19,61	5,19	4,64	5,73	5,36
Sulawesi Tenggara	10,66	9,16	12,15	7,14	0,84	0,55	1,12	17,31	5,71	4,97	6,44	6,56
Gorontalo	10,45	8,51	12,40	9,50	0,52	0,11	0,93	40,54	5,56	4,59	6,54	8,96
Sulawesi Barat	10,88	9,10	12,65	8,32	0,46	0,08	0,85	41,98	5,71	4,85	6,57	7,71
Maluku	10,10	8,36	11,84	8,79	0,47	0,23	0,72	26,69	5,36	4,46	6,26	8,57
Maluku Utara	10,92	9,14	12,69	8,29	0,39	0,12	0,66	35,75	5,68	4,78	6,57	8,03
Papua Barat	16,51	14,35	18,68	6,69	1,13	0,74	1,52	17,50	8,98	7,87	10,09	6,31
Papua	23,35	21,36	25,33	4,34	2,94	2,20	3,68	12,85	13,57	12,48	14,67	4,10
Indonesia	12,90	12,59	13,20	1,19	0,95	0,87	1,04	4,41	7,00	6,84	7,15	1,14

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Bab 3. Pendidikan

<https://www.bps.go.id>

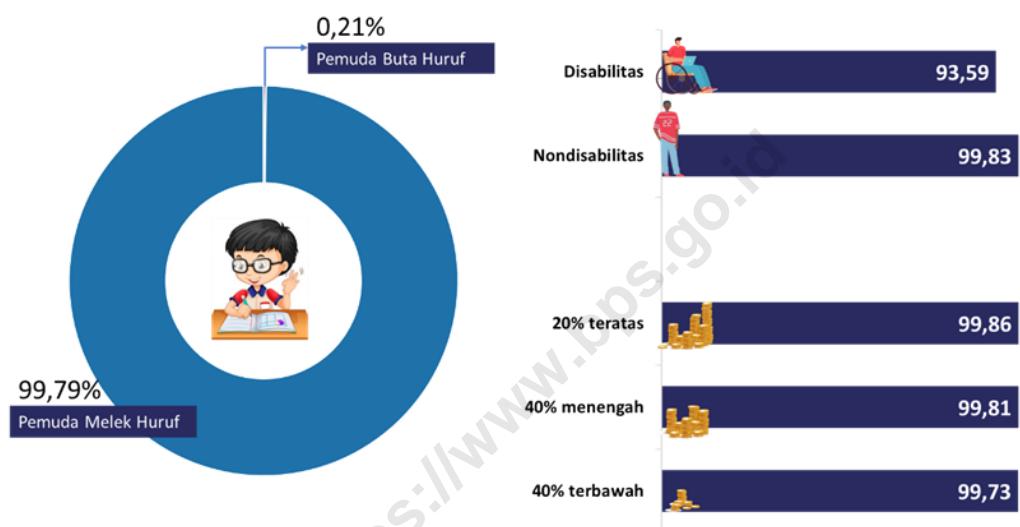
Pembangunan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia. Bagi penduduk usia muda, pendidikan menjadi hal penting untuk kelangsungan hidup di masa depan. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Gambaran mengenai kondisi pendidikan pemuda Indonesia akan dikupas lebih dalam pada bagian ini, antara lain kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, pendidikan tinggi yang ditamatkan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.1 Kemampuan Baca Tulis Pemuda

Keterampilan literasi adalah kebutuhan yang perlu dimiliki oleh siapa pun untuk dapat bersaing secara global, termasuk oleh pemuda. Literasi merupakan keterampilan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, menghitung, dan menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini diperlukan kemampuan dasar dalam baca dan tulis. Dengan pondasi kemampuan baca tulis, seseorang dapat mempertajam penguasaan keterampilan literasinya, yang kemudian membawa pengaruh juga pada kompetensi dan kualitas karakternya.

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, tingkat kemampuan baca tulis tercermin melalui Angka Melek Huruf (AMH). Pada tahun 2023, AMH pemuda sebesar 99,79 persen, artinya, sekitar 99,79 persen pemuda dapat membaca dan menulis. AMH pemuda di perkotaan dan perdesaan tidak

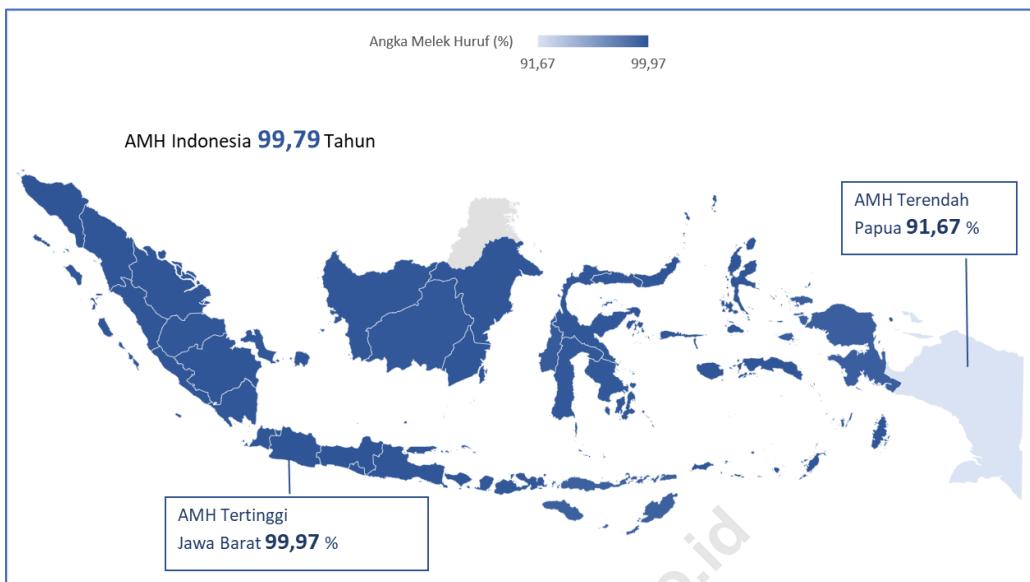
menunjukkan perbedaan yang nyata, yaitu 99,95 persen di perkotaan dan 99,55 persen di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda di perkotaan maupun perdesaan telah mendapatkan pendidikan dasar yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Namun demikian masih ditemukan adanya kesenjangan capaian AMH pemuda penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,24 persen poin.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Indonesia menurut Status Disabilitas dan Kelompok Pengeluaran, 2023

Meskipun secara nasional capaian AMH pemuda di Indoensia sudah bagus tetapi terdapat beberapa provinsi yang capaian AMH-nya masih di bawah angka nasional. Gambar 3.2 menunjukkan persebaran nilai AMH pemuda di setiap provinsi. Terlihat bahwa di Provinsi Jawa Barat hampir seluruh pemuda di Jawa Barat dapat membaca dan menulis. Sementara itu, sekitar 8,33 persen pemuda di Papua tidak dapat membaca dan menulis. Selain Provinsi Papua, terdapat 4 provinsi lain dengan AMH pemuda di bawah angka nasional yaitu provinsi Kalimantan Utara (99,73 persen), Sulawesi Barat (99,64 persen), Nusa Tenggara Timur (99,28 persen) dan Papua Barat (99,37 persen).



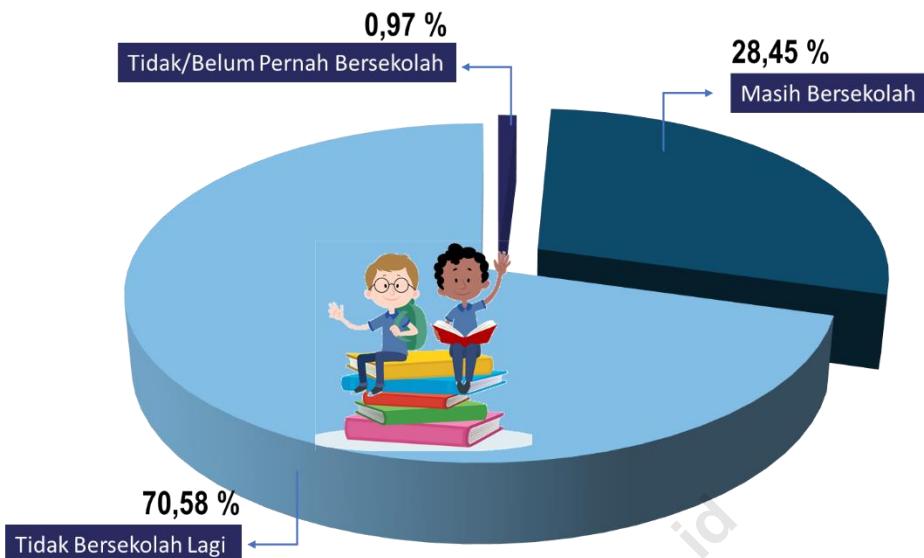
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.2 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda menurut Provinsi, 2023

3.2 Partisipasi Sekolah Pemuda

Pendidikan merupakan hak asasi seluruh warga negara Indonesia. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan. Guna pemenuhan hak tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan mutu dan jumlah fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah memberikan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap pemuda. Tingkat partisipasi sekolah menjelaskan status pemuda dalam jenjang pendidikan formal dan non formal.

Pada tahun 2023, sebanyak 28,45 persen pemuda masih bersekolah, baik di penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta. Angka ini menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya (27,30 persen). Sementara itu, masih terdapat 0,97 persen pemuda yang tidak/belum pernah sekolah dan 70,58 persen pemuda yang tidak bersekolah lagi.

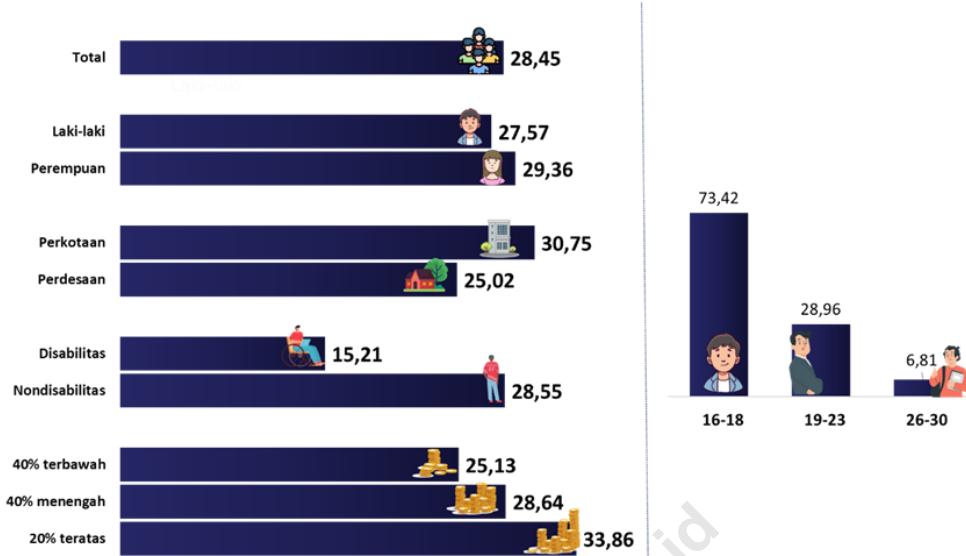


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.3 Partisipasi Sekolah Pemuda, 2023

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pemuda adalah persentase pemuda yang bersekolah terhadap total seluruh pemuda. Penghitungan indikator APS tersebut tidak mempertimbangkan kelas dan jenjang pendidikan pemuda. Secara umum, nilai APS pemuda (16-30 tahun) sebesar 28,45 persen. Semakin bertambahnya umur pemuda, nilai APS semakin menurun. APS tertinggi terdapat pada kelompok umur 16-18 tahun (73,42 persen), diikuti kelompok umur 19-23 tahun (28,96 persen), dan 24-30 tahun (6,81 persen).

Berdasarkan klasifikasi desa, terdapat kesenjangan antara APS pemuda yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan. APS pemuda yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (30,75 persen berbanding 25,02 persen). Kesenjangan yang cukup besar terlihat dari karakteristik status disabilitas. APS pemuda penyandang disabilitas hanya setengah capaian APS pemuda bukan penyandang disabilitas (15,21 persen berbanding 28,55 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

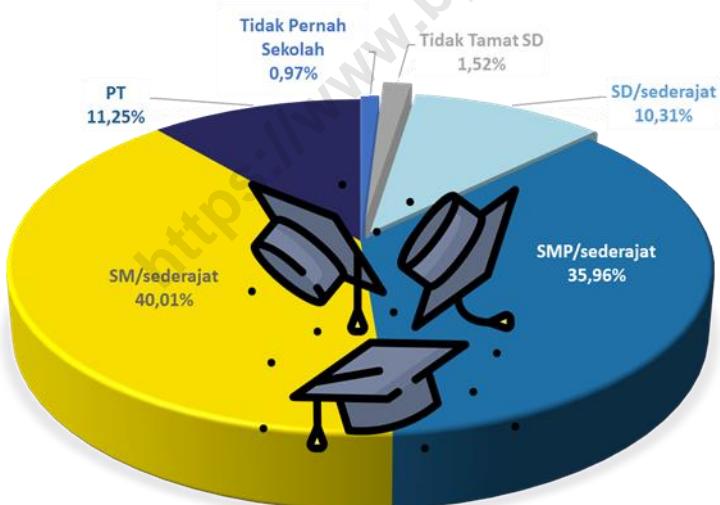
Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Karakteristik, 2023

Terdapat keterkaitan status ekonomi rumah tangga terhadap APS pemuda. Status ekonomi dalam hal ini digambarkan dengan distribusi pendapatan rumah tangga. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa nilai APS pemuda pada golongan 20 persen teratas lebih besar dibandingkan APS pemuda pada golongan 40 persen terbawah (33,86 persen berbanding 25,13 persen). Pemerintah telah berupaya memberikan berbagai program sebagai upaya mempertahankan anak usia sekolah agar tetap berada di bangku sekolah. Namun tak dapat dipungkiri angka partisipasi sekolah pada status ekonomi terbawah masih tetap tertinggal. Program sekolah gratis masih terfokus pada jenjang pendidikan dasar, sementara itu semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, biaya pendidikan yang dibutuhkan juga semakin besar. Oleh karena itu, masalah biaya masih menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk mengenyam pendidikan khususnya bagi pemuda yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu (Dewi & Indrayani, 2021).

3.3 Tingkat Pendidikan Pemuda

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasi muda. Sementara itu, pendidikan menjadi suatu usaha terencana melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dan proses pembelajaran sehingga peserta didik termasuk pemuda, mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya di berbagai bidang dan meningkatkan kualitasnya. Melalui sistem pendidikan yang baik diharapkan akan tercipta SDM pemuda yang unggul dan memamjukan bangsa.

Tingkat pendidikan pemuda dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Pada tahun 2023, sebanyak 40,01 persen pemuda tamat SMA/sederajat, 35,96 persen pemuda tamat SMP/sederajat, dan 11,25 persen pemuda tamat perguruan tinggi. Sementara itu, sebanyak 12,80 persen pemuda menamatkan pendidikan jenjang SD/sederajat ke bawah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.5 Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Terdapat perbedaan tingkat pendidikan yang cukup nyata pada pemuda yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Berdasarkan klasifikasi desa, mayoritas pemuda di perkotaan tamat SMA/sederajat (44,19 persen) sementara pemuda di perdesaan mayoritas hanya tamat SMP/sederajat (39,51 persen). Adapun jika dilihat berdasarkan status disabilitas, pemuda bukan penyandang

disabilitas mayoritas menamatkan pendidikan SMA/sederajat (40,15 persen) dan pemuda penyandang disabilitas mayoritas hanya tamat pendidikan SMP/sederajat (26,03 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

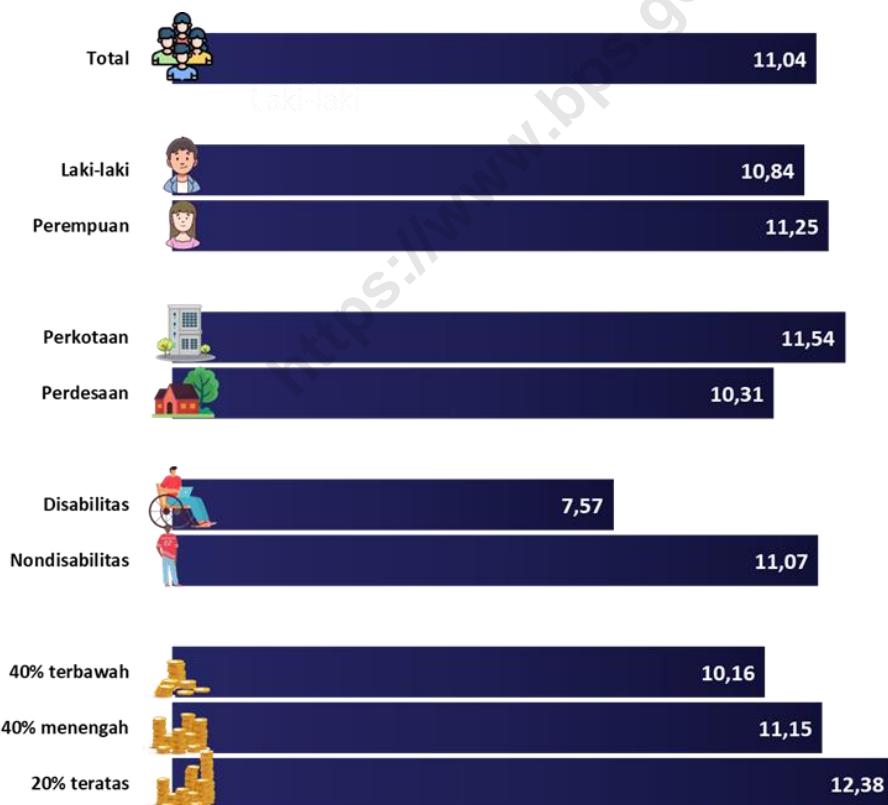
Gambar 3.6 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda menurut Karakteristik, 2023

Pendidikan tinggi lebih banyak dicapai oleh pemuda yang tinggal pada rumah tangga kelompok pengeluaran tinggi. Hal ini terlihat pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, mayoritas pemuda hanya mampu menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP/Sederajat (41,22 persen). Pola tersebut berbeda dengan kelompok pengeluaran lainnya. Pada kelompok 40 persen menengah maupun 20 persen teratas, mayoritas pemuda mampu menamatkan pendidikan SM/sederajat (42,55 persen dan 45,06 persen). Lebih lanjut, persentase pemuda pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang tamat perguruan tinggi sebesar 21,74 persen. Persentase tersebut empat kali lebih besar dibandingkan pemuda pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang tamat perguruan tinggi (5,79 persen).

3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda

Rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi nilai rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

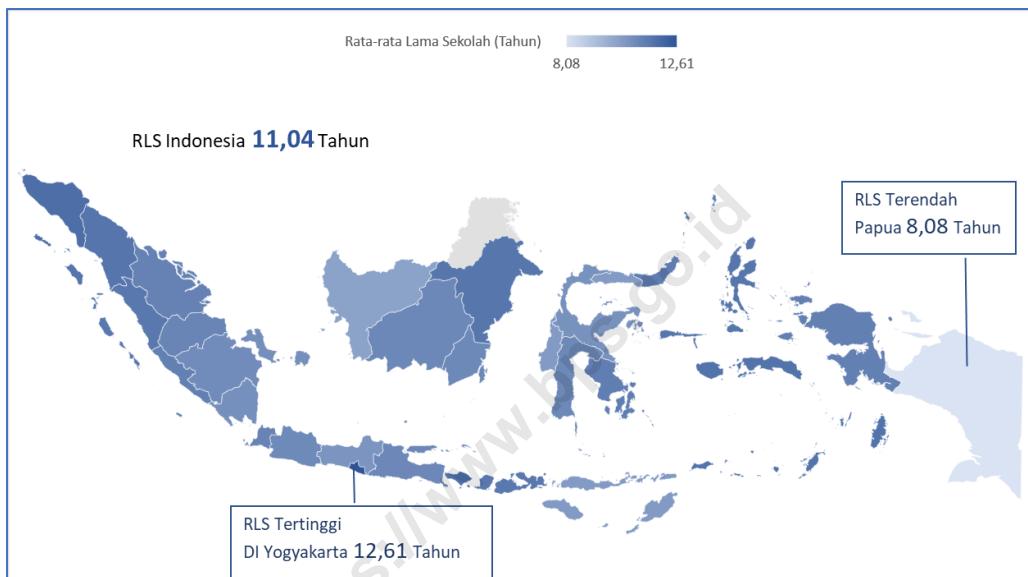
Secara umum, rata-rata lama sekolah pemuda Indonesia tahun 2023 sebesar 11,04 tahun, atau mampu menyelesaikan pendidikan sampai kelas XI pada jenjang SM/sederajat. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan rata-rata lama sekolah tahun 2022 yang mencapai 10,94 tahun. Sementara itu, pemuda di perkotaan bersekolah satu tahun lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (11,54 tahun berbanding 10,31 tahun).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.7 Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Karakteristik, 2023

Kesenjangan cukup besar terlihat dari status disabilitas pemuda. Rata-rata lama sekolah pemuda penyandang disabilitas masih menunjukkan gap yang jauh dibanding pemuda bukan penyandang disabilitas (7,57 tahun berbanding 11,07 tahun). Jika dilihat dari distribusi pengeluaran rumah tangga, pemuda pada kelompok 20 persen teratas mengenyam pendidikan di bangku sekolah paling lama dibandingkan kelompok lainnya, yaitu mencapai kelas XII SMA/sederajat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

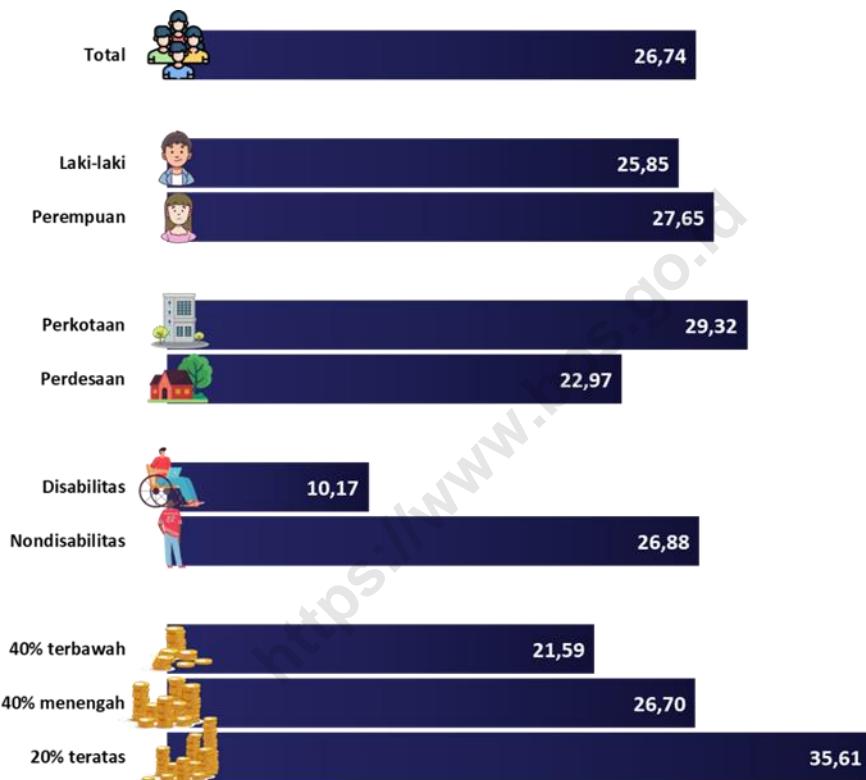
Gambar 3.8 Rata-rata Lama Sekolah Pemuda menurut Provinsi, 2023

Pemuda Indonesia juga dihadapkan pada disparitas pencapaian lama pendidikan berdasarkan wilayah. Sesuai dengan julukannya sebagai "Kota Pelajar", Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki rata-rata lama sekolah pemuda tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 12,61 tahun atau rata-rata pemuda mampu bersekolah sampai lulus SM/sederajat, sedangkan rata-rata lama sekolah terendah berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 8,08 tahun atau rata-rata pemuda mampu bersekolah sampai kelas 8 SMP/sederajat.

3.5 Pendidikan dan Pelatihan Kerja untuk Pemuda

Pengembangan dan pemberian bekal bekerja untuk pemuda tidak semua dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Pemberian bekal bekerja juga perlu difasilitasi melalui pelatihan nonformal dan informal. Pada tahun 1999, ILO dan

UNESCO menetapkan pendidikan dan pelatihan kerja atau *Technical and Vocational Education and Training* (TVET) sebagai konsep pendidikan dan pelatihan teknikal dan vokasional, yang meliputi pendidikan dan pelatihan formal, nonformal, dan informal untuk dunia kerja. Fokus dari TVET adalah proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan teori dan kemampuan praktis sekaligus untuk dunia kerja (Sudira, 2017).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Gambar 3.9 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Nonformal dalam 12 Bulan Terakhir, 2021

TVET pemuda diukur dari indikator tingkat partisipasi pemuda dalam pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal dalam 12 bulan terakhir. Indikator ini dapat menunjukkan bahwa seberapa besar tingkat partisipasi pemuda dalam pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya untuk memasuki dunia kerja. Pada tahun 2021, terdapat sekitar 1 dari 4 orang pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal.

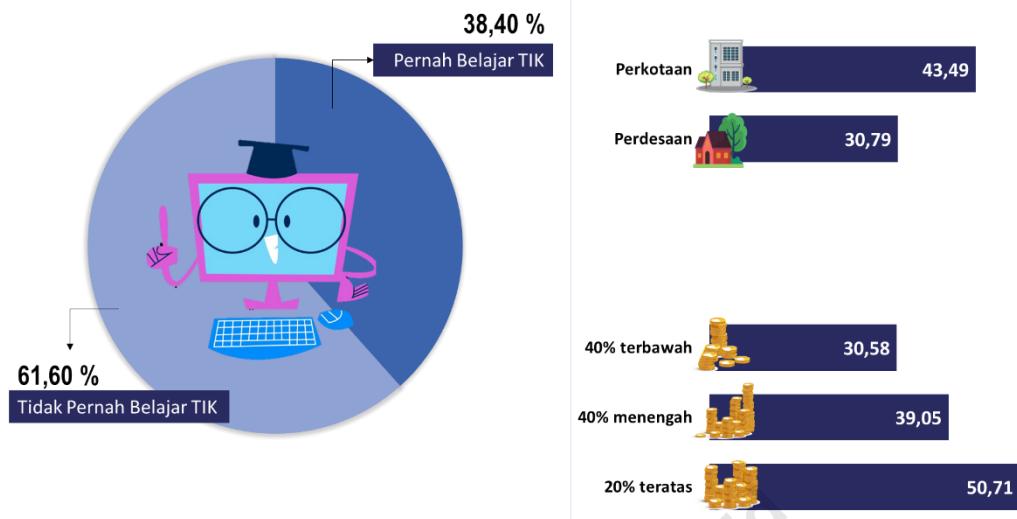
Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, terdapat 74,06 persen pemuda umur 16-18 tahun yang pernah berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Sementara itu, tingkat partisipasi pemuda bukan penyandang disabilitas jauh lebih tinggi dibandingkan pemuda penyandang disabilitas (26,88 persen berbanding 10,17 persen).

Gambar 3.9 juga menunjukkan adanya hubungan yang positif antara karakteristik ekonomi rumah tangga terhadap partisipasi pemuda dalam pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi golongan pengeluaran rumah tangga, partisipasi pemuda dalam pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal semakin meningkat.

3.6 Pemuda dan Teknologi

Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih berpengaruh terhadap perkembangan generasi muda. Perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam akses informasi maupun layanan-layanan kebutuhan manusia. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital juga memberikan dampak negatif yang mengancam, seperti tindak kejahatan yang mudah terfasilitasi, *game online* yang merusak mental generasi muda, mudahnya paparan pornografi, dan lainnya (Setiawan, 2017). Tentunya ini menjadi tantangan utama generasi muda untuk lebih bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.

Susenas 2023 mengumpulkan dua jenis informasi terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu pengalaman belajar keterampilan TIK dan akses terhadap TIK. Pada tahun 2023, terdapat 38,40 persen pemuda yang pernah belajar keterampilan TIK baik secara formal di sekolah maupun nonformal di tempat kursus/yang memiliki kurikulum/sertifikat. Berdasarkan klasifikasi desa, terdapat ketimpangan antara pemuda perkotaan dan perdesaan yang pernah belajar TIK. Selain itu, semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, persentase pemuda yang pernah belajar TIK juga semakin besar. Lebih dari separuh pemuda pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas pernah belajar TIK.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.10 Persentase Pemuda Yang Pernah Belajar TIK, 2023

Pemuda yang mengakses TIK terutama telepon seluler (HP) dan internet menunjukkan peningkatan dalam empat tahun terakhir. Gambar 3.11 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, perkembangan indikator TIK yang paling tinggi terlihat pada persentase pemuda yang menggunakan HP yaitu mencapai 96,28 persen. Peningkatan persentase penggunaan HP tersebut diikuti juga dengan peningkatan persentase pemuda yang menggunakan internet (94,16 persen). Sementara itu, persentase pemuda yang menggunakan komputer masih rendah (24,11 persen).

Telepon seluler (HP) merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi komunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, HP menjadi sebuah kebutuhan yang menyertai aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama pemuda. Selain sebagai alat komunikasi, dengan disertai fasilitas internet, HP menjadi media yang tepat untuk proses belajar jarak jauh, alat untuk mencari informasi, dan menambah wawasan pemuda (Maknuni, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

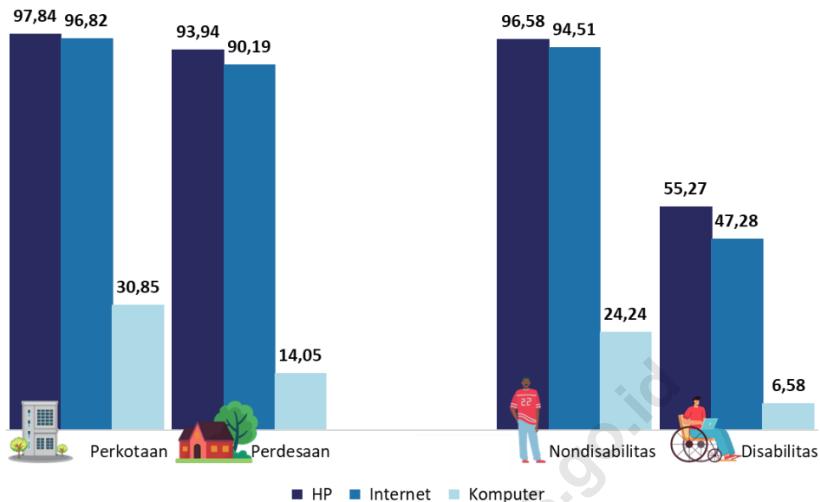
Gambar 3.11 Persentase Pemuda menurut Akses Teknologi dan Informasi, 2019-2023

Gambar 3.12 menunjukkan persentase penggunaan HP pada pemuda berdasarkan klasifikasi desa dan status disabilitas. Berdasarkan klasifikasi desa, terdapat sedikit gap yaitu persentase pemuda di perkotaan yang menggunakan HP lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (97,84 persen berbanding 93,94 persen). Ketimpangan yang besar terjadi pada disagregasi menurut status disabilitas. Persentase pemuda bukan penyandang disabilitas yang menggunakan HP jauh lebih besar dibandingkan pemuda penyandang disabilitas (96,58 persen berbanding 55,27 persen).

Penggunaan komputer seperti multimedia dan internet memberikan kesempatan bagi pemuda dan pelajar untuk memperoleh ilmu dan wawasan yang lebih luas. Selain itu, komputer juga dapat memudahkan proses penghitungan, pengolahan data, hingga media aplikasi pendukung kebutuhan administrasi.

Penggunaan komputer oleh pemuda di perkotaan sekitar dua kali lebih besar dibandingkan pemuda di perdesaan (30,85 persen berbanding 14,05 persen). Keterbatasan fasilitas komputer berupa PC/laptop/notebook/tablet di perdesaan dapat menjadi salah satu penyebabnya. Adanya ketimpangan yang cukup besar dalam penggunaan komputer juga terlihat dari status disabilitas pemuda. Persentase pemuda bukan penyandang disabilitas yang menggunakan

komputer hampir 4 kali lebih besar dari persentase pemuda penyandang disabilitas (24,24 persen berbanding 6,58 persen).

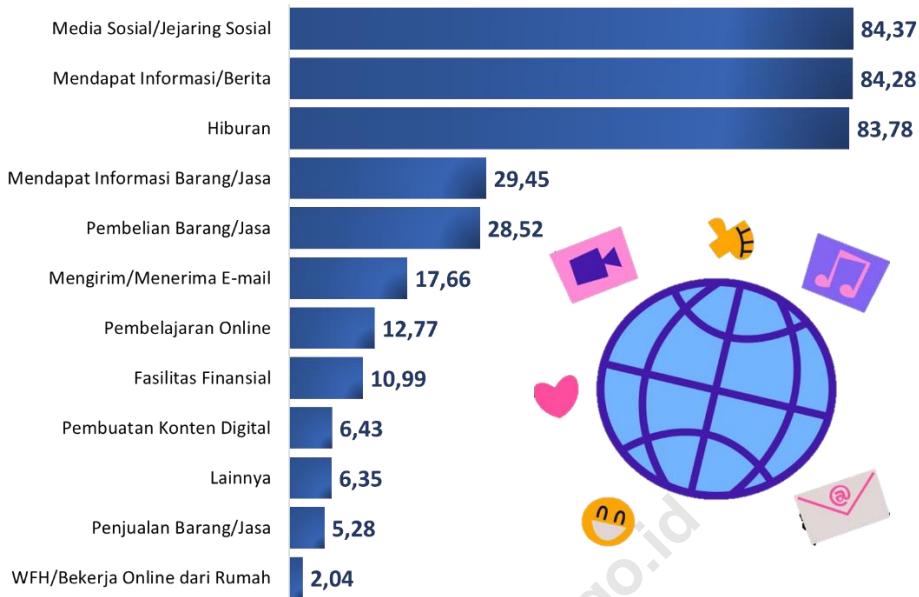


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.12 Persentase Penggunaan HP, Penggunaan Komputer, dan Akses Internet pada Pemuda menurut Klasifikasi Desa dan Status Disabilitas, 2023

Dilihat dari sisi penggunanya, internet saat ini sudah digunakan oleh berbagai kalangan, terutama pemuda. Sekitar 94,16 persen pemuda menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan klasifikasi desa, terjadi pola gap yang sama dengan penggunaan HP dan komputer, yaitu akses internet oleh pemuda di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan (96,82 persen berbanding 90,19 persen). Data tersebut menggambarkan bahwa layanan infrastruktur internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kesenjangan akses internet juga terjadi pada pemuda bukan penyandang disabilitas dibandingkan dengan pemuda penyandang disabilitas (94,51 persen berbanding 47,28 persen). Hal ini memberi gambaran adanya keterbatasan pemuda penyandang disabilitas terhadap akses teknologi. Sementara itu, jika dilihat dari tujuan penggunaan internet, mayoritas pemuda mengakses internet untuk tujuan media sosial/jejaring sosial (84,37 persen), mendapatkan informasi/berita (84,28 persen), dan hiburan (83,78 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.13 Persentase Pemuda yang Menggunakan Internet menurut Tujuan Penggunaannya, 2023

Kemampuan penggunaan TIK dianggap penting dalam peningkatan kualitas hidup di masa sekarang. Namun, kadangkala fasilitas yang mendukung aksesibilitas teknologi menyebabkan keberadaan teknologi komputer, jaringan internet, dan pelayanan komunikasi/informasi jarak jauh yang baik, cepat, dan murah belum dapat diakses secara merata. Kesenjangan digital yang terjadi tersebut dapat dipicu oleh luasnya wilayah Indonesia dan struktur wilayah kepulauan di mana sebagian topografinya berbentuk pegunungan dan lembah, sehingga lokasi permukiman penduduk menyebar dan menyebabkan pembangunan sarana komunikasi dan informasi sulit dilakukan dan membutuhkan biaya yang tidak murah (Hadiyat, 2014).

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Pemuda, 2023

Karakteristik	Angka Melek Huruf
(1)	(2)
Indonesia	99,79
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	99,79
Perempuan	99,79
Kelompok Umur	
16-18 tahun	99,87
19-24 tahun	99,79
25-30 tahun	99,74
Status Disabilitas	
Disabilitas	93,59
Non Disabilitas	99,83
Distribusi Pengeluaran	
40% Terbawah	99,73
40% Menengah	99,81
20% Teratas	99,86
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	99,95
Perdesaan	99,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.2 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda menurut Klasifikasi Desa, 2023

Karakteristik (1)	Klasifikasi Desa		Jumlah (4)
	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	
Indonesia	99,95	99,55	99,79
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	99,94	99,56	99,79
Perempuan	99,95	99,54	99,79
Kelompok Umur			
16-18 tahun	99,95	99,76	99,87
19-24 tahun	99,94	99,57	99,79
25-30 tahun	99,96	99,42	99,74
Status Disabilitas			
Disabilitas	94,91	91,85	93,59
Non Disabilitas	99,98	99,61	99,83
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	99,93	99,50	99,73
40% Menengah	99,95	99,61	99,81
20% Teratas	99,97	99,53	99,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.3 Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah, 2023

Karakteristik	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi
		Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	0,97	20,03	8,42	70,58
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	1,02	19,17	8,40	71,41
Perempuan	0,91	20,91	8,45	69,73
Kelompok Umur				
16-18 tahun	0,61	51,82	21,60	25,96
19-24 tahun	0,87	17,84	9,01	72,28
25-30 tahun	1,25	5,02	0,68	93,04
Status Disabilitas				
Disabilitas	18,18	12,43	2,79	66,60
Non Disabilitas	0,84	20,09	8,47	70,61
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	1,31	18,77	6,36	73,56
40% Menengah	0,81	20,64	8,00	70,55
20% Teratas	0,66	21,03	12,84	65,47
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,44	20,26	10,50	68,81
Perdesaan	1,76	19,69	5,33	73,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	16-18 tahun	19-23 tahun	24-30 tahun	16-30 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	73,42	28,96	6,81	28,45
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	71,90	26,79	6,84	27,57
Perempuan	75,01	31,20	6,77	29,36
Status Disabilitas				
Disabilitas	42,00	21,03	3,64	15,21
Non Disabilitas	73,60	29,01	6,83	28,55
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	68,86	20,55	4,92	25,13
40% Menengah	75,46	28,08	6,84	28,64
20% Teratas	79,27	45,01	9,66	33,86
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	75,91	31,40	6,13	30,75
Perdesaan	69,92	19,77	5,08	25,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.5 Persentase Pemuda menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Karakteristik	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	0,97	1,52	10,31	35,96	40,01	11,25
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	1,02	1,84	11,40	36,33	39,99	9,42
Perempuan	0,91	1,19	9,19	35,57	40,03	13,11
Kelompok Umur						
16-18 tahun	0,61	0,71	11,75	76,43	10,47	0,02
19-24 tahun	0,87	1,50	7,76	24,02	60,27	5,58
25-30 tahun	1,25	1,97	12,12	26,17	35,38	23,11
Status Disabilitas						
Disabilitas	18,18	9,31	19,89	26,03	21,17	5,41
Non Disabilitas	0,84	1,46	10,24	36,03	40,15	11,29
Distribusi Pengeluaran						
40% Terbawah	1,31	2,34	15,08	41,22	34,25	5,79
40% Menengah	0,81	1,21	8,96	35,75	42,55	10,72
20% Teratas	0,66	0,69	4,64	27,21	45,06	21,74
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	0,44	0,91	7,56	33,57	44,19	13,33
Perdesaan	1,76	2,43	14,41	39,51	33,75	8,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda, 2023

Karakteristik	Rata-Rata Lama Sekolah
(1)	(2)
Indonesia	11,04
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	10,84
Perempuan	11,25
Kelompok Umur	
16-18 tahun	9,76
19-24 tahun	11,30
25-30 tahun	11,48
Status Disabilitas	
Disabilitas	7,57
Non Disabilitas	11,07
Distribusi Pengeluaran	
40% Terbawah	10,16
40% Menengah	11,15
20% Teratas	12,38
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	11,54
Perdesaan	10,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.7 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda menurut Klasifikasi Desa, 2023

Karakteristik	Klasifikasi Desa		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	11,54	10,31	11,04
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	11,33	10,11	10,84
Perempuan	11,75	10,51	11,25
Kelompok Umur			
16-18 tahun	9,89	9,58	9,76
19-24 tahun	11,77	10,56	11,30
25-30 tahun	12,16	10,47	11,48
Status Disabilitas			
Disabilitas	8,21	6,71	7,57
Non Disabilitas	11,56	10,34	11,07
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	10,63	9,73	10,16
40% Menengah	11,66	10,43	11,15
20% Teratas	12,88	11,11	12,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.8 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Nonformal dalam 12 Bulan Terakhir, 2021

Karakteristik	Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal		
	Ya	Tidak	
	(1)	(2)	(3)
Indonesia	26,74	73,26	
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	25,85	74,15	
Perempuan	27,65	72,35	
Kelompok Umur			
16-18 tahun	74,06	25,94	
19-24 tahun	24,47	75,53	
25-30 tahun	4,22	95,78	
Status Disabilitas			
Disabilitas	10,17	89,83	
Non Disabilitas	26,88	73,12	
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	21,59	78,41	
40% Menengah	26,70	73,30	
20% Teratas	35,61	64,39	
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	29,32	70,68	
Perdesaan	22,97	77,03	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.9 Persentase Pemuda menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2023

Karakteristik	Menggunakan HP	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	96,28	24,11	94,16
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	96,32	21,27	94,24
Perempuan	96,24	27,02	94,08
Kelompok Umur			
16-18 tahun	95,80	30,42	94,13
19-24 tahun	96,69	25,41	95,10
25-30 tahun	96,11	19,37	93,22
Status Disabilitas			
Disabilitas	55,27	6,58	47,28
Non Disabilitas	96,58	24,24	94,51
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	93,66	10,90	89,87
40% Menengah	97,47	22,46	96,08
20% Teratas	98,51	50,24	97,88
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	97,84	30,85	96,82
Perdesaan	93,94	14,05	90,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.10 Persentase Pemuda Yang Menggunakan Internet menurut Tujuan Penggunaannya, 2023

Karakteristik	Mendapat Informasi/ Berita	Mendapat Informasi Mengenai Barang/Jasa	Mengirim/ Menerima E-mail	Media Sosial/ Jejaring Sosial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	84,28	29,45	17,66	84,37
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	84,48	27,75	16,66	84,22
Perempuan	84,08	31,18	18,68	84,52
Kelompok Umur				
16-18 tahun	81,10	21,95	14,30	82,77
19-24 tahun	84,77	30,67	19,27	84,76
25-30 tahun	85,52	32,27	17,81	84,83
Status Disabilitas				
Disabilitas	61,99	18,54	9,05	70,73
Non Disabilitas	84,36	29,49	17,69	84,42
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	79,74	21,15	8,94	82,68
40% Menengah	85,11	29,89	16,35	84,74
20% Teratas	89,94	41,81	34,04	86,33
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	86,24	33,00	22,27	85,38
Perdesaan	81,14	23,74	10,25	82,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.10

Karakteristik	Pembelian Barang/Jasa	Penjualan Barang/Jasa	Fasilitas Finansial	Pembelajaran Online
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indonesia	28,52	5,28	10,99	12,77
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	22,84	5,01	10,26	11,25
Perempuan	34,35	5,55	11,73	14,32
Kelompok Umur				
16-18 tahun	21,04	1,61	2,53	29,14
19-24 tahun	30,89	4,91	11,44	11,39
25-30 tahun	30,16	7,67	15,15	5,23
Status Disabilitas				
Disabilitas	18,49	5,57	5,75	9,28
Non Disabilitas	28,56	5,27	11,01	12,78
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	18,35	3,49	3,27	9,74
40% Menengah	28,60	5,23	8,96	12,60
20% Teratas	44,59	8,21	27,15	17,89
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	33,77	6,06	15,03	14,55
Perdesaan	20,10	4,01	4,50	9,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.10

Karakteristik	WFH/ Bekerja Online dari Rumah	Hiburan	Pembuatan Konten Digital	Lainnya
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indonesia	2,04	83,78	6,43	6,35
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	1,99	84,57	5,94	6,52
Perempuan	2,09	82,96	6,93	6,17
Kelompok Umur				
16-18 tahun	1,45	84,53	7,14	6,45
19-24 tahun	1,72	84,44	6,76	6,47
25-30 tahun	2,69	82,68	5,69	6,15
Status Disabilitas				
Disabilitas	1,42	87,80	6,13	5,75
Non Disabilitas	2,04	83,76	6,43	6,35
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	1,04	82,11	5,09	5,68
40% Menengah	1,66	84,21	6,45	6,54
20% Teratas	4,35	85,60	8,50	7,03
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	2,49	84,32	6,68	5,75
Perdesaan	1,32	82,90	6,02	7,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.11 Persentase Pemuda yang Pernah Belajar TIK, 2023

Karakteristik (1)	Pernah Belajar TIK (2)	Tidak Pernah Belajar TIK (3)
	Indonesia	38,40
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	37,16	62,84
Perempuan	39,66	60,34
Kelompok Umur		
16-18 tahun	47,00	53,00
19-24 tahun	39,83	60,17
25-30 tahun	32,27	67,73
Status Disabilitas		
Disabilitas	13,47	86,53
Non Disabilitas	38,58	61,42
Distribusi Pengeluaran		
40% Terbawah	30,58	69,42
40% Menengah	39,05	60,95
20% Teratas	50,71	49,29
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	43,49	56,51
Perdesaan	30,79	69,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.12.1 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,86	99,99	99,93
Sumatera Utara	99,96	99,91	99,93
Sumatera Barat	99,87	99,96	99,91
Riau	99,91	100,00	99,95
Jambi	99,75	100,00	99,87
Sumatera Selatan	99,91	99,99	99,95
Bengkulu	100,00	100,00	100,00
Lampung	99,86	99,78	99,82
Kep. Bangka Belitung	99,89	99,93	99,91
Kepulauan Riau	99,98	100,00	99,99
DKI Jakarta	99,88	99,97	99,93
Jawa Barat	99,99	99,96	99,98
Jawa Tengah	99,97	99,96	99,97
DI Yogyakarta	100,00	99,92	99,96
Jawa Timur	100,00	100,00	100,00
Banten	99,98	99,96	99,97
Bali	99,81	100,00	99,90
Nusa Tenggara Barat	99,69	99,82	99,76
Nusa Tenggara Timur	100,00	99,36	99,69
Kalimantan Barat	100,00	99,96	99,98
Kalimantan Tengah	99,72	99,91	99,82
Kalimantan Selatan	100,00	100,00	100,00
Kalimantan Timur	99,80	100,00	99,90
Kalimantan Utara	99,63	100,00	99,81
Sulawesi Utara	99,87	100,00	99,93
Sulawesi Tengah	99,44	100,00	99,73
Sulawesi Selatan	99,99	99,95	99,97
Sulawesi Tenggara	99,65	99,80	99,73
Gorontalo	100,00	99,57	99,78
Sulawesi Barat	99,29	100,00	99,66
Maluku	100,00	100,00	100,00
Maluku Utara	99,94	100,00	99,97
Papua Barat	99,39	100,00	99,69
Papua	99,78	99,54	99,67
Indonesia	99,94	99,95	99,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.12.2 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,96	99,97	99,96
Sumatera Utara	99,98	99,91	99,95
Sumatera Barat	99,87	99,92	99,90
Riau	99,92	99,88	99,90
Jambi	99,89	99,86	99,88
Sumatera Selatan	99,92	99,91	99,92
Bengkulu	99,73	99,96	99,84
Lampung	99,74	99,99	99,86
Kep. Bangka Belitung	99,73	99,94	99,83
Kepulauan Riau	99,85	99,40	99,67
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	99,97	99,92	99,95
Jawa Tengah	99,95	99,98	99,97
DI Yogyakarta	100,00	99,67	99,83
Jawa Timur	99,85	99,89	99,87
Banten	99,76	99,78	99,77
Bali	99,89	99,87	99,88
Nusa Tenggara Barat	100,00	99,69	99,85
Nusa Tenggara Timur	98,99	99,22	99,10
Kalimantan Barat	99,74	99,74	99,74
Kalimantan Tengah	100,00	99,57	99,79
Kalimantan Selatan	99,81	99,91	99,86
Kalimantan Timur	99,98	99,95	99,96
Kalimantan Utara	99,41	99,71	99,55
Sulawesi Utara	99,91	100,00	99,95
Sulawesi Tengah	99,91	99,87	99,89
Sulawesi Selatan	99,53	99,76	99,64
Sulawesi Tenggara	99,84	99,82	99,83
Gorontalo	99,84	99,91	99,87
Sulawesi Barat	99,56	99,71	99,63
Maluku	99,94	99,84	99,89
Maluku Utara	99,90	99,85	99,88
Papua Barat	99,41	98,85	99,14
Papua	89,14	87,79	88,48
Indonesia	99,56	99,54	99,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.12.3 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,93	99,98	99,95
Sumatera Utara	99,97	99,91	99,94
Sumatera Barat	99,87	99,94	99,91
Riau	99,91	99,93	99,92
Jambi	99,84	99,91	99,88
Sumatera Selatan	99,92	99,94	99,93
Bengkulu	99,83	99,97	99,90
Lampung	99,78	99,92	99,85
Kep. Bangka Belitung	99,82	99,93	99,88
Kepulauan Riau	99,97	99,95	99,96
DKI Jakarta	99,88	99,97	99,93
Jawa Barat	99,99	99,96	99,97
Jawa Tengah	99,96	99,97	99,97
DI Yogyakarta	100,00	99,87	99,94
Jawa Timur	99,93	99,95	99,94
Banten	99,93	99,92	99,93
Bali	99,83	99,97	99,90
Nusa Tenggara Barat	99,84	99,76	99,80
Nusa Tenggara Timur	99,30	99,26	99,28
Kalimantan Barat	99,83	99,83	99,83
Kalimantan Tengah	99,88	99,72	99,80
Kalimantan Selatan	99,91	99,96	99,93
Kalimantan Timur	99,85	99,98	99,92
Kalimantan Utara	99,56	99,91	99,73
Sulawesi Utara	99,89	100,00	99,94
Sulawesi Tengah	99,75	99,92	99,83
Sulawesi Selatan	99,76	99,85	99,81
Sulawesi Tenggara	99,76	99,81	99,79
Gorontalo	99,91	99,75	99,83
Sulawesi Barat	99,50	99,77	99,64
Maluku	99,97	99,91	99,94
Maluku Utara	99,91	99,90	99,91
Papua Barat	99,41	99,33	99,37
Papua	92,28	91,02	91,67
Indonesia	99,79	99,79	99,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.13.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	NA	37,89	2,86	58,92	100,00
Sumatera Utara	0,15	18,31	14,88	66,66	100,00
Sumatera Barat	0,30	32,62	7,31	59,77	100,00
Riau	0,62	26,99	10,50	61,90	100,00
Jambi	NA	29,99	8,80	60,90	100,00
Sumatera Selatan	NA	22,58	9,36	67,97	100,00
Bengkulu	NA	35,66	5,67	58,45	100,00
Lampung	0,26	23,60	8,64	67,49	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,41	22,74	4,33	72,52	100,00
Kepulauan Riau	NA	19,64	6,55	73,44	100,00
DKI Jakarta	NA	15,12	12,79	71,98	100,00
Jawa Barat	0,41	14,05	12,54	72,99	100,00
Jawa Tengah	0,26	17,83	10,86	71,04	100,00
DI Yogyakarta	NA	30,53	12,96	56,49	100,00
Jawa Timur	0,37	21,27	9,45	68,92	100,00
Banten	0,76	16,99	11,86	70,38	100,00
Bali	0,25	21,61	10,38	67,75	100,00
Nusa Tenggara Barat	NA	27,45	6,54	65,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	NA	28,91	9,57	61,37	100,00
Kalimantan Barat	0,73	25,95	6,20	67,13	100,00
Kalimantan Tengah	NA	26,87	3,82	68,90	100,00
Kalimantan Selatan	0,46	24,23	6,01	69,30	100,00
Kalimantan Timur	0,56	29,65	7,01	62,78	100,00
Kalimantan Utara	2,66	26,03	4,03	67,28	100,00
Sulawesi Utara	NA	24,73	5,61	69,35	100,00
Sulawesi Tengah	1,05	35,26	5,77	57,92	100,00
Sulawesi Selatan	1,41	29,36	7,81	61,42	100,00
Sulawesi Tenggara	1,89	36,44	4,67	57,00	100,00
Gorontalo	NA	33,11	3,44	63,15	100,00
Sulawesi Barat	4,21	28,95	5,91	60,93	100,00
Maluku	NA	39,27	4,31	56,07	100,00
Maluku Utara	NA	35,20	5,28	59,45	100,00
Papua Barat	1,37	25,21	7,65	65,77	100,00
Papua	3,92	27,56	5,32	63,21	100,00
Indonesia	0,44	20,26	10,50	68,81	100,00

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.13.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,34	29,95	2,19	67,52	100,00
Sumatera Utara	0,63	23,25	7,51	68,61	100,00
Sumatera Barat	0,87	28,09	2,26	68,78	100,00
Riau	0,53	21,71	4,79	72,97	100,00
Jambi	0,50	20,59	3,40	75,51	100,00
Sumatera Selatan	0,40	18,40	2,74	78,46	100,00
Bengkulu	0,23	25,66	1,87	72,24	100,00
Lampung	0,49	17,60	5,80	76,11	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,53	19,33	2,46	77,67	100,00
Kepulauan Riau	0,94	22,89	2,12	74,05	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,40	14,42	6,35	78,83	100,00
Jawa Tengah	0,54	14,42	8,82	76,22	100,00
DI Yogyakarta	NA	22,45	5,13	71,89	100,00
Jawa Timur	0,76	17,77	7,15	74,32	100,00
Banten	1,64	15,79	5,22	77,34	100,00
Bali	0,48	22,29	5,59	71,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,34	21,85	5,32	72,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,48	22,02	5,49	72,01	100,00
Kalimantan Barat	1,52	20,89	2,43	75,16	100,00
Kalimantan Tengah	0,75	20,85	2,25	76,14	100,00
Kalimantan Selatan	0,61	19,83	4,85	74,71	100,00
Kalimantan Timur	0,47	24,18	2,45	72,91	100,00
Kalimantan Utara	4,01	24,68	2,65	68,66	100,00
Sulawesi Utara	NA	20,33	3,40	76,12	100,00
Sulawesi Tengah	1,64	23,43	2,36	72,57	100,00
Sulawesi Selatan	3,88	23,02	3,90	69,20	100,00
Sulawesi Tenggara	3,71	25,85	2,40	68,04	100,00
Gorontalo	2,06	24,21	1,22	72,51	100,00
Sulawesi Barat	6,47	21,79	4,18	67,56	100,00
Maluku	2,33	27,40	3,11	67,16	100,00
Maluku Utara	0,87	25,54	4,00	69,59	100,00
Papua Barat	4,81	23,41	3,57	68,22	100,00
Papua	32,13	18,64	1,39	47,84	100,00
Indonesia	1,76	19,69	5,33	73,23	100,00

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.13.3 Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,37	31,51	1,91	66,21	100,00
Sumatera Utara	0,44	19,35	11,74	68,47	100,00
Sumatera Barat	0,59	28,21	5,17	66,03	100,00
Riau	0,62	22,68	6,71	69,99	100,00
Jambi	0,69	21,25	5,17	72,89	100,00
Sumatera Selatan	0,37	18,54	5,72	75,38	100,00
Bengkulu	0,29	26,96	2,80	69,95	100,00
Lampung	0,49	18,32	6,79	74,40	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,46	21,88	3,30	74,36	100,00
Kepulauan Riau	0,30	18,28	6,67	74,75	100,00
DKI Jakarta	NA	14,61	12,36	72,82	100,00
Jawa Barat	0,41	13,68	11,42	74,49	100,00
Jawa Tengah	0,46	15,86	10,23	73,45	100,00
DI Yogyakarta	NA	28,33	12,79	58,74	100,00
Jawa Timur	0,59	18,42	8,86	72,13	100,00
Banten	0,81	15,93	9,43	73,83	100,00
Bali	NA	21,57	9,72	68,58	100,00
Nusa Tenggara Barat	NA	25,49	5,79	68,47	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,47	24,20	5,98	69,35	100,00
Kalimantan Barat	1,28	21,16	3,63	73,93	100,00
Kalimantan Tengah	0,44	22,28	2,83	74,44	100,00
Kalimantan Selatan	0,79	21,07	5,21	72,94	100,00
Kalimantan Timur	0,49	26,74	5,98	66,79	100,00
Kalimantan Utara	3,93	22,75	2,71	70,61	100,00
Sulawesi Utara	NA	21,69	4,05	73,93	100,00
Sulawesi Tengah	1,52	25,76	2,58	70,14	100,00
Sulawesi Selatan	3,06	26,16	5,65	65,13	100,00
Sulawesi Tenggara	3,64	29,41	2,83	64,12	100,00
Gorontalo	1,74	26,20	1,74	70,32	100,00
Sulawesi Barat	7,19	22,53	3,23	67,04	100,00
Maluku	1,89	31,06	3,54	63,51	100,00
Maluku Utara	0,67	27,16	5,03	67,14	100,00
Papua Barat	3,65	23,75	4,76	67,83	100,00
Papua	22,35	21,54	2,68	53,43	100,00
Indonesia	1,02	19,17	8,40	71,41	100,00

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.13.4 Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,31	34,00	2,94	62,74	100,00
Sumatera Utara	0,25	21,33	12,00	66,42	100,00
Sumatera Barat	0,54	32,79	4,63	62,04	100,00
Riau	0,51	25,26	7,71	66,51	100,00
Jambi	NA	26,03	5,07	68,73	100,00
Sumatera Selatan	0,20	21,63	5,02	73,15	100,00
Bengkulu	NA	31,68	3,71	64,45	100,00
Lampung	0,33	21,06	6,76	71,85	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,48	20,65	3,75	75,13	100,00
Kepulauan Riau	NA	21,63	5,60	72,21	100,00
DKI Jakarta	NA	15,60	13,19	71,19	100,00
Jawa Barat	0,41	14,59	11,35	73,66	100,00
Jawa Tengah	0,31	16,69	9,61	73,38	100,00
DI Yogyakarta	NA	29,72	10,22	59,96	100,00
Jawa Timur	0,47	21,17	8,12	70,24	100,00
Banten	1,10	17,56	11,48	69,86	100,00
Bali	0,50	22,00	8,60	68,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,15	24,15	6,14	69,55	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,29	23,93	7,43	68,35	100,00
Kalimantan Barat	1,17	24,35	4,01	70,47	100,00
Kalimantan Tengah	0,77	24,66	3,03	71,54	100,00
Kalimantan Selatan	0,27	23,06	5,67	70,99	100,00
Kalimantan Timur	0,57	29,38	5,31	64,73	100,00
Kalimantan Utara	2,23	28,61	4,49	64,67	100,00
Sulawesi Utara	NA	24,11	5,33	70,40	100,00
Sulawesi Tengah	1,34	29,44	4,54	64,68	100,00
Sulawesi Selatan	2,20	26,30	6,11	65,40	100,00
Sulawesi Tenggara	2,26	31,13	3,85	62,76	100,00
Gorontalo	0,79	30,26	2,70	66,24	100,00
Sulawesi Barat	4,79	24,06	5,87	65,29	100,00
Maluku	0,93	34,79	3,79	60,50	100,00
Maluku Utara	0,58	29,92	3,76	65,74	100,00
Papua Barat	3,06	24,59	5,83	66,52	100,00
Papua	25,98	20,80	2,31	50,90	100,00
Indonesia	0,91	20,91	8,45	69,73	100,00

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.13.5 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,34	32,76	2,43	64,47	100,00
Sumatera Utara	0,35	20,33	11,87	67,46	100,00
Sumatera Barat	0,57	30,46	4,90	64,07	100,00
Riau	0,57	23,93	7,19	68,31	100,00
Jambi	0,44	23,59	5,12	70,86	100,00
Sumatera Selatan	0,28	20,06	5,37	74,28	100,00
Bengkulu	0,23	29,28	3,25	67,24	100,00
Lampung	0,41	19,66	6,77	73,15	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,47	21,27	3,52	74,74	100,00
Kepulauan Riau	NA	19,93	6,14	73,49	100,00
DKI Jakarta	NA	15,12	12,79	71,98	100,00
Jawa Barat	0,41	14,12	11,38	74,08	100,00
Jawa Tengah	0,39	16,27	9,93	73,41	100,00
DI Yogyakarta	NA	29,03	11,50	59,35	100,00
Jawa Timur	0,53	19,80	8,49	71,18	100,00
Banten	0,95	16,74	10,45	71,87	100,00
Bali	0,31	21,78	9,18	68,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,20	24,82	5,97	69,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,38	24,06	6,70	68,85	100,00
Kalimantan Barat	1,23	22,75	3,82	72,20	100,00
Kalimantan Tengah	0,60	23,45	2,93	73,01	100,00
Kalimantan Selatan	0,53	22,06	5,44	71,97	100,00
Kalimantan Timur	0,53	28,02	5,66	65,79	100,00
Kalimantan Utara	3,10	25,59	3,57	67,74	100,00
Sulawesi Utara	0,25	22,86	4,67	72,23	100,00
Sulawesi Tengah	1,43	27,61	3,56	67,40	100,00
Sulawesi Selatan	2,63	26,23	5,88	65,26	100,00
Sulawesi Tenggara	2,95	30,27	3,35	63,43	100,00
Gorontalo	1,27	28,20	2,21	68,32	100,00
Sulawesi Barat	6,00	23,29	4,54	66,17	100,00
Maluku	1,42	32,89	3,66	62,02	100,00
Maluku Utara	0,62	28,54	4,40	66,44	100,00
Papua Barat	3,36	24,16	5,28	67,19	100,00
Papua	24,09	21,18	2,51	52,22	100,00
Indonesia	0,97	20,03	8,42	70,58	100,00

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.14.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	16-18 tahun	19-23 tahun	24-30 tahun	16-30 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	88,86	43,27	15,02	40,74
Sumatera Utara	80,70	35,01	8,13	33,18
Sumatera Barat	88,64	50,05	5,22	39,93
Riau	84,28	43,44	5,92	37,48
Jambi	78,87	37,90	14,82	38,79
Sumatera Selatan	76,65	33,87	9,83	31,93
Bengkulu	82,41	52,11	11,07	41,33
Lampung	72,83	33,40	8,57	32,24
Kep. Bangka Belitung	72,94	21,53	8,03	27,07
Kepulauan Riau	85,74	23,01	5,95	26,18
DKI Jakarta	72,50	28,43	10,50	27,91
Jawa Barat	70,53	28,58	4,53	26,59
Jawa Tengah	73,36	32,03	5,79	28,70
DI Yogyakarta	93,56	60,08	12,81	43,49
Jawa Timur	77,79	34,79	7,79	30,72
Banten	71,96	27,94	8,48	28,86
Bali	86,00	37,36	4,80	32,00
Nusa Tenggara Barat	83,68	33,43	10,79	33,99
Nusa Tenggara Timur	79,91	48,17	9,58	38,48
Kalimantan Barat	73,13	36,12	8,46	32,15
Kalimantan Tengah	70,51	31,38	10,72	30,69
Kalimantan Selatan	71,43	36,03	4,17	30,24
Kalimantan Timur	83,88	40,33	10,77	36,66
Kalimantan Utara	75,67	34,18	6,43	30,06
Sulawesi Utara	76,52	29,54	9,61	30,33
Sulawesi Tengah	84,92	46,08	13,73	41,04
Sulawesi Selatan	74,73	46,92	11,19	37,17
Sulawesi Tenggara	79,19	45,73	16,32	41,11
Gorontalo	75,36	47,26	7,75	36,54
Sulawesi Barat	74,73	34,11	12,78	34,86
Maluku	82,56	52,48	13,16	43,58
Maluku Utara	84,93	45,61	13,98	40,47
Papua Barat	81,95	45,08	2,91	32,86
Papua	82,04	42,56	4,73	32,87
Indonesia	75,91	33,84	7,45	30,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.14.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	16-30 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	80,46	30,76	9,06	32,14
Sumatera Utara	77,40	24,98	8,57	30,76
Sumatera Barat	79,58	32,53	4,14	30,35
Riau	73,43	24,22	3,86	26,50
Jambi	68,91	19,92	6,29	23,99
Sumatera Selatan	68,52	13,21	4,69	21,13
Bengkulu	77,88	23,23	6,95	27,53
Lampung	71,13	18,01	4,65	23,40
Kep. Bangka Belitung	64,90	16,52	4,87	21,79
Kepulauan Riau	78,83	17,37	NA	25,01
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	60,73	16,74	3,62	20,77
Jawa Tengah	68,14	19,69	3,64	23,24
DI Yogyakarta	81,54	32,64	5,40	27,58
Jawa Timur	69,25	19,85	8,28	24,92
Banten	61,24	13,35	7,04	21,01
Bali	81,23	25,20	4,28	27,88
Nusa Tenggara Barat	70,79	22,22	9,69	27,17
Nusa Tenggara Timur	74,32	26,22	4,20	27,51
Kalimantan Barat	66,89	22,08	4,56	23,33
Kalimantan Tengah	63,06	20,70	6,76	23,10
Kalimantan Selatan	68,46	21,53	4,75	24,68
Kalimantan Timur	75,40	21,47	9,42	26,62
Kalimantan Utara	79,42	22,94	NA	27,33
Sulawesi Utara	71,85	20,37	5,73	23,73
Sulawesi Tengah	71,33	21,41	7,19	25,79
Sulawesi Selatan	67,23	27,91	7,37	26,92
Sulawesi Tenggara	71,52	23,60	8,16	28,25
Gorontalo	68,44	25,94	5,59	25,43
Sulawesi Barat	70,59	23,15	7,73	25,97
Maluku	77,62	28,08	8,23	30,51
Maluku Utara	75,64	24,93	10,07	29,54
Papua Barat	79,63	28,51	2,43	26,97
Papua	57,48	19,54	2,45	20,03
Indonesia	69,92	21,29	5,85	25,02

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.14.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	16-30 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	83,41	35,24	11,16	35,19
Sumatera Utara	79,25	31,08	8,31	32,19
Sumatera Barat	84,33	42,19	4,68	35,36
Riau	78,15	32,32	4,71	31,12
Jambi	72,46	25,79	8,79	28,71
Sumatera Selatan	71,71	21,49	6,75	25,44
Bengkulu	79,57	34,05	8,38	32,53
Lampung	71,74	23,51	5,92	26,44
Kep. Bangka Belitung	69,53	19,38	6,65	24,79
Kepulauan Riau	84,97	22,43	5,57	26,08
DKI Jakarta	72,50	28,43	10,50	27,91
Jawa Barat	68,58	26,45	4,36	25,50
Jawa Tengah	70,87	26,52	4,80	26,20
DI Yogyakarta	91,17	55,80	11,31	40,53
Jawa Timur	74,07	28,59	7,99	28,28
Banten	69,64	24,85	8,17	27,18
Bali	84,73	34,31	4,67	30,96
Nusa Tenggara Barat	77,46	28,45	10,26	30,79
Nusa Tenggara Timur	75,93	33,03	5,77	30,77
Kalimantan Barat	69,25	27,42	5,94	26,57
Kalimantan Tengah	66,32	25,49	8,42	26,38
Kalimantan Selatan	69,95	29,09	4,46	27,49
Kalimantan Timur	81,50	34,75	10,36	33,68
Kalimantan Utara	77,03	30,83	5,67	29,16
Sulawesi Utara	74,55	25,88	7,88	27,52
Sulawesi Tengah	76,29	30,31	9,41	31,17
Sulawesi Selatan	71,00	37,89	9,26	32,11
Sulawesi Tenggara	74,60	33,59	11,43	33,62
Gorontalo	71,70	35,50	6,54	30,41
Sulawesi Barat	71,57	25,42	8,73	27,83
Maluku	79,90	40,27	10,37	36,56
Maluku Utara	78,38	32,19	11,20	32,94
Papua Barat	80,58	35,74	2,63	29,45
Papua	64,15	26,06	3,12	23,69
Indonesia	73,42	28,96	6,81	28,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.15.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,34	0,36	4,50	30,97	45,97	17,87
Sumatera Utara	0,15	0,24	4,67	31,09	51,19	12,65
Sumatera Barat	0,30	1,03	6,83	32,32	42,12	17,41
Riau	0,62	0,14	7,63	33,25	44,67	13,70
Jambi	0,31	1,62	6,59	33,50	41,83	16,14
Sumatera Selatan	0,10	1,57	10,89	24,10	46,06	17,28
Bengkulu	0,22	0,29	7,37	31,31	41,92	18,89
Lampung	0,26	1,61	9,08	33,93	42,95	12,16
Kep. Bangka Belitung	0,41	3,29	10,31	28,56	44,56	12,87
Kepulauan Riau	NA	0,09	3,22	32,89	49,94	13,48
DKI Jakarta	NA	0,27	3,99	21,53	56,16	17,93
Jawa Barat	0,41	0,64	9,45	36,39	42,22	10,90
Jawa Tengah	0,26	0,92	9,18	39,90	38,37	11,37
DI Yogyakarta	NA	NA	2,21	25,13	53,74	18,81
Jawa Timur	0,37	0,76	7,05	35,37	43,68	12,77
Banten	0,76	0,69	7,40	35,02	44,36	11,77
Bali	0,25	1,06	4,97	34,25	39,03	20,43
Nusa Tenggara Barat	0,08	1,52	5,94	35,56	44,62	12,27
Nusa Tenggara Timur	0,15	5,45	9,12	32,67	36,92	15,70
Kalimantan Barat	0,73	2,49	12,81	29,00	41,22	13,76
Kalimantan Tengah	0,41	1,15	8,17	29,44	42,71	18,13
Kalimantan Selatan	0,46	2,07	10,45	28,03	43,05	15,94
Kalimantan Timur	0,56	1,50	4,66	30,62	47,84	14,82
Kalimantan Utara	2,66	0,93	7,70	31,38	41,45	15,88
Sulawesi Utara	0,32	2,83	6,76	28,73	47,80	13,56
Sulawesi Tengah	1,05	1,31	8,88	35,54	38,31	14,91
Sulawesi Selatan	1,41	1,81	7,13	32,39	42,98	14,28
Sulawesi Tenggara	1,89	1,69	4,16	30,98	46,00	15,28
Gorontalo	0,30	5,47	11,19	33,25	33,14	16,66
Sulawesi Barat	4,21	1,04	12,71	35,62	28,25	18,18
Maluku	0,35	0,29	3,71	31,83	48,08	15,74
Maluku Utara	0,08	0,35	4,53	31,34	47,16	16,53
Papua Barat	1,37	1,52	3,89	29,70	43,57	19,94
Papua	3,92	3,67	6,28	28,54	41,85	15,73
Indonesia	0,44	0,91	7,56	33,57	44,19	13,33

Catatan:

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.15.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,34	0,65	5,72	37,27	43,67	12,35
Sumatera Utara	0,63	1,13	7,90	37,03	44,41	8,91
Sumatera Barat	0,87	0,91	11,68	37,56	35,40	13,60
Riau	0,53	1,40	14,04	34,96	39,15	9,91
Jambi	0,50	2,34	13,66	33,54	38,71	11,25
Sumatera Selatan	0,40	3,90	20,02	33,22	33,95	8,50
Bengkulu	0,23	1,47	16,52	36,98	34,06	10,74
Lampung	0,49	2,31	13,97	40,94	35,40	6,89
Kep. Bangka Belitung	0,53	7,54	16,43	26,50	38,74	10,27
Kepulauan Riau	0,94	0,67	13,70	38,65	40,57	5,47
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,40	0,77	17,46	48,86	27,77	4,73
Jawa Tengah	0,54	1,71	15,80	46,99	29,60	5,36
DI Yogyakarta	0,53	0,00	4,03	37,50	45,79	12,15
Jawa Timur	0,76	1,43	15,05	41,09	34,40	7,28
Banten	1,64	1,53	20,88	42,13	30,88	2,94
Bali	0,48	3,27	12,94	37,48	34,42	11,41
Nusa Tenggara Barat	0,34	1,94	8,12	42,62	35,51	11,47
Nusa Tenggara Timur	0,48	9,66	17,88	36,23	24,57	11,17
Kalimantan Barat	1,52	6,62	20,21	32,79	32,54	6,32
Kalimantan Tengah	0,75	2,88	15,67	38,20	34,54	7,96
Kalimantan Selatan	0,61	3,55	17,78	34,95	33,88	9,23
Kalimantan Timur	0,47	2,71	10,11	37,74	41,42	7,54
Kalimantan Utara	4,01	1,14	14,82	35,90	34,84	9,29
Sulawesi Utara	0,15	5,17	10,79	33,56	39,04	11,29
Sulawesi Tengah	1,64	2,28	19,36	36,58	30,12	10,01
Sulawesi Selatan	3,88	3,08	11,47	34,60	36,95	10,03
Sulawesi Tenggara	3,71	2,55	9,10	35,71	37,28	11,66
Gorontalo	2,06	10,43	15,98	34,16	26,83	10,54
Sulawesi Barat	6,47	1,66	15,84	32,76	28,05	15,22
Maluku	2,33	1,01	9,53	34,49	40,97	11,66
Maluku Utara	0,87	1,10	9,45	38,51	37,40	12,67
Papua Barat	4,81	2,65	10,50	35,06	33,13	13,87
Papua	32,13	4,99	10,21	31,12	18,24	3,33
Indonesia	1,76	2,43	14,41	39,51	33,75	8,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.15.3 Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Pendidikan Jenjang Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,37	0,65	5,96	36,87	44,41	11,75
Sumatera Utara	0,44	0,67	7,29	34,29	48,74	8,57
Sumatera Barat	0,59	1,42	11,37	37,41	38,61	10,59
Riau	0,62	0,87	13,02	34,72	41,15	9,61
Jambi	0,69	2,35	13,25	33,38	40,60	9,74
Sumatera Selatan	0,37	4,01	17,58	30,47	38,23	9,34
Bengkulu	0,29	1,43	13,69	35,35	38,64	10,61
Lampung	0,49	2,74	13,85	37,85	37,87	7,20
Kep. Bangka Belitung	0,46	6,77	14,08	27,46	42,61	8,62
Kepulauan Riau	0,30	0,13	5,26	35,96	47,14	11,21
DKI Jakarta	0,21	0,28	4,43	21,79	56,92	16,38
Jawa Barat	0,41	0,80	12,20	38,67	38,89	9,03
Jawa Tengah	0,46	1,86	13,46	43,85	33,34	7,02
DI Yogyakarta	0,13	0,12	3,97	27,94	51,96	15,86
Jawa Timur	0,59	1,26	11,16	37,82	40,50	8,67
Banten	0,81	0,98	11,39	37,08	42,15	7,60
Bali	0,13	1,89	7,25	35,15	38,83	16,75
Nusa Tenggara Barat	0,25	2,03	6,51	37,76	42,81	10,65
Nusa Tenggara Timur	0,47	9,79	16,34	35,74	27,33	10,33
Kalimantan Barat	1,28	6,52	19,02	30,96	35,00	7,22
Kalimantan Tengah	0,44	2,01	13,27	34,77	38,71	10,80
Kalimantan Selatan	0,79	2,85	15,83	30,48	39,01	11,04
Kalimantan Timur	0,49	1,78	6,50	33,18	47,12	10,94
Kalimantan Utara	3,93	0,89	11,42	31,63	40,17	11,97
Sulawesi Utara	0,33	4,52	10,04	31,20	43,68	10,23
Sulawesi Tengah	1,52	2,30	16,33	36,94	32,67	10,25
Sulawesi Selatan	3,06	2,93	10,63	34,59	39,85	8,93
Sulawesi Tenggara	3,64	2,09	8,22	34,18	41,69	10,18
Gorontalo	1,74	10,06	16,14	32,59	29,40	10,07
Sulawesi Barat	7,19	2,43	15,67	32,20	29,39	13,11
Maluku	1,89	0,74	7,25	35,32	44,46	10,33
Maluku Utara	0,67	0,89	8,04	36,78	41,67	11,96
Papua Barat	3,65	2,49	7,83	32,41	38,51	15,11
Papua	22,35	4,22	8,61	31,13	27,45	6,24
Indonesia	1,02	1,84	11,40	36,33	39,99	9,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.15.4 Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Pendidikan Jenjang Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,31	0,44	4,62	33,21	44,56	16,85
Sumatera Utara	0,25	0,54	4,66	32,73	48,08	13,73
Sumatera Barat	0,54	0,50	6,84	32,14	39,23	20,75
Riau	0,51	0,86	9,55	33,72	41,82	13,54
Jambi	0,18	1,87	9,49	33,67	38,77	16,03
Sumatera Selatan	0,20	1,90	15,15	28,68	39,34	14,73
Bengkulu	0,16	0,64	12,70	34,49	35,13	16,88
Lampung	0,33	1,38	10,66	39,24	38,13	10,26
Kep. Bangka Belitung	0,48	3,43	11,80	27,89	41,46	14,94
Kepulauan Riau	0,56	0,16	3,07	30,81	51,08	14,31
DKI Jakarta	0,03	0,26	3,57	21,29	55,44	19,40
Jawa Barat	0,41	0,52	9,63	38,77	40,17	10,50
Jawa Tengah	0,31	0,68	10,92	42,43	35,39	10,26
DI Yogyakarta	0,10	0,00	1,14	26,92	52,56	19,28
Jawa Timur	0,47	0,82	9,66	37,72	39,08	12,26
Banten	1,10	0,76	9,13	35,99	40,80	12,22
Bali	0,50	1,33	6,69	34,98	36,84	19,65
Nusa Tenggara Barat	0,15	1,40	7,42	39,99	37,88	13,15
Nusa Tenggara Timur	0,29	7,01	14,21	34,60	29,16	14,73
Kalimantan Barat	1,17	3,68	15,94	31,83	36,48	10,90
Kalimantan Tengah	0,77	2,26	11,56	34,05	37,41	13,96
Kalimantan Selatan	0,27	2,75	12,29	32,44	38,03	14,23
Kalimantan Timur	0,57	1,95	6,05	32,26	44,68	14,48
Kalimantan Utara	2,23	1,13	8,59	34,18	38,32	15,56
Sulawesi Utara	0,16	3,09	6,78	30,34	44,50	15,13
Sulawesi Tengah	1,34	1,59	15,01	35,50	33,34	13,22
Sulawesi Selatan	2,20	1,93	7,89	32,35	40,15	15,48
Sulawesi Tenggara	2,26	2,29	5,87	33,29	40,17	16,12
Gorontalo	0,79	6,30	11,45	34,94	29,92	16,60
Sulawesi Barat	4,79	0,62	14,68	34,54	26,78	18,60
Maluku	0,93	0,62	6,41	31,13	44,05	16,86
Maluku Utara	0,58	0,85	7,80	35,79	39,18	15,80
Papua Barat	3,06	1,84	7,61	33,21	36,48	17,79
Papua	25,98	5,04	9,61	29,57	22,26	7,53
Indonesia	0,91	1,19	9,19	35,57	40,03	13,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.15.5 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,34	0,55	5,29	35,04	44,48	14,31
Sumatera Utara	0,35	0,61	5,99	33,52	48,42	11,12
Sumatera Barat	0,57	0,97	9,14	34,81	38,92	15,59
Riau	0,57	0,87	11,34	34,24	41,47	11,51
Jambi	0,44	2,11	11,41	33,53	39,70	12,81
Sumatera Selatan	0,28	2,97	16,38	29,59	38,78	12,00
Bengkulu	0,23	1,04	13,20	34,93	36,91	13,70
Lampung	0,41	2,07	12,29	38,53	38,00	8,70
Kep. Bangka Belitung	0,47	5,12	12,95	27,67	42,04	11,75
Kepulauan Riau	0,43	0,14	4,17	33,41	49,09	12,75
DKI Jakarta	0,11	0,27	3,99	21,53	56,16	17,93
Jawa Barat	0,41	0,66	10,95	38,72	39,52	9,74
Jawa Tengah	0,39	1,28	12,21	43,15	34,35	8,61
DI Yogyakarta	0,12	0,06	2,55	27,43	52,26	17,57
Jawa Timur	0,53	1,04	10,40	37,77	39,79	10,47
Banten	0,95	0,87	10,27	36,54	41,49	9,88
Bali	0,31	1,62	6,98	35,07	37,87	18,15
Nusa Tenggara Barat	0,20	1,72	6,96	38,87	40,34	11,90
Nusa Tenggara Timur	0,38	8,41	15,28	35,17	28,24	12,52
Kalimantan Barat	1,23	5,10	17,48	31,40	35,74	9,06
Kalimantan Tengah	0,60	2,13	12,43	34,42	38,07	12,36
Kalimantan Selatan	0,53	2,80	14,07	31,45	38,52	12,62
Kalimantan Timur	0,53	1,86	6,28	32,73	45,93	12,66
Kalimantan Utara	3,10	1,00	10,05	32,87	39,27	13,71
Sulawesi Utara	0,25	3,83	8,47	30,79	44,07	12,59
Sulawesi Tengah	1,43	1,94	15,67	36,22	33,01	11,74
Sulawesi Selatan	2,63	2,44	9,27	33,48	40,00	12,18
Sulawesi Tenggara	2,95	2,19	7,04	33,73	40,92	13,17
Gorontalo	1,27	8,21	13,83	33,75	29,66	13,28
Sulawesi Barat	6,00	1,53	15,18	33,36	28,10	15,84
Maluku	1,42	0,68	6,84	33,26	44,26	13,55
Maluku Utara	0,62	0,87	7,92	36,29	40,43	13,87
Papua Barat	3,36	2,17	7,72	32,80	37,52	16,42
Papua	24,09	4,62	9,09	30,38	24,97	6,86
Indonesia	0,97	1,52	10,31	35,96	40,01	11,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.16 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda (Tahun) menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,30	11,54	11,54	12,08	11,81
Sumatera Utara	11,88	11,13	11,32	11,83	11,57
Sumatera Barat	11,92	11,05	11,00	12,03	11,51
Riau	11,67	10,79	10,94	11,40	11,16
Jambi	11,75	10,75	10,74	11,41	11,07
Sumatera Selatan	11,91	10,15	10,50	11,21	10,85
Bengkulu	12,15	10,70	10,97	11,48	11,22
Lampung	11,42	10,38	10,53	10,96	10,74
Kep. Bangka Belitung	11,18	10,25	10,42	11,14	10,77
Kepulauan Riau	11,69	10,45	11,41	11,75	11,58
DKI Jakarta	12,36	-	12,23	12,49	12,36
Jawa Barat	11,17	9,89	10,81	11,05	10,93
Jawa Tengah	11,10	10,02	10,38	10,84	10,61
DI Yogyakarta	12,85	11,57	12,41	12,80	12,61
Jawa Timur	11,46	10,37	10,84	11,16	11,00
Banten	11,48	9,79	10,90	11,34	11,12
Bali	12,09	10,81	11,69	11,85	11,77
Nusa Tenggara Barat	11,70	11,25	11,45	11,53	11,49
Nusa Tenggara Timur	11,41	9,99	10,12	10,71	10,41
Kalimantan Barat	11,17	9,59	9,83	10,51	10,17
Kalimantan Tengah	11,88	10,31	10,88	11,11	10,99
Kalimantan Selatan	11,57	10,34	10,78	11,15	10,97
Kalimantan Timur	11,92	10,75	11,45	11,70	11,57
Kalimantan Utara	11,38	10,24	10,74	11,28	11,01
Sulawesi Utara	11,66	10,86	10,99	11,68	11,32
Sulawesi Tengah	11,51	10,21	10,45	10,89	10,67
Sulawesi Selatan	11,51	10,40	10,61	11,32	10,96
Sulawesi Tenggara	12,02	10,77	10,96	11,62	11,30
Gorontalo	11,16	9,74	9,84	10,93	10,38
Sulawesi Barat	10,94	10,24	10,02	10,76	10,39
Maluku	12,27	11,11	11,33	11,97	11,65
Maluku Utara	12,33	11,21	11,40	11,71	11,55
Papua Barat	12,10	10,61	11,12	11,36	11,24
Papua	11,36	6,78	8,33	7,81	8,08
Indonesia	11,54	10,31	10,84	11,25	11,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.17.1 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Nonformal dalam 12 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2021

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34,00	28,60	30,46
Sumatera Utara	28,36	28,61	28,47
Sumatera Barat	38,96	28,17	33,89
Riau	36,94	25,13	30,04
Jambi	33,46	24,83	27,70
Sumatera Selatan	29,59	22,23	25,10
Bengkulu	42,90	26,79	32,47
Lampung	30,43	21,39	24,49
Kep. Bangka Belitung	24,44	18,94	22,01
Kepulauan Riau	27,35	27,02	27,33
DKI Jakarta	27,52	-	27,52
Jawa Barat	26,38	19,11	24,99
Jawa Tengah	27,47	20,46	24,34
DI Yogyakarta	40,02	28,42	37,79
Jawa Timur	28,11	22,49	25,73
Banten	26,43	16,46	23,95
Bali	35,57	28,10	33,69
Nusa Tenggara Barat	30,28	23,03	26,80
Nusa Tenggara Timur	41,33	26,76	30,93
Kalimantan Barat	31,23	21,02	24,78
Kalimantan Tengah	26,44	24,07	25,09
Kalimantan Selatan	33,43	24,95	29,14
Kalimantan Timur	36,13	24,23	32,49
Kalimantan Utara	31,78	23,79	28,96
Sulawesi Utara	29,30	20,67	25,66
Sulawesi Tengah	32,89	22,50	26,09
Sulawesi Selatan	32,27	24,79	28,45
Sulawesi Tenggara	46,23	20,39	30,91
Gorontalo	36,28	23,52	29,29
Sulawesi Barat	36,30	27,49	29,22
Maluku	36,18	25,25	30,62
Maluku Utara	34,29	24,31	27,29
Papua Barat	38,47	26,05	31,70
Papua	28,69	17,88	21,06
Indonesia	29,32	22,97	26,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.17.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Nonformal dalam 12 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2021

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,24	31,69	30,46
Sumatera Utara	26,50	30,58	28,47
Sumatera Barat	28,18	39,72	33,89
Riau	28,87	31,26	30,04
Jambi	25,04	30,25	27,70
Sumatera Selatan	24,22	26,01	25,10
Bengkulu	28,30	36,65	32,47
Lampung	24,17	24,84	24,49
Kep. Bangka Belitung	22,50	21,48	22,01
Kepulauan Riau	24,25	30,38	27,33
DKI Jakarta	25,59	29,41	27,52
Jawa Barat	25,44	24,51	24,99
Jawa Tengah	24,14	24,54	24,34
DI Yogyakarta	39,01	36,53	37,79
Jawa Timur	24,91	26,54	25,73
Banten	24,06	23,85	23,95
Bali	33,77	33,61	33,69
Nusa Tenggara Barat	24,46	29,12	26,80
Nusa Tenggara Timur	28,36	33,41	30,93
Kalimantan Barat	23,46	26,16	24,78
Kalimantan Tengah	21,46	28,77	25,09
Kalimantan Selatan	27,79	30,51	29,14
Kalimantan Timur	36,09	28,56	32,49
Kalimantan Utara	23,27	35,63	28,96
Sulawesi Utara	23,18	28,31	25,66
Sulawesi Tengah	25,46	26,71	26,09
Sulawesi Selatan	24,12	32,72	28,45
Sulawesi Tenggara	31,01	30,82	30,91
Gorontalo	23,69	34,92	29,29
Sulawesi Barat	26,08	32,43	29,22
Maluku	28,36	33,15	30,62
Maluku Utara	29,91	24,63	27,29
Papua Barat	31,24	32,20	31,70
Papua	21,50	20,59	21,06
Indonesia	25,85	27,65	26,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021

Tabel 3.18.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023

Provinsi	Jenis Fasilitas		
	HP/Telepon Seluler	Komputer/Laptop	Akses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,89	26,34	94,25
Sumatera Utara	97,37	24,24	95,49
Sumatera Barat	98,00	33,98	97,21
Riau	98,68	30,12	97,66
Jambi	97,85	29,99	96,35
Sumatera Selatan	98,64	29,65	97,77
Bengkulu	98,62	38,34	97,65
Lampung	98,92	29,62	96,63
Kep. Bangka Belitung	98,90	27,25	97,51
Kepulauan Riau	99,03	39,45	98,70
DKI Jakarta	98,18	43,40	97,47
Jawa Barat	97,30	28,88	96,26
Jawa Tengah	98,41	27,88	98,12
DI Yogyakarta	98,94	44,60	99,07
Jawa Timur	98,04	31,36	97,33
Banten	97,50	31,31	96,86
Bali	98,57	37,19	97,76
Nusa Tenggara Barat	98,33	23,26	95,33
Nusa Tenggara Timur	96,42	31,84	94,02
Kalimantan Barat	98,36	25,46	97,23
Kalimantan Tengah	97,99	31,83	97,51
Kalimantan Selatan	97,68	28,88	96,57
Kalimantan Timur	98,90	34,45	98,53
Kalimantan Utara	99,35	35,30	98,59
Sulawesi Utara	97,08	24,62	95,72
Sulawesi Tengah	97,35	33,57	94,26
Sulawesi Selatan	98,57	31,72	97,39
Sulawesi Tenggara	98,27	29,90	96,54
Gorontalo	100,00	36,24	97,99
Sulawesi Barat	99,35	34,12	96,75
Maluku	96,46	29,76	93,25
Maluku Utara	98,24	29,30	94,97
Papua Barat	92,20	24,13	88,86
Papua	91,04	26,18	88,00
Indonesia	97,84	30,85	96,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.18.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023

Provinsi	Jenis Fasilitas		
	HP/Telepon Seluler	Komputer/Laptop	Akses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,49	11,21	89,17
Sumatera Utara	95,90	14,44	91,68
Sumatera Barat	96,26	17,67	93,80
Riau	96,71	15,18	94,01
Jambi	97,34	14,59	95,59
Sumatera Selatan	95,52	11,48	91,49
Bengkulu	96,87	16,37	93,33
Lampung	97,75	13,96	95,10
Kep. Bangka Belitung	98,14	16,05	95,92
Kepulauan Riau	97,64	13,58	94,32
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	95,28	11,86	93,50
Jawa Tengah	97,34	14,91	96,82
DI Yogyakarta	98,15	26,71	98,74
Jawa Timur	96,40	16,55	93,74
Banten	94,13	9,21	90,35
Bali	96,20	14,68	94,52
Nusa Tenggara Barat	95,11	13,12	87,47
Nusa Tenggara Timur	88,89	14,68	75,30
Kalimantan Barat	92,34	9,99	88,57
Kalimantan Tengah	94,56	12,69	91,02
Kalimantan Selatan	97,16	17,53	95,72
Kalimantan Timur	97,96	15,39	97,14
Kalimantan Utara	97,95	19,19	95,55
Sulawesi Utara	94,93	14,42	90,07
Sulawesi Tengah	93,10	13,19	86,45
Sulawesi Selatan	96,94	17,57	93,72
Sulawesi Tenggara	97,76	15,74	93,49
Gorontalo	97,22	18,26	92,22
Sulawesi Barat	96,66	17,93	92,27
Maluku	84,55	9,31	73,68
Maluku Utara	86,78	11,42	75,12
Papua Barat	81,69	10,10	71,75
Papua	32,11	2,53	17,03
Indonesia	93,94	14,05	90,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.18.3 Persentase Pemuda Laki-laki yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023

Provinsi	Jenis Fasilitas		
	HP/Telepon Seluler	Komputer/Laptop	Akses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95,52	13,94	92,12
Sumatera Utara	96,78	16,83	93,74
Sumatera Barat	97,32	20,64	95,88
Riau	97,02	18,85	95,54
Jambi	97,54	16,64	96,20
Sumatera Selatan	97,38	15,90	94,43
Bengkulu	97,52	20,70	95,22
Lampung	98,17	16,28	95,77
Kep. Bangka Belitung	98,19	18,30	96,02
Kepulauan Riau	98,60	36,12	97,57
DKI Jakarta	97,93	40,24	96,52
Jawa Barat	96,63	23,56	95,57
Jawa Tengah	97,97	19,07	97,63
DI Yogyakarta	98,68	36,86	98,90
Jawa Timur	97,82	22,22	96,34
Banten	96,47	23,51	95,28
Bali	98,46	29,24	97,92
Nusa Tenggara Barat	97,87	17,59	93,36
Nusa Tenggara Timur	90,99	17,34	81,75
Kalimantan Barat	95,34	13,91	92,54
Kalimantan Tengah	96,49	17,75	94,97
Kalimantan Selatan	97,55	19,80	96,11
Kalimantan Timur	98,91	25,97	98,68
Kalimantan Utara	99,21	27,10	97,86
Sulawesi Utara	95,11	16,48	91,37
Sulawesi Tengah	94,32	16,73	88,03
Sulawesi Selatan	97,54	21,36	94,99
Sulawesi Tenggara	97,92	17,44	95,09
Gorontalo	98,15	21,97	94,14
Sulawesi Barat	97,33	17,17	93,73
Maluku	89,76	15,54	82,35
Maluku Utara	90,17	14,10	80,34
Papua Barat	86,86	14,98	79,68
Papua	51,14	8,91	38,69
Indonesia	96,32	21,27	94,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.18.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023

Provinsi	Jenis Fasilitas		
	HP/Telepon Seluler	Komputer/Laptop	Akses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95,16	19,19	89,83
Sumatera Utara	96,76	23,73	94,13
Sumatera Barat	97,02	31,96	95,28
Riau	98,10	24,27	95,55
Jambi	97,46	22,47	95,44
Sumatera Selatan	96,14	21,62	93,54
Bengkulu	97,48	28,07	94,57
Lampung	98,13	22,52	95,48
Kep. Bangka Belitung	98,96	26,62	97,64
Kepulauan Riau	99,22	38,10	99,05
DKI Jakarta	98,41	46,40	98,37
Jawa Barat	97,22	27,95	95,92
Jawa Tengah	97,87	24,89	97,42
DI Yogyakarta	98,90	45,66	99,13
Jawa Timur	96,88	28,06	95,31
Banten	97,10	29,75	95,67
Bali	97,46	33,94	95,89
Nusa Tenggara Barat	95,78	19,41	89,92
Nusa Tenggara Timur	91,25	22,24	79,95
Kalimantan Barat	93,77	17,47	90,98
Kalimantan Tengah	95,59	24,28	92,64
Kalimantan Selatan	97,29	26,81	96,19
Kalimantan Timur	98,31	31,77	97,54
Kalimantan Utara	98,54	33,07	97,29
Sulawesi Utara	97,30	24,37	95,41
Sulawesi Tengah	94,87	24,00	90,37
Sulawesi Selatan	98,00	28,16	96,18
Sulawesi Tenggara	98,02	25,80	94,45
Gorontalo	98,80	30,81	95,50
Sulawesi Barat	97,12	25,54	92,69
Maluku	90,37	22,11	83,14
Maluku Utara	90,51	19,87	82,24
Papua Barat	85,33	17,06	78,17
Papua	46,48	9,67	35,70
Indonesia	96,24	27,02	94,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.18.5 Persentase Pemuda yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2023

Provinsi	Jenis Fasilitas		
	HP/Telepon Seluler	Komputer/Laptop	Akses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95,34	16,57	90,97
Sumatera Utara	96,77	20,24	93,93
Sumatera Barat	97,17	26,21	95,58
Riau	97,54	21,47	95,55
Jambi	97,50	19,49	95,83
Sumatera Selatan	96,76	18,72	93,99
Bengkulu	97,50	24,33	94,90
Lampung	98,15	19,34	95,63
Kep. Bangka Belitung	98,57	22,41	96,82
Kepulauan Riau	98,91	37,10	98,30
DKI Jakarta	98,18	43,40	97,47
Jawa Barat	96,92	25,70	95,74
Jawa Tengah	97,92	21,93	97,52
DI Yogyakarta	98,79	41,27	99,01
Jawa Timur	97,35	25,15	95,82
Banten	96,78	26,60	95,47
Bali	97,97	31,51	96,94
Nusa Tenggara Barat	96,82	18,50	91,64
Nusa Tenggara Timur	91,12	19,77	80,86
Kalimantan Barat	94,56	15,69	91,76
Kalimantan Tengah	96,05	20,97	93,82
Kalimantan Selatan	97,42	23,28	96,15
Kalimantan Timur	98,62	28,79	98,12
Kalimantan Utara	98,89	29,99	97,59
Sulawesi Utara	96,17	20,28	93,32
Sulawesi Tengah	94,60	20,38	89,20
Sulawesi Selatan	97,77	24,73	95,58
Sulawesi Tenggara	97,97	21,66	94,77
Gorontalo	98,47	26,32	94,81
Sulawesi Barat	97,23	21,32	93,21
Maluku	90,06	18,78	82,74
Maluku Utara	90,34	16,97	81,29
Papua Barat	86,11	16,00	78,94
Papua	48,91	9,27	37,26
Indonesia	96,28	24,11	94,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.19.1 Sampling Error Partisipasi Sekolah Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Tidak/Belum Sekolah					Masih Sekolah (Negeri)			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Aceh	NA	NA	NA	51,96	37,89	35,24	40,54	3,57	
Sumatera Utara	0,15	0,01	0,30	47,85	18,31	16,90	19,72	3,93	
Sumatera Barat	0,30	0,09	0,51	34,93	32,62	30,08	35,16	3,97	
Riau	0,62	0,17	1,07	37,18	26,99	24,47	29,50	4,76	
Jambi	NA	NA	NA	57,13	29,99	26,73	33,26	5,56	
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	74,11	22,58	20,35	24,81	5,04	
Bengkulu	NA	NA	NA	62,61	35,66	32,06	39,25	5,14	
Lampung	0,26	0,01	0,52	48,95	23,60	20,78	26,43	6,10	
Kep. Bangka Belitung	0,41	0,10	0,73	38,59	22,74	19,78	25,71	6,65	
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	70,03	19,64	17,31	21,96	6,04	
DKI Jakarta	NA	NA	NA	55,20	15,12	13,63	16,60	5,01	
Jawa Barat	0,41	0,20	0,63	26,48	14,05	13,18	14,92	3,16	
Jawa Tengah	0,26	0,15	0,37	21,94	17,83	16,91	18,76	2,64	
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	100,00	30,53	28,02	33,04	4,20	
Jawa Timur	0,37	0,20	0,53	23,10	21,27	20,24	22,29	2,46	
Banten	0,76	0,20	1,32	37,49	16,99	15,40	18,59	4,79	
Bali	0,25	0,01	0,50	49,87	21,61	19,47	23,76	5,06	
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	99,91	27,45	24,95	29,94	4,64	
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	NA	98,88	28,91	25,68	32,15	5,71	
Kalimantan Barat	0,73	0,17	1,28	39,01	25,95	23,41	28,49	4,99	
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	60,28	26,87	24,31	29,43	4,86	
Kalimantan Selatan	0,46	0,13	0,79	36,56	24,23	21,96	26,49	4,76	
Kalimantan Timur	0,56	0,15	0,97	37,67	29,65	27,06	32,24	4,45	
Kalimantan Utara	2,66	1,31	4,00	25,86	26,03	22,60	29,47	6,74	
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	53,73	24,73	22,53	26,92	4,53	
Sulawesi Tengah	1,05	0,37	1,73	33,17	35,26	31,31	39,22	5,72	
Sulawesi Selatan	1,41	0,86	1,96	20,00	29,36	27,32	31,40	3,54	
Sulawesi Tenggara	1,89	1,08	2,69	21,72	36,44	33,41	39,47	4,24	
Gorontalo	NA	NA	NA	77,78	33,11	29,62	36,59	5,36	
Sulawesi Barat	4,21	2,23	6,19	23,94	28,95	24,67	33,24	7,55	
Maluku	NA	NA	NA	59,89	39,27	35,75	42,79	4,57	
Maluku Utara	NA	NA	NA	93,33	35,20	31,29	39,11	5,67	
Papua Barat	1,37	0,57	2,18	29,95	25,21	22,15	28,27	6,20	
Papua	3,92	1,68	6,16	29,20	27,56	24,83	30,28	5,05	
Indonesia	0,44	0,36	0,52	9,14	20,26	19,88	20,64	0,95	

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.19.1

Provinsi	Masih Sekolah (Swasta)				Tidak Sekolah Lagi			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	2,86	1,84	3,87	18,11	58,92	56,15	61,69	2,40
Sumatera Utara	14,88	13,34	16,41	5,26	66,66	64,68	68,65	1,52
Sumatera Barat	7,31	5,84	8,78	10,28	59,77	57,36	62,18	2,06
Riau	10,50	8,73	12,27	8,60	61,90	59,01	64,78	2,38
Jambi	8,80	6,98	10,62	10,56	60,90	57,53	64,28	2,83
Sumatera Selatan	9,36	7,86	10,85	8,17	67,97	65,58	70,36	1,79
Bengkulu	5,67	3,75	7,59	17,29	58,45	54,40	62,50	3,54
Lampung	8,64	6,91	10,36	10,20	67,49	64,31	70,68	2,41
Kep. Bangka Belitung	4,33	3,06	5,59	14,88	72,52	69,26	75,77	2,29
Kepulauan Riau	6,55	4,20	8,89	18,26	73,44	70,54	76,34	2,01
DKI Jakarta	12,79	11,47	14,11	5,26	71,98	70,10	73,86	1,33
Jawa Barat	12,54	11,70	13,38	3,40	72,99	71,85	74,14	0,80
Jawa Tengah	10,86	10,04	11,69	3,86	71,04	69,88	72,21	0,84
DI Yogyakarta	12,96	11,09	14,83	7,36	56,49	53,56	59,41	2,64
Jawa Timur	9,45	8,69	10,20	4,08	68,92	67,74	70,09	0,87
Banten	11,86	10,38	13,35	6,39	70,38	68,28	72,49	1,53
Bali	10,38	8,72	12,04	8,15	67,75	65,15	70,35	1,96
Nusa Tenggara Barat	6,54	5,04	8,04	11,69	65,93	63,11	68,75	2,18
Nusa Tenggara Timur	9,57	7,60	11,53	10,48	61,37	57,97	64,78	2,83
Kalimantan Barat	6,20	4,78	7,62	11,68	67,13	64,39	69,87	2,08
Kalimantan Tengah	3,82	2,62	5,01	15,97	68,90	66,17	71,63	2,02
Kalimantan Selatan	6,01	4,62	7,41	11,84	69,30	66,80	71,81	1,84
Kalimantan Timur	7,01	5,65	8,37	9,89	62,78	60,35	65,22	1,98
Kalimantan Utara	4,03	2,37	5,68	20,96	67,28	63,62	70,95	2,78
Sulawesi Utara	5,61	4,27	6,95	12,18	69,35	66,93	71,77	1,78
Sulawesi Tengah	5,77	3,71	7,84	18,21	57,92	53,99	61,84	3,46
Sulawesi Selatan	7,81	6,51	9,11	8,49	61,42	59,24	63,61	1,82
Sulawesi Tenggara	4,67	3,26	6,08	15,41	57,00	54,08	59,93	2,62
Gorontalo	3,44	2,19	4,69	18,55	63,15	59,50	66,81	2,95
Sulawesi Barat	5,91	3,27	8,55	22,77	60,93	55,87	65,98	4,23
Maluku	4,31	2,92	5,70	16,45	56,07	52,57	59,56	3,18
Maluku Utara	5,28	3,32	7,24	18,93	59,45	55,18	63,72	3,66
Papua Barat	7,65	5,55	9,76	14,03	65,77	62,49	69,04	2,54
Papua	5,32	3,99	6,64	12,68	63,21	59,79	66,63	2,76
Indonesia	10,50	10,18	10,82	1,55	68,81	68,35	69,27	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.19.2 Sampling Error Partisipasi Sekolah Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Tidak/Belum Sekolah				Masih Sekolah (Negeri)			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,34	0,18	0,51	24,67	29,95	28,42	31,47	2,60
Sumatera Utara	0,63	0,41	0,85	18,04	23,25	21,99	24,52	2,77
Sumatera Barat	0,87	0,46	1,27	23,63	28,09	26,37	29,80	3,12
Riau	0,53	0,22	0,84	29,73	21,71	20,03	23,39	3,96
Jambi	0,50	0,17	0,82	33,13	20,59	18,92	22,26	4,15
Sumatera Selatan	0,40	0,05	0,76	44,35	18,40	17,02	19,77	3,81
Bengkulu	0,23	0,02	0,43	45,54	25,66	23,25	28,07	4,79
Lampung	0,49	0,18	0,79	31,93	17,60	16,30	18,91	3,78
Kep. Bangka Belitung	0,53	0,02	1,05	49,36	19,33	16,91	21,76	6,40
Kepulauan Riau	0,94	0,04	1,85	49,12	22,89	18,40	27,38	10,01
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,40	0,16	0,64	30,34	14,42	13,21	15,63	4,28
Jawa Tengah	0,54	0,34	0,75	19,38	14,42	13,54	15,31	3,14
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	57,12	22,45	17,80	27,11	10,58
Jawa Timur	0,76	0,51	1,00	16,71	17,77	16,74	18,80	2,96
Banten	1,64	0,73	2,56	28,51	15,79	13,25	18,33	8,21
Bali	0,48	0,11	0,85	39,56	22,29	19,76	24,81	5,77
Nusa Tenggara Barat	0,34	0,09	0,58	36,92	21,85	19,69	24,02	5,05
Nusa Tenggara Timur	0,48	0,29	0,67	20,41	22,02	20,73	23,30	2,97
Kalimantan Barat	1,52	1,04	1,99	15,89	20,89	19,43	22,35	3,57
Kalimantan Tengah	0,75	0,25	1,26	33,98	20,85	18,89	22,81	4,80
Kalimantan Selatan	0,61	0,27	0,95	28,44	19,83	18,02	21,65	4,67
Kalimantan Timur	0,47	0,01	0,92	49,58	24,18	21,01	27,34	6,68
Kalimantan Utara	4,01	1,95	6,07	26,19	24,68	20,76	28,60	8,11
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	52,90	20,33	18,37	22,29	4,91
Sulawesi Tengah	1,64	0,92	2,36	22,52	23,43	21,61	25,26	3,98
Sulawesi Selatan	3,88	3,18	4,58	9,23	23,02	21,81	24,23	2,68
Sulawesi Tenggara	3,71	2,80	4,61	12,47	25,85	24,06	27,64	3,53
Gorontalo	2,06	1,23	2,90	20,65	24,21	21,64	26,79	5,42
Sulawesi Barat	6,47	5,04	7,91	11,30	21,79	19,56	24,02	5,22
Maluku	2,33	1,66	3,00	14,66	27,40	25,04	29,76	4,39
Maluku Utara	0,87	0,24	1,50	37,09	25,54	23,36	27,71	4,35
Papua Barat	4,81	3,65	5,96	12,26	23,41	21,32	25,50	4,56
Papua	32,13	29,64	34,62	3,95	18,64	17,27	20,02	3,77
Indonesia	1,76	1,65	1,87	3,25	19,69	19,37	20,00	0,82

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.19.2

Provinsi	Masih Sekolah (Swasta)					Tidak Sekolah Lagi				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	2,19	1,60	2,79	13,78	67,52	65,93	69,10	1,20		
Sumatera Utara	7,51	6,58	8,44	6,32	68,61	67,21	70,01	1,04		
Sumatera Barat	2,26	1,71	2,82	12,49	68,78	66,98	70,59	1,34		
Riau	4,79	3,87	5,71	9,76	72,97	71,13	74,80	1,29		
Jambi	3,40	2,51	4,30	13,41	75,51	73,65	77,38	1,26		
Sumatera Selatan	2,74	2,14	3,33	11,03	78,46	77,05	79,87	0,92		
Bengkulu	1,87	1,19	2,56	18,68	72,24	69,79	74,69	1,73		
Lampung	5,80	4,90	6,70	7,90	76,11	74,71	77,51	0,94		
Kep. Bangka Belitung	2,46	1,01	3,91	30,00	77,67	74,83	80,51	1,86		
Kepulauan Riau	2,12	0,00	5,34	77,69	74,05	68,36	79,74	3,92		
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jawa Barat	6,35	5,54	7,15	6,46	78,83	77,47	80,20	0,88		
Jawa Tengah	8,82	8,08	9,56	4,29	76,22	75,12	77,31	0,73		
DI Yogyakarta	5,13	3,38	6,88	17,40	71,89	66,70	77,08	3,69		
Jawa Timur	7,15	6,43	7,88	5,14	74,32	73,15	75,50	0,81		
Banten	5,22	3,95	6,49	12,42	77,34	74,65	80,04	1,78		
Bali	5,59	4,06	7,12	13,95	71,64	68,67	74,62	2,12		
Nusa Tenggara Barat	5,32	3,91	6,72	13,49	72,49	69,99	74,99	1,76		
Nusa Tenggara Timur	5,49	4,74	6,24	6,95	72,01	70,62	73,40	0,99		
Kalimantan Barat	2,43	1,84	3,03	12,50	75,16	73,57	76,75	1,08		
Kalimantan Tengah	2,25	1,27	3,24	22,32	76,14	74,12	78,17	1,36		
Kalimantan Selatan	4,85	3,79	5,90	11,10	74,71	72,63	76,78	1,41		
Kalimantan Timur	2,45	1,26	3,64	24,80	72,91	69,86	75,95	2,13		
Kalimantan Utara	2,65	0,54	4,77	40,70	68,66	63,67	73,64	3,71		
Sulawesi Utara	3,40	2,63	4,17	11,57	76,12	74,15	78,08	1,32		
Sulawesi Tengah	2,36	1,79	2,92	12,24	72,57	70,65	74,49	1,35		
Sulawesi Selatan	3,90	3,29	4,52	8,09	69,20	67,85	70,55	1,00		
Sulawesi Tenggara	2,40	1,83	2,97	12,16	68,04	66,20	69,88	1,38		
Gorontalo	1,22	0,67	1,77	23,05	72,51	69,71	75,31	1,97		
Sulawesi Barat	4,18	2,88	5,48	15,91	67,56	64,95	70,17	1,97		
Maluku	3,11	2,28	3,93	13,52	67,16	64,80	69,51	1,79		
Maluku Utara	4,00	3,06	4,94	12,00	69,59	67,46	71,73	1,57		
Papua Barat	3,57	2,70	4,43	12,37	68,22	66,33	70,11	1,41		
Papua	1,39	1,07	1,70	11,66	47,84	45,60	50,09	2,39		
Indonesia	5,33	5,13	5,53	1,92	73,23	72,87	73,59	0,25		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.19.3 Sampling Error Partisipasi Sekolah Pemuda Laki-laki menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Tidak/Belum Sekolah				Masih Sekolah (Negeri)			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,37	0,15	0,58	29,73	31,51	29,66	33,36	3,00
Sumatera Utara	0,44	0,23	0,65	24,69	19,35	17,93	20,78	3,76
Sumatera Barat	0,59	0,31	0,88	24,43	28,21	26,28	30,13	3,49
Riau	0,62	0,31	0,93	25,81	22,68	20,81	24,55	4,20
Jambi	0,69	0,31	1,06	28,06	21,25	19,22	23,27	4,87
Sumatera Selatan	0,37	0,07	0,67	41,92	18,54	16,87	20,21	4,60
Bengkulu	0,29	0,05	0,53	41,88	26,96	24,40	29,52	4,84
Lampung	0,49	0,16	0,82	34,40	18,32	16,68	19,95	4,56
Kep. Bangka Belitung	0,46	0,08	0,84	42,45	21,88	19,24	24,53	6,16
Kepulauan Riau	0,30	0,09	0,51	35,53	18,28	14,89	21,67	9,47
DKI Jakarta	NA	NA	NA	61,22	14,61	12,54	16,69	7,24
Jawa Barat	0,41	0,20	0,63	26,38	13,68	12,70	14,66	3,65
Jawa Tengah	0,46	0,30	0,63	18,19	15,86	14,99	16,74	2,82
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	70,48	28,33	25,34	31,32	5,38
Jawa Timur	0,59	0,40	0,78	16,26	18,42	17,47	19,37	2,64
Banten	0,81	0,43	1,18	23,76	15,93	14,18	17,69	5,63
Bali	NA	NA	NA	50,89	21,57	19,42	23,73	5,11
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	53,39	25,49	23,28	27,71	4,43
Nusa Tenggara Timur	0,47	0,23	0,71	25,67	24,20	22,48	25,92	3,62
Kalimantan Barat	1,28	0,75	1,80	20,98	21,16	19,47	22,86	4,09
Kalimantan Tengah	0,44	0,06	0,82	43,93	22,28	20,19	24,38	4,80
Kalimantan Selatan	0,79	0,38	1,20	26,52	21,07	19,12	23,01	4,70
Kalimantan Timur	0,49	0,16	0,83	34,43	26,74	24,17	29,30	4,90
Kalimantan Utara	3,93	2,12	5,73	23,45	22,75	19,51	25,99	7,26
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	53,35	21,69	19,73	23,65	4,60
Sulawesi Tengah	1,52	0,86	2,18	22,13	25,76	23,46	28,06	4,56
Sulawesi Selatan	3,06	2,40	3,71	10,94	26,16	24,44	27,88	3,35
Sulawesi Tenggara	3,64	2,68	4,60	13,46	29,41	27,01	31,81	4,16
Gorontalo	1,74	0,99	2,49	21,94	26,20	23,11	29,28	6,00
Sulawesi Barat	7,19	5,41	8,98	12,64	22,53	19,92	25,15	5,93
Maluku	1,89	1,20	2,59	18,81	31,06	28,34	33,78	4,47
Maluku Utara	0,67	0,20	1,14	36,04	27,16	24,80	29,53	4,44
Papua Barat	3,65	2,57	4,73	15,07	23,75	21,57	25,93	4,68
Papua	22,35	20,13	24,57	5,07	21,54	19,90	23,18	3,88
Indonesia	1,02	0,94	1,10	3,92	19,17	18,82	19,51	0,91

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.19.3

Provinsi	Masih Sekolah (Swasta)					Tidak Sekolah Lagi				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	1,91	1,36	2,46	14,68	66,21	64,29	68,13	1,48		
Sumatera Utara	11,74	10,35	13,13	6,06	68,47	66,53	70,41	1,44		
Sumatera Barat	5,17	3,92	6,42	12,32	66,03	64,03	68,03	1,54		
Riau	6,71	5,47	7,94	9,37	69,99	67,88	72,10	1,54		
Jambi	5,17	4,02	6,32	11,34	72,89	70,72	75,07	1,52		
Sumatera Selatan	5,72	4,67	6,76	9,31	75,38	73,55	77,21	1,24		
Bengkulu	2,80	1,88	3,72	16,76	69,95	67,30	72,61	1,94		
Lampung	6,79	5,72	7,87	8,06	74,40	72,56	76,25	1,26		
Kep. Bangka Belitung	3,30	2,09	4,51	18,73	74,36	71,47	77,25	1,99		
Kepulauan Riau	6,67	3,86	9,48	21,52	74,75	70,79	78,71	2,70		
DKI Jakarta	12,36	10,55	14,18	7,49	72,82	70,26	75,37	1,79		
Jawa Barat	11,42	10,52	12,31	4,01	74,49	73,25	75,73	0,85		
Jawa Tengah	10,23	9,48	10,98	3,75	73,45	72,36	74,53	0,75		
DI Yogyakarta	12,79	10,57	15,02	8,87	58,74	55,30	62,18	2,99		
Jawa Timur	8,86	8,13	9,58	4,19	72,13	71,02	73,25	0,79		
Banten	9,43	7,89	10,97	8,33	73,83	71,57	76,09	1,56		
Bali	9,72	8,07	11,37	8,66	68,58	66,01	71,15	1,91		
Nusa Tenggara Barat	5,79	4,40	7,18	12,21	68,47	66,03	70,91	1,82		
Nusa Tenggara Timur	5,98	4,94	7,03	8,91	69,35	67,51	71,18	1,35		
Kalimantan Barat	3,63	2,79	4,48	11,89	73,93	72,10	75,76	1,26		
Kalimantan Tengah	2,83	1,84	3,83	17,96	74,44	72,22	76,67	1,52		
Kalimantan Selatan	5,21	4,06	6,35	11,23	72,94	70,78	75,09	1,51		
Kalimantan Timur	5,98	4,38	7,59	13,69	66,79	64,14	69,43	2,02		
Kalimantan Utara	2,71	1,38	4,04	25,04	70,61	66,86	74,36	2,71		
Sulawesi Utara	4,05	2,93	5,17	14,13	73,93	71,86	76,00	1,43		
Sulawesi Tengah	2,58	1,71	3,45	17,13	70,14	67,80	72,48	1,70		
Sulawesi Selatan	5,65	4,64	6,67	9,17	65,13	63,29	66,97	1,44		
Sulawesi Tenggara	2,83	2,11	3,55	12,99	64,12	61,77	66,47	1,87		
Gorontalo	1,74	1,03	2,46	20,93	70,32	67,12	73,53	2,33		
Sulawesi Barat	3,23	2,05	4,42	18,72	67,04	63,93	70,14	2,36		
Maluku	3,54	2,49	4,60	15,18	63,51	60,74	66,27	2,22		
Maluku Utara	5,03	3,76	6,30	12,86	67,14	64,68	69,60	1,87		
Papua Barat	4,76	3,34	6,19	15,27	67,83	65,42	70,24	1,81		
Papua	2,68	2,03	3,33	12,35	53,43	51,20	55,66	2,13		
Indonesia	8,40	8,13	8,68	1,68	71,41	71,00	71,82	0,29		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.19.4 Sampling Error Partisipasi Sekolah Pemuda Perempuan menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Tidak/Belum Sekolah					Masih Sekolah (Negeri)				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	0,31	0,10	0,53	35,05	34,00	32,21	35,79	2,68		
Sumatera Utara	0,25	0,16	0,35	19,59	21,33	19,99	22,66	3,19		
Sumatera Barat	0,54	0,27	0,82	25,40	32,79	30,64	34,93	3,34		
Riau	0,51	0,12	0,91	39,03	25,26	23,27	27,26	4,03		
Jambi	NA	NA	NA	55,97	26,03	23,75	28,31	4,46		
Sumatera Selatan	0,20	0,01	0,39	47,55	21,63	19,91	23,34	4,04		
Bengkulu	NA	NA	NA	68,35	31,68	28,83	34,53	4,59		
Lampung	0,33	0,11	0,55	33,87	21,06	19,21	22,92	4,49		
Kep. Bangka Belitung	0,48	0,05	0,90	45,60	20,65	18,06	23,23	6,39		
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	85,12	21,63	18,44	24,82	7,52		
DKI Jakarta	NA	NA	NA	100,00	15,60	13,57	17,62	6,62		
Jawa Barat	0,41	0,21	0,61	24,67	14,59	13,57	15,60	3,55		
Jawa Tengah	0,31	0,19	0,44	20,16	16,69	15,80	17,58	2,71		
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	73,76	29,72	26,72	32,73	5,15		
Jawa Timur	0,47	0,30	0,64	18,08	21,17	20,14	22,21	2,50		
Banten	1,10	0,23	1,96	40,13	17,56	15,71	19,41	5,37		
Bali	0,50	0,11	0,90	40,35	22,00	19,56	24,45	5,67		
Nusa Tenggara Barat	0,15	0,04	0,27	38,19	24,15	21,74	26,55	5,08		
Nusa Tenggara Timur	0,29	0,08	0,50	36,88	23,93	22,16	25,69	3,77		
Kalimantan Barat	1,17	0,74	1,61	18,95	24,35	22,51	26,20	3,86		
Kalimantan Tengah	0,77	0,22	1,33	36,51	24,66	22,50	26,81	4,46		
Kalimantan Selatan	0,27	0,09	0,46	34,36	23,06	21,11	25,01	4,32		
Kalimantan Timur	0,57	0,06	1,08	45,64	29,38	26,55	32,22	4,92		
Kalimantan Utara	2,23	1,01	3,44	27,81	28,61	25,07	32,15	6,31		
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	67,86	24,11	21,68	26,54	5,15		
Sulawesi Tengah	1,34	0,63	2,05	26,97	29,44	26,99	31,89	4,25		
Sulawesi Selatan	2,20	1,65	2,75	12,74	26,30	24,65	27,95	3,20		
Sulawesi Tenggara	2,26	1,63	2,89	14,20	31,13	29,01	33,25	3,48		
Gorontalo	0,79	0,16	1,42	40,48	30,26	27,43	33,10	4,78		
Sulawesi Barat	4,79	3,43	6,14	14,41	24,06	21,29	26,83	5,87		
Maluku	0,93	0,56	1,30	20,41	34,79	31,47	38,11	4,86		
Maluku Utara	0,58	0,06	1,09	45,42	29,92	27,36	32,49	4,38		
Papua Barat	3,06	2,26	3,86	13,37	24,59	21,95	27,24	5,48		
Papua	25,98	23,77	28,19	4,34	20,80	19,13	22,47	4,09		
Indonesia	0,91	0,83	0,99	4,50	20,91	20,56	21,27	0,86		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.19.4

Provinsi	Masih Sekolah (Swasta)					Tidak Sekolah Lagi				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	2,94	2,21	3,68	12,78	62,74	60,90	64,58	1,49		
Sumatera Utara	12,00	10,73	13,27	5,40	66,42	64,74	68,11	1,30		
Sumatera Barat	4,63	3,69	5,57	10,39	62,04	59,85	64,23	1,80		
Riau	7,71	6,36	9,07	8,94	66,51	64,22	68,79	1,75		
Jambi	5,07	3,88	6,25	11,94	68,73	66,33	71,12	1,78		
Sumatera Selatan	5,02	4,01	6,03	10,23	73,15	71,32	74,98	1,28		
Bengkulu	3,71	2,53	4,89	16,19	64,45	61,55	67,35	2,29		
Lampung	6,76	5,57	7,95	8,99	71,85	69,86	73,84	1,41		
Kep. Bangka Belitung	3,75	2,28	5,21	19,97	75,13	72,12	78,15	2,05		
Kepulauan Riau	5,60	3,36	7,85	20,42	72,21	68,34	76,08	2,73		
DKI Jakarta	13,19	11,24	15,13	7,51	71,19	68,54	73,83	1,89		
Jawa Barat	11,35	10,34	12,36	4,54	73,66	72,32	74,99	0,92		
Jawa Tengah	9,61	8,85	10,37	4,04	73,38	72,28	74,48	0,76		
DI Yogyakarta	10,22	8,25	12,19	9,82	59,96	56,72	63,20	2,76		
Jawa Timur	8,12	7,39	8,84	4,55	70,24	69,09	71,39	0,84		
Banten	11,48	9,82	13,14	7,37	69,86	67,57	72,16	1,68		
Bali	8,60	6,77	10,43	10,85	68,89	65,99	71,79	2,15		
Nusa Tenggara Barat	6,14	4,80	7,49	11,15	69,55	66,94	72,17	1,92		
Nusa Tenggara Timur	7,43	6,42	8,44	6,93	68,35	66,46	70,24	1,41		
Kalimantan Barat	4,01	3,16	4,86	10,84	70,47	68,40	72,53	1,50		
Kalimantan Tengah	3,03	2,13	3,93	15,20	71,54	69,26	73,82	1,62		
Kalimantan Selatan	5,67	4,54	6,81	10,21	70,99	68,89	73,10	1,51		
Kalimantan Timur	5,31	4,06	6,56	12,00	64,73	61,84	67,62	2,28		
Kalimantan Utara	4,49	2,39	6,60	23,85	64,67	60,79	68,55	3,06		
Sulawesi Utara	5,33	4,20	6,45	10,77	70,40	67,78	73,02	1,90		
Sulawesi Tengah	4,54	3,24	5,83	14,58	64,68	62,14	67,23	2,01		
Sulawesi Selatan	6,11	5,10	7,12	8,46	65,40	63,61	67,18	1,39		
Sulawesi Tenggara	3,85	2,86	4,85	13,23	62,76	60,64	64,87	1,72		
Gorontalo	2,70	1,60	3,80	20,77	66,24	63,23	69,26	2,32		
Sulawesi Barat	5,87	4,15	7,59	14,98	65,29	62,16	68,41	2,44		
Maluku	3,79	2,79	4,79	13,43	60,50	57,24	63,75	2,74		
Maluku Utara	3,76	2,77	4,75	13,40	65,74	62,96	68,51	2,15		
Papua Barat	5,83	4,46	7,19	11,96	66,52	63,97	69,07	1,95		
Papua	2,31	1,78	2,85	11,77	50,90	48,57	53,24	2,34		
Indonesia	8,45	8,16	8,74	1,76	69,73	69,31	70,15	0,31		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.19.5 Sampling Error Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Tidak/Belum Sekolah				Masih Sekolah (Negeri)			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,34	0,18	0,50	24,24	32,76	31,38	34,14	2,14
Sumatera Utara	0,35	0,22	0,47	18,25	20,33	19,34	21,31	2,47
Sumatera Barat	0,57	0,35	0,79	19,65	30,46	28,91	32,02	2,61
Riau	0,57	0,31	0,83	23,44	23,93	22,48	25,38	3,08
Jambi	0,44	0,19	0,68	28,72	23,59	22,03	25,14	3,37
Sumatera Selatan	0,28	0,06	0,51	39,79	20,06	18,85	21,27	3,07
Bengkulu	0,23	0,06	0,39	36,84	29,28	27,23	31,33	3,57
Lampung	0,41	0,19	0,63	27,16	19,66	18,38	20,95	3,33
Kep. Bangka Belitung	0,47	0,18	0,75	31,25	21,27	19,29	23,25	4,76
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	56,98	19,93	17,78	22,09	5,52
DKI Jakarta	NA	NA	NA	55,20	15,12	13,63	16,60	5,01
Jawa Barat	0,41	0,23	0,59	22,36	14,12	13,38	14,87	2,69
Jawa Tengah	0,39	0,28	0,50	14,69	16,27	15,63	16,92	2,02
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	50,85	29,03	26,79	31,27	3,94
Jawa Timur	0,53	0,39	0,67	13,65	19,80	19,06	20,53	1,89
Banten	0,95	0,47	1,43	25,87	16,74	15,37	18,10	4,17
Bali	0,31	0,10	0,52	34,20	21,78	20,06	23,51	4,04
Nusa Tenggara Barat	0,20	0,06	0,35	36,21	24,82	23,14	26,50	3,45
Nusa Tenggara Timur	0,38	0,22	0,54	21,20	24,06	22,74	25,39	2,81
Kalimantan Barat	1,23	0,86	1,59	15,03	22,75	21,45	24,06	2,93
Kalimantan Tengah	0,60	0,25	0,96	29,86	23,45	21,88	25,03	3,43
Kalimantan Selatan	0,53	0,30	0,77	22,60	22,06	20,61	23,51	3,35
Kalimantan Timur	0,53	0,21	0,85	30,71	28,02	25,97	30,08	3,74
Kalimantan Utara	3,10	1,98	4,23	18,48	25,59	22,94	28,23	5,27
Sulawesi Utara	0,25	0,04	0,45	42,11	22,86	21,34	24,38	3,39
Sulawesi Tengah	1,43	0,90	1,96	18,77	27,61	25,74	29,47	3,44
Sulawesi Selatan	2,63	2,19	3,08	8,62	26,23	25,03	27,42	2,33
Sulawesi Tenggara	2,95	2,32	3,57	10,83	30,27	28,57	31,97	2,86
Gorontalo	1,27	0,76	1,78	20,44	28,20	26,03	30,37	3,93
Sulawesi Barat	6,00	4,79	7,21	10,30	23,29	21,30	25,28	4,35
Maluku	1,42	1,01	1,83	14,76	32,89	30,78	35,01	3,28
Maluku Utara	0,62	0,18	1,06	36,08	28,54	26,56	30,52	3,54
Papua Barat	3,36	2,60	4,13	11,64	24,16	22,39	25,94	3,76
Papua	24,09	22,12	26,06	4,17	21,18	19,91	22,46	3,06
Indonesia	0,97	0,90	1,03	3,43	20,03	19,77	20,29	0,66

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.19.5

Provinsi	Masih Sekolah (Swasta)					Tidak Sekolah Lagi				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	2,43	1,90	2,95	11,02	64,47	63,04	65,90	1,13		
Sumatera Utara	11,87	10,87	12,86	4,27	67,46	66,15	68,77	0,99		
Sumatera Barat	4,90	4,07	5,73	8,63	64,07	62,53	65,60	1,22		
Riau	7,19	6,25	8,13	6,66	68,31	66,65	69,96	1,23		
Jambi	5,12	4,27	5,97	8,48	70,86	69,16	72,55	1,22		
Sumatera Selatan	5,37	4,65	6,10	6,88	74,28	73,00	75,56	0,88		
Bengkulu	3,25	2,43	4,07	12,85	67,24	65,06	69,42	1,65		
Lampung	6,77	5,93	7,62	6,35	73,15	71,72	74,58	1,00		
Kep. Bangka Belitung	3,52	2,57	4,47	13,73	74,74	72,53	76,96	1,51		
Kepulauan Riau	6,14	3,98	8,31	17,97	73,49	70,81	76,18	1,86		
DKI Jakarta	12,79	11,47	14,11	5,26	71,98	70,10	73,86	1,33		
Jawa Barat	11,38	10,68	12,08	3,13	74,08	73,12	75,05	0,67		
Jawa Tengah	9,93	9,36	10,49	2,89	73,41	72,61	74,22	0,56		
DI Yogyakarta	11,50	9,94	13,07	6,94	59,35	56,74	61,97	2,25		
Jawa Timur	8,49	7,95	9,02	3,20	71,18	70,34	72,02	0,60		
Banten	10,45	9,25	11,65	5,86	71,87	70,11	73,62	1,25		
Bali	9,18	7,87	10,48	7,27	68,73	66,64	70,82	1,55		
Nusa Tenggara Barat	5,97	4,94	7,00	8,82	69,01	67,11	70,91	1,41		
Nusa Tenggara Timur	6,70	5,92	7,48	5,94	68,85	67,44	70,27	1,05		
Kalimantan Barat	3,82	3,17	4,46	8,61	72,20	70,79	73,62	1,00		
Kalimantan Tengah	2,93	2,17	3,69	13,22	73,01	71,37	74,66	1,15		
Kalimantan Selatan	5,44	4,56	6,31	8,22	71,97	70,35	73,59	1,15		
Kalimantan Timur	5,66	4,62	6,69	9,31	65,79	63,82	67,75	1,52		
Kalimantan Utara	3,57	2,27	4,88	18,65	67,74	64,78	70,69	2,23		
Sulawesi Utara	4,67	3,83	5,50	9,10	72,23	70,60	73,86	1,15		
Sulawesi Tengah	3,56	2,73	4,39	11,88	67,40	65,47	69,33	1,46		
Sulawesi Selatan	5,88	5,14	6,62	6,39	65,26	63,95	66,57	1,03		
Sulawesi Tenggara	3,35	2,67	4,02	10,32	63,43	61,74	65,12	1,36		
Gorontalo	2,21	1,57	2,86	14,83	68,32	66,00	70,63	1,73		
Sulawesi Barat	4,54	3,37	5,71	13,16	66,17	63,84	68,49	1,79		
Maluku	3,66	2,89	4,44	10,81	62,02	59,94	64,11	1,72		
Maluku Utara	4,40	3,50	5,29	10,38	66,44	64,40	68,49	1,57		
Papua Barat	5,28	4,29	6,28	9,63	67,19	65,43	68,95	1,34		
Papua	2,51	2,06	2,95	9,01	52,22	50,33	54,12	1,85		
Indonesia	8,42	8,21	8,63	1,27	70,58	70,27	70,89	0,23		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.20.1 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	16-18 TAHUN				19-23 TAHUN			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	88,86	85,81	91,92	1,75	43,27	38,63	47,91	5,47
Sumatera Utara	80,70	77,86	83,54	1,80	35,01	31,35	38,66	5,33
Sumatera Barat	88,64	85,47	91,82	1,83	50,05	45,74	54,36	4,40
Riau	84,28	80,62	87,95	2,22	43,44	38,58	48,29	5,70
Jambi	78,87	73,61	84,12	3,40	37,90	31,77	44,04	8,26
Sumatera Selatan	76,65	71,65	81,65	3,33	33,87	29,68	38,07	6,32
Bengkulu	82,41	77,22	87,59	3,21	52,11	45,73	58,49	6,24
Lampung	72,83	67,59	78,08	3,67	33,40	27,42	39,39	9,15
Kep. Bangka Belitung	72,94	67,33	78,54	3,92	21,53	16,87	26,20	11,06
Kepulauan Riau	85,74	80,12	91,35	3,34	23,01	16,99	29,03	13,34
DKI Jakarta	72,50	69,04	75,97	2,44	28,43	25,40	31,46	5,43
Jawa Barat	70,53	68,20	72,87	1,69	28,58	26,62	30,54	3,50
Jawa Tengah	73,36	71,12	75,60	1,56	32,03	29,92	34,14	3,36
DI Yogyakarta	93,56	90,59	96,53	1,62	60,08	55,01	65,15	4,31
Jawa Timur	77,79	75,46	80,11	1,52	34,79	32,81	36,76	2,90
Banten	71,96	67,67	76,25	3,04	27,94	24,40	31,48	6,47
Bali	86,00	82,60	89,41	2,02	37,36	32,72	42,01	6,34
Nusa Tenggara Barat	83,68	79,50	87,86	2,55	33,43	28,50	38,36	7,52
Nusa Tenggara Timur	79,91	75,09	84,72	3,07	48,17	42,45	53,89	6,06
Kalimantan Barat	73,13	68,05	78,21	3,55	36,12	31,31	40,92	6,79
Kalimantan Tengah	70,51	64,83	76,20	4,11	31,38	26,38	36,37	8,12
Kalimantan Selatan	71,43	66,47	76,39	3,54	36,03	31,57	40,50	6,32
Kalimantan Timur	83,88	80,09	87,67	2,31	40,33	35,75	44,90	5,79
Kalimantan Utara	75,67	68,80	82,54	4,63	34,18	27,69	40,67	9,69
Sulawesi Utara	76,52	71,87	81,16	3,10	29,54	25,47	33,61	7,03
Sulawesi Tengah	84,92	80,44	89,39	2,69	46,08	39,15	53,02	7,68
Sulawesi Selatan	74,73	70,90	78,57	2,62	46,92	42,67	51,16	4,61
Sulawesi Tenggara	79,19	74,37	84,02	3,11	45,73	39,90	51,56	6,50
Gorontalo	75,36	69,73	80,99	3,81	47,26	40,07	54,45	7,76
Sulawesi Barat	74,73	65,96	83,50	5,98	34,11	25,64	42,57	12,66
Maluku	82,56	78,07	87,05	2,78	52,48	47,13	57,82	5,19
Maluku Utara	84,93	78,75	91,11	3,71	45,61	38,12	53,10	8,37
Papua Barat	81,95	76,42	87,49	3,45	45,08	37,99	52,17	8,03
Papua	82,04	77,20	86,88	3,01	42,56	37,86	47,27	5,64
Indonesia	75,91	75,04	76,78	0,59	33,84	33,03	34,64	1,21

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.20.1

Provinsi	24-30 TAHUN					16-30 TAHUN				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	—	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	
		Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	15,02	12,21	17,82	9,53	40,74	37,98	43,51	3,47		
Sumatera Utara	8,13	6,65	9,62	9,32	33,18	31,20	35,17	3,05		
Sumatera Barat	5,22	3,59	6,84	15,91	39,93	37,51	42,34	3,08		
Riau	5,92	4,03	7,82	16,31	37,48	34,64	40,33	3,88		
Jambi	14,82	10,40	19,24	15,23	38,79	35,38	42,20	4,49		
Sumatera Selatan	9,83	7,26	12,40	13,36	31,93	29,54	34,33	3,83		
Bengkulu	11,07	7,82	14,32	14,98	41,33	37,28	45,38	5,00		
Lampung	8,57	5,94	11,21	15,69	32,24	29,07	35,42	5,02		
Kep. Bangka Belitung	8,03	4,38	11,69	23,22	27,07	23,83	30,31	6,11		
Kepulauan Riau	5,95	3,27	8,64	23,00	26,18	23,35	29,01	5,51		
DKI Jakarta	10,50	8,57	12,42	9,36	27,91	26,04	29,78	3,42		
Jawa Barat	4,53	3,68	5,38	9,59	26,59	25,45	27,73	2,18		
Jawa Tengah	5,79	4,93	6,64	7,55	28,70	27,53	29,87	2,08		
DI Yogyakarta	12,81	10,05	15,56	10,97	43,49	40,56	46,42	3,43		
Jawa Timur	7,79	6,78	8,80	6,61	30,72	29,55	31,88	1,94		
Banten	8,48	6,67	10,29	10,88	28,86	26,78	30,93	3,67		
Bali	4,80	3,42	6,17	14,62	32,00	29,39	34,60	4,15		
Nusa Tenggara Barat	10,79	8,28	13,30	11,87	33,99	31,16	36,81	4,24		
Nusa Tenggara Timur	9,58	6,70	12,46	15,35	38,48	35,12	41,84	4,46		
Kalimantan Barat	8,46	5,91	11,01	15,37	32,15	29,38	34,91	4,39		
Kalimantan Tengah	10,72	7,70	13,73	14,34	30,69	27,98	33,41	4,51		
Kalimantan Selatan	4,17	2,62	5,71	18,88	30,24	27,70	32,77	4,27		
Kalimantan Timur	10,77	7,36	14,17	16,14	36,66	34,22	39,10	3,40		
Kalimantan Utara	6,43	3,42	9,45	23,90	30,06	26,58	33,54	5,91		
Sulawesi Utara	9,61	7,24	11,97	12,55	30,33	27,92	32,75	4,06		
Sulawesi Tengah	13,73	10,03	17,43	13,74	41,04	37,16	44,92	4,82		
Sulawesi Selatan	11,19	8,86	13,53	10,65	37,17	34,95	39,38	3,04		
Sulawesi Tenggara	16,32	12,76	19,88	11,12	41,11	38,17	44,04	3,64		
Gorontalo	7,75	4,67	10,83	20,27	36,54	32,83	40,25	5,18		
Sulawesi Barat	12,78	7,80	17,75	19,87	34,86	29,85	39,88	7,34		
Maluku	13,16	9,32	17,01	14,91	43,58	40,11	47,04	4,06		
Maluku Utara	13,98	10,23	17,74	13,71	40,47	36,22	44,73	5,36		
Papua Barat	2,91	1,45	4,37	25,58	32,86	29,70	36,03	4,91		
Papua	4,73	2,65	6,82	22,49	32,87	30,07	35,67	4,34		
Indonesia	7,45	7,07	7,83	2,60	30,75	30,30	31,21	0,76		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.20.2 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Umur, 2023

Provinsi	16-18 TAHUN				19-23 TAHUN			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	80,46	77,77	83,16	1,71	30,76	28,05	33,47	4,50
Sumatera Utara	77,40	75,00	79,80	1,58	24,98	22,41	27,55	5,25
Sumatera Barat	79,58	76,85	82,31	1,75	32,53	29,39	35,67	4,93
Riau	73,43	69,71	77,14	2,58	24,22	21,16	27,29	6,46
Jambi	68,91	65,02	72,81	2,88	19,92	16,91	22,92	7,69
Sumatera Selatan	68,52	65,29	71,75	2,40	13,21	11,28	15,13	7,44
Bengkulu	77,88	73,60	82,17	2,81	23,23	19,23	27,23	8,79
Lampung	71,13	67,86	74,40	2,35	18,01	15,57	20,44	6,89
Kep. Bangka Belitung	64,90	57,85	71,95	5,54	16,52	11,80	21,25	14,59
Kepulauan Riau	78,83	67,62	90,04	7,25	17,37	6,34	28,41	32,41
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	60,73	57,31	64,16	2,88	16,74	14,57	18,91	6,61
Jawa Tengah	68,14	65,53	70,75	1,95	19,69	17,89	21,49	4,66
DI Yogyakarta	81,54	73,82	89,27	4,84	32,64	23,51	41,76	14,27
Jawa Timur	69,25	66,65	71,85	1,91	19,85	17,98	21,71	4,79
Banten	61,24	54,59	67,89	5,54	13,35	9,15	17,55	16,06
Bali	81,23	76,24	86,22	3,13	25,20	19,95	30,45	10,62
Nusa Tenggara Barat	70,79	65,07	76,52	4,13	22,22	18,05	26,39	9,57
Nusa Tenggara Timur	74,32	71,95	76,69	1,63	26,22	23,94	28,49	4,42
Kalimantan Barat	66,89	63,30	70,48	2,74	22,08	19,51	24,65	5,94
Kalimantan Tengah	63,06	57,84	68,28	4,22	20,70	17,07	24,34	8,96
Kalimantan Selatan	68,46	64,02	72,91	3,31	21,53	17,62	25,44	9,27
Kalimantan Timur	75,40	68,64	82,15	4,57	21,47	16,67	26,27	11,40
Kalimantan Utara	79,42	72,23	86,61	4,62	22,94	17,10	28,78	12,99
Sulawesi Utara	71,85	67,69	76,01	2,95	20,37	16,91	23,83	8,66
Sulawesi Tengah	71,33	67,01	75,65	3,09	21,41	18,30	24,52	7,41
Sulawesi Selatan	67,23	64,18	70,29	2,32	27,91	25,46	30,36	4,47
Sulawesi Tenggara	71,52	68,12	74,92	2,43	23,60	20,08	27,12	7,61
Gorontalo	68,44	62,61	74,27	4,35	25,94	21,78	30,10	8,18
Sulawesi Barat	70,59	66,24	74,93	3,14	23,15	18,47	27,82	10,30
Maluku	77,62	73,81	81,43	2,50	28,08	24,08	32,07	7,27
Maluku Utara	75,64	71,86	79,42	2,55	24,93	20,94	28,93	8,17
Papua Barat	79,63	76,06	83,19	2,29	28,51	25,06	31,95	6,17
Papua	57,48	54,04	60,91	3,05	19,54	17,29	21,80	5,89
Indonesia	69,92	69,14	70,71	0,57	21,29	20,71	21,87	1,39

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.20.2

Provinsi	24-30 TAHUN					16-30 TAHUN				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	9,06	7,59	10,52	8,24	32,14	30,56	33,73	2,52		
Sumatera Utara	8,57	7,19	9,95	8,22	30,76	29,38	32,14	2,28		
Sumatera Barat	4,14	3,07	5,22	13,24	30,35	28,58	32,12	2,97		
Riau	3,86	2,50	5,22	17,97	26,50	24,67	28,34	3,53		
Jambi	6,29	4,75	7,83	12,51	23,99	22,16	25,82	3,89		
Sumatera Selatan	4,69	3,52	5,87	12,81	21,13	19,67	22,60	3,54		
Bengkulu	6,95	5,27	8,62	12,28	27,53	25,10	29,96	4,51		
Lampung	4,65	3,60	5,70	11,50	23,40	22,05	24,76	2,95		
Kep. Bangka Belitung	4,87	2,40	7,35	25,87	21,79	19,01	24,58	6,53		
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	53,94	25,01	19,41	30,61	11,42		
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jawa Barat	3,62	2,67	4,57	13,37	20,77	19,41	22,12	3,33		
Jawa Tengah	3,64	2,97	4,31	9,43	23,24	22,16	24,33	2,38		
DI Yogyakarta	5,40	2,79	8,00	24,60	27,58	22,52	32,64	9,37		
Jawa Timur	8,28	7,15	9,41	6,97	24,92	23,77	26,07	2,36		
Banten	7,04	4,40	9,69	19,14	21,01	18,41	23,62	6,33		
Bali	4,28	2,05	6,50	26,50	27,88	24,94	30,82	5,38		
Nusa Tenggara Barat	9,69	7,29	12,09	12,64	27,17	24,65	29,69	4,73		
Nusa Tenggara Timur	4,20	3,25	5,15	11,54	27,51	26,12	28,90	2,58		
Kalimantan Barat	4,56	3,54	5,58	11,36	23,33	21,78	24,87	3,38		
Kalimantan Tengah	6,76	4,92	8,61	13,93	23,10	21,13	25,07	4,35		
Kalimantan Selatan	4,75	3,41	6,09	14,35	24,68	22,61	26,75	4,28		
Kalimantan Timur	9,42	5,79	13,05	19,67	26,62	23,59	29,65	5,81		
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	51,98	27,33	22,49	32,18	9,04		
Sulawesi Utara	5,73	4,21	7,25	13,56	23,73	21,76	25,70	4,24		
Sulawesi Tengah	7,19	5,58	8,80	11,41	25,79	23,94	27,64	3,66		
Sulawesi Selatan	7,37	6,11	8,63	8,70	26,92	25,61	28,23	2,48		
Sulawesi Tenggara	8,16	6,62	9,71	9,67	28,25	26,44	30,06	3,27		
Gorontalo	5,59	3,48	7,71	19,31	25,43	22,81	28,05	5,26		
Sulawesi Barat	7,73	5,70	9,75	13,37	25,97	23,59	28,34	4,66		
Maluku	8,23	5,95	10,50	14,12	30,51	28,09	32,93	4,05		
Maluku Utara	10,07	8,02	12,12	10,38	29,54	27,37	31,71	3,74		
Papua Barat	2,43	1,55	3,30	18,36	26,97	24,99	28,96	3,76		
Papua	2,45	1,82	3,08	13,18	20,03	18,61	21,44	3,61		
Indonesia	5,85	5,56	6,14	2,50	25,02	24,67	25,36	0,71		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.20.3 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Umur, 2023

Provinsi	16-18 TAHUN					19-23 TAHUN				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	83,08	80,12	86,04	1,82	31,65	28,57	34,73	4,96		
Sumatera Utara	77,99	75,25	80,73	1,79	27,89	24,51	31,28	6,19		
Sumatera Barat	80,09	76,58	83,59	2,23	38,96	34,98	42,95	5,22		
Riau	75,51	71,77	79,25	2,53	29,51	25,73	33,29	6,53		
Jambi	67,81	63,03	72,58	3,59	22,94	19,43	26,45	7,81		
Sumatera Selatan	69,62	65,58	73,66	2,96	19,97	16,88	23,07	7,90		
Bengkulu	72,43	67,67	77,19	3,35	30,88	26,02	35,73	8,02		
Lampung	69,81	66,04	73,58	2,76	20,70	17,36	24,03	8,22		
Kep. Bangka Belitung	69,72	63,70	75,74	4,41	19,88	15,31	24,44	11,72		
Kepulauan Riau	83,60	76,48	90,72	4,34	19,26	12,35	26,16	18,30		
DKI Jakarta	70,18	64,84	75,52	3,88	27,74	23,53	31,95	7,75		
Jawa Barat	67,27	64,45	70,08	2,14	24,74	22,61	26,88	4,40		
Jawa Tengah	70,46	68,13	72,79	1,68	25,16	23,23	27,08	3,90		
DI Yogyakarta	88,73	83,89	93,57	2,78	56,30	49,62	62,98	6,06		
Jawa Timur	73,02	70,71	75,34	1,61	25,22	23,35	27,09	3,79		
Banten	67,87	62,61	73,12	3,95	22,87	19,23	26,52	8,14		
Bali	85,38	81,41	89,36	2,38	33,39	29,06	37,73	6,62		
Nusa Tenggara Barat	74,44	69,51	79,36	3,37	30,91	26,33	35,49	7,56		
Nusa Tenggara Timur	75,24	71,99	78,49	2,21	31,61	28,39	34,83	5,20		
Kalimantan Barat	66,92	62,93	70,91	3,04	23,93	20,85	27,00	6,56		
Kalimantan Tengah	65,24	60,09	70,39	4,03	23,38	19,56	27,19	8,33		
Kalimantan Selatan	69,59	64,69	74,49	3,59	26,70	22,76	30,63	7,52		
Kalimantan Timur	80,03	75,17	84,89	3,10	31,15	26,29	36,01	7,96		
Kalimantan Utara	72,86	65,74	79,99	4,99	23,32	17,86	28,78	11,94		
Sulawesi Utara	73,70	69,65	77,74	2,80	21,84	18,15	25,54	8,63		
Sulawesi Tengah	73,48	68,81	78,14	3,24	26,76	22,79	30,73	7,57		
Sulawesi Selatan	70,58	67,18	73,99	2,46	35,65	31,94	39,37	5,32		
Sulawesi Tenggara	71,45	67,00	75,90	3,18	30,00	25,28	34,73	8,03		
Gorontalo	65,86	59,75	71,97	4,73	31,53	26,14	36,92	8,72		
Sulawesi Barat	64,41	59,25	69,57	4,09	21,02	15,73	26,31	12,85		
Maluku	79,79	75,62	83,95	2,66	34,67	29,86	39,48	7,08		
Maluku Utara	77,57	73,21	81,93	2,87	29,20	24,82	33,58	7,65		
Papua Barat	76,50	71,31	81,69	3,46	35,03	29,88	40,19	7,51		
Papua	64,73	61,13	68,33	2,84	26,00	23,08	28,93	5,74		
Indonesia	71,90	71,05	72,76	0,61	26,79	26,07	27,50	1,36		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.20.3

Provinsi	24-30 TAHUN				16-30 TAHUN			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	10,24	8,42	12,06	9,07	33,42	31,51	35,34	2,93
Sumatera Utara	8,30	6,78	9,82	9,35	31,09	29,16	33,02	3,17
Sumatera Barat	4,90	3,50	6,29	14,55	33,37	31,38	35,37	3,05
Riau	4,56	3,17	5,96	15,59	29,39	27,28	31,49	3,66
Jambi	8,29	6,27	10,30	12,38	26,42	24,28	28,55	4,12
Sumatera Selatan	5,52	4,01	7,02	13,91	24,26	22,39	26,13	3,93
Bengkulu	8,33	6,04	10,62	14,02	29,76	27,10	32,41	4,55
Lampung	6,33	4,67	7,99	13,39	25,11	23,30	26,92	3,68
Kep. Bangka Belitung	6,91	3,69	10,13	23,79	25,18	22,31	28,06	5,83
Kepulauan Riau	4,86	1,59	8,13	34,31	24,95	20,99	28,91	8,10
DKI Jakarta	9,95	7,42	12,48	12,98	26,98	24,45	29,50	4,77
Jawa Barat	4,95	3,94	5,96	10,41	25,10	23,86	26,33	2,51
Jawa Tengah	4,73	3,94	5,53	8,56	26,09	25,01	27,17	2,11
DI Yogyakarta	12,54	9,51	15,57	12,33	41,12	37,68	44,56	4,27
Jawa Timur	8,36	7,32	9,40	6,34	27,28	26,17	28,38	2,06
Banten	7,07	5,13	9,00	13,98	25,37	23,13	27,61	4,51
Bali	5,53	3,86	7,20	15,43	31,29	28,73	33,85	4,18
Nusa Tenggara Barat	11,40	8,78	14,02	11,73	31,28	28,83	33,73	4,00
Nusa Tenggara Timur	5,33	3,92	6,74	13,52	30,18	28,35	32,02	3,10
Kalimantan Barat	5,02	3,60	6,44	14,42	24,80	23,01	26,59	3,68
Kalimantan Tengah	7,60	5,38	9,82	14,91	25,12	22,91	27,33	4,48
Kalimantan Selatan	3,92	2,52	5,32	18,27	26,27	24,12	28,42	4,18
Kalimantan Timur	10,96	7,64	14,29	15,48	32,72	30,07	35,37	4,14
Kalimantan Utara	5,35	2,40	8,30	28,11	25,46	22,07	28,86	6,80
Sulawesi Utara	6,53	4,76	8,30	13,85	25,74	23,67	27,81	4,09
Sulawesi Tengah	7,19	5,14	9,25	14,56	28,34	26,02	30,66	4,18
Sulawesi Selatan	10,29	8,32	12,25	9,76	31,81	29,96	33,67	2,97
Sulawesi Tenggara	11,44	9,14	13,74	10,26	32,24	29,86	34,62	3,77
Gorontalo	7,20	4,67	9,74	17,94	27,94	24,80	31,08	5,73
Sulawesi Barat	9,61	6,93	12,28	14,20	25,77	23,05	28,49	5,38
Maluku	10,46	7,41	13,51	14,89	34,60	31,80	37,40	4,13
Maluku Utara	11,68	8,90	14,46	12,16	32,19	29,71	34,68	3,94
Papua Barat	2,92	1,80	4,03	19,55	28,52	26,18	30,85	4,18
Papua	4,03	2,77	5,28	15,93	24,22	22,51	25,93	3,60
Indonesia	6,84	6,49	7,19	2,60	27,57	27,16	27,98	0,76

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.20.4 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Umur, 2023

Provinsi	16-18 TAHUN					19-23 TAHUN				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(4)	(5)	(3)	(6)	(8)	(9)	(7)		
Aceh	83,74	80,83	86,64	1,77	38,85	35,50	42,20	4,40		
Sumatera Utara	80,55	77,65	83,46	1,84	34,54	31,45	37,64	4,57		
Sumatera Barat	88,53	86,13	90,93	1,38	45,70	41,79	49,61	4,37		
Riau	80,93	77,35	84,52	2,26	35,35	31,44	39,25	5,64		
Jambi	77,31	73,18	81,45	2,73	28,72	24,47	32,97	7,55		
Sumatera Selatan	73,93	69,93	77,93	2,76	23,11	19,90	26,32	7,09		
Bengkulu	86,65	82,58	90,71	2,39	37,45	32,33	42,56	6,97		
Lampung	73,71	69,53	77,89	2,89	26,47	22,69	30,24	7,28		
Kep. Bangka Belitung	69,32	63,17	75,48	4,53	18,87	14,73	23,01	11,19		
Kepulauan Riau	86,46	78,97	93,94	4,41	25,75	17,71	33,80	15,94		
DKI Jakarta	74,75	69,93	79,57	3,29	29,06	24,89	33,23	7,32		
Jawa Barat	70,03	67,30	72,75	1,98	28,16	25,87	30,46	4,16		
Jawa Tengah	71,31	68,78	73,84	1,81	27,94	25,94	29,94	3,65		
DI Yogyakarta	93,63	90,62	96,63	1,64	55,29	50,06	60,53	4,83		
Jawa Timur	75,13	72,73	77,54	1,63	31,94	29,81	34,08	3,41		
Banten	71,31	66,57	76,06	3,40	27,06	23,05	31,08	7,57		
Bali	84,03	80,04	88,02	2,42	35,30	29,80	40,80	7,95		
Nusa Tenggara Barat	80,38	75,59	85,18	3,04	25,94	21,81	30,08	8,12		
Nusa Tenggara Timur	76,61	73,60	79,62	2,01	34,59	31,43	37,74	4,65		
Kalimantan Barat	71,72	67,65	75,79	2,90	30,91	27,40	34,43	5,80		
Kalimantan Tengah	67,40	62,09	72,72	4,03	27,83	23,79	31,87	7,41		
Kalimantan Selatan	70,31	65,71	74,90	3,34	31,57	27,56	35,58	6,48		
Kalimantan Timur	83,06	78,80	87,32	2,62	38,83	33,70	43,96	6,74		
Kalimantan Utara	81,26	75,25	87,27	3,78	39,29	32,16	46,42	9,26		
Sulawesi Utara	75,53	70,82	80,24	3,18	30,02	25,44	34,61	7,79		
Sulawesi Tengah	79,04	74,65	83,42	2,83	33,96	29,03	38,89	7,41		
Sulawesi Selatan	71,44	67,69	75,18	2,68	40,15	36,75	43,55	4,33		
Sulawesi Tenggara	77,97	74,25	81,69	2,43	37,08	32,78	41,38	5,92		
Gorontalo	77,36	71,74	82,98	3,70	39,83	33,38	46,28	8,26		
Sulawesi Barat	79,62	74,48	84,77	3,30	29,72	24,37	35,07	9,18		
Maluku	80,01	76,05	83,98	2,53	46,32	40,21	52,43	6,73		
Maluku Utara	79,19	74,59	83,79	2,96	35,40	29,78	41,02	8,10		
Papua Barat	84,76	81,22	88,29	2,13	36,50	31,26	41,74	7,33		
Papua	63,52	59,48	67,56	3,24	26,12	23,24	29,00	5,63		
Indonesia	75,01	74,17	75,84	0,57	31,20	30,45	31,96	1,24		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.20.4

Provinsi	24-30 TAHUN				16-30 TAHUN			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(12)	(13)	(11)	(14)	(16)	(17)	(15)
Aceh	12,08	10,23	13,92	7,79	36,95	35,11	38,78	2,53
Sumatera Utara	8,32	6,86	9,78	8,97	33,32	31,64	35,01	2,58
Sumatera Barat	4,47	3,19	5,75	14,63	37,42	35,23	39,61	2,98
Riau	4,87	3,20	6,53	17,48	32,98	30,73	35,23	3,48
Jambi	9,32	6,89	11,75	13,30	31,10	28,70	33,50	3,94
Sumatera Selatan	7,96	6,06	9,85	12,18	26,65	24,81	28,48	3,51
Bengkulu	8,43	6,18	10,69	13,63	35,39	32,50	38,29	4,18
Lampung	5,50	4,03	6,96	13,62	27,82	25,82	29,82	3,66
Kep. Bangka Belitung	6,39	3,74	9,05	21,20	24,39	21,40	27,38	6,25
Kepulauan Riau	6,26	2,48	10,05	30,81	27,23	23,55	30,92	6,90
DKI Jakarta	11,03	8,41	13,64	12,10	28,79	26,14	31,43	4,69
Jawa Barat	3,73	2,69	4,78	14,31	25,93	24,61	27,26	2,61
Jawa Tengah	4,87	4,09	5,66	8,21	26,30	25,21	27,40	2,12
DI Yogyakarta	10,11	7,32	12,90	14,07	39,94	36,72	43,17	4,12
Jawa Timur	7,63	6,66	8,60	6,49	29,29	28,14	30,44	2,00
Banten	9,27	7,00	11,54	12,51	29,04	26,82	31,27	3,91
Bali	3,76	2,16	5,36	21,72	30,60	27,71	33,49	4,82
Nusa Tenggara Barat	9,11	6,93	11,30	12,23	30,29	27,68	32,91	4,40
Nusa Tenggara Timur	6,19	4,50	7,89	13,95	31,36	29,50	33,21	3,02
Kalimantan Barat	6,85	5,15	8,54	12,61	28,36	26,33	30,40	3,66
Kalimantan Tengah	9,23	6,97	11,49	12,49	27,69	25,45	29,92	4,12
Kalimantan Selatan	5,01	3,48	6,54	15,59	28,73	26,62	30,84	3,75
Kalimantan Timur	9,76	6,86	12,66	15,16	34,70	31,83	37,56	4,22
Kalimantan Utara	6,00	2,85	9,16	26,81	33,11	29,40	36,81	5,70
Sulawesi Utara	9,33	7,03	11,63	12,60	29,44	26,83	32,05	4,52
Sulawesi Tengah	11,59	8,87	14,31	11,97	33,98	31,47	36,49	3,77
Sulawesi Selatan	8,22	6,58	9,85	10,16	32,40	30,60	34,21	2,84
Sulawesi Tenggara	11,42	8,96	13,88	11,00	34,98	32,86	37,11	3,10
Gorontalo	5,86	3,58	8,14	19,85	32,96	29,94	35,99	4,68
Sulawesi Barat	7,86	5,37	10,35	16,19	29,93	26,94	32,91	5,09
Maluku	10,28	7,30	13,26	14,78	38,58	35,31	41,85	4,33
Maluku Utara	10,75	8,24	13,25	11,91	33,68	30,91	36,46	4,21
Papua Barat	2,33	1,28	3,39	23,07	30,42	27,87	32,98	4,28
Papua	2,13	1,46	2,80	16,12	23,12	21,42	24,81	3,74
Indonesia	6,77	6,42	7,13	2,67	29,36	28,94	29,78	0,73

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.21 Sampling Error Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH					TIDAK TAMAT SD				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	0,34	0,18	0,50	24,24	0,55	0,36	0,74	17,71		
Sumatera Utara	0,35	0,22	0,47	18,25	0,61	0,46	0,75	12,45		
Sumatera Barat	0,57	0,35	0,79	19,65	0,97	0,65	1,29	16,84		
Riau	0,57	0,31	0,83	23,44	0,87	0,51	1,22	20,79		
Jambi	0,44	0,19	0,68	28,72	2,11	1,56	2,66	13,33		
Sumatera Selatan	0,28	0,06	0,51	39,79	2,97	2,20	3,74	13,25		
Bengkulu	0,23	0,06	0,39	36,84	1,04	0,67	1,42	18,42		
Lampung	0,41	0,19	0,63	27,16	2,07	1,59	2,56	11,86		
Kep. Bangka Belitung	0,47	0,18	0,75	31,25	5,12	3,93	6,31	11,88		
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	56,98	0,14	0,06	0,22	28,28		
DKI Jakarta	NA	NA	NA	55,20	0,27	0,07	0,47	37,14		
Jawa Barat	0,41	0,23	0,59	22,36	0,66	0,48	0,84	13,76		
Jawa Tengah	0,39	0,28	0,50	14,69	1,28	1,08	1,48	8,04		
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	50,85	NA	NA	NA	74,06		
Jawa Timur	0,53	0,39	0,67	13,65	1,04	0,85	1,23	9,14		
Banten	0,95	0,47	1,43	25,87	0,87	0,50	1,23	21,42		
Bali	0,31	0,10	0,52	34,20	1,62	1,02	2,22	19,02		
Nusa Tenggara Barat	0,20	0,06	0,35	36,21	1,72	1,13	2,30	17,38		
Nusa Tenggara Timur	0,38	0,22	0,54	21,20	8,41	7,62	9,20	4,78		
Kalimantan Barat	1,23	0,86	1,59	15,03	5,10	4,42	5,79	6,83		
Kalimantan Tengah	0,60	0,25	0,96	29,86	2,13	1,24	3,02	21,25		
Kalimantan Selatan	0,53	0,30	0,77	22,60	2,80	2,19	3,40	11,02		
Kalimantan Timur	0,53	0,21	0,85	30,71	1,86	1,36	2,36	13,77		
Kalimantan Utara	3,10	1,98	4,23	18,48	1,00	0,45	1,56	28,23		
Sulawesi Utara	0,25	0,04	0,45	42,11	3,83	3,10	4,55	9,67		
Sulawesi Tengah	1,43	0,90	1,96	18,77	1,94	1,48	2,40	12,14		
Sulawesi Selatan	2,63	2,19	3,08	8,62	2,44	2,03	2,85	8,62		
Sulawesi Tenggara	2,95	2,32	3,57	10,83	2,19	1,68	2,71	12,00		
Gorontalo	1,27	0,76	1,78	20,44	8,21	7,00	9,42	7,51		
Sulawesi Barat	6,00	4,79	7,21	10,30	1,53	0,93	2,13	19,96		
Maluku	1,42	1,01	1,83	14,76	0,68	0,35	1,01	24,82		
Maluku Utara	0,62	0,18	1,06	36,08	0,87	0,45	1,28	24,33		
Papua Barat	3,36	2,60	4,13	11,64	2,17	1,64	2,71	12,54		
Papua	24,09	22,12	26,06	4,17	4,62	3,98	5,25	7,02		
Indonesia	0,97	0,90	1,03	3,43	1,52	1,44	1,59	2,47		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.21

Provinsi	SD/SEDERAJAT					SMP/SEDERAJAT				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	
		Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	
Aceh	5,29	4,71	5,87	5,60		35,04	33,76	36,31	1,86	
Sumatera Utara	5,99	5,41	6,57	4,95		33,52	32,37	34,67	1,75	
Sumatera Barat	9,14	8,22	10,05	5,12		34,81	33,35	36,28	2,15	
Riau	11,34	10,16	12,53	5,33		34,24	32,68	35,80	2,32	
Jambi	11,41	10,10	12,73	5,88		33,53	31,75	35,30	2,70	
Sumatera Selatan	16,38	15,13	17,63	3,90		29,59	28,09	31,09	2,59	
Bengkulu	13,20	11,86	14,55	5,20		34,93	33,16	36,69	2,58	
Lampung	12,29	11,07	13,51	5,08		38,53	37,14	39,93	1,85	
Kep. Bangka Belitung	12,95	11,25	14,65	6,70		27,67	25,51	29,83	3,98	
Kepulauan Riau	4,17	2,93	5,41	15,15		33,41	30,16	36,67	4,97	
DKI Jakarta	3,99	3,14	4,84	10,90		21,53	19,94	23,13	3,78	
Jawa Barat	10,95	10,17	11,73	3,63		38,72	37,68	39,75	1,36	
Jawa Tengah	12,21	11,56	12,87	2,75		43,15	42,24	44,07	1,08	
DI Yogyakarta	2,55	1,79	3,31	15,25		27,43	25,34	29,52	3,89	
Jawa Timur	10,40	9,78	11,03	3,05		37,77	36,88	38,66	1,20	
Banten	10,27	8,78	11,77	7,41		36,54	34,68	38,40	2,60	
Bali	6,98	5,97	7,99	7,39		35,07	33,07	37,06	2,90	
Nusa Tenggara Barat	6,96	5,91	8,02	7,74		38,87	37,05	40,70	2,39	
Nusa Tenggara Timur	15,28	14,36	16,20	3,07		35,17	33,89	36,46	1,86	
Kalimantan Barat	17,48	16,21	18,75	3,71		31,40	29,96	32,83	2,34	
Kalimantan Tengah	12,43	10,89	13,96	6,29		34,42	32,70	36,13	2,55	
Kalimantan Selatan	14,07	12,74	15,41	4,83		31,45	29,82	33,08	2,64	
Kalimantan Timur	6,28	5,28	7,28	8,16		32,73	30,67	34,79	3,21	
Kalimantan Utara	10,05	8,20	11,90	9,41		32,87	30,44	35,29	3,76	
Sulawesi Utara	8,47	7,45	9,49	6,14		30,79	29,07	32,50	2,85	
Sulawesi Tengah	15,67	14,14	17,19	4,96		36,22	34,46	37,97	2,47	
Sulawesi Selatan	9,27	8,45	10,10	4,55		33,48	32,05	34,92	2,19	
Sulawesi Tenggara	7,04	6,22	7,86	5,95		33,73	32,09	35,37	2,48	
Gorontalo	13,83	12,24	15,41	5,85		33,75	31,61	35,89	3,24	
Sulawesi Barat	15,18	13,32	17,03	6,23		33,36	31,27	35,45	3,19	
Maluku	6,84	5,82	7,86	7,60		33,26	31,50	35,01	2,70	
Maluku Utara	7,92	6,77	9,08	7,45		36,29	34,37	38,20	2,70	
Papua Barat	7,72	6,83	8,62	5,92		32,80	30,94	34,67	2,90	
Papua	9,09	8,20	9,97	4,96		30,38	28,98	31,79	2,36	
Indonesia	10,31	10,08	10,54	1,14		35,96	35,63	36,28	0,46	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 3.21

Provinsi	SM/SEDERAJAT				PT			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	44,48	43,19	45,78	1,48	14,31	13,32	15,29	3,51
Sumatera Utara	48,42	47,15	49,69	1,34	11,12	10,18	12,06	4,32
Sumatera Barat	38,92	37,45	40,38	1,92	15,59	14,38	16,80	3,95
Riau	41,47	39,66	43,28	2,23	11,51	10,37	12,64	5,03
Jambi	39,70	37,73	41,68	2,54	12,81	11,38	14,25	5,72
Sumatera Selatan	38,78	37,09	40,46	2,22	12,00	10,72	13,27	5,42
Bengkulu	36,91	35,05	38,77	2,57	13,70	12,14	15,25	5,79
Lampung	38,00	36,40	39,59	2,14	8,70	7,73	9,67	5,71
Kep. Bangka Belitung	42,04	39,68	44,41	2,87	11,75	9,92	13,57	7,93
Kepulauan Riau	49,09	45,38	52,81	3,86	12,75	10,17	15,32	10,31
DKI Jakarta	56,16	54,06	58,27	1,91	17,93	16,02	19,85	5,45
Jawa Barat	39,52	38,38	40,65	1,46	9,74	9,00	10,49	3,91
Jawa Tengah	34,35	33,44	35,26	1,35	8,61	8,06	9,17	3,30
DI Yogyakarta	52,26	49,77	54,76	2,44	17,57	15,29	19,86	6,64
Jawa Timur	39,79	38,87	40,70	1,18	10,47	9,81	11,13	3,20
Banten	41,49	39,48	43,49	2,47	9,88	8,51	11,26	7,08
Bali	37,87	35,87	39,87	2,70	18,15	16,52	19,78	4,58
Nusa Tenggara Barat	40,34	38,35	42,34	2,52	11,90	10,69	13,11	5,19
Nusa Tenggara Timur	28,24	26,97	29,51	2,30	12,52	11,52	13,51	4,05
Kalimantan Barat	35,74	34,16	37,31	2,25	9,06	7,98	10,14	6,09
Kalimantan Tengah	38,07	35,98	40,16	2,81	12,36	10,92	13,79	5,92
Kalimantan Selatan	38,52	36,78	40,26	2,31	12,62	11,22	14,03	5,68
Kalimantan Timur	45,93	43,76	48,10	2,41	12,66	10,94	14,39	6,95
Kalimantan Utara	39,27	36,16	42,39	4,05	13,71	11,32	16,10	8,89
Sulawesi Utara	44,07	42,14	46,01	2,24	12,59	11,37	13,81	4,94
Sulawesi Tengah	33,01	31,19	34,83	2,81	11,74	10,40	13,08	5,83
Sulawesi Selatan	40,00	38,40	41,60	2,04	12,18	10,85	13,50	5,55
Sulawesi Tenggara	40,92	38,99	42,86	2,41	13,17	11,81	14,53	5,28
Gorontalo	29,66	27,63	31,68	3,48	13,28	11,21	15,35	7,96
Sulawesi Barat	28,10	25,94	30,25	3,91	15,84	14,01	17,66	5,88
Maluku	44,26	42,10	46,42	2,49	13,55	11,95	15,14	6,02
Maluku Utara	40,43	38,25	42,61	2,75	13,87	12,24	15,50	6,00
Papua Barat	37,52	35,26	39,78	3,07	16,42	14,65	18,19	5,49
Papua	24,97	23,55	26,38	2,89	6,86	5,92	7,80	6,98
Indonesia	40,01	39,66	40,36	0,45	11,25	11,00	11,49	1,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

<https://www.bps.go.id>



Bab 4. Kesehatan



<https://www.bps.gov>

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia, sebagaimana tertuang pada pasal 25 *Universal Declaration of Human Right* yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai bagi kesehatan, kesejahteraan diri sendiri, dan keluarganya (United Nations 1948). Hal ini juga berlaku untuk seluruh pemuda Indonesia. Peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu isu penting yang dikedepankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 salah satunya adalah bidang kesehatan. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menjalankan pembangunan jika masyarakat, terutama pemuda, dalam kondisi yang tidak sehat. Padahal, sebagai agen perubahan, pemuda memegang peranan penting dalam menentukan nasib bangsa Indonesia kelak. Kesehatan pemuda dapat menentukan seberapa besar seseorang memperoleh pendidikan yang lebih baik, bertransisi ke pekerjaan penuh waktu, mengembangkan gaya hidup yang sehat, serta dapat membentuk keluarga dan terlibat dalam pengasuhan yang baik di beberapa tahun ke depan (Australian Institute of Health and Welfare 2021). Oleh karena itu, agar pembangunan bangsa dapat terlaksana dengan baik, hal utama yang wajib terpenuhi adalah pemuda harus dalam kondisi sehat, jasmani maupun rohani.

4.1 Kondisi Kesehatan Pemuda

Pemuda merupakan wajah bangsa saat ini dan nanti. Hal ini dikarenakan kondisi pemuda yang sekarang akan menentukan kondisi bangsa di masa yang akan datang. Status kesehatan pemuda saat ini akan menentukan status kesehatan penduduk pada puluhan tahun berikutnya. Oleh karena itu, investasi terhadap pemuda sangat diperlukan sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan (United Nations Population Fund 2019, 7), salah satunya adalah investasi kesehatan pemuda yang dapat dilakukan sedini mungkin. Berinvestasi pada kesehatan penduduk muda dapat memberikan manfaat *triple dividend* yaitu meningkatkan kesehatan saat ini, meningkatkan kesehatan sepanjang

hidup, dan berkontribusi terhadap kesehatan generasi mendatang (The Association for Young People Health 2022; Word Health Organization 2019, 2).

Status kesehatan saat ini merupakan dampak dari pembangunan kesehatan anak pada periode sebelumnya. Begitu pula dengan capaian pemuda saat ini yang secara tidak langsung juga akan menentukan status kesehatan penduduk dewasa dan lansia pada beberapa dekade ke depan. Meskipun masih banyak faktor internal dan eksternal lainnya yang turut andil dalam menentukan kondisi kesehatan di masa yang akan datang, salah satunya adalah gaya hidup. Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 60 persen faktor yang berhubungan dengan kesehatan individu (termasuk juga pemuda) dan kualitas hidup berkorelasi dengan gaya hidup yang dilakukan (Farhud 2015; Ziglio E, Currie C, and Rasmussen VB 2004).

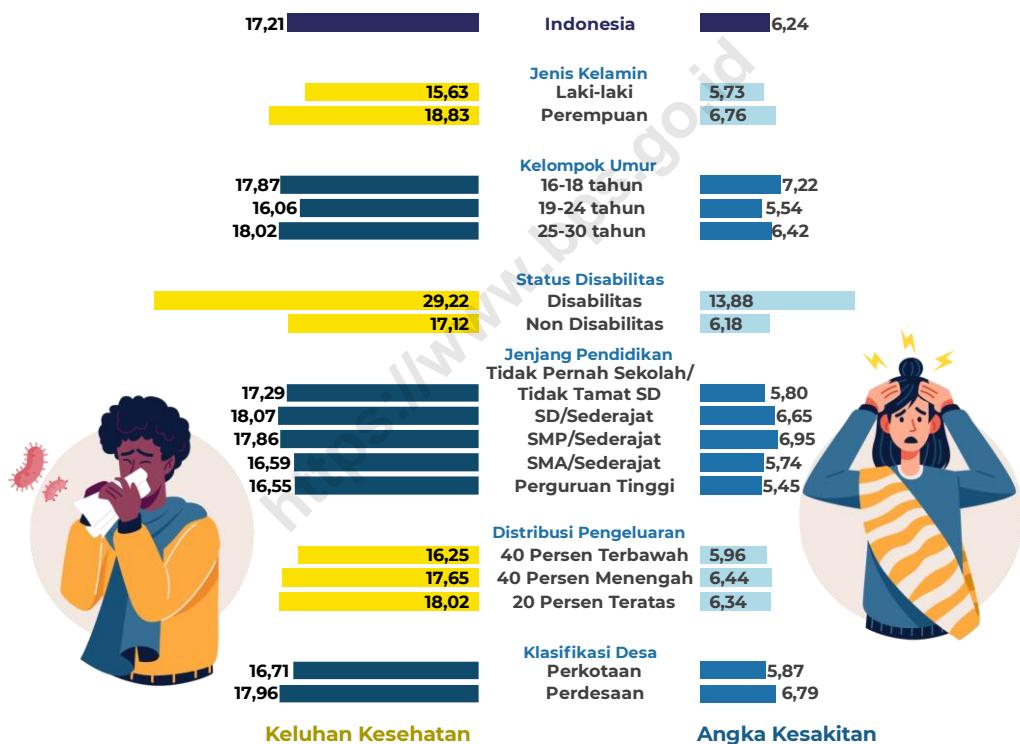
Dalam mengukur tingkat kesehatan pemuda, publikasi ini menghasilkan indikator persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan yaitu keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik keluhan fisik maupun psikis. Selain itu, terdapat juga indikator angka kesakitan yang merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, apabila keluhan tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016-2023

Gambar 4.1 Persentase Pemuda menurut Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan, 2016-2023

Pada tahun 2023, baik persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan maupun angka kesakitan pemuda mengalami penurunan. Meskipun sempat mengalami kenaikan selama masa pandemi (tahun 2021 dan 2022), persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan di tahun 2023 menurun cukup tajam menjadi 17,21 persen. Begitu juga dengan angka kesakitan pemuda yang turun dari 9,51 persen pada tahun 2022 menjadi 6,24 persen di tahun 2023. Kedua kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya perbaikan layanan dan kondisi kesehatan pemuda Indonesia, khususnya setelah 3 tahun berjuang melawan pandemi Covid-19.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.2 Persentase Pemuda menurut Kondisi Kesehatan dan Karakteristik, 2023

Gambar 4.2 menunjukkan persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan berdasarkan beberapa karakteristik. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pemuda perempuan memiliki angka kesakitan yang lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki (6,76 persen berbanding 5,73

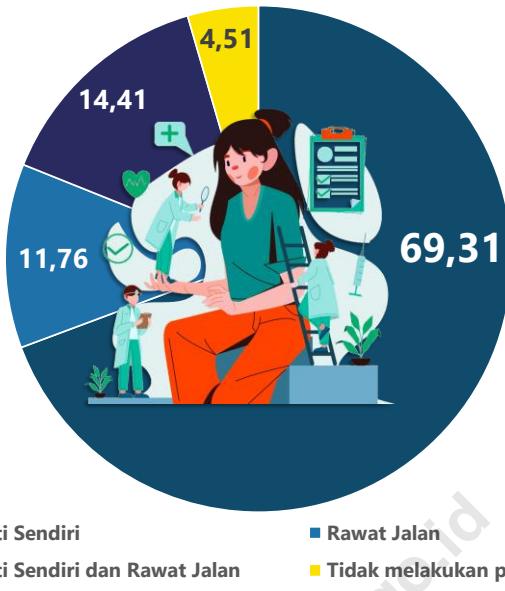
persen). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemuda perempuan cenderung lebih mudah sakit dibandingkan laki-laki.

Perempuan lebih beresiko terhadap penyakit dan rentan pada kondisi kesehatan yang buruk dikarenakan tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang diberikan kepada perempuan serta masalah kesehatan reproduksi yang mungkin terjadi karena kehamilan dan melahirkan (Burns et al. 2023). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Crimmins dkk. menyimpulkan bahwa jika dibandingkan laki-laki, perempuan lebih rentan terhadap penyakit yang berhubungan dengan peradangan (inflamatori), meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai eksplorasi tren perbedaan jenis kelamin di bidang kesehatan di masa depan (Crimmins dkk. 2019, 1).

Kesenjangan keluhan kesehatan juga terlihat berdasarkan status disabilitas pemuda. Persentase pemuda penyandang disabilitas yang mengalami keluhan kesehatan sekitar 12,10 persen poin lebih tinggi dibandingkan pemuda bukan penyandang disabilitas (29,22 persen berbanding 17,12 persen). Hal yang sama juga terlihat dari besarnya angka kesakitan pemuda penyandang disabilitas sebesar dua kali angka kesakitan pemuda bukan penyandang disabilitas (13,88 persen berbanding 6,18 persen).

4.2 Perilaku Berobat Pemuda

Ketika mengalami keluhan kesehatan dan mengalami sakit, pengobatan merupakan salah satu cara yang dapat dipilih untuk meredakan rasa sakit dan keluhan yang dirasakan. Langkah sederhana yang biasanya dilakukan adalah dengan mengobati sendiri yang merupakan upaya pengobatan yang dilakukan tanpa menggunakan resep/saran dari tenaga kesehatan, termasuk minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, kerokan saat masuk angin, mengonsumsi obat pemberian orang lain, dsb. Selain itu, alternatif lain yang dilakukan adalah rawat jalan yang merupakan upaya pengobatan dengan memeriksakan diri di tempat pelayanan kesehatan (modern maupun tradisional), termasuk juga mendatangkan petugas kesehatan ke rumah, ataupun konsultasi dengan dokter secara daring atau melalui telepon.

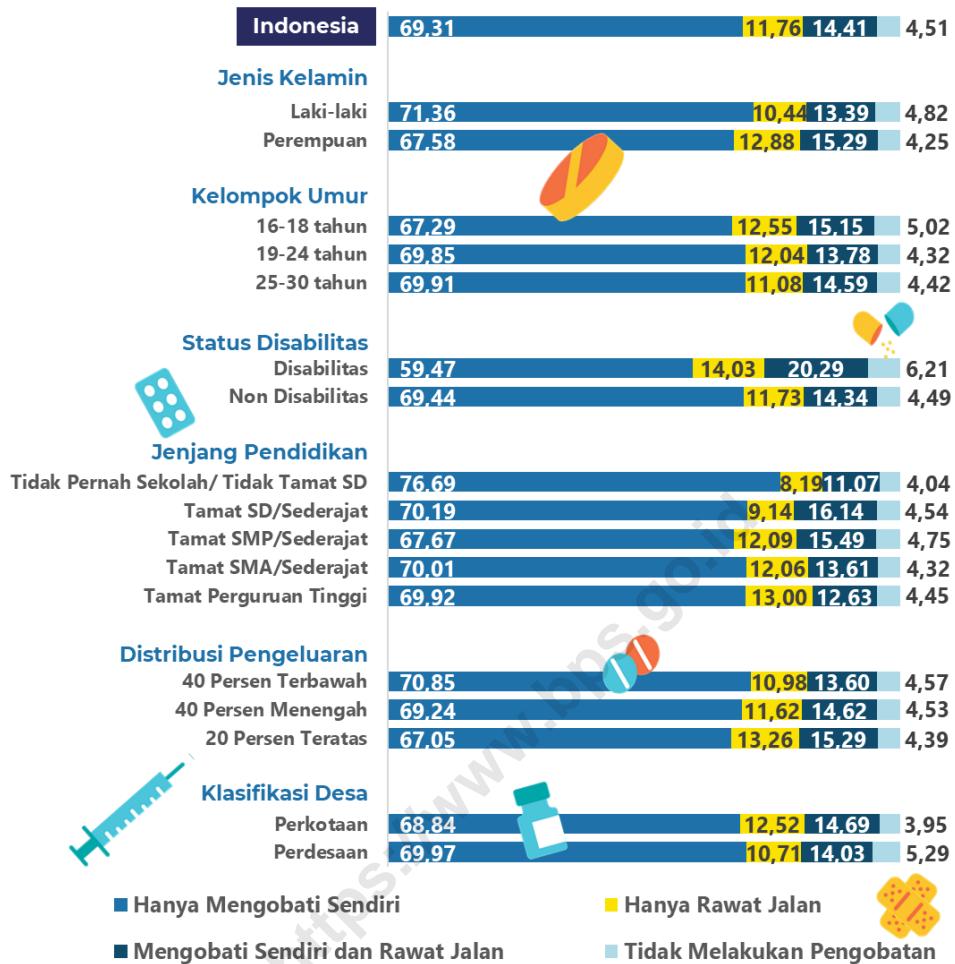


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.3 Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam sebulan terakhir Menurut Upaya Pengobatan, 2023

Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa pemuda yang mengalami keluhan kesehatan cenderung lebih memilih melakukan tindakan pengobatan dengan mengobati sendiri dibandingkan rawat jalan. Sekitar 69,31 persen pemuda memilih untuk mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dialami, 14,41 persen melakukan keduanya baik mengobati sendiri maupun rawat jalan, dan sekitar 11,76 persen hanya memilih untuk melakukan rawat jalan.

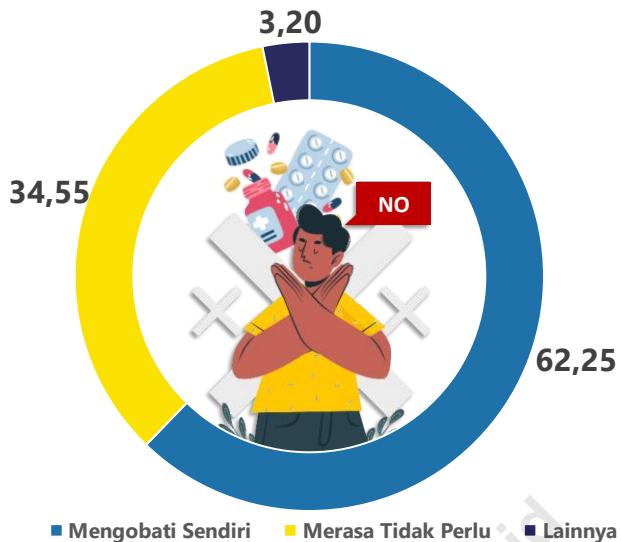
Dari semua karakteristik penduduk seperti yang tersaji pada Gambar 4.4, mayoritas pemuda lebih memilih mengobati sendiri saat mengalami keluhan kesehatan. Pada jenjang pendidikan lebih rendah (tidak tamat SD/sederajat atau tidak pernah sekolah), pemuda yang hanya memilih untuk mengobati sendiri lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya (76,69 persen). Temuan ini sejalan dengan pemuda pada distribusi pengeluaran 40 persen terbawah yaitu sekitar 70,85 persen yang lebih memilih mengobati dirinya sendiri, lebih tinggi dibandingkan kelompok distribusi pengeluaran di atasnya. Sebaliknya, semakin tinggi distribusi pengeluaran rumah tangga terlihat semakin tinggi persentase pemuda yang memilih rawat jalan serta yang melakukan keduanya (mengobati sendiri dan rawat jalan) ketika mengalami keluhan kesehatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.4 **Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Karakteristik dan Upaya Pengobatan, 2023**

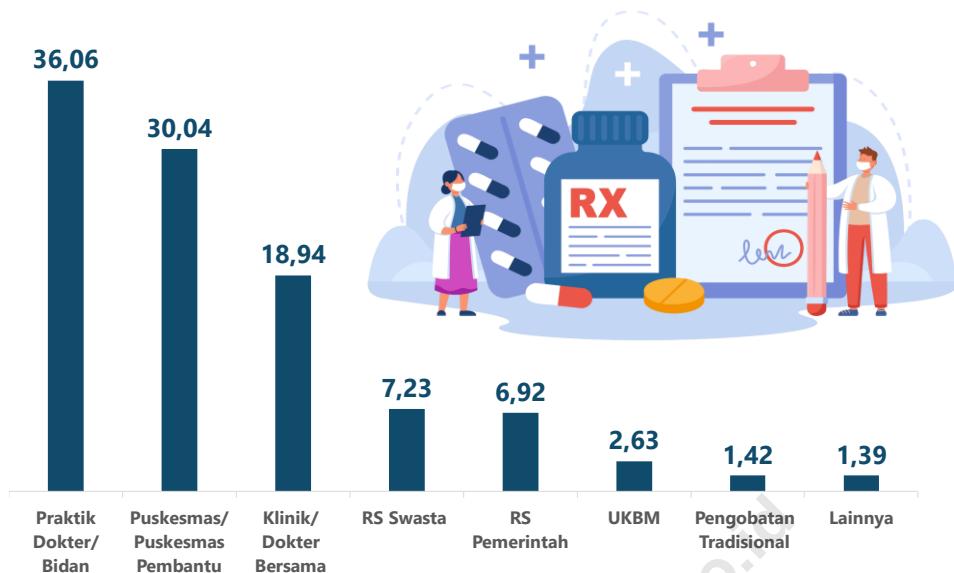
Sementara itu, meskipun persentase pemuda penyandang disabilitas yang mengobati sendiri sekaligus rawat jalan lebih tinggi dibandingkan bukan penyandang disabilitas, masih ada sekitar 6,21 pemuda penyandang disabilitas yang tidak melakukan pengobatan saat mengalami keluhan kesehatan. Persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan pemuda bukan penyandang disabilitas yang tidak melakukan pengobatan yaitu sekitar 4,49 persen. Padahal, pemuda dengan kondisi disabilitas berada pada posisi lebih rentan dan sudah seharusnya memperoleh pengobatan untuk keluhan kesehatan/sakit yang dialami.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.5 Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan yang Tidak Rawat Jalan menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023

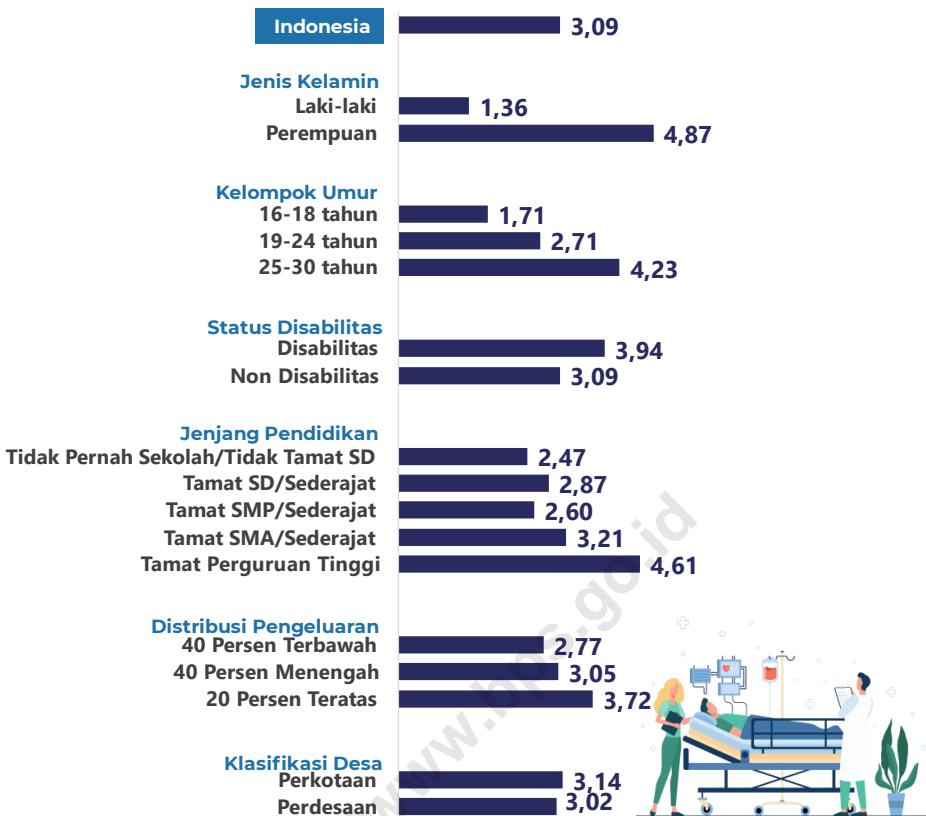
Sebelumnya ditunjukkan pada Gambar 4.3, masih terdapat 4,51 persen pemuda yang tidak melakukan tindakan pengobatan (termasuk rawat jalan) saat mengalami keluhan kesehatan. Alasan sebagian besar pemuda lebih memilih tidak rawat jalan adalah karena mereka lebih memilih untuk mengobati sendiri yaitu 62,25 persen (Gambar 4.5). Selain itu, 34,55 persen pemuda merasa tidak perlu melakukan rawat jalan dan 3,20 persen pemuda merasa ada alasan lain yang mendorong mereka untuk tidak rawat jalan di antaranya karena tidak ada biaya untuk berobat, tidak ada biaya transpor, tidak ada sarana transportasi, waktu tunggu pelayanan lama, tidak ada yang mendampingi, dsb. Sebuah penelitian menemukan bahwa beberapa penyebab seseorang yang menghindari pengobatan di pelayanan kesehatan adalah penilaian yang kurang baik dalam pencarian rawatan medis, rendahnya kebutuhan untuk mendapatkan perawatan medis karena banyak yang menganggap penyakit atau gejala yang dialami akan segera membaik seiring berjalannya waktu, serta terdapat hambatan klasik seperti biaya yang tinggi, tidak adanya asuransi kesehatan, serta keterbatasan waktu (Taber, Leyva, and Persoskie 2014, 1).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.6 Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Jalan menurut Tempat Rawat Jalan, 2023

Jika dilihat berdasarkan tempat yang dipilih pemuda untuk melakukan rawat jalan, praktik dokter/bidan menjadi fasilitas rawat jalan dengan persentase tertinggi (36,06 persen), disusul oleh puskesmas/puskesmas pembantu (30,04 persen). Selain fasilitas kesehatan modern, Gambar 4.6 juga menunjukkan masih terdapat sekitar 1,42 persen pemuda yang memilih ke praktik pengobatan tradisional. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pengobatan tradisional masih dianggap dapat membantu mengobati untuk sebagian kecil pemuda yang mengalami keluhan kesehatan.



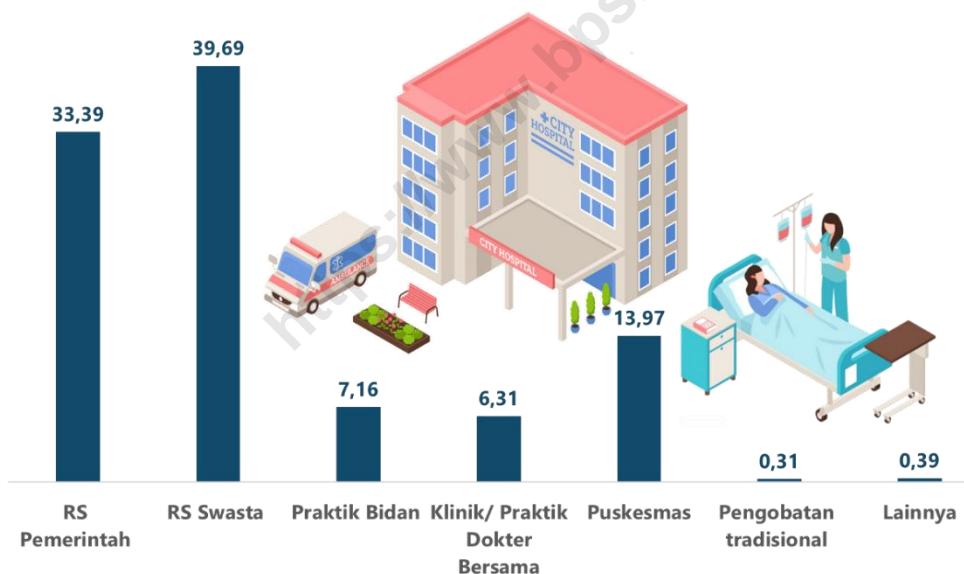
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.7 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2023

Selain rawat jalan, Susenas Maret 2023 juga menangkap informasi mengenai rawat inap pemuda. Sekitar 3,09 persen pemuda dirawat inap dalam setahun terakhir. Terlihat gap yang cukup jauh antara persentase pemuda perempuan yang pernah dirawat inap dibandingkan laki-laki (4,87 persen berbanding 1,36 persen). Kesenjangan ini juga sejalan dengan persentase pemuda perempuan yang lebih cenderung mengalami keluhan kesehatan dibandingkan laki-laki (Gambar 4.2), sehingga dapat mengakibatkan pemuda perempuan lebih cenderung untuk dirawat inap. Di lain sisi, sebuah survei yang dilakukan oleh sistem rumah sakit Orlando Health menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan laki-laki tidak melakukan pengobatan/menemui dokter ketika sakit dikarenakan kombinasi alasan antara kesibukan, ketakutan,

rasa malu, dan ketidaknyamanan yang membuat mereka tidak ingin mengunjungi dokter (Almendrala 2016).

Semakin tinggi distribusi pengeluaran rumah tangga, terlihat bahwa semakin besar persentase pemuda yang dirawat inap selama setahun terakhir. Gambar 4.7 menunjukkan bahwa 3,72 persen pemuda pada rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 20 persen teratas dirawat inap selama setahun terakhir, sementara itu hanya 2,77 persen pemuda pada kelompok distribusi pengeluaran 40 persen terbawah. Temuan ini juga sejalan dengan persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan pada distribusi pengeluaran 20 persen teratas yang lebih tinggi dibandingkan 40 persen terbawah (Gambar 4.2). Hal tersebut menunjukkan tingginya tingkat perekonomian pemuda tidak menjadikan mereka lebih sehat dan bebas dari keluhan kesehatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.8 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Tempat Rawat Inap, 2023

Jika dilihat berdasarkan lokasi pelayanan rawat inap selama setahun terakhir, persentase pemuda yang rawat inap di rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya yaitu sekitar 39,69 persen dan 33,39 persen. Hal tersebut didukung dengan

lengkapnya ketersediaan peralatan kesehatan dan juga tenaga medis yang lebih banyak dibandingkan fasilitas kesehatan lain. Oleh karena itu, rumah sakit merupakan fasilitas yang paling ideal untuk melayani rawat inap, selain juga melayani rawat jalan, dan kegawatdaruratan sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dapat dilihat pada Gambar 4.9 bahwa dalam 3 tahun terakhir, persentase pemuda yang pernah dirawat inap di rumah sakit (baik RS swasta maupun RS pemerintah) juga mengalami peningkatan, dengan peningkatan pemuda yang rawat inap di RS swasta yang lebih tinggi dibandingkan RS pemerintah.

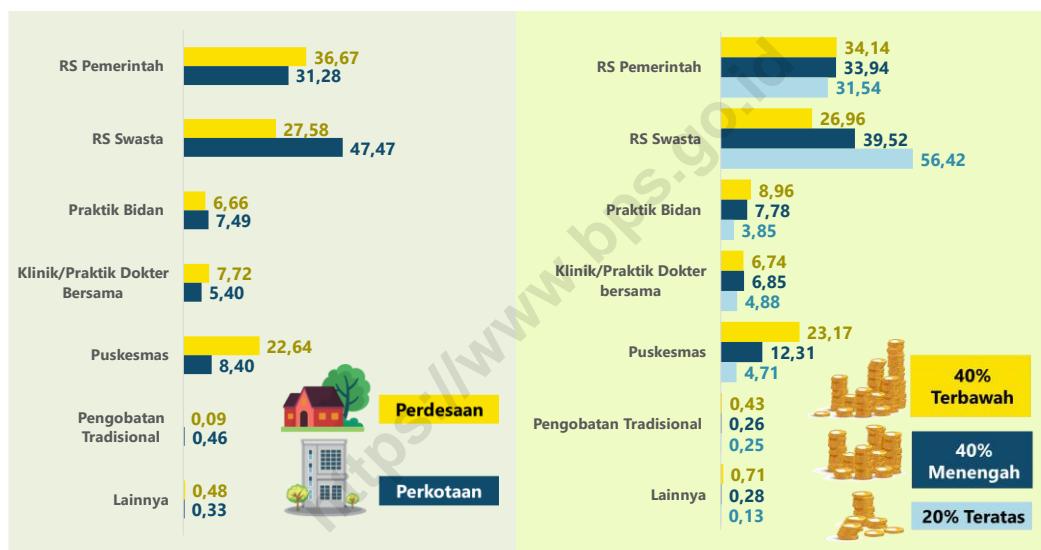


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.9 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap di Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, 2020-2023

Tingginya minat masyarakat dalam memilih rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan sebagai tempat rawat inap sejalan dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit yang semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir. Dalam Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 disebutkan bahwa jumlah rumah sakit umum (RSU) mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020 sebesar 19,76 persen, dengan penambahan yang paling banyak terjadi pada rumah sakit umum milik swasta (Kementerian Kesehatan

2022, 10). Sejalan dengan data tersebut, dari segi kepemilikan, dalam 10 tahun terakhir jumlah rumah sakit swasta juga tumbuh jauh lebih pesat daripada rumah sakit pemerintah (39 persen berbanding 92 persen) (Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2020, 5). Semakin banyaknya jumlah rumah sakit seharusnya dapat termanfaatkan dengan baik bagi pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dalam memfasilitasi pengobatan untuk rawat jalan dan rawat inap. Hal tersebut disebabkan pemuda yang sakit akan memiliki produktivitas yang lebih rendah. Sementara itu, pemuda yang sehat akan lebih produktif dalam bekerja, sekolah, maupun melakukan aktivitas lainnya.

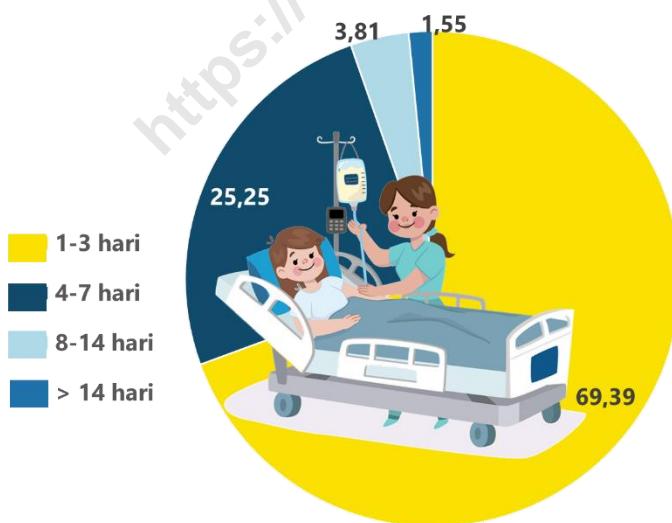


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.10 Persentase Pemuda yang Rawat Inap Setahun Terakhir menurut Klasifikasi Desa, Kelompok Pengeluaran, dan Tempat Berobat, 2023

Gambar 4.10 menunjukkan pola yang berbeda pada fasilitas kesehatan tempat pemuda dirawat inap menurut daerah tempat tinggal. Di perkotaan, mayoritas pemuda dirawat inap di rumah sakit swasta selama setahun terakhir, jauh lebih tinggi dibandingkan rumah sakit pemerintah (47,47 persen berbanding 31,28 persen). Sebaliknya, di perdesaan pemuda yang rawat inap di rumah sakit pemerintah lebih tinggi dibandingkan rumah sakit swasta (36,67 persen berbanding 27,58 persen).

Selain itu, terlihat juga perbedaan pada persentase pemuda perdesaan yang dirawat inap di puskesmas yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan (22,64 persen berbanding 8,40 persen). Berdasarkan distribusi pengeluaran, persentase tertinggi pemuda yang rawat inap di puskesmas ada pada kelompok distribusi pengeluaran rumah tangga 40 persen terbawah (23,17 persen). Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama yang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa setidaknya pada setiap kecamatan harus ada satu puskesmas, dan dalam kondisi tertentu satu kecamatan dapat memiliki lebih dari satu puskesmas. Artinya, puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang aksesnya termasuk yang paling dekat dengan masyarakat, termasuk juga masyarakat yang tinggal di perdesaan serta masyarakat miskin. Puskesmas dapat menjadi langkah awal pemeriksaan kesehatan yang diharapkan dapat menjadi pilihan pertama, khususnya dalam mengurangi disparitas kesehatan antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi (Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

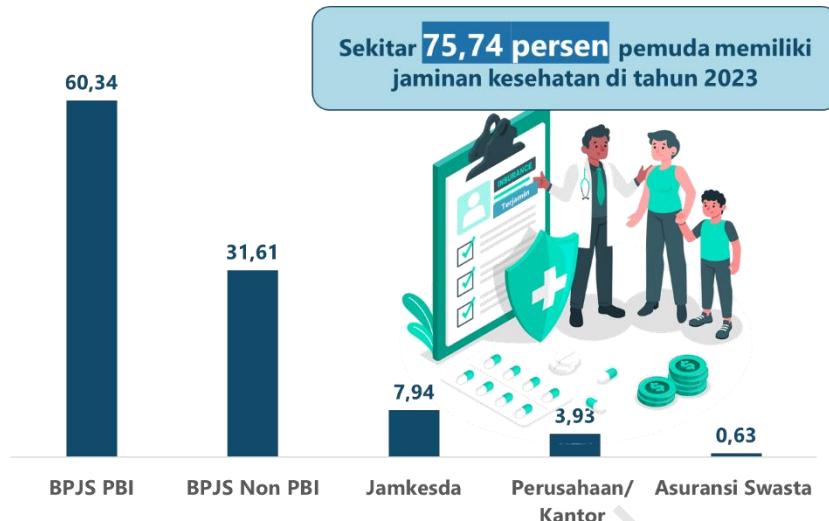
Gambar 4.11 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap menurut Lama Dirawat (hari), 2023

Rata-rata lamanya hari yang dihabiskan untuk rawat inap dapat dijadikan gambaran tingkat keparahan penyakit yang diderita pemuda. Gambar 4.11 menunjukkan bahwa sekitar 69,39 persen pemuda yang dirawat inap menghabiskan waktu rata-rata sekitar 1-3 hari. Selain itu, terdapat 1,55 persen pemuda yang dirawat lebih dari 14 hari. Semakin lama waktu rawat inap, menunjukkan seberapa lama terganggunya produktivitas pemuda dalam beraktivitas (termasuk untuk sekolah, bekerja, dsb.). Meskipun demikian, jika memang diperlukan, rawat inap harus tetap dilakukan sesuai rekomendasi dokter agar keluhan kesehatan dan sakit dapat tertangani dengan baik, sehingga pemuda dapat kembali produktif.

4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan oleh Pemuda

Pemerintah terus mengupayakan tercapainya cakupan kesehatan semesta yang lebih dikenal dengan *Universal Health Coverage* (UHC). Akan tetapi, UHC baru akan dapat tercapai jika pemerintah menjalin komitmen bersama dalam mencapai UHC dan memastikan semua masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, salah satunya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, tercapainya UHC bukan hanya memastikan seluruh penduduk menjadi peserta program JKN saja, pemerintah juga harus menjamin peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta mampu menjadi perlindungan finansial bagi penerima manfaat JKN saat membutuhkan pelayanan kesehatan (Sehat Negeriku 2021).

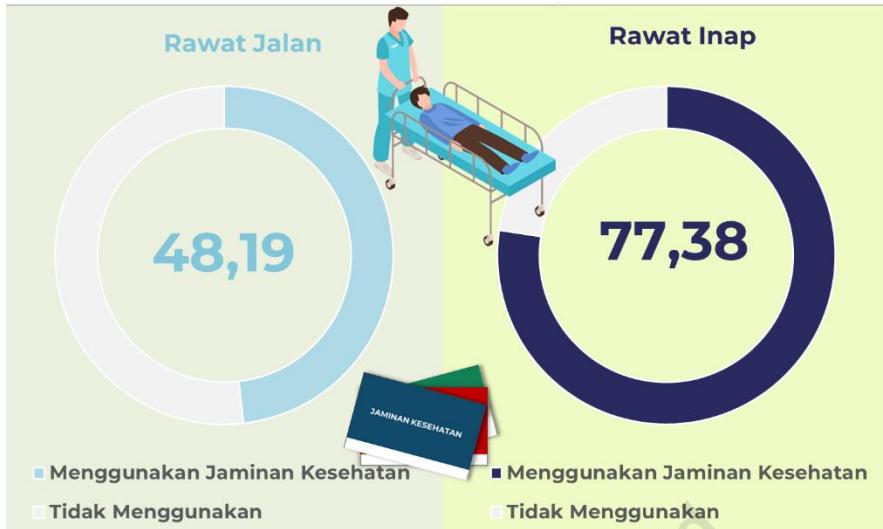
Dengan memiliki jaminan kesehatan, diharapkan masyarakat dapat memiliki pengeluaran untuk biaya kesehatan yang berasal dari kantong sendiri atau *Out of Pocket* (OOP) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Sehingga, diharapkan pengeluaran untuk biaya kesehatan yang seharusnya dapat diminimalisir dengan adanya jaminan kesehatan yang dimiliki. Beberapa jaminan kesehatan yang dicakup dalam Susenas Maret antara lain BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), BPJS non PBI, Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), asuransi swasta dan jaminan kesehatan yang difasilitasi perusahaan/kantor.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.12 Persentase Pemuda menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Karakteristik, 2023

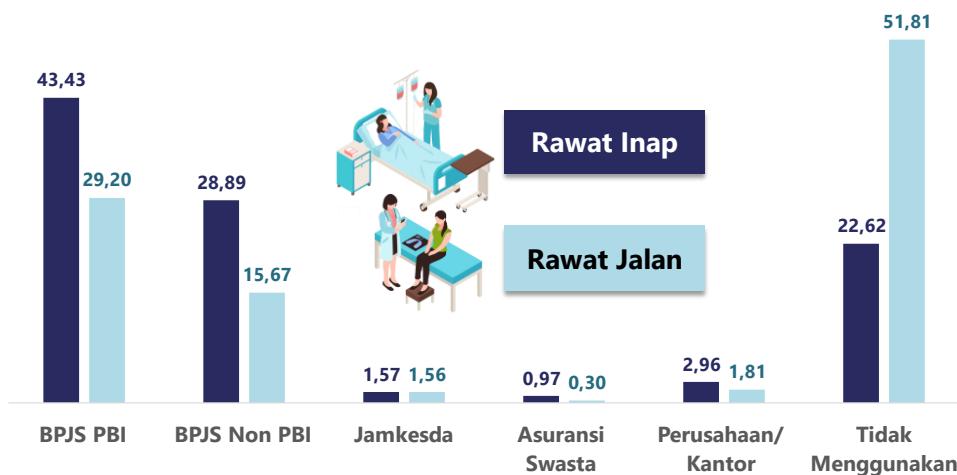
Pada tahun 2023, sekitar 76 dari 100 pemuda telah memiliki jaminan kesehatan. Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh pemuda adalah BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yaitu 60,34 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda masih menggunakan jaminan kesehatan yang dibantu pemerintah. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan RI, disebutkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas bagi masyarakat yang berasal dari kalangan miskin dan kurang mampu, tanpa harus membayar iuran berupa BPJS PBI (Peserta Bantuan Iuran) (Ayo Sehat Kementerian Kesehatan RI 2018). Sementara itu, sekitar 31,61 persen pemuda memiliki BPJS non PBI, 3,93 persen asuransi perusahaan/kantor dan hanya 0,63 persen lainnya yang menggunakan asuransi swasta.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.13 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dan Rawat Inap menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023

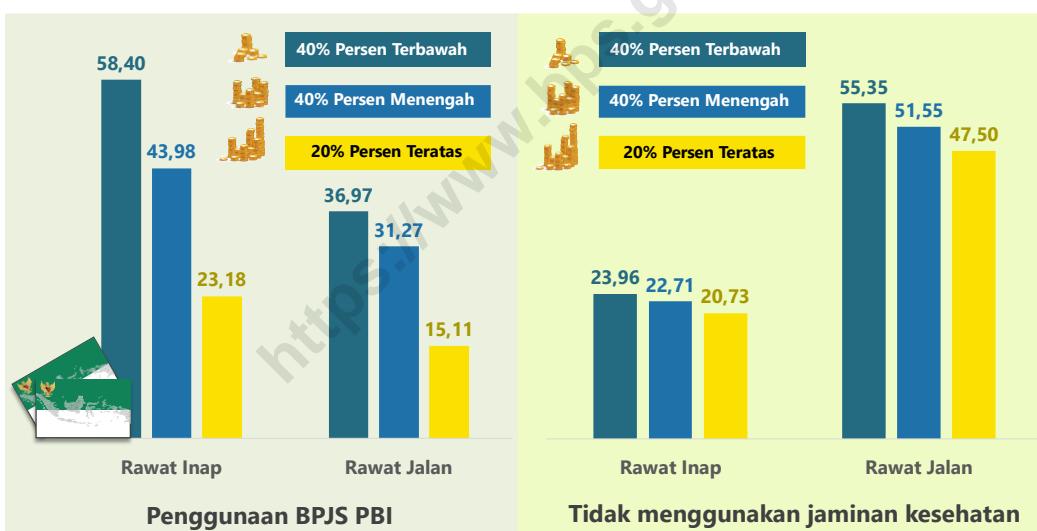
Penggunaan jaminan kesehatan untuk rawat inap jauh lebih tinggi dibandingkan untuk rawat jalan sekitar 77,38 persen berbanding 48,19 persen. Hal ini dapat dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk rawat inap biasanya cenderung lebih besar jika dibandingkan rawat jalan. Sehingga, manfaatnya akan lebih semakin besar dirasakan ketika jaminan kesehatan digunakan untuk rawat inap.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.14 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dan Rawat Inap menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa penggunaan semua jenis jaminan kesehatan lebih tinggi untuk rawat inap jika dibandingkan rawat jalan. Persentase pemuda menurut penggunaan jaminan kesehatan tertinggi adalah BPJS PBI dan BPS Non PBI (baik untuk rawat jalan maupun rawat inap). Sementara itu, terdapat lebih dari separuh pemuda (51,81 persen) yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan dan 22,62 persen pemuda yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap. Hal menarik yang dapat dikaji lebih lanjut adalah dari sekitar 75,74 persen pemuda yang telah memiliki JKN, berapa di antaranya yang tidak menggunakan JKN yang dimiliki untuk rawat jalan atau rawat inap. Perlunya edukasi pentingnya pemanfaatan JKN yang dimiliki dalam melakukan rawatan ketika sakit atau mengalami keluhan kesehatan, agar JKN yang dimiliki dapat teroptimalkan dengan baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.15 Persentase Pemuda yang Menggunakan BPJS PBI dan Persentase Pemuda yang tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan ketika Rawat Inap atau Rawat Jalan, 2023

Semakin rendah distribusi pengeluaran, persentase pemuda yang menggunakan BPJS PBI semakin tinggi baik untuk rawat inap maupun rawat jalan (Gambar 4.15). Penggunaan BPJS PBI baik untuk rawat inap maupun rawat jalan pada pemuda kelompok pengeluaran 40 persen terbawah lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Hal ini dikarenakan BPJS PBI

ditujukan untuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Akan tetapi, data juga menunjukkan masih ada sebagian masyarakat pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang menggunakan BPJS PBI yang iuran bulannya ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi, seharusnya dapat beralih ke jenis JKN lainnya, tanpa menjadi beban pemerintah.

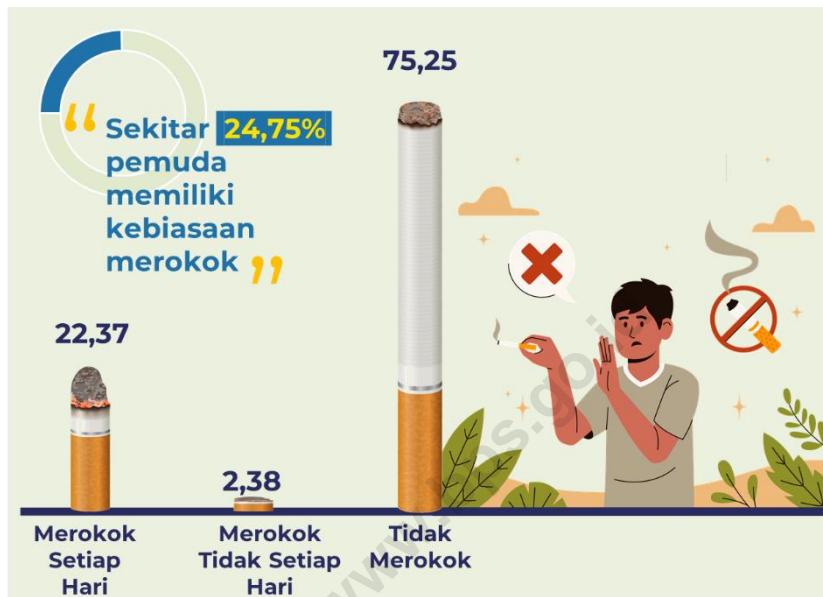
Jika dibandingkan berdasarkan penggunaannya, persentase pemuda yang menggunakan BPJS pada kelompok 40 persen terbawah untuk rawat inap jauh lebih tinggi dibandingkan untuk rawat jalan (58,40 persen berbanding 36,97 persen). Sementara itu, persentase pemuda yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan jauh lebih tinggi dibandingkan rawat inap untuk semua kelompok distribusi pengeluaran. Tingginya biaya untuk rawat inap dapat membuat pemuda untuk menggunakan jaminan kesehatan, bahkan untuk pemuda pada kelompok distribusi pengeluaran 20 persen teratas sekalipun.

4.4 Pemuda yang Merokok

Sekitar 80 persen dari total pengguna tembakau di seluruh dunia berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan beban penyakit dan kematian akibat tembakau (rokok) merupakan yang paling berat (World Health Organization 2023). Tanpa melihat bentuk fisik rokok yang dikonsumsi, merokok membawa mara bahaya bagi tubuh. Hal ini dikarenakan dalam setiap produk tembakau terdapat nikotin, yang bukan hanya bersifat adiktif, namun juga dapat merusak otak (Frederick Health 2021). Padahal, ketika tubuh masih berkembang (termasuk pada usia pemuda), optimalisasi tubuh dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun rokok menyebabkan hal yang sebaliknya.

Merokok membahayakan organ tubuh, menyebabkan banyak penyakit, dan menurunkan kesehatan perokok secara umum (Centers for Disease Control and Prevention 2021). Akan tetapi, data Susenas 2023 menunjukkan masih terdapat pemuda yang merokok. Padahal, merokok sejak muda bukan hanya dapat menyebabkan permasalahan serius kepada pemuda itu sendiri, melainkan juga permasalahan saat dewasa di masa mendatang. Bahkan, mereka yang mulai merokok di usia yang lebih muda lebih cenderung memiliki kecanduan nikotin yang lebih parah dibandingkan yang mulai merokok pada usia yang lebih tua

(American Lung Association 2023). Frederick Health (2021) menambahkan bahwa merokok ketika muda dapat merusak kemampuan atletis dan aktivitas fisik, dapat meningkatkan resiko kanker, diabetes, penyakit gigi dan mulut, bronkitis, serta permasalahan sistem imun.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.16 Persentase Pemuda menurut Kebiasaan Merokok Tembakau, 2023

Gambar 4.16 menunjukkan sekitar 24,75 persen pemuda memiliki kebiasaan merokok tembakau. Jika dilihat lebih dalam, terdapat 22,37 persen pemuda yang merokok tembakau setiap hari dan sekitar 2,38 persen merokok namun tidak setiap hari. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sebagian pemuda Indonesia yang tidak teroptimalkan masa mudanya, karena beberapa resiko kesehatan dapat timbul karena kebiasaan merokok tembakau tersebut.

Berdasarkan batang rokok yang dihisap, sebagian besar (42,15 persen) pemuda merokok tembakau rata-rata menghisap 7-12 batang per hari. Bahkan, sekitar 4,27 persen pemuda menghisap rokok lebih dari 24 batang per hari. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa merokok 1-4 batang per hari pun secara signifikan meningkatkan risiko kematian yang lebih tinggi akibat penyakit jantung iskemik dan penyebab lainnya, serta meningkatkan risiko kanker paru-paru pada wanita (Bjartveit and Tverdal 2005, 320). Mengacu pada temuan

tersebut, jangankan kebiasaan menghisap rokok lebih dari 24 batang per hari, merokok 1-4 batang per hari pun dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius bagi para pelakunya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.17 Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau Menurut Rata-Rata Jumlah Batang yang Dihisap per Hari, 2023

Jika kita melihat kembali bahwa yang dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok bagi para pemuda, sungguh sangat disayangkan ketika melihat masih terdapat pemuda yang merokok, bahkan setiap hari, dan juga menghisap banyak batang rokok per harinya. Beberapa penyebab disebutkan menjadi alasan pemuda merokok di antaranya status sosial ekonomi rendah (termasuk pendapatan dan pendidikan yang rendah); kurangnya dukungan dari orang tua; aksesibilitas, ketersediaan, dan harga produk tembakau; iklan produk tembakau, dsb. (Centers for Disease Control and Prevention 2023). Peran pemerintah didukung oleh segala pihak termasuk swasta dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengedukasi pemuda untuk menghindari kebiasaan merokok rokok agar masa mudanya termanfaatkan dengan optimal.

Tabel 4.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda dalam Sebulan Terakhir menurut Karakteristik , 2023

Karakteristik	Mengalami Keluhan Kesehatan	Angka Kesakitan Pemuda
(1)	(2)	(3)
Indonesia	17,21	6,24
Jenis Kelamin		
Laki-laki	15,63	5,73
Perempuan	18,83	6,76
Kelompok Umur		
16-18 tahun	17,87	7,22
19-24 tahun	16,06	5,54
25-30 tahun	18,02	6,42
Status Disabilitas		
Disabilitas	29,22	13,88
Non Disabilitas	17,12	6,18
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	17,29	5,80
Tamat SD/Sederajat	18,07	6,65
Tamat SMP/Sederajat	17,86	6,95
Tamat SMA/Sederajat	16,59	5,74
Tamat Perguruan Tinggi	16,55	5,45
Distribusi Pengeluaran		
40% Terbawah	16,25	5,96
40% Menengah	17,65	6,44
20% Teratas	18,02	6,34
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	16,71	5,87
Perdesaan	17,96	6,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.2 Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan menurut Karakteristik dan Upaya Pengobatan, 2023

Karakteristik	Mengobati Sendiri Saja	Rawat Jalan Saja	Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan	Tidak Melakukan Pengobatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indonesia	69,31	11,76	14,41	4,51	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	71,36	10,44	13,39	4,82	100,00
Perempuan	67,58	12,88	15,29	4,25	100,00
Kelompok Umur					
16-18 tahun	67,29	12,55	15,15	5,02	100,00
19-24 tahun	69,85	12,04	13,78	4,32	100,00
25-30 tahun	69,91	11,08	14,59	4,42	100,00
Status Disabilitas					
Disabilitas	59,47	14,03	20,29	6,21	100,00
Non Disabilitas	69,44	11,73	14,34	4,49	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	76,69	8,19	11,07	4,04	100,00
Tamat SD/Sederajat	70,19	9,14	16,14	4,54	100,00
Tamat SMP/Sederajat	67,67	12,09	15,49	4,75	100,00
Tamat SMA/Sederajat	70,01	12,06	13,61	4,32	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	69,92	13,00	12,63	4,45	100,00
Distribusi Pengeluaran					
40% Terbawah	70,85	10,98	13,60	4,57	100,00
40% Menengah	69,24	11,62	14,62	4,53	100,00
20% Teratas	67,05	13,26	15,29	4,39	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	68,84	12,52	14,69	3,95	100,00
Perdesaan	69,97	10,71	14,03	5,29	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.3 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Karakteristik dan Tempat Berobat, 2023

Karakteristik	Pemuda yang Rawat Jalan	Tempat Rawat Jalan		
		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	26,17	6,92	7,23	36,06
Jenis Kelamin				
Laki-laki	23,82	6,68	7,19	34,77
Perempuan	28,17	7,08	7,26	36,98
Kelompok Umur				
16-18 tahun	27,70	6,22	6,80	35,72
19-24 tahun	25,83	7,54	6,33	34,72
25-30 tahun	25,67	6,75	8,31	37,47
Status Disabilitas				
Disabilitas	34,32	26,54	17,70	22,65
Non Disabilitas	26,07	6,59	7,06	36,28
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	19,27	11,32	8,24	21,67
Tamat SD/Sederajat	25,27	5,44	3,67	38,63
Tamat SMP/Sederajat	27,58	6,72	6,43	37,63
Tamat SMA/Sederajat	25,66	7,19	8,32	33,70
Tamat Perguruan Tinggi	25,63	7,35	9,69	38,60
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	24,58	6,41	3,86	36,50
40% Menengah	26,24	6,91	6,53	38,02
20% Teratas	28,55	7,61	13,00	32,03
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	27,20	6,96	9,77	29,72
Perdesaan	24,74	6,84	3,35	45,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.3

Karakteristik	Tempat Rawat Jalan				
	Klinik/ Dokter Bersama	Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	UKBM	Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indonesia	18,94	30,04	2,63	1,42	1,39
Jenis Kelamin					
Laki-laki	19,49	29,65	2,37	1,74	1,93
Perempuan	18,54	30,31	2,82	1,20	1,01
Kelompok Umur					
16-18 tahun	17,70	31,72	2,86	0,74	1,56
19-24 tahun	18,52	32,06	2,28	1,48	1,74
25-30 tahun	20,04	27,21	2,81	1,77	0,99
Status Disabilitas					
Disabilitas	7,06	28,74	3,03	3,89	0,33
Non Disabilitas	19,14	30,06	2,62	1,38	1,41
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	7,55	49,88	4,76	2,04	0,61
Tamat SD/Sederajat	14,36	33,12	3,74	1,77	3,23
Tamat SMP/Sederajat	16,87	31,47	2,77	1,08	1,15
Tamat SMA/Sederajat	22,11	29,20	2,43	1,45	1,06
Tamat Perguruan Tinggi	21,80	21,23	1,36	2,18	1,81
Distribusi Pengeluaran					
40% Terbawah	14,05	36,82	3,24	1,48	1,71
40% Menengah	17,28	31,05	2,99	1,32	1,11
20% Teratas	28,41	19,12	1,18	1,53	1,47
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	24,33	29,91	1,11	1,09	1,19
Perdesaan	10,70	30,23	4,95	1,93	1,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.4 Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan yang Tidak Rawat Jalan menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023

Karakteristik	Alasan Utama Tidak Rawat Jalan			Jumlah
	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	62,25	34,55	3,20	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	61,49	35,15	3,36	100,00
Perempuan	62,93	34,01	3,06	100,00
Kelompok Umur				
16-18 tahun	62,50	34,15	3,35	100,00
19-24 tahun	61,77	35,30	2,92	100,00
25-30 tahun	62,54	34,08	3,38	100,00
Status Disabilitas				
Disabilitas	54,93	34,88	10,19	100,00
Non Disabilitas	62,33	34,55	3,12	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	67,15	26,58	6,27	100,00
Tamat SD/Sederajat	63,15	32,97	3,88	100,00
Tamat SMP/Sederajat	62,43	34,55	3,03	100,00
Tamat SMA/Sederajat	61,59	35,38	3,03	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	61,84	35,20	2,97	100,00
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	64,63	32,05	3,32	100,00
40% Menengah	62,31	34,50	3,19	100,00
20% Teratas	58,19	38,78	3,03	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	61,99	34,79	3,21	100,00
Perdesaan	62,59	34,23	3,19	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.5 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2023

Karakteristik	Pemuda yang Rawat Inap	Tempat Rawat Inap		
		RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan
	(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	3,09	33,39	39,69	7,16
Jenis Kelamin				
Laki-laki	1,36	39,56	40,63	1,79
Perempuan	4,87	31,63	39,42	8,70
Kelompok Umur				
16-18 tahun	1,71	36,99	37,97	3,10
19-24 tahun	2,71	36,07	36,69	6,55
25-30 tahun	4,23	30,85	42,02	8,45
Status Disabilitas				
Disabilitas	3,94	62,26	33,26	1,21
Non Disabilitas	3,09	33,11	39,75	7,22
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	2,47	42,73	23,23	4,32
Tamat SD/Sederajat	2,87	37,67	25,35	9,07
Tamat SMP/Sederajat	2,60	34,69	36,93	6,71
Tamat SMA/Sederajat	3,21	31,16	42,32	7,08
Tamat Perguruan Tinggi	4,61	33,00	48,27	7,41
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	2,77	34,14	26,96	8,96
40% Menengah	3,05	33,94	39,52	7,78
20% Teratas	3,72	31,54	56,42	3,85
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	3,14	31,28	47,47	7,49
Perdesaan	3,02	36,67	27,58	6,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.5

Karakteristik	Tempat Rawat Inap			
	Klinik/ Dokter Bersama	Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indonesia	6,31	13,97	0,31	0,39
Jenis Kelamin				
Laki-laki	6,81	11,28	0,96	0,48
Perempuan	6,17	14,74	0,13	0,36
Kelompok Umur				
16-18 tahun	5,08	15,89	0,79	0,65
19-24 tahun	6,92	14,59	0,32	0,57
25-30 tahun	6,18	13,14	0,20	0,20
Status Disabilitas				
Disabilitas	2,34	7,07	1,21	1,21
Non Disabilitas	6,35	14,04	0,30	0,38
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak Pernah Sekolah/	3,43	26,67	0,11	-
Tidak Tamat SD				
Tamat SD/Sederajat	8,91	21,03	0,20	0,54
Tamat SMP/Sederajat	5,71	16,06	0,33	0,80
Tamat SMA/Sederajat	7,06	12,97	0,31	0,22
Tamat Perguruan Tinggi	4,39	7,15	0,36	-
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	6,74	23,17	0,43	0,71
40% Menengah	6,85	12,31	0,26	0,28
20% Teratas	4,88	4,71	0,25	0,13
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	5,40	8,40	0,46	0,33
Perdesaan	7,72	22,64	0,09	0,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.6 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap menurut Karakteristik dan Lama Dirawat (Hari), 2023

Karakteristik	Rata-rata Lama Rawat Inap	Lama Rawat Inap				Jumlah
		1-3 hari	4-7 hari	8-14 hari	>14 hari	
(1)	(2)	(3)	(6)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	3,66	69,39	25,25	3,81	1,55	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	4,92	54,51	34,70	7,33	3,46	100,00
Perempuan	3,30	73,65	22,55	2,80	1,01	100,00
Kelompok Umur						
16-18 tahun	4,20	55,50	38,66	3,88	1,96	100,00
19-24 tahun	3,98	66,47	26,55	4,29	2,69	100,00
25-30 tahun	3,34	74,35	21,46	3,47	0,72	100,00
Status Disabilitas						
Disabilitas	9,80	19,72	56,66	13,71	9,91	100,00
Non Disabilitas	3,60	69,87	24,95	3,71	1,47	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	4,77	70,59	17,54	3,96	7,90	100,00
Tamat SD/Sederajat	3,32	74,68	20,18	4,26	0,88	100,00
Tamat SMP/Sederajat	3,63	66,44	28,15	3,94	1,47	100,00
Tamat SMA/Sederajat	3,69	70,20	24,52	3,49	1,78	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	3,71	69,58	25,61	4,06	0,75	100,00
Distribusi Pengeluaran						
40% Terbawah	3,15	76,02	19,97	3,14	0,87	100,00
40% Menengah	3,52	71,23	24,35	3,39	1,03	100,00
20% Teratas	4,56	57,89	33,50	5,33	3,27	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	3,85	66,02	28,03	4,25	1,71	100,00
Perdesaan	3,37	74,65	20,92	3,12	1,30	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.7 Persentase Pemuda menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Jaminan Kesehatan, 2023

Karakteristik	Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan	Memiliki Jaminan Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	24,26	75,74	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	25,05	74,95	100,00
Perempuan	23,46	76,54	100,00
Kelompok Umur			
16-18 tahun	25,17	74,83	100,00
19-24 tahun	23,71	76,29	100,00
25-30 tahun	24,34	75,66	100,00
Status Disabilitas			
Disabilitas	24,05	75,95	100,00
Non Disabilitas	24,27	75,73	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	27,64	72,36	100,00
Tamat SD/Sederajat	31,32	68,68	100,00
Tamat SMP/Sederajat	26,72	73,28	100,00
Tamat SMA/Sederajat	22,32	77,68	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	16,11	83,89	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	29,61	70,39	100,00
40% Menengah	23,28	76,72	100,00
20% Teratas	16,90	83,10	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	20,29	79,71	100,00
Perdesaan	30,20	69,80	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.8 Persentase Pemuda menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

Karakteristik	Kepemilikan Jaminan Kesehatan				
	BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indonesia	60,34	31,61	7,94	0,63	3,93
Jenis Kelamin					
Laki-laki	62,09	29,94	7,95	0,61	3,79
Perempuan	58,58	33,28	7,93	0,65	4,08
Kelompok Umur					
16-18 tahun	66,26	26,63	7,97	0,55	2,70
19-24 tahun	62,22	30,10	8,02	0,52	3,61
25-30 tahun	55,22	35,83	7,84	0,78	4,93
Status Disabilitas					
Disabilitas	71,17	23,30	6,92	0,36	2,27
Non Disabilitas	60,26	31,67	7,95	0,63	3,94
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	70,85	11,03	20,74	0,09	1,48
Tamat SD/Sederajat	78,88	13,53	9,52	0,12	1,72
Tamat SMP/Sederajat	67,49	25,10	8,20	0,46	2,88
Tamat SMA/Sederajat	57,10	35,00	7,10	0,62	4,70
Tamat Perguruan Tinggi	35,11	56,11	6,33	1,63	6,48
Distribusi Pengeluaran					
40% Terbawah	79,79	13,55	8,27	0,12	1,64
40% Menengah	60,99	31,25	8,06	0,23	3,87
20% Teratas	30,56	58,80	7,24	2,11	7,41
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	52,78	39,73	6,37	0,91	5,00
Perdesaan	73,23	17,76	10,63	0,15	2,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.9 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023

Karakteristik	Jenis Jaminan Kesehatan					Tidak Menggunakan
	BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	29,20	15,67	1,56	0,30	1,81	51,81
Jenis Kelamin						
Laki-laki	29,36	14,32	1,59	0,15	1,45	53,47
Perempuan	29,08	16,64	1,54	0,41	2,07	50,62
Kelompok Umur						
16-18 tahun	31,00	14,54	1,18	0,35	1,35	51,88
19-24 tahun	32,06	13,70	1,86	0,27	1,58	50,75
25-30 tahun	25,53	18,13	1,50	0,30	2,28	52,75
Status Disabilitas						
Disabilitas	47,94	17,19	2,54	-	1,79	32,01
Non Disabilitas	28,88	15,65	1,54	0,31	1,81	52,14
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	44,13	8,64	10,54	-	2,60	35,66
Tamat SD/Sederajat	35,27	5,07	1,08	0,11	0,38	58,45
Tamat SMP/Sederajat	30,20	12,95	1,71	0,39	1,27	53,81
Tamat SMA/Sederajat	29,35	17,98	1,25	0,31	2,44	49,05
Tamat Perguruan Tinggi	16,33	29,21	1,01	0,18	2,84	50,52
Distribusi Pengeluaran						
40% Terbawah	36,97	5,41	1,76	0,10	0,61	55,35
40% Menengah	31,27	14,70	1,36	0,10	1,33	51,55
20% Teratas	15,11	31,19	1,63	0,92	4,26	47,50
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	29,27	21,28	1,18	0,47	2,59	45,58
Perdesaan	29,08	7,09	2,14	0,05	0,62	61,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.10 Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023

Karakteristik	Jenis Jaminan Kesehatan					Tidak Menggunakan
	BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	43,43	28,89	1,57	0,97	2,96	22,62
Jenis Kelamin						
Laki-laki	41,34	29,80	1,47	1,51	2,45	23,94
Perempuan	44,03	28,63	1,60	0,81	3,11	22,24
Kelompok Umur						
16-18 tahun	48,46	23,80	1,18	0,40	2,52	23,86
19-24 tahun	48,45	23,88	1,48	0,78	3,06	23,00
25-30 tahun	39,06	33,27	1,72	1,21	2,99	22,10
Status Disabilitas						
Disabilitas	65,98	20,91	2,13	-	-	12,04
Non Disabilitas	43,22	28,96	1,57	0,98	2,99	22,72
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	53,35	15,80	3,80	-	0,14	27,42
Tamat SD/Sederajat	59,47	12,70	1,83	-	0,37	25,96
Tamat SMP/Sederajat	51,00	20,42	1,35	0,57	2,35	24,75
Tamat SMA/Sederajat	39,80	31,79	1,45	0,69	3,85	22,87
Tamat Perguruan Tinggi	28,46	47,74	1,88	3,03	3,66	15,69
Distribusi Pengeluaran						
40% Terbawah	58,40	14,95	1,89	0,03	0,94	23,96
40% Menengah	43,98	29,03	1,73	0,34	2,72	22,71
20% Teratas	23,18	46,71	0,92	3,18	5,96	20,73
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	37,21	36,57	1,35	1,46	3,89	20,02
Perdesaan	53,11	16,94	1,93	0,20	1,51	26,65

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.11 Persentase Pemuda menurut Karakteristik dan Kebiasaan Merokok Tembakau Sebulan Terakhir, 2023

Karakteristik	Kebiasaan Merokok			Tidak Merokok
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	22,37	2,38	24,75	75,25
Jenis Kelamin				
Laki-laki	43,53	4,62	48,14	51,86
Perempuan	0,69	0,10	0,79	99,21
Kelompok Umur				
16-18 tahun	7,83	1,47	9,30	90,70
19-24 tahun	23,03	2,71	25,74	74,26
25-30 tahun	29,57	2,55	32,12	67,88
Status Disabilitas				
Disabilitas	14,00	2,07	16,07	83,93
Non Disabilitas	22,43	2,39	24,82	75,18
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	28,58	4,21	32,78	67,22
Tamat SD/Sederajat	32,01	2,76	34,76	65,24
Tamat SMP/Sederajat	20,04	2,11	22,15	77,85
Tamat SMA/Sederajat	23,07	2,58	25,65	74,35
Tamat Perguruan Tinggi	17,08	1,85	18,93	81,07
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	21,23	2,69	23,92	76,08
40% Menengah	24,04	2,29	26,33	73,67
20% Teratas	21,08	2,04	23,13	76,87
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	20,78	2,35	23,14	76,86
Perdesaan	24,73	2,43	27,17	72,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.12 Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau menurut Karakteristik dan Rata-rata Jumlah Batang rokok yang Dihisap per Hari, 2023

Karakteristik	Rata-rata Rokok yang Dihisap per Hari	1-3 Batang	4-6 Batang	7-12 Batang	13-24 Batang	>25 Batang	Jumlah (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	11,55	10,66	20,93	42,15	21,98	4,27	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-laki	11,57	10,58	20,94	42,14	22,04	4,30	100,00
Perempuan	10,50	15,50	20,25	43,04	18,60	2,60	100,00
Kelompok Umur							
16-18 tahun	9,00	23,39	28,19	32,41	12,86	3,14	100,00
19-24 tahun	11,24	11,05	22,38	41,76	20,70	4,11	100,00
25-30 tahun	12,21	8,34	18,61	44,00	24,46	4,59	100,00
Status Disabilitas							
Disabilitas	10,80	18,93	19,18	40,00	15,05	6,83	100,00
Non Disabilitas	11,56	10,62	20,94	42,16	22,01	4,26	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan							
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	12,21	13,68	15,70	36,75	28,72	5,14	100,00
Tamat SD/Sederajat	12,33	8,06	19,33	43,56	24,33	4,71	100,00
Tamat SMP/Sederajat	11,21	11,77	21,65	42,61	20,04	3,93	100,00
Tamat SMA/Sederajat	11,48	10,51	21,45	41,98	21,76	4,29	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	11,63	10,41	20,45	40,99	23,74	4,41	100,00
Distribusi Pengeluaran							
40% Terbawah	10,15	14,03	25,30	41,71	15,68	3,27	100,00
40% Menengah	12,11	8,65	18,73	43,68	24,72	4,22	100,00
20% Teratas	12,84	9,05	17,94	39,58	27,24	6,20	100,00
Klasifikasi Desa							
Perkotaan	10,57	12,72	24,27	43,10	16,44	3,47	100,00
Perdesaan	12,80	8,04	16,68	40,95	29,04	5,29	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.13 Persentase Pemuda yang Pernah Merokok Tembakau Sebelum Sebulan Terakhir menurut Karakteristik dan Frekuensi Kebiasaan Merokok, 2023

Karakteristik	Kebiasaan Merokok Sebelum Sebulan Terakhir			Tidak Merokok Sebelum Sebulan Terakhir
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	20,90	2,58	23,48	76,52
Jenis Kelamin				
Laki-laki	40,53	4,86	45,39	54,61
Perempuan	0,80	0,25	1,05	98,95
Kelompok Umur				
16-18 tahun	7,25	1,70	8,95	91,05
19-24 tahun	21,27	2,88	24,15	75,85
25-30 tahun	27,93	2,75	30,68	69,32
Status Disabilitas				
Disabilitas	13,33	2,05	15,38	84,62
Non Disabilitas	20,96	2,59	23,54	76,46
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	25,94	4,69	30,63	69,37
Tamat SD/Sederajat	29,73	2,87	32,60	67,40
Tamat SMP/Sederajat	18,66	2,37	21,03	78,97
Tamat SMA/Sederajat	21,71	2,68	24,39	75,61
Tamat Perguruan Tinggi	15,98	2,21	18,19	81,81
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	19,54	2,97	22,51	77,49
40% Menengah	22,69	2,36	25,05	74,95
20% Teratas	19,79	2,34	22,13	77,87
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	19,60	2,48	22,08	77,92
Perdesaan	22,84	2,75	25,59	74,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.14 Persentase Pemuda yang Pernah Merokok Tembakau (Dahulu hingga Sebulan Terakhir) menurut Karakteristik dan Kebiasaan Merokok, 2023

Karakteristik	Kebiasaan Merokok Sebelum Sebulan Terakhir					Jumlah
	Merokok Sebelum dan Sebulan Terakhir	Merokok Sebulan Terakhir Saja	Merokok Sebelum Sebulan Terakhir Saja	Tidak Pernah Merokok		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Indonesia	22,93	1,82	0,56	74,69	100,00	
Jenis Kelamin						
Laki-laki	44,63	3,51	0,76	51,10	100,00	
Perempuan	0,70	0,09	0,35	98,86	100,00	
Kelompok Umur						
16-18 tahun	8,56	0,74	0,39	90,30	100,00	
19-24 tahun	23,71	2,03	0,45	73,82	100,00	
25-30 tahun	29,93	2,19	0,75	67,12	100,00	
Status Disabilitas						
Disabilitas	15,01	1,06	0,37	83,56	100,00	
Non Disabilitas	22,99	1,83	0,56	74,63	100,00	
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	30,06	2,72	0,57	66,65	100,00	
Tamat SD/Sederajat	32,02	2,75	0,58	64,65	100,00	
Tamat SMP/Sederajat	20,56	1,59	0,47	77,38	100,00	
Tamat SMA/Sederajat	23,78	1,86	0,60	73,75	100,00	
Tamat Perguruan Tinggi	17,56	1,37	0,63	80,44	100,00	
Distribusi Pengeluaran						
40% Terbawah	22,00	1,92	0,51	75,56	100,00	
40% Menengah	24,45	1,88	0,60	73,07	100,00	
20% Teratas	21,59	1,53	0,54	76,33	100,00	
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	21,49	1,64	0,58	76,28	100,00	
Perdesaan	25,07	2,09	0,51	72,32	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.15 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	16,38	17,91	15,54	19,18	17,37
Sumatera Utara	12,78	18,66	14,61	15,77	15,18
Sumatera Barat	19,87	19,71	17,22	22,44	19,79
Riau	16,90	15,13	13,81	18,08	15,88
Jambi	15,21	16,07	14,11	17,57	15,80
Sumatera Selatan	21,47	16,87	17,23	20,22	18,70
Bengkulu	18,25	18,56	15,44	21,56	18,45
Lampung	13,64	17,76	15,20	17,53	16,34
Kep. Bangka Belitung	18,93	17,27	16,14	20,33	18,21
Kepulauan Riau	24,94	11,97	19,73	27,87	23,76
DKI Jakarta	12,20	-	11,51	12,87	12,20
Jawa Barat	15,50	19,82	15,07	17,61	16,31
Jawa Tengah	20,60	20,00	17,43	23,30	20,32
DI Yogyakarta	17,12	17,43	14,70	19,65	17,18
Jawa Timur	17,91	18,06	16,50	19,44	17,97
Banten	15,73	19,89	15,65	17,60	16,61
Bali	14,86	15,54	14,14	15,98	15,03
Nusa Tenggara Barat	28,74	27,74	25,98	30,55	28,27
Nusa Tenggara Timur	23,64	24,17	22,33	25,72	24,01
Kalimantan Barat	17,90	17,77	16,02	19,63	17,82
Kalimantan Tengah	18,84	15,93	14,87	19,58	17,19
Kalimantan Selatan	16,41	19,50	17,04	18,86	17,94
Kalimantan Timur	15,76	14,61	14,09	16,81	15,42
Kalimantan Utara	14,32	18,58	15,02	16,48	15,72
Sulawesi Utara	16,00	15,03	13,92	17,39	15,59
Sulawesi Tengah	14,97	13,20	12,72	14,92	13,82
Sulawesi Selatan	13,26	16,35	13,76	15,82	14,78
Sulawesi Tenggara	14,15	12,95	12,14	14,74	13,45
Gorontalo	28,70	20,89	22,10	26,75	24,39
Sulawesi Barat	15,78	15,27	13,23	17,56	15,38
Maluku	14,62	10,45	9,85	14,99	12,38
Maluku Utara	7,01	10,18	7,77	10,63	9,20
Papua Barat	11,18	8,45	8,20	11,05	9,60
Papua	14,21	6,97	8,26	9,88	9,04
Indonesia	16,71	17,96	15,63	18,83	17,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.16 Angka Kesakitan Pemuda menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,73	8,21	6,77	9,30	8,04
Sumatera Utara	4,40	5,65	4,59	5,25	4,91
Sumatera Barat	6,75	7,76	6,05	8,45	7,23
Riau	7,26	4,00	4,27	6,56	5,37
Jambi	4,79	7,02	6,12	6,50	6,31
Sumatera Selatan	3,27	4,80	3,77	4,62	4,19
Bengkulu	5,17	7,28	5,00	8,09	6,52
Lampung	5,51	6,47	6,05	6,24	6,14
Kep. Bangka Belitung	5,30	6,01	5,00	6,23	5,61
Kepulauan Riau	6,67	3,20	4,59	8,16	6,36
DKI Jakarta	4,74	-	4,61	4,87	4,74
Jawa Barat	6,04	7,64	6,12	6,56	6,34
Jawa Tengah	6,79	7,85	6,34	8,24	7,28
DI Yogyakarta	5,83	8,83	5,21	7,56	6,39
Jawa Timur	6,11	6,41	5,93	6,54	6,24
Banten	4,94	7,13	4,87	5,95	5,40
Bali	5,49	7,85	6,07	6,10	6,08
Nusa Tenggara Barat	12,89	13,83	12,10	14,57	13,33
Nusa Tenggara Timur	6,15	10,34	8,32	9,88	9,09
Kalimantan Barat	6,40	6,52	5,99	6,97	6,48
Kalimantan Tengah	4,01	6,21	4,96	5,57	5,26
Kalimantan Selatan	4,22	5,54	4,85	4,89	4,87
Kalimantan Timur	5,50	5,79	5,74	5,43	5,59
Kalimantan Utara	5,87	7,48	4,61	8,32	6,40
Sulawesi Utara	6,23	6,93	5,70	7,42	6,53
Sulawesi Tengah	4,43	5,71	4,66	5,85	5,26
Sulawesi Selatan	5,02	5,94	5,45	5,50	5,47
Sulawesi Tenggara	4,86	6,00	4,95	6,10	5,53
Gorontalo	11,12	8,28	8,48	10,66	9,55
Sulawesi Barat	4,65	6,62	4,96	7,48	6,21
Maluku	6,82	5,33	4,60	7,49	6,02
Maluku Utara	2,55	5,28	3,77	5,10	4,43
Papua Barat	4,05	3,25	3,18	4,01	3,59
Papua	5,11	2,32	2,68	3,59	3,11
Indonesia	5,87	6,79	5,73	6,76	6,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.17 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Mengobati Sendiri menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	84,52	76,85	82,06	77,28	79,41
Sumatera Utara	85,42	84,89	85,24	85,07	85,15
Sumatera Barat	72,92	71,31	74,20	70,53	72,16
Riau	80,95	83,01	83,53	80,91	82,09
Jambi	78,13	83,80	81,78	82,30	82,06
Sumatera Selatan	90,79	88,44	88,86	90,09	89,51
Bengkulu	80,14	85,00	85,33	81,72	83,26
Lampung	87,95	84,79	86,82	84,68	85,69
Kep. Bangka Belitung	85,53	87,11	86,74	85,72	86,18
Kepulauan Riau	84,31	71,72	86,99	81,36	83,73
DKI Jakarta	79,13	-	82,80	76,02	79,13
Jawa Barat	81,82	88,43	83,05	83,58	83,33
Jawa Tengah	82,68	80,33	82,70	80,79	81,62
DI Yogyakarta	81,68	76,19	79,41	81,56	80,64
Jawa Timur	86,47	86,61	88,40	84,95	86,53
Banten	86,08	93,00	89,54	86,31	87,85
Bali	76,24	63,12	73,81	71,88	72,82
Nusa Tenggara Barat	88,98	84,33	86,97	86,73	86,84
Nusa Tenggara Timur	83,88	81,88	84,85	80,36	82,46
Kalimantan Barat	86,21	89,38	90,33	86,47	88,21
Kalimantan Tengah	93,56	88,36	88,54	92,61	90,83
Kalimantan Selatan	89,31	93,41	92,96	90,18	91,51
Kalimantan Timur	82,91	79,88	81,82	82,28	82,06
Kalimantan Utara	90,78	83,62	90,10	85,94	87,99
Sulawesi Utara	76,53	73,45	77,98	72,94	75,27
Sulawesi Tengah	90,74	87,05	86,87	89,81	88,46
Sulawesi Selatan	81,21	82,10	82,27	81,18	81,69
Sulawesi Tenggara	83,38	82,84	86,07	80,64	83,07
Gorontalo	86,02	87,90	87,31	86,57	86,91
Sulawesi Barat	71,45	85,12	80,71	83,29	82,18
Maluku	85,45	81,79	90,96	78,94	83,79
Maluku Utara	76,78	91,62	90,06	86,67	88,11
Papua Barat	83,13	64,08	74,77	72,36	73,41
Papua	80,04	72,31	78,67	73,14	75,77
Indonesia	83,53	84,00	84,74	82,87	83,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.18 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)
Aceh	30,86	38,94	31,22	40,29	36,24
Sumatera Utara	25,98	21,08	23,46	23,58	23,52
Sumatera Barat	34,22	38,66	33,44	38,61	36,33
Riau	31,17	15,33	18,24	25,85	22,43
Jambi	25,04	22,82	20,59	25,95	23,50
Sumatera Selatan	17,99	19,74	18,69	19,16	18,94
Bengkulu	23,11	22,22	20,77	23,85	22,54
Lampung	28,68	22,57	21,26	27,10	24,33
Kep. Bangka Belitung	23,28	27,41	22,37	27,08	24,97
Kepulauan Riau	23,32	NA	17,33	28,05	23,55
DKI Jakarta	33,03	-	33,10	32,98	33,03
Jawa Barat	31,96	23,47	28,15	31,72	30,03
Jawa Tengah	28,30	28,82	25,51	30,87	28,54
DI Yogyakarta	30,20	38,81	31,50	32,07	31,82
Jawa Timur	24,40	25,36	21,97	27,20	24,81
Banten	22,85	16,76	17,55	24,70	21,30
Bali	31,52	55,47	37,13	38,36	37,76
Nusa Tenggara Barat	28,45	33,66	29,98	31,59	30,85
Nusa Tenggara Timur	15,45	25,33	18,57	25,85	22,44
Kalimantan Barat	17,91	15,07	11,92	19,58	16,12
Kalimantan Tengah	12,05	14,48	11,37	14,86	13,33
Kalimantan Selatan	13,82	13,89	11,62	15,91	13,86
Kalimantan Timur	25,71	16,21	20,54	25,25	23,04
Kalimantan Utara	17,09	21,12	14,58	22,63	18,66
Sulawesi Utara	35,06	32,91	33,92	34,40	34,18
Sulawesi Tengah	11,29	18,18	15,93	15,22	15,55
Sulawesi Selatan	24,18	21,65	20,97	24,42	22,80
Sulawesi Tenggara	16,61	15,96	12,82	19,02	16,25
Gorontalo	20,02	21,63	19,45	21,92	20,78
Sulawesi Barat	30,63	21,29	21,50	24,67	23,30
Maluku	15,35	23,34	11,86	23,80	18,97
Maluku Utara	24,32	14,88	18,86	15,83	17,11
Papua Barat	16,68	42,27	28,18	30,93	29,73
Papua	28,12	28,49	27,30	29,26	28,33
Indonesia	27,20	24,74	23,82	28,17	26,17

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.19 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Provinsi dan Tempat Rawat Jalan, 2023

Provinsi	Tempat Rawat Jalan			
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Dokter Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	10,98	3,11	33,85	13,97
Sumatera Utara	6,49	3,95	57,91	9,37
Sumatera Barat	6,43	5,92	42,87	12,96
Riau	4,72	11,01	28,33	35,66
Jambi	9,24	4,64	44,95	15,27
Sumatera Selatan	6,77	NA	49,79	18,94
Bengkulu	5,55	4,37	54,30	4,85
Lampung	4,17	6,46	61,76	9,02
Kep. Bangka Belitung	9,76	10,72	42,50	9,67
Kepulauan Riau	NA	13,53	10,14	35,89
DKI Jakarta	10,83	11,95	NA	40,93
Jawa Barat	5,56	11,02	35,00	26,74
Jawa Tengah	7,64	6,38	39,90	16,52
DI Yogyakarta	8,40	18,49	24,86	18,93
Jawa Timur	5,42	7,42	47,56	15,09
Banten	4,82	6,07	20,59	36,13
Bali	6,09	5,77	55,15	12,52
Nusa Tenggara Barat	5,51	1,14	40,79	11,86
Nusa Tenggara Timur	4,76	2,84	8,61	4,15
Kalimantan Barat	6,58	4,68	27,99	10,56
Kalimantan Tengah	NA	-	33,05	15,15
Kalimantan Selatan	8,80	3,83	18,60	10,73
Kalimantan Timur	6,89	13,78	13,18	32,85
Kalimantan Utara	28,30	0,04	9,77	NA
Sulawesi Utara	14,27	5,61	28,83	16,11
Sulawesi Tengah	11,83	NA	15,03	13,43
Sulawesi Selatan	13,66	2,97	18,84	11,66
Sulawesi Tenggara	8,84	NA	11,99	7,95
Gorontalo	2,28	NA	40,92	6,89
Sulawesi Barat	8,72	-	21,93	NA
Maluku	11,02	NA	19,97	NA
Maluku Utara	14,55	NA	NA	NA
Papua Barat	11,00	3,27	5,08	4,93
Papua	11,20	NA	5,12	8,13
Indonesia	6,92	7,23	36,06	18,94

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.19

Provinsi	Tempat Rawat Jalan			
	Puskesmas/Puskesmas Pembantu	UKBM	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	40,59	4,70	2,14	NA
Sumatera Utara	23,44	NA	1,47	NA
Sumatera Barat	29,76	6,03	2,05	NA
Riau	17,12	NA	NA	NA
Jambi	27,54	2,43	NA	NA
Sumatera Selatan	21,59	2,66	NA	NA
Bengkulu	29,07	NA	3,23	NA
Lampung	18,93	NA	NA	NA
Kep. Bangka Belitung	27,50	NA	NA	NA
Kepulauan Riau	27,47	NA	NA	NA
DKI Jakarta	33,74	NA	NA	NA
Jawa Barat	22,68	0,98	0,90	1,37
Jawa Tengah	27,78	2,00	1,22	1,55
DI Yogyakarta	33,27	NA	-	NA
Jawa Timur	24,20	3,70	2,33	1,52
Banten	33,21	NA	NA	NA
Bali	22,23	NA	NA	-
Nusa Tenggara Barat	34,00	5,39	2,82	5,85
Nusa Tenggara Timur	70,51	12,97	NA	NA
Kalimantan Barat	48,04	NA	NA	NA
Kalimantan Tengah	31,38	10,48	NA	NA
Kalimantan Selatan	49,72	6,61	NA	NA
Kalimantan Timur	35,33	NA	NA	NA
Kalimantan Utara	51,39	-	NA	NA
Sulawesi Utara	34,62	3,18	NA	-
Sulawesi Tengah	42,29	11,85	NA	NA
Sulawesi Selatan	51,49	2,25	1,26	NA
Sulawesi Tenggara	65,62	NA	NA	NA
Gorontalo	50,20	NA	NA	NA
Sulawesi Barat	66,28	-	NA	NA
Maluku	66,33	5,69	NA	NA
Maluku Utara	61,24	7,67	NA	NA
Papua Barat	74,35	NA	NA	NA
Papua	63,80	NA	NA	NA
Indonesia	30,04	2,63	1,42	1,39

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.20 Persentase Pemuda yang memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	98,60	98,79	98,56	98,88	98,72
Sumatera Utara	74,12	62,68	68,76	70,15	69,44
Sumatera Barat	78,63	74,16	73,86	79,22	76,50
Riau	77,01	66,43	70,26	71,54	70,88
Jambi	67,35	52,59	55,54	59,12	57,29
Sumatera Selatan	79,32	62,78	69,81	68,92	69,37
Bengkulu	78,26	70,41	73,01	73,51	73,25
Lampung	83,49	66,49	71,56	73,13	72,33
Kep. Bangka Belitung	82,60	73,78	78,26	79,34	78,79
Kepulauan Riau	81,00	88,48	82,19	81,15	81,68
DKI Jakarta	95,67	-	96,26	95,12	95,67
Jawa Barat	75,59	56,86	71,43	72,78	72,09
Jawa Tengah	79,37	71,19	73,88	77,41	75,62
DI Yogyakarta	85,74	87,47	84,72	87,40	86,06
Jawa Timur	77,97	66,02	72,35	73,56	72,96
Banten	80,63	56,16	74,13	76,72	75,41
Bali	87,27	89,11	87,79	87,67	87,73
Nusa Tenggara Barat	76,97	60,49	70,21	68,25	69,23
Nusa Tenggara Timur	79,83	79,35	79,08	79,90	79,49
Kalimantan Barat	71,83	63,41	65,33	67,69	66,51
Kalimantan Tengah	68,91	61,71	64,22	65,44	64,82
Kalimantan Selatan	73,81	73,45	72,14	75,14	73,63
Kalimantan Timur	87,63	81,77	84,94	86,90	85,89
Kalimantan Utara	88,85	92,65	90,93	89,22	90,10
Sulawesi Utara	86,42	80,33	83,10	84,61	83,83
Sulawesi Tengah	83,32	80,56	80,88	82,19	81,54
Sulawesi Selatan	87,41	83,72	85,05	86,13	85,59
Sulawesi Tenggara	78,81	83,56	80,77	82,37	81,58
Gorontalo	90,46	86,97	86,96	90,16	88,54
Sulawesi Barat	92,52	92,08	92,69	91,65	92,17
Maluku	63,16	59,74	60,55	62,12	61,32
Maluku Utara	76,63	70,82	73,29	71,95	72,62
Papua Barat	79,04	75,55	75,95	78,13	77,02
Papua	75,90	83,28	80,37	82,06	81,18
Indonesia	79,71	69,80	74,95	76,54	75,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.21 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023

Provinsi	Jenis Jaminan Kesehatan					
	BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Asuransi Perusahaan/Kantor	Tidak Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	58,90	3,37	NA	-	NA	37,18
Sumatera Utara	20,94	8,97	NA	-	NA	66,64
Sumatera Barat	33,63	14,07	1,23	-	NA	50,30
Riau	24,60	26,30	NA	-	2,19	45,83
Jambi	14,92	24,97	NA	NA	NA	58,75
Sumatera Selatan	29,23	11,89	NA	-	NA	53,96
Bengkulu	26,00	11,31	-	-	NA	61,77
Lampung	22,85	10,10	NA	NA	-	64,15
Kep. Bangka Belitung	22,00	23,12	NA	-	NA	53,54
Kepulauan Riau	41,14	28,34	-	-	NA	26,09
DKI Jakarta	44,90	28,19	-	NA	NA	24,60
Jawa Barat	23,20	17,00	0,38	NA	1,65	57,13
Jawa Tengah	26,78	17,24	1,46	-	1,33	53,55
DI Yogyakarta	35,41	12,27	-	-	NA	49,30
Jawa Timur	19,33	11,40	2,56	NA	1,65	65,27
Banten	25,60	19,75	NA	NA	8,41	44,41
Bali	18,92	17,22	NA	-	NA	60,91
Nusa Tenggara Barat	25,26	4,64	2,58	-	NA	67,51
Nusa Tenggara Timur	69,34	11,01	2,28	-	NA	17,47
Kalimantan Barat	34,15	16,92	2,73	-	NA	46,06
Kalimantan Tengah	NA	29,26	NA	-	4,84	55,57
Kalimantan Selatan	37,77	22,65	NA	-	NA	37,54
Kalimantan Timur	21,87	55,07	NA	NA	NA	20,09
Kalimantan Utara	50,80	13,58	-	-	NA	35,53
Sulawesi Utara	38,13	21,43	NA	-	-	40,37
Sulawesi Tengah	58,38	11,11	NA	NA	-	29,85
Sulawesi Selatan	53,85	17,08	NA	-	NA	26,76
Sulawesi Tenggara	63,68	14,87	NA	-	-	20,70
Gorontalo	42,02	8,73	-	-	-	49,25
Sulawesi Barat	56,69	16,30	NA	-	NA	21,68
Maluku	34,12	21,73	5,33	-	-	38,82
Maluku Utara	50,61	2,87	8,49	-	NA	35,34
Papua Barat	54,85	11,11	8,86	-	NA	23,39
Papua	34,59	3,85	33,43	-	-	32,45
Indonesia	29,20	15,67	1,56	0,30	1,81	51,81

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.22 Persentase Pemuda yang Tidak Rawat Jalan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023

Provinsi	Alasan Utama Tidak Rawat Jalan			
	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	66,48	30,77	2,75	66,48
Sumatera Utara	58,57	38,41	3,02	58,57
Sumatera Barat	52,59	41,55	5,86	52,59
Riau	46,43	50,04	3,53	46,43
Jambi	62,65	33,23	4,12	62,65
Sumatera Selatan	60,96	34,31	4,72	60,96
Bengkulu	54,83	42,69	2,47	54,83
Lampung	66,50	31,17	2,32	66,50
Kep. Bangka Belitung	77,71	21,23	NA	77,71
Kepulauan Riau	56,49	39,84	3,67	56,49
DKI Jakarta	59,90	35,56	4,54	59,90
Jawa Barat	59,62	35,96	4,42	59,62
Jawa Tengah	64,79	33,14	2,07	64,79
DI Yogyakarta	68,30	29,97	1,73	68,30
Jawa Timur	69,35	28,39	2,25	69,35
Banten	54,23	42,07	3,70	54,23
Bali	66,71	33,14	NA	66,71
Nusa Tenggara Barat	65,21	32,24	2,55	65,21
Nusa Tenggara Timur	71,91	25,41	2,68	71,91
Kalimantan Barat	55,37	39,95	4,69	55,37
Kalimantan Tengah	64,23	34,26	1,50	64,23
Kalimantan Selatan	74,60	23,60	1,80	74,60
Kalimantan Timur	54,42	39,14	NA	54,42
Kalimantan Utara	46,91	45,48	7,61	46,91
Sulawesi Utara	61,03	36,37	2,60	61,03
Sulawesi Tengah	57,31	38,70	3,99	57,31
Sulawesi Selatan	60,64	37,29	2,07	60,64
Sulawesi Tenggara	64,23	32,24	3,54	64,23
Gorontalo	75,64	22,81	1,56	75,64
Sulawesi Barat	49,31	46,84	3,85	49,31
Maluku	56,09	42,26	1,65	56,09
Maluku Utara	54,60	43,51	NA	54,60
Papua Barat	56,81	38,10	5,09	56,81
Papua	51,48	40,35	8,17	51,48
Indonesia	62,25	34,55	3,20	62,25

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.23 Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,42	3,90	1,63	6,53	4,08
Sumatera Utara	3,40	1,84	1,03	4,53	2,76
Sumatera Barat	3,38	4,04	1,03	6,45	3,70
Riau	3,73	2,30	1,12	4,81	2,90
Jambi	2,90	2,72	1,18	4,45	2,78
Sumatera Selatan	2,45	2,62	0,99	4,16	2,55
Bengkulu	3,54	2,97	0,80	5,63	3,18
Lampung	3,51	2,71	1,20	4,85	2,99
Kep. Bangka Belitung	3,31	3,64	1,19	5,76	3,45
Kepulauan Riau	4,03	3,06	0,70	7,26	3,94
DKI Jakarta	2,44	-	1,26	3,57	2,44
Jawa Barat	2,50	2,73	1,65	3,49	2,54
Jawa Tengah	4,15	4,06	1,68	6,61	4,11
DI Yogyakarta	3,01	3,82	1,82	4,49	3,16
Jawa Timur	3,34	2,83	1,32	4,92	3,13
Banten	2,11	1,42	0,97	2,99	1,97
Bali	3,93	3,26	1,01	6,70	3,76
Nusa Tenggara Barat	4,20	5,90	1,82	8,18	5,00
Nusa Tenggara Timur	3,04	3,71	1,34	5,70	3,51
Kalimantan Barat	2,61	2,73	0,89	4,50	2,69
Kalimantan Tengah	1,90	1,14	0,41	2,55	1,47
Kalimantan Selatan	2,74	1,88	0,58	4,08	2,32
Kalimantan Timur	3,65	2,46	1,08	5,63	3,29
Kalimantan Utara	3,38	3,66	1,50	5,58	3,47
Sulawesi Utara	5,08	5,11	2,56	7,82	5,09
Sulawesi Tengah	4,62	3,84	1,58	6,64	4,12
Sulawesi Selatan	4,78	4,62	2,30	7,14	4,70
Sulawesi Tenggara	3,09	2,89	0,91	5,00	2,97
Gorontalo	5,11	3,62	1,62	7,04	4,29
Sulawesi Barat	4,54	3,18	1,28	5,69	3,47
Maluku	2,04	1,26	0,92	2,35	1,62
Maluku Utara	2,03	1,26	0,69	2,31	1,50
Papua Barat	3,26	1,54	0,46	4,14	2,26
Papua	3,07	0,51	0,47	2,09	1,24
Indonesia	3,14	3,02	1,36	4,87	3,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.24 Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023

Provinsi	Tempat Rawat Inap						
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama	Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	Praktik Pengobatan Tradisional	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	56,48	26,56	2,37	4,46	11,98	-	NA
Sumatera Utara	25,55	47,46	11,26	11,56	4,24	-	-
Sumatera Barat	38,88	29,04	16,88	9,33	9,38	NA	NA
Riau	24,28	45,19	12,64	11,19	6,70	-	NA
Jambi	35,78	30,58	12,59	8,79	12,71	NA	-
Sumatera Selatan	35,48	38,90	12,15	11,49	3,21	-	-
Bengkulu	62,59	25,52	NA	NA	3,48	-	-
Lampung	11,18	50,59	17,05	15,88	7,65	-	-
Kep. Bangka Belitung	48,45	37,54	-	NA	8,42	-	-
Kepulauan Riau	19,30	63,80	9,05	NA	NA	-	-
DKI Jakarta	32,15	47,62	13,13	NA	NA	NA	-
Jawa Barat	28,36	48,09	8,25	8,69	6,79	NA	NA
Jawa Tengah	27,07	45,70	4,13	6,33	16,91	NA	-
DI Yogyakarta	24,36	63,73	NA	NA	NA	-	-
Jawa Timur	32,87	39,00	8,75	3,55	15,58	NA	NA
Banten	22,65	46,39	8,00	11,10	9,75	NA	NA
Bali	26,92	58,66	5,46	5,73	4,12	-	-
Nusa Tenggara Barat	32,24	14,00	3,40	4,59	47,50	NA	NA
Nusa Tenggara Timur	42,84	21,02	-	NA	37,34	-	-
Kalimantan Barat	40,61	21,49	6,02	2,15	30,58	-	NA
Kalimantan Tengah	52,09	21,99	NA	NA	16,65	-	-
Kalimantan Selatan	58,32	20,26	4,51	12,16	4,90	-	-
Kalimantan Timur	43,13	43,73	7,60	2,58	3,34	-	-
Kalimantan Utara	89,80	NA	NA	NA	NA	-	-
Sulawesi Utara	41,13	45,30	1,59	4,05	10,51	-	-
Sulawesi Tengah	54,51	9,89	NA	NA	32,90	-	-
Sulawesi Selatan	42,71	28,37	3,00	1,82	25,38	NA	NA
Sulawesi Tenggara	48,06	18,64	NA	3,15	27,51	-	-
Gorontalo	58,20	25,16	-	NA	13,95	-	-
Sulawesi Barat	46,54	17,23	NA	-	39,47	-	-
Maluku	58,09	20,37	NA	1,58	18,58	-	-
Maluku Utara	63,63	13,88	-	NA	23,98	-	-
Papua Barat	76,32	15,25	-	NA	6,52	-	-
Papua	62,00	22,36	NA	NA	11,32	-	NA
Indonesia	33,39	39,69	7,16	6,31	13,97	0,31	0,39

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.25 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Lama Rawat Inap (Hari), 2023

Provinsi	Lama Rawat Inap			
	1-3 Hari	4-7 Hari	8-14 Hari	>14 Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	64,78	30,13	3,60	1,49
Sumatera Utara	63,55	28,99	6,51	0,95
Sumatera Barat	67,31	26,61	2,12	3,96
Riau	73,44	25,83	NA	NA
Jambi	61,85	31,27	3,99	NA
Sumatera Selatan	74,79	18,47	3,54	NA
Bengkulu	83,58	14,89	NA	NA
Lampung	79,09	17,66	2,95	NA
Kep. Bangka Belitung	84,91	9,77	NA	NA
Kepulauan Riau	78,18	18,54	NA	NA
DKI Jakarta	58,98	35,20	NA	NA
Jawa Barat	65,53	27,31	5,15	2,01
Jawa Tengah	67,98	26,30	3,93	1,79
DI Yogyakarta	62,27	30,60	4,92	NA
Jawa Timur	74,65	21,87	3,28	NA
Banten	72,11	24,86	NA	NA
Bali	70,83	26,97	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	75,68	20,18	3,28	NA
Nusa Tenggara Timur	77,83	17,83	3,96	NA
Kalimantan Barat	75,56	19,95	3,16	NA
Kalimantan Tengah	71,36	23,75	NA	NA
Kalimantan Selatan	76,48	22,83	NA	NA
Kalimantan Timur	66,94	27,51	NA	NA
Kalimantan Utara	64,13	26,14	NA	NA
Sulawesi Utara	51,41	37,82	8,85	NA
Sulawesi Tengah	66,82	27,85	5,32	-
Sulawesi Selatan	68,05	24,89	4,98	2,08
Sulawesi Tenggara	74,51	19,65	4,09	NA
Gorontalo	68,10	31,90	-	-
Sulawesi Barat	68,25	25,91	NA	NA
Maluku	59,03	28,57	6,35	NA
Maluku Utara	61,63	27,92	NA	NA
Papua Barat	83,76	13,57	NA	NA
Papua	63,38	27,71	8,15	NA
Indonesia	69,39	25,25	3,81	1,55

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.26 Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023

Provinsi	Jenis Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap					
	BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Asuransi Perusahaan/Kantor	Tidak Menggunakan Asuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	87,31	8,67	NA	-	1,51	2,22
Sumatera Utara	29,93	34,40	NA	NA	NA	31,62
Sumatera Barat	49,17	26,30	1,62	NA	NA	22,76
Riau	28,79	28,88	3,36	-	NA	34,29
Jambi	26,22	32,23	1,41	NA	NA	37,64
Sumatera Selatan	50,87	20,92	NA	-	3,48	23,24
Bengkulu	51,12	33,47	-	-	3,56	11,86
Lampung	35,62	25,81	3,12	NA	6,75	27,85
Kep. Bangka Belitung	46,72	41,00	-	NA	NA	9,95
Kepulauan Riau	13,46	64,08	-	NA	NA	20,75
DKI Jakarta	41,52	35,37	-	NA	NA	15,11
Jawa Barat	34,78	33,34	NA	NA	3,99	25,58
Jawa Tengah	46,62	24,96	1,55	0,68	2,62	23,90
DI Yogyakarta	51,02	26,74	-	NA	NA	19,45
Jawa Timur	40,42	27,42	1,45	NA	4,27	26,23
Banten	27,18	28,91	NA	NA	8,06	32,24
Bali	38,91	36,86	NA	NA	NA	21,02
Nusa Tenggara Barat	53,62	17,00	2,22	NA	NA	26,88
Nusa Tenggara Timur	70,55	9,61	4,63	-	NA	14,64
Kalimantan Barat	38,52	29,76	NA	NA	NA	27,79
Kalimantan Tengah	29,29	41,24	-	-	NA	22,85
Kalimantan Selatan	35,83	40,55	NA	-	NA	19,76
Kalimantan Timur	22,91	57,80	NA	NA	NA	13,69
Kalimantan Utara	58,74	24,92	-	-	NA	14,26
Sulawesi Utara	55,78	32,72	-	NA	NA	9,94
Sulawesi Tengah	67,22	23,26	NA	-	NA	7,03
Sulawesi Selatan	55,82	33,12	NA	NA	NA	10,18
Sulawesi Tenggara	48,97	32,62	NA	-	-	17,63
Gorontalo	75,87	21,87	-	NA	NA	NA
Sulawesi Barat	56,79	30,79	NA	-	-	11,48
Maluku	37,28	42,10	NA	-	-	16,96
Maluku Utara	42,22	11,97	13,63	NA	NA	26,75
Papua Barat	57,41	12,33	NA	-	8,90	19,13
Papua	44,11	19,47	15,84	NA	NA	20,76
Indonesia	43,43	28,89	1,57	0,97	2,96	22,62

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.27 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok Tembakau Sebulan Terakhir, 2023

Provinsi	Kebiasaan Merokok			Tidak Merokok
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,19	2,53	22,72	77,28
Sumatera Utara	18,38	1,76	20,14	79,86
Sumatera Barat	23,50	2,37	25,87	74,13
Riau	20,19	1,60	21,79	78,21
Jambi	23,05	1,92	24,96	75,04
Sumatera Selatan	24,59	2,42	27,02	72,98
Bengkulu	25,73	1,39	27,12	72,88
Lampung	28,62	1,66	30,28	69,72
Kep. Bangka Belitung	21,57	1,62	23,18	76,82
Kepulauan Riau	20,10	1,94	22,04	77,96
DKI Jakarta	16,24	2,32	18,57	81,43
Jawa Barat	26,10	2,57	28,67	71,33
Jawa Tengah	23,92	2,45	26,37	73,63
DI Yogyakarta	21,53	2,76	24,29	75,71
Jawa Timur	23,80	2,21	26,01	73,99
Banten	23,63	1,97	25,60	74,40
Bali	14,78	1,82	16,60	83,40
Nusa Tenggara Barat	26,17	3,08	29,25	70,75
Nusa Tenggara Timur	18,49	5,38	23,87	76,13
Kalimantan Barat	20,93	1,05	21,99	78,01
Kalimantan Tengah	19,93	2,00	21,93	78,07
Kalimantan Selatan	18,04	1,43	19,48	80,52
Kalimantan Timur	15,32	1,88	17,21	82,79
Kalimantan Utara	18,42	1,58	20,00	80,00
Sulawesi Utara	18,04	4,67	22,70	77,30
Sulawesi Tengah	19,72	2,31	22,03	77,97
Sulawesi Selatan	18,86	1,95	20,82	79,18
Sulawesi Tenggara	17,45	2,26	19,71	80,29
Gorontalo	21,36	3,06	24,42	75,58
Sulawesi Barat	20,61	1,95	22,56	77,44
Maluku	15,97	6,24	22,21	77,79
Maluku Utara	18,99	3,22	22,21	77,79
Papua Barat	16,98	4,41	21,39	78,61
Papua	11,80	4,93	16,73	83,27
Indonesia	22,37	2,38	24,75	75,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.28 Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau menurut Provinsi dan Rata-Rata Jumlah Batang yang Dihisap per Hari, 2023

Provinsi	Rata-rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap	Rata-rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Hari				
		1-3 Batang	4-6 Batang	7-12 Batang	13-24 Batang	25 Batang atau Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	12,42	10,28	18,59	41,02	24,05	6,07
Sumatera Utara	12,56	11,60	15,84	35,60	30,97	5,99
Sumatera Barat	13,68	9,43	12,89	31,56	41,14	4,97
Riau	17,13	5,10	7,85	22,37	55,78	8,90
Jambi	17,46	3,91	5,51	24,20	58,57	7,81
Sumatera Selatan	13,23	7,51	9,82	47,53	29,62	5,51
Bengkulu	14,51	4,08	10,61	42,05	37,57	5,69
Lampung	13,64	4,50	11,58	42,71	37,09	4,12
Kep. Bangka Belitung	15,22	3,00	7,56	28,97	54,46	6,00
Kepulauan Riau	13,92	6,88	12,35	36,91	35,48	8,39
DKI Jakarta	9,09	18,21	27,04	41,10	11,20	2,45
Jawa Barat	10,28	11,21	25,79	48,75	11,14	3,11
Jawa Tengah	10,07	12,61	28,28	44,71	10,72	3,68
DI Yogyakarta	7,88	20,32	37,64	32,83	6,91	2,29
Jawa Timur	10,73	8,88	24,24	51,75	11,52	3,60
Banten	12,54	5,51	15,86	51,30	23,15	4,18
Bali	10,67	11,90	21,57	36,59	28,24	1,70
Nusa Tenggara Barat	10,56	10,57	25,69	43,65	14,74	5,35
Nusa Tenggara Timur	8,00	28,70	29,17	27,64	11,81	2,68
Kalimantan Barat	15,67	5,12	6,65	26,49	54,08	7,66
Kalimantan Tengah	15,43	4,02	6,47	33,87	49,18	6,45
Kalimantan Selatan	15,24	6,21	9,16	29,31	49,86	5,46
Kalimantan Timur	14,80	7,70	9,15	28,97	48,61	5,56
Kalimantan Utara	14,16	7,96	8,16	32,83	45,71	5,34
Sulawesi Utara	11,12	13,98	19,25	34,20	27,65	4,93
Sulawesi Tengah	14,07	14,19	11,75	26,28	40,32	7,46
Sulawesi Selatan	13,48	7,66	14,95	29,49	42,96	4,93
Sulawesi Tenggara	13,37	8,61	13,69	26,98	46,82	3,90
Gorontalo	11,54	13,56	19,62	33,22	28,70	4,89
Sulawesi Barat	16,78	5,67	9,30	23,24	54,03	7,77
Maluku	6,61	39,85	26,95	19,92	10,54	2,75
Maluku Utara	10,08	12,79	25,64	36,73	20,68	4,16
Papua Barat	9,67	22,25	21,10	24,78	27,98	3,89
Papua	8,93	25,05	27,25	23,04	21,22	3,44
Indonesia	11,55	10,66	20,93	42,15	21,98	4,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.29 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok Tembakau Sebelum Sebulan Terakhir, 2023

Provinsi	Kebiasaan Merokok			Tidak Merokok
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	18,88	2,78	21,66	78,34
Sumatera Utara	17,27	1,78	19,04	80,96
Sumatera Barat	22,56	2,62	25,18	74,82
Riau	19,23	1,65	20,88	79,12
Jambi	21,45	2,14	23,59	76,41
Sumatera Selatan	22,56	2,50	25,07	74,93
Bengkulu	23,48	1,54	25,02	74,98
Lampung	26,33	2,18	28,51	71,49
Kep. Bangka Belitung	20,72	1,58	22,31	77,69
Kepulauan Riau	19,08	2,60	21,69	78,31
DKI Jakarta	15,03	2,46	17,49	82,51
Jawa Barat	24,25	2,68	26,93	73,07
Jawa Tengah	22,70	2,84	25,55	74,45
DI Yogyakarta	20,77	3,36	24,13	75,87
Jawa Timur	21,94	2,27	24,20	75,80
Banten	22,18	2,21	24,39	75,61
Bali	14,71	1,66	16,36	83,64
Nusa Tenggara Barat	24,10	3,73	27,83	72,17
Nusa Tenggara Timur	17,43	5,76	23,19	76,81
Kalimantan Barat	19,46	1,47	20,93	79,07
Kalimantan Tengah	19,28	2,17	21,44	78,56
Kalimantan Selatan	17,36	1,75	19,11	80,89
Kalimantan Timur	14,68	2,14	16,82	83,18
Kalimantan Utara	17,47	1,78	19,25	80,75
Sulawesi Utara	15,69	5,08	20,77	79,23
Sulawesi Tengah	18,27	2,63	20,90	79,10
Sulawesi Selatan	17,88	1,91	19,79	80,21
Sulawesi Tenggara	16,38	2,12	18,51	81,49
Gorontalo	20,09	3,92	24,00	76,00
Sulawesi Barat	19,16	2,36	21,52	78,48
Maluku	14,50	6,30	20,80	79,20
Maluku Utara	17,05	3,56	20,61	79,39
Papua Barat	15,19	4,96	20,15	79,85
Papua	10,77	5,19	15,96	84,04
Indonesia	20,90	2,58	23,48	76,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.30 Persentase Pemuda yang Pernah Merokok Tembakau (Dahulu hingga Sebelum Sebulan Terakhir), 2023

Provinsi	Merokok Sebelum dan Sebulan Terakhir	Merokok Sebulan Terakhir Saja	Merokok Sebelum Sebulan Terakhir Saja	Tidak Pernah Merokok	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	20,79	1,93	0,87	76,41	100,00
Sumatera Utara	18,73	1,41	0,31	79,55	100,00
Sumatera Barat	24,47	1,40	0,72	73,41	100,00
Riau	20,53	1,26	0,35	77,86	100,00
Jambi	23,27	1,69	0,32	74,72	100,00
Sumatera Selatan	24,51	2,51	0,56	72,42	100,00
Bengkulu	24,67	2,45	0,35	72,53	100,00
Lampung	27,90	2,37	0,61	69,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	22,11	1,08	0,20	76,62	100,00
Kepulauan Riau	21,04	1,00	0,64	77,31	100,00
DKI Jakarta	16,78	1,78	0,71	80,73	100,00
Jawa Barat	26,25	2,42	0,68	70,65	100,00
Jawa Tengah	24,98	1,39	0,57	73,06	100,00
DI Yogyakarta	23,35	0,94	0,78	74,93	100,00
Jawa Timur	23,81	2,20	0,39	73,60	100,00
Banten	23,70	1,90	0,69	73,71	100,00
Bali	15,80	0,80	0,57	82,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,26	1,98	0,57	70,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,59	1,29	0,60	75,52	100,00
Kalimantan Barat	20,36	1,63	0,57	77,45	100,00
Kalimantan Tengah	20,99	0,94	0,45	77,62	100,00
Kalimantan Selatan	18,45	1,02	0,65	79,87	100,00
Kalimantan Timur	16,26	0,94	0,56	82,24	100,00
Kalimantan Utara	18,65	1,35	NA	79,40	100,00
Sulawesi Utara	20,08	2,63	0,70	76,60	100,00
Sulawesi Tengah	20,47	1,56	0,43	77,53	100,00
Sulawesi Selatan	19,45	1,37	0,34	78,84	100,00
Sulawesi Tenggara	18,22	1,49	0,29	80,00	100,00
Gorontalo	23,23	1,19	0,77	74,80	100,00
Sulawesi Barat	21,03	1,54	0,49	76,94	100,00
Maluku	20,12	2,09	0,68	77,11	100,00
Maluku Utara	20,08	2,13	0,52	77,27	100,00
Papua Barat	19,75	1,64	0,40	78,21	100,00
Papua	15,29	1,43	0,67	82,60	100,00
Indonesia	22,93	1,82	0,56	74,69	100,00

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.31 Sampling Error Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Selang		Relative Standard	Estimasi Error	Selang		Relative Standard	Estimasi Error	Selang		Relative Standard	
	Bawah	Atas			Bawah	Atas			Bawah	Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	7,73	5,94	9,52	11,84	8,21	7,05	9,37	7,23	8,04	7,06	9,02	6,24
Sumatera Utara	4,40	3,52	5,28	10,21	5,65	4,50	6,81	10,41	4,91	4,21	5,62	7,30
Sumatera Barat	6,75	5,28	8,21	11,07	7,76	6,63	8,88	7,41	7,23	6,29	8,17	6,63
Riau	7,26	5,25	9,27	14,14	4,00	2,98	5,02	12,99	5,37	4,34	6,41	9,86
Jambi	4,79	3,06	6,52	18,41	7,02	5,45	8,58	11,36	6,31	5,11	7,51	9,71
Sumatera Selatan	3,27	2,13	4,40	17,67	4,80	3,82	5,77	10,36	4,19	3,44	4,93	9,07
Bengkulu	5,17	3,31	7,04	18,43	7,28	5,57	8,99	11,98	6,52	5,23	7,80	10,06
Lampung	5,51	3,49	7,53	18,68	6,47	5,31	7,63	9,15	6,14	5,11	7,17	8,56
Kep. Bangka Belitung	5,30	3,54	7,06	16,95	6,01	3,95	8,07	17,51	5,61	4,27	6,95	12,19
Kepulauan Riau	6,67	4,53	8,82	16,41	3,20	0,92	5,49	36,41	6,36	4,40	8,31	15,71
DKI Jakarta	4,74	3,37	6,12	14,80	-	-	-	-	NA	4,74	3,37	6,12
Jawa Barat	6,04	5,34	6,73	5,84	7,64	6,44	8,84	7,99	6,34	5,73	6,94	4,87
Jawa Tengah	6,79	5,97	7,61	6,13	7,85	6,91	8,80	6,12	7,28	6,66	7,90	4,33
DI Yogyakarta	5,83	4,43	7,23	12,26	8,83	6,25	11,41	14,91	6,39	5,15	7,62	9,89
Jawa Timur	6,11	5,30	6,92	6,75	6,41	5,48	7,34	7,42	6,24	5,62	6,85	5,00
Banten	4,94	3,75	6,12	12,28	7,13	5,08	9,18	14,69	5,40	4,37	6,43	9,71
Bali	5,49	4,13	6,84	12,62	7,85	5,83	9,87	13,13	6,08	4,94	7,22	9,54
Nusa Tenggara Barat	12,89	10,45	15,33	9,66	13,83	11,38	16,29	9,05	13,33	11,60	15,07	6,63
Nusa Tenggara Timur	6,15	4,21	8,09	16,10	10,34	8,92	11,75	6,99	9,09	7,94	10,25	6,48
Kalimantan Barat	6,40	4,67	8,12	13,75	6,52	5,26	7,79	9,92	6,48	5,45	7,50	8,05
Kalimantan Tengah	4,01	2,73	5,29	16,31	6,21	4,37	8,05	15,11	5,26	4,07	6,45	11,55
Kalimantan Selatan	4,22	2,61	5,83	19,48	5,54	4,21	6,86	12,18	4,87	3,82	5,92	10,96
Kalimantan Timur	5,50	3,72	7,29	16,57	5,79	2,22	9,36	31,46	5,59	3,95	7,23	15,01
Kalimantan Utara	5,87	3,22	8,52	23,05	7,48	4,20	10,76	22,36	6,40	4,32	8,49	16,62
Sulawesi Utara	6,23	4,67	7,79	12,77	6,93	5,22	8,63	12,55	6,53	5,38	7,68	9,01
Sulawesi Tengah	4,43	2,63	6,22	20,70	5,71	4,39	7,03	11,79	5,26	4,19	6,32	10,32
Sulawesi Selatan	5,02	3,62	6,41	14,16	5,94	4,99	6,90	8,19	5,47	4,62	6,32	7,91
Sulawesi Tenggara	4,86	3,30	6,42	16,37	6,00	4,98	7,02	8,70	5,53	4,64	6,41	8,14
Gorontalo	11,12	5,59	16,66	25,40	8,28	6,01	10,55	13,98	9,55	6,75	12,36	14,96
Sulawesi Barat	4,65	2,29	7,01	25,94	6,62	4,91	8,34	13,21	6,21	4,77	7,65	11,85
Maluku	6,82	3,62	10,02	23,93	5,33	3,49	7,18	17,64	6,02	4,23	7,81	15,14
Maluku Utara	2,55	0,40	4,70	42,99	5,28	3,90	6,66	13,35	4,43	3,27	5,60	13,40
Papua Barat	4,05	1,99	6,11	25,94	3,25	2,38	4,12	13,67	3,59	2,58	4,60	14,39
Papua	5,11	3,24	6,99	18,72	2,32	1,80	2,84	11,44	3,11	2,46	3,77	10,75
Indonesia	5,87	5,58	6,15	2,49	6,79	6,51	7,07	2,11	6,24	6,03	6,44	1,68

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.32.1 Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Jumlah			
	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard
		Bawah	Atas			Bawah	Atas			Bawah	Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	30,86	22,70	39,03	13,49	38,94	33,44	44,44	7,21	36,24	31,71	40,77	6,38
Sumatera Utara	25,98	20,18	31,78	11,40	21,08	17,07	25,09	9,71	23,52	19,99	27,05	7,66
Sumatera Barat	34,22	28,05	40,40	9,21	38,66	33,05	44,27	7,40	36,33	32,11	40,55	5,93
Riau	31,17	23,91	38,44	11,89	15,33	10,05	20,60	17,57	22,43	17,89	26,97	10,32
Jambi	25,04	14,99	35,10	20,49	22,82	17,55	28,10	11,79	23,50	18,72	28,28	10,37
Sumatera Selatan	17,99	12,65	23,32	15,13	19,74	15,12	24,36	11,95	18,94	15,45	22,43	9,39
Bengkulu	23,11	14,32	31,91	19,41	22,22	16,37	28,08	13,45	22,54	17,64	27,45	11,10
Lampung	28,68	20,79	36,58	14,04	22,57	18,39	26,76	9,45	24,33	20,54	28,12	7,95
Kep. Bangka Belitung	23,28	15,99	30,57	15,97	27,41	16,59	38,23	20,14	24,97	18,84	31,10	12,53
Kepulauan Riau	23,32	13,85	32,80	20,73	NA	NA	NA	56,07	23,55	14,37	32,72	19,88
DKI Jakarta	33,03	26,31	39,76	10,39	-	-	-	-	NA	33,03	26,31	39,76
Jawa Barat	31,96	28,34	35,58	5,78	23,47	19,54	27,40	8,55	30,03	27,14	32,93	4,92
Jawa Tengah	28,30	25,37	31,23	5,27	28,82	25,50	32,14	5,88	28,54	26,34	30,73	3,93
DI Yogyakarta	30,20	24,37	36,02	9,84	38,81	28,85	48,77	13,09	31,82	26,72	36,93	8,19
Jawa Timur	24,40	21,07	27,74	6,96	25,36	22,01	28,70	6,74	24,81	22,42	27,20	4,92
Banten	22,85	16,27	29,44	14,70	16,76	10,48	23,04	19,13	21,30	16,20	26,39	12,20
Bali	31,52	22,24	40,80	15,02	55,47	45,89	65,06	8,81	37,76	29,86	45,66	10,67
Nusa Tenggara Barat	28,45	22,87	34,02	10,00	33,66	27,35	39,97	9,56	30,85	26,68	35,02	6,89
Nusa Tenggara Timur	15,45	10,08	20,81	17,72	25,33	21,53	29,12	7,64	22,44	19,26	25,62	7,23
Kalimantan Barat	17,91	11,35	24,48	18,70	15,07	11,46	18,69	12,23	16,12	12,79	19,46	10,54
Kalimantan Tengah	12,05	6,03	18,08	25,49	14,48	9,27	19,70	18,36	13,33	9,39	17,27	15,08
Kalimantan Selatan	13,82	8,35	19,28	20,16	13,89	10,02	17,76	14,22	13,86	10,58	17,13	12,05
Kalimantan Timur	25,71	18,29	33,14	14,73	16,21	8,64	23,78	23,81	23,04	17,07	29,01	13,21
Kalimantan Utara	17,09	9,24	24,95	23,44	21,12	11,05	31,19	24,32	18,66	12,53	24,80	16,77
Sulawesi Utara	35,06	26,44	43,68	12,54	32,91	25,81	40,00	11,00	34,18	28,31	40,05	8,76
Sulawesi Tengah	11,29	4,81	17,77	29,29	18,18	12,95	23,40	14,68	15,55	11,30	19,80	13,95
Sulawesi Selatan	24,18	18,66	29,70	11,65	21,65	17,81	25,50	9,06	22,80	19,54	26,06	7,30
Sulawesi Tenggara	16,61	9,16	24,05	22,87	15,96	12,09	19,84	12,39	16,25	12,33	20,16	12,31
Gorontalo	20,02	8,31	31,74	29,85	21,63	15,11	28,15	15,37	20,78	13,89	27,67	16,92
Sulawesi Barat	30,63	20,10	41,15	17,54	21,29	14,77	27,81	15,63	23,30	17,68	28,91	12,29
Maluku	15,35	8,06	22,64	24,22	23,34	15,21	31,47	17,77	18,97	13,44	24,51	14,88
Maluku Utara	24,32	5,61	43,02	39,25	14,88	9,63	20,12	17,98	17,11	10,90	23,33	18,54
Papua Barat	16,68	3,42	29,93	40,56	42,27	34,65	49,89	9,20	29,73	21,06	38,41	14,89
Papua	28,12	17,97	38,28	18,43	28,49	22,33	34,66	11,04	28,33	22,65	34,00	10,22
Indonesia	27,20	25,91	28,50	2,44	24,74	23,68	25,80	2,18	26,17	25,30	27,05	1,70

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.32.2 Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Rawat Jalan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Jumlah			
	Selang		Relative		Selang		Relative		Selang		Relative	
	Estimasi	Batas Bawah	Batas Atas	Standard Error	Estimasi	Batas Bawah	Batas Atas	Standard Error	Estimasi	Batas Bawah	Batas Atas	Standard Error
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	31,22	25,67	36,78	9,08	40,29	34,90	45,67	6,82	36,24	31,71	40,77	6,38
Sumatera Utara	23,46	18,81	28,11	10,11	23,58	19,34	27,81	9,16	23,52	19,99	27,05	7,66
Sumatera Barat	33,44	27,96	38,93	8,36	38,61	33,65	43,58	6,56	36,33	32,11	40,55	5,93
Riau	18,24	12,92	23,55	14,87	25,85	20,43	31,26	10,69	22,43	17,89	26,97	10,32
Jambi	20,59	15,00	26,18	13,85	25,95	19,71	32,19	12,27	23,50	18,72	28,28	10,37
Sumatera Selatan	18,69	13,65	23,73	13,75	19,16	15,05	23,26	10,94	18,94	15,45	22,43	9,39
Bengkulu	20,77	14,46	27,08	15,50	23,85	18,49	29,21	11,46	22,54	17,64	27,45	11,10
Lampung	21,26	16,52	25,99	11,36	27,10	22,39	31,80	8,86	24,33	20,54	28,12	7,95
Kep. Bangka Belitung	22,37	14,52	30,22	17,90	27,08	19,99	34,16	13,35	24,97	18,84	31,10	12,53
Kepulauan Riau	17,33	7,16	27,51	29,95	28,05	16,98	39,12	20,14	23,55	14,37	32,72	19,88
DKI Jakarta	33,10	24,28	41,93	13,60	32,98	24,90	41,06	12,50	33,03	26,31	39,76	10,39
Jawa Barat	28,15	24,46	31,85	6,70	31,72	28,29	35,15	5,51	30,03	27,14	32,93	4,92
Jawa Tengah	25,51	22,60	28,42	5,83	30,87	28,29	33,44	4,26	28,54	26,34	30,73	3,93
DI Yogyakarta	31,50	23,70	39,29	12,63	32,07	25,66	38,47	10,19	31,82	26,72	36,93	8,19
Jawa Timur	21,97	19,04	24,89	6,79	27,20	24,31	30,09	5,42	24,81	22,42	27,20	4,92
Banten	17,55	12,11	22,99	15,81	24,70	17,97	31,43	13,90	21,30	16,20	26,39	12,20
Bali	37,13	28,70	45,55	11,58	38,36	29,12	47,60	12,29	37,76	29,86	45,66	10,67
Nusa Tenggara Barat	29,98	24,12	35,83	9,97	31,59	26,42	36,76	8,35	30,85	26,68	35,02	6,89
Nusa Tenggara Timur	18,57	14,99	22,14	9,83	25,85	22,09	29,61	7,42	22,44	19,26	25,62	7,23
Kalimantan Barat	11,92	8,60	15,24	14,21	19,58	15,36	23,79	10,99	16,12	12,79	19,46	10,54
Kalimantan Tengah	11,37	6,56	16,19	21,61	14,86	9,60	20,13	18,07	13,33	9,39	17,27	15,08
Kalimantan Selatan	11,62	7,98	15,25	15,97	15,91	11,50	20,33	14,15	13,86	10,58	17,13	12,05
Kalimantan Timur	20,54	12,52	28,56	19,91	25,25	18,92	31,58	12,79	23,04	17,07	29,01	13,21
Kalimantan Utara	14,58	7,48	21,69	24,85	22,63	14,27	30,99	18,85	18,66	12,53	24,80	16,77
Sulawesi Utara	33,92	27,01	40,82	10,38	34,40	27,44	41,36	10,32	34,18	28,31	40,05	8,76
Sulawesi Tengah	15,93	9,90	21,97	19,32	15,22	10,67	19,77	15,24	15,55	11,30	19,80	13,95
Sulawesi Selatan	20,97	16,77	25,17	10,21	24,42	20,48	28,35	8,22	22,80	19,54	26,06	7,30
Sulawesi Tenggara	12,82	8,54	17,11	17,05	19,02	13,38	24,66	15,12	16,25	12,33	20,16	12,31
Gorontalo	19,45	10,69	28,21	22,97	21,92	15,12	28,71	15,81	20,78	13,89	27,67	16,92
Sulawesi Barat	21,50	13,79	29,21	18,29	24,67	18,32	31,03	13,14	23,30	17,68	28,91	12,29
Maluku	11,86	5,90	17,82	25,64	23,80	15,93	31,66	16,86	18,97	13,44	24,51	14,88
Maluku Utara	18,86	9,98	27,74	24,02	15,83	9,41	22,25	20,69	17,11	10,90	23,33	18,54
Papua Barat	28,18	17,59	38,77	19,17	30,93	22,00	39,86	14,73	29,73	21,06	38,41	14,89
Papua	27,30	20,08	34,53	13,50	29,26	22,65	35,87	11,52	28,33	22,65	34,00	10,22
Indonesia	23,82	22,71	24,93	2,38	28,17	27,13	29,22	1,90	26,17	25,30	27,05	1,70

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.33 Sampling Error Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2023

Provinsi	RS Pemerintah					RS Swasta				
	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	10,98	7,43	14,52	16,50	3,11	0,79	5,43	38,13		
Sumatera Utara	6,49	2,62	10,36	30,43	3,95	1,78	6,12	27,99		
Sumatera Barat	6,43	4,13	8,74	18,27	5,92	3,25	8,59	23,02		
Riau	4,72	1,84	7,60	31,11	11,01	3,36	18,65	35,43		
Jambi	9,24	4,13	14,35	28,21	4,64	0,12	9,16	49,70		
Sumatera Selatan	6,77	2,70	10,84	30,63	NA	NA	NA	59,71		
Bengkulu	5,55	1,44	9,67	37,77	4,37	0,61	8,13	43,89		
Lampung	4,17	1,36	6,98	34,36	6,46	3,18	9,74	25,90		
Kep. Bangka Belitung	9,76	3,52	16,00	32,59	10,72	4,58	16,86	29,21		
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	59,40	13,53	1,80	25,26	44,22		
DKI Jakarta	10,83	4,94	16,71	27,72	11,95	5,11	18,79	29,19		
Jawa Barat	5,56	3,45	7,68	19,41	11,02	7,64	14,40	15,64		
Jawa Tengah	7,64	5,72	9,56	12,83	6,38	4,69	8,08	13,56		
DI Yogyakarta	8,40	3,17	13,64	31,79	18,49	11,18	25,80	20,16		
Jawa Timur	5,42	3,48	7,36	18,25	7,42	5,01	9,84	16,62		
Banten	4,82	0,93	8,70	41,15	6,07	2,72	9,42	28,14		
Bali	6,09	2,61	9,56	29,13	5,77	2,55	9,00	28,45		
Nusa Tenggara Barat	5,51	2,38	8,64	28,97	1,14	0,05	2,23	48,66		
Nusa Tenggara Timur	4,76	2,05	7,47	29,00	2,84	1,14	4,54	30,47		
Kalimantan Barat	6,58	2,80	10,35	29,27	4,68	1,23	8,14	37,63		
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	55,40	-	-	-	NA		
Kalimantan Selatan	8,80	3,49	14,12	30,80	3,83	0,40	7,25	45,68		
Kalimantan Timur	6,89	1,75	12,03	38,04	13,78	6,90	20,67	25,49		
Kalimantan Utara	28,30	15,28	41,31	23,46	0,04	0,03	0,05	12,58		
Sulawesi Utara	14,27	7,34	21,21	24,78	5,61	1,06	10,15	41,33		
Sulawesi Tengah	11,83	5,75	17,91	26,23	NA	NA	NA	54,05		
Sulawesi Selatan	13,66	8,84	18,48	17,99	2,97	0,37	5,56	44,57		
Sulawesi Tenggara	8,84	4,40	13,28	25,65	NA	NA	NA	73,51		
Gorontalo	2,28	0,16	4,40	47,39	NA	NA	NA	101,58		
Sulawesi Barat	8,72	2,03	15,42	39,16	-	-	-	NA		
Maluku	11,02	2,29	19,76	40,43	NA	NA	NA	101,04		
Maluku Utara	14,55	4,31	24,79	35,89	NA	NA	NA	104,62		
Papua Barat	11,00	4,65	17,34	29,43	3,27	0,08	6,46	49,69		
Papua	11,20	4,75	17,64	29,35	NA	NA	NA	91,07		
Indonesia	6,92	6,16	7,67	5,58	7,23	6,29	8,18	6,65		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.33

Provinsi	Praktik Dokter/Bidan				Klinik/Dokter Bersama			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	33,85	27,24	40,46	9,96	13,97	9,59	18,35	16,00
Sumatera Utara	57,91	50,51	65,30	6,51	9,37	5,55	13,18	20,77
Sumatera Barat	42,87	37,05	48,70	6,93	12,96	8,52	17,41	17,48
Riau	28,33	18,32	38,35	18,03	35,66	26,96	44,36	12,45
Jambi	44,95	34,09	55,82	12,32	15,27	4,66	25,89	35,46
Sumatera Selatan	49,79	39,80	59,77	10,23	18,94	8,40	29,47	28,37
Bengkulu	54,30	44,01	64,59	9,66	4,85	1,46	8,24	35,62
Lampung	61,76	53,67	69,85	6,68	9,02	4,75	13,30	24,15
Kep. Bangka Belitung	42,50	31,06	53,95	13,73	9,67	3,70	15,64	31,49
Kepulauan Riau	10,14	0,70	19,58	47,51	35,89	14,58	57,20	30,29
DKI Jakarta	NA	NA	NA	56,08	40,93	30,51	51,34	12,98
Jawa Barat	35,00	30,33	39,68	6,81	26,74	22,30	31,17	8,47
Jawa Tengah	39,90	35,95	43,85	5,05	16,52	13,41	19,63	9,60
DI Yogyakarta	24,86	17,12	32,60	15,89	18,93	11,98	25,88	18,73
Jawa Timur	47,56	42,78	52,34	5,13	15,09	11,45	18,73	12,29
Banten	20,59	13,00	28,18	18,81	36,13	27,20	45,05	12,60
Bali	55,15	46,65	63,66	7,87	12,52	7,47	17,57	20,58
Nusa Tenggara Barat	40,79	32,84	48,73	9,93	11,86	7,25	16,47	19,84
Nusa Tenggara Timur	8,61	4,55	12,66	24,04	4,15	1,88	6,43	27,96
Kalimantan Barat	27,99	19,39	36,59	15,68	10,56	5,09	16,02	26,41
Kalimantan Tengah	33,05	20,67	45,42	19,10	15,15	1,32	28,97	46,58
Kalimantan Selatan	18,60	11,19	26,01	20,32	10,73	3,81	17,66	32,92
Kalimantan Timur	13,18	6,26	20,11	26,81	32,85	16,00	49,70	26,17
Kalimantan Utara	9,77	1,32	18,23	44,14	NA	NA	NA	50,55
Sulawesi Utara	28,83	20,96	36,70	13,93	16,11	8,08	24,14	25,44
Sulawesi Tengah	15,03	2,71	27,36	41,82	13,43	3,40	23,45	38,08
Sulawesi Selatan	18,84	13,17	24,50	15,34	11,66	6,47	16,84	22,68
Sulawesi Tenggara	11,99	5,41	18,57	28,00	7,95	5,02	10,88	18,80
Gorontalo	40,92	24,64	57,21	20,30	6,89	2,84	10,94	29,99
Sulawesi Barat	21,93	9,33	34,53	29,32	NA	NA	NA	70,82
Maluku	19,97	7,88	32,05	30,88	NA	NA	NA	81,76
Maluku Utara	NA	NA	NA	54,28	NA	NA	NA	101,43
Papua Barat	5,08	0,42	9,73	46,82	4,93	0,51	9,34	45,68
Papua	5,12	1,49	8,74	36,15	8,13	2,89	13,37	32,86
Indonesia	36,06	34,46	37,66	2,26	18,94	17,51	20,37	3,86

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.33

Provinsi	Puskesmas/Puskesmas Pembantu				UKBM			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	40,59	34,24	46,93	7,97	4,70	2,13	7,27	27,91
Sumatera Utara	23,44	15,88	31,00	16,45	NA	NA	NA	63,84
Sumatera Barat	29,76	24,30	35,21	9,35	6,03	3,00	9,05	25,62
Riau	17,12	10,72	23,51	19,06	NA	NA	NA	58,24
Jambi	27,54	17,86	37,22	17,92	2,43	0,06	4,81	49,80
Sumatera Selatan	21,59	15,56	27,63	14,26	2,66	0,18	5,14	47,58
Bengkulu	29,07	18,55	39,59	18,46	NA	NA	NA	100,64
Lampung	18,93	12,77	25,08	16,59	NA	NA	NA	61,63
Kep. Bangka Belitung	27,50	17,61	37,40	18,35	NA	NA	NA	82,24
Kepulauan Riau	27,47	5,24	49,70	41,29	NA	NA	NA	72,33
DKI Jakarta	33,74	23,23	44,24	15,88	NA	NA	NA	100,60
Jawa Barat	22,68	18,57	26,80	9,25	0,98	0,10	1,87	45,97
Jawa Tengah	27,78	24,22	31,33	6,53	2,00	0,85	3,15	29,25
DI Yogyakarta	33,27	24,27	42,27	13,80	NA	NA	NA	70,44
Jawa Timur	24,20	19,42	28,99	10,09	3,70	1,56	5,83	29,42
Banten	33,21	23,13	43,29	15,48	NA	NA	NA	100,28
Bali	22,23	13,66	30,81	19,68	NA	NA	NA	99,77
Nusa Tenggara Barat	34,00	26,79	41,21	10,82	5,39	2,08	8,71	31,35
Nusa Tenggara Timur	70,51	64,42	76,59	4,40	12,97	8,35	17,60	18,19
Kalimantan Barat	48,04	39,75	56,34	8,81	NA	NA	NA	58,15
Kalimantan Tengah	31,38	19,12	43,65	19,94	10,48	3,16	17,81	35,65
Kalimantan Selatan	49,72	38,66	60,79	11,35	6,61	1,02	12,20	43,16
Kalimantan Timur	35,33	23,62	47,04	16,90	NA	NA	NA	78,87
Kalimantan Utara	51,39	33,61	69,17	17,65	-	-	-	NA
Sulawesi Utara	34,62	26,25	42,99	12,34	3,18	0,11	6,24	49,30
Sulawesi Tengah	42,29	31,10	53,47	13,49	11,85	4,56	19,15	31,40
Sulawesi Selatan	51,49	44,18	58,80	7,24	2,25	0,35	4,16	43,13
Sulawesi Tenggara	65,62	55,63	75,62	7,77	NA	NA	NA	74,48
Gorontalo	50,20	34,22	66,17	16,23	NA	NA	NA	101,00
Sulawesi Barat	66,28	52,79	79,77	10,38	-	-	-	NA
Maluku	66,33	52,67	79,99	10,50	NA	NA	NA	52,16
Maluku Utara	61,24	40,75	81,74	17,07	7,67	1,00	14,33	44,33
Papua Barat	74,35	63,92	84,78	7,15	NA	NA	NA	91,99
Papua	63,80	50,39	77,21	10,72	NA	NA	NA	56,42
Indonesia	30,04	28,50	31,58	2,61	2,63	2,15	3,11	9,35

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.33

Provinsi	Praktik Pengobatan Tradisional					Lainnya			
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	
Aceh	2,14	0,95	3,33	28,44	NA	NA	NA	53,07	
Sumatera Utara	1,47	0,44	2,49	35,59	NA	NA	NA	51,60	
Sumatera Barat	2,05	0,29	3,81	43,77	NA	NA	NA	99,80	
Riau	NA	NA	NA	59,24	NA	NA	NA	90,53	
Jambi	NA	NA	NA	70,14	NA	NA	NA	100,47	
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	80,86	NA	NA	NA	100,74	
Bengkulu	3,23	0,51	5,95	42,92	NA	NA	NA	79,43	
Lampung	NA	NA	NA	55,56	NA	NA	NA	88,73	
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	71,02	NA	NA	NA	88,42	
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	89,36	NA	NA	NA	101,24	
DKI Jakarta	NA	NA	NA	99,21	NA	NA	NA	100,30	
Jawa Barat	0,90	0,30	1,49	33,82	1,37	0,45	2,29	34,25	
Jawa Tengah	1,22	0,29	2,14	38,83	1,55	0,59	2,51	31,50	
DI Yogyakarta	-	-	-	NA	NA	NA	NA	73,00	
Jawa Timur	2,33	0,99	3,66	29,32	1,52	0,36	2,68	39,04	
Banten	NA	NA	NA	76,77	NA	NA	NA	100,82	
Bali	NA	NA	NA	100,45	-	-	-	NA	
Nusa Tenggara Barat	2,82	0,77	4,88	37,08	5,85	1,83	9,88	35,06	
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	NA	54,39	NA	NA	NA	56,99	
Kalimantan Barat	NA	NA	NA	75,73	NA	NA	NA	88,31	
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	102,04	NA	NA	NA	85,16	
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	100,65	NA	NA	NA	67,59	
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	80,22	NA	NA	NA	55,06	
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	101,37	NA	NA	NA	100,34	
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	63,32	-	-	-	NA	
Sulawesi Tengah	NA	NA	NA	77,98	NA	NA	NA	100,32	
Sulawesi Selatan	1,26	0,20	2,32	42,96	NA	NA	NA	63,73	
Sulawesi Tenggara	NA	NA	NA	99,90	NA	NA	NA	94,76	
Gorontalo	NA	NA	NA	101,84	NA	NA	NA	94,03	
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	60,31	NA	NA	NA	100,77	
Maluku	NA	NA	NA	80,27	NA	NA	NA	100,30	
Maluku Utara	NA	NA	NA	75,18	NA	NA	NA	101,34	
Papua Barat	NA	NA	NA	82,78	NA	NA	NA	100,67	
Papua	NA	NA	NA	75,19	NA	NA	NA	69,88	
Indonesia	1,42	1,07	1,78	12,58	1,39	1,02	1,77	13,72	

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.34 Sampling Error Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023

Provinsi	BPJS PBI				BPJS Non PBI			
	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	58,90	52,03	65,78	5,95	3,37	1,64	5,09	26,12
Sumatera Utara	20,94	13,73	28,15	17,56	8,97	5,42	12,52	20,19
Sumatera Barat	33,63	27,40	39,86	9,45	14,07	9,21	18,93	17,62
Riau	24,60	14,06	35,14	21,85	26,30	18,68	33,92	14,79
Jambi	14,92	7,90	21,93	23,99	24,97	15,92	34,01	18,48
Sumatera Selatan	29,23	17,23	41,23	20,93	11,89	5,45	18,32	27,61
Bengkulu	26,00	17,41	34,58	16,85	11,31	5,94	16,69	24,25
Lampung	22,85	16,28	29,42	14,67	10,10	5,29	14,90	24,30
Kep. Bangka Belitung	22,00	13,36	30,65	20,05	23,12	14,79	31,46	18,38
Kepulauan Riau	41,14	18,24	64,04	28,40	28,34	10,61	46,08	31,91
DKI Jakarta	44,90	33,97	55,82	12,41	28,19	17,45	38,93	19,44
Jawa Barat	23,20	19,15	27,25	8,91	17,00	13,26	20,74	11,22
Jawa Tengah	26,78	23,38	30,19	6,49	17,24	14,31	20,17	8,66
DI Yogyakarta	35,41	25,16	45,67	14,77	12,27	6,10	18,44	25,65
Jawa Timur	19,33	15,76	22,91	9,44	11,40	8,32	14,47	13,76
Banten	25,60	15,61	35,60	19,92	19,75	12,31	27,19	19,21
Bali	18,92	12,78	25,05	16,55	17,22	10,89	23,54	18,73
Nusa Tenggara Barat	25,26	18,96	31,56	12,71	4,64	1,92	7,36	29,89
Nusa Tenggara Timur	69,34	64,10	74,58	3,85	11,01	6,70	15,31	19,95
Kalimantan Barat	34,15	26,54	41,75	11,36	16,92	9,84	23,99	21,34
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	57,15	29,26	13,76	44,75	27,02
Kalimantan Selatan	37,77	25,29	50,24	16,85	22,65	12,24	33,07	23,45
Kalimantan Timur	21,87	12,13	31,61	22,72	55,07	41,75	68,40	12,34
Kalimantan Utara	50,80	33,86	67,74	17,01	13,58	1,94	25,22	43,74
Sulawesi Utara	38,13	30,02	46,25	10,85	21,43	15,39	27,46	14,36
Sulawesi Tengah	58,38	44,70	72,06	11,95	11,11	4,41	17,81	30,76
Sulawesi Selatan	53,85	47,23	60,46	6,27	17,08	11,62	22,53	16,29
Sulawesi Tenggara	63,68	52,56	74,81	8,91	14,87	6,31	23,43	29,38
Gorontalo	42,02	29,36	54,69	15,37	8,73	1,61	15,85	41,60
Sulawesi Barat	56,69	44,13	69,24	11,30	16,30	8,07	24,52	25,75
Maluku	34,12	23,09	45,14	16,49	21,73	8,54	34,93	30,98
Maluku Utara	50,61	39,98	61,25	10,72	2,87	0,07	5,67	49,77
Papua Barat	54,85	43,76	65,94	10,31	11,11	1,10	21,12	45,97
Papua	34,59	24,59	44,60	14,75	3,85	0,89	6,80	39,18
Indonesia	29,20	27,69	30,70	2,63	15,67	14,42	16,92	4,07

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.34

Provinsi	Jamkesda				Asuransi Swasta			
	Estimasi	Selang		Relative	Estimasi	Selang		Relative
		Batas Bawah	Batas Atas	Standard Error		Batas Bawah	Batas Atas	Standard Error
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	NA	NA	NA	54,42	-	-	-	NA
Sumatera Utara	NA	NA	NA	100,16	-	-	-	NA
Sumatera Barat	1,23	0,25	2,21	40,59	-	-	-	NA
Riau	NA	NA	NA	53,35	-	-	-	NA
Jambi	NA	NA	NA	71,48	NA	NA	NA	100,29
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	54,41	-	-	-	NA
Bengkulu	-	-	-	NA	-	-	-	NA
Lampung	NA	NA	NA	53,00	NA	NA	NA	100,30
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	100,70	-	-	-	NA
Kepulauan Riau	-	-	-	NA	-	-	-	NA
DKI Jakarta	-	-	-	NA	NA	NA	NA	100,27
Jawa Barat	0,38	0,03	0,73	47,28	NA	NA	NA	60,30
Jawa Tengah	1,46	0,35	2,57	38,70	-	-	-	NA
DI Yogyakarta	-	-	-	NA	-	-	-	NA
Jawa Timur	2,56	0,96	4,15	31,77	NA	NA	NA	76,82
Banten	NA	NA	NA	51,30	NA	NA	NA	66,51
Bali	NA	NA	NA	90,62	-	-	-	NA
Nusa Tenggara Barat	2,58	1,07	4,09	29,90	-	-	-	NA
Nusa Tenggara Timur	2,28	0,88	3,68	31,36	-	-	-	NA
Kalimantan Barat	2,73	0,23	5,23	46,78	-	-	-	NA
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	100,05	-	-	-	NA
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	101,92	-	-	-	NA
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	102,48	NA	NA	NA	66,76
Kalimantan Utara	-	-	-	NA	-	-	-	NA
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	100,42	-	-	-	NA
Sulawesi Tengah	NA	NA	NA	100,48	NA	NA	NA	99,83
Sulawesi Selatan	NA	NA	NA	72,75	-	-	-	NA
Sulawesi Tenggara	NA	NA	NA	61,22	-	-	-	NA
Gorontalo	-	-	-	NA	-	-	-	NA
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	58,17	-	-	-	NA
Maluku	5,33	2,72	7,94	24,97	-	-	-	NA
Maluku Utara	8,49	2,24	14,74	37,53	-	-	-	NA
Papua Barat	8,86	1,27	16,44	43,68	-	-	-	NA
Papua	33,43	22,94	43,92	16,00	-	-	-	NA
Indonesia	1,56	1,21	1,90	11,29	0,30	0,09	0,52	36,09

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.34

Provinsi	Asuransi Perusahaan/Kantor					Tidak Menggunakan				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		Estimasi	Selang		Relative Standard Error	
		Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)	(24)	(25)	
Aceh	NA	NA	NA	62,37		37,18	29,98	44,39	9,88	
Sumatera Utara	NA	NA	NA	51,26		66,64	59,71	73,56	5,30	
Sumatera Barat	NA	NA	NA	55,86		50,30	43,78	56,81	6,61	
Riau	2,19	0,39	3,99	41,90		45,83	35,04	56,62	12,01	
Jambi	NA	NA	NA	99,75		58,75	48,11	69,38	9,23	
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	71,99		53,96	44,31	63,60	9,12	
Bengkulu	NA	NA	NA	100,12		61,77	53,71	69,84	6,66	
Lampung	-	-	-	NA		64,15	55,99	72,30	6,49	
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	99,25		53,54	42,45	64,63	10,57	
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	91,98		26,09	11,48	40,70	28,56	
DKI Jakarta	NA	NA	NA	75,05		24,60	15,37	33,83	19,15	
Jawa Barat	1,65	0,57	2,73	33,40		57,13	52,29	61,96	4,32	
Jawa Tengah	1,33	0,40	2,26	35,66		53,55	49,51	57,60	3,85	
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	50,57		49,30	39,86	58,74	9,77	
Jawa Timur	1,65	0,54	2,76	34,36		65,27	60,68	69,85	3,58	
Banten	8,41	2,57	14,24	35,39		44,41	34,59	54,24	11,28	
Bali	NA	NA	NA	60,98		60,91	52,14	69,67	7,34	
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	63,51		67,51	60,77	74,24	5,09	
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	NA	100,39		17,47	13,19	21,75	12,49	
Kalimantan Barat	NA	NA	NA	101,02		46,06	36,76	55,37	10,30	
Kalimantan Tengah	4,84	0,32	9,36	47,60		55,57	41,38	69,77	13,03	
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	69,66		37,54	26,52	48,56	14,97	
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	82,77		20,09	12,30	27,88	19,79	
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	101,37		35,53	17,28	53,77	26,20	
Sulawesi Utara	-	-	-	NA		40,37	32,88	47,86	9,47	
Sulawesi Tengah	-	-	-	NA		29,85	16,23	43,47	23,27	
Sulawesi Selatan	NA	NA	NA	60,33		26,76	20,07	33,45	12,75	
Sulawesi Tenggara	-	-	-	NA		20,70	10,55	30,86	25,02	
Gorontalo	-	-	-	NA		49,25	38,30	60,20	11,34	
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	102,03		21,68	10,90	32,45	25,35	
Maluku	-	-	-	NA		38,82	25,12	52,51	18,00	
Maluku Utara	NA	NA	NA	100,28		35,34	23,00	47,68	17,81	
Papua Barat	NA	NA	NA	101,30		23,39	11,55	35,22	25,82	
Papua	-	-	-	NA		32,45	19,05	45,85	21,06	
Indonesia	1,81	1,33	2,29	13,60		51,81	50,14	53,49	1,65	

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.35 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tidak Rawat Jalan menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023

Provinsi	Mengobati Sendiri				Merasa Tidak Perlu				Lainnya			
	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	66,48	60,84	72,12	4,33	30,77	25,28	36,27	9,12	2,75	1,64	3,86	20,61
Sumatera Utara	58,57	52,95	64,19	4,89	38,41	32,74	44,07	7,52	3,02	1,65	4,40	23,19
Sumatera Barat	52,59	45,86	59,32	6,53	41,55	34,67	48,42	8,44	5,86	2,36	9,36	30,50
Riau	46,43	39,45	53,41	7,67	50,04	42,89	57,19	7,29	3,53	1,15	5,91	34,46
Jambi	62,65	54,93	70,38	6,29	33,23	25,77	40,69	11,46	4,12	0,60	7,64	43,64
Sumatera Selatan	60,96	54,67	67,25	5,27	34,31	27,95	40,68	9,46	4,72	2,15	7,30	27,79
Bengkulu	54,83	46,15	63,51	8,07	42,69	34,04	51,34	10,34	2,47	0,82	4,13	34,06
Lampung	66,50	61,10	71,91	4,14	31,17	25,95	36,40	8,55	2,32	0,76	3,89	34,35
Kep. Bangka Belitung	77,71	70,52	84,89	4,72	21,23	14,06	28,39	17,22	NA	NA	NA	68,45
Kepulauan Riau	56,49	40,15	72,82	14,75	39,84	23,96	55,72	20,34	3,67	0,32	7,02	46,56
DKI Jakarta	59,90	50,54	69,26	7,97	35,56	26,33	44,79	13,24	4,54	1,08	7,99	38,88
Jawa Barat	59,62	54,56	64,67	4,33	35,96	30,79	41,13	7,34	4,42	2,79	6,06	18,85
Jawa Tengah	64,79	61,50	68,08	2,59	33,14	29,88	36,40	5,02	2,07	1,38	2,77	17,11
DI Yogyakarta	68,30	60,54	76,06	5,80	29,97	22,26	37,68	13,13	1,73	0,07	3,39	48,92
Jawa Timur	69,35	66,20	72,50	2,32	28,39	25,29	31,50	5,58	2,25	1,30	3,21	21,67
Banten	54,23	43,24	65,22	10,34	42,07	30,84	53,31	13,62	3,70	1,43	5,97	31,33
Bali	66,71	54,33	79,09	9,47	33,14	20,76	45,52	19,06	NA	NA	NA	92,16
Nusa Tenggara Barat	65,21	59,26	71,16	4,65	32,24	26,45	38,03	9,16	2,55	0,95	4,14	31,91
Nusa Tenggara Timur	71,91	67,07	76,75	3,43	25,41	20,67	30,14	9,51	2,68	1,49	3,87	22,71
Kalimantan Barat	55,37	49,20	61,53	5,68	39,95	33,72	46,17	7,95	4,69	1,73	7,64	32,19
Kalimantan Tengah	64,23	57,03	71,44	5,72	34,26	27,05	41,48	10,74	1,50	0,39	2,62	37,73
Kalimantan Selatan	74,60	68,32	80,88	4,30	23,60	17,47	29,72	13,24	1,80	0,53	3,08	36,06
Kalimantan Timur	54,42	43,53	65,32	10,21	39,14	28,85	49,43	13,41	NA	NA	NA	55,07
Kalimantan Utara	46,91	34,57	59,25	13,42	45,48	34,12	56,83	12,73	7,61	2,53	12,70	34,08
Sulawesi Utara	61,03	53,09	68,97	6,64	36,37	28,46	44,27	11,09	2,60	1,04	4,16	30,58
Sulawesi Tengah	57,31	48,74	65,88	7,63	38,70	30,27	47,13	11,12	3,99	1,43	6,55	32,78
Sulawesi Selatan	60,64	54,88	66,39	4,84	37,29	31,64	42,93	7,72	2,07	0,78	3,37	31,80
Sulawesi Tenggara	64,23	56,28	72,17	6,31	32,24	24,51	39,96	12,23	3,54	0,90	6,18	38,10
Gorontalo	75,64	66,25	85,02	6,33	22,81	13,35	32,27	21,16	1,56	0,05	3,06	49,27
Sulawesi Barat	49,31	40,37	58,25	9,25	46,84	37,95	55,73	9,68	3,85	1,04	6,66	37,30
Maluku	56,09	42,42	69,76	12,43	42,26	28,62	55,90	16,47	1,65	0,57	2,73	33,34
Maluku Utara	54,60	45,43	63,77	8,57	43,51	34,41	52,60	10,67	NA	NA	NA	52,13
Papua Barat	56,81	45,38	68,23	10,26	38,10	26,44	49,76	15,61	5,09	1,44	8,74	36,59
Papua	51,48	44,16	58,80	7,25	40,35	33,16	47,54	9,10	8,17	4,65	11,69	22,00
Indonesia	62,25	60,79	63,70	1,19	34,55	33,09	36,01	2,16	3,20	2,78	3,63	6,76

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.36.1 Sampling Error Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Jumlah				
	Selang		Relative Standard	Selang		Relative Standard									
	Batas Bawah	Batas Atas		Batas Bawah	Batas Atas		Batas Bawah	Batas Atas		Batas Bawah	Batas Atas		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
Aceh	4,42	3,39	5,46	11,96	3,90	3,23	4,56	8,73	4,08	3,52	4,65	7,09			
Sumatera Utara	3,40	2,75	4,04	9,69	1,84	1,42	2,25	11,61	2,76	2,34	3,18	7,73			
Sumatera Barat	3,38	2,46	4,30	13,83	4,04	3,35	4,74	8,78	3,70	3,11	4,28	8,06			
Riau	3,73	2,64	4,82	14,93	2,30	1,69	2,92	13,60	2,90	2,32	3,49	10,24			
Jambi	2,90	1,62	4,17	22,45	2,72	2,06	3,38	12,45	2,78	2,17	3,38	11,17			
Sumatera Selatan	2,45	1,48	3,43	20,25	2,62	2,05	3,19	11,13	2,55	2,03	3,07	10,36			
Bengkulu	3,54	2,26	4,82	18,48	2,97	2,15	3,80	14,17	3,18	2,48	3,88	11,26			
Lampung	3,51	2,27	4,76	18,07	2,71	2,10	3,31	11,39	2,99	2,40	3,57	9,95			
Kep. Bangka Belitung	3,31	2,23	4,39	16,63	3,64	2,41	4,86	17,17	3,45	2,64	4,26	11,96			
Kepulauan Riau	4,03	2,44	5,62	20,15	3,06	1,01	5,12	34,19	3,94	2,48	5,40	18,88			
DKI Jakarta	2,44	1,80	3,09	13,50	-	-	-	NA	2,44	1,80	3,09	13,50			
Jawa Barat	2,50	2,14	2,87	7,45	2,73	2,14	3,33	11,10	2,54	2,23	2,86	6,36			
Jawa Tengah	4,15	3,66	4,65	6,09	4,06	3,58	4,54	6,05	4,11	3,76	4,46	4,32			
DI Yogyakarta	3,01	2,14	3,88	14,74	3,82	2,18	5,46	21,88	3,16	2,39	3,93	12,42			
Jawa Timur	3,34	2,86	3,83	7,41	2,83	2,40	3,25	7,67	3,13	2,79	3,46	5,44			
Banten	2,11	1,50	2,73	14,83	1,42	0,65	2,19	27,73	1,97	1,46	2,48	13,25			
Bali	3,93	3,01	4,86	11,96	3,26	2,21	4,30	16,35	3,76	3,02	4,50	10,01			
Nusa Tenggara Barat	4,20	2,99	5,41	14,65	5,90	4,63	7,18	11,02	5,00	4,12	5,88	8,94			
Nusa Tenggara Timur	3,04	2,03	4,04	16,85	3,71	3,16	4,25	7,51	3,51	3,02	3,99	7,08			
Kalimantan Barat	2,61	1,69	3,54	18,13	2,73	2,12	3,35	11,48	2,69	2,17	3,21	9,82			
Kalimantan Tengah	1,90	1,04	2,75	22,93	1,14	0,64	1,63	22,26	1,47	1,00	1,93	16,15			
Kalimantan Selatan	2,74	1,84	3,64	16,68	1,88	1,35	2,41	14,39	2,32	1,79	2,84	11,57			
Kalimantan Timur	3,65	2,63	4,66	14,18	2,46	1,23	3,69	25,53	3,29	2,49	4,10	12,44			
Kalimantan Utara	3,38	2,29	4,48	16,46	3,66	1,82	5,49	25,60	3,47	2,52	4,43	13,96			
Sulawesi Utara	5,08	3,88	6,28	12,07	5,11	3,91	6,31	11,97	5,09	4,23	5,95	8,60			
Sulawesi Tengah	4,62	3,02	6,22	17,63	3,84	2,92	4,77	12,25	4,12	3,30	4,94	10,16			
Sulawesi Selatan	4,78	3,81	5,75	10,39	4,62	3,98	5,25	7,00	4,70	4,12	5,28	6,34			
Sulawesi Tenggara	3,09	2,03	4,15	17,56	2,89	2,25	3,52	11,23	2,97	2,39	3,55	9,92			
Gorontalo	5,11	3,36	6,86	17,47	3,62	2,57	4,67	14,79	4,29	3,30	5,27	11,71			
Sulawesi Barat	4,54	2,57	6,52	22,18	3,18	2,15	4,20	16,43	3,47	2,55	4,38	13,41			
Maluku	2,04	1,19	2,90	21,41	1,26	0,58	1,93	27,43	1,62	1,08	2,16	16,99			
Maluku Utara	2,03	0,90	3,16	28,38	1,26	0,83	1,68	17,25	1,50	1,04	1,95	15,53			
Papua Barat	3,26	2,05	4,46	18,82	1,54	1,06	2,01	15,79	2,26	1,68	2,84	13,16			
Papua	3,07	2,07	4,07	16,61	0,51	0,33	0,69	18,09	1,24	0,92	1,57	13,27			
Indonesia	3,14	2,98	3,30	2,63	3,02	2,88	3,16	2,33	3,09	2,98	3,20	1,84			

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.36.2 Sampling Error Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Jumlah			
	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard
		Bawah	Atas			Bawah	Atas			Bawah	Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	1,63	1,15	2,10	14,81	6,53	5,52	7,53	7,88	4,08	3,52	4,65	7,09
Sumatera Utara	1,03	0,70	1,37	16,62	4,53	3,77	5,29	8,54	2,76	2,34	3,18	7,73
Sumatera Barat	1,03	0,63	1,43	19,93	6,45	5,34	7,55	8,75	3,70	3,11	4,28	8,06
Riau	1,12	0,55	1,69	26,12	4,81	3,80	5,82	10,72	2,90	2,32	3,49	10,24
Jambi	1,18	0,64	1,72	23,49	4,45	3,37	5,52	12,34	2,78	2,17	3,38	11,17
Sumatera Selatan	0,99	0,65	1,33	17,61	4,16	3,17	5,15	12,17	2,55	2,03	3,07	10,36
Bengkulu	0,80	0,38	1,22	26,96	5,63	4,24	7,02	12,59	3,18	2,48	3,88	11,26
Lampung	1,20	0,76	1,64	18,83	4,85	3,78	5,92	11,23	2,99	2,40	3,57	9,95
Kep. Bangka Belitung	1,19	0,51	1,88	29,24	5,76	4,25	7,27	13,37	3,45	2,64	4,26	11,96
Kepulauan Riau	0,70	0,18	1,21	37,90	7,26	4,48	10,04	19,54	3,94	2,48	5,40	18,88
DKI Jakarta	1,26	0,65	1,87	24,87	3,57	2,52	4,61	14,98	2,44	1,80	3,09	13,50
Jawa Barat	1,65	1,29	2,01	11,19	3,49	2,97	4,01	7,62	2,54	2,23	2,86	6,36
Jawa Tengah	1,68	1,37	2,00	9,44	6,61	5,99	7,23	4,78	4,11	3,76	4,46	4,32
DI Yogyakarta	1,82	0,98	2,66	23,50	4,49	3,12	5,87	15,61	3,16	2,39	3,93	12,42
Jawa Timur	1,32	1,03	1,62	11,41	4,92	4,34	5,49	5,96	3,13	2,79	3,46	5,44
Banten	0,97	0,48	1,46	25,86	2,99	2,08	3,90	15,53	1,97	1,46	2,48	13,25
Bali	1,01	0,60	1,41	20,63	6,70	5,23	8,18	11,19	3,76	3,02	4,50	10,01
Nusa Tenggara Barat	1,82	1,03	2,61	22,17	8,18	6,59	9,78	9,95	5,00	4,12	5,88	8,94
Nusa Tenggara Timur	1,34	0,88	1,81	17,62	5,70	4,85	6,55	7,64	3,51	3,02	3,99	7,08
Kalimantan Barat	0,89	0,44	1,34	26,03	4,50	3,60	5,41	10,28	2,69	2,17	3,21	9,82
Kalimantan Tengah	0,41	0,02	0,80	47,97	2,55	1,69	3,41	17,19	1,47	1,00	1,93	16,15
Kalimantan Selatan	0,58	0,25	0,91	29,15	4,08	3,11	5,05	12,18	2,32	1,79	2,84	11,57
Kalimantan Timur	1,08	0,54	1,62	25,42	5,63	4,11	7,15	13,73	3,29	2,49	4,10	12,44
Kalimantan Utara	1,50	0,55	2,45	32,31	5,58	3,89	7,27	15,43	3,47	2,52	4,43	13,96
Sulawesi Utara	2,56	1,80	3,31	15,11	7,82	6,30	9,34	9,91	5,09	4,23	5,95	8,60
Sulawesi Tengah	1,58	0,85	2,32	23,73	6,64	5,14	8,14	11,54	4,12	3,30	4,94	10,16
Sulawesi Selatan	2,30	1,68	2,92	13,72	7,14	6,14	8,13	7,13	4,70	4,12	5,28	6,34
Sulawesi Tenggara	0,91	0,51	1,31	22,50	5,00	4,01	6,00	10,12	2,97	2,39	3,55	9,92
Gorontalo	1,62	0,81	2,43	25,58	7,04	5,22	8,87	13,24	4,29	3,30	5,27	11,71
Sulawesi Barat	1,28	0,61	1,94	26,63	5,69	3,99	7,38	15,20	3,47	2,55	4,38	13,41
Maluku	0,92	0,41	1,42	28,22	2,35	1,42	3,28	20,25	1,62	1,08	2,16	16,99
Maluku Utara	0,69	0,27	1,12	31,24	2,31	1,50	3,11	17,79	1,50	1,04	1,95	15,53
Papua Barat	0,46	0,21	0,70	27,37	4,14	2,98	5,30	14,32	2,26	1,68	2,84	13,16
Papua	0,47	0,21	0,72	27,69	2,09	1,49	2,69	14,70	1,24	0,92	1,57	13,27
Indonesia	1,36	1,25	1,47	4,02	4,87	4,68	5,06	2,03	3,09	2,98	3,20	1,84

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.37 Sampling Error Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2023

Provinsi	RS Pemerintah					RS Swasta				
	Estimasi	Selang		Relative Standard	Error	Estimasi	Selang		Relative Standard	
		Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	56,48	50,04	62,92	5,82	26,56	20,31	32,81	12,01		
Sumatera Utara	25,55	18,73	32,36	13,61	47,46	39,42	55,51	8,65		
Sumatera Barat	38,88	31,21	46,56	10,07	29,04	22,67	35,41	11,19		
Riau	24,28	16,95	31,61	15,39	45,19	35,28	55,10	11,18		
Jambi	35,78	26,37	45,18	13,41	30,58	20,13	41,03	17,43		
Sumatera Selatan	35,48	25,46	45,51	14,40	38,90	28,52	49,28	13,61		
Bengkulu	62,59	50,04	75,14	10,23	25,52	13,52	37,52	23,98		
Lampung	11,18	6,03	16,33	23,51	50,59	40,50	60,68	10,17		
Kep. Bangka Belitung	48,45	36,30	60,61	12,79	37,54	25,81	49,27	15,94		
Kepulauan Riau	19,30	8,27	30,34	29,16	63,80	48,83	78,77	11,97		
DKI Jakarta	32,15	18,87	45,42	21,06	47,62	34,13	61,11	14,45		
Jawa Barat	28,36	23,01	33,71	9,62	48,09	42,28	53,90	6,16		
Jawa Tengah	27,07	23,27	30,88	7,17	45,70	41,32	50,09	4,89		
DI Yogyakarta	24,36	13,67	35,05	22,39	63,73	52,83	74,63	8,72		
Jawa Timur	32,87	27,97	37,77	7,60	39,00	33,92	44,09	6,65		
Banten	22,65	12,87	32,43	22,02	46,39	34,91	57,87	12,63		
Bali	26,92	18,74	35,10	15,50	58,66	48,79	68,53	8,58		
Nusa Tenggara Barat	32,24	24,37	40,11	12,45	14,00	6,81	21,19	26,18		
Nusa Tenggara Timur	42,84	36,15	49,54	7,97	21,02	14,88	27,16	14,90		
Kalimantan Barat	40,61	30,85	50,37	12,26	21,49	12,58	30,40	21,15		
Kalimantan Tengah	52,09	36,94	67,24	14,84	21,99	11,28	32,70	24,84		
Kalimantan Selatan	58,32	48,61	68,03	8,50	20,26	13,42	27,10	17,22		
Kalimantan Timur	43,13	30,04	56,21	15,48	43,73	30,41	57,04	15,54		
Kalimantan Utara	89,80	81,16	98,43	4,91	NA	NA	NA	75,33		
Sulawesi Utara	41,13	33,25	49,01	9,77	45,30	37,30	53,30	9,01		
Sulawesi Tengah	54,51	44,80	64,22	9,09	9,89	4,37	15,40	28,45		
Sulawesi Selatan	42,71	36,62	48,79	7,27	28,37	22,01	34,73	11,44		
Sulawesi Tenggara	48,06	39,09	57,03	9,52	18,64	10,90	26,38	21,18		
Gorontalo	58,20	45,31	71,09	11,29	25,16	13,33	36,99	23,99		
Sulawesi Barat	46,54	32,46	60,63	15,43	17,23	8,21	26,24	26,69		
Maluku	58,09	41,91	74,27	14,21	20,37	6,27	34,47	35,32		
Maluku Utara	63,63	48,78	78,47	11,90	13,88	1,08	26,68	47,04		
Papua Barat	76,32	65,96	86,69	6,93	15,25	5,95	24,54	31,09		
Papua	62,00	50,39	73,61	9,55	22,36	10,89	33,83	26,18		
Indonesia	33,39	31,78	35,00	2,46	39,69	37,94	41,43	2,24		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.37

Provinsi	Praktik Dokter/Bidan				Klinik/Dokter Bersama			
	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	2,37	0,59	4,15	38,34	4,46	1,26	7,66	36,62
Sumatera Utara	11,26	6,19	16,34	22,99	11,56	5,86	17,26	25,15
Sumatera Barat	16,88	10,57	23,18	19,05	9,33	5,35	13,31	21,74
Riau	12,64	6,57	18,72	24,50	11,19	5,48	16,90	26,02
Jambi	12,59	5,03	20,15	30,62	8,79	3,61	13,98	30,09
Sumatera Selatan	12,15	5,55	18,75	27,71	11,49	5,35	17,63	27,24
Bengkulu	NA	NA	NA	50,87	NA	NA	NA	99,82
Lampung	17,05	9,77	24,33	21,79	15,88	9,85	21,91	19,36
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	NA	NA	NA	NA	50,60
Kepulauan Riau	9,05	0,77	17,33	46,66	NA	NA	NA	62,64
DKI Jakarta	13,13	3,82	22,44	36,17	NA	NA	NA	101,33
Jawa Barat	8,25	5,03	11,48	19,94	8,69	5,59	11,79	18,19
Jawa Tengah	4,13	2,37	5,88	21,66	6,33	4,24	8,43	16,84
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	60,16	NA	NA	NA	53,89
Jawa Timur	8,75	5,79	11,71	17,26	3,55	1,77	5,33	25,53
Banten	8,00	2,76	13,24	33,43	11,10	2,07	20,12	41,48
Bali	5,46	1,02	9,90	41,50	5,73	1,21	10,26	40,27
Nusa Tenggara Barat	3,40	0,76	6,04	39,65	4,59	1,41	7,77	35,38
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	NA	NA	NA	NA	73,94
Kalimantan Barat	6,02	2,53	9,51	29,56	2,15	0,19	4,11	46,56
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	56,43	NA	NA	NA	62,40
Kalimantan Selatan	4,51	0,59	8,43	44,38	12,16	5,05	19,27	29,83
Kalimantan Timur	7,60	2,44	12,76	34,65	2,58	0,10	5,07	49,02
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	63,61	NA	NA	NA	101,53
Sulawesi Utara	1,59	0,04	3,15	49,80	4,05	0,24	7,86	48,03
Sulawesi Tengah	NA	NA	NA	71,56	NA	NA	NA	79,26
Sulawesi Selatan	3,00	1,40	4,60	27,20	1,82	0,70	2,93	31,29
Sulawesi Tenggara	NA	NA	NA	55,34	3,15	2,61	3,68	8,70
Gorontalo	-	-	-	NA	NA	NA	NA	71,94
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	100,83	-	-	-	NA
Maluku	NA	NA	NA	73,03	1,58	1,31	1,85	8,62
Maluku Utara	-	-	-	NA	NA	NA	NA	101,07
Papua Barat	-	-	-	NA	NA	NA	NA	70,46
Papua	NA	NA	NA	66,29	NA	NA	NA	55,77
Indonesia	7,16	6,23	8,10	6,66	6,31	5,45	7,17	6,92

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.37

Provinsi	Puskesmas/Puskesmas Pembantu				Praktik Pengobatan Tradisional						Lainnya			
	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard	Estimasi	Selang		Relative Standard		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
Aceh	11,98	7,27	16,69	20,06	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	100,18	
Sumatera Utara	4,24	2,07	6,41	26,09	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Sumatera Barat	9,38	5,11	13,65	23,24	NA	NA	NA	100,32	NA	NA	NA	NA	100,32	
Riau	6,70	1,37	12,02	40,56	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	100,51	
Jambi	12,71	6,19	19,23	26,17	NA	NA	NA	100,45	-	-	-	-	NA	
Sumatera Selatan	3,21	0,52	5,89	42,67	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Bengkulu	3,48	0,52	6,44	43,35	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Lampung	7,65	3,52	11,78	27,53	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Kep. Bangka Belitung	8,42	0,44	16,40	48,34	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	57,88	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
DKI Jakarta	NA	NA	NA	50,94	NA	NA	NA	100,91	-	-	-	-	NA	
Jawa Barat	6,79	2,94	10,64	28,91	NA	NA	NA	71,57	NA	NA	NA	NA	54,57	
Jawa Tengah	16,91	13,75	20,07	9,54	NA	NA	NA	68,62	-	-	-	-	NA	
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	62,43	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Jawa Timur	15,58	11,89	19,27	12,07	NA	NA	NA	95,00	NA	NA	NA	NA	71,76	
Banten	9,75	2,19	17,30	39,53	NA	NA	NA	100,37	NA	NA	NA	NA	79,38	
Bali	4,12	0,12	8,12	49,47	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Nusa Tenggara Barat	47,50	38,89	56,11	9,24	NA	NA	NA	100,20	NA	NA	NA	NA	64,73	
Nusa Tenggara Timur	37,34	31,11	43,56	8,51	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Kalimantan Barat	30,58	22,75	38,42	13,07	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	100,24	
Kalimantan Tengah	16,65	4,79	28,51	36,34	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Kalimantan Selatan	4,90	1,58	8,23	34,62	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Kalimantan Timur	3,34	0,92	5,75	36,93	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	55,67	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Sulawesi Utara	10,51	7,35	13,67	15,33	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Sulawesi Tengah	32,90	24,03	41,77	13,76	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Sulawesi Selatan	25,38	20,38	30,39	10,06	NA	NA	NA	93,74	NA	NA	NA	NA	74,33	
Sulawesi Tenggara	27,51	19,89	35,12	14,12	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Gorontalo	13,95	6,18	21,71	28,39	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Sulawesi Barat	39,47	27,35	51,60	15,67	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Maluku	18,58	7,56	29,60	30,25	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Maluku Utara	23,98	14,02	33,94	21,19	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Papua Barat	6,52	2,54	10,50	31,17	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	
Papua	11,32	6,14	16,49	23,33	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	100,51	
Indonesia	13,97	12,83	15,11	4,16	0,31	0,10	0,52	34,08	0,39	0,14	0,63	32,67		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.38 Sampling Error Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Lama Rawat Inap (Hari), 2023

Provinsi	1-3 Hari				4-7 Hari			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	64,78	58,76	70,81	4,74	30,13	24,32	35,94	9,84
Sumatera Utara	63,55	55,66	71,44	6,33	28,99	21,98	36,01	12,35
Sumatera Barat	67,31	60,68	73,94	5,03	26,61	20,43	32,79	11,85
Riau	73,44	65,86	81,01	5,26	25,83	18,30	33,37	14,89
Jambi	61,85	51,22	72,47	8,76	31,27	21,51	41,03	15,92
Sumatera Selatan	74,79	66,42	83,16	5,71	18,47	10,96	25,97	20,73
Bengkulu	83,58	75,00	92,15	5,24	14,89	6,81	22,97	27,67
Lampung	79,09	72,07	86,11	4,53	17,66	10,97	24,35	19,33
Kep. Bangka Belitung	84,91	76,52	93,31	5,04	9,77	3,40	16,13	33,25
Kepulauan Riau	78,18	65,98	90,39	7,96	18,54	6,36	30,72	33,52
DKI Jakarta	58,98	46,71	71,24	10,61	35,20	22,92	47,49	17,80
Jawa Barat	65,53	59,89	71,18	4,39	27,31	21,88	32,74	10,14
Jawa Tengah	67,98	64,15	71,82	2,88	26,30	22,65	29,96	7,08
DI Yogyakarta	62,27	49,34	75,21	10,59	30,60	18,32	42,87	20,46
Jawa Timur	74,65	70,18	79,12	3,05	21,87	17,66	26,09	9,83
Banten	72,11	61,08	83,13	7,80	24,86	14,13	35,60	22,03
Bali	70,83	60,30	81,37	7,59	26,97	16,43	37,51	19,93
Nusa Tenggara Barat	75,68	67,12	84,24	5,77	20,18	11,72	28,64	21,38
Nusa Tenggara Timur	77,83	71,45	84,20	4,18	17,83	11,94	23,72	16,86
Kalimantan Barat	75,56	67,84	83,28	5,21	19,95	12,48	27,41	19,09
Kalimantan Tengah	71,36	55,19	87,53	11,56	23,75	7,85	39,65	34,15
Kalimantan Selatan	76,48	67,13	85,83	6,23	22,83	13,47	32,20	20,93
Kalimantan Timur	66,94	55,88	78,00	8,43	27,51	17,40	37,62	18,74
Kalimantan Utara	64,13	49,36	78,90	11,75	26,14	12,15	40,13	27,30
Sulawesi Utara	51,41	42,90	59,93	8,45	37,82	29,42	46,23	11,33
Sulawesi Tengah	66,82	58,67	74,98	6,22	27,85	20,04	35,67	14,32
Sulawesi Selatan	68,05	62,08	74,03	4,48	24,89	19,33	30,45	11,40
Sulawesi Tenggara	74,51	66,94	82,07	5,18	19,65	12,55	26,76	18,44
Gorontalo	68,10	59,06	77,14	6,77	31,90	22,86	40,94	14,45
Sulawesi Barat	68,25	56,41	80,09	8,85	25,91	15,10	36,71	21,27
Maluku	59,03	42,14	75,93	14,60	28,57	13,39	43,74	27,09
Maluku Utara	61,63	45,64	77,62	13,23	27,92	13,52	42,32	26,31
Papua Barat	83,76	75,75	91,78	4,88	13,57	5,92	21,23	28,76
Papua	63,38	52,05	74,70	9,12	27,71	16,04	39,38	21,49
Indonesia	69,39	67,78	71,01	1,18	25,25	23,71	26,78	3,10

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.38

Provinsi	8-14 Hari					>14 Hari				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		Estimasi	Selang		Relative Standard Error	
		Batas Bawah	Batas Atas				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	
Aceh	3,60	1,06	6,14	36,00		1,49	0,34	2,64	39,40	
Sumatera Utara	6,51	1,13	11,89	42,19		0,95	0,08	1,81	46,45	
Sumatera Barat	2,12	0,18	4,06	46,76		3,96	0,37	7,54	46,21	
Riau	NA	NA	NA	100,29		NA	NA	NA	71,88	
Jambi	3,99	0,09	7,88	49,83		NA	NA	NA	76,69	
Sumatera Selatan	3,54	0,67	6,40	41,30		NA	NA	NA	65,43	
Bengkulu	NA	NA	NA	100,60		NA	NA	NA	99,64	
Lampung	2,95	0,34	5,56	45,16		NA	NA	NA	100,16	
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	70,39		NA	NA	NA	72,12	
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	72,64		NA	NA	NA	101,08	
DKI Jakarta	NA	NA	NA	98,19		NA	NA	NA	56,95	
Jawa Barat	5,15	2,53	7,77	25,92		2,01	0,29	3,73	43,56	
Jawa Tengah	3,93	2,31	5,55	21,04		1,79	0,60	2,97	33,84	
DI Yogyakarta	4,92	0,21	9,63	48,80		NA	NA	NA	100,14	
Jawa Timur	3,28	1,33	5,23	30,27		NA	NA	NA	60,70	
Banten	NA	NA	NA	88,25		NA	NA	NA	58,91	
Bali	NA	NA	NA	52,73		NA	NA	NA	72,15	
Nusa Tenggara Barat	3,28	0,48	6,07	43,52		NA	NA	NA	53,84	
Nusa Tenggara Timur	3,96	1,41	6,51	32,86		NA	NA	NA	71,48	
Kalimantan Barat	3,16	0,38	5,95	44,93		NA	NA	NA	64,90	
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	60,05		NA	NA	NA	91,17	
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	88,52		NA	NA	NA	77,40	
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	63,86		NA	NA	NA	71,38	
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	61,72		NA	NA	NA	73,56	
Sulawesi Utara	8,85	3,69	14,01	29,74		NA	NA	NA	56,05	
Sulawesi Tengah	5,32	1,54	9,10	36,22		-	-	-	NA	
Sulawesi Selatan	4,98	1,86	8,10	31,96		2,08	0,28	3,87	44,16	
Sulawesi Tenggara	4,09	1,14	7,04	36,83		NA	NA	NA	60,23	
Gorontalo	-	-	-	NA		-	-	-	NA	
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	64,77		NA	NA	NA	64,82	
Maluku	6,35	1,56	11,14	38,45		NA	NA	NA	85,11	
Maluku Utara	NA	NA	NA	53,17		NA	NA	NA	74,37	
Papua Barat	NA	NA	NA	67,28		NA	NA	NA	70,66	
Papua	8,15	3,10	13,20	31,59		NA	NA	NA	54,70	
Indonesia	3,81	3,11	4,50	9,31		1,55	1,12	1,98	14,15	

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.39 Sampling Error Persentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2023

Provinsi	BPJS PBI				BPJS Non PBI			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	87,31	83,63	90,99	2,15	8,67	5,41	11,93	19,17
Sumatera Utara	29,93	22,87	36,99	12,03	34,40	26,58	42,22	11,60
Sumatera Barat	49,17	41,71	56,63	7,74	26,30	18,62	33,97	14,89
Riau	28,79	19,77	37,81	15,98	28,88	19,46	38,29	16,63
Jambi	26,22	18,28	34,16	15,45	32,23	22,17	42,29	15,92
Sumatera Selatan	50,87	41,08	60,65	9,81	20,92	13,30	28,54	18,58
Bengkulu	51,12	39,18	63,05	11,91	33,47	21,77	45,17	17,83
Lampung	35,62	26,98	44,26	12,37	25,81	17,85	33,78	15,74
Kep. Bangka Belitung	46,72	34,73	58,71	13,09	41,00	29,15	52,85	14,74
Kepulauan Riau	13,46	5,09	21,82	31,72	64,08	51,19	76,98	10,26
DKI Jakarta	41,52	27,98	55,06	16,63	35,37	21,97	48,76	19,32
Jawa Barat	34,78	28,89	40,67	8,64	33,34	27,46	39,22	9,00
Jawa Tengah	46,62	42,47	50,78	4,55	24,96	21,43	28,49	7,22
DI Yogyakarta	51,02	38,18	63,87	12,84	26,74	14,73	38,76	22,92
Jawa Timur	40,42	35,20	45,65	6,59	27,42	22,65	32,19	8,87
Banten	27,18	16,69	37,68	19,70	28,91	18,70	39,12	18,02
Bali	38,91	28,83	49,00	13,22	36,86	27,13	46,59	13,47
Nusa Tenggara Barat	53,62	44,94	62,29	8,25	17,00	9,71	24,29	21,87
Nusa Tenggara Timur	70,55	64,87	76,23	4,10	9,61	4,69	14,53	26,12
Kalimantan Barat	38,52	29,32	47,72	12,18	29,76	20,64	38,88	15,64
Kalimantan Tengah	29,29	12,08	46,50	29,97	41,24	26,30	56,18	18,48
Kalimantan Selatan	35,83	25,73	45,93	14,37	40,55	30,11	51,00	13,14
Kalimantan Timur	22,91	13,63	32,18	20,66	57,80	46,39	69,20	10,07
Kalimantan Utara	58,74	44,15	73,32	12,67	24,92	12,80	37,05	24,82
Sulawesi Utara	55,78	47,49	64,07	7,58	32,72	25,01	40,43	12,03
Sulawesi Tengah	67,22	59,03	75,41	6,21	23,26	15,96	30,57	16,02
Sulawesi Selatan	55,82	50,60	61,03	4,77	33,12	27,88	38,36	8,07
Sulawesi Tenggara	48,97	40,98	56,96	8,32	32,62	23,43	41,82	14,37
Gorontalo	75,87	64,97	86,77	7,33	21,87	11,55	32,19	24,06
Sulawesi Barat	56,79	43,22	70,36	12,19	30,79	18,37	43,21	20,57
Maluku	37,28	21,00	53,56	22,28	42,10	24,73	59,48	21,05
Maluku Utara	42,22	28,58	55,87	16,49	11,97	3,24	20,70	37,19
Papua Barat	57,41	42,64	72,18	13,12	12,33	3,61	21,05	36,07
Papua	44,11	31,98	56,24	14,02	19,47	10,02	28,92	24,77
Indonesia	43,43	41,72	45,15	2,01	28,89	27,25	30,52	2,89

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.39

Provinsi	Jamkesda					Asuransi Swasta				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	NA	NA	NA	53,61	-	-	-	-	NA	
Sumatera Utara	NA	NA	NA	72,06	NA	NA	NA	64,42		
Sumatera Barat	1,62	0,15	3,08	46,21	NA	NA	NA	71,37		
Riau	3,36	0,21	6,51	47,81	-	-	-	NA		
Jambi	1,41	0,31	2,50	39,79	NA	NA	NA	100,48		
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	68,83	-	-	-	NA		
Bengkulu	-	-	-	NA	-	-	-	NA		
Lampung	3,12	0,19	6,06	47,85	NA	NA	NA	68,22		
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	NA	NA	NA	NA	100,89		
Kepulauan Riau	-	-	-	NA	NA	NA	NA	100,89		
DKI Jakarta	-	-	-	NA	NA	NA	NA	58,14		
Jawa Barat	NA	NA	NA	55,61	NA	NA	NA	57,37		
Jawa Tengah	1,55	0,25	2,86	42,72	0,68	0,10	1,25	43,65		
DI Yogyakarta	-	-	-	NA	NA	NA	NA	70,87		
Jawa Timur	1,45	0,41	2,50	36,70	NA	NA	NA	56,76		
Banten	NA	NA	NA	73,66	NA	NA	NA	99,62		
Bali	NA	NA	NA	100,71	NA	NA	NA	70,26		
Nusa Tenggara Barat	2,22	0,34	4,09	43,27	NA	NA	NA	99,56		
Nusa Tenggara Timur	4,63	2,72	6,54	21,04	-	-	-	NA		
Kalimantan Barat	NA	NA	NA	68,11	NA	NA	NA	99,82		
Kalimantan Tengah	-	-	-	NA	-	-	-	NA		
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	72,42	-	-	-	NA		
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	101,75	NA	NA	NA	100,29		
Kalimantan Utara	-	-	-	NA	-	-	-	NA		
Sulawesi Utara	-	-	-	NA	NA	NA	NA	99,99		
Sulawesi Tengah	NA	NA	NA	52,17	-	-	-	NA		
Sulawesi Selatan	NA	NA	NA	100,10	NA	NA	NA	100,14		
Sulawesi Tenggara	NA	NA	NA	56,58	-	-	-	NA		
Gorontalo	-	-	-	NA	NA	NA	NA	99,93		
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	56,48	-	-	-	NA		
Maluku	NA	NA	NA	54,56	-	-	-	NA		
Maluku Utara	13,63	7,83	19,44	21,73	NA	NA	NA	101,01		
Papua Barat	NA	NA	NA	57,73	-	-	-	NA		
Papua	15,84	6,79	24,88	29,14	NA	NA	NA	100,65		
Indonesia	1,57	1,16	1,99	13,37	0,97	0,56	1,37	21,43		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.39

Provinsi	Asuransi Perusahaan/Kantor					Tidak Menggunakan				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Aceh	1,51	0,93	2,10	19,60	2,22	0,57	3,86	37,83		
Sumatera Utara	NA	NA	NA	62,49	31,62	24,08	39,16	12,16		
Sumatera Barat	NA	NA	NA	87,54	22,76	17,19	28,33	12,48		
Riau	NA	NA	NA	52,28	34,29	24,88	43,70	14,00		
Jambi	NA	NA	NA	56,42	37,64	27,96	47,32	13,12		
Sumatera Selatan	3,48	0,57	6,40	42,68	23,24	15,25	31,23	17,54		
Bengkulu	3,56	0,17	6,94	48,60	11,86	4,32	19,41	32,44		
Lampung	6,75	1,10	12,40	42,68	27,85	19,54	36,16	15,21		
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	84,45	9,95	2,90	17,00	36,12		
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	61,03	20,75	8,08	33,42	31,14		
DKI Jakarta	NA	NA	NA	70,56	15,11	4,88	25,35	34,55		
Jawa Barat	3,99	1,53	6,46	31,50	25,58	20,55	30,62	10,04		
Jawa Tengah	2,62	1,14	4,10	28,84	23,90	20,35	27,45	7,58		
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	99,30	19,45	10,39	28,51	23,76		
Jawa Timur	4,27	1,73	6,80	30,35	26,23	22,02	30,44	8,18		
Banten	8,06	0,63	15,49	47,03	32,24	20,99	43,49	17,80		
Bali	NA	NA	NA	70,87	21,02	13,32	28,72	18,69		
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	99,41	26,88	19,82	33,94	13,39		
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	NA	77,75	14,64	8,66	20,62	20,82		
Kalimantan Barat	NA	NA	NA	59,49	27,79	18,70	36,87	16,67		
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	51,51	22,85	11,39	34,30	25,58		
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	68,73	19,76	11,17	28,35	22,18		
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	52,22	13,69	6,93	20,46	25,20		
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	99,91	14,26	2,74	25,78	41,21		
Sulawesi Utara	NA	NA	NA	55,06	9,94	5,12	14,75	24,74		
Sulawesi Tengah	NA	NA	NA	64,81	7,03	2,47	11,58	33,10		
Sulawesi Selatan	NA	NA	NA	54,53	10,18	6,56	13,80	18,15		
Sulawesi Tenggara	-	-	-	NA	17,63	10,45	24,82	20,79		
Gorontalo	NA	NA	NA	100,20	NA	NA	NA	77,35		
Sulawesi Barat	-	-	-	NA	11,48	3,47	19,49	35,58		
Maluku	-	-	-	NA	16,96	5,01	28,91	35,94		
Maluku Utara	NA	NA	NA	67,06	26,75	14,20	39,30	23,93		
Papua Barat	8,90	1,23	16,57	43,94	19,13	8,54	29,71	28,23		
Papua	NA	NA	NA	102,76	20,76	10,26	31,26	25,80		
Indonesia	2,96	2,27	3,65	11,86	22,62	21,16	24,07	3,28		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.40 Sampling Error Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok Sebulan Terakhir, 2023

Provinsi	Merokok Setiap Hari				Merokok Tidak Setiap Hari					
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	20,19	18,94	21,44	3,15	2,53	2,00	3,07	10,80		
Sumatera Utara	18,38	17,30	19,46	3,00	1,76	1,40	2,12	10,45		
Sumatera Barat	23,50	22,17	24,83	2,89	2,37	1,62	3,12	16,08		
Riau	20,19	18,77	21,60	3,57	1,60	1,15	2,05	14,43		
Jambi	23,05	21,56	24,54	3,30	1,92	1,43	2,40	12,90		
Sumatera Selatan	24,59	23,22	25,97	2,85	2,42	1,84	3,01	12,30		
Bengkulu	25,73	23,99	27,46	3,44	1,39	0,98	1,80	15,16		
Lampung	28,62	27,16	30,07	2,60	1,66	1,25	2,06	12,47		
Kep. Bangka Belitung	21,57	19,67	23,46	4,49	1,62	0,95	2,28	20,98		
Kepulauan Riau	20,10	16,93	23,28	8,06	1,94	0,74	3,14	31,68		
DKI Jakarta	16,24	14,60	17,88	5,15	2,32	1,63	3,01	15,16		
Jawa Barat	26,10	25,13	27,06	1,89	2,57	2,17	2,98	8,08		
Jawa Tengah	23,92	23,13	24,70	1,68	2,45	2,17	2,74	5,92		
DI Yogyakarta	21,53	19,11	23,95	5,73	2,76	1,93	3,59	15,34		
Jawa Timur	23,80	23,00	24,60	1,71	2,21	1,92	2,49	6,61		
Banten	23,63	21,98	25,29	3,57	1,97	1,47	2,47	13,06		
Bali	14,78	13,13	16,42	5,68	1,82	1,26	2,39	15,87		
Nusa Tenggara Barat	26,17	24,31	28,02	3,62	3,08	2,32	3,84	12,57		
Nusa Tenggara Timur	18,49	17,31	19,67	3,26	5,38	4,68	6,08	6,62		
Kalimantan Barat	20,93	19,58	22,28	3,29	1,05	0,73	1,38	15,85		
Kalimantan Tengah	19,93	18,41	21,44	3,88	2,00	1,41	2,60	15,22		
Kalimantan Selatan	18,04	16,54	19,54	4,25	1,43	0,91	1,96	18,53		
Kalimantan Timur	15,32	13,76	16,88	5,20	1,88	1,13	2,64	20,45		
Kalimantan Utara	18,42	15,71	21,13	7,51	1,58	0,71	2,44	27,91		
Sulawesi Utara	18,04	16,52	19,56	4,30	4,67	3,74	5,59	10,10		
Sulawesi Tengah	19,72	18,12	21,33	4,14	2,31	1,62	3,00	15,20		
Sulawesi Selatan	18,86	17,70	20,03	3,16	1,95	1,54	2,37	10,90		
Sulawesi Tenggara	17,45	16,03	18,88	4,16	2,26	1,58	2,94	15,33		
Gorontalo	21,36	19,42	23,31	4,65	3,06	2,21	3,92	14,21		
Sulawesi Barat	20,61	18,54	22,68	5,12	1,95	1,23	2,68	18,91		
Maluku	15,97	14,20	17,74	5,66	6,24	5,08	7,40	9,50		
Maluku Utara	18,99	17,23	20,75	4,72	3,22	2,43	4,01	12,53		
Papua Barat	16,98	15,20	18,76	5,34	4,41	3,57	5,25	9,74		
Papua	11,80	10,73	12,86	4,61	4,93	4,24	5,62	7,15		
Indonesia	22,37	22,07	22,66	0,68	2,38	2,27	2,50	2,46		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.40

Provinsi	Jumlah					Tidak Merokok				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	22,72	21,44	24,00	2,88	77,28	76,00	78,56	0,85		
Sumatera Utara	20,14	19,02	21,25	2,83	79,86	78,75	80,98	0,71		
Sumatera Barat	25,87	24,50	27,23	2,70	74,13	72,77	75,50	0,94		
Riau	21,79	20,35	23,22	3,36	78,21	76,78	79,65	0,94		
Jambi	24,96	23,46	26,46	3,06	75,04	73,54	76,54	1,02		
Sumatera Selatan	27,02	25,63	28,40	2,62	72,98	71,60	74,37	0,97		
Bengkulu	27,12	25,39	28,84	3,24	72,88	71,16	74,61	1,21		
Lampung	30,28	28,79	31,77	2,51	69,72	68,23	71,21	1,09		
Kep. Bangka Belitung	23,18	21,24	25,13	4,29	76,82	74,87	78,76	1,29		
Kepulauan Riau	22,04	18,68	25,40	7,77	77,96	74,60	81,32	2,20		
DKI Jakarta	18,57	16,89	20,25	4,62	81,43	79,75	83,11	1,05		
Jawa Barat	28,67	27,71	29,63	1,71	71,33	70,37	72,29	0,69		
Jawa Tengah	26,37	25,57	27,16	1,54	73,63	72,84	74,43	0,55		
DI Yogyakarta	24,29	21,89	26,69	5,03	75,71	73,31	78,11	1,62		
Jawa Timur	26,01	25,22	26,80	1,56	73,99	73,20	74,78	0,55		
Banten	25,60	23,86	27,35	3,47	74,40	72,65	76,14	1,19		
Bali	16,60	14,90	18,30	5,22	83,40	81,70	85,10	1,04		
Nusa Tenggara Barat	29,25	27,39	31,10	3,24	70,75	68,90	72,61	1,34		
Nusa Tenggara Timur	23,87	22,68	25,07	2,56	76,13	74,93	77,32	0,80		
Kalimantan Barat	21,99	20,63	23,34	3,14	78,01	76,66	79,37	0,88		
Kalimantan Tengah	21,93	20,36	23,51	3,67	78,07	76,49	79,64	1,03		
Kalimantan Selatan	19,48	17,92	21,03	4,07	80,52	78,97	82,08	0,98		
Kalimantan Timur	17,21	15,55	18,86	4,90	82,79	81,14	84,45	1,02		
Kalimantan Utara	20,00	17,21	22,78	7,10	80,00	77,22	82,79	1,78		
Sulawesi Utara	22,70	21,20	24,21	3,37	77,30	75,79	78,80	0,99		
Sulawesi Tengah	22,03	20,44	23,63	3,69	77,97	76,37	79,56	1,04		
Sulawesi Selatan	20,82	19,64	22,00	2,89	79,18	78,00	80,36	0,76		
Sulawesi Tenggara	19,71	18,30	21,13	3,66	80,29	78,87	81,70	0,90		
Gorontalo	24,42	22,59	26,26	3,83	75,58	73,74	77,41	1,24		
Sulawesi Barat	22,56	20,51	24,62	4,64	77,44	75,38	79,49	1,35		
Maluku	22,21	20,43	23,99	4,10	77,79	76,01	79,57	1,17		
Maluku Utara	22,21	20,41	24,01	4,13	77,79	75,99	79,59	1,18		
Papua Barat	21,39	19,48	23,30	4,55	78,61	76,70	80,52	1,24		
Papua	16,73	15,54	17,92	3,63	83,27	82,08	84,46	0,73		
Indonesia	24,75	24,45	25,05	0,62	75,25	74,95	75,55	0,20		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.41 Sampling Error Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau menurut Rata-Rata Jumlah Batang yang Dihisap per Hari, 2023

Provinsi	Rata-Rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap					1-3 Batang				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	12,42	11,70	13,13	2,94	10,28	8,18	12,38		10,41	
Sumatera Utara	12,56	11,93	13,18	2,55	11,60	9,18	14,02		10,65	
Sumatera Barat	13,68	12,64	14,71	3,85	9,43	7,46	11,41		10,70	
Riau	17,13	16,15	18,11	2,92	5,10	3,53	6,67		15,68	
Jambi	17,46	16,27	18,64	3,46	3,91	2,48	5,34		18,64	
Sumatera Selatan	13,23	12,45	14,01	3,00	7,51	5,65	9,36		12,61	
Bengkulu	14,51	13,64	15,38	3,08	4,08	2,58	5,57		18,73	
Lampung	13,64	13,10	14,18	2,00	4,50	3,37	5,64		12,87	
Kep. Bangka Belitung	15,22	14,34	16,10	2,96	3,00	1,24	4,77		29,97	
Kepulauan Riau	13,92	12,03	15,81	6,92	6,88	2,78	10,97		30,37	
DKI Jakarta	9,09	8,34	9,84	4,22	18,21	14,29	22,12		10,97	
Jawa Barat	10,28	9,93	10,63	1,75	11,21	9,75	12,66		6,61	
Jawa Tengah	10,07	9,69	10,45	1,92	12,61	11,30	13,92		5,29	
DI Yogyakarta	7,88	7,11	8,65	4,97	20,32	16,11	24,54		10,58	
Jawa Timur	10,73	10,37	11,09	1,71	8,88	7,73	10,03		6,59	
Banten	12,54	11,70	13,38	3,42	5,51	3,91	7,11		14,83	
Bali	10,67	9,89	11,45	3,71	11,90	8,84	14,96		13,12	
Nusa Tenggara Barat	10,56	9,74	11,39	3,98	10,57	8,14	13,00		11,71	
Nusa Tenggara Timur	8,00	7,44	8,56	3,56	28,70	25,74	31,66		5,26	
Kalimantan Barat	15,67	14,96	16,39	2,32	5,12	3,63	6,61		14,88	
Kalimantan Tengah	15,43	14,44	16,41	3,25	4,02	2,23	5,82		22,73	
Kalimantan Selatan	15,24	14,11	16,36	3,76	6,21	3,65	8,76		20,99	
Kalimantan Timur	14,80	13,80	15,80	3,45	7,70	4,24	11,16		22,92	
Kalimantan Utara	14,16	12,69	15,62	5,29	7,96	2,77	13,16		33,29	
Sulawesi Utara	11,12	10,12	12,12	4,59	13,98	11,02	16,93		10,79	
Sulawesi Tengah	14,07	12,56	15,58	5,48	14,19	10,38	18,00		13,70	
Sulawesi Selatan	13,48	12,82	14,15	2,51	7,66	5,51	9,80		14,28	
Sulawesi Tenggara	13,37	12,52	14,22	3,25	8,61	4,69	12,52		23,23	
Gorontalo	11,54	10,42	12,65	4,93	13,56	9,84	17,29		14,00	
Sulawesi Barat	16,78	15,06	18,50	5,23	5,67	3,36	7,97		20,77	
Maluku	6,61	5,79	7,43	6,32	39,85	34,35	45,34		7,03	
Maluku Utara	10,08	9,29	10,87	4,01	12,79	9,57	16,00		12,84	
Papua Barat	9,67	8,77	10,58	4,77	22,25	16,94	27,56		12,17	
Papua	8,93	8,13	9,74	4,60	25,05	21,83	28,27		6,56	
Indonesia	11,55	11,41	11,69	0,62	10,66	10,18	11,14		2,30	

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.41

Provinsi	4-6 Batang					7-12 Batang				
	Estimasi	Selang		Relative Standard Error	Estimasi	Selang		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	18,59	15,47	21,71	8,57	41,02	37,54	44,49	4,32		
Sumatera Utara	15,84	13,50	18,18	7,53	35,60	32,61	38,60	4,29		
Sumatera Barat	12,89	9,92	15,87	11,76	31,56	28,29	34,82	5,27		
Riau	7,85	5,82	9,88	13,20	22,37	18,89	25,85	7,94		
Jambi	5,51	3,74	7,27	16,38	24,20	20,84	27,56	7,08		
Sumatera Selatan	9,82	7,90	11,75	10,02	47,53	44,05	51,02	3,74		
Bengkulu	10,61	8,21	13,01	11,54	42,05	37,89	46,21	5,04		
Lampung	11,58	9,52	13,64	9,08	42,71	39,39	46,03	3,96		
Kep. Bangka Belitung	7,56	4,75	10,37	18,95	28,97	23,63	34,32	9,41		
Kepulauan Riau	12,35	6,16	18,54	25,57	36,91	27,58	46,23	12,89		
DKI Jakarta	27,04	22,20	31,88	9,13	41,10	35,64	46,55	6,77		
Jawa Barat	25,79	23,91	27,68	3,73	48,75	46,49	51,02	2,37		
Jawa Tengah	28,28	26,57	29,99	3,09	44,71	42,81	46,61	2,17		
DI Yogyakarta	37,64	31,45	43,83	8,39	32,83	27,10	38,57	8,92		
Jawa Timur	24,24	22,48	26,00	3,70	51,75	49,66	53,85	2,07		
Banten	15,86	13,01	18,72	9,19	51,30	47,14	55,45	4,13		
Bali	21,57	17,39	25,76	9,90	36,59	31,21	41,97	7,50		
Nusa Tenggara Barat	25,69	22,09	29,29	7,14	43,65	39,16	48,14	5,25		
Nusa Tenggara Timur	29,17	26,46	31,87	4,73	27,64	24,80	30,48	5,25		
Kalimantan Barat	6,65	5,03	8,27	12,41	26,49	23,39	29,59	5,97		
Kalimantan Tengah	6,47	4,54	8,41	15,25	33,87	29,77	37,97	6,18		
Kalimantan Selatan	9,16	6,66	11,67	13,95	29,31	25,71	32,90	6,26		
Kalimantan Timur	9,15	6,20	12,10	16,44	28,97	24,19	33,76	8,43		
Kalimantan Utara	8,16	2,50	13,83	35,39	32,83	25,87	39,78	10,81		
Sulawesi Utara	19,25	15,95	22,54	8,74	34,20	30,15	38,26	6,05		
Sulawesi Tengah	11,75	9,14	14,35	11,31	26,28	22,62	29,95	7,11		
Sulawesi Selatan	14,95	11,84	18,07	10,63	29,49	26,44	32,55	5,29		
Sulawesi Tenggara	13,69	9,88	17,51	14,21	26,98	22,71	31,25	8,07		
Gorontalo	19,62	15,95	23,30	9,56	33,22	28,73	37,70	6,89		
Sulawesi Barat	9,30	6,19	12,41	17,06	23,24	18,23	28,25	11,00		
Maluku	26,95	22,51	31,38	8,40	19,92	16,24	23,60	9,42		
Maluku Utara	25,64	21,45	29,84	8,35	36,73	32,05	41,41	6,49		
Papua Barat	21,10	17,03	25,17	9,83	24,78	20,86	28,70	8,07		
Papua	27,25	23,69	30,80	6,66	23,04	19,36	26,72	8,15		
Indonesia	20,93	20,30	21,57	1,55	42,15	41,37	42,93	0,94		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.41

Provinsi	13-24 Batang					25 Batang atau Lebih				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Aceh	24,05	21,23	26,88	5,99	6,07	4,56	7,57	12,62		
Sumatera Utara	30,97	28,23	33,70	4,51	5,99	4,21	7,78	15,20		
Sumatera Barat	41,14	37,33	44,95	4,72	4,97	3,25	6,69	17,65		
Riau	55,78	51,77	59,79	3,67	8,90	6,58	11,22	13,30		
Jambi	58,57	54,55	62,60	3,50	7,81	5,31	10,31	16,31		
Sumatera Selatan	29,62	26,60	32,63	5,19	5,51	3,75	7,28	16,37		
Bengkulu	37,57	33,50	41,64	5,52	5,69	3,77	7,61	17,22		
Lampung	37,09	33,79	40,39	4,53	4,12	2,98	5,25	14,11		
Kep. Bangka Belitung	54,46	48,84	60,09	5,27	6,00	3,75	8,25	19,14		
Kepulauan Riau	35,48	26,67	44,29	12,67	8,39	2,95	13,82	33,07		
DKI Jakarta	11,20	7,75	14,65	15,71	2,45	1,04	3,87	29,47		
Jawa Barat	11,14	9,66	12,62	6,77	3,11	2,35	3,86	12,45		
Jawa Tengah	10,72	9,50	11,94	5,79	3,68	2,80	4,57	12,27		
DI Yogyakarta	6,91	4,38	9,45	18,74	2,29	0,96	3,63	29,70		
Jawa Timur	11,52	10,25	12,80	5,65	3,60	2,85	4,35	10,66		
Banten	23,15	19,48	26,82	8,09	4,18	2,32	6,04	22,68		
Bali	28,24	22,95	33,52	9,55	1,70	0,69	2,72	30,37		
Nusa Tenggara Barat	14,74	11,77	17,71	10,28	5,35	3,16	7,54	20,90		
Nusa Tenggara Timur	11,81	9,67	13,96	9,26	2,68	1,68	3,68	19,04		
Kalimantan Barat	54,08	50,30	57,86	3,57	7,66	5,12	10,19	16,89		
Kalimantan Tengah	49,18	44,99	53,38	4,35	6,45	4,11	8,79	18,52		
Kalimantan Selatan	49,86	45,55	54,16	4,41	5,46	3,04	7,88	22,61		
Kalimantan Timur	48,61	42,69	54,54	6,21	5,56	3,20	7,92	21,66		
Kalimantan Utara	45,71	36,96	54,45	9,76	5,34	2,42	8,26	27,89		
Sulawesi Utara	27,65	23,55	31,74	7,56	4,93	2,91	6,94	20,84		
Sulawesi Tengah	40,32	35,63	45,01	5,94	7,46	4,42	10,49	20,76		
Sulawesi Selatan	42,96	39,57	46,35	4,03	4,93	3,69	6,17	12,87		
Sulawesi Tenggara	46,82	41,78	51,86	5,49	3,90	2,36	5,43	20,12		
Gorontalo	28,70	23,62	33,79	9,04	4,89	2,40	7,38	25,97		
Sulawesi Barat	54,03	47,95	60,11	5,74	7,77	3,81	11,73	26,01		
Maluku	10,54	7,24	13,84	15,98	2,75	1,26	4,24	27,69		
Maluku Utara	20,68	16,03	25,32	11,46	4,16	2,11	6,22	25,16		
Papua Barat	27,98	23,29	32,66	8,54	3,89	0,96	6,82	38,48		
Papua	21,22	17,79	24,65	8,24	3,44	2,04	4,84	20,75		
Indonesia	21,98	21,39	22,57	1,36	4,27	3,96	4,58	3,71		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.42 Sampling Error Persentase Pemuda menurut Provinsi yang Merokok Sebelum Sebulan Terakhir, 2023

Provinsi	Merokok Setiap Hari				Merokok Tidak Setiap Hari			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18,88	17,63	20,13	3,38	2,78	2,26	3,30	9,52
Sumatera Utara	17,27	16,21	18,33	3,14	1,78	1,44	2,11	9,58
Sumatera Barat	22,56	21,19	23,94	3,11	2,62	1,86	3,38	14,83
Riau	19,23	17,85	20,60	3,65	1,65	1,18	2,13	14,57
Jambi	21,45	19,98	22,92	3,49	2,14	1,64	2,65	12,08
Sumatera Selatan	22,56	21,18	23,95	3,13	2,50	1,96	3,04	11,07
Bengkulu	23,48	21,78	25,17	3,69	1,54	1,15	1,94	13,09
Lampung	26,33	24,85	27,81	2,87	2,18	1,65	2,71	12,35
Kep. Bangka Belitung	20,72	18,86	22,59	4,58	1,58	0,92	2,24	21,20
Kepulauan Riau	19,08	15,93	22,24	8,43	2,60	1,32	3,88	25,05
DKI Jakarta	15,03	13,40	16,65	5,52	2,46	1,70	3,22	15,72
Jawa Barat	24,25	23,28	25,23	2,05	2,68	2,26	3,09	7,97
Jawa Tengah	22,70	21,91	23,50	1,79	2,84	2,52	3,16	5,72
DI Yogyakarta	20,77	18,24	23,30	6,22	3,36	2,31	4,41	15,95
Jawa Timur	21,94	21,14	22,73	1,84	2,27	1,99	2,54	6,17
Banten	22,18	20,44	23,91	3,99	2,21	1,62	2,80	13,57
Bali	14,71	13,05	16,37	5,76	1,66	1,17	2,15	15,00
Nusa Tenggara Barat	24,10	22,29	25,91	3,83	3,73	2,82	4,64	12,44
Nusa Tenggara Timur	17,43	16,28	18,58	3,35	5,76	5,07	6,45	6,13
Kalimantan Barat	19,46	18,08	20,83	3,60	1,47	1,04	1,89	14,83
Kalimantan Tengah	19,28	17,79	20,77	3,94	2,17	1,55	2,78	14,39
Kalimantan Selatan	17,36	15,84	18,88	4,46	1,75	1,19	2,30	16,24
Kalimantan Timur	14,68	13,11	16,26	5,47	2,14	1,32	2,96	19,54
Kalimantan Utara	17,47	14,87	20,08	7,61	1,78	0,92	2,64	24,72
Sulawesi Utara	15,69	14,23	17,15	4,75	5,08	4,07	6,10	10,18
Sulawesi Tengah	18,27	16,72	19,82	4,33	2,63	1,90	3,37	14,30
Sulawesi Selatan	17,88	16,73	19,03	3,29	1,91	1,51	2,32	10,75
Sulawesi Tenggara	16,38	14,97	17,79	4,39	2,12	1,56	2,69	13,55
Gorontalo	20,09	18,18	22,00	4,85	3,92	2,96	4,87	12,42
Sulawesi Barat	19,16	17,03	21,29	5,67	2,36	1,60	3,12	16,44
Maluku	14,50	12,82	16,18	5,91	6,30	5,02	7,57	10,31
Maluku Utara	17,05	15,34	18,76	5,12	3,56	2,63	4,48	13,28
Papua Barat	15,19	13,57	16,82	5,47	4,96	3,99	5,92	9,93
Papua	10,77	9,77	11,76	4,71	5,19	4,50	5,88	6,78
Indonesia	20,90	20,60	21,20	0,73	2,58	2,46	2,70	2,37

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.42

Provinsi	Jumlah					Tidak Merokok				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	21,66	20,39	22,93	2,98	78,34	77,07	79,61	0,82		
Sumatera Utara	19,04	17,94	20,15	2,95	80,96	79,85	82,06	0,69		
Sumatera Barat	25,18	23,80	26,56	2,79	74,82	73,44	76,20	0,94		
Riau	20,88	19,46	22,30	3,46	79,12	77,70	80,54	0,91		
Jambi	23,59	22,10	25,09	3,23	76,41	74,91	77,90	1,00		
Sumatera Selatan	25,07	23,66	26,48	2,87	74,93	73,52	76,34	0,96		
Bengkulu	25,02	23,30	26,74	3,51	74,98	73,26	76,70	1,17		
Lampung	28,51	27,01	30,01	2,68	71,49	69,99	72,99	1,07		
Kep. Bangka Belitung	22,31	20,39	24,22	4,39	77,69	75,78	79,61	1,26		
Kepulauan Riau	21,69	18,30	25,07	7,96	78,31	74,93	81,70	2,21		
DKI Jakarta	17,49	15,81	19,17	4,89	82,51	80,83	84,19	1,04		
Jawa Barat	26,93	25,93	27,93	1,90	73,07	72,07	74,07	0,70		
Jawa Tengah	25,55	24,74	26,36	1,62	74,45	73,64	75,26	0,55		
DI Yogyakarta	24,13	21,60	26,66	5,35	75,87	73,34	78,40	1,70		
Jawa Timur	24,20	23,40	25,00	1,69	75,80	75,00	76,60	0,54		
Banten	24,39	22,64	26,14	3,66	75,61	73,86	77,36	1,18		
Bali	16,36	14,66	18,07	5,30	83,64	81,93	85,34	1,04		
Nusa Tenggara Barat	27,83	25,99	29,68	3,39	72,17	70,32	74,01	1,31		
Nusa Tenggara Timur	23,19	22,00	24,38	2,62	76,81	75,62	78,00	0,79		
Kalimantan Barat	20,93	19,56	22,29	3,33	79,07	77,71	80,44	0,88		
Kalimantan Tengah	21,44	19,88	23,01	3,73	78,56	76,99	80,12	1,02		
Kalimantan Selatan	19,11	17,53	20,68	4,20	80,89	79,32	82,47	0,99		
Kalimantan Timur	16,82	15,13	18,51	5,11	83,18	81,49	84,87	1,03		
Kalimantan Utara	19,25	16,48	22,03	7,35	80,75	77,97	83,52	1,75		
Sulawesi Utara	20,77	19,24	22,30	3,76	79,23	77,70	80,76	0,99		
Sulawesi Tengah	20,90	19,30	22,51	3,91	79,10	77,49	80,70	1,03		
Sulawesi Selatan	19,79	18,64	20,94	2,97	80,21	79,06	81,36	0,73		
Sulawesi Tenggara	18,51	17,11	19,90	3,85	81,49	80,10	82,89	0,87		
Gorontalo	24,00	22,17	25,83	3,89	76,00	74,17	77,83	1,23		
Sulawesi Barat	21,52	19,43	23,61	4,96	78,48	76,39	80,57	1,36		
Maluku	20,80	19,01	22,59	4,39	79,20	77,41	80,99	1,15		
Maluku Utara	20,61	18,83	22,38	4,39	79,39	77,62	81,17	1,14		
Papua Barat	20,15	18,27	22,03	4,76	79,85	77,97	81,73	1,20		
Papua	15,96	14,81	17,11	3,68	84,04	82,89	85,19	0,70		
Indonesia	23,48	23,18	23,79	0,66	76,52	76,21	76,82	0,20		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.43 Sampling Error Persentase Pemuda menurut Provinsi yang Pernah Merokok (Sebulan Terakhir maupun Sebelum Sebulan Terakhir), 2023

Provinsi	Merokok Sebelum dan Sebulan Terakhir					Merokok Sebulan Terakhir Saja				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Aceh	20,79	19,55	22,04	3,06	1,93	1,44	2,42		12,86	
Sumatera Utara	18,73	17,64	19,82	2,97	1,41	1,08	1,74		11,95	
Sumatera Barat	24,47	23,12	25,81	2,80	1,40	0,98	1,82		15,20	
Riau	20,53	19,11	21,95	3,52	1,26	0,90	1,62		14,50	
Jambi	23,27	21,79	24,76	3,25	1,69	1,12	2,26		17,25	
Sumatera Selatan	24,51	23,12	25,89	2,88	2,51	1,85	3,17		13,35	
Bengkulu	24,67	22,96	26,38	3,54	2,45	1,67	3,23		16,25	
Lampung	27,90	26,39	29,41	2,76	2,37	1,83	2,92		11,70	
Kep. Bangka Belitung	22,11	20,20	24,01	4,40	1,08	0,56	1,60		24,70	
Kepulauan Riau	21,04	17,71	24,37	8,08	1,00	0,25	1,75		38,14	
DKI Jakarta	16,78	15,17	18,40	4,90	1,78	1,18	2,38		17,25	
Jawa Barat	26,25	25,28	27,22	1,88	2,42	2,06	2,77		7,52	
Jawa Tengah	24,98	24,18	25,78	1,63	1,39	1,17	1,61		8,12	
DI Yogyakarta	23,35	20,92	25,78	5,32	0,94	0,24	1,64		37,92	
Jawa Timur	23,81	23,01	24,61	1,71	2,20	1,89	2,51		7,18	
Banten	23,70	22,03	25,36	3,58	1,90	1,35	2,45		14,73	
Bali	15,80	14,12	17,48	5,43	0,80	0,42	1,18		24,40	
Nusa Tenggara Barat	27,26	25,39	29,14	3,50	1,98	1,38	2,59		15,59	
Nusa Tenggara Timur	22,59	21,40	23,78	2,69	1,29	0,95	1,62		13,46	
Kalimantan Barat	20,36	19,02	21,70	3,36	1,63	1,12	2,14		16,02	
Kalimantan Tengah	20,99	19,44	22,55	3,78	0,94	0,59	1,29		18,97	
Kalimantan Selatan	18,45	16,90	20,01	4,29	1,02	0,61	1,43		20,42	
Kalimantan Timur	16,26	14,60	17,93	5,21	0,94	0,56	1,32		20,59	
Kalimantan Utara	18,65	15,87	21,43	7,61	1,35	0,63	2,07		27,32	
Sulawesi Utara	20,08	18,57	21,59	3,84	2,63	1,93	3,32		13,51	
Sulawesi Tengah	20,47	18,89	22,06	3,95	1,56	1,07	2,05		16,08	
Sulawesi Selatan	19,45	18,30	20,60	3,02	1,37	0,98	1,75		14,34	
Sulawesi Tenggara	18,22	16,83	19,61	3,88	1,49	0,97	2,01		17,82	
Gorontalo	23,23	21,41	25,06	4,01	1,19	0,56	1,82		27,04	
Sulawesi Barat	21,03	18,93	23,12	5,09	1,54	0,91	2,16		20,72	
Maluku	20,12	18,36	21,87	4,44	2,09	1,24	2,94		20,73	
Maluku Utara	20,08	18,33	21,84	4,45	2,13	1,54	2,72		14,15	
Papua Barat	19,75	17,94	21,56	4,69	1,64	1,04	2,24		18,66	
Papua	15,29	14,16	16,42	3,76	1,43	1,04	1,82		13,89	
Indonesia	22,93	22,63	23,23	0,66	1,82	1,72	1,93	2,90		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Lanjutan Tabel 4.43

Provinsi	Merokok Sebelum Sebulan Terakhir Saja					Tidak Pernah Merokok				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Aceh	0,87	0,56	1,17	18,11	76,41	75,09	77,73	0,88		
Sumatera Utara	0,31	0,19	0,44	19,95	79,55	78,42	80,68	0,72		
Sumatera Barat	0,72	0,42	1,02	21,31	73,41	72,02	74,81	0,97		
Riau	0,35	0,15	0,56	29,71	77,86	76,43	79,30	0,94		
Jambi	0,32	0,14	0,50	28,12	74,72	73,21	76,22	1,03		
Sumatera Selatan	0,56	0,30	0,82	23,79	72,42	71,01	73,84	1,00		
Bengkulu	0,35	0,13	0,58	32,39	72,53	70,79	74,26	1,22		
Lampung	0,61	0,33	0,89	23,37	69,12	67,64	70,59	1,09		
Kep. Bangka Belitung	0,20	0,01	0,39	48,03	76,62	74,66	78,58	1,31		
Kepulauan Riau	0,64	0,05	1,24	47,35	77,31	73,91	80,71	2,24		
DKI Jakarta	0,71	0,29	1,12	29,83	80,73	78,97	82,49	1,11		
Jawa Barat	0,68	0,45	0,91	17,37	70,65	69,66	71,65	0,72		
Jawa Tengah	0,57	0,42	0,72	13,63	73,06	72,26	73,87	0,56		
DI Yogyakarta	0,78	0,37	1,19	26,76	74,93	72,44	77,42	1,70		
Jawa Timur	0,39	0,26	0,52	16,68	73,60	72,81	74,39	0,55		
Banten	0,69	0,38	1,00	22,93	73,71	71,87	75,54	1,27		
Bali	0,57	0,26	0,87	27,64	82,83	81,10	84,57	1,07		
Nusa Tenggara Barat	0,57	0,20	0,94	33,38	70,18	68,35	72,02	1,33		
Nusa Tenggara Timur	0,60	0,36	0,85	21,00	75,52	74,32	76,72	0,81		
Kalimantan Barat	0,57	0,31	0,82	23,02	77,45	76,07	78,82	0,91		
Kalimantan Tengah	0,45	0,21	0,70	27,62	77,62	76,03	79,20	1,04		
Kalimantan Selatan	0,65	0,42	0,89	18,24	79,87	78,30	81,44	1,01		
Kalimantan Timur	0,56	0,24	0,88	29,41	82,24	80,56	83,92	1,04		
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	53,91	79,40	76,63	82,17	1,78		
Sulawesi Utara	0,70	0,40	1,00	21,81	76,60	75,07	78,13	1,02		
Sulawesi Tengah	0,43	0,21	0,65	26,00	77,53	75,92	79,15	1,06		
Sulawesi Selatan	0,34	0,21	0,48	19,77	78,84	77,66	80,02	0,76		
Sulawesi Tenggara	0,29	0,15	0,42	24,92	80,00	78,58	81,43	0,91		
Gorontalo	0,77	0,37	1,18	26,77	74,80	72,90	76,70	1,30		
Sulawesi Barat	0,49	0,16	0,82	34,35	76,94	74,90	78,99	1,35		
Maluku	0,68	0,32	1,04	26,97	77,11	75,30	78,92	1,20		
Maluku Utara	0,52	0,22	0,83	29,51	77,27	75,45	79,08	1,20		
Papua Barat	0,40	0,13	0,67	34,34	78,21	76,24	80,18	1,28		
Papua	0,67	0,46	0,88	16,00	82,60	81,39	83,82	0,75		
Indonesia	0,56	0,49	0,62	5,57	74,69	74,39	75,00	0,21		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

<https://www.bps.go.id>



Bab 5. Ketenagakerjaan



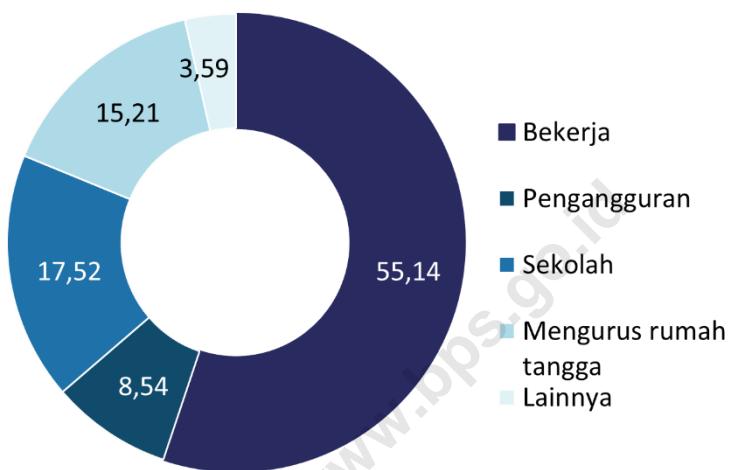
Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi negara dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan ekonomi dengan dukungan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif. Sebagai bagian dari penduduk usia produktif, pemuda berperan penting dalam menyumbang kemajuan ekonomi. Partisipasi pemuda dalam ketenagakerjaan memberikan gambaran kontribusi mereka yang tidak dapat dipisahkan dalam perekonomian. Bab ini membahas mengenai kondisi dan karakteristik ketenagakerjaan pemuda yang meliputi aktivitas dan produktivitas pemuda dalam kegiatan ekonomi termasuk di antaranya tingkat pengangguran pemuda. Selain itu, bab ini juga menyajikan profil pekerjaan pemuda yang dilihat dari latar belakang pendidikan pemuda bekerja dan beberapa indikator pekerjaan layak.

5.1 Aktivitas Pemuda

Undang-undang kepemudaan mengelompokkan pemuda pada rentang usia 16-30 tahun, dimana periode usia tersebut mencakup usia sekolah dan usia kerja. Tidak heran apabila mayoritas pemuda akan lebih terkonsentrasi pada kegiatan pendidikan ataupun aktivitas ekonomi (bekerja/mencari kerja). Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi (BPS 2023a).

Hasil Sakernas Agustus 2023 sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda bekerja (55,14 persen). Namun demikian, masih terdapat sekitar 8,54 persen pemuda berstatus pengangguran. Pemuda yang masuk dalam kategori menganggur di antaranya yang sedang dalam proses mencari kerja, mempersiapkan usaha, pemuda yang putus asa, dan

pemuda yang sudah diterima kerja namun belum memulai bekerja. Di lain sisi, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi, namun tidak bekerja. Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat bahwa sekitar 17,52 persen pemuda memiliki aktivitas utama bersekolah dan sebanyak 15,21 persen pemuda menghabiskan waktu terbanyak untuk mengurus rumah tangga.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.1 Jenis Kegiatan Utama Pemuda, 2023

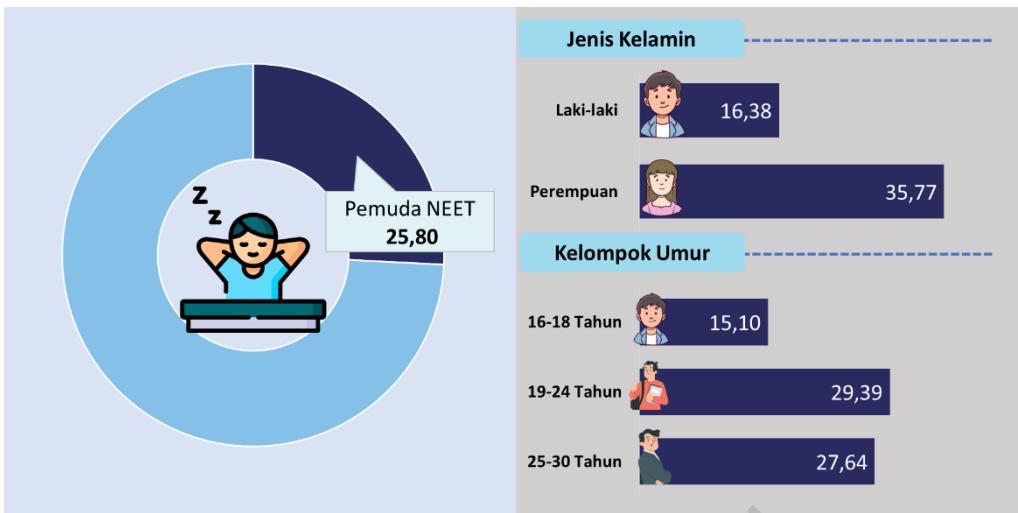
Aktivitas pendidikan dan bekerja dipandang sebagai kegiatan produktif karena memberikan nilai tambah secara ekonomi. Dengan bekerja, pemuda dapat memperoleh upah/pendapatan. Sementara itu, dengan menempuh pendidikan, pemuda diharapkan akan mendapat pengembalian penghasilan pada saat bekerja nanti. Hal tersebut sesuai dengan asumsi dasar teori *Human Capital* bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan (Atmanti, 2005).

Sebaliknya, pemuda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja dianggap tidak produktif karena potensinya tidak diberdayakan. Kondisi ini dimonitor dalam salah satu indikator dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (*Not in Employment, Education, and Training/NEET*). Dengan kata lain, NEET menggambarkan penduduk usia muda

(15-24 tahun) yang tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/pelatihan/kursus/training) atau tidak terserap pasar kerja. Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 25,80 persen, dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 26,82 persen (BPS 2022).

Penggunaan indikator NEET dinilai lebih komprehensif dibandingkan dengan tingkat pengangguran karena dapat melihat dinamika dan keaktifan pemuda dalam pasar tenaga kerja (Anggraini 2020). Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, pemuda yang berstatus NEET sebesar 25,80 persen. Artinya, setidaknya terdapat 25 dari 100 pemuda tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun tidak sedang mengikuti pelatihan/kursus/training. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat disparitas yang cukup lebar antara pemuda laki-laki dan perempuan yang berstatus NEET. Persentase pemuda perempuan yang tergolong NEET adalah dua kaliya persentase pemuda laki-laki yang tergolong NEET (35,77 persen berbanding 16,38 persen). Hal tersebut dapat dimungkinkan mengingat pemuda perempuan tengah berada pada masa reproduktif (usia subur) sehingga banyak yang sudah menikah dan berumah tangga (Adioetomo & Indrayanti 2018). Lebih jauh, hal tersebut didukung oleh pendapat Ehrenberg dan Smith (2012) yang menyatakan bahwa perempuan sebagai istri akan lebih mempertimbangkan kepentingan keluarga ketika memutuskan untuk masuk ke pasar kerja atau melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan kelompok umur, 19-24 tahun menjadi kelompok pemuda yang banyak berstatus NEET (29,39 persen). Pada umur 19-24 tahun, pemuda cenderung telah menyelesaikan pendidikan formal dan menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada usia 16-18 tahun sebanyak 15,10 persen pemuda berstatus NEET. Proporsi terendah dibanding kelompok umur lainnya, namun yang perlu diperhatikan bahwa pada kelompok ini seharusnya pemuda sedang mengenyam pendidikan formal, setidaknya pada jenjang pendidikan menengah atas. Sehingga angka ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena terdapat sejumlah 15 dari 100 orang pemuda pada usia 16-18 tahun yang sudah tidak sedang bersekolah, bekerja, maupun sedang mengikuti kursus.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.2 Pemuda Not in Employment, Education, and Training (NEET) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2023

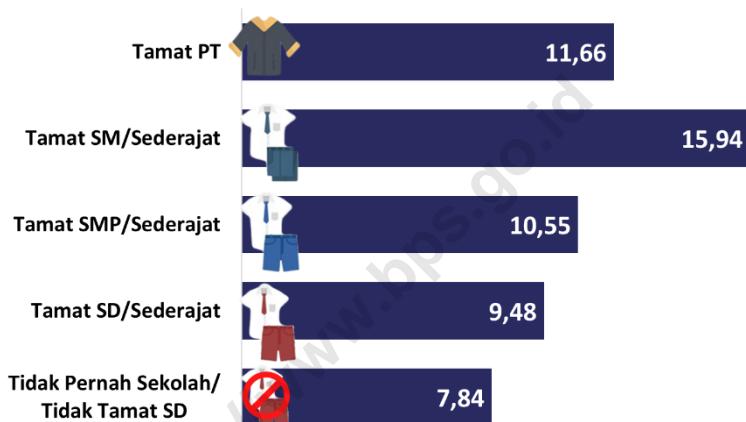
Pemuda yang sedang menganggur, termasuk yang mencari pekerjaan, merupakan bagian dari pemuda NEET. Indikator yang digunakan untuk dapat mengukur besarnya angkatan kerja pemuda yang menjadi pengangguran disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda. TPT umumnya digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah, menggambarkan tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan, atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, TPT pemuda tercatat sekitar 13,41 persen. Artinya, sekitar 13 dari 100 pemuda yang masuk dalam angkatan kerja, tidak terserap dalam pasar kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016-2023

Gambar 5.3 Perkembangan TPT Pemuda, 2016-2023

Gambar 5.3 menunjukkan perkembangan TPT periode 2016-2023. Terlihat bahwa pada tahun 2023 TPT pemuda dan TPT semua kelompok umur mengalami penurunan seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang mulai membaik pasca pandemi Covid-19. Namun, pola TPT pemuda selalu lebih tinggi dari TPT semua kelompok umur dan konsisten setiap tahun. Masih tingginya pengangguran pemuda membuat daya saing pemuda belum mencapai posisi yang optimal. Salah satu penyebab tingginya TPT pemuda adalah rendahnya daya saing pemuda di pasar kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2023

Tingginya TPT pemuda mengindikasikan kurangnya potensi meraih keuntungan ekonomi. Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan (Gambar 5.4), TPT pemuda tertinggi terjadi pada kelompok pemuda tamatan Sekolah Menengah (SM) (15,94 persen), diikuti pemuda tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (10,55 persen), kemudian tamatan Perguruan Tinggi (PT) (11,66 persen). Umumnya, pemuda dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki daya tawar dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi pendidikan dan penawaran gaji yang lebih baik, atau dengan kata lain mereka memiliki kesempatan untuk memilih pekerjaan. Faktanya, tidak semua pemuda lulusan Sekolah Menengah ke atas dapat tertampung di dunia kerja, sehingga pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah

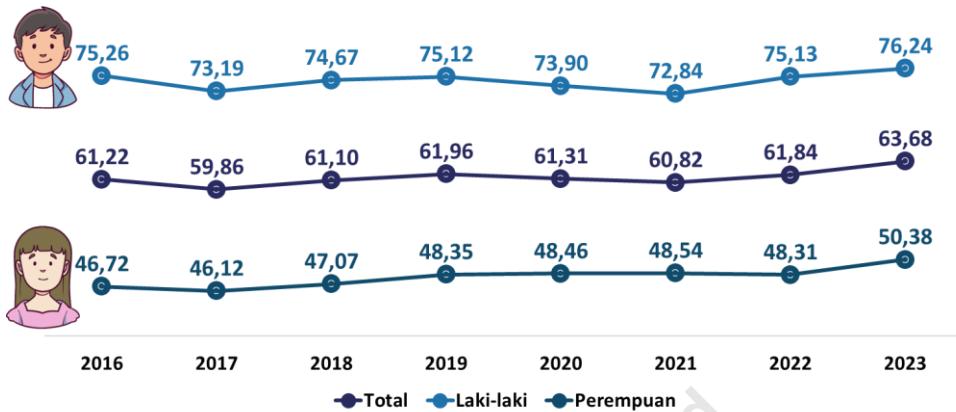
pengangguran terdidik. Tingginya tingkat pengangguran pada pemuda terdidik tersebut menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan berpotensi menjadi ancaman di era bonus demografi. Kondisi berbeda dialami oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Mereka pada umumnya akan menerima segala macam pekerjaan yang dapat memberi penghasilan, sehingga tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan SMP/sederajat ke bawah cenderung lebih rendah.

5.2 Pemuda dalam Pasar Kerja

Angkatan kerja mewakili penawaran tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin besar angkatan kerja maka diharapkan akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda menunjukkan seberapa besar pasokan tenaga kerja pemuda (*youth labour supply*) yang tersedia untuk menyokong kegiatan perekonomian. TPAK pemuda merupakan perbandingan antara pemuda angkatan kerja (jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang bekerja dan pemuda yang menganggur) terhadap jumlah seluruh pemuda (penduduk usia 16-30 tahun).

Hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan TPAK pemuda pada tahun 2023 sebesar 63,68 persen (Gambar 5.5). Artinya, dari 100 orang pemuda, setidaknya 63 orang diantaranya siap masuk pasar kerja. Dalam periode 2016-2023 pergerakan nilai TPAK pemuda relatif stabil di sekitar angka 60 persen. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat kesenjangan antara TPAK pemuda laki-laki dengan perempuan yang cukup lebar. Pemuda laki-laki masih mendominasi dengan memberikan kontribusi lebih besar terhadap TPAK pemuda. Capaian TPAK pemuda laki-laki secara konsisten berada pada nilai lebih dari 70 persen dalam kurun beberapa tahun terakhir, dengan capaian di tahun 2023 sebesar 76,24 persen. Di sisi lain, TPAK pemuda perempuan secara konsisten berada jauh di bawah TPAK pemuda laki-laki yaitu sebesar 50,38 persen pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pemahaman bahwa kodrat wanita untuk lebih banyak melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, apalagi setelah memasuki gerbang pernikahan atau setelah memiliki anak,

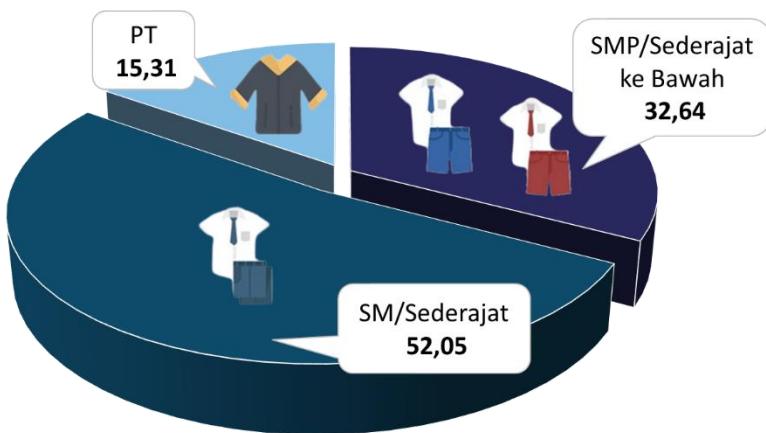
sehingga menyebabkan TPAK pemuda perempuan masih jauh lebih rendah dibanding TPAK pemuda laki-laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016-2023

Gambar 5.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda, 2016-2023

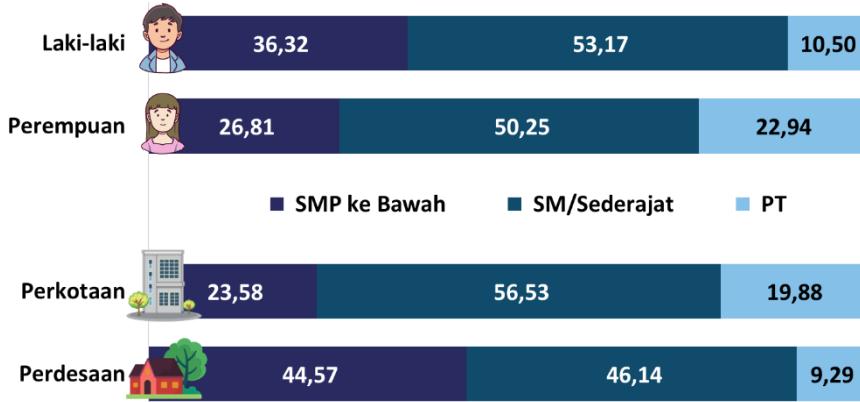
Pemuda yang produktif secara ekonomi ditandai dari aktivitas ekonominya, yakni bekerja. Pemuda dengan kondisi kerja yang baik tentu memberikan nilai pengembalian ekonomi yang tinggi. Gambar 5.6 memperlihatkan pemuda yang bekerja ditinjau dari tingkat pendidikannya. Pemuda bekerja didominasi oleh pemuda yang tamat SM/sederajat sebesar 52,05 persen, sementara persentase pemuda bekerja yang tamat Perguruan Tinggi hanya sebesar 15,31 persen. Fenomena ini dimungkinkan karena secara komposisi, pemuda memang didominasi oleh tamatan SM/sederajat (40,01 persen) dibandingkan Perguruan Tinggi (11,25 persen), seperti yang tertuang pada Bab 3, Gambar 3.5.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.6 Persentase Pemuda Bekerja menurut Tingkat Pendidikan, 2023

Jika dilihat menurut tipe daerah, terdapat perbedaan pada pola tingkat pendidikan antara pemuda bekerja di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, pemuda bekerja didominasi oleh pemuda berpendidikan yang merupakan tamatan Sekolah Menengah/sederajat. Lebih dari separuh (56,53 persen) pemuda bekerja di perkotaan merupakan tamatan Sekolah Menengah/sederajat diikuti 19,88 persen pemuda tamat Perguruan Tinggi. Kondisi yang cukup kontradiktif terlihat di perdesaan, dimana persentase pemuda bekerja yang tamatan SMP/sederajat ke bawah masih tinggi (44,57 persen), sebesar dua kali persentase pemuda tamatan SMP ke bawah yang bekerja di perkotaan. Sementara itu, pemuda bekerja yang lulusan Sekolah Menengah/sederajat di perdesaan sebesar 46,14 persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi yang bekerja hanya 9,29 persen.

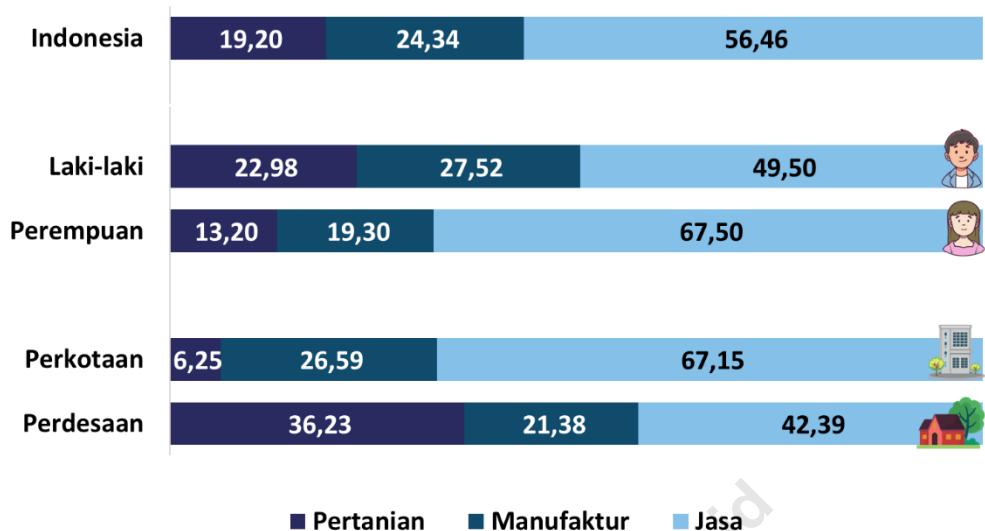


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.7 Pemuda Bekerja menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebelumnya telah digambarkan bahwa TPAK pemuda perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pemuda laki-laki, faktanya pemuda perempuan yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.7. Kondisi tersebut mengindikasikan pemuda perempuan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk bekerja, namun mereka yang terserap dalam pasar kerja memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari pemuda laki-laki.

Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi beberapa sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda. Berdasarkan strukturnya, lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat dikategorikan sebagai lapangan usaha pertanian, sedangkan lapangan usaha manufaktur terdiri dari sektor pertambangan, industri, listrik, dan konstruksi. Adapun untuk lapangan usaha jasa terdiri dari sektor perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa kemasyarakatan.

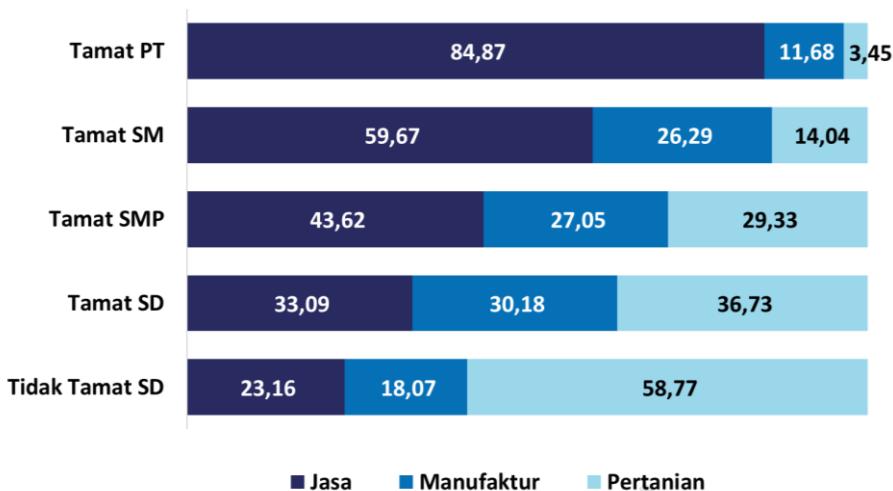


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.8 Pemuda Bekerja menurut Lapangan Usaha, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Gambar 5.8 memperlihatkan struktur lapangan usaha pekerjaan utama pemuda yang bekerja dalam tiga sektor. Lebih dari separuh (56,46 persen) pemuda bekerja berada pada sektor jasa. Berdasarkan tipe daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan, mayoritas pemuda bekerja di sektor jasa. Namun pemuda di perdesaan yang bekerja di sektor pertanian juga masih tinggi, lima kali dibandingkan di perkotaan (36,23 persen). Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan paling banyak bekerja di sektor jasa (49,50 persen dan 67,50 persen).

Apabila ditarik benang merah antara tingkat pendidikan dan lapangan usaha pekerjaan pemuda, terlihat pola bahwa semakin tinggi pendidikan, pemuda cenderung lebih mendominasi pekerjaan di sektor jasa. Sebaliknya, pekerjaan di sektor pertanian didominasi oleh pemuda dengan jenjang pendidikan yang rendah. Sebuah fenomena yang sangat disayangkan mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun tidak diminati oleh para pemuda sebagai generasi penerusnya.



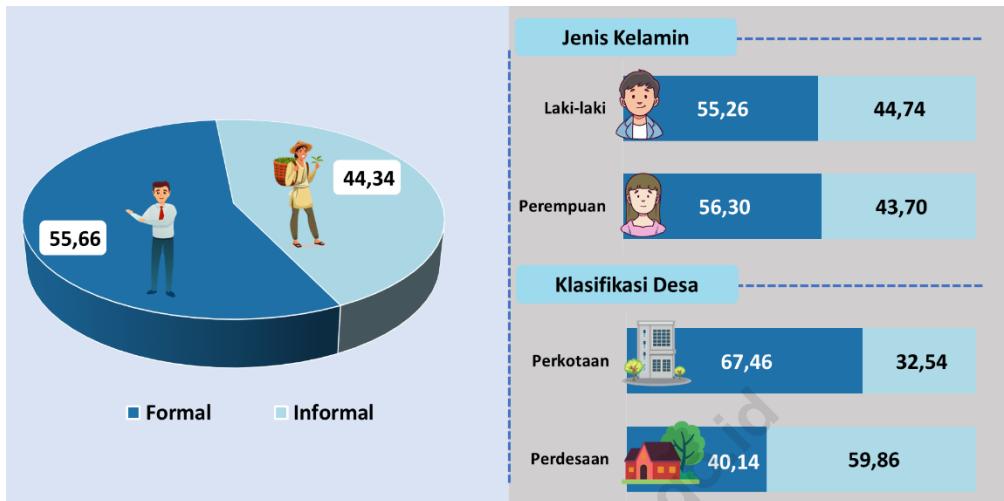
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.9 Persentase Pemuda Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan, 2023

Selanjutnya, struktur pekerjaan pemuda pada sektor formal dan informal dapat dianalisis melalui komposisi status pekerjaannya. Pekerja formal umumnya identik dengan status pekerjaan yang layak dengan tingkat upah yang lebih besar dan risiko pemberhentian kerja yang kecil. Pekerja formal terdiri dari pekerja dengan status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Di sisi lain, pemuda yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, pekerja keluarga/tidak dibayar, serta pekerja bebas di pertanian dan non pertanian, dikategorikan sebagai pekerja informal.

Secara umum, status pekerjaan pemuda pada sektor formal lebih tinggi dibanding sektor informal. Lebih dari separuh pemuda (55,66 persen) bekerja pada sektor formal, sisanya sebesar 44,34 persen pemuda bekerja pada sektor informal. Jika dilihat menurut klasifikasi desa, struktur lapangan pekerjaan terlihat kontradiktif. Pemuda di perkotaan yang bekerja pada sektor formal jauh lebih tinggi daripada sektor informal (67,46 persen berbanding 32,54 persen). Sebaliknya, pemuda di perdesaan yang bekerja pada sektor informal lebih tinggi dibanding sektor formal (59,86 persen berbanding 40,14 persen). Adapun berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan pola yang signifikan antara

pemuda perempuan dan pemuda laki-laki, dan keduanya lebih banyak bekerja di sektor formal.



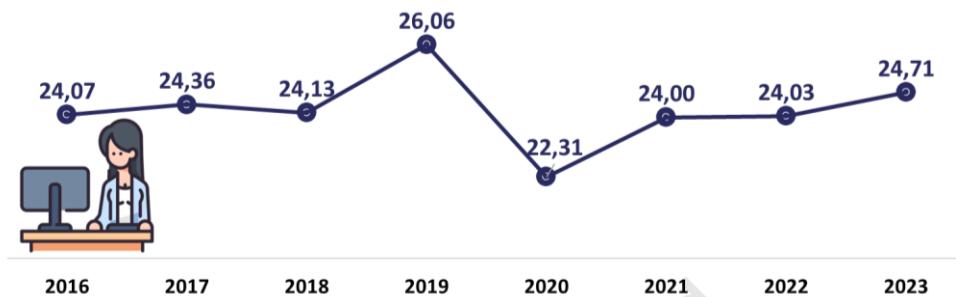
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.10 Pemuda Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Percentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) domain gender dan diskriminasi. Penghitungan indikator ini sedikit berbeda dengan penghitungan proporsi pada Gambar 5.10. Indikator yang ditampilkan pada Gambar 5.10, yaitu persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Indikator ini dihitung dari jumlah pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dibagi jumlah pemuda perempuan yang bekerja. Sedangkan dalam indikator IPP, persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dihitung dari jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal dibagi seluruh jumlah pemuda perempuan, baik bekerja maupun tidak. Indikator ini menggambarkan peluang pemuda perempuan untuk masuk ke dalam sektor formal.

Indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal mengalami peningkatan yang cukup baik selama periode 2015-2019. Namun pada tahun 2020 persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal menurun menjadi 22,31 persen yang kemungkinan besar terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2023, persentase

perempuan bekerja di sektor formal sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 meskipun belum dapat setara dengan capaian pada tahun 2019 atau sebelum kondisi pandemi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.11 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal per Jumlah Pemuda Perempuan, 2016-2023

Rendahnya partisipasi pemuda perempuan dalam angkatan kerja menyebabkan perbandingan antara pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dan total pemuda perempuan menjadi jauh lebih kecil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.11. Akan tetapi, jika yang dipertimbangkan dalam penghitungan indikator hanya pemuda yang bekerja, maka nilai indikator pemuda perempuan sebagai pekerja formal akan lebih besar seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.10.

5.3 Pemuda dan Pekerjaan Layak

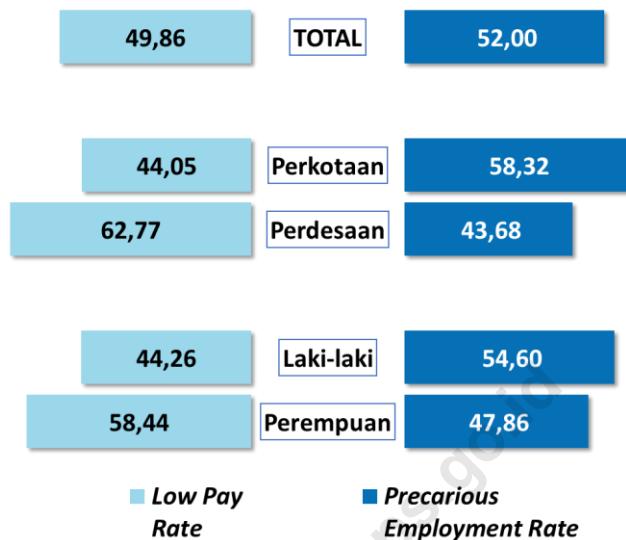
Sekedar memiliki pekerjaan, tidak lantas menjamin seseorang untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan, mengingat tidak semua pekerjaan menghasilkan *output* dan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Untuk itu, kontribusi pemuda terhadap pembangunan ekonomi tidak cukup dengan menganalisis partisipasi kerja pemuda. Pekerjaan yang layak menjadi penting untuk diperhatikan dan ini menjadi salah satu agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs). Urgensi perlunya pekerjaan layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Tujuan 8 yakni untuk "Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua".

Indikator pekerjaan layak yang disajikan dalam publikasi ini adalah *Precarious Employment Rate* (PER) dan *Low Pay Rate* (LPR). PER merupakan indikator pengukuran stabilitas dan jaminan pekerjaan, sedangkan LPR termasuk indikator dari pendapatan yang setara dan pekerjaan yang produktif (BPS 2022b). Kedua indikator ini perlu mendapat perhatian pemerintah mengingat kombinasi keduanya identik dengan rentan jeratan kemiskinan.

Precarious employment atau pekerjaan tidak tetap merujuk pada penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas, bekerja dengan kontrak jangka pendek, pekerja musiman, dan pekerja yang dipekerjakan dengan kontrak kerja yang dapat diputus sewaktu-waktu pada kondisi tertentu hanya dengan pemberitahuan singkat (BPS 2022b). Dalam Sakernas, *precarious employment* mencakup pekerja bebas (baik pekerja bebas pertanian maupun nonpertanian), buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan kontrak kerja lisan/tidak memiliki perjanjian/kontrak (BPS 2022b). Umumnya, *precarious employment* bekerja dalam jangka waktu pendek dan tidak terlindungi oleh jaminan sosial. *Precarious Employment Rate* (PER) sendiri menunjukkan proporsi penduduk bekerja yang termasuk sebagai pekerja tidak tetap. Gambar 5.12 menunjukkan pemuda bekerja yang termasuk sebagai *precarious employment* sebesar 52,00 persen, di mana *precarious employment* pada pemuda laki-laki lebih tinggi daripada pemuda perempuan. Jika dilihat dari klasifikasi wilayahnya, daerah perkotaan memberikan kontribusi lebih besar terhadap indikator PER pemuda, dengan capaian sebesar 58,32 persen.

Pendapatan yang mencukupi adalah hal penting dalam memastikan kesejahteraan para pekerja. Indikator *Low Pay Rate* (LPR) bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak buruh/karyawan/pegawai yang bekerja dengan upah rendah. Pekerja dengan pendapatan rendah didefinisikan sebagai pekerja dengan penghasilan di bawah 2/3 median upah (BPS 2022b). Gambar 5.12 menunjukkan bahwa sebanyak 49,86 persen pemuda bekerja memiliki upah kerja yang rendah. Lebih lanjut, upah rendah ini banyak dialami pemuda perempuan dan pemuda di perdesaan. Sebesar 58,44 persen pemuda perempuan bekerja

dengan upah rendah dan sebesar 62,77 persen pemuda perdesaan bekerja dengan mendapat upah rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

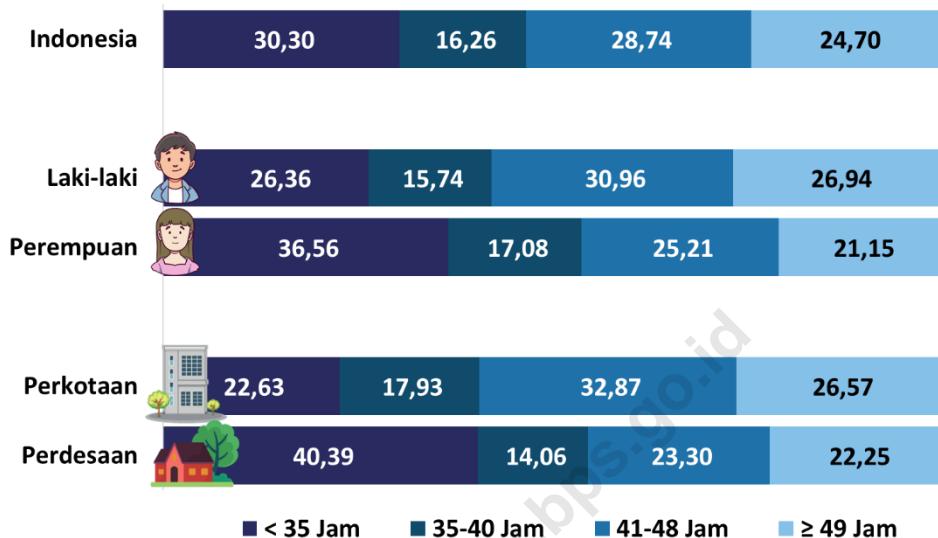
Gambar 5.12 Precarious Employment Rate Pemuda dan Low Pay Rate Pemuda, 2023

5.4 Jam Kerja Pemuda

Jam kerja adalah lamanya waktu pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan. Peraturan mengenai jam kerja telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja yang dibagi dalam 2 (dua) sistem yang dapat dipilih sesuai dengan kebijakan pengusaha yaitu 7 (tujuh) jam per hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, atau 8 (delapan) jam per hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.

Jam kerja berlebih dapat diamati melalui dua pendekatan. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa jam kerja berlebih dalam konteks Indonesia didefinisikan berdasarkan ambang batas 48 jam per minggu seperti dinyatakan pada Konvensi

International Labour Organization (ILO). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur ketentuan bahwa 40 jam sebagai jam kerja maksimum per minggu.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.13 Persentase Pemuda Bekerja menurut Jam Kerja dalam Seminggu, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin 2023

Komposisi pemuda yang bekerja menurut jumlah jam kerja dalam seminggu dapat dilihat pada Gambar 5.13. Dari gambar tersebut terlihat bahwa persentase pemuda yang bekerja dengan jumlah jam 35-40 jam dalam seminggu sebesar 16,26 persen, sementara persentase pemuda yang bekerja dengan jumlah jam lebih dari 41-48 jam dalam seminggu sebesar 28,74 persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Salah satu penyebab mengapa seseorang masuk sebagai pekerja tidak penuh antara lain karena tingkat kesempatan kerja yang semakin lama semakin kecil. Hal tersebut membuat para pekerja menerima untuk bekerja atau melakukan pekerjaan walaupun berada di bawah jam kerja normal dibandingkan menganggur dan tidak mempunyai penghasilan (BPS 2014). Pekerja tidak penuh terdiri dari setengah penganggur dan pekerja paruh waktu.

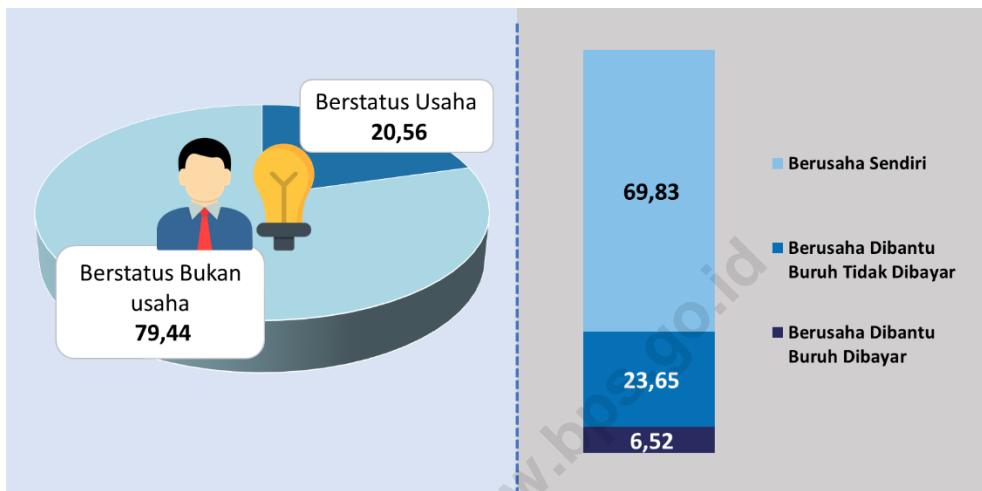
Jam kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap upah yang diterima. Oleh karena itu, pemuda yang setengah menganggur kemungkinan besar berada pada kondisi dengan tingkat kesejahteraan yang rendah karena pendapatannya yang rendah (Prasetya 2019). Pada Gambar 5.13 terlihat bahwa sekitar 30,30 persen pemuda bekerja di bawah jam kerja normal. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pemuda di perdesaan yang menjadi pekerja tidak penuh hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding pemuda di perkotaan (40,39 persen berbanding 22,63 persen). Kemudian, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda perempuan lebih banyak yang menjadi pekerja tidak penuh dibanding pemuda laki-laki. Kondisi tersebut kemungkinan dikarenakan pemuda perempuan bekerja selain untuk menambah penghasilan rumah tangga juga untuk mengisi waktu luang sambil mengurus rumah tangga.

Selain beberapa hal yang telah diulas di atas, terdapat indikator pekerjaan dengan jam kerja berlebih (*Employment in Excessive Working Time/EEWT*) yang memberikan informasi mengenai perbandingan penduduk yang bekerja dengan jam kerja lebih dari 48 jam seminggu (*excessive hours*) (BPS 2022b). Pada tahun 2023, pemuda yang bekerja dengan jam kerja berlebih/*excessive hours* (jam kerja lebih dari 48 jam seminggu) sebesar 24,70 persen. Lebih detail, pemuda laki-laki yang memiliki jam kerja lebih dari 48 jam seminggu lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan pemuda perempuan. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, pemuda yang memiliki jam kerja lebih dari 48 jam seminggu di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan.

5.5 Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha

Kreativitas pemuda untuk menumbuhkan kemandirian dalam segi finansial dan produktivitas sangat penting dalam pemulihan ekonomi agar mampu beradaptasi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Terlebih pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, di mana sudah hampir segala aspek kehidupan dapat dilakukan dengan mengandalkan teknologi. Kesempatan membuka usaha pun kian lebar seiring dengan berkembangnya ekonomi digital. Pemuda dapat memanfaatkan media sosial sebagai peluang

berwirausaha. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing, pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan, antara lain penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024).



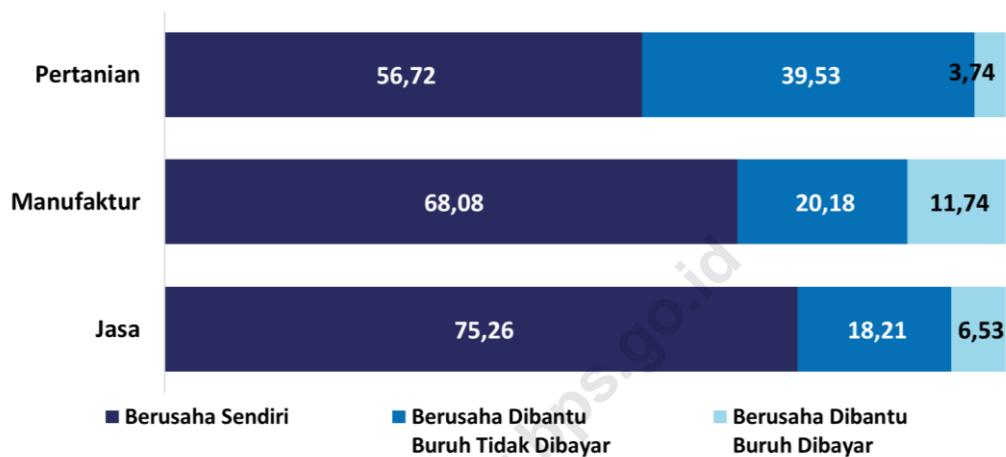
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.14 Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha menurut Status/Kedudukan dalam Pekerjaan, 2023

Hasil Sakernas Agustus 2023 dapat memberikan gambaran pemuda bekerja menurut status pekerjaan utama yang dapat dibagi ke dalam pemuda bekerja dengan status berusaha dan pemuda bekerja dengan status bukan berusaha. Dalam publikasi ini, pemuda bekerja dengan status berusaha didefinisikan sebagai pemuda bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Selanjutnya, pemuda bekerja dengan status bukan berusaha mencakup pemuda bekerja sebagai buruh/karyawan, pekerja keluarga/tidak dibayar, dan pekerja bebas pertanian serta pekerja bebas non pertanian.

Gambar 5.14 menunjukkan bahwa mayoritas pemuda bekerja berstatus bukan berusaha (79,44 persen), hanya sekitar 20,56 persen pemuda bekerja berstatus berusaha. Pemuda yang bekerja berstatus berusaha didominasi oleh

pemuda dengan status/kedudukan berusaha sendiri, yaitu mencapai 69,83 persen. Hanya sebagian kecil pemuda berusaha yang berstatus/kedudukan berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar (6,52 persen). Kondisi tersebut menunjukkan pemuda berusaha cenderung memiliki usaha dalam skala kecil dengan mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja keluarga/tidak dibayar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.15 Pemuda Bekerja Berstatus Berusaha menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Usaha, 2023

Pemuda berusaha dengan status/kedudukan berusaha sendiri paling banyak ditemui di sektor jasa (75,26 persen). Selanjutnya, pemuda berstatus berusaha dengan status/kedudukan berusaha dibantu pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, paling banyak ditemui di sektor pertanian (39,53 persen). Sementara itu, pemuda berstatus berusaha dengan status/kedudukan berusaha dibantu pekerja tetap/dibayar, paling banyak ditemui di sektor manufaktur (11,74 persen).

Lebih jauh, salah satu indikator penyusun IPP adalah proporsi pemuda berusaha dengan jenis jabatan *white collar* per jumlah pemuda. Sama halnya dengan TPT pemuda, indikator ini termasuk dalam domain lapangan dan kesempatan kerja. Indikator ini didefinisikan sebagai persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap, dan jenis pekerjaan *white collar* (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan

atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun. Pada umumnya, jenis jabatan ini membutuhkan *skill* dan kompetensi yang tinggi, sehingga pekerja *white collar* mencerminkan pekerja yang berkualitas atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Kemampuan pemuda untuk menjadi pekerja berusaha *white collar* diasosiasikan dengan kemampuan dan kesinambungan dalam berusaha mandiri sehingga mencerminkan taraf hidup yang baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Gambar 5.16 Persentase Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha *White Collar*, 2016-2023

Gambar 5.16 menunjukkan indikator persentase pemuda berstatus berusaha *white collar* yang secara konsisten meningkat dalam kurun waktu 2016-2019. Selain itu, pandemi Covid-19 juga turut memberikan dampak pada indikator pemuda berstatus berusaha *white collar*. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 0,44 persen pemuda berstatus berusaha *white collar* kemudian menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 0,41 persen. Seiring dengan meredanya Covid-19, persentase pemuda berstatus berusaha *white collar* kembali mengalami peningkatan menjadi 0,53 persen pada tahun 2023.

Tabel 5.1 Persentase Pemuda menurut Karakteristik dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2023

Karakteristik	Jenis Kegiatan Utama					Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	55,14	8,54	17,52	15,21	3,59	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	65,77	10,47	16,31	2,56	4,89	100,00
Perempuan	43,89	6,50	18,79	28,61	2,21	100,00
Kelompok Umur						
16-18 Tahun	19,21	7,06	62,72	6,46	4,56	100,00
19-24 Tahun	56,83	12,55	11,74	14,21	4,67	100,00
25-30 Tahun	71,49	5,36	0,52	20,58	2,05	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	53,95	9,86	19,76	13,29	3,14	100,00
Perdesaan	56,79	6,71	14,41	17,88	4,21	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.2 Pemuda *Not in Employment, Education, and Training* (NEET) menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Kelompok Umur			Pemuda NEET
	16-18 Tahun	19-24 Tahun	25-30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	15,10	29,39	27,64	25,80
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14,58	22,67	11,09	16,38
Perempuan	15,64	36,56	45,05	35,77
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	50,45	41,27	34,50	38,87
Tamat SD/Sederajat	30,54	38,77	31,11	33,44
Tamat SMP/Sederajat	4,74	36,76	34,68	19,66
Tamat SMA/Sederajat	41,08	26,43	27,77	28,23
Tamat Perguruan Tinggi	5,90	28,14	16,51	19,73
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	14,15	26,70	27,23	24,40
Perdesaan	16,38	33,14	28,20	27,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.3 Tingkat Pengangguran Pemuda (TPT) Pemuda menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Karakteristik	Pendidikan						TPT Pemuda (7)
	Tidak pernah sekolah/Tida k tamat SD (1)	Tamat SD/ sederajat (2)	Tamat SMP/ sederajat (3)	Tamat SM/ sederajat (4)	Tamat PT/ sederajat (5)	Tamat PT/ sederajat (6)	
Indonesia	7,84	9,48	10,55	15,94	11,66	13,41	
Jenis Kelamin							
Laki-laki	9,13	9,80	11,39	15,95	12,68	13,73	
Perempuan	4,57	8,59	8,98	15,92	10,91	12,89	
Kelompok Umur							
16-18 Tahun	14,36	24,42	13,98	41,45	-	26,88	
19-24 Tahun	10,31	12,59	14,76	18,93	23,50	18,09	
25-30 Tahun	5,20	5,72	6,32	7,60	7,22	6,97	
Klasifikasi Desa							
Perkotaan	14,07	13,15	13,87	17,20	12,35	15,45	
Perdesaan	5,22	6,90	7,72	13,82	9,67	10,57	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Kelompok Umur			TPAK Pemuda
	16-18 Tahun	19-24 Tahun	25-30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	26,27	69,38	76,85	63,68
Jenis Kelamin				
Laki-laki	30,20	80,65	95,02	76,24
Perempuan	22,11	57,36	57,72	50,38
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/	45,82	63,93	68,93	64,37
Tidak tamat SD	42,39	68,90	72,81	67,54
Tamat SD/Sederajat	16,29	65,69	69,52	41,32
Tamat SMP/Sederajat	52,11	68,49	76,80	70,03
Tamat SMA/Sederajat	38,96	86,52	88,70	88,07
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	23,79	69,55	78,05	63,81
Perdesaan	29,63	69,15	75,17	63,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.5 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Karakteristik dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Karakteristik	Pendidikan					Jumlah
	Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	Tamat SD/Sederajat	Tamat SMP/Sederajat	Tamat SMA/Sederajat	Tamat Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	3,34	10,90	18,41	52,05	15,31	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	3,85	13,04	19,44	53,17	10,50	100,00
Perempuan	2,53	7,50	16,79	50,25	22,94	100,00
Kelompok Umur						
16-18 Tahun	3,67	10,77	51,12	34,39	0,05	100,00
19-24 Tahun	2,94	8,30	13,67	66,19	8,90	100,00
25-30 Tahun	3,60	12,93	17,69	43,42	22,34	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	1,63	7,61	14,35	56,53	19,88	100,00
Perdesaan	5,59	15,22	23,76	46,14	9,29	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.6 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2023

Karakteristik	Lapangan Usaha			Jumlah
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	19,20	24,34	56,46	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	22,98	27,52	49,50	100,00
Perempuan	13,20	19,30	67,50	100,00
Kelompok Umur				
16-18 Tahun	30,07	18,42	51,51	100,00
19-24 Tahun	18,45	25,22	56,33	100,00
25-30 Tahun	18,32	24,46	57,23	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/ Tidak tamat SD	58,77	18,07	23,16	100,00
Tamat SD/Sederajat	36,73	30,18	33,09	100,00
Tamat SMP/Sederajat	29,33	27,05	43,62	100,00
Tamat SMA/Sederajat	14,04	26,29	59,67	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	3,45	11,68	84,87	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	6,25	26,59	67,15	100,00
Perdesaan	36,23	21,38	42,39	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.7 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Karakteristik dan Jenis Pekerjaan Utama, 2023

Karakteristik	Jenis Pekerjaan Utama					(6)
	Tenaga Profesional, Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi	Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan	Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi	Tenaga Usaha Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Indonesia	9,28	0,58	8,38	21,06	6,75	
Jenis Kelamin						
Laki-laki	5,78	0,68	5,97	15,71	5,85	
Perempuan	14,84	0,41	12,20	29,56	8,16	
Kelompok Umur						
16-18 Tahun	1,97	0,01	2,81	29,77	7,63	
19-24 Tahun	7,40	0,35	8,20	21,77	7,55	
25-30 Tahun	11,73	0,82	9,26	19,34	6,00	
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	0,52	0,02	0,32	8,57	4,34	
Tamat SD/Sederajat	0,80	0,23	0,67	15,17	5,82	
Tamat SMP/Sederajat	1,08	0,18	1,14	22,51	7,19	
Tamat SMA/Sederajat	5,10	0,52	8,21	24,54	7,55	
Tamat Perguruan Tinggi	41,31	1,62	24,92	14,41	4,65	
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	11,15	0,68	11,05	24,02	8,17	
Perdesaan	6,82	0,44	4,87	17,16	4,87	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Lanjutan Tabel 5.7

Karakteristik	Jenis Pekerjaan Utama				Jumlah (10)
	Tenaga Usaha Tani, Kebun, Ternak, Ikan, Hutan Dan Perburuan	Tenaga Produksi Operator Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar	Lainnya (TNI POLRI Unsur Pertahanan lainnya)		
	(7)	(8)	(9)		
Indonesia	18,34	34,03	1,58	100,00	
Jenis Kelamin					
Laki-laki	21,81	41,76	2,45	100,00	
Perempuan	12,84	21,77	0,21	100,00	
Kelompok Umur					
16-18 Tahun	29,29	28,27	0,24	100,00	
19-24 Tahun	17,60	35,63	1,50	100,00	
25-30 Tahun	17,45	33,56	1,83	100,00	
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak pernah sekolah/	57,28	28,81	0,13	100,00	
Tidak tamat SD	35,53	41,28	0,51	100,00	
Tamat SD/Sederajat	28,24	39,29	0,37	100,00	
Tamat SMP/Sederajat	13,26	38,26	2,56	100,00	
Tamat SMA/Sederajat	3,00	9,30	0,79	100,00	
Tamat Perguruan Tinggi					
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	5,76	37,17	2,00	100,00	
Perdesaan	34,9	29,90	1,03	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.8 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2023

Karakteristik	Status Pekerjaan				
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Dibayar	Buruh/Karyawan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	14,35	4,86	1,34	54,32	
Jenis Kelamin					
Laki-laki	14,54	5,04	1,69	53,57	
Perempuan	14,06	4,58	0,79	55,51	
Kelompok Umur					
16-18 Tahun	6,43	1,67	0,23	30,46	
19-24 Tahun	11,24	3,12	0,68	58,51	
25-30 Tahun	17,84	6,65	2,00	54,28	
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	18,12	10,16	0,51	22,96	
Tamat SD/Sederajat	19,05	7,76	1,20	32,85	
Tamat SMP/Sederajat	16,86	6,55	1,02	33,76	
Tamat SMA/Sederajat	14,14	4,14	1,25	60,22	
Tamat Perguruan Tinggi	7,92	2,04	2,32	81,10	
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	13,25	2,88	1,53	65,93	
Perdesaan	15,81	7,46	1,10	39,05	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Lanjutan Tabel 5.8

Karakteristik	Status Pekerjaan			Jumlah
	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	(8)	
(1)	(6)	(7)	(8)	
Indonesia	7,49	17,63	100,00	
Jenis Kelamin				
Laki-laki	10,59	14,57	100,00	
Perempuan	2,58	22,49	100,00	
Kelompok Umur				
16-18 Tahun	6,96	54,24	100,00	
19-24 Tahun	7,14	19,31	100,00	
25-30 Tahun	7,84	11,40	100,00	
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/ Tidak tamat SD	13,99	34,25	100,00	
Tamat SD/Sederajat	18,74	20,40	100,00	
Tamat SMP/Sederajat	12,81	28,99	100,00	
Tamat SMA/Sederajat	4,80	15,44	100,00	
Tamat Perguruan Tinggi	0,81	5,82	100,00	
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	5,31	11,10	100,00	
Perdesaan	10,37	26,22	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.9 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal) dan Karakteristik, 2023

Karakteristik	Formal Informal		Jumlah
	Formal	Informal ¹	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	55,66	44,34	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	55,26	44,74	100,00
Perempuan	56,30	43,70	100,00
Kelompok Umur			
16-18 Tahun	30,69	69,31	100,00
19-24 Tahun	59,19	40,81	100,00
25-30 Tahun	56,28	43,72	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah/ Tidak tamat SD	23,47	76,53	100,00
Tamat SD/Sederajat	34,05	65,95	100,00
Tamat SMP/Sederajat	34,78	65,22	100,00
Tamat SMA/Sederajat	61,47	38,53	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	83,42	16,58	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	67,46	32,54	100,00
Perdesaan	40,14	59,86	100,00

Catatan:

¹ Pekerja Informal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas pertanian dan non-pertanian, serta pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.10 Persentase Pemuda Bekerja yang Termasuk *Precarious Employment* (Pekerja Tidak Tetap), 2023

Karakteristik	Sektor Pekerjaan		Jumlah
	Pekerja Tetap	Pekerja Tidak Tetap	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	48,00	52,00	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	45,40	54,60	100,00
Perempuan	52,14	47,86	100,00
Kelompok Umur			
16-18 Tahun	65,12	34,88	100,00
19-24 Tahun	43,21	56,79	100,00
25-30 Tahun	49,43	50,57	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	64,43	35,57	100,00
Tamat SD/Sederajat	51,19	48,81	100,00
Tamat SMP/Sederajat	56,80	43,20	100,00
Tamat SMA/Sederajat	45,10	54,90	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	41,45	58,55	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	41,68	58,32	100,00
Perdesaan	56,32	43,68	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.11 Persentase Pemuda Bekerja menurut Karakteristik dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023

Karakteristik	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan						Jumlah
	0 jam	1-14 jam	15-34 jam	35-40 jam	41-48 jam	>= 49 jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indonesia	1,30	9,66	19,35	16,26	28,74	24,70	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-laki	1,31	7,46	17,59	15,74	30,96	26,94	100,00
Perempuan	1,28	13,15	22,13	17,08	25,21	21,15	100,00
Kelompok Umur							
16-18 Tahun	0,91	36,62	25,08	7,59	15,23	14,57	100,00
19-24 Tahun	1,21	9,38	19,25	15,03	30,80	24,32	100,00
25-30 Tahun	1,41	6,24	18,65	18,38	28,95	26,36	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan							
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	1,61	8,00	30,86	16,67	24,88	17,97	100,00
Tamat SD/Sederajat	2,02	8,68	23,95	12,05	25,23	28,06	100,00
Tamat SMP/Sederajat	1,56	17,89	22,49	11,12	22,72	24,21	100,00
Tamat SMA/Sederajat	1,09	8,28	16,78	14,80	32,11	26,94	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	1,11	5,47	18,52	30,30	27,84	16,76	100,00
Klasifikasi Desa							
Perkotaan	1,15	7,24	14,24	17,93	32,87	26,57	100,00
Perdesaan	1,49	12,83	26,07	14,06	23,30	22,25	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.12 Persentase Pemuda Bekerja menurut Karakteristik dan Penghasilan dalam Sebulan, 2023

Karakteristik	Penghasilan				Jumlah
	<1.000.000	1.000.000-1.999.999	2.000.000-2.999.999	>=3.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indonesia	16,74	27,85	25,48	29,92	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-laki	11,63	27,35	28,43	32,59	100,00
Perempuan	25,60	28,73	20,38	25,29	100,00
Kelompok Umur					
16-18 Tahun	33,69	38,41	18,76	9,14	100,00
19-24 Tahun	16,86	31,55	26,25	25,33	100,00
25-30 Tahun	15,41	24,32	25,41	34,87	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	26,33	34,95	25,14	13,58	100,00
Tamat SD/Sederajat	21,64	34,62	27,34	16,40	100,00
Tamat SMP/Sederajat	21,40	34,70	26,21	17,68	100,00
Tamat SMA/Sederajat	13,89	27,65	27,07	31,39	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	17,33	17,91	19,11	45,64	100,00
Lapangan Usaha Pekerjaan Utama					
Pertanian	26,76	33,47	21,58	18,19	100,00
Manufaktur	9,62	22,27	32,27	35,85	100,00
Jasa	18,31	29,48	22,99	29,22	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	12,26	25,68	25,02	37,04	100,00
Perdesaan	24,39	31,56	26,27	17,77	100,00

Catatan:

Menggunakan Status Pekerjaan:

1. Berusaha sendiri
2. Buruh/karyawan/pegawai
3. Pekerja bebas di pertanian
4. Pekerja bebas di nonpertanian

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.13 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Karakteristik dan Median Upah, 2023

Karakteristik	Median Upah		Jumlah
	<2/3 Median	>= 2/3 Median	
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	49,86	50,14	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-laki	44,26	55,74	100,00
Perempuan	58,44	41,56	100,00
Kelompok Umur			
16-18 Tahun	77,76	22,24	100,00
19-24 Tahun	55,88	44,12	100,00
25-30 Tahun	42,72	57,28	100,00
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah/ Tidak tamat SD	66,05	33,95	100,00
Tamat SD/Sederajat	60,32	39,68	100,00
Tamat SMP/Sederajat	61,95	38,05	100,00
Tamat SMA/Sederajat	49,21	50,79	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	41,44	58,56	100,00
Lapangan Usaha Pekerjaan Utama			
Pertanian	52,68	47,32	100,00
Manufaktur	39,48	60,52	100,00
Jasa	54,63	45,37	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	44,05	55,95	100,00
Perdesaan	62,77	37,23	100,00

Catatan:

Menggunakan Status Pekerjaan buruh/karyawan/pegawai

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.14.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga			Jumlah
				(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Aceh	46,09	12,37	20,76	13,14	7,63	100,00	
Sumatera Utara	55,30	10,66	17,43	13,79	2,82	100,00	
Sumatera Barat	52,59	10,11	20,17	12,70	4,43	100,00	
Riau	53,18	7,84	19,36	16,00	3,63	100,00	
Jambi	51,72	9,54	20,92	14,57	3,24	100,00	
Sumatera Selatan	55,54	9,71	17,61	13,75	3,39	100,00	
Bengkulu	52,36	6,65	23,53	14,10	3,36	100,00	
Lampung	54,62	8,45	18,34	16,19	2,40	100,00	
Kep. Bangka Belitung	58,02	7,46	17,54	14,88	2,10	100,00	
Kepulauan Riau	58,82	7,99	18,99	11,64	2,56	100,00	
DKI Jakarta	52,03	10,11	26,20	9,22	2,44	100,00	
Jawa Barat	51,35	12,33	18,61	14,76	2,94	100,00	
Jawa Tengah	58,11	8,89	18,49	11,80	2,70	100,00	
DI Yogyakarta	57,80	5,54	25,79	7,52	3,35	100,00	
Jawa Timur	56,97	9,30	20,19	11,35	2,19	100,00	
Banten	51,02	11,75	18,26	14,27	4,70	100,00	
Bali	64,62	5,00	21,66	7,26	1,46	100,00	
Nusa Tenggara Barat	57,12	5,22	18,26	15,23	4,16	100,00	
Nusa Tenggara Timur	50,81	7,76	24,36	13,10	3,96	100,00	
Kalimantan Barat	51,45	8,56	20,91	16,14	2,94	100,00	
Kalimantan Tengah	55,18	7,36	19,99	14,61	2,86	100,00	
Kalimantan Selatan	54,97	8,26	17,94	15,03	3,81	100,00	
Kalimantan Timur	54,66	7,56	22,08	13,19	2,50	100,00	
Kalimantan Utara	54,37	6,82	21,12	14,83	2,86	100,00	
Sulawesi Utara	45,94	11,15	19,32	17,44	6,17	100,00	
Sulawesi Tengah	54,36	6,33	20,58	15,76	2,97	100,00	
Sulawesi Selatan	51,97	7,31	21,36	15,42	3,94	100,00	
Sulawesi Tenggara	56,66	5,22	18,94	15,92	3,26	100,00	
Gorontalo	58,98	6,51	16,07	14,30	4,14	100,00	
Sulawesi Barat	58,54	5,00	16,83	16,60	3,03	100,00	
Maluku	39,48	11,66	19,60	19,45	9,81	100,00	
Maluku Utara	44,66	9,59	22,35	15,98	7,42	100,00	
Papua Barat	42,39	9,03	21,87	19,20	7,51	100,00	
Papua	47,21	8,82	20,75	16,34	6,88	100,00	
Indonesia	53,95	9,86	19,76	13,29	3,14	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.14.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga			Jumlah
				(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)				
Aceh	47,89	6,54	16,08	20,40	9,09	100,00	
Sumatera Utara	64,05	5,80	13,16	13,86	3,12	100,00	
Sumatera Barat	54,01	7,61	16,63	16,95	4,81	100,00	
Riau	52,37	5,45	16,32	22,09	3,77	100,00	
Jambi	56,34	5,22	15,48	19,35	3,61	100,00	
Sumatera Selatan	57,38	5,17	13,82	18,75	4,88	100,00	
Bengkulu	55,69	5,10	15,64	19,71	3,87	100,00	
Lampung	58,41	6,41	13,67	19,07	2,44	100,00	
Kep. Bangka Belitung	58,67	4,03	14,19	20,06	3,05	100,00	
Kepulauan Riau	57,42	9,51	13,87	16,74	2,46	100,00	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	50,17	10,03	14,51	20,91	4,39	100,00	
Jawa Tengah	56,19	8,91	13,76	17,02	4,13	100,00	
DI Yogyakarta	64,09	5,59	16,32	12,55	1,44	100,00	
Jawa Timur	56,81	7,39	16,11	16,92	2,77	100,00	
Banten	46,26	13,37	11,58	19,14	9,64	100,00	
Bali	71,76	3,16	15,45	7,57	2,05	100,00	
Nusa Tenggara Barat	65,41	3,88	11,97	13,84	4,90	100,00	
Nusa Tenggara Timur	65,50	4,36	14,53	12,23	3,38	100,00	
Kalimantan Barat	56,24	5,76	15,72	18,89	3,39	100,00	
Kalimantan Tengah	55,28	5,37	13,70	22,43	3,22	100,00	
Kalimantan Selatan	58,37	5,59	14,09	18,79	3,16	100,00	
Kalimantan Timur	53,82	7,00	15,54	20,53	3,12	100,00	
Kalimantan Utara	60,40	5,22	17,60	14,56	2,21	100,00	
Sulawesi Utara	48,89	7,88	15,80	20,41	7,03	100,00	
Sulawesi Tengah	60,01	3,44	14,90	18,12	3,53	100,00	
Sulawesi Selatan	58,02	4,69	14,77	18,70	3,82	100,00	
Sulawesi Tenggara	57,58	4,25	14,53	20,32	3,32	100,00	
Gorontalo	57,53	3,81	12,94	21,83	3,88	100,00	
Sulawesi Barat	58,15	2,79	15,10	20,85	3,11	100,00	
Maluku	43,32	5,62	14,22	24,00	12,84	100,00	
Maluku Utara	53,29	5,95	14,24	20,96	5,56	100,00	
Papua Barat	50,78	5,65	18,24	19,18	6,15	100,00	
Papua	71,43	2,28	6,41	13,00	6,88	100,00	
Indonesia	56,79	6,71	14,41	17,88	4,21	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.14.3 Persentase Pemuda Laki-laki menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga			Jumlah
				(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Aceh	59,73	8,80	16,47	3,48	11,52	100,00	
Sumatera Utara	68,58	9,99	14,67	2,57	4,19	100,00	
Sumatera Barat	64,86	9,39	15,92	3,07	6,76	100,00	
Riau	67,84	6,99	16,45	3,21	5,51	100,00	
Jambi	68,66	7,78	15,62	2,93	5,00	100,00	
Sumatera Selatan	69,80	7,76	14,01	2,34	6,09	100,00	
Bengkulu	68,20	6,19	16,36	3,80	5,45	100,00	
Lampung	73,66	6,81	13,34	2,58	3,61	100,00	
Kep. Bangka Belitung	72,83	5,57	14,08	3,55	3,97	100,00	
Kepulauan Riau	68,71	8,74	17,58	1,21	3,77	100,00	
DKI Jakarta	56,14	13,75	25,81	1,81	2,49	100,00	
Jawa Barat	61,96	15,85	16,25	1,92	4,02	100,00	
Jawa Tengah	65,90	11,52	15,53	2,27	4,78	100,00	
DI Yogyakarta	65,73	6,66	21,34	2,12	4,16	100,00	
Jawa Timur	66,96	10,50	17,28	2,19	3,07	100,00	
Banten	59,98	14,10	15,91	2,23	7,77	100,00	
Bali	70,49	5,47	19,82	2,11	2,10	100,00	
Nusa Tenggara Barat	69,22	5,86	14,27	3,36	7,28	100,00	
Nusa Tenggara Timur	68,15	5,22	16,76	4,46	5,41	100,00	
Kalimantan Barat	68,09	8,34	16,79	2,22	4,56	100,00	
Kalimantan Tengah	69,93	7,19	16,01	2,68	4,19	100,00	
Kalimantan Selatan	68,55	9,67	15,24	2,50	4,04	100,00	
Kalimantan Timur	67,17	7,86	19,29	1,69	3,99	100,00	
Kalimantan Utara	68,83	8,32	18,02	1,80	3,03	100,00	
Sulawesi Utara	61,72	10,14	15,74	3,73	8,67	100,00	
Sulawesi Tengah	73,18	4,53	15,37	2,68	4,24	100,00	
Sulawesi Selatan	67,69	7,22	15,80	3,41	5,89	100,00	
Sulawesi Tenggara	71,29	4,78	15,32	3,97	4,63	100,00	
Gorontalo	72,16	5,35	12,58	3,88	6,03	100,00	
Sulawesi Barat	75,10	4,30	13,24	3,05	4,31	100,00	
Maluku	50,80	8,44	15,22	6,10	19,44	100,00	
Maluku Utara	63,49	7,64	14,32	6,79	7,77	100,00	
Papua Barat	57,85	7,64	19,74	5,62	9,15	100,00	
Papua	72,34	4,71	9,81	4,68	8,46	100,00	
Indonesia	65,77	10,47	16,31	2,56	4,89	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.14.4 Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga			Jumlah
				(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Aceh	34,18	8,45	19,10	32,80	5,47	100,00	
Sumatera Utara	49,06	6,99	16,51	25,81	1,63	100,00	
Sumatera Barat	40,85	8,29	21,07	27,46	2,33	100,00	
Riau	36,90	5,84	18,72	36,71	1,83	100,00	
Jambi	40,14	5,70	19,31	32,96	1,90	100,00	
Sumatera Selatan	42,74	6,12	16,69	32,05	2,40	100,00	
Bengkulu	39,70	5,07	20,68	32,75	1,79	100,00	
Lampung	39,44	7,46	17,39	34,55	1,17	100,00	
Kep. Bangka Belitung	42,78	6,53	18,35	31,42	0,92	100,00	
Kepulauan Riau	48,15	7,54	19,32	23,70	1,28	100,00	
DKI Jakarta	47,86	6,40	26,61	16,74	2,39	100,00	
Jawa Barat	39,69	7,66	19,38	30,85	2,41	100,00	
Jawa Tengah	48,08	6,14	17,16	26,76	1,85	100,00	
DI Yogyakarta	52,66	4,41	25,74	15,65	1,55	100,00	
Jawa Timur	46,20	6,36	19,72	25,96	1,76	100,00	
Banten	38,78	10,08	17,23	29,88	4,02	100,00	
Bali	62,86	3,36	19,73	12,90	1,15	100,00	
Nusa Tenggara Barat	52,71	3,21	16,13	26,33	1,62	100,00	
Nusa Tenggara Timur	54,24	5,41	17,85	20,92	1,57	100,00	
Kalimantan Barat	39,80	5,23	18,69	34,49	1,78	100,00	
Kalimantan Tengah	39,63	5,27	17,01	36,24	1,86	100,00	
Kalimantan Selatan	44,28	4,07	16,82	31,93	2,91	100,00	
Kalimantan Timur	40,75	6,88	20,81	30,25	1,32	100,00	
Kalimantan Utara	43,01	3,98	21,90	28,91	2,19	100,00	
Sulawesi Utara	31,55	9,24	19,96	35,00	4,25	100,00	
Sulawesi Tengah	41,96	4,29	18,39	33,00	2,37	100,00	
Sulawesi Selatan	42,10	4,57	20,03	31,52	1,78	100,00	
Sulawesi Tenggara	42,62	4,46	17,22	33,78	1,92	100,00	
Gorontalo	43,56	4,74	16,25	33,58	1,88	100,00	
Sulawesi Barat	40,51	2,26	17,89	37,54	1,80	100,00	
Maluku	32,32	7,11	17,17	39,98	3,41	100,00	
Maluku Utara	37,27	6,24	18,85	33,38	4,25	100,00	
Papua Barat	35,71	6,47	19,82	33,91	4,10	100,00	
Papua	54,85	3,59	11,55	25,00	5,00	100,00	
Indonesia	43,89	6,50	18,79	28,61	2,21	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.14.5 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga			Jumlah
				(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Aceh	47,25	8,63	17,76	17,80	8,57	100,00	
Sumatera Utara	59,13	8,54	15,56	13,83	2,95	100,00	
Sumatera Barat	53,30	8,86	18,40	14,82	4,62	100,00	
Riau	52,70	6,43	17,56	19,60	3,71	100,00	
Jambi	54,69	6,76	17,43	17,64	3,48	100,00	
Sumatera Selatan	56,65	6,96	15,31	16,78	4,30	100,00	
Bengkulu	54,50	5,65	18,44	17,72	3,69	100,00	
Lampung	57,09	7,12	15,30	18,06	2,42	100,00	
Kep. Bangka Belitung	58,29	6,04	16,15	17,03	2,49	100,00	
Kepulauan Riau	58,66	8,15	18,43	12,20	2,55	100,00	
DKI Jakarta	52,03	10,11	26,20	9,22	2,44	100,00	
Jawa Barat	51,11	11,86	17,78	16,01	3,24	100,00	
Jawa Tengah	57,23	8,90	16,32	14,20	3,36	100,00	
DI Yogyakarta	59,33	5,56	23,49	8,74	2,88	100,00	
Jawa Timur	56,90	8,49	18,47	13,71	2,43	100,00	
Banten	49,79	12,17	16,54	15,52	5,97	100,00	
Bali	66,78	4,44	19,78	7,36	1,64	100,00	
Nusa Tenggara Barat	61,18	4,57	15,18	14,55	4,52	100,00	
Nusa Tenggara Timur	61,38	5,31	17,29	12,48	3,54	100,00	
Kalimantan Barat	54,40	6,84	17,71	17,84	3,21	100,00	
Kalimantan Tengah	55,24	6,25	16,49	18,96	3,06	100,00	
Kalimantan Selatan	56,67	6,93	16,02	16,91	3,48	100,00	
Kalimantan Timur	54,40	7,38	20,02	15,50	2,70	100,00	
Kalimantan Utara	56,51	6,25	19,87	14,73	2,63	100,00	
Sulawesi Utara	47,24	9,71	17,77	18,75	6,55	100,00	
Sulawesi Tengah	58,10	4,42	16,82	17,32	3,34	100,00	
Sulawesi Selatan	55,17	5,92	17,87	17,15	3,88	100,00	
Sulawesi Tenggara	57,22	4,63	16,25	18,60	3,30	100,00	
Gorontalo	58,20	5,05	14,37	18,38	4,00	100,00	
Sulawesi Barat	58,24	3,30	15,50	19,87	3,09	100,00	
Maluku	41,93	7,80	16,16	22,36	11,75	100,00	
Maluku Utara	50,88	6,97	16,50	19,57	6,08	100,00	
Papua Barat	47,23	7,08	19,78	19,19	6,73	100,00	
Papua	64,34	4,20	10,61	13,97	6,88	100,00	
Indonesia	55,14	8,54	17,52	15,21	3,59	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,47	54,44	68,53	42,63	55,88
Sumatera Utara	65,96	69,86	78,57	56,05	67,66
Sumatera Barat	62,70	61,62	74,25	49,14	62,16
Riau	61,02	57,82	74,83	42,73	59,13
Jambi	61,26	61,55	76,44	45,84	61,45
Sumatera Selatan	65,25	62,55	77,55	48,86	63,61
Bengkulu	59,01	60,78	74,39	44,77	60,15
Lampung	63,07	64,82	80,47	46,89	64,21
Kep. Bangka Belitung	65,48	62,70	78,40	49,31	64,33
Kepulauan Riau	66,80	66,93	77,45	55,69	66,82
DKI Jakarta	62,14	-	69,89	54,26	62,14
Jawa Barat	63,68	60,19	77,81	47,35	62,97
Jawa Tengah	67,00	65,10	77,42	54,22	66,13
DI Yogyakarta	63,34	69,69	72,39	57,06	64,89
Jawa Timur	66,27	64,20	77,46	52,56	65,39
Banten	62,77	59,63	74,08	48,87	61,96
Bali	69,62	74,93	75,96	66,22	71,23
Nusa Tenggara Barat	62,34	69,29	75,08	55,92	65,74
Nusa Tenggara Timur	58,58	69,86	73,37	59,65	66,69
Kalimantan Barat	60,01	62,00	76,43	45,04	61,24
Kalimantan Tengah	62,54	60,65	77,12	44,89	61,49
Kalimantan Selatan	63,23	63,96	78,22	48,34	63,59
Kalimantan Timur	62,22	60,82	75,03	47,63	61,78
Kalimantan Utara	61,19	65,62	77,15	46,99	62,77
Sulawesi Utara	57,08	56,76	71,86	40,79	56,94
Sulawesi Tengah	60,69	63,45	77,71	46,25	62,51
Sulawesi Selatan	59,29	62,71	74,90	46,67	61,10
Sulawesi Tenggara	61,88	61,83	76,08	47,08	61,85
Gorontalo	65,49	61,35	77,51	48,30	63,25
Sulawesi Barat	63,54	60,94	79,40	42,77	61,54
Maluku	51,14	48,94	59,24	39,43	49,73
Maluku Utara	54,26	59,24	71,13	43,51	57,85
Papua Barat	51,42	56,42	65,49	42,17	54,31
Papua	56,03	73,71	77,05	58,44	68,54
Indonesia	63,81	63,50	76,24	50,38	63,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.16.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,90	4,47	11,44	54,16	29,03	100,00
Sumatera Utara	2,05	4,73	13,46	59,93	19,83	100,00
Sumatera Barat	4,34	6,85	12,63	49,68	26,49	100,00
Riau	1,35	5,92	11,70	59,17	21,86	100,00
Jambi	1,47	5,12	10,94	57,32	25,16	100,00
Sumatera Selatan	2,63	6,32	8,67	57,16	25,23	100,00
Bengkulu	1,79	6,62	14,25	49,54	27,79	100,00
Lampung	1,88	6,86	16,82	54,99	19,44	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,50	9,66	10,78	54,47	19,59	100,00
Kepulauan Riau	2,12	4,54	7,10	65,63	20,61	100,00
DKI Jakarta	0,48	3,11	7,84	59,10	29,48	100,00
Jawa Barat	1,15	10,19	18,08	55,63	14,96	100,00
Jawa Tengah	1,78	9,03	17,13	55,77	16,29	100,00
DI Yogyakarta	0,54	2,95	9,02	59,88	27,62	100,00
Jawa Timur	0,75	7,39	15,44	58,35	18,08	100,00
Banten	0,53	7,30	12,43	60,24	19,51	100,00
Bali	1,57	4,82	9,00	52,88	31,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,64	8,85	16,40	52,17	20,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,12	5,68	12,44	48,91	29,86	100,00
Kalimantan Barat	3,88	8,23	14,12	50,10	23,67	100,00
Kalimantan Tengah	2,12	9,82	13,67	55,78	18,62	100,00
Kalimantan Selatan	4,01	8,96	13,64	52,88	20,51	100,00
Kalimantan Timur	1,40	3,62	9,02	64,38	21,58	100,00
Kalimantan Utara	3,80	7,74	11,12	55,27	22,06	100,00
Sulawesi Utara	3,17	9,82	11,29	57,40	18,31	100,00
Sulawesi Tengah	1,77	7,01	13,00	55,91	22,31	100,00
Sulawesi Selatan	3,42	9,42	12,04	50,39	24,73	100,00
Sulawesi Tenggara	3,39	4,92	9,94	53,70	28,04	100,00
Gorontalo	8,61	8,24	16,93	45,13	21,10	100,00
Sulawesi Barat	5,60	15,65	10,51	50,55	17,69	100,00
Maluku	1,56	3,85	8,72	58,65	27,22	100,00
Maluku Utara	0,62	2,83	8,33	58,35	29,87	100,00
Papua Barat	3,13	5,42	8,36	58,15	24,93	100,00
Papua	8,76	7,07	11,96	50,23	21,98	100,00
Indonesia	1,63	7,61	14,35	56,53	19,88	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.16.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,34	9,21	21,42	55,68	12,35	100,00
Sumatera Utara	3,85	8,90	21,63	55,12	10,50	100,00
Sumatera Barat	8,38	12,82	19,59	43,27	15,94	100,00
Riau	5,05	14,79	18,27	52,58	9,30	100,00
Jambi	3,62	13,05	19,72	50,70	12,90	100,00
Sumatera Selatan	4,87	15,95	19,51	51,66	8,01	100,00
Bengkulu	3,92	13,37	22,66	45,62	14,42	100,00
Lampung	2,71	12,99	27,98	47,71	8,62	100,00
Kep. Bangka Belitung	11,54	17,89	18,71	42,47	9,40	100,00
Kepulauan Riau	7,46	21,35	15,87	44,89	10,43	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,69	23,07	33,25	38,11	4,88	100,00
Jawa Tengah	2,11	14,97	29,41	46,92	6,58	100,00
DI Yogyakarta	0,39	6,23	18,56	65,63	9,19	100,00
Jawa Timur	2,05	14,79	25,67	49,58	7,92	100,00
Banten	3,68	23,94	28,61	39,98	3,80	100,00
Bali	4,40	7,77	21,20	50,98	15,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,47	10,43	26,49	44,45	16,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	8,92	16,04	21,12	41,91	12,01	100,00
Kalimantan Barat	8,84	21,43	21,85	40,38	7,50	100,00
Kalimantan Tengah	4,53	17,76	22,75	47,61	7,36	100,00
Kalimantan Selatan	5,63	17,13	18,45	46,10	12,69	100,00
Kalimantan Timur	5,87	12,42	17,39	55,53	8,80	100,00
Kalimantan Utara	9,99	16,50	21,15	39,33	13,03	100,00
Sulawesi Utara	4,14	12,72	16,29	52,27	14,58	100,00
Sulawesi Tengah	6,21	18,92	19,03	46,48	9,36	100,00
Sulawesi Selatan	6,80	16,70	19,15	43,94	13,42	100,00
Sulawesi Tenggara	5,52	11,13	18,88	47,90	16,57	100,00
Gorontalo	15,19	18,31	15,24	38,40	12,86	100,00
Sulawesi Barat	7,85	14,96	18,10	44,94	14,15	100,00
Maluku	5,54	10,17	18,00	51,12	15,16	100,00
Maluku Utara	5,64	12,69	17,58	49,54	14,55	100,00
Papua Barat	11,53	12,38	19,41	42,63	14,05	100,00
Papua	48,24	18,17	16,95	14,74	1,90	100,00
Indonesia	5,59	15,22	23,76	46,14	9,29	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.16.3 Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,33	9,44	20,33	58,35	10,55	100,00
Sumatera Utara	3,13	8,18	19,05	59,35	10,29	100,00
Sumatera Barat	8,22	12,87	18,75	48,42	11,74	100,00
Riau	4,55	13,88	17,30	55,29	8,99	100,00
Jambi	3,30	13,41	17,41	54,93	10,94	100,00
Sumatera Selatan	4,83	14,38	15,06	55,78	9,95	100,00
Bengkulu	4,13	14,59	21,50	47,95	11,83	100,00
Lampung	3,06	13,48	26,39	49,25	7,81	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,37	17,08	15,17	47,88	9,50	100,00
Kepulauan Riau	3,88	7,64	10,18	61,72	16,57	100,00
DKI Jakarta	0,56	3,55	8,94	63,44	23,51	100,00
Jawa Barat	1,42	15,19	21,44	51,90	10,05	100,00
Jawa Tengah	2,76	14,42	23,66	51,60	7,56	100,00
DI Yogyakarta	0,57	4,55	14,20	64,03	16,65	100,00
Jawa Timur	1,51	12,04	21,01	56,67	8,77	100,00
Banten	1,46	13,27	17,37	56,06	11,85	100,00
Bali	2,61	5,22	12,66	53,90	25,62	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,15	10,97	20,75	52,91	13,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	9,09	15,30	19,78	44,04	11,79	100,00
Kalimantan Barat	8,04	18,74	20,45	43,57	9,20	100,00
Kalimantan Tengah	3,78	17,88	19,92	50,98	7,45	100,00
Kalimantan Selatan	5,92	15,44	16,44	51,41	10,79	100,00
Kalimantan Timur	3,65	7,73	11,93	64,37	12,32	100,00
Kalimantan Utara	7,50	11,10	16,06	53,13	12,21	100,00
Sulawesi Utara	4,85	14,28	14,74	55,78	10,35	100,00
Sulawesi Tengah	5,45	18,32	18,12	50,34	7,77	100,00
Sulawesi Selatan	6,55	16,48	16,88	49,42	10,67	100,00
Sulawesi Tenggara	5,93	11,07	16,07	53,35	13,58	100,00
Gorontalo	15,07	16,95	16,34	41,74	9,89	100,00
Sulawesi Barat	8,26	18,06	16,46	46,53	10,69	100,00
Maluku	4,75	10,12	15,48	57,93	11,72	100,00
Maluku Utara	5,29	12,44	16,08	55,63	10,56	100,00
Papua Barat	7,74	10,17	15,20	53,53	13,36	100,00
Papua	34,83	15,65	17,77	25,98	5,78	100,00
Indonesia	3,85	13,04	19,44	53,17	10,50	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.16.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,92	4,12	13,56	49,28	32,12	100,00
Sumatera Utara	2,56	4,51	14,78	55,13	23,02	100,00
Sumatera Barat	3,25	4,75	11,74	43,04	37,21	100,00
Riau	1,57	5,87	12,23	55,31	25,02	100,00
Jambi	2,16	4,96	15,58	49,39	27,91	100,00
Sumatera Selatan	2,59	8,52	15,77	50,34	22,79	100,00
Bengkulu	1,47	4,54	16,62	45,13	32,25	100,00
Lampung	1,18	5,91	20,02	51,88	21,01	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,77	5,87	12,13	52,31	25,93	100,00
Kepulauan Riau	0,91	4,42	4,84	65,90	23,92	100,00
DKI Jakarta	0,38	2,58	6,52	53,93	36,59	100,00
Jawa Barat	0,45	8,80	20,60	52,46	17,69	100,00
Jawa Tengah	0,73	7,77	21,21	52,07	18,23	100,00
DI Yogyakarta	0,41	2,84	8,04	57,96	30,75	100,00
Jawa Timur	0,96	8,17	17,83	51,52	21,51	100,00
Banten	0,98	7,94	14,49	54,29	22,30	100,00
Bali	2,35	6,45	13,35	50,32	27,54	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,98	7,88	22,97	41,51	25,66	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,56	11,43	18,22	42,86	21,93	100,00
Kalimantan Barat	5,19	12,79	16,48	44,54	21,00	100,00
Kalimantan Tengah	2,85	7,40	16,47	51,72	21,55	100,00
Kalimantan Selatan	3,11	9,51	15,60	46,12	25,66	100,00
Kalimantan Timur	1,26	3,92	11,08	56,81	26,93	100,00
Kalimantan Utara	3,77	11,00	12,93	42,38	29,92	100,00
Sulawesi Utara	1,00	4,50	11,09	53,54	29,87	100,00
Sulawesi Tengah	3,59	9,23	15,26	47,83	24,09	100,00
Sulawesi Selatan	3,19	8,42	14,52	42,40	31,48	100,00
Sulawesi Tenggara	2,56	4,67	14,31	44,59	33,88	100,00
Gorontalo	7,04	7,87	15,46	41,15	28,47	100,00
Sulawesi Barat	5,51	9,38	16,08	45,69	23,33	100,00
Maluku	3,23	4,46	13,77	46,43	32,11	100,00
Maluku Utara	2,78	6,28	13,92	44,47	32,55	100,00
Papua Barat	9,39	8,97	15,24	39,74	26,66	100,00
Papua	47,49	16,00	12,93	16,69	6,89	100,00
Indonesia	2,53	7,50	16,79	50,25	22,94	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.16.5 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,19	7,56	17,94	55,15	18,17	100,00
Sumatera Utara	2,90	6,70	17,33	57,65	15,41	100,00
Sumatera Barat	6,39	9,87	16,16	46,43	21,14	100,00
Riau	3,53	11,14	15,56	55,30	14,48	100,00
Jambi	2,89	10,37	16,76	52,94	17,04	100,00
Sumatera Selatan	4,01	12,23	15,32	53,78	14,66	100,00
Bengkulu	3,19	11,07	19,79	46,96	18,98	100,00
Lampung	2,43	10,95	24,26	50,13	12,23	100,00
Kep. Bangka Belitung	8,03	13,10	14,09	49,45	15,33	100,00
Kepulauan Riau	2,69	6,35	8,04	63,40	19,52	100,00
DKI Jakarta	0,48	3,11	7,84	59,10	29,48	100,00
Jawa Barat	1,05	12,77	21,12	52,11	12,94	100,00
Jawa Tengah	1,93	11,70	22,66	51,79	11,92	100,00
DI Yogyakarta	0,50	3,81	11,52	61,39	22,77	100,00
Jawa Timur	1,30	10,52	19,76	54,64	13,79	100,00
Banten	1,28	11,27	16,29	55,40	15,76	100,00
Bali	2,49	5,78	12,97	52,26	26,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,08	9,67	21,68	48,13	18,44	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,57	13,64	19,10	43,53	16,15	100,00
Kalimantan Barat	7,03	16,63	19,04	43,91	13,38	100,00
Kalimantan Tengah	3,46	14,24	18,72	51,24	12,36	100,00
Kalimantan Selatan	4,84	13,17	16,12	49,39	16,48	100,00
Kalimantan Timur	2,79	6,35	11,62	61,63	17,61	100,00
Kalimantan Utara	6,15	11,06	14,92	49,23	18,64	100,00
Sulawesi Utara	3,61	11,15	13,57	55,06	16,61	100,00
Sulawesi Tengah	4,80	15,15	17,12	49,46	13,46	100,00
Sulawesi Selatan	5,30	13,47	16,00	46,80	18,44	100,00
Sulawesi Tenggara	4,70	8,73	15,43	50,15	21,00	100,00
Gorontalo	12,13	13,63	16,02	41,53	16,68	100,00
Sulawesi Barat	7,33	15,12	16,33	46,25	14,98	100,00
Maluku	4,19	8,02	14,85	53,68	19,26	100,00
Maluku Utara	4,41	10,27	15,32	51,70	18,30	100,00
Papua Barat	8,34	9,74	15,21	48,53	18,18	100,00
Papua	39,77	15,79	15,88	22,36	6,21	100,00
Indonesia	3,34	10,90	18,41	52,05	15,31	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.17.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023

Provinsi	Lapangan Usaha			
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	11,69	20,10	68,21	100,00
Sumatera Utara	11,16	20,73	68,11	100,00
Sumatera Barat	10,49	15,81	73,70	100,00
Riau	10,48	18,38	71,14	100,00
Jambi	9,92	13,91	76,17	100,00
Sumatera Selatan	7,49	17,98	74,52	100,00
Bengkulu	10,87	15,51	73,62	100,00
Lampung	11,71	16,80	71,49	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,65	25,55	63,79	100,00
Kepulauan Riau	2,31	38,08	59,61	100,00
DKI Jakarta	0,12	14,41	85,46	100,00
Jawa Barat	3,66	32,15	64,19	100,00
Jawa Tengah	5,09	37,26	57,64	100,00
DI Yogyakarta	2,63	18,53	78,85	100,00
Jawa Timur	8,36	28,28	63,37	100,00
Banten	1,87	35,66	62,47	100,00
Bali	4,05	14,74	81,21	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,68	24,97	62,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	10,93	13,78	75,29	100,00
Kalimantan Barat	11,03	15,39	73,57	100,00
Kalimantan Tengah	10,69	17,90	71,41	100,00
Kalimantan Selatan	6,12	20,02	73,85	100,00
Kalimantan Timur	3,90	23,28	72,83	100,00
Kalimantan Utara	13,56	13,05	73,39	100,00
Sulawesi Utara	6,98	18,68	74,34	100,00
Sulawesi Tengah	7,22	21,26	71,52	100,00
Sulawesi Selatan	10,53	21,03	68,45	100,00
Sulawesi Tenggara	7,83	20,65	71,53	100,00
Gorontalo	9,66	13,97	76,37	100,00
Sulawesi Barat	22,04	17,90	60,06	100,00
Maluku	4,67	15,47	79,86	100,00
Maluku Utara	6,34	13,12	80,54	100,00
Papua Barat	6,05	14,71	79,24	100,00
Papua	21,39	12,25	66,36	100,00
Indonesia	6,25	26,59	67,15	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.17.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023

Provinsi	Lapangan Usaha			
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	42,21	14,51	43,28	100,00
Sumatera Utara	49,08	12,49	38,43	100,00
Sumatera Barat	35,54	13,32	51,14	100,00
Riau	45,27	10,99	43,74	100,00
Jambi	46,25	12,56	41,19	100,00
Sumatera Selatan	51,55	10,95	37,50	100,00
Bengkulu	44,70	10,48	44,82	100,00
Lampung	41,87	13,30	44,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,86	35,85	38,29	100,00
Kepulauan Riau	30,47	15,91	53,62	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	20,08	30,52	49,40	100,00
Jawa Tengah	15,56	37,84	46,60	100,00
DI Yogyakarta	10,75	30,39	58,85	100,00
Jawa Timur	28,62	26,05	45,34	100,00
Banten	19,07	29,21	51,72	100,00
Bali	23,47	17,53	59,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,01	16,64	44,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	54,72	13,86	31,42	100,00
Kalimantan Barat	48,70	17,47	33,83	100,00
Kalimantan Tengah	41,59	26,15	32,26	100,00
Kalimantan Selatan	28,06	19,70	52,25	100,00
Kalimantan Timur	31,12	24,61	44,27	100,00
Kalimantan Utara	53,64	13,07	33,29	100,00
Sulawesi Utara	24,01	24,98	51,01	100,00
Sulawesi Tengah	46,51	17,62	35,87	100,00
Sulawesi Selatan	42,98	17,58	39,44	100,00
Sulawesi Tenggara	31,59	23,04	45,37	100,00
Gorontalo	30,74	22,25	47,00	100,00
Sulawesi Barat	45,59	14,93	39,48	100,00
Maluku	40,24	19,16	40,60	100,00
Maluku Utara	24,36	43,57	32,07	100,00
Papua Barat	54,97	12,67	32,35	100,00
Papua	86,80	1,55	11,65	100,00
Indonesia	36,23	21,38	42,39	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.17.3 Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023

Provinsi	Lapangan Usaha			
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	37,36	19,32	43,32	100,00
Sumatera Utara	33,43	20,59	45,98	100,00
Sumatera Barat	30,10	16,46	53,44	100,00
Riau	41,82	17,28	40,90	100,00
Jambi	42,80	16,80	40,40	100,00
Sumatera Selatan	41,42	16,96	41,62	100,00
Bengkulu	40,56	15,45	43,99	100,00
Lampung	39,55	16,48	43,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	22,33	41,50	36,16	100,00
Kepulauan Riau	8,54	38,86	52,60	100,00
DKI Jakarta	0,22	15,88	83,90	100,00
Jawa Barat	8,81	34,12	57,07	100,00
Jawa Tengah	12,60	38,96	48,44	100,00
DI Yogyakarta	7,12	23,58	69,29	100,00
Jawa Timur	19,71	31,66	48,63	100,00
Banten	7,31	37,28	55,41	100,00
Bali	11,57	17,17	71,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,06	23,74	45,20	100,00
Nusa Tenggara Timur	45,31	14,21	40,48	100,00
Kalimantan Barat	38,48	22,54	38,98	100,00
Kalimantan Tengah	33,53	30,36	36,11	100,00
Kalimantan Selatan	22,32	25,20	52,49	100,00
Kalimantan Timur	16,89	31,61	51,50	100,00
Kalimantan Utara	34,23	16,54	49,23	100,00
Sulawesi Utara	19,81	26,44	53,75	100,00
Sulawesi Tengah	41,45	24,07	34,48	100,00
Sulawesi Selatan	32,59	24,70	42,72	100,00
Sulawesi Tenggara	27,77	28,34	43,88	100,00
Gorontalo	28,17	22,36	49,47	100,00
Sulawesi Barat	47,11	19,67	33,21	100,00
Maluku	33,94	21,39	44,67	100,00
Maluku Utara	21,46	44,69	33,84	100,00
Papua Barat	34,89	18,45	46,66	100,00
Papua	71,04	5,39	23,57	100,00
Indonesia	22,98	27,52	49,50	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.17.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023

Provinsi	Lapangan Usaha			
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,94	11,22	67,84	100,00
Sumatera Utara	22,72	11,22	66,06	100,00
Sumatera Barat	11,36	11,28	77,36	100,00
Riau	10,01	7,81	82,18	100,00
Jambi	18,25	6,28	75,47	100,00
Sumatera Selatan	22,63	7,98	69,39	100,00
Bengkulu	19,43	6,15	74,42	100,00
Lampung	16,44	10,47	73,09	100,00
Kep. Bangka Belitung	7,34	8,70	83,96	100,00
Kepulauan Riau	0,55	30,97	68,48	100,00
DKI Jakarta	0,01	12,66	87,33	100,00
Jawa Barat	3,90	28,05	68,04	100,00
Jawa Tengah	5,75	35,45	58,80	100,00
DI Yogyakarta	1,68	19,12	79,20	100,00
Jawa Timur	12,61	20,67	66,72	100,00
Banten	3,75	28,84	67,41	100,00
Bali	8,97	13,84	77,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,11	16,27	63,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,54	13,35	43,11	100,00
Kalimantan Barat	28,65	6,10	65,25	100,00
Kalimantan Tengah	17,27	7,74	74,99	100,00
Kalimantan Selatan	9,52	11,23	79,25	100,00
Kalimantan Timur	4,36	9,73	85,91	100,00
Kalimantan Utara	19,16	6,94	73,90	100,00
Sulawesi Utara	4,01	11,20	84,79	100,00
Sulawesi Tengah	20,30	8,89	70,81	100,00
Sulawesi Selatan	21,89	9,72	68,39	100,00
Sulawesi Tenggara	13,10	11,31	75,59	100,00
Gorontalo	8,41	11,53	80,05	100,00
Sulawesi Barat	26,44	7,72	65,84	100,00
Maluku	18,30	11,96	69,74	100,00
Maluku Utara	17,15	20,32	62,53	100,00
Papua Barat	39,06	4,65	56,28	100,00
Papua	75,45	1,44	23,12	100,00
Indonesia	13,20	19,30	67,50	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.17.5 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2023

Provinsi	Lapangan Usaha			
	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	31,56	16,46	51,98	100,00
Sumatera Utara	29,13	16,83	54,05	100,00
Sumatera Barat	23,18	14,55	62,27	100,00
Riau	30,92	14,04	55,04	100,00
Jambi	33,97	13,01	53,01	100,00
Sumatera Selatan	34,53	13,67	51,80	100,00
Bengkulu	33,16	12,19	54,64	100,00
Lampung	31,82	14,47	53,71	100,00
Kep. Bangka Belitung	17,01	29,86	53,13	100,00
Kepulauan Riau	5,34	35,70	58,97	100,00
DKI Jakarta	0,12	14,41	85,46	100,00
Jawa Barat	6,95	31,82	61,22	100,00
Jawa Tengah	9,80	37,52	52,67	100,00
DI Yogyakarta	4,76	21,64	73,60	100,00
Jawa Timur	16,92	27,34	55,75	100,00
Banten	5,98	34,12	59,90	100,00
Bali	10,38	15,65	73,98	100,00
Nusa Tenggara Barat	26,46	20,61	52,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	44,55	13,84	41,61	100,00
Kalimantan Barat	35,00	16,72	48,29	100,00
Kalimantan Tengah	27,87	22,49	49,64	100,00
Kalimantan Selatan	17,42	19,85	62,72	100,00
Kalimantan Timur	12,35	23,69	63,96	100,00
Kalimantan Utara	28,76	13,06	58,18	100,00
Sulawesi Utara	14,74	21,55	63,70	100,00
Sulawesi Tengah	34,07	18,77	47,16	100,00
Sulawesi Selatan	28,60	19,11	52,30	100,00
Sulawesi Tenggara	22,41	22,12	55,48	100,00
Gorontalo	20,95	18,40	60,64	100,00
Sulawesi Barat	40,10	15,62	44,28	100,00
Maluku	28,15	17,91	53,94	100,00
Maluku Utara	19,94	36,11	43,94	100,00
Papua Barat	36,40	13,44	50,15	100,00
Papua	72,76	3,85	23,40	100,00
Indonesia	19,20	24,34	56,46	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.18.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (*White Collar* dan *Blue Collar*), 2023

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama		
	<i>White Collar</i>	<i>Blue Collar</i>	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	25,55	74,45	100,00
Sumatera Utara	19,47	80,53	100,00
Sumatera Barat	22,49	77,51	100,00
Riau	24,73	75,27	100,00
Jambi	27,23	72,77	100,00
Sumatera Selatan	24,83	75,17	100,00
Bengkulu	26,14	73,86	100,00
Lampung	20,58	79,42	100,00
Kep. Bangka Belitung	20,64	79,36	100,00
Kepulauan Riau	26,91	73,09	100,00
DKI Jakarta	33,69	66,31	100,00
Jawa Barat	20,87	79,13	100,00
Jawa Tengah	18,65	81,35	100,00
DI Yogyakarta	28,84	71,16	100,00
Jawa Timur	20,72	79,28	100,00
Banten	25,27	74,73	100,00
Bali	27,99	72,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,72	79,28	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,27	69,73	100,00
Kalimantan Barat	25,07	74,93	100,00
Kalimantan Tengah	27,17	72,83	100,00
Kalimantan Selatan	23,74	76,26	100,00
Kalimantan Timur	31,95	68,05	100,00
Kalimantan Utara	24,19	75,81	100,00
Sulawesi Utara	24,30	75,70	100,00
Sulawesi Tengah	26,54	73,46	100,00
Sulawesi Selatan	22,71	77,29	100,00
Sulawesi Tenggara	26,04	73,96	100,00
Gorontalo	23,48	76,52	100,00
Sulawesi Barat	19,58	80,42	100,00
Maluku	25,95	74,05	100,00
Maluku Utara	32,05	67,95	100,00
Papua Barat	29,39	70,61	100,00
Papua	21,97	78,03	100,00
Indonesia	22,88	77,12	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.18.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (*White Collar* dan *Blue Collar*), 2023

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama		
	<i>White Collar</i>	<i>Blue Collar</i>	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13,36	86,64	100,00
Sumatera Utara	11,80	88,20	100,00
Sumatera Barat	14,92	85,08	100,00
Riau	12,25	87,75	100,00
Jambi	14,73	85,27	100,00
Sumatera Selatan	10,74	89,26	100,00
Bengkulu	15,69	84,31	100,00
Lampung	10,70	89,30	100,00
Kep. Bangka Belitung	15,44	84,56	100,00
Kepulauan Riau	22,46	77,54	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	11,31	88,69	100,00
Jawa Tengah	11,75	88,25	100,00
DI Yogyakarta	15,98	84,02	100,00
Jawa Timur	11,04	88,96	100,00
Banten	10,23	89,77	100,00
Bali	12,97	87,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	16,15	83,85	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,72	88,28	100,00
Kalimantan Barat	10,75	89,25	100,00
Kalimantan Tengah	13,63	86,37	100,00
Kalimantan Selatan	18,27	81,73	100,00
Kalimantan Timur	16,72	83,28	100,00
Kalimantan Utara	15,58	84,42	100,00
Sulawesi Utara	21,00	79,00	100,00
Sulawesi Tengah	12,02	87,98	100,00
Sulawesi Selatan	13,15	86,85	100,00
Sulawesi Tenggara	17,23	82,77	100,00
Gorontalo	18,16	81,84	100,00
Sulawesi Barat	12,61	87,39	100,00
Maluku	14,81	85,19	100,00
Maluku Utara	14,88	85,12	100,00
Papua Barat	14,51	85,49	100,00
Papua	2,11	97,89	100,00
Indonesia	12,13	87,87	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.18.3 Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (*White Collar* dan *Blue Collar*), 2023

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama		
	<i>White Collar</i>	<i>Blue Collar</i>	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,73	89,27	100,00
Sumatera Utara	10,07	89,93	100,00
Sumatera Barat	9,77	90,23	100,00
Riau	10,85	89,15	100,00
Jambi	11,52	88,48	100,00
Sumatera Selatan	9,43	90,57	100,00
Bengkulu	12,55	87,45	100,00
Lampung	8,49	91,51	100,00
Kep. Bangka Belitung	8,25	91,75	100,00
Kepulauan Riau	19,04	80,96	100,00
DKI Jakarta	23,66	76,34	100,00
Jawa Barat	14,29	85,71	100,00
Jawa Tengah	10,71	89,29	100,00
DI Yogyakarta	17,66	82,34	100,00
Jawa Timur	11,06	88,94	100,00
Banten	16,89	83,11	100,00
Bali	16,93	83,07	100,00
Nusa Tenggara Barat	13,44	86,56	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,72	88,28	100,00
Kalimantan Barat	11,21	88,79	100,00
Kalimantan Tengah	13,07	86,93	100,00
Kalimantan Selatan	12,96	87,04	100,00
Kalimantan Timur	18,39	81,61	100,00
Kalimantan Utara	12,65	87,35	100,00
Sulawesi Utara	15,09	84,91	100,00
Sulawesi Tengah	9,86	90,14	100,00
Sulawesi Selatan	10,80	89,20	100,00
Sulawesi Tenggara	13,55	86,45	100,00
Gorontalo	12,20	87,80	100,00
Sulawesi Barat	10,09	89,91	100,00
Maluku	11,87	88,13	100,00
Maluku Utara	12,27	87,73	100,00
Papua Barat	16,02	83,98	100,00
Papua	6,69	93,31	100,00
Indonesia	12,43	87,57	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.18.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (*White Collar* dan *Blue Collar*), 2023

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama		
	<i>White Collar</i>	<i>Blue Collar</i>	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,21	69,79	100,00
Sumatera Utara	24,41	75,59	100,00
Sumatera Barat	33,82	66,18	100,00
Riau	29,98	70,02	100,00
Jambi	32,19	67,81	100,00
Sumatera Selatan	27,83	72,17	100,00
Bengkulu	31,70	68,30	100,00
Lampung	24,95	75,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	37,04	62,96	100,00
Kepulauan Riau	37,47	62,53	100,00
DKI Jakarta	45,64	54,36	100,00
Jawa Barat	26,61	73,39	100,00
Jawa Tengah	22,53	77,47	100,00
DI Yogyakarta	35,62	64,38	100,00
Jawa Timur	25,21	74,79	100,00
Banten	29,69	70,31	100,00
Bali	30,41	69,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	25,08	74,92	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,73	78,27	100,00
Kalimantan Barat	24,63	75,37	100,00
Kalimantan Tengah	31,95	68,05	100,00
Kalimantan Selatan	33,79	66,21	100,00
Kalimantan Timur	42,78	57,22	100,00
Kalimantan Utara	35,45	64,55	100,00
Sulawesi Utara	39,11	60,89	100,00
Sulawesi Tengah	29,23	70,77	100,00
Sulawesi Selatan	28,46	71,54	100,00
Sulawesi Tenggara	32,93	67,07	100,00
Gorontalo	35,26	64,74	100,00
Sulawesi Barat	22,33	77,67	100,00
Maluku	30,05	69,95	100,00
Maluku Utara	31,64	68,36	100,00
Papua Barat	27,43	72,57	100,00
Papua	5,88	94,12	100,00
Indonesia	27,46	72,54	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.18.5 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama (*White Collar* dan *Blue Collar*), 2023

Provinsi	Jenis Pekerjaan Utama		
	<i>White Collar</i>	<i>Blue Collar</i>	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	17,61	82,39	100,00
Sumatera Utara	15,84	84,16	100,00
Sumatera Barat	18,65	81,35	100,00
Riau	17,40	82,60	100,00
Jambi	18,95	81,05	100,00
Sumatera Selatan	16,18	83,82	100,00
Bengkulu	19,25	80,75	100,00
Lampung	13,99	86,01	100,00
Kep. Bangka Belitung	18,47	81,53	100,00
Kepulauan Riau	26,43	73,57	100,00
DKI Jakarta	33,69	66,31	100,00
Jawa Barat	18,95	81,05	100,00
Jawa Tengah	15,55	84,45	100,00
DI Yogyakarta	25,46	74,54	100,00
Jawa Timur	16,63	83,37	100,00
Banten	21,68	78,32	100,00
Bali	23,10	76,90	100,00
Nusa Tenggara Barat	18,32	81,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,03	83,97	100,00
Kalimantan Barat	15,96	84,04	100,00
Kalimantan Tengah	19,64	80,36	100,00
Kalimantan Selatan	20,92	79,08	100,00
Kalimantan Timur	27,22	72,78	100,00
Kalimantan Utara	20,93	79,07	100,00
Sulawesi Utara	22,79	77,21	100,00
Sulawesi Tengah	16,62	83,38	100,00
Sulawesi Selatan	17,39	82,61	100,00
Sulawesi Tenggara	20,63	79,37	100,00
Gorontalo	20,63	79,37	100,00
Sulawesi Barat	14,24	85,76	100,00
Maluku	18,59	81,41	100,00
Maluku Utara	19,09	80,91	100,00
Papua Barat	20,16	79,84	100,00
Papua	6,37	93,63	100,00
Indonesia	18,24	81,76	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.19.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023

Provinsi	Status Pekerjaan		
	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	63,54	36,46	100,00
Sumatera Utara	65,80	34,20	100,00
Sumatera Barat	57,25	42,75	100,00
Riau	66,34	33,66	100,00
Jambi	68,62	31,38	100,00
Sumatera Selatan	68,58	31,42	100,00
Bengkulu	59,74	40,26	100,00
Lampung	57,59	42,41	100,00
Kep. Bangka Belitung	66,96	33,04	100,00
Kepulauan Riau	81,21	18,79	100,00
DKI Jakarta	78,24	21,76	100,00
Jawa Barat	66,70	33,30	100,00
Jawa Tengah	67,48	32,52	100,00
DI Yogyakarta	72,00	28,00	100,00
Jawa Timur	65,94	34,06	100,00
Banten	78,66	21,34	100,00
Bali	74,64	25,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	47,06	52,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,57	42,43	100,00
Kalimantan Barat	70,54	29,46	100,00
Kalimantan Tengah	67,17	32,83	100,00
Kalimantan Selatan	72,35	27,65	100,00
Kalimantan Timur	78,08	21,92	100,00
Kalimantan Utara	68,75	31,25	100,00
Sulawesi Utara	62,66	37,34	100,00
Sulawesi Tengah	60,74	39,26	100,00
Sulawesi Selatan	61,29	38,71	100,00
Sulawesi Tenggara	57,09	42,91	100,00
Gorontalo	56,81	43,19	100,00
Sulawesi Barat	49,00	51,00	100,00
Maluku	65,06	34,94	100,00
Maluku Utara	65,39	34,61	100,00
Papua Barat	62,74	37,26	100,00
Papua	47,61	52,39	100,00
Indonesia	67,46	32,54	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.19.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023

Provinsi	Status Pekerjaan		
	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	40,55	59,45	100,00
Sumatera Utara	33,50	66,50	100,00
Sumatera Barat	36,08	63,92	100,00
Riau	45,09	54,91	100,00
Jambi	43,09	56,91	100,00
Sumatera Selatan	39,15	60,85	100,00
Bengkulu	37,07	62,93	100,00
Lampung	34,22	65,78	100,00
Kep. Bangka Belitung	54,17	45,83	100,00
Kepulauan Riau	55,17	44,83	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	40,23	59,77	100,00
Jawa Tengah	53,96	46,04	100,00
DI Yogyakarta	60,07	39,93	100,00
Jawa Timur	42,76	57,24	100,00
Banten	45,11	54,89	100,00
Bali	54,36	45,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,47	71,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,00	78,00	100,00
Kalimantan Barat	47,23	52,77	100,00
Kalimantan Tengah	56,71	43,29	100,00
Kalimantan Selatan	53,52	46,48	100,00
Kalimantan Timur	59,60	40,40	100,00
Kalimantan Utara	42,40	57,60	100,00
Sulawesi Utara	43,42	56,58	100,00
Sulawesi Tengah	31,97	68,03	100,00
Sulawesi Selatan	35,22	64,78	100,00
Sulawesi Tenggara	40,23	59,77	100,00
Gorontalo	40,77	59,23	100,00
Sulawesi Barat	29,62	70,38	100,00
Maluku	29,44	70,56	100,00
Maluku Utara	30,24	69,76	100,00
Papua Barat	31,95	68,05	100,00
Papua	4,38	95,62	100,00
Indonesia	40,14	59,86	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.19.3 Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023

Provinsi	Status Pekerjaan		
	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	47,67	52,33	100,00
Sumatera Utara	52,16	47,84	100,00
Sumatera Barat	44,33	55,67	100,00
Riau	52,48	47,52	100,00
Jambi	51,63	48,37	100,00
Sumatera Selatan	49,81	50,19	100,00
Bengkulu	41,70	58,30	100,00
Lampung	39,11	60,89	100,00
Kep. Bangka Belitung	60,64	39,36	100,00
Kepulauan Riau	77,81	22,19	100,00
DKI Jakarta	77,40	22,60	100,00
Jawa Barat	60,83	39,17	100,00
Jawa Tengah	60,49	39,51	100,00
DI Yogyakarta	66,77	33,23	100,00
Jawa Timur	56,83	43,17	100,00
Banten	71,34	28,66	100,00
Bali	69,75	30,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	35,95	64,05	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,23	69,77	100,00
Kalimantan Barat	57,78	42,22	100,00
Kalimantan Tengah	65,96	34,04	100,00
Kalimantan Selatan	64,93	35,07	100,00
Kalimantan Timur	74,26	25,74	100,00
Kalimantan Utara	59,77	40,23	100,00
Sulawesi Utara	50,38	49,62	100,00
Sulawesi Tengah	39,57	60,43	100,00
Sulawesi Selatan	45,37	54,63	100,00
Sulawesi Tenggara	46,49	53,51	100,00
Gorontalo	44,52	55,48	100,00
Sulawesi Barat	33,37	66,63	100,00
Maluku	39,09	60,91	100,00
Maluku Utara	35,71	64,29	100,00
Papua Barat	45,95	54,05	100,00
Papua	16,22	83,78	100,00
Indonesia	55,26	44,74	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.19.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023

Provinsi	Status Pekerjaan		
	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	50,22	49,78	100,00
Sumatera Utara	48,02	51,98	100,00
Sumatera Barat	50,28	49,72	100,00
Riau	56,50	43,50	100,00
Jambi	51,88	48,12	100,00
Sumatera Selatan	51,74	48,26	100,00
Bengkulu	50,55	49,45	100,00
Lampung	47,79	52,21	100,00
Kep. Bangka Belitung	63,40	36,60	100,00
Kepulauan Riau	79,29	20,71	100,00
DKI Jakarta	79,23	20,77	100,00
Jawa Barat	62,32	37,68	100,00
Jawa Tengah	62,71	37,29	100,00
DI Yogyakarta	71,60	28,40	100,00
Jawa Timur	55,09	44,91	100,00
Banten	69,50	30,50	100,00
Bali	66,01	33,99	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,24	60,76	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,30	69,70	100,00
Kalimantan Barat	51,94	48,06	100,00
Kalimantan Tengah	52,73	47,27	100,00
Kalimantan Selatan	58,98	41,02	100,00
Kalimantan Timur	68,97	31,03	100,00
Kalimantan Utara	56,99	43,01	100,00
Sulawesi Utara	61,32	38,68	100,00
Sulawesi Tengah	43,89	56,11	100,00
Sulawesi Selatan	49,14	50,86	100,00
Sulawesi Tenggara	47,18	52,82	100,00
Gorontalo	54,65	45,35	100,00
Sulawesi Barat	35,63	64,37	100,00
Maluku	45,70	54,30	100,00
Maluku Utara	44,61	55,39	100,00
Papua Barat	39,56	60,44	100,00
Papua	9,64	90,36	100,00
Indonesia	56,30	43,70	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.19.5 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (Formal dan Informal), 2023

Provinsi	Status Pekerjaan		
	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	48,57	51,43	100,00
Sumatera Utara	50,49	49,51	100,00
Sumatera Barat	46,52	53,48	100,00
Riau	53,85	46,15	100,00
Jambi	51,72	48,28	100,00
Sumatera Selatan	50,51	49,49	100,00
Bengkulu	44,80	55,20	100,00
Lampung	42,01	57,99	100,00
Kep. Bangka Belitung	61,62	38,38	100,00
Kepulauan Riau	78,41	21,59	100,00
DKI Jakarta	78,24	21,76	100,00
Jawa Barat	61,39	38,61	100,00
Jawa Tengah	61,40	38,60	100,00
DI Yogyakarta	68,87	31,13	100,00
Jawa Timur	56,15	43,85	100,00
Banten	70,65	29,35	100,00
Bali	68,04	31,96	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,33	62,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,26	69,74	100,00
Kalimantan Barat	55,71	44,29	100,00
Kalimantan Tengah	61,35	38,65	100,00
Kalimantan Selatan	62,65	37,35	100,00
Kalimantan Timur	72,34	27,66	100,00
Kalimantan Utara	58,76	41,24	100,00
Sulawesi Utara	53,89	46,11	100,00
Sulawesi Tengah	41,08	58,92	100,00
Sulawesi Selatan	46,78	53,22	100,00
Sulawesi Tenggara	46,74	53,26	100,00
Gorontalo	48,22	51,78	100,00
Sulawesi Barat	34,14	65,86	100,00
Maluku	41,54	58,46	100,00
Maluku Utara	38,85	61,15	100,00
Papua Barat	43,64	56,36	100,00
Papua	13,66	86,34	100,00
Indonesia	55,66	44,34	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.20.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023

Provinsi	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan							Rata-rata jam kerja
	0 jam	1-14 jam	15-34 jam	35-40 jam	41-48 jam	>= 49 jam	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,22	7,97	22,87	17,30	20,04	30,60	100,00	40,50
Sumatera Utara	1,36	6,20	17,50	15,72	32,42	26,80	100,00	42,28
Sumatera Barat	2,05	10,93	21,73	16,06	20,96	28,27	100,00	39,37
Riau	0,98	7,08	13,27	18,38	28,63	31,66	100,00	43,60
Jambi	0,99	9,75	19,42	17,72	28,11	24,01	100,00	39,73
Sumatera Selatan	1,15	8,22	13,97	16,39	26,84	33,43	100,00	43,48
Bengkulu	2,43	10,44	16,12	13,88	25,50	31,62	100,00	41,25
Lampung	1,35	8,02	18,40	15,27	25,49	31,47	100,00	41,95
Kep. Bangka Belitung	1,42	7,89	14,80	17,50	32,64	25,75	100,00	41,73
Kepulauan Riau	0,76	5,91	10,45	22,28	30,10	30,51	100,00	44,40
DKI Jakarta	0,44	4,10	6,67	24,92	39,83	24,04	100,00	45,28
Jawa Barat	0,85	6,57	14,14	19,76	33,56	25,13	100,00	42,77
Jawa Tengah	1,66	7,57	13,90	17,25	36,64	22,97	100,00	41,24
DI Yogyakarta	2,15	10,40	18,93	16,33	32,73	19,46	100,00	38,46
Jawa Timur	0,96	8,29	14,14	14,60	34,33	27,67	100,00	42,21
Banten	0,55	3,43	10,65	25,31	39,08	20,99	100,00	43,56
Bali	1,39	7,42	12,61	15,83	41,57	21,19	100,00	42,01
Nusa Tenggara Barat	1,21	12,60	19,12	12,17	24,65	30,25	100,00	39,59
Nusa Tenggara Timur	0,92	12,51	16,39	16,33	23,92	29,94	100,00	40,81
Kalimantan Barat	1,67	6,39	15,31	14,69	29,94	31,99	100,00	43,16
Kalimantan Tengah	2,47	6,94	14,08	15,70	27,36	33,44	100,00	42,50
Kalimantan Selatan	0,84	8,84	15,09	16,57	28,07	30,60	100,00	42,47
Kalimantan Timur	1,33	4,50	11,29	15,57	35,69	31,63	100,00	45,21
Kalimantan Utara	2,12	8,01	14,82	17,18	21,00	36,87	100,00	43,36
Sulawesi Utara	0,85	6,66	12,76	18,49	30,92	30,32	100,00	44,51
Sulawesi Tengah	1,23	8,26	13,95	17,69	23,80	35,07	100,00	43,13
Sulawesi Selatan	1,79	10,04	15,90	14,69	26,78	30,80	100,00	41,77
Sulawesi Tenggara	1,58	13,00	19,93	14,27	19,40	31,83	100,00	40,03
Gorontalo	1,72	10,91	13,06	13,62	18,98	41,70	100,00	43,56
Sulawesi Barat	4,78	12,18	20,99	11,08	14,84	36,13	100,00	39,69
Maluku	1,93	7,14	15,56	14,63	19,35	41,39	100,00	45,63
Maluku Utara	0,66	5,00	14,72	19,61	23,05	36,96	100,00	44,80
Papua Barat	0,98	8,44	15,10	15,12	26,53	33,83	100,00	43,96
Papua	1,72	5,58	20,47	15,69	25,68	30,86	100,00	43,06
Indonesia	1,15	7,24	14,24	17,93	32,87	26,57	100,00	42,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.20.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023

Provinsi	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan							Rata-rata jam kerja
	0 jam	1-14 jam	15-34 jam	35-40 jam	41-48 jam	>= 49 jam	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,32	12,12	34,92	14,53	17,95	19,16	100,00	34,62
Sumatera Utara	1,11	14,34	31,16	17,15	21,50	14,74	100,00	34,09
Sumatera Barat	1,43	14,03	28,61	15,06	20,69	20,18	100,00	35,63
Riau	0,83	13,49	29,55	13,32	21,16	21,65	100,00	36,30
Jambi	0,72	11,85	33,34	14,25	20,43	19,40	100,00	35,50
Sumatera Selatan	0,81	10,97	29,45	14,51	22,25	22,01	100,00	36,96
Bengkulu	0,97	12,52	28,56	15,90	19,08	22,96	100,00	36,52
Lampung	1,46	13,54	27,76	14,27	18,78	24,20	100,00	36,15
Kep. Bangka Belitung	3,13	7,54	17,82	14,65	31,50	25,36	100,00	40,43
Kepulauan Riau	4,77	8,13	19,43	17,30	18,30	32,07	100,00	40,17
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	2,40	10,61	21,93	13,78	26,49	24,79	100,00	38,98
Jawa Tengah	2,34	9,78	17,63	13,83	30,19	26,24	100,00	40,02
DI Yogyakarta	0,75	12,04	20,18	18,48	30,10	18,45	100,00	37,10
Jawa Timur	0,91	12,84	21,93	11,11	26,40	26,81	100,00	38,74
Banten	0,67	11,53	18,17	14,20	31,12	24,31	100,00	40,89
Bali	1,48	11,26	18,96	9,56	32,12	26,63	100,00	40,13
Nusa Tenggara Barat	1,82	22,34	27,68	10,81	15,37	21,98	100,00	33,22
Nusa Tenggara Timur	1,68	24,02	36,21	12,59	14,70	10,79	100,00	28,68
Kalimantan Barat	0,97	10,34	25,15	15,00	27,68	20,85	100,00	37,68
Kalimantan Tengah	2,24	8,62	22,42	14,03	24,21	28,49	100,00	39,61
Kalimantan Selatan	1,88	12,28	26,02	14,43	22,63	22,77	100,00	36,93
Kalimantan Timur	1,13	9,17	16,85	16,13	20,84	35,89	100,00	42,77
Kalimantan Utara	1,92	7,42	27,55	15,39	20,41	27,30	100,00	39,73
Sulawesi Utara	1,87	9,24	26,22	16,28	25,89	20,49	100,00	38,09
Sulawesi Tengah	0,74	12,46	29,02	13,83	19,13	24,83	100,00	36,93
Sulawesi Selatan	2,04	19,66	27,29	11,35	15,99	23,66	100,00	34,55
Sulawesi Tenggara	1,43	15,29	28,82	12,74	16,63	25,10	100,00	35,78
Gorontalo	2,30	14,65	24,52	17,29	15,91	25,33	100,00	36,55
Sulawesi Barat	2,00	20,69	33,86	10,36	12,88	20,20	100,00	31,88
Maluku	1,29	13,70	36,14	12,04	17,11	19,72	100,00	34,31
Maluku Utara	2,19	12,73	27,68	13,41	19,52	24,48	100,00	36,66
Papua Barat	2,41	10,42	37,60	16,33	15,67	17,57	100,00	34,35
Papua	0,35	4,14	41,89	26,54	24,55	2,53	100,00	33,52
Indonesia	1,49	12,83	26,07	14,06	23,30	22,25	100,00	36,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.20.3 Persentase Pemuda Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023

Provinsi	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan							Rata-rata jam kerja
	0 jam	1-14 jam	15-34 jam	35-40 jam	41-48 jam	>= 49 jam	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,97	7,53	28,51	15,90	21,49	25,58	100,00	38,93
Sumatera Utara	1,30	7,93	22,02	17,25	29,32	22,19	100,00	39,83
Sumatera Barat	1,57	9,68	24,62	15,19	23,56	25,38	100,00	38,97
Riau	0,98	9,45	22,55	16,55	25,92	24,54	100,00	39,63
Jambi	0,98	8,61	27,43	16,83	24,61	21,54	100,00	37,96
Sumatera Selatan	0,86	8,12	21,66	14,81	26,62	27,92	100,00	40,87
Bengkulu	1,31	10,92	23,27	14,16	23,54	26,80	100,00	38,94
Lampung	1,37	9,38	24,24	14,97	22,79	27,25	100,00	39,11
Kep. Bangka Belitung	2,37	5,21	14,46	14,59	35,87	27,51	100,00	42,78
Kepulauan Riau	0,72	5,12	9,79	20,37	27,88	36,13	100,00	45,86
DKI Jakarta	0,36	2,27	5,52	21,09	42,42	28,33	100,00	47,09
Jawa Barat	1,18	5,71	13,48	17,99	33,60	28,04	100,00	43,65
Jawa Tengah	2,08	6,94	13,56	14,66	36,61	26,15	100,00	42,04
DI Yogyakarta	1,48	10,02	16,82	16,71	34,24	20,74	100,00	39,33
Jawa Timur	0,89	6,58	15,72	12,70	34,32	29,78	100,00	42,75
Banten	0,64	3,84	11,25	21,23	39,96	23,08	100,00	44,05
Bali	1,21	6,71	13,21	14,86	37,83	26,19	100,00	43,12
Nusa Tenggara Barat	1,23	15,19	20,47	10,19	23,16	29,76	100,00	38,58
Nusa Tenggara Timur	1,64	17,54	30,79	13,79	19,55	16,71	100,00	33,16
Kalimantan Barat	1,05	7,68	19,64	14,24	32,55	24,84	100,00	40,45
Kalimantan Tengah	3,09	5,41	15,75	13,86	29,16	32,73	100,00	42,35
Kalimantan Selatan	1,36	7,15	18,31	15,19	27,21	30,77	100,00	42,29
Kalimantan Timur	1,27	4,66	10,28	13,93	31,41	38,45	100,00	46,79
Kalimantan Utara	2,36	6,80	17,78	13,01	22,28	37,77	100,00	43,94
Sulawesi Utara	1,01	5,53	17,26	17,10	31,29	27,80	100,00	43,32
Sulawesi Tengah	0,90	8,16	21,74	14,96	23,30	30,93	100,00	40,76
Sulawesi Selatan	2,47	13,18	20,09	11,88	23,15	29,22	100,00	39,17
Sulawesi Tenggara	1,01	10,71	22,41	13,52	20,80	31,55	100,00	39,85
Gorontalo	1,75	9,69	20,05	14,84	17,25	36,40	100,00	41,53
Sulawesi Barat	2,48	15,24	31,67	10,72	16,03	23,86	100,00	34,71
Maluku	1,21	8,85	27,63	12,55	19,82	29,94	100,00	40,26
Maluku Utara	2,32	6,45	22,07	13,52	23,37	32,27	100,00	40,95
Papua Barat	2,21	7,53	24,44	16,62	21,42	27,78	100,00	40,12
Papua	0,79	3,92	32,23	25,62	26,91	10,54	100,00	36,75
Indonesia	1,31	7,46	17,59	15,74	30,96	26,94	100,00	41,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.20.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023

Provinsi	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan							Rata-rata jam kerja
	0 jam	1-14 jam	15-34 jam	35-40 jam	41-48 jam	> = 49 jam	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,86	16,42	34,73	14,75	13,53	18,71	100,00	32,55
Sumatera Utara	1,16	13,23	26,87	15,13	24,16	19,44	100,00	36,27
Sumatera Barat	2,03	17,33	26,23	16,17	16,15	22,10	100,00	34,93
Riau	0,72	13,52	23,37	13,21	21,03	28,16	100,00	38,69
Jambi	0,51	15,65	30,80	12,92	20,19	19,93	100,00	35,10
Sumatera Selatan	1,08	13,00	26,59	15,97	19,53	23,82	100,00	37,08
Bengkulu	1,76	13,47	26,27	17,17	17,05	24,27	100,00	36,63
Lampung	1,53	16,32	25,44	13,87	17,48	25,37	100,00	36,03
Kep. Bangka Belitung	1,71	12,36	18,98	19,43	25,43	22,10	100,00	38,30
Kepulauan Riau	1,89	7,68	13,85	23,79	30,26	22,54	100,00	41,08
DKI Jakarta	0,53	6,27	8,04	29,49	36,74	18,93	100,00	43,12
Jawa Barat	1,13	10,14	19,35	19,48	29,73	20,16	100,00	39,31
Jawa Tengah	1,81	10,91	18,49	17,22	29,59	21,97	100,00	38,73
DI Yogyakarta	2,18	11,88	22,43	17,14	29,18	17,18	100,00	36,50
Jawa Timur	1,02	15,83	20,06	13,78	25,83	23,49	100,00	37,64
Banten	0,46	7,92	14,45	25,04	32,52	19,61	100,00	41,04
Bali	1,67	10,99	16,41	12,52	39,28	19,13	100,00	39,35
Nusa Tenggara Barat	1,95	21,16	27,92	13,21	15,15	20,60	100,00	33,05
Nusa Tenggara Timur	1,33	26,39	32,68	13,03	13,27	13,30	100,00	29,30
Kalimantan Barat	1,55	11,14	25,10	16,08	21,12	25,01	100,00	38,27
Kalimantan Tengah	0,95	12,49	24,27	16,49	18,95	26,86	100,00	38,18
Kalimantan Selatan	1,39	16,19	24,61	15,90	22,14	19,77	100,00	35,30
Kalimantan Timur	1,26	8,22	17,84	18,95	30,48	23,25	100,00	40,33
Kalimantan Utara	1,50	9,52	22,92	22,64	18,12	25,30	100,00	38,55
Sulawesi Utara	1,96	12,71	22,36	18,29	22,98	21,69	100,00	37,89
Sulawesi Tengah	0,89	16,66	28,92	15,21	15,58	22,74	100,00	35,41
Sulawesi Selatan	1,03	19,12	25,85	14,44	16,78	22,79	100,00	35,38
Sulawesi Tenggara	2,31	20,81	30,54	13,01	12,31	21,01	100,00	33,20
Gorontalo	2,52	18,50	17,71	16,88	17,47	26,92	100,00	36,81
Sulawesi Barat	2,97	25,47	29,28	10,16	8,10	24,01	100,00	31,73
Maluku	2,03	15,93	31,73	13,55	14,55	22,22	100,00	34,56
Maluku Utara	0,88	18,90	28,99	17,51	14,89	18,83	100,00	34,44
Papua Barat	1,27	13,43	37,19	14,55	16,93	16,63	100,00	34,25
Papua	0,43	5,28	45,21	22,01	21,48	5,59	100,00	33,72
Indonesia	1,28	13,15	22,13	17,08	25,21	21,15	100,00	37,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.20.5 Persentase Pemuda Bekerja menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2023

Provinsi	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan							Rata-rata jam kerja
	0 jam	1-14 jam	15-34 jam	35-40 jam	41-48 jam	>= 49 jam	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,29	10,67	30,71	15,50	18,68	23,15	100,00	36,67
Sumatera Utara	1,24	10,06	23,97	16,40	27,24	21,09	100,00	38,40
Sumatera Barat	1,74	12,50	25,22	15,55	20,82	24,17	100,00	37,48
Riau	0,89	10,84	22,83	15,41	24,24	25,78	100,00	39,31
Jambi	0,81	11,14	28,64	15,42	23,02	20,96	100,00	36,93
Sumatera Selatan	0,94	9,91	23,47	15,24	24,02	26,42	100,00	39,48
Bengkulu	1,47	11,81	24,32	15,21	21,27	25,92	100,00	38,13
Lampung	1,42	11,70	24,64	14,60	21,02	26,62	100,00	38,08
Kep. Bangka Belitung	2,13	7,74	16,06	16,31	32,16	25,59	100,00	41,19
Kepulauan Riau	1,19	6,14	11,42	21,74	28,83	30,67	100,00	43,94
DKI Jakarta	0,44	4,10	6,67	24,92	39,83	24,04	100,00	45,28
Jawa Barat	1,16	7,38	15,70	18,56	32,14	25,06	100,00	42,01
Jawa Tengah	1,97	8,56	15,58	15,71	33,74	24,44	100,00	40,69
DI Yogyakarta	1,78	10,83	19,26	16,90	32,04	19,19	100,00	38,10
Jawa Timur	0,94	10,22	17,43	13,12	30,98	27,31	100,00	40,74
Banten	0,58	5,36	12,45	22,66	37,18	21,78	100,00	42,92
Bali	1,42	8,67	14,67	13,79	38,49	22,96	100,00	41,39
Nusa Tenggara Barat	1,53	17,70	23,60	11,46	19,80	25,92	100,00	36,26
Nusa Tenggara Timur	1,51	21,35	31,60	13,46	16,84	15,24	100,00	31,50
Kalimantan Barat	1,23	8,90	21,57	14,89	28,50	24,90	100,00	39,68
Kalimantan Tengah	2,34	7,87	18,72	14,77	25,61	30,69	100,00	40,90
Kalimantan Selatan	1,37	10,61	20,72	15,46	25,27	26,56	100,00	39,62
Kalimantan Timur	1,26	5,95	13,02	15,75	31,07	32,95	100,00	44,45
Kalimantan Utara	2,05	7,79	19,65	16,50	20,77	33,24	100,00	41,98
Sulawesi Utara	1,32	7,84	18,90	17,48	28,63	25,84	100,00	41,58
Sulawesi Tengah	0,89	11,13	24,25	15,05	20,61	28,07	100,00	38,89
Sulawesi Selatan	1,93	15,40	22,24	12,83	20,77	26,82	100,00	37,75
Sulawesi Tenggara	1,49	14,40	25,38	13,33	17,70	27,70	100,00	37,42
Gorontalo	2,03	12,91	19,20	15,59	17,33	32,94	100,00	39,81
Sulawesi Barat	2,65	18,71	30,86	10,53	13,34	23,91	100,00	33,70
Maluku	1,51	11,47	29,15	12,92	17,87	27,08	100,00	38,16
Maluku Utara	1,81	10,83	24,51	14,93	20,38	27,54	100,00	38,66
Papua Barat	1,87	9,67	29,06	15,87	19,79	23,74	100,00	37,99
Papua	0,65	4,45	37,29	24,21	24,79	8,61	100,00	35,57
Indonesia	1,30	9,66	19,35	16,26	28,74	24,70	100,00	40,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	21,16	12,02	12,84	19,83	15,44
Sumatera Utara	16,16	8,31	12,71	12,47	12,62
Sumatera Barat	16,13	12,35	12,65	16,87	14,26
Riau	12,85	9,43	9,35	13,66	10,87
Jambi	15,57	8,48	10,18	12,43	11,01
Sumatera Selatan	14,88	8,27	10,00	12,53	10,94
Bengkulu	11,27	8,39	8,32	11,31	9,39
Lampung	13,40	9,89	8,46	15,90	11,09
Kep. Bangka Belitung	11,40	6,43	7,11	13,25	9,38
Kepulauan Riau	11,95	14,21	11,28	13,54	12,20
DKI Jakarta	16,27	-	19,68	11,80	16,27
Jawa Barat	19,36	16,66	20,37	16,18	18,83
Jawa Tengah	13,27	13,68	14,88	11,32	13,46
DI Yogyakarta	8,75	8,03	9,20	7,72	8,56
Jawa Timur	14,03	11,51	13,55	12,09	12,98
Banten	18,73	22,42	19,03	20,63	19,64
Bali	7,18	4,22	7,20	5,07	6,24
Nusa Tenggara Barat	8,38	5,60	7,80	5,74	6,95
Nusa Tenggara Timur	13,25	6,24	7,11	9,07	7,97
Kalimantan Barat	14,26	9,29	10,91	11,62	11,16
Kalimantan Tengah	11,77	8,86	9,32	11,73	10,17
Kalimantan Selatan	13,07	8,74	12,36	8,41	10,89
Kalimantan Timur	12,15	11,50	10,47	14,45	11,95
Kalimantan Utara	11,14	7,96	10,79	8,47	9,96
Sulawesi Utara	19,53	13,88	14,11	22,64	17,05
Sulawesi Tengah	10,43	5,42	5,84	9,28	7,07
Sulawesi Selatan	12,33	7,48	9,64	9,80	9,70
Sulawesi Tenggara	8,43	6,87	6,29	9,48	7,48
Gorontalo	9,94	6,22	6,90	9,81	7,99
Sulawesi Barat	7,86	4,58	5,41	5,28	5,37
Maluku	22,79	11,49	14,24	18,03	15,68
Maluku Utara	17,68	10,05	10,74	14,35	12,04
Papua Barat	17,55	10,01	11,66	15,33	13,03
Papua	15,75	3,10	6,11	6,14	6,12
Indonesia	15,45	10,57	13,73	12,89	13,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel 5.22 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)¹, 2023

Provinsi	Pemuda Berusaha dengan Jenis Jabatan <i>White Collar</i> per Jumlah Pemuda	Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal per Jumlah Pemuda Perempuan
	(1)	(2)
Aceh	0,50	17,16
Sumatera Utara	0,53	23,56
Sumatera Barat	0,33	20,54
Riau	0,45	20,85
Jambi	0,52	20,82
Sumatera Selatan	0,40	22,11
Bengkulu	0,63	20,07
Lampung	0,39	18,85
Kep. Bangka Belitung	0,16	27,12
Kepulauan Riau	0,32	38,18
DKI Jakarta	0,78	37,92
Jawa Barat	0,55	24,74
Jawa Tengah	0,56	30,15
DI Yogyakarta	1,66	37,70
Jawa Timur	0,66	25,45
Banten	0,66	26,96
Bali	0,55	41,50
Nusa Tenggara Barat	0,34	20,68
Nusa Tenggara Timur	0,19	16,44
Kalimantan Barat	0,46	20,67
Kalimantan Tengah	0,62	20,89
Kalimantan Selatan	0,24	26,11
Kalimantan Timur	0,72	28,10
Kalimantan Utara	0,21	24,51
Sulawesi Utara	0,49	19,35
Sulawesi Tengah	0,65	18,42
Sulawesi Selatan	0,34	20,69
Sulawesi Tenggara	0,42	20,11
Gorontalo	0,24	23,81
Sulawesi Barat	0,29	14,43
Maluku	0,11	14,77
Maluku Utara	0,34	16,63
Papua Barat	0,30	14,13
Papua	0,14	5,29
Indonesia	0,53	24,71

Catatan:

¹ Indikator ini digunakan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023



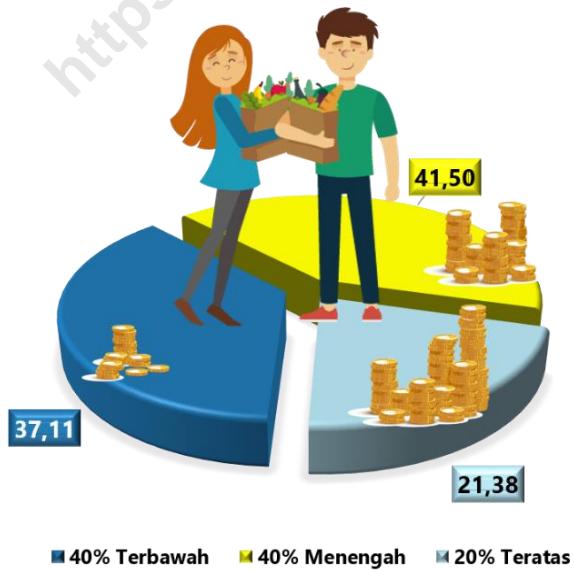
Bab 6. Sosial Ekonomi



Pemuda telah menorehkan sejarah yang baik dalam proses pembangunan. Kondisi ini seyogyanya dipertahankan sampai dengan sekarang. Agar dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagai subjek dari pembangunan, maka pemuda haruslah memiliki kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup pemuda dapat dilihat dari status ekonomi pemuda, kondisi tempat tinggal pemuda, dan kehidupan sosial pemuda.

6.1 Status Ekonomi Pemuda

Status ekonomi suatu rumah tangga menunjukkan bagaimana kesejahteraan rumah tangga tersebut. Pemuda sebagai subjek dari pembangunan seharusnya memiliki status ekonomi yang baik. Status ekonomi pemuda dapat dilihat melalui pendekatan distribusi pengeluaran perkapita rumah tangga dimana pemuda tinggal, yang dikelompokkan menjadi 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.1 Persentase Pemuda menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Berdasarkan Gambar 6.1, sebagian besar pemuda berada pada rumah tangga dengan status ekonomi 40 persen menengah. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, baik pemuda laki-laki maupun perempuan, mayoritas berada pada rumah tangga dengan status ekonomi 40 persen menengah. Hal yang sama terjadi pada persentase pemuda menurut distribusi pengeluaran rumah tangga dan klasifikasi desa (Gambar 6.2). Hal ini berarti baik pemuda laki-laki, perempuan, tinggal di perkotaan, maupun di perdesaan sebagian besar berada pada rumah tangga dengan status ekonomi rumah tangga 40 persen menengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.2 Persentase Pemuda menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga dan Karakteristik, 2023

Apabila dilihat menurut jenjang pendidikan pemuda, persentase pemuda yang tamat pendidikan SMP/sederajat ke bawah sebagian besar berada pada rumah tangga dengan status ekonomi 40 persen terbawah. Sementara itu, persentase pemuda dengan jenjang pendidikan SMA/sederajat dan perguruan tinggi sebagian besar berasal dari rumah tangga dengan status ekonomi 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Artinya pendidikan pada jenjang menengah atas dan perguruan tinggi masih lebih banyak hanya mampu dicapai oleh pemuda pada rumah tangga 40 persen menengah atas dan 20 persen teratas.



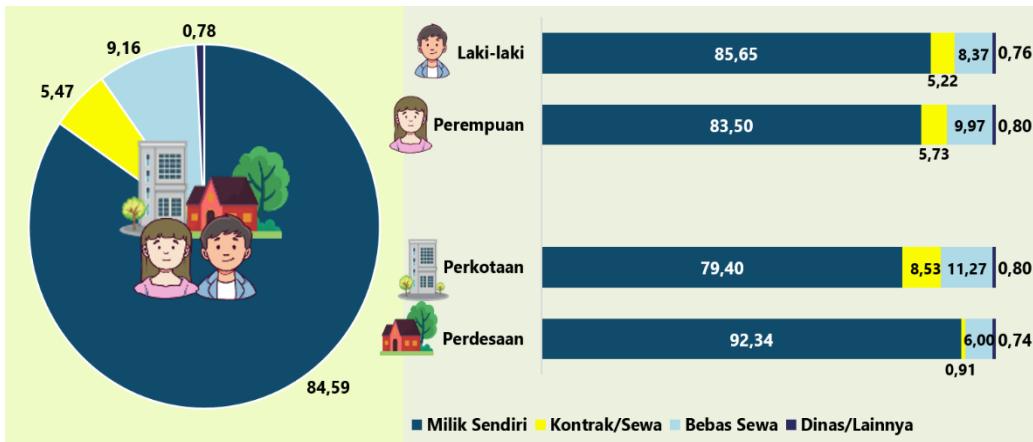
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.3 Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan menurut Karakteristik, 2023

Berdasarkan Gambar 6.3 terlihat bahwa sebesar 45,77 persen pemuda memiliki rekening tabungan. Dilihat menurut jenis kelamin, persentase pemuda perempuan yang memiliki rekening tabungan lebih besar daripada laki-laki. Dilihat menurut klasifikasi desa, persentase pemuda yang tinggal di perkotaan lebih besar daripada pemuda yang tinggal di perdesaan. Selanjutnya, semakin tinggi kelompok umur pemuda maka persentase kepemilikan rekening tabungan semakin besar. Semakin tinggi jenjang pendidikan pemuda juga semakin besar persentase kepemilikan rekening tabungan.

6.2 Kondisi Rumah Tempat Tinggal Pemuda

Berdasarkan Gambar 6.4 menunjukkan bahwa mayoritas pemuda tinggal di rumah milik sendiri (84,59 persen). Rumah dianggap milik sendiri jika rumah tersebut dimiliki oleh salah satu dari anggota rumah tangga dimana pemuda tersebut tinggal. Selanjutnya, sekitar 9,16 persen pemuda tinggal di rumah bebas sewa. Hal ini berarti sekitar 9,16 persen pemuda tinggal di rumah tangga, yang status kempemilikan rumahnya diperoleh dari pihak lain, baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

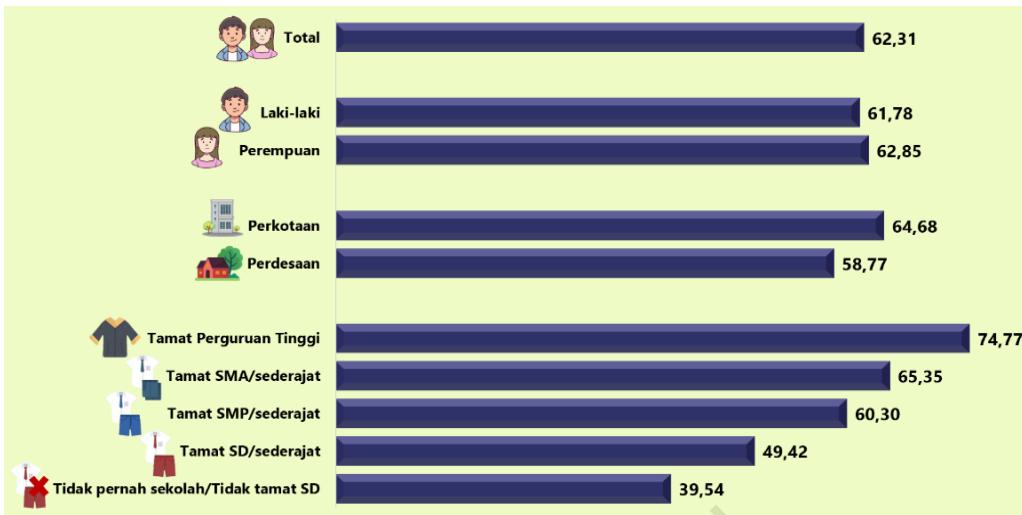


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.4 Persentase Pemuda menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal dan Karakteristik, 2023

Dilihat menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang tinggal di rumah milik sendiri lebih sedikit dibandingkan pemuda perempuan. Hal berbeda terjadi pada kepemilikan rumah kontrak/sewa dan bebas sewa. Persentase pemuda yang tinggal di rumah kontrak/sewa dan bebas sewa sedikit lebih besar pada perempuan daripada laki-laki (Gambar 6.4). Dilihat menurut klasifikasi desa, terdapat perbedaan pola status kepemilikan rumah tempat tinggal pemuda yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Pemuda yang tinggal di rumah milik sendiri lebih besar di perdesaan daripada perkotaan. Namun, pemuda yang tinggal di rumah kontrak/sewa dan bebas sewa terjadi lebih besar di perkotaan daripada perdesaan.

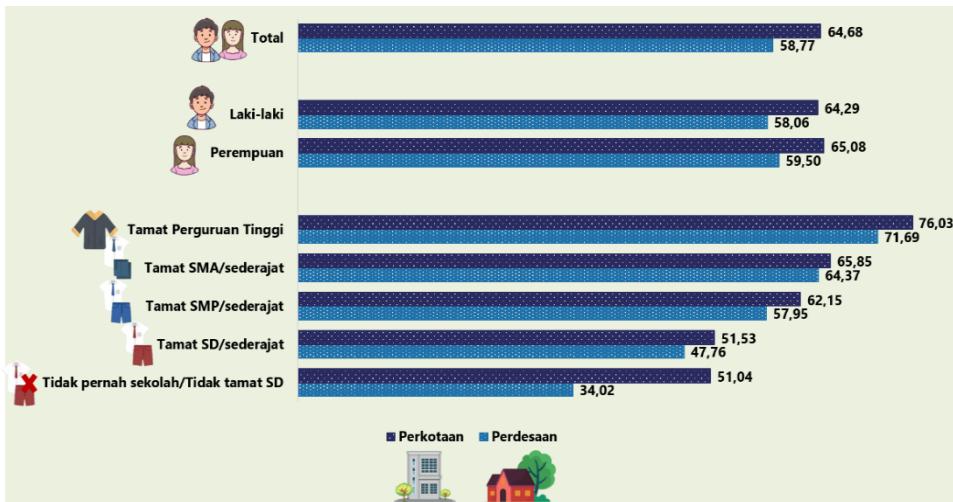
Kualitas perumahan memiliki dampak besar terhadap kesehatan (WHO 2018, vii). Perumahan sehat merupakan hunian yang menunjang keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh. Perumahan sehat memberi rasa nyaman, aman, dan privasi (WHO 2018, 2). Berdasarkan Gambar 6.5 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda tinggal di rumah layak huni (62,31 persen). Pemuda perempuan sedikit lebih besar tinggal di rumah layak huni daripada pemuda laki-laki. Persentase pemuda yang tinggal di rumah layak huni sedikit lebih banyak tinggal di perkotaan daripada perdesaan. Selanjutnya, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar persentase pemuda yang tinggal di rumah layak huni.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.5 Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Karakteristik Demografi, 2023

Pola yang sama terjadi pada persentase pemuda yang tinggal di rumah layak huni menurut klasifikasi desa (Gambar 6.6). Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih cukup besarnya persentase pemuda yang tinggal di rumah tidak layak huni, baik di perkotaan maupun perdesaan, yaitu berturut-turut sebesar 35,32 persen dan 41,23 persen. Perumahan buruk dapat menyebabkan orang terkena beberapa risiko kesehatan (WHO 2018, 3). Hasil kesehatan yang buruk pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap hasil perekonomian yang buruk (WHO 2018, 11).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.6 Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Klasifikasi Desa dan Karakteristik Demografi, 2023

6.3 Kehidupan Sosial Pemuda

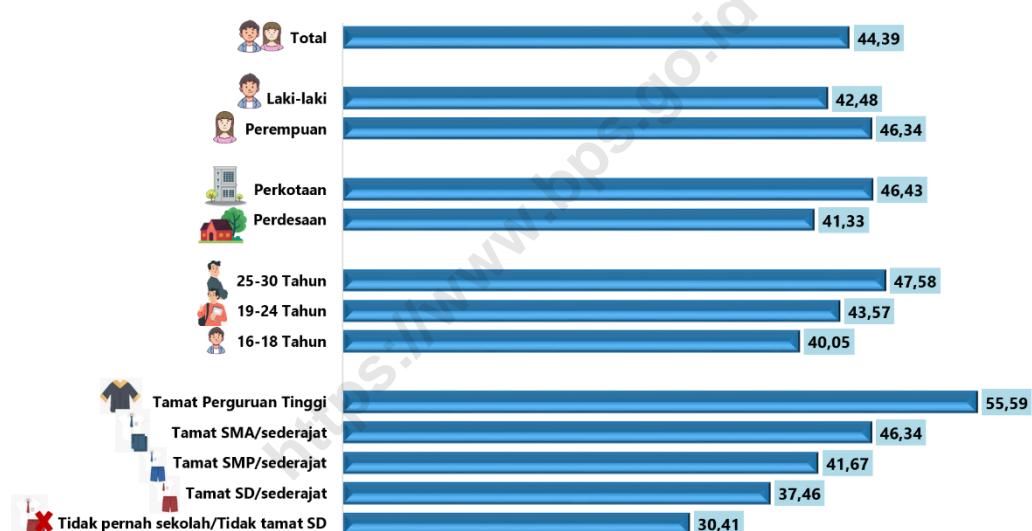
Berdasarkan Gambar 6.7 menunjukkan terjadinya peningkatan tren pemuda bepergian yang cukup signifikan. Peningkatan ini tak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang semakin konsisten membaik. Bahkan pada tanggal 22 Juni 2023 telah ditetapkan pula Keppres RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2023

Gambar 6.7 Persentase Pemuda yang Bepergian, 2021-2023

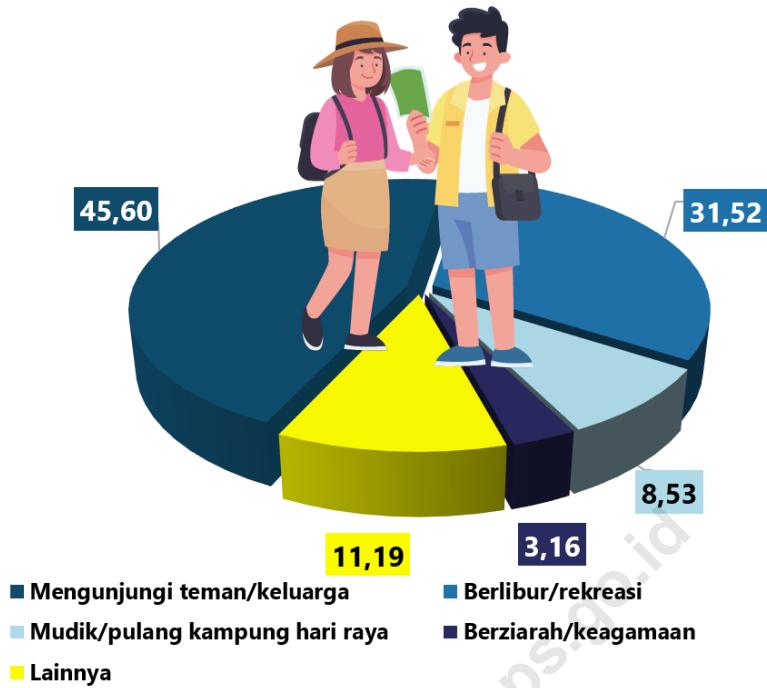
Karakteristik pemuda bepergian menurut jenis kelamin dan klasifikasi desa tidak berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan serta perkotaan dan perdesaan. Aktivitas mobilitas pemuda perempuan sedikit lebih besar daripada laki-laki. Persentase pemuda yang tinggal di perkotaan lebih besar melakukan aktivitas bepergian daripada pemuda yang tinggal di perdesaan. Selanjutnya, persentase pemuda bepergian menurut kelompok umur dan jenjang pendidikan memiliki pola yang sama. Semakin tinggi kelompok umur maka persentase pemuda yang bepergian semakin besar. Begitu pula dengan jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan maka persentase pemuda yang bepergian semakin besar (Gambar 6.8).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.8 Persentase Pemuda yang Bepergian menurut Karakteristik Demografi, 2023

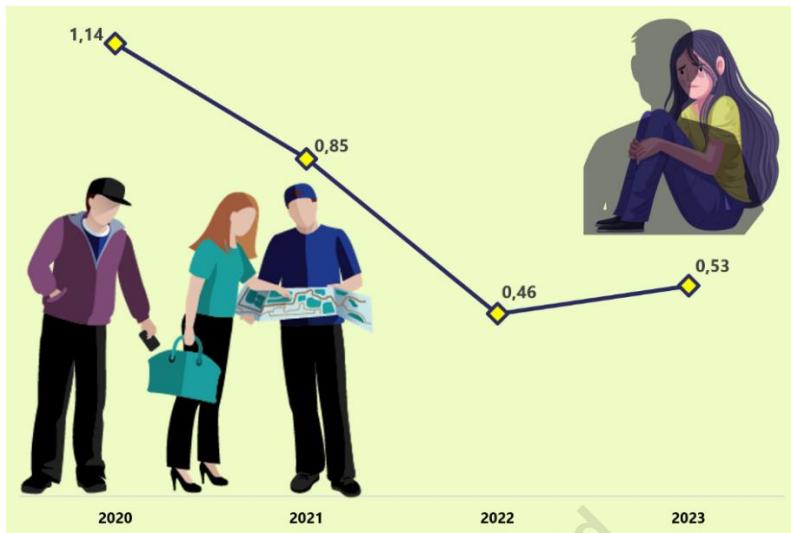
Dilihat menurut maksud utama bepergian, ternyata hampir separuh pemuda bepergian untuk tujuan mengunjungi teman/keluarga (45,60 persen). Selanjutnya sebesar 31,52 persen pemuda bepergian untuk tujuan berlibur/rekreasi. Sementara itu, maksud utama bepergian lainnya (11,19 persen) pada Gambar 6.8 adalah kesehatan/berobat, belanja/shopping, training/pendidikan/pelatihan, profesi/bisnis, olahraga/kesenian, misi/pertemuan/kongres/seminar, dan lain-lain.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.9 Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian menurut Maksud Utama Bepergian, 2023

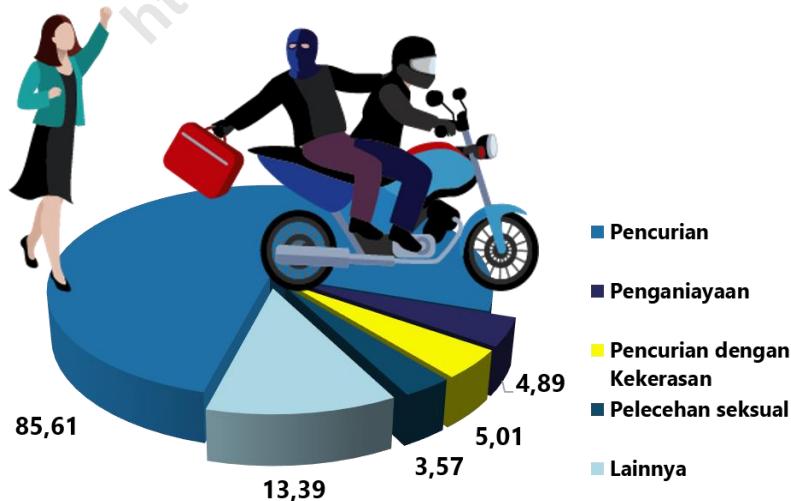
Pemuda tak luput dari korban kejahatan. Perbuatan kejahatan selalu merugikan baik materiil maupun nonmaterial. Selain itu, kejahatan dapat menyebabkan beban dan tekanan psikologis pada korbannya, seperti ketakutan, trauma, stres, dan berbagai gangguan jiwa (Soraya, 2022, 44). Selama tahun 2023, sekitar 0,53 persen pemuda pernah mengalami korban kejahatan. Tren ini bergerak fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2023 (Gambar 6.10).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2023

Gambar 6.10 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2020-2023

Berdasarkan Gambar 6.11 terlihat bahwa pada tahun 2023 dari seluruh pemuda yang mengalami korban kejahatan, mayoritas adalah korban pencurian (85,61 persen). Sekitar 5,01 persen mengalami pencurian dengan kekerasan, sekitar 4,89 persen pemuda mengalami korban penganiayaan, dan sekitar 3,57 persen mengalami korban pelecehan seksual.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.11 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan, 2023

Tabel 6.1 Persentase Pemuda menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Karakteristik	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	37,11	41,50	21,38	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	36,46	42,13	21,41	100,00
Perempuan	37,78	40,87	21,35	100,00
Kelompok Umur				
16-18 Tahun	41,08	41,27	17,65	100,00
19-24 Tahun	36,29	42,10	21,61	100,00
25-30 Tahun	35,80	41,03	23,17	100,00
Status Disabilitas				
Disabilitas	47,50	38,52	13,98	100,00
Non Disabilitas	37,04	41,53	21,44	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	54,61	33,77	11,61	100,00
Tamat SD/sederajat	54,29	36,09	9,62	100,00
Tamat SMP/sederajat	42,55	41,27	16,18	100,00
Tamat SMA/sederajat	31,78	44,14	24,08	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	19,12	39,55	41,33	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	36,86	42,12	21,02	100,00
Perdesaan	37,91	41,10	20,99	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.2 Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan menurut Klasifikasi Desa, 2023

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	53,07	34,85	45,77
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	50,71	32,82	43,50
Perempuan	55,47	36,96	48,09
Kelompok Umur			
16-18 Tahun	23,71	17,70	21,21
19-24 Tahun	56,12	34,05	47,49
25-30 Tahun	65,48	45,25	57,33
Status Disabilitas			
Disabilitas	17,86	13,35	15,92
Non Disabilitas	53,32	35,03	45,99
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah/	27,96	13,86	18,44
Tidak tamat SD	26,70	21,83	23,97
Tamat SD/sederajat	35,84	27,56	32,19
Tamat SMP/sederajat	61,77	42,62	55,29
Tamat SMA/sederajat	85,14	71,91	81,31
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	36,60	26,37	30,89
40% Menengah	55,73	35,18	47,07
20% Teratas	76,62	49,53	69,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.3 Persentase Pemuda menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2023

Karakteristik	Kepemilikan Tempat Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indonesia	84,59	5,47	9,16	0,78	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	85,65	5,22	8,37	0,76	100,00
Perempuan	83,50	5,73	9,97	0,80	100,00
Kelompok Umur					
16-18 Tahun	86,56	4,72	7,98	0,74	100,00
19-24 Tahun	86,57	5,18	7,55	0,70	100,00
25-30 Tahun	81,51	6,18	11,43	0,88	100,00
Status Disabilitas					
Disabilitas	86,61	3,85	9,06	0,48	100,00
Non Disabilitas	84,57	5,49	9,16	0,78	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	88,94	3,18	7,38	0,50	100,00
Tamat SD/sederajat	85,80	3,79	9,76	0,64	100,00
Tamat SMP/sederajat	85,49	4,93	8,98	0,60	100,00
Tamat SMA/sederajat	83,05	6,56	9,51	0,87	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	85,11	5,37	8,32	1,19	100,00
Distribusi Pengeluaran					
40% Terbawah	86,75	3,70	9,23	0,32	100,00
40% Menengah	83,25	6,46	9,45	0,84	100,00
20% Teratas	83,44	6,64	8,45	1,47	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	79,40	8,53	11,27	0,80	100,00
Perdesaan	92,34	0,91	6,00	0,74	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.4 Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Klasifikasi Desa, 2023

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	64,68	58,77	62,31
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	64,29	58,06	61,78
Perempuan	65,08	59,50	62,85
Kelompok Umur			
16-18 Tahun	63,26	57,80	60,99
19-24 Tahun	64,83	59,11	62,59
25-30 Tahun	65,29	58,97	62,74
Status Disabilitas			
Disabilitas	62,16	54,06	58,67
Non Disabilitas	64,70	58,80	62,34
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah /	51,04	34,02	39,54
Tidak tamat SD	51,53	47,76	49,42
Tamat SD/sederajat	62,15	57,95	60,30
Tamat SMP/sederajat	65,85	64,37	65,35
Tamat SMA/sederajat	76,03	71,69	74,77
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	56,11	49,27	53,15
40% Menengah	65,77	62,13	64,35
20% Teratas	77,54	69,33	74,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.5 Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian menurut Klasifikasi Desa, 2023

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)
Indonesia	46,43	41,33	44,39
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	44,20	39,95	42,48
Perempuan	48,71	42,77	46,34
Kelompok Umur			
16-18 Tahun	42,67	36,37	40,05
19-24 Tahun	45,58	40,43	43,57
25-30 Tahun	49,32	45,01	47,58
Status Disabilitas			
Disabilitas	25,96	23,43	24,87
Non Disabilitas	46,58	41,48	44,54
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah /	33,64	28,86	30,41
Tidak tamat SD	38,64	36,54	37,46
Tamat SD/sederajat	43,59	39,23	41,67
Tamat SMP/sederajat	47,50	44,08	46,34
Tamat SMA/sederajat	55,80	55,08	55,59
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	36,17	33,68	34,94
40% Menengah	47,20	43,13	45,41
20% Teratas	62,90	51,64	58,82

Catatan:

Bepergian yang dimaksud adalah pada periode Januari-Desember 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.6 Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian menurut Maksud Utama Bepergian, 2023

Karakteristik	Maksud Utama Bepergian					(6)
	Mengunjungi Teman/Keluarga	Berlibur/Rekreasi	Mudik/Pulang Kampung Hari Raya	Berziarah/Keagamaan	Lainnya ¹	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
Indonesia	45,60	31,52	8,53	3,16	11,19	
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	45,45	32,18	7,99	3,10	11,28	
Perempuan	45,73	30,90	9,04	3,22	11,10	
Kelompok Umur						
16-18 Tahun	44,14	33,70	8,45	3,38	10,34	
19-24 Tahun	44,22	32,85	8,34	3,15	11,44	
25-30 Tahun	47,55	29,29	8,74	3,08	11,34	
Status Disabilitas						
Disabilitas	49,07	19,88	6,61	4,32	20,12	
Non Disabilitas	45,58	31,57	8,54	3,16	11,15	
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan						
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	58,97	17,64	6,02	3,03	14,33	
Tamat SD/sederajat	52,40	25,40	7,04	4,54	10,62	
Tamat SMP/sederajat	46,63	31,66	7,99	3,23	10,49	
Tamat SMA/sederajat	44,06	32,58	9,24	3,06	11,06	
Tamat Perguruan Tinggi	41,88	33,51	8,95	2,45	13,20	
Distribusi Pengeluaran						
40% Terbawah	53,38	25,98	6,31	3,58	10,73	
40% Menengah	44,78	32,07	8,20	3,28	11,66	
20% Teratas	38,79	36,42	11,31	2,54	10,94	
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	43,22	32,87	11,65	2,77	9,49	
Perdesaan	49,59	29,26	3,29	3,82	14,04	

Catatan:

¹ termasuk belanja/*shopping*, pendidikan/pelatihan, kesehatan/berobat, profesi/bisnis, olahraga/kesenian, kongres/seminar, dsb

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.7 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Klasifikasi Desa, 2023

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	0,65	0,37	0,53
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	0,69	0,42	0,58
Perempuan	0,60	0,31	0,49
Kelompok Umur			
16-18 Tahun	0,40	0,22	0,33
19-24 Tahun	0,54	0,38	0,48
25-30 Tahun	0,89	0,43	0,70
Status Disabilitas			
Disabilitas	0,39	0,13	0,28
Non Disabilitas	0,65	0,37	0,54
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah /	0,29	0,44	0,39
Tidak tamat SD	0,82	0,29	0,53
Tamat SD/sederajat	0,61	0,34	0,49
Tamat SMP/sederajat	0,64	0,39	0,55
Tamat SMA/sederajat	0,72	0,48	0,65
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	0,54	0,24	0,40
40% Menengah	0,72	0,44	0,56
20% Teratas	0,69	0,45	0,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.8 Persentase Pemuda yang Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan yang Dialami, 2023

Karakteristik	Jenis Kejahatan					Jumlah	
	Pencurian		Penganiayaan	Pelecehan dengan Kekerasan	Pelecehan Seksual		
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Indonesia	85,61	4,89	5,01	3,57	13,39	100,00	
Jenis Kelamin							
Laki-Laki	85,68	5,46	5,54	2,19	11,74	100,00	
Perempuan	85,52	4,20	4,36	5,27	15,42	100,00	
Kelompok Umur							
16-18 Tahun	81,95	5,27	5,80	3,31	10,27	100,00	
19-24 Tahun	82,14	2,90	3,37	2,14	14,04	100,00	
25-30 Tahun	88,95	6,19	5,96	4,63	13,73	100,00	
Status Disabilitas							
Disabilitas	77,81	19,81	0,00	2,38	0,00	100,00	
Non Disabilitas	85,64	4,84	5,03	3,57	13,44	100,00	
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan							
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	81,48	0,08	7,47	0,13	18,31	100,00	
Tamat SD/sederajat	86,09	6,03	8,03	4,52	16,03	100,00	
Tamat SMP/sederajat	85,74	7,95	6,62	5,96	13,08	100,00	
Tamat SMA/sederajat	84,95	2,44	3,18	0,71	12,69	100,00	
Tamat Perguruan	87,46	4,77	4,12	6,21	13,66	100,00	
Distribusi Pengeluaran							
40% Terbawah	90,95	5,29	3,79	4,44	9,43	100,00	
40% Menengah	83,38	4,19	4,03	2,19	15,54	100,00	
20% Teratas	83,76	5,59	7,77	4,85	13,99	100,00	
Klasifikasi Desa							
Perkotaan	85,39	4,72	6,23	4,03	13,65	100,00	
Perdesaan	86,19	5,36	1,79	2,33	12,72	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.9 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahanan dan Melaporkan ke Polisi menurut Klasifikasi Desa, 2023

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	29,42	20,76	27,05
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	30,81	24,07	28,84
Perempuan	27,81	16,08	24,85
Kelompok Umur			
16-18 Tahun	20,60	17,35	19,70
19-24 Tahun	28,00	24,35	26,85
25-30 Tahun	32,46	18,56	29,05
Status Disabilitas			
Disabilitas	60,77	100,00	68,91
Non Disabilitas	29,29	20,53	26,89
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah /	59,90	5,65	18,73
Tidak tamat SD			
Tamat SD/sederajat	22,95	14,67	20,35
Tamat SMP/sederajat	29,79	16,75	25,76
Tamat SMA/sederajat	30,04	20,83	27,87
Tamat Perguruan Tinggi	29,79	48,42	33,77
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	28,06	20,17	26,98
40% Menengah	30,32	18,54	22,85
20% Teratas	29,41	25,60	33,65

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.10.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	37,23	41,14	21,63	100,00
Sumatera Utara	35,01	44,70	20,29	100,00
Sumatera Barat	36,31	41,32	22,37	100,00
Riau	37,31	41,90	20,79	100,00
Jambi	39,30	40,31	20,39	100,00
Sumatera Selatan	39,60	41,64	18,77	100,00
Bengkulu	40,45	39,98	19,57	100,00
Lampung	37,42	41,58	21,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	39,28	42,41	18,31	100,00
Kepulauan Riau	35,56	43,56	20,88	100,00
DKI Jakarta	37,32	42,73	19,95	100,00
Jawa Barat	36,87	41,90	21,23	100,00
Jawa Tengah	35,32	42,46	22,22	100,00
DI Yogyakarta	32,65	43,88	23,47	100,00
Jawa Timur	36,25	41,16	22,59	100,00
Banten	37,16	41,48	21,35	100,00
Bali	35,71	42,67	21,62	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,38	41,24	20,38	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,10	39,03	21,87	100,00
Kalimantan Barat	39,12	44,34	16,54	100,00
Kalimantan Tengah	39,73	38,58	21,69	100,00
Kalimantan Selatan	40,05	41,53	18,43	100,00
Kalimantan Timur	38,14	42,19	19,68	100,00
Kalimantan Utara	35,93	42,63	21,44	100,00
Sulawesi Utara	41,61	40,32	18,07	100,00
Sulawesi Tengah	39,02	40,22	20,76	100,00
Sulawesi Selatan	39,47	39,93	20,60	100,00
Sulawesi Tenggara	39,45	41,33	19,22	100,00
Gorontalo	38,89	40,08	21,03	100,00
Sulawesi Barat	41,53	41,21	17,26	100,00
Maluku	41,15	40,14	18,71	100,00
Maluku Utara	40,40	39,00	20,60	100,00
Papua Barat	43,38	39,27	17,35	100,00
Papua	41,84	40,03	18,13	100,00
Indonesia	36,86	42,12	21,02	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.10.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	38,17	41,20	20,63	100,00
Sumatera Utara	36,38	42,89	20,73	100,00
Sumatera Barat	36,63	41,47	21,90	100,00
Riau	37,57	41,85	20,58	100,00
Jambi	38,80	40,76	20,44	100,00
Sumatera Selatan	37,40	41,71	20,89	100,00
Bengkulu	38,54	40,81	20,65	100,00
Lampung	37,92	40,46	21,62	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,13	40,28	19,59	100,00
Kepulauan Riau	35,57	42,03	22,40	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	38,19	40,65	21,16	100,00
Jawa Tengah	36,67	41,51	21,82	100,00
DI Yogyakarta	34,71	45,14	20,15	100,00
Jawa Timur	38,06	40,24	21,70	100,00
Banten	38,42	39,49	22,08	100,00
Bali	37,02	42,89	20,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,04	40,19	21,77	100,00
Nusa Tenggara Timur	38,45	41,05	20,49	100,00
Kalimantan Barat	38,38	40,33	21,29	100,00
Kalimantan Tengah	38,87	41,95	19,17	100,00
Kalimantan Selatan	37,95	41,04	21,01	100,00
Kalimantan Timur	38,87	40,61	20,52	100,00
Kalimantan Utara	39,02	40,93	20,05	100,00
Sulawesi Utara	41,90	39,79	18,31	100,00
Sulawesi Tengah	40,44	38,80	20,76	100,00
Sulawesi Selatan	40,09	40,16	19,75	100,00
Sulawesi Tenggara	36,50	41,85	21,65	100,00
Gorontalo	41,48	40,70	17,83	100,00
Sulawesi Barat	37,53	42,00	20,47	100,00
Maluku	43,07	40,27	16,66	100,00
Maluku Utara	42,99	38,37	18,64	100,00
Papua Barat	42,25	41,23	16,52	100,00
Papua	40,99	39,65	19,36	100,00
Indonesia	37,91	41,10	20,99	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.10.3 Persentase Pemuda Laki-Laki menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	36,19	41,76	22,05	100,00
Sumatera Utara	34,29	43,07	22,64	100,00
Sumatera Barat	35,08	42,83	22,09	100,00
Riau	36,49	42,66	20,85	100,00
Jambi	37,83	41,22	20,96	100,00
Sumatera Selatan	37,97	40,79	21,24	100,00
Bengkulu	36,09	42,38	21,53	100,00
Lampung	35,03	42,88	22,09	100,00
Kep. Bangka Belitung	39,44	42,18	18,38	100,00
Kepulauan Riau	32,78	44,80	22,42	100,00
DKI Jakarta	35,90	44,70	19,41	100,00
Jawa Barat	37,05	42,42	20,53	100,00
Jawa Tengah	34,86	42,66	22,48	100,00
DI Yogyakarta	30,78	44,25	24,97	100,00
Jawa Timur	35,88	41,33	22,78	100,00
Banten	37,46	41,86	20,68	100,00
Bali	35,14	40,95	23,91	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,32	40,62	22,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,07	42,80	22,13	100,00
Kalimantan Barat	38,05	43,09	18,86	100,00
Kalimantan Tengah	38,25	41,27	20,49	100,00
Kalimantan Selatan	39,00	41,84	19,16	100,00
Kalimantan Timur	37,99	42,75	19,26	100,00
Kalimantan Utara	34,90	42,38	22,71	100,00
Sulawesi Utara	40,06	41,48	18,46	100,00
Sulawesi Tengah	38,81	40,36	20,84	100,00
Sulawesi Selatan	37,28	41,08	21,64	100,00
Sulawesi Tenggara	35,42	43,35	21,22	100,00
Gorontalo	39,07	40,24	20,68	100,00
Sulawesi Barat	37,96	42,89	19,15	100,00
Maluku	42,05	40,40	17,55	100,00
Maluku Utara	40,62	39,62	19,75	100,00
Papua Barat	42,49	38,80	18,71	100,00
Papua	41,69	38,04	20,27	100,00
Indonesia	36,46	42,13	21,41	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.10.4 Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	38,76	40,38	20,85	100,00
Sumatera Utara	37,07	43,23	19,71	100,00
Sumatera Barat	36,90	40,95	22,15	100,00
Riau	38,18	41,00	20,82	100,00
Jambi	40,38	39,08	20,53	100,00
Sumatera Selatan	38,76	40,90	20,34	100,00
Bengkulu	40,59	40,32	19,09	100,00
Lampung	39,02	40,06	20,91	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,53	39,77	19,70	100,00
Kepulauan Riau	36,35	42,82	20,83	100,00
DKI Jakarta	38,67	40,87	20,46	100,00
Jawa Barat	36,87	40,73	22,40	100,00
Jawa Tengah	37,07	41,02	21,91	100,00
DI Yogyakarta	34,42	42,73	22,86	100,00
Jawa Timur	37,33	40,57	22,10	100,00
Banten	37,74	40,40	21,86	100,00
Bali	38,80	41,08	20,12	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,68	40,83	20,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,48	40,11	20,41	100,00
Kalimantan Barat	38,89	41,83	19,27	100,00
Kalimantan Tengah	40,43	39,30	20,27	100,00
Kalimantan Selatan	39,16	40,43	20,41	100,00
Kalimantan Timur	39,79	39,55	20,67	100,00
Kalimantan Utara	37,49	39,90	22,61	100,00
Sulawesi Utara	41,15	40,49	18,36	100,00
Sulawesi Tengah	40,10	38,38	21,53	100,00
Sulawesi Selatan	40,53	40,06	19,41	100,00
Sulawesi Tenggara	38,87	39,72	21,42	100,00
Gorontalo	41,43	38,40	20,18	100,00
Sulawesi Barat	38,02	41,01	20,98	100,00
Maluku	41,13	38,55	20,32	100,00
Maluku Utara	41,81	39,14	19,05	100,00
Papua Barat	44,49	39,56	15,95	100,00
Papua	42,98	39,07	17,94	100,00
Indonesia	37,78	40,87	21,35	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.10.5 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	37,48	41,07	21,45	100,00
Sumatera Utara	35,66	43,15	21,19	100,00
Sumatera Barat	35,98	41,90	22,12	100,00
Riau	37,31	41,86	20,84	100,00
Jambi	39,08	40,17	20,75	100,00
Sumatera Selatan	38,36	40,84	20,79	100,00
Bengkulu	38,31	41,36	20,33	100,00
Lampung	36,99	41,50	21,51	100,00
Kep. Bangka Belitung	39,98	40,98	19,03	100,00
Kepulauan Riau	34,55	43,82	21,63	100,00
DKI Jakarta	37,32	42,73	19,95	100,00
Jawa Barat	36,96	41,60	21,44	100,00
Jawa Tengah	35,95	41,85	22,20	100,00
DI Yogyakarta	32,60	43,49	23,91	100,00
Jawa Timur	36,61	40,95	22,44	100,00
Banten	37,60	41,14	21,26	100,00
Bali	36,91	41,01	22,08	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,00	40,72	21,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,26	41,46	21,28	100,00
Kalimantan Barat	38,47	42,46	19,07	100,00
Kalimantan Tengah	39,32	40,30	20,38	100,00
Kalimantan Selatan	39,08	41,14	19,78	100,00
Kalimantan Timur	38,87	41,19	19,94	100,00
Kalimantan Utara	36,16	41,18	22,66	100,00
Sulawesi Utara	40,59	41,00	18,41	100,00
Sulawesi Tengah	39,45	39,36	21,18	100,00
Sulawesi Selatan	38,89	40,57	20,54	100,00
Sulawesi Tenggara	37,16	41,52	21,32	100,00
Gorontalo	40,23	39,34	20,43	100,00
Sulawesi Barat	37,99	41,96	20,05	100,00
Maluku	41,59	39,49	18,92	100,00
Maluku Utara	41,21	39,38	19,40	100,00
Papua Barat	43,47	39,17	17,36	100,00
Papua	42,31	38,53	19,16	100,00
Indonesia	37,11	41,50	21,38	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.11 Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	51,49	32,16	36,18	41,82	39,01
Sumatera Utara	41,43	30,90	35,33	38,98	37,13
Sumatera Barat	53,06	40,62	40,21	54,28	47,13
Riau	48,84	34,02	39,49	41,08	40,26
Jambi	45,91	30,34	34,04	36,62	35,30
Sumatera Selatan	47,03	26,41	33,62	35,65	34,62
Bengkulu	52,07	36,62	39,04	45,49	42,22
Lampung	46,65	31,99	34,33	39,83	37,02
Kep. Bangka Belitung	47,29	29,90	36,39	43,25	39,78
Kepulauan Riau	70,95	43,44	66,74	70,20	68,45
DKI Jakarta	73,66	-	73,53	73,79	73,66
Jawa Barat	49,64	34,24	44,76	48,87	46,76
Jawa Tengah	58,32	47,39	49,07	57,68	53,31
DI Yogyakarta	68,09	52,71	62,25	68,20	65,23
Jawa Timur	50,72	35,67	42,21	46,60	44,41
Banten	52,78	25,99	45,35	48,82	47,07
Bali	61,13	38,90	56,63	54,35	55,52
Nusa Tenggara Barat	37,38	27,35	31,99	33,35	32,67
Nusa Tenggara Timur	46,76	26,85	30,01	35,56	32,77
Kalimantan Barat	51,40	33,53	39,44	40,79	40,11
Kalimantan Tengah	53,16	33,36	42,62	41,19	41,92
Kalimantan Selatan	51,21	37,00	46,05	42,31	44,19
Kalimantan Timur	66,92	54,07	63,00	63,22	63,11
Kalimantan Utara	61,65	52,52	57,69	59,66	58,64
Sulawesi Utara	47,24	32,58	36,54	45,80	41,00
Sulawesi Tengah	46,78	28,25	32,14	37,41	34,79
Sulawesi Selatan	51,86	42,02	42,42	51,65	47,00
Sulawesi Tenggara	53,09	44,70	45,07	51,30	48,21
Gorontalo	50,29	36,72	37,14	48,64	42,81
Sulawesi Barat	50,51	36,30	34,83	43,80	39,28
Maluku	38,43	20,33	24,46	33,09	28,71
Maluku Utara	44,53	24,43	27,97	33,40	30,67
Papua Barat	55,10	29,90	39,42	41,62	40,50
Papua	55,47	10,01	23,19	22,72	22,97
Indonesia	53,07	34,85	43,50	48,09	45,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.12.1 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	78,80	8,57	10,14	2,49	100,00
Sumatera Utara	66,23	14,65	16,52	2,61	100,00
Sumatera Barat	66,45	11,22	20,44	1,88	100,00
Riau	71,05	15,21	11,68	2,06	100,00
Jambi	80,87	7,98	10,43	NA	100,00
Sumatera Selatan	76,59	7,53	14,47	NA	100,00
Bengkulu	82,34	9,67	7,64	NA	100,00
Lampung	86,42	7,65	5,67	NA	100,00
Kep. Bangka Belitung	84,15	6,96	7,94	NA	100,00
Kepulauan Riau	69,48	19,26	10,76	0,51	100,00
DKI Jakarta	59,69	22,30	16,41	1,60	100,00
Jawa Barat	80,23	7,46	12,08	0,24	100,00
Jawa Tengah	87,54	2,38	10,00	NA	100,00
DI Yogyakarta	84,75	8,69	6,13	NA	100,00
Jawa Timur	85,96	5,24	8,40	0,41	100,00
Banten	85,77	7,55	6,29	NA	100,00
Bali	81,66	11,86	6,33	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,12	1,52	10,88	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	83,47	9,53	6,03	0,97	100,00
Kalimantan Barat	85,18	5,50	9,21	NA	100,00
Kalimantan Tengah	75,02	5,91	14,26	4,80	100,00
Kalimantan Selatan	74,58	10,25	13,41	NA	100,00
Kalimantan Timur	72,02	13,07	13,81	1,10	100,00
Kalimantan Utara	74,59	12,75	9,24	3,42	100,00
Sulawesi Utara	74,26	4,92	19,58	1,24	100,00
Sulawesi Tengah	81,05	7,89	9,31	1,75	100,00
Sulawesi Selatan	81,70	4,80	13,04	NA	100,00
Sulawesi Tenggara	85,03	5,80	8,49	NA	100,00
Gorontalo	83,16	0,86	15,98	NA	100,00
Sulawesi Barat	90,45	4,60	4,20	NA	100,00
Maluku	81,17	5,20	12,23	1,40	100,00
Maluku Utara	86,80	4,44	7,99	NA	100,00
Papua Barat	76,57	12,20	10,23	1,00	100,00
Papua	62,16	16,56	12,08	9,20	100,00
Indonesia	79,40	8,53	11,27	0,80	100,00

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.12.2 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	90,83	1,71	6,73	0,73	100,00
Sumatera Utara	80,81	4,15	12,55	2,49	100,00
Sumatera Barat	83,17	2,63	13,47	0,72	100,00
Riau	86,01	2,27	7,09	4,63	100,00
Jambi	90,29	0,88	7,63	1,20	100,00
Sumatera Selatan	88,82	1,69	9,31	0,19	100,00
Bengkulu	90,76	1,47	6,56	1,21	100,00
Lampung	95,18	0,40	4,24	NA	100,00
Kep. Bangka Belitung	95,31	0,92	2,40	NA	100,00
Kepulauan Riau	93,16	NA	6,42	NA	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	91,53	0,63	7,76	NA	100,00
Jawa Tengah	96,00	0,26	3,70	NA	100,00
DI Yogyakarta	97,41	NA	2,05	NA	100,00
Jawa Timur	96,44	0,20	3,34	NA	100,00
Banten	93,36	0,63	5,66	NA	100,00
Bali	91,89	0,38	7,55	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	94,16	NA	5,24	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	96,12	0,28	3,04	0,55	100,00
Kalimantan Barat	94,49	0,27	4,92	0,32	100,00
Kalimantan Tengah	85,84	0,88	7,53	5,74	100,00
Kalimantan Selatan	89,27	1,17	7,78	1,78	100,00
Kalimantan Timur	85,33	2,15	7,57	NA	100,00
Kalimantan Utara	88,55	0,93	9,54	0,98	100,00
Sulawesi Utara	87,40	1,01	11,47	0,12	100,00
Sulawesi Tengah	93,74	NA	5,05	NA	100,00
Sulawesi Selatan	93,12	0,33	6,20	0,34	100,00
Sulawesi Tenggara	95,59	0,23	4,07	NA	100,00
Gorontalo	91,74	NA	7,62	NA	100,00
Sulawesi Barat	95,17	NA	3,99	0,66	100,00
Maluku	93,68	0,34	5,71	0,27	100,00
Maluku Utara	93,89	NA	5,52	NA	100,00
Papua Barat	93,23	1,19	3,87	1,71	100,00
Papua	96,16	0,41	2,57	0,86	100,00
Indonesia	92,34	0,91	6,00	0,74	100,00

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.12.3 Persentase Pemuda Laki-Laki menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	88,51	3,32	6,70	1,47	100,00
Sumatera Utara	74,21	10,00	13,35	2,44	100,00
Sumatera Barat	76,97	6,06	15,78	1,19	100,00
Riau	82,64	6,34	7,84	3,17	100,00
Jambi	88,79	2,93	7,47	0,81	100,00
Sumatera Selatan	84,26	4,37	10,63	NA	100,00
Bengkulu	88,90	3,90	6,55	0,66	100,00
Lampung	93,00	2,35	4,49	0,15	100,00
Kep. Bangka Belitung	88,92	4,30	5,53	1,25	100,00
Kepulauan Riau	71,64	17,71	10,15	0,50	100,00
DKI Jakarta	60,02	21,78	16,59	1,61	100,00
Jawa Barat	83,96	5,86	10,01	0,16	100,00
Jawa Tengah	91,77	1,51	6,67	NA	100,00
DI Yogyakarta	88,34	6,09	5,38	NA	100,00
Jawa Timur	91,06	2,99	5,75	0,20	100,00
Banten	87,41	6,50	5,71	NA	100,00
Bali	84,85	8,97	6,01	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,65	0,81	7,15	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	93,32	2,44	3,56	0,68	100,00
Kalimantan Barat	92,24	1,85	5,72	0,19	100,00
Kalimantan Tengah	82,33	2,57	9,59	5,50	100,00
Kalimantan Selatan	83,33	5,90	9,39	1,38	100,00
Kalimantan Timur	77,00	9,33	10,80	2,87	100,00
Kalimantan Utara	80,77	7,92	9,02	2,28	100,00
Sulawesi Utara	80,92	3,12	15,06	0,90	100,00
Sulawesi Tengah	89,99	3,32	5,97	0,72	100,00
Sulawesi Selatan	88,55	2,71	8,17	0,57	100,00
Sulawesi Tenggara	92,10	2,13	5,44	0,33	100,00
Gorontalo	89,16	NA	10,42	NA	100,00
Sulawesi Barat	93,94	0,95	4,05	1,06	100,00
Maluku	88,49	2,61	7,83	1,07	100,00
Maluku Utara	92,02	1,56	5,81	NA	100,00
Papua Barat	86,97	5,33	6,14	1,56	100,00
Papua	86,51	4,89	5,31	3,30	100,00
Indonesia	85,65	5,22	8,37	0,76	100,00

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.12.4 Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	84,64	4,95	9,17	1,24	100,00
Sumatera Utara	70,11	10,72	16,49	2,68	100,00
Sumatera Barat	71,79	8,24	18,51	1,47	100,00
Riau	76,59	9,19	10,28	3,95	100,00
Jambi	85,72	3,37	9,62	1,30	100,00
Sumatera Selatan	83,62	3,65	12,12	NA	100,00
Bengkulu	86,49	5,00	7,36	1,15	100,00
Lampung	91,31	3,46	4,99	NA	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,02	4,41	5,56	1,01	100,00
Kepulauan Riau	71,62	17,37	10,58	NA	100,00
DKI Jakarta	59,38	22,80	16,23	1,59	100,00
Jawa Barat	80,63	6,52	12,59	0,26	100,00
Jawa Tengah	91,05	1,30	7,57	NA	100,00
DI Yogyakarta	85,88	8,26	5,37	NA	100,00
Jawa Timur	89,66	3,26	6,80	0,29	100,00
Banten	87,37	5,64	6,61	NA	100,00
Bali	83,59	8,96	7,31	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,21	1,22	9,31	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	91,40	3,63	4,30	0,67	100,00
Kalimantan Barat	89,87	2,54	7,28	0,31	100,00
Kalimantan Tengah	79,96	3,56	11,32	5,16	100,00
Kalimantan Selatan	80,33	5,63	11,89	2,16	100,00
Kalimantan Timur	74,89	10,36	13,17	1,58	100,00
Kalimantan Utara	77,50	9,85	9,68	2,97	100,00
Sulawesi Utara	78,69	3,40	17,28	0,62	100,00
Sulawesi Tengah	88,55	3,39	7,13	0,93	100,00
Sulawesi Selatan	86,12	2,47	11,18	0,23	100,00
Sulawesi Tenggara	90,28	2,97	6,38	0,37	100,00
Gorontalo	86,58	1,00	12,34	NA	100,00
Sulawesi Barat	94,42	1,26	4,02	NA	100,00
Maluku	87,27	2,56	9,65	0,51	100,00
Maluku Utara	91,36	1,60	6,77	0,27	100,00
Papua Barat	85,45	6,32	6,96	1,26	100,00
Papua	86,43	5,14	5,25	3,18	100,00
Indonesia	83,50	5,73	9,97	0,80	100,00

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.12.5 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2023

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	86,57	4,14	7,94	1,35	100,00
Sumatera Utara	72,18	10,36	14,90	2,56	100,00
Sumatera Barat	74,42	7,13	17,12	1,33	100,00
Riau	79,72	7,72	9,02	3,55	100,00
Jambi	87,29	3,14	8,52	1,05	100,00
Sumatera Selatan	83,94	4,01	11,37	NA	100,00
Bengkulu	87,71	4,44	6,95	0,90	100,00
Lampung	92,17	2,89	4,73	NA	100,00
Kep. Bangka Belitung	88,97	4,35	5,55	1,14	100,00
Kepulauan Riau	71,63	17,54	10,36	0,47	100,00
DKI Jakarta	59,69	22,30	16,41	1,60	100,00
Jawa Barat	82,34	6,18	11,27	0,21	100,00
Jawa Tengah	91,41	1,41	7,11	0,06	100,00
DI Yogyakarta	87,11	7,18	5,37	NA	100,00
Jawa Timur	90,35	3,12	6,28	0,25	100,00
Banten	87,39	6,07	6,15	NA	100,00
Bali	84,24	8,96	6,64	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	90,43	1,02	8,23	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	92,36	3,03	3,93	0,68	100,00
Kalimantan Barat	91,06	2,20	6,50	0,25	100,00
Kalimantan Tengah	81,17	3,06	10,44	5,34	100,00
Kalimantan Selatan	81,84	5,77	10,63	1,77	100,00
Kalimantan Timur	75,97	9,83	11,95	2,25	100,00
Kalimantan Utara	79,19	8,86	9,34	2,61	100,00
Sulawesi Utara	79,85	3,26	16,13	0,76	100,00
Sulawesi Tengah	89,26	3,35	6,55	0,83	100,00
Sulawesi Selatan	87,34	2,59	9,66	0,40	100,00
Sulawesi Tenggara	91,18	2,55	5,92	0,35	100,00
Gorontalo	87,89	0,63	11,36	NA	100,00
Sulawesi Barat	94,18	1,10	4,04	0,68	100,00
Maluku	87,89	2,59	8,73	0,79	100,00
Maluku Utara	91,69	1,58	6,29	0,44	100,00
Papua Barat	86,23	5,82	6,54	1,41	100,00
Papua	86,47	5,01	5,28	3,24	100,00
Indonesia	84,59	5,47	9,16	0,78	100,00

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.13 Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	79,17	59,54	66,96	66,03	66,49
Sumatera Utara	74,24	59,98	68,82	68,00	68,41
Sumatera Barat	69,01	50,83	59,92	60,78	60,35
Riau	78,66	63,44	69,37	70,36	69,85
Jambi	74,78	56,61	60,41	64,48	62,40
Sumatera Selatan	67,95	56,74	60,14	62,31	61,21
Bengkulu	57,94	53,65	54,63	55,79	55,20
Lampung	62,69	62,87	62,66	62,96	62,80
Kep. Bangka Belitung	32,42	23,53	28,23	28,94	28,58
Kepulauan Riau	61,23	16,26	52,93	61,44	57,14
DKI Jakarta	37,54	-	35,89	39,11	37,54
Jawa Barat	53,15	55,27	53,10	54,01	53,54
Jawa Tengah	71,48	66,95	68,97	69,85	69,41
DI Yogyakarta	84,12	90,88	85,23	85,51	85,37
Jawa Timur	73,18	68,55	71,12	71,35	71,24
Banten	67,87	55,17	63,86	66,50	65,16
Bali	85,16	82,33	85,09	83,77	84,45
Nusa Tenggara Barat	71,97	60,11	65,41	67,39	66,40
Nusa Tenggara Timur	53,82	37,63	41,73	43,15	42,44
Kalimantan Barat	70,06	58,35	61,34	64,00	62,66
Kalimantan Tengah	67,84	42,19	52,15	54,43	53,27
Kalimantan Selatan	65,71	47,09	55,62	57,43	56,51
Kalimantan Timur	82,40	59,00	75,27	75,66	75,46
Kalimantan Utara	73,93	62,58	67,93	72,60	70,19
Sulawesi Utara	73,02	62,51	67,10	70,11	68,55
Sulawesi Tengah	71,79	49,85	56,96	58,21	57,59
Sulawesi Selatan	74,69	65,74	69,54	71,01	70,27
Sulawesi Tenggara	75,25	70,38	71,44	73,38	72,41
Gorontalo	83,20	57,66	68,75	69,48	69,11
Sulawesi Barat	64,03	58,54	57,94	61,46	59,69
Maluku	66,03	54,41	59,23	60,37	59,79
Maluku Utara	87,99	57,30	65,88	67,79	66,83
Papua Barat	61,70	42,92	51,21	50,40	50,82
Papua	63,43	10,66	26,88	24,42	25,70
Indonesia	64,68	58,77	61,78	62,85	62,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.14 Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	39,61	40,36	38,03	42,15	40,10
Sumatera Utara	46,37	44,28	43,40	47,69	45,52
Sumatera Barat	49,80	54,64	49,55	54,75	52,11
Riau	43,89	39,32	38,75	43,91	41,25
Jambi	37,22	45,32	40,57	45,01	42,74
Sumatera Selatan	45,53	36,46	37,93	42,27	40,07
Bengkulu	53,02	58,56	56,02	57,11	56,55
Lampung	44,44	42,44	41,98	44,32	43,13
Kep. Bangka Belitung	57,25	71,33	62,04	64,64	63,33
Kepulauan Riau	67,67	45,16	64,08	67,20	65,62
DKI Jakarta	46,24	-	43,49	48,85	46,24
Jawa Barat	44,66	39,49	42,03	45,44	43,69
Jawa Tengah	43,12	37,09	37,54	43,26	40,36
DI Yogyakarta	51,01	39,89	44,66	53,21	48,94
Jawa Timur	51,73	40,47	45,32	48,68	47,01
Banten	47,82	42,13	44,00	49,28	46,61
Bali	51,88	41,52	48,19	50,42	49,27
Nusa Tenggara Barat	65,23	66,10	65,98	65,30	65,64
Nusa Tenggara Timur	54,50	53,46	53,70	53,84	53,77
Kalimantan Barat	44,14	38,41	39,72	41,33	40,52
Kalimantan Tengah	34,34	31,90	31,29	34,66	32,95
Kalimantan Selatan	44,61	40,55	40,10	45,15	42,60
Kalimantan Timur	33,45	40,94	34,53	36,89	35,68
Kalimantan Utara	28,84	36,42	33,85	28,65	31,34
Sulawesi Utara	41,24	43,74	39,78	45,01	42,30
Sulawesi Tengah	31,96	32,60	31,13	33,61	32,37
Sulawesi Selatan	51,50	46,35	46,60	51,35	48,96
Sulawesi Tenggara	38,93	45,09	40,34	44,66	42,51
Gorontalo	57,56	57,37	54,48	60,52	57,45
Sulawesi Barat	39,26	45,55	45,07	43,39	44,23
Maluku	33,66	35,00	33,18	35,62	34,38
Maluku Utara	33,70	39,37	37,16	38,07	37,61
Papua Barat	24,30	36,23	30,70	31,74	31,21
Papua	26,55	12,31	16,85	15,85	16,37
Indonesia	46,43	41,33	42,48	46,34	44,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.15 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,32	0,18	0,27	0,19	0,23
Sumatera Utara	0,72	0,48	0,57	0,66	0,62
Sumatera Barat	0,89	0,42	0,52	0,82	0,67
Riau	NA	0,34	0,51	NA	0,41
Jambi	0,75	0,54	0,73	0,48	0,60
Sumatera Selatan	0,59	0,29	0,64	0,17	0,41
Bengkulu	0,89	0,73	1,08	0,49	0,79
Lampung	0,75	0,76	0,87	0,64	0,75
Kep. Bangka Belitung	0,25	NA	0,33	NA	0,29
Kepulauan Riau	1,14	0,00	NA	1,91	1,03
DKI Jakarta	0,43	-	0,71	NA	0,43
Jawa Barat	0,80	0,56	0,86	0,64	0,76
Jawa Tengah	0,65	0,30	0,47	0,52	0,49
DI Yogyakarta	0,73	1,17	0,94	0,68	0,81
Jawa Timur	0,55	0,20	0,47	0,34	0,40
Banten	0,70	NA	0,48	0,67	0,58
Bali	NA	NA	NA	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	0,72	1,16	1,12	0,72	0,92
Nusa Tenggara Timur	0,75	0,20	0,50	0,23	0,36
Kalimantan Barat	0,49	0,36	0,60	0,21	0,41
Kalimantan Tengah	0,56	0,24	0,43	0,33	0,38
Kalimantan Selatan	0,51	0,33	0,28	0,56	0,42
Kalimantan Timur	0,26	NA	0,29	NA	0,20
Kalimantan Utara	0,74	NA	0,54	0,72	0,63
Sulawesi Utara	0,44	NA	0,25	0,31	0,28
Sulawesi Tengah	1,02	0,38	0,59	0,62	0,60
Sulawesi Selatan	0,33	0,17	0,25	0,25	0,25
Sulawesi Tenggara	0,54	0,31	0,35	0,46	0,41
Gorontalo	0,35	0,17	NA	NA	0,25
Sulawesi Barat	0,61	NA	NA	0,21	0,21
Maluku	1,27	NA	0,57	1,11	0,84
Maluku Utara	0,63	0,55	0,70	0,44	0,57
Papua Barat	0,49	0,34	0,42	0,38	0,40
Papua	0,39	0,44	0,42	0,43	0,43
Indonesia	0,65	0,37	0,58	0,49	0,53

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.16.1 Sampling Error Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	40% terbawah				40% menengah				20% teratas			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	37,23	33,20	41,26	5,52	41,14	37,54	44,74	4,47	21,63	18,48	24,77	7,43
Sumatera Utara	35,01	31,62	38,39	4,93	44,70	41,53	47,87	3,62	20,29	17,45	23,13	7,14
Sumatera Barat	36,31	32,40	40,23	5,50	41,32	37,25	45,39	5,03	22,37	18,93	25,80	7,84
Riau	37,31	32,43	42,18	6,67	41,90	37,53	46,27	5,32	20,79	16,65	24,93	10,16
Jambi	39,30	34,32	44,28	6,47	40,31	36,11	44,50	5,31	20,39	16,56	24,23	9,59
Sumatera Selatan	39,60	34,93	44,26	6,01	41,64	36,98	46,29	5,70	18,77	15,78	21,75	8,12
Bengkulu	40,45	34,49	46,40	7,51	39,98	34,69	45,26	6,74	19,57	14,97	24,18	12,00
Lampung	37,42	32,84	42,01	6,25	41,58	36,91	46,24	5,72	21,00	17,01	24,99	9,69
Kep. Bangka Belitung	39,28	34,17	44,38	6,63	42,41	37,82	47,00	5,52	18,31	14,70	21,93	10,07
Kepulauan Riau	35,56	29,31	41,81	8,96	43,56	37,68	49,43	6,88	20,88	14,65	27,12	15,23
DKI Jakarta	37,32	34,20	40,44	4,26	42,73	39,70	45,76	3,62	19,95	17,00	22,89	7,53
Jawa Barat	36,87	34,95	38,79	2,66	41,90	40,09	43,72	2,21	21,23	19,60	22,85	3,90
Jawa Tengah	35,32	33,51	37,13	2,61	42,46	40,75	44,16	2,05	22,22	20,64	23,80	3,63
DI Yogyakarta	32,65	28,17	37,14	7,01	43,88	39,59	48,16	4,98	23,47	19,57	27,37	8,47
Jawa Timur	36,25	34,46	38,04	2,51	41,16	39,39	42,93	2,19	22,59	20,95	24,24	3,71
Banten	37,16	32,96	41,37	5,77	41,48	37,62	45,35	4,76	21,35	18,18	24,52	7,58
Bali	35,71	32,04	39,38	5,24	42,67	38,85	46,49	4,56	21,62	18,62	24,62	7,08
Nusa Tenggara Barat	38,38	34,03	42,72	5,78	41,24	36,98	45,51	5,27	20,38	17,13	23,63	8,14
Nusa Tenggara Timur	39,10	33,66	44,55	7,11	39,03	34,65	43,40	5,72	21,87	17,80	25,94	9,49
Kalimantan Barat	39,12	34,81	43,43	5,63	44,34	39,86	48,82	5,15	16,54	13,45	19,62	9,51
Kalimantan Tengah	39,73	35,13	44,32	5,90	38,58	34,64	42,52	5,21	21,69	17,65	25,74	9,51
Kalimantan Selatan	40,05	35,73	44,37	5,50	41,53	37,96	45,09	4,38	18,43	15,22	21,63	8,88
Kalimantan Timur	38,14	34,01	42,26	5,52	42,19	38,33	46,04	4,67	19,68	16,32	23,04	8,70
Kalimantan Utara	35,93	29,44	42,42	9,22	42,63	36,15	49,12	7,76	21,44	16,28	26,59	12,27
Sulawesi Utara	41,61	37,53	45,69	5,00	40,32	36,41	44,23	4,95	18,07	14,71	21,43	9,49
Sulawesi Tengah	39,02	32,54	45,49	8,47	40,22	35,11	45,33	6,48	20,76	16,20	25,33	11,22
Sulawesi Selatan	39,47	35,44	43,51	5,21	39,93	36,58	43,28	4,27	20,60	16,86	24,33	9,25
Sulawesi Tenggara	39,45	33,91	44,99	7,16	41,33	36,37	46,28	6,12	19,22	15,08	23,36	10,98
Gorontalo	38,89	32,49	45,29	8,40	40,08	34,47	45,70	7,15	21,03	15,94	26,11	12,34
Sulawesi Barat	41,53	32,02	51,04	11,69	41,21	32,45	49,97	10,84	17,26	11,83	22,69	16,05
Maluku	41,15	35,37	46,93	7,16	40,14	35,21	45,08	6,27	18,71	14,02	23,40	12,79
Maluku Utara	40,40	32,75	48,05	9,66	39,00	32,80	45,21	8,11	20,60	15,28	25,92	13,17
Papua Barat	43,38	36,42	50,34	8,19	39,27	33,49	45,05	7,51	17,35	12,81	21,89	13,34
Papua	41,84	37,02	46,66	5,88	40,03	35,64	44,42	5,59	18,13	14,09	22,18	11,38
Indonesia	36,86	36,09	37,62	1,06	42,12	41,40	42,85	0,88	21,02	20,38	21,66	1,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.16.2 Sampling Error Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Estimasi	40% terbahwa				40% menengah				20% teratas			
		Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas		Batas Bawah	Batas Atas		Batas Bawah	Batas Atas		Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Aceh	38,17	35,14	41,21	4,06	41,20	38,63	43,77	3,18	20,63	18,34	22,92	5,66	
Sumatera Utara	36,38	33,98	38,78	3,36	42,89	40,65	45,13	2,66	20,73	18,74	22,72	4,90	
Sumatera Barat	36,63	33,31	39,94	4,62	41,47	38,58	44,35	3,55	21,90	19,43	24,38	5,76	
Riau	37,57	34,07	41,06	4,75	41,85	38,87	44,83	3,63	20,58	17,79	23,38	6,93	
Jambi	38,80	35,35	42,25	4,54	40,76	37,68	43,84	3,85	20,44	17,66	23,22	6,94	
Sumatera Selatan	37,40	34,36	40,45	4,15	41,71	38,66	44,75	3,72	20,89	18,37	23,42	6,16	
Bengkulu	38,54	34,75	42,33	5,02	40,81	37,70	43,92	3,89	20,65	17,41	23,89	8,01	
Lampung	37,92	35,07	40,78	3,84	40,46	38,08	42,84	3,00	21,62	19,28	23,95	5,51	
Kep. Bangka Belitung	40,13	34,13	46,13	7,62	40,28	35,31	45,26	6,30	19,59	15,33	23,85	11,10	
Kepulauan Riau	35,57	20,07	51,06	22,22	42,03	30,89	53,17	13,53	22,40	9,18	35,62	30,10	
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	38,19	35,29	41,09	3,87	40,65	38,24	43,07	3,03	21,16	18,95	23,37	5,32	
Jawa Tengah	36,67	34,72	38,62	2,71	41,51	39,75	43,26	2,15	21,82	20,31	23,34	3,55	
DI Yogyakarta	34,71	28,68	40,74	8,87	45,14	39,47	50,80	6,40	20,15	15,48	24,83	11,84	
Jawa Timur	38,06	35,99	40,14	2,78	40,24	38,37	42,10	2,36	21,70	20,13	23,28	3,71	
Banten	38,42	33,38	43,47	6,69	39,49	35,21	43,77	5,53	22,08	17,45	26,72	10,72	
Bali	37,02	32,07	41,97	6,82	42,89	37,85	47,93	5,99	20,09	15,72	24,46	11,09	
Nusa Tenggara Barat	38,04	33,79	42,28	5,70	40,19	36,33	44,06	4,91	21,77	18,26	25,28	8,22	
Nusa Tenggara Timur	38,45	35,73	41,17	3,61	41,05	38,69	43,41	2,93	20,49	18,37	22,61	5,28	
Kalimantan Barat	38,38	35,09	41,68	4,38	40,33	37,54	43,11	3,52	21,29	18,70	23,89	6,22	
Kalimantan Tengah	38,87	34,64	43,11	5,56	41,95	38,31	45,60	4,43	19,17	16,33	22,02	7,57	
Kalimantan Selatan	37,95	34,05	41,85	5,25	41,04	37,82	44,26	4,00	21,01	18,22	23,79	6,76	
Kalimantan Timur	38,87	32,30	45,45	8,63	40,61	35,23	45,98	6,75	20,52	14,77	26,27	14,29	
Kalimantan Utara	39,02	31,25	46,80	10,17	40,93	34,70	47,15	7,76	20,05	15,11	24,99	12,56	
Sulawesi Utara	41,90	38,13	45,66	4,59	39,79	36,25	43,33	4,54	18,31	15,74	20,89	7,18	
Sulawesi Tengah	40,44	36,51	44,36	4,95	38,80	35,36	42,25	4,53	20,76	18,25	23,27	6,16	
Sulawesi Selatan	40,09	37,30	42,88	3,55	40,16	37,79	42,53	3,01	19,75	17,73	21,77	5,21	
Sulawesi Tenggara	36,50	33,23	39,77	4,57	41,85	38,68	45,02	3,86	21,65	18,97	24,32	6,30	
Gorontalo	41,48	36,20	46,75	6,49	40,70	35,99	45,40	5,90	17,83	13,70	21,96	11,82	
Sulawesi Barat	37,53	32,74	42,32	6,51	42,00	37,76	46,24	5,15	20,47	17,25	23,69	8,03	
Maluku	43,07	38,08	48,06	5,91	40,27	36,33	44,22	4,99	16,66	12,79	20,52	11,83	
Maluku Utara	42,99	38,43	47,55	5,41	38,37	34,42	42,32	5,25	18,64	15,54	21,73	8,47	
Papua Barat	42,25	37,13	47,38	6,19	41,23	36,75	45,71	5,54	16,52	13,77	19,26	8,48	
Papua	40,99	38,31	43,67	3,33	39,65	37,15	42,15	3,21	19,36	17,10	21,62	5,95	
Indonesia	37,91	37,27	38,56	0,87	41,10	40,52	41,67	0,71	20,99	20,48	21,51	1,25	

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.17.1 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Sewa/Kontrak menurut Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	8,57	6,67	10,47	11,32	1,71	1,22	2,19	14,48	4,14	3,38	4,89	9,31
Sumatera Utara	14,65	12,35	16,94	7,99	4,15	3,39	4,90	9,28	10,36	8,94	11,77	6,97
Sumatera Barat	11,22	9,04	13,41	9,92	2,63	1,83	3,43	15,59	7,13	5,94	8,32	8,52
Riau	15,21	12,19	18,23	10,13	2,27	1,54	3,00	16,36	7,72	6,34	9,09	9,09
Jambi	7,98	5,49	10,47	15,95	0,88	0,50	1,27	22,32	3,14	2,28	4,00	13,97
Sumatera Selatan	7,53	5,59	9,46	13,11	1,69	0,46	2,92	37,25	4,01	2,96	5,07	13,38
Bengkulu	9,67	6,95	12,38	14,34	1,47	0,52	2,43	33,14	4,44	3,28	5,60	13,34
Lampung	7,65	5,27	10,04	15,88	0,40	0,15	0,66	32,51	2,89	2,05	3,74	14,85
Kep. Bangka Belitung	6,96	4,57	9,36	17,56	0,92	0,27	1,56	36,09	4,35	2,95	5,76	16,45
Kepulauan Riau	19,26	14,20	24,32	13,40	NA	NA	NA	69,74	17,54	12,93	22,16	13,42
DKI Jakarta	22,30	19,76	24,84	5,81	-	-	-	-	22,30	19,76	24,84	5,81
Jawa Barat	7,46	6,53	8,38	6,32	0,63	0,34	0,93	23,62	6,18	5,43	6,94	6,24
Jawa Tengah	2,38	1,89	2,87	10,49	0,26	0,11	0,40	29,40	1,41	1,13	1,68	9,92
DI Yogyakarta	8,69	6,57	10,82	12,48	NA	NA	NA	81,51	7,18	5,46	8,90	12,21
Jawa Timur	5,24	4,36	6,12	8,58	0,20	0,08	0,31	29,58	3,12	2,60	3,64	8,47
Banten	7,55	6,00	9,10	10,50	0,63	0,16	1,10	38,37	6,07	4,84	7,30	10,33
Bali	11,86	9,03	14,69	12,17	0,38	0,01	0,74	49,14	8,96	6,81	11,11	12,24
Nusa Tenggara Barat	1,52	0,53	2,52	33,26	NA	NA	NA	73,47	1,02	0,41	1,62	30,35
Nusa Tenggara Timur	9,53	6,75	12,31	14,89	0,28	0,10	0,47	33,64	3,03	2,17	3,89	14,46
Kalimantan Barat	5,50	3,19	7,81	21,45	0,27	0,06	0,48	39,68	2,20	1,31	3,08	20,58
Kalimantan Tengah	5,91	4,28	7,55	14,10	0,88	0,37	1,39	29,42	3,06	2,30	3,82	12,69
Kalimantan Selatan	10,25	7,99	12,52	11,27	1,17	0,67	1,66	21,69	5,77	4,57	6,97	10,62
Kalimantan Timur	13,07	10,69	15,45	9,30	2,15	1,01	3,29	27,09	9,83	8,09	11,56	9,00
Kalimantan Utara	12,75	8,67	16,83	16,32	0,93	0,08	1,78	46,69	8,86	6,07	11,65	16,06
Sulawesi Utara	4,92	3,18	6,65	17,99	1,01	0,36	1,66	33,02	3,26	2,22	4,29	16,24
Sulawesi Tengah	7,89	4,84	10,94	19,71	NA	NA	NA	52,78	3,35	2,12	4,59	18,82
Sulawesi Selatan	4,80	3,16	6,44	17,46	0,33	0,06	0,61	41,93	2,59	1,76	3,42	16,38
Sulawesi Tenggara	5,80	3,06	8,54	24,07	0,23	0,07	0,38	35,10	2,55	1,40	3,71	23,04
Gorontalo	0,86	0,19	1,53	39,59	NA	NA	NA	71,95	0,63	0,18	1,08	36,83
Sulawesi Barat	4,60	0,86	8,34	41,44	NA	NA	NA	51,92	1,10	0,27	1,94	38,61
Maluku	5,20	3,00	7,40	21,62	0,34	0,05	0,63	43,69	2,59	1,54	3,64	20,65
Maluku Utara	4,44	2,26	6,62	25,05	NA	NA	NA	53,60	1,58	0,87	2,28	22,80
Papua Barat	12,20	8,56	15,83	15,20	1,19	0,62	1,75	24,37	5,82	4,29	7,35	13,42
Papua	16,56	12,96	20,16	11,09	0,41	0,18	0,64	28,95	5,01	3,97	6,05	10,60
Indonesia	8,53	8,12	8,93	2,42	0,91	0,81	1,02	5,72	5,47	5,23	5,72	2,32

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.17.2 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Sewa/Kontrak menurut Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	3,32	2,53	4,11	12,13	4,95	3,98	5,92	9,99	4,14	3,38	4,89	9,31
Sumatera Utara	10,00	8,35	11,65	8,44	10,72	9,20	12,25	7,25	10,36	8,94	11,77	6,97
Sumatera Barat	6,06	4,86	7,26	10,11	8,24	6,68	9,79	9,61	7,13	5,94	8,32	8,52
Riau	6,34	4,88	7,79	11,71	9,19	7,50	10,88	9,39	7,72	6,34	9,09	9,09
Jambi	2,93	2,09	3,77	14,65	3,37	2,24	4,49	17,07	3,14	2,28	4,00	13,97
Sumatera Selatan	4,37	2,94	5,80	16,68	3,65	2,66	4,63	13,75	4,01	2,96	5,07	13,38
Bengkulu	3,90	2,38	5,41	19,82	5,00	3,66	6,34	13,65	4,44	3,28	5,60	13,34
Lampung	2,35	1,53	3,18	17,93	3,46	2,40	4,52	15,66	2,89	2,05	3,74	14,85
Kep. Bangka Belitung	4,30	2,52	6,07	21,06	4,41	2,83	5,98	18,28	4,35	2,95	5,76	16,45
Kepulauan Riau	17,71	12,01	23,40	16,41	17,37	12,91	21,82	13,09	17,54	12,93	22,16	13,42
DKI Jakarta	21,78	18,87	24,68	6,81	22,80	19,93	25,66	6,42	22,30	19,76	24,84	5,81
Jawa Barat	5,86	4,97	6,75	7,73	6,52	5,63	7,41	6,99	6,18	5,43	6,94	6,24
Jawa Tengah	1,51	1,15	1,87	12,09	1,30	1,03	1,58	10,91	1,41	1,13	1,68	9,92
DI Yogyakarta	6,09	4,12	8,06	16,49	8,26	6,00	10,52	13,95	7,18	5,46	8,90	12,21
Jawa Timur	2,99	2,37	3,61	10,58	3,26	2,63	3,89	9,91	3,12	2,60	3,64	8,47
Banten	6,50	4,87	8,13	12,79	5,64	4,36	6,91	11,52	6,07	4,84	7,30	10,33
Bali	8,97	6,45	11,49	14,34	8,96	6,87	11,05	11,92	8,96	6,81	11,11	12,24
Nusa Tenggara Barat	0,81	0,27	1,36	34,36	1,22	0,42	2,02	33,52	1,02	0,41	1,62	30,35
Nusa Tenggara Timur	2,44	1,81	3,26	17,25	3,63	2,45	4,80	16,52	3,03	2,17	3,89	14,46
Kalimantan Barat	1,85	0,75	2,96	30,50	2,54	1,58	3,50	19,25	2,20	1,31	3,08	20,58
Kalimantan Tengah	2,57	1,77	3,37	15,97	3,56	2,62	4,50	13,50	3,06	2,30	3,82	12,69
Kalimantan Selatan	5,90	4,31	7,49	13,73	5,63	4,29	6,96	12,12	5,77	4,57	6,97	10,62
Kalimantan Timur	9,33	7,43	11,22	10,35	10,36	8,33	12,39	9,99	9,83	8,09	11,56	9,00
Kalimantan Utara	7,92	4,94	10,91	19,22	9,85	6,66	13,04	16,53	8,86	6,07	11,65	16,06
Sulawesi Utara	3,12	1,91	4,33	19,74	3,40	2,30	4,50	16,49	3,26	2,22	4,29	16,24
Sulawesi Tengah	3,32	2,02	4,61	19,89	3,39	1,94	4,84	21,80	3,35	2,12	4,59	18,82
Sulawesi Selatan	2,71	1,73	3,70	18,46	2,47	1,57	3,37	18,56	2,59	1,76	3,42	16,38
Sulawesi Tenggara	2,13	1,07	3,19	25,32	2,97	1,47	4,48	25,82	2,55	1,40	3,71	23,04
Gorontalo	NA	NA	NA	50,20	1,00	0,21	1,78	40,20	0,63	0,18	1,08	36,83
Sulawesi Barat	0,95	0,24	1,67	38,22	1,26	0,23	2,28	41,56	1,10	0,27	1,94	38,61
Maluku	2,61	1,25	3,97	26,53	2,56	1,49	3,64	21,47	2,59	1,54	3,64	20,65
Maluku Utara	1,56	0,63	2,48	30,43	1,60	0,83	2,37	24,66	1,58	0,87	2,28	22,80
Papua Barat	5,33	3,64	7,02	16,18	6,32	4,48	8,16	14,84	5,82	4,29	7,35	13,42
Papua	4,89	3,74	6,04	11,98	5,14	3,88	6,40	12,52	5,01	3,97	6,05	10,60
Indonesia	5,22	4,93	5,51	2,86	5,73	5,45	6,02	2,52	5,47	5,23	5,72	2,32

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.18 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Bebas Sewa menurut Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
(1)	(2)	Batas Bawah	Batas Atas	(5)	(6)	Batas Bawah	Batas Atas	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	10,14	8,20	12,09	9,79	6,73	5,64	7,82	8,25	7,94	6,96	8,92	6,32
Sumatera Utara	16,52	14,18	18,86	7,22	12,55	11,11	14,00	5,88	14,90	13,39	16,40	5,15
Sumatera Barat	20,44	17,19	23,69	8,11	13,47	11,85	15,09	6,13	17,12	15,24	19,00	5,60
Riau	11,68	8,80	14,56	12,59	7,09	5,62	8,55	10,55	9,02	7,53	10,51	8,45
Jambi	10,43	7,34	13,51	15,11	7,63	6,10	9,15	10,21	8,52	7,08	9,95	8,60
Sumatera Selatan	14,47	10,55	18,40	13,84	9,31	7,79	10,82	8,30	11,37	9,54	13,19	8,19
Bengkulu	7,64	5,09	10,19	17,04	6,56	4,80	8,32	13,71	6,95	5,50	8,40	10,67
Lampung	5,67	3,96	7,39	15,40	4,24	3,36	5,13	10,67	4,73	3,91	5,56	8,90
Kep. Bangka Belitung	7,94	5,69	10,18	14,43	2,40	0,84	3,95	33,09	5,55	4,11	6,98	13,17
Kepulauan Riau	10,76	6,80	14,71	18,74	6,42	3,25	9,60	25,24	10,36	6,76	13,97	17,75
DKI Jakarta	16,41	14,48	18,33	5,97	-	-	-	-	16,41	14,48	18,33	5,97
Jawa Barat	12,08	11,02	13,14	4,47	7,76	6,53	8,99	8,10	11,27	10,38	12,16	4,03
Jawa Tengah	10,00	8,91	11,09	5,55	3,70	3,07	4,34	8,76	7,11	6,45	7,77	4,73
DI Yogyakarta	6,13	4,72	7,54	11,72	2,05	0,54	3,56	37,61	5,37	4,20	6,54	11,11
Jawa Timur	8,40	7,34	9,45	6,40	3,34	2,77	3,92	8,75	6,28	5,62	6,94	5,37
Banten	6,29	4,76	7,81	12,36	5,66	4,01	7,31	14,90	6,15	4,90	7,40	10,36
Bali	6,33	4,47	8,20	15,01	7,55	4,49	10,60	20,66	6,64	5,05	8,23	12,24
Nusa Tenggara Barat	10,88	8,41	13,34	11,56	5,24	3,35	7,12	18,34	8,23	6,65	9,81	9,80
Nusa Tenggara Timur	6,03	4,16	7,89	15,78	3,04	2,34	3,74	11,74	3,93	3,19	4,66	9,56
Kalimantan Barat	9,21	6,86	11,56	13,01	4,92	3,80	6,03	11,55	6,50	5,38	7,61	8,74
Kalimantan Tengah	14,26	11,24	17,29	10,81	7,53	6,00	9,07	10,41	10,44	8,86	12,02	7,73
Kalimantan Selatan	13,41	10,44	16,37	11,27	7,78	6,23	9,33	10,15	10,63	8,92	12,33	8,18
Kalimantan Timur	13,81	11,34	16,27	9,10	7,57	5,20	9,93	15,96	11,95	10,06	13,85	8,11
Kalimantan Utara	9,24	5,82	12,66	18,88	9,54	5,84	13,24	19,76	9,34	6,74	11,94	14,19
Sulawesi Utara	19,58	16,59	22,57	7,78	11,47	9,48	13,47	8,88	16,13	14,26	18,01	5,93
Sulawesi Tengah	9,31	6,56	12,07	15,10	5,05	3,73	6,37	13,35	6,55	5,27	7,84	10,00
Sulawesi Selatan	13,04	10,04	16,04	11,73	6,20	5,07	7,33	9,29	9,66	8,04	11,29	8,59
Sulawesi Tenggara	8,49	6,12	10,86	14,26	4,07	3,24	4,90	10,38	5,92	4,82	7,01	9,47
Gorontalo	15,98	12,88	19,08	9,91	7,62	5,65	9,58	13,14	11,36	9,59	13,14	7,96
Sulawesi Barat	4,20	1,76	6,64	29,65	3,99	2,61	5,38	17,66	4,04	2,83	5,24	15,25
Maluku	12,23	8,80	15,66	14,31	5,71	4,09	7,33	14,45	8,73	6,91	10,54	10,61
Maluku Utara	7,99	4,33	11,65	23,36	5,52	3,76	7,29	16,31	6,29	4,63	7,95	13,48
Papua Barat	10,23	7,10	13,36	15,62	3,87	2,68	5,06	15,70	6,54	5,08	8,01	11,39
Papua	12,08	9,09	15,06	12,61	2,57	1,99	3,15	11,52	5,28	4,30	6,26	9,46
Indonesia	11,27	10,83	11,70	1,97	6,00	5,75	6,25	2,13	9,16	8,88	9,44	1,56

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.19.1 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Dinas/Lainnya menurut Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan Batas Bawah	Batas Atas	Relative Standard Error
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	2,49	1,00	3,97	30,46	0,73	0,26	1,21	33,14	1,35	0,75	1,96	22,93
Sumatera Utara	2,61	1,42	3,79	23,19	2,49	1,60	3,38	18,25	2,56	1,77	3,35	15,74
Sumatera Barat	1,88	0,57	3,20	35,69	0,72	0,29	1,15	30,28	1,33	0,61	2,05	27,49
Riau	2,06	0,77	3,35	31,97	4,63	2,84	6,42	19,74	3,55	2,38	4,72	16,82
Jambi	NA	NA	NA	53,60	1,20	0,07	2,33	47,88	1,05	0,24	1,86	39,16
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	59,79	0,19	0,03	0,34	42,50	NA	NA	NA	50,39
Bengkulu	NA	NA	NA	54,25	1,21	0,15	2,26	44,64	0,90	0,21	1,59	38,94
Lampung	NA	NA	NA	90,50	NA	NA	NA	94,67	NA	NA	NA	66,46
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	51,08	NA	NA	NA	54,40	1,14	0,30	1,97	37,47
Kepulauan Riau	0,51	0,08	0,93	42,83	NA	NA	NA	61,57	0,47	0,08	0,85	42,28
DKI Jakarta	1,60	0,20	3,01	44,77	-	-	-	-	1,60	0,20	3,01	44,77
Jawa Barat	0,24	0,06	0,41	37,51	NA	NA	NA	57,77	0,21	0,06	0,35	35,12
Jawa Tengah	NA	NA	NA	57,84	NA	NA	NA	85,05	0,06	0,00	0,12	47,83
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	56,15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	56,13
Jawa Timur	0,41	0,16	0,66	31,39	NA	NA	NA	70,75	0,25	0,10	0,39	30,52
Banten	NA	NA	NA	75,61	NA	NA	NA	73,70	NA	NA	NA	62,17
Bali	NA	NA	NA	100,22	NA	NA	NA	99,50	NA	NA	NA	76,35
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	65,69	NA	NA	NA	75,56	NA	NA	NA	53,57
Nusa Tenggara Timur	0,97	0,11	1,84	45,26	0,55	0,20	0,91	32,87	0,68	0,32	1,04	26,88
Kalimantan Barat	NA	NA	NA	62,56	0,32	0,01	0,63	48,79	0,25	0,05	0,45	41,70
Kalimantan Tengah	4,80	1,97	7,82	30,05	5,74	3,48	8,01	20,14	5,34	3,56	7,11	16,97
Kalimantan Selatan	NA	NA	NA	57,27	1,78	0,61	2,95	33,51	1,77	0,61	2,92	33,28
Kalimantan Timur	1,10	0,22	1,99	41,04	NA	NA	NA	55,64	2,25	0,50	3,99	39,62
Kalimantan Utara	3,42	1,15	5,69	33,85	0,98	0,17	1,78	42,06	2,61	1,08	4,15	30,01
Sulawesi Utara	1,24	0,29	2,20	39,03	0,12	0,02	0,22	44,07	0,76	0,22	1,31	36,53
Sulawesi Tengah	1,75	0,46	3,04	37,53	NA	NA	NA	50,87	0,83	0,32	1,33	31,17
Sulawesi Selatan	NA	NA	NA	51,20	0,34	0,13	0,55	31,05	0,40	0,15	0,66	32,47
Sulawesi Tenggara	NA	NA	NA	50,62	NA	NA	NA	59,75	0,35	0,06	0,64	42,65
Gorontalo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71,72	NA	NA	NA	71,65
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	72,05	0,66	0,03	1,30	49,05	0,68	0,13	1,23	41,23
Maluku	1,40	0,23	2,57	42,80	0,27	0,09	0,46	34,77	0,79	0,24	1,35	35,39
Maluku Utara	NA	NA	NA	64,13	NA	NA	NA	54,08	0,44	0,07	0,81	42,65
Papua Barat	1,00	0,38	1,62	31,57	1,71	0,94	2,48	22,98	1,41	0,89	1,93	18,75
Papua	9,20	4,85	13,55	24,13	0,86	0,11	1,62	44,72	3,24	1,85	4,63	21,86
Indonesia	0,80	0,65	0,96	9,89	0,74	0,62	0,87	8,50	0,78	0,67	0,89	6,92

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.19.2 Sampling Error Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Dinas/Lainnya menurut Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	1,47	0,74	2,20	25,27	1,24	0,66	1,82	23,70	1,35	0,75	1,96	22,93
Sumatera Utara	2,44	1,65	3,23	16,53	2,68	1,80	3,55	16,68	2,56	1,77	3,35	15,74
Sumatera Barat	1,19	0,41	1,98	33,62	1,47	0,68	2,26	27,53	1,33	0,61	2,05	27,49
Riau	3,17	2,03	4,31	18,34	3,95	2,58	5,32	17,65	3,55	2,38	4,72	16,82
Jambi	0,81	0,18	1,45	39,55	1,30	0,27	2,32	40,42	1,05	0,24	1,86	39,16
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	52,19	NA	NA	NA	50,54	NA	NA	NA	50,39
Bengkulu	0,66	0,03	1,28	48,69	1,15	0,34	1,95	35,79	0,90	0,21	1,59	38,94
Lampung	NA	NA	NA	70,35	NA	NA	NA	71,85	NA	NA	NA	66,46
Kep. Bangka Belitung	1,25	0,25	2,26	40,97	1,01	0,25	1,77	38,37	1,14	0,30	1,97	37,47
Kepulauan Riau	0,50	0,02	0,99	49,26	NA	NA	NA	51,62	0,47	0,08	0,85	42,28
DKI Jakarta	1,61	0,15	3,07	46,15	1,59	0,18	3,01	45,31	1,60	0,20	3,01	44,77
Jawa Barat	0,16	0,04	0,28	37,42	0,26	0,08	0,44	35,71	0,21	0,06	0,35	35,12
Jawa Tengah	NA	NA	NA	53,45	NA	NA	NA	61,46	0,06	0,00	0,12	47,83
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	58,51	NA	NA	NA	70,16	NA	NA	NA	56,13
Jawa Timur	0,20	0,06	0,35	36,74	0,29	0,09	0,49	35,29	0,25	0,10	0,39	30,52
Banten	NA	NA	NA	61,39	NA	NA	NA	64,05	NA	NA	NA	62,17
Bali	NA	NA	NA	78,49	NA	NA	NA	74,02	NA	NA	NA	76,35
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	56,14	NA	NA	NA	53,56	NA	NA	NA	53,57
Nusa Tenggara Timur	0,68	0,24	1,13	33,33	0,67	0,30	1,05	28,47	0,68	0,32	1,04	26,88
Kalimantan Barat	0,19	0,02	0,36	44,59	0,31	0,04	0,57	44,42	0,25	0,05	0,45	41,70
Kalimantan Tengah	5,50	3,55	7,46	18,10	5,16	3,24	7,08	19,01	5,34	3,56	7,11	16,97
Kalimantan Selatan	1,38	0,52	2,24	31,73	2,16	0,58	3,74	37,33	1,77	0,61	2,92	33,28
Kalimantan Timur	2,87	0,35	5,39	44,74	1,58	0,51	2,66	34,69	2,25	0,50	3,99	39,62
Kalimantan Utara	2,28	0,66	3,90	36,28	2,97	1,28	4,67	29,08	2,61	1,08	4,15	30,01
Sulawesi Utara	0,90	0,18	1,61	40,57	0,62	0,15	1,10	38,92	0,76	0,22	1,31	36,53
Sulawesi Tengah	0,72	0,19	1,25	37,59	0,93	0,26	1,61	36,80	0,83	0,32	1,33	31,17
Sulawesi Selatan	0,57	0,10	1,04	42,29	0,23	0,09	0,38	30,56	0,40	0,15	0,66	32,47
Sulawesi Tenggara	0,33	0,01	0,65	49,36	0,37	0,06	0,67	42,31	0,35	0,06	0,64	42,65
Gorontalo	NA	NA	NA	95,83	NA	NA	NA	85,49	NA	NA	NA	71,65
Sulawesi Barat	1,06	0,21	1,90	40,79	NA	NA	NA	56,24	0,68	0,13	1,23	41,23
Maluku	1,07	0,14	2,00	44,57	0,51	0,23	0,79	28,18	0,79	0,24	1,35	35,39
Maluku Utara	NA	NA	NA	52,54	0,27	0,03	0,51	45,74	0,44	0,07	0,81	42,65
Papua Barat	1,56	0,83	2,28	23,66	1,26	0,76	1,77	20,46	1,41	0,89	1,93	18,75
Papua	3,30	1,83	4,76	22,66	3,18	1,76	4,60	22,77	3,24	1,85	4,63	21,86
Indonesia	0,76	0,65	0,87	7,41	0,80	0,69	0,92	7,31	0,78	0,67	0,89	6,92

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.20.1 Sampling Error Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan Batas Bawah	Selang Kepercayaan Batas Atas	Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan Batas Bawah	Selang Kepercayaan Batas Atas	Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan Batas Bawah	Selang Kepercayaan Batas Atas	Relative Standard Error
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,32	0,08	0,57	38,04	0,18	0,02	0,34	45,27	0,23	0,10	0,36	29,58
Sumatera Utara	0,72	0,35	1,08	26,11	0,48	0,26	0,69	23,18	0,62	0,38	0,85	19,34
Sumatera Barat	0,89	0,35	1,43	30,77	0,42	0,20	0,63	26,03	0,67	0,37	0,96	22,85
Riau	NA	NA	NA	61,67	0,34	0,13	0,55	31,31	0,41	0,12	0,70	35,57
Jambi	0,75	0,04	1,45	48,29	0,54	0,27	0,81	25,66	0,60	0,31	0,89	24,57
Sumatera Selatan	0,59	0,19	0,99	34,45	0,29	0,11	0,47	31,46	0,41	0,22	0,60	23,86
Bengkulu	0,89	0,22	1,55	38,28	0,73	0,29	1,17	30,62	0,79	0,42	1,16	23,92
Lampung	0,75	0,27	1,24	32,65	0,76	0,20	1,31	37,26	0,75	0,36	1,15	26,92
Kep. Bangka Belitung	0,25	0,01	0,50	48,57	NA	NA	NA	52,20	0,29	0,09	0,50	35,70
Kepulauan Riau	1,14	0,18	2,09	42,75	0,00	0,00	0,00	NA	1,03	0,17	1,90	42,79
DKI Jakarta	0,43	0,19	0,67	28,53	-	-	-	-	0,43	0,19	0,67	28,53
Jawa Barat	0,80	0,58	1,02	13,94	0,56	0,29	0,82	24,17	0,76	0,57	0,94	12,46
Jawa Tengah	0,65	0,46	0,85	15,29	0,30	0,17	0,42	21,40	0,49	0,37	0,61	12,56
DI Yogyakarta	0,73	0,29	1,17	30,61	1,17	0,19	2,14	42,56	0,81	0,41	1,21	25,18
Jawa Timur	0,55	0,32	0,77	20,95	0,20	0,10	0,30	25,32	0,40	0,27	0,54	17,41
Banten	0,70	0,28	1,12	30,48	NA	NA	NA	57,70	0,58	0,24	0,91	29,31
Bali	NA	NA	NA	64,67	NA	NA	NA	75,76	NA	NA	NA	55,78
Nusa Tenggara Barat	0,72	0,34	1,09	27,03	1,16	0,60	1,72	24,58	0,92	0,59	1,25	18,27
Nusa Tenggara Timur	0,75	0,17	1,33	39,68	0,20	0,09	0,31	29,05	0,36	0,17	0,55	26,76
Kalimantan Barat	0,49	0,08	0,89	42,51	0,36	0,17	0,55	26,99	0,41	0,22	0,60	24,04
Kalimantan Tengah	0,56	0,14	0,98	38,37	0,24	0,01	0,47	49,29	0,38	0,15	0,60	30,40
Kalimantan Selatan	0,51	0,17	0,85	34,17	0,33	0,12	0,53	31,86	0,42	0,22	0,62	24,33
Kalimantan Timur	0,26	0,04	0,49	43,85	NA	NA	NA	78,73	0,20	0,04	0,36	41,37
Kalimantan Utara	0,74	0,23	1,24	34,96	NA	NA	NA	86,37	0,63	0,22	1,03	33,09
Sulawesi Utara	0,44	0,16	0,72	32,15	NA	NA	NA	72,07	0,28	0,12	0,45	29,84
Sulawesi Tengah	1,02	0,26	1,77	37,77	0,38	0,08	0,68	40,68	0,60	0,27	0,93	27,91
Sulawesi Selatan	0,33	0,13	0,54	31,31	0,17	0,07	0,26	29,10	0,25	0,14	0,37	23,04
Sulawesi Tenggara	0,54	0,08	1,00	43,47	0,31	0,10	0,52	34,31	0,41	0,18	0,63	28,61
Gorontalo	NA	NA	NA	71,74	0,17	0,02	0,33	44,97	0,25	0,02	0,49	47,59
Sulawesi Barat	0,61	0,10	1,13	43,08	NA	NA	NA	70,51	0,21	0,05	0,38	38,31
Maluku	1,27	0,47	2,08	32,33	NA	NA	NA	57,71	0,84	0,37	1,30	28,29
Maluku Utara	0,63	0,07	1,18	45,26	0,55	0,18	0,91	34,59	0,57	0,26	0,88	27,53
Papua Barat	0,49	0,06	0,91	44,52	0,34	0,10	0,57	35,52	0,40	0,17	0,62	28,70
Papua	0,39	0,07	0,70	41,73	0,44	0,26	0,63	21,38	0,43	0,27	0,59	19,18
Indonesia	0,65	0,56	0,73	6,54	0,37	0,31	0,42	7,28	0,53	0,48	0,59	5,15

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.20.2 Sampling Error Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
(1)	(2)	Batas Bawah	Batas Atas	(5)	(6)	Batas Bawah	Batas Atas	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,27	0,05	0,49	40,94	0,19	0,04	0,34	41,23	0,23	0,10	0,36	29,58
Sumatera Utara	0,57	0,31	0,84	23,70	0,66	0,33	1,00	26,06	0,62	0,38	0,85	19,34
Sumatera Barat	0,52	0,20	0,83	31,06	0,82	0,39	1,24	26,53	0,67	0,37	0,96	22,85
Riau	0,51	0,17	0,85	33,84	NA	NA	NA	51,18	0,41	0,12	0,70	35,57
Jambi	0,73	0,31	1,14	29,11	0,48	0,16	0,79	33,95	0,60	0,31	0,89	24,57
Sumatera Selatan	0,64	0,30	0,99	27,41	NA	NA	NA	50,56	0,41	0,22	0,60	23,86
Bengkulu	1,08	0,49	1,67	28,04	0,49	0,13	0,85	37,74	0,79	0,42	1,16	23,92
Lampung	0,87	0,44	1,29	25,01	0,64	0,12	1,15	41,18	0,75	0,36	1,15	26,92
Kep. Bangka Belitung	0,33	0,02	0,63	47,84	NA	NA	NA	50,07	0,29	0,09	0,50	35,70
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	67,84	1,91	0,16	3,66	46,78	1,03	0,17	1,90	42,79
DKI Jakarta	0,71	0,25	1,16	32,93	NA	NA	NA	55,96	0,43	0,19	0,67	28,53
Jawa Barat	0,86	0,61	1,11	14,78	0,64	0,39	0,90	20,29	0,76	0,57	0,94	12,46
Jawa Tengah	0,47	0,31	0,62	17,15	0,52	0,34	0,70	17,41	0,49	0,37	0,61	12,56
DI Yogyakarta	0,94	0,31	1,56	33,93	0,68	0,20	1,17	35,88	0,81	0,41	1,21	25,18
Jawa Timur	0,47	0,29	0,65	19,55	0,34	0,13	0,55	31,93	0,40	0,27	0,54	17,41
Banten	0,48	0,07	0,90	43,89	0,67	0,22	1,12	34,52	0,58	0,24	0,91	29,31
Bali	NA	NA	NA	59,93	NA	NA	NA	100,08	NA	NA	NA	55,78
Nusa Tenggara Barat	1,12	0,60	1,65	23,75	0,72	0,33	1,11	27,45	0,92	0,59	1,25	18,27
Nusa Tenggara Timur	0,50	0,23	0,77	27,87	0,23	0,01	0,45	48,79	0,36	0,17	0,55	26,76
Kalimantan Barat	0,60	0,25	0,96	29,98	0,21	0,06	0,37	37,22	0,41	0,22	0,60	24,04
Kalimantan Tengah	0,43	0,11	0,74	37,54	0,33	0,01	0,64	49,28	0,38	0,15	0,60	30,40
Kalimantan Selatan	0,28	0,10	0,46	32,76	0,56	0,20	0,92	32,89	0,42	0,22	0,62	24,33
Kalimantan Timur	0,29	0,01	0,56	48,71	NA	NA	NA	65,35	0,20	0,04	0,36	41,37
Kalimantan Utara	0,54	0,03	1,06	48,48	0,72	0,10	1,33	43,63	0,63	0,22	1,03	33,09
Sulawesi Utara	0,25	0,05	0,46	41,16	0,31	0,04	0,58	43,88	0,28	0,12	0,45	29,84
Sulawesi Tengah	0,59	0,15	1,03	38,09	0,62	0,12	1,12	41,48	0,60	0,27	0,93	27,91
Sulawesi Selatan	0,25	0,11	0,39	28,19	0,25	0,07	0,43	36,11	0,25	0,14	0,37	23,04
Sulawesi Tenggara	0,35	0,11	0,60	34,95	0,46	0,08	0,83	42,14	0,41	0,18	0,63	28,61
Gorontalo	NA	NA	NA	59,21	NA	NA	NA	66,73	0,25	0,02	0,49	47,59
Sulawesi Barat	NA	NA	NA	53,13	0,21	0,01	0,40	48,93	0,21	0,05	0,38	38,31
Maluku	0,57	0,12	1,03	40,35	1,11	0,30	1,92	37,40	0,84	0,37	1,30	28,29
Maluku Utara	0,70	0,27	1,13	31,67	0,44	0,11	0,77	38,12	0,57	0,26	0,88	27,53
Papua Barat	0,42	0,09	0,75	39,95	0,38	0,09	0,67	39,01	0,40	0,17	0,62	28,70
Papua	0,42	0,18	0,66	29,17	0,43	0,24	0,62	22,33	0,43	0,27	0,59	19,18
Indonesia	0,58	0,51	0,65	6,26	0,49	0,41	0,56	7,89	0,53	0,48	0,59	5,15

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

<https://www.bps.go.id>



Bab 7. Kesehatan Reproduksi



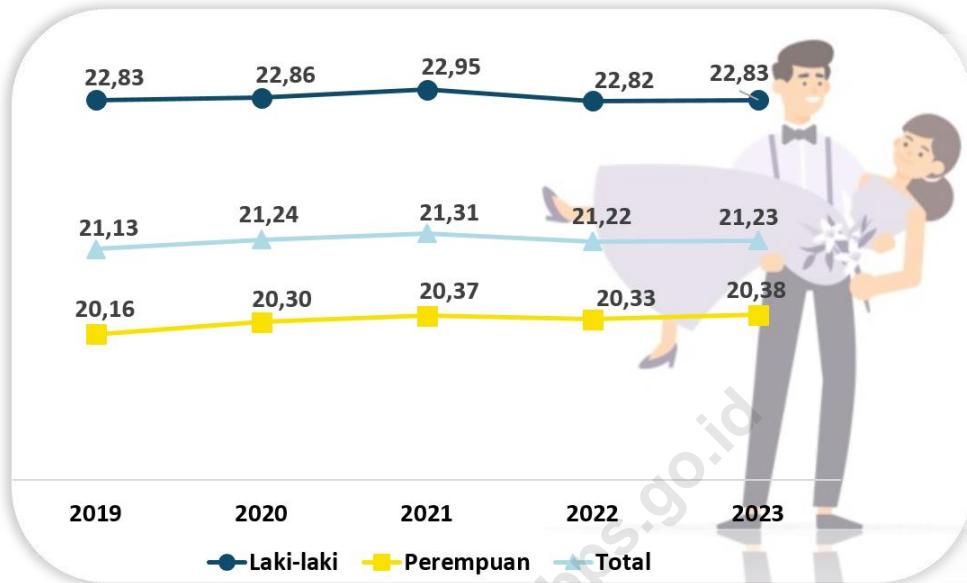
Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, tidak hanya terbebas dari segala penyakit dan gangguan fungsional di segala sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya (www.who.int). Kesehatan reproduksi menjadi suatu hal yang penting bagi pemuda. Hal ini mengingat peran penting pemuda sebagai agen pembangunan. Beberapa isu terkait kesehatan reproduksi seperti pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak direncanakan, serta kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga kesempatan berkarir dan pemberdayaan pemuda.

7.1 Usia Kawin Pertama Pemuda

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batasan umur untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Undang-Undang ini merupakan perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya yang menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raga seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, perubahan batasan umur ini antara lain dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Secara umum, perkembangan usia kawin pertama pada pemuda menunjukkan adanya pergerakan yang cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 (Gambar 7.1). Artinya, terjadi penundaan usia kawin pertama pemuda baik dilihat secara total, laki-laki, maupun perempuan. Tampaknya tren ini bersesuaian dengan perbaikan ketentuan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan, yaitu 19 tahun, yang semula adalah 16 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7). Meskipun

demikian, untuk dapat mengetahui dengan pasti asosiasi antara dua hal tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.



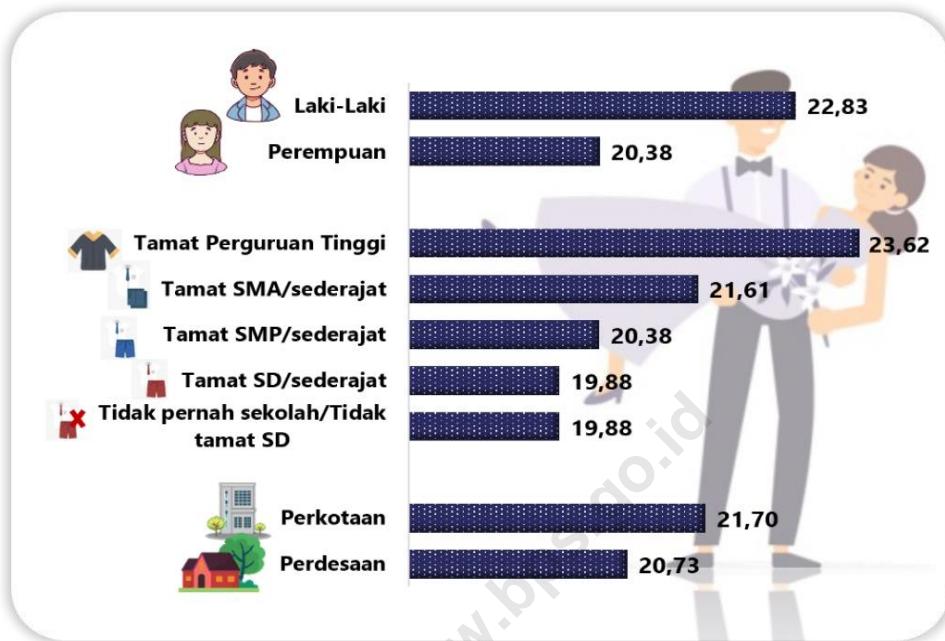
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Gambar 7.1 Perkembangan Usia Kawin Pertama Pemuda, 2019-2023

Dilihat menurut jenis kelamin, usia kawin pertama pemuda laki-laki dua tahun lebih tua daripada perempuan (22,83 tahun berbanding 20,38 tahun). Sementara itu, dilihat menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa seiring meningkatnya jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda maka semakin tua usia kawin pertamanya. Lebih lanjut, usia kawin pertama pemuda yang tinggal di perkotaan sedikit lebih tua daripada di perdesaan (Gambar 7.2).

Berbagai alasan melatarbelakangi usia kawin pertama pemuda. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa usia kawin pertama berhubungan secara signifikan dengan umur (Imron 2019, 108; Hossain 2022, 607), pengetahuan kesehatan reproduksi (Imron 2019, 108), pendidikan (Imron 2019, 108; Hossain 2022, 607; Singh 2022, 4; & Rasul 2022, 10; Khuzaimah 2022, 109), klasifikasi desa (Singh 2022, 4; Khuzaimah 2022, 109), pekerjaan perempuan sebelum menikah (Rasul 2022, 10), dan paparan media massa (Imron 2019, 108; Singh 2022, 4). Perempuan berpendidikan memiliki peluang lebih besar daripada perempuan

tidak berpendidikan untuk menunda perkawinan sampai dengan umur 18 tahun dan hamil hingga umur 20 tahun (Marphatia 2020, 14).



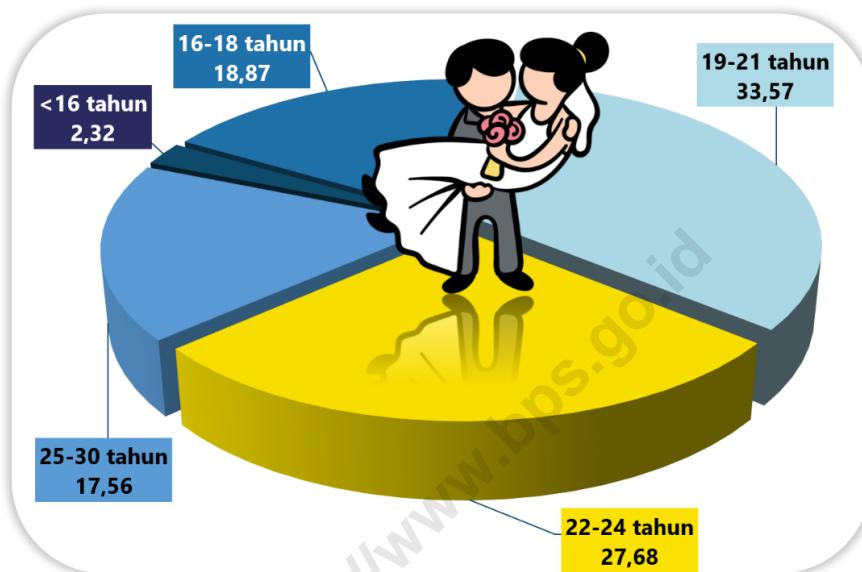
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.2 Usia Kawin Pertama Pemuda menurut Karakteristik, 2023

Berdasarkan Gambar 7.3 menunjukkan bahwa ternyata sebesar 18,87 persen pemuda dengan usia kawin pertamanya di umur 16-18 tahun. Bahkan, masih ada sekitar 2,32 persen yang usia kawin pertama di umur kurang dari 16 tahun (bukan pemuda). Dari penelitian sebelumnya ditemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk melakukan perkawinan dini perempuan diantaranya klasifikasi desa (Widiantara 2019, 146), status bekerja dan jenis pekerjaan perempuan (Widiantara 2019, 146; Sahli 2020, 4), pendidikan perempuan (Widiantara 2019, 147; Sahli 2020, 3), pendidikan orang tua (Widiantara 2019, 147), usia kawin pertama orang tua (Widiantara 2019, 147), pekerjaan orang tua (Sahli 2020, 4), dan status kemiskinan (Widiantara 2019, 146).

Masih adanya praktik perkawinan usia dini sangat memprihatinkan. Hal ini perlu menjadi perhatian. Penelitian menemukan bahwa rendahnya usia kawin pertama dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu dan anak, termasuk

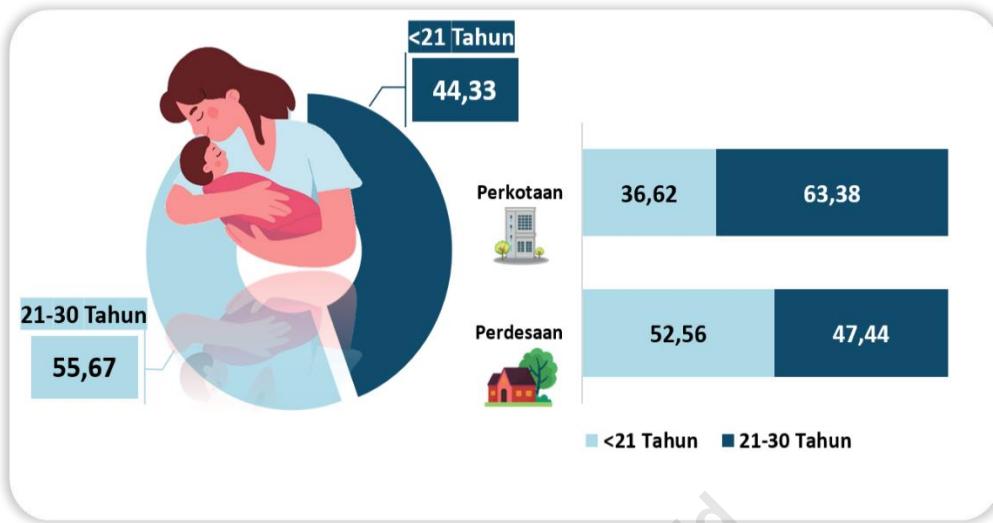
malnutrisi, tingginya angka kesakitan, dan kematian (Marphatia 2017, 9-10). Usia kawin pertama umur 15-19 tahun berhubungan dengan keluaran kesehatan reproduksi yang buruk, seperti jumlah anak yang dilahirkan, anak lahir mati dan meninggal, jumlah anak saat ini, dan penggunaan KB di tahun pertama pernikahan (Fanti 2022, 1280-1284).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.3 Persentase Pemuda menurut Usia Kawin Pertama dan Kelompok Umur, 2023

Pada tahun 2023, sebesar 44,33 persen pemuda perempuan pernah melahirkan di saat umur kurang dari 21 tahun. Persentase ini cukup besar. Dilihat menurut klasifikasi desa, persentase pemuda perempuan yang pernah melahirkan di saat umur 21-30 tahun lebih besar terjadi di perkotaan daripada di perdesaan. Di lain pihak, persentase pemuda perempuan yang pernah melahirkan di saat umur kurang dari 21 tahun lebih besar terjadi di perdesaan daripada di perkotaan (Gambar 7.4). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kombinasi antara umur reproduksi yang belum matang dan umur saat melahirkan <20 tahun atau >34 tahun memiliki risiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dibandingkan dengan umur reproduksi yang matang dan umur saat melahirkan 20-34 tahun, setelah dikontrol faktor lain (Mubasyiroh dkk, 2016, 115).

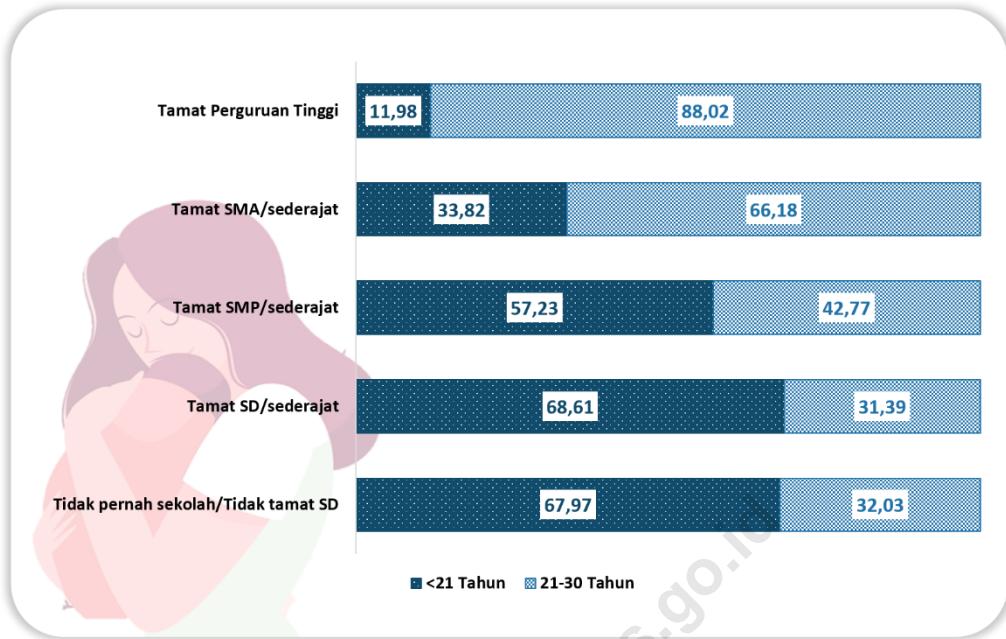


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Umur saat Melahirkan dan Klasifikasi Desa, 2023

Secara umum, jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan memiliki hubungan terbalik dengan pemuda perempuan saat melahirkan pertama di umur kurang dari 21 tahun, dan memiliki hubungan linier dengan pemuda perempuan saat melahirkan pertama di umur 21-30 tahun. Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka semakin rendah persentase pemuda perempuan yang melahirkan pertama saat umur kurang dari 21 tahun. Di sisi lain, semakin tinggi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka semakin tinggi persentase pemuda perempuan yang melahirkan pertama saat umur 21-30 tahun (Gambar 7.5).

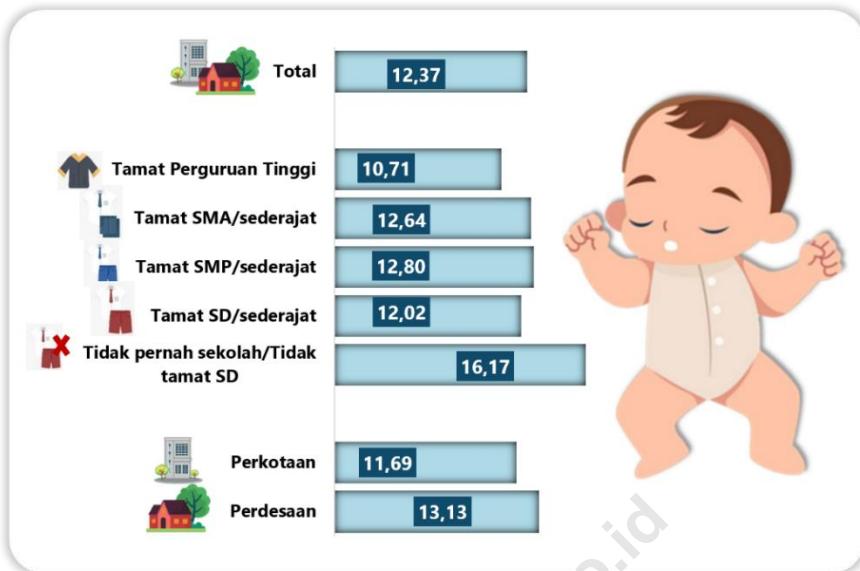
Hal ini bersesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa status pendidikan perempuan berpengaruh terhadap umur saat melahirkan pertama. Perempuan berpendidikan rendah (SD dan tidak lulus SD) cenderung melahirkan pada umur muda (kurang dari 20 tahun). Perempuan berpendidikan menengah dan tinggi cenderung melahirkan pada umur yang lebih dewasa, yaitu lebih dari 20 tahun (Sjafii dkk, 2019, 29).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.5 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Umur saat Melahirkan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Pada tahun 2023, sekitar 12,37 persen pemuda perempuan pernah melahirkan dengan BBLR. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka semakin kecil persentase pemuda perempuan pernah melahirkan dengan BBLR. Dilihat menurut klasifikasi desa, persentase pemuda perempuan pernah melahirkan dengan BBLR di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (Gambar 7.6). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ibu dan status tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap kejadian BBLR. Ibu yang berpendidikan tidak sekolah atau tidak tamat SD cenderung lebih tinggi untuk memiliki bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan SMA ke atas. Selanjutnya, rumah tangga yang tinggal di perdesaan cenderung lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di perkotaan (Sohibien & Yuhan, 2019, 12).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.6 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Klasifikasi Desa, 2023

Kejadian BBLR disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian oleh Endalamaw dkk (2018) menemukan bahwa umur ibu kurang dari 20 tahun, jarak kehamilan kurang dari 24 bulan, *Body Mass Index* (BMI) kurang dari $18,5\text{kg}/\text{m}^2$, dan umur kehamilan kurang dari 37 minggu saat lahir merupakan faktor yang berhubungan dengan BBLR (Endalamaw dkk, 2018, 6-8). Kelahiran prematur, riwayat trauma fisik yang dialami selama kehamilan, dan riwayat komplikasi kehamilan merupakan dugaan terjadinya BBLR (Hailu & Kebede, 2018, 3-7). Ibu usia lanjut (35-49 tahun), kurangnya *antenatal care* (ANC), buta huruf, dan status sosial ekonomi rendah berhubungan signifikan terhadap BBLR (Mahumud dkk, 2017, 26).

7.2 Persalinan Pemuda

SDGs Goal 3.1 menyebutkan bahwa pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk melihat sejauh mana capaian tujuan tersebut antara lain dapat dilihat dari

gambaran pemuda perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada tahun 2023, sebesar 91,85 persen pemuda perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan. Artinya, masih ada sekitar 8,15 persen pemuda perempuan melahirkan bukan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, dilihat menurut klasifikasi desa, persentase pemuda perempuan yang tinggal di perkotaan dan melahirkan di fasilitas kesehatan lebih besar daripada di perdesaan, yaitu 95,28 persen berbanding 88,01 persen (Gambar 7.7).

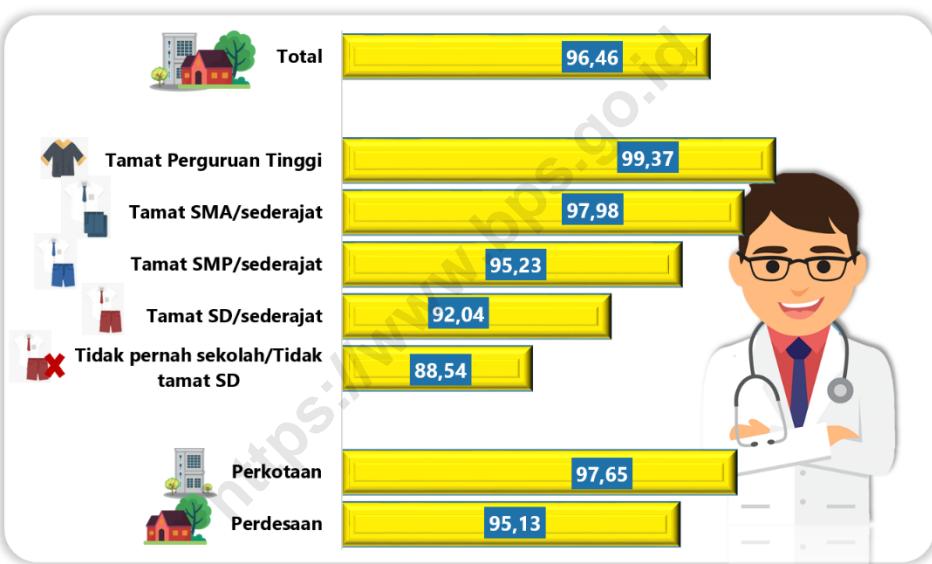


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.7 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Klasifikasi Desa, 2023

Berdasarkan Gambar 7.8, sebesar 96,46 persen pemuda perempuan melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, terdapat hubungan linier antara jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan persentase pemuda perempuan melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Semakin tinggi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka semakin besar persentase pemuda perempuan melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Dilihat menurut klasifikasi desa, persentase pemuda perempuan melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan.

Pada penelitian sebelumnya, indikator penolong terakhir persalinan digunakan sebagai pendekatan dari jenis pelayanan kesehatan yang dipilih ibu untuk memeriksakan kehamilan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa rumah tangga yang persalinan ibunya dibantu oleh tenaga nonmedis cenderung lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan BBLR daripada rumah tangga yang persalinan ibunya dibantu tenaga medis. Ibu yang memeriksakan kehamilan pada tenaga medis akan mendapatkan pelayanan lebih baik bagi kesehatan bayi yang dikandungnya daripada ibu yang tidak memeriksakan kehamilan pada tenaga medis (Sohibien & Yuhan, 2019, 12-13).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.8 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Klasifikasi Desa, 2023

7.3 Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. Program KB bertujuan untuk mengendalikan bertambahnya jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, menghindari kasus kehamilan yang tidak diinginkan, dan mengatur jarak kelahiran yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Lebih lanjut, program KB dapat menciptakan keluarga sehat dan sejahtera (ayosehat.kemkes.go.id).

Berdasarkan Gambar 7.9 terlihat bahwa lebih dari separuh pemuda perempuan pernah kawin sedang menggunakan KB (53,61 persen). Sementara itu, sebesar 33,96 persen pemuda perempuan pernah kawin tidak pernah menggunakan KB. Menurut penelitian, perempuan yang menikah pada usia muda 15-19 tahun memiliki peluang lebih besar untuk tidak segera menggunakan KB di tahun pertama pernikahan daripada perempuan yang menikah di usia ideal (Fanti 2022, 1282).

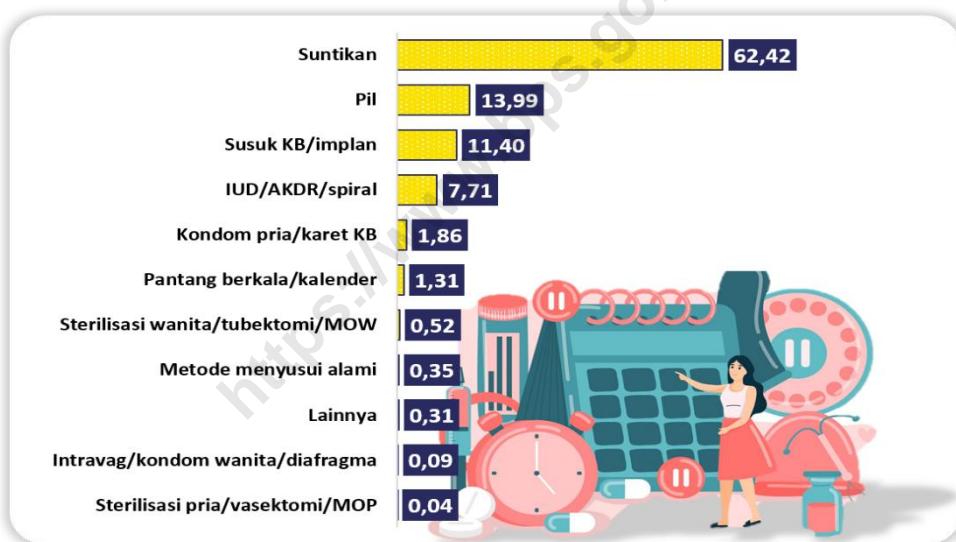


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.9 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Partisipasi Program Keluarga Berencana (KB), 2023

Metode kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB dibedakan menjadi dua, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan metode kontrasepsi jangka pendek (nonMKJP). MKJP merupakan metode yang memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dibandingkan dengan metode nonMKJP untuk mencegah kehamilan (BKKBN, 2018, 15). Jenis metode yang termasuk MKJP adalah sterilisasi pria/vasektomi/MOP, sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, implan/susuk KB, dan IUD/spiral. Sedangkan jenis metode yang termasuk nonMKJP adalah pil, suntik, dan kondom (BKKBN, 2019, 95 & 98).

Pada tahun 2023, metode yang paling banyak digunakan oleh pemuda perempuan pernah kawin adalah suntikan (62,42 persen), diikuti dengan pil, yaitu sekitar 13,99 persen (Gambar 7.10). Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (Andriani & Anwar, 2018, 82; Paramita & Zuliyati, 2019, 65; & Rofikoh dkk, 2019, 199). Sementara itu, metode yang paling sedikit digunakan oleh pemuda perempuan pernah kawin adalah sterilisasi pria/vasektomi/MOP, yaitu sekitar 0,04 persen (Gambar 7.10). Masih besarnya preferensi pemuda perempuan pernah kawin terhadap metode kontrasepsi nonMKJP menunjukkan bahwa cakupan penggunaan MKJP masih perlu ditingkatkan lagi.



Catatan: Jenis/alat KB yang dimaksud digunakan oleh pemuda perempuan atau pasangannya.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7.10 Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Jenis/Alat KB yang Digunakan, 2023

Tabel 7.1 Persentase Pemuda menurut Karakteristik Demografi dan Usia Kawin Pertama, 2023

Karakteristik	Usia Kawin Pertama					Jumlah
	<16 Tahun	16-18 Tahun	19-21 Tahun	22-24 Tahun	25-30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	2,32	18,87	33,57	27,68	17,56	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,43	5,92	27,31	36,01	30,33	100,00
Perempuan	3,33	25,78	36,91	23,24	10,74	100,00
Status Disabilitas						
Disabilitas	1,96	17,02	31,39	27,48	22,15	100,00
Nondisabilitas	2,32	18,88	33,58	27,68	17,54	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	7,62	28,73	34,27	19,60	9,78	100,00
Tamat SD/sederajat	5,82	31,63	34,08	18,33	10,14	100,00
Tamat SMP/sederajat	3,00	27,67	35,88	21,72	11,74	100,00
Tamat SMA/sederajat	0,79	12,01	38,40	32,21	16,60	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	0,21	3,31	16,93	39,48	40,07	100,00
Distribusi Pengeluaran						
40% Terbawah	3,12	24,60	37,06	23,47	11,75	100,00
40% Menengah	2,01	16,90	34,27	29,19	17,62	100,00
20% Teratas	1,16	9,96	23,98	34,11	30,79	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	1,55	15,08	31,56	30,83	20,98	100,00
Perdesaan	3,15	22,97	35,73	24,28	13,86	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Karakteristik Demografi dan Umur saat Melahirkan Pertama, 2023

Karakteristik (1)	Kelompok Umur	
	<21 Tahun (2)	21-30 Tahun (3)
Indonesia	44,33	55,67
Status Disabilitas		
Disabilitas	34,52	65,48
Nondisabilitas	44,36	55,64
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	67,97	32,03
Tamat SD/sederajat	68,61	31,39
Tamat SMP/sederajat	57,23	42,77
Tamat SMA/sederajat	33,82	66,18
Tamat Perguruan Tinggi	11,98	88,02
Distribusi Pengeluaran		
40% Terbawah	52,88	47,12
40% Menengah	41,03	58,97
20% Teratas	26,53	73,47
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	36,62	63,38
Perdesaan	52,56	47,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Karakteristik Demografi dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2023

Karakteristik	Berat Badan Bayi Saat Lahir		
	< 2,5 kg	≥ 2,5 kg	Tidak Ditimbang/ Tidak tau
	(1)	(2)	(3)
Indonesia	12,37	84,5	3,13
Status Disabilitas			
Disabilitas	10,16	89,78	0,06
Nondisabilitas	12,37	84,48	3,15
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	16,17	72,52	11,31
Tamat SD/sederajat	12,02	82,93	5,05
Tamat SMP/sederajat	12,80	83,25	3,95
Tamat SMA/sederajat	12,64	85,29	2,07
Tamat Perguruan Tinggi	10,71	87,67	1,62
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	12,51	83,28	4,21
40% Menengah	12,88	84,97	2,15
20% Teratas	10,58	87,43	1,99
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	11,69	86,37	1,94
Perdesaan	13,13	82,39	4,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Karakteristik Demografi dan Penolong Persalinan, 2023

Karakteristik	Penolong Persalinan		
	Tenaga Kesehatan	Tanpa Tenaga Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	96,46	3,54	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	88,54	11,46	100,00
Tamat SD/sederajat	92,04	7,96	100,00
Tamat SMP/sederajat	95,23	4,77	100,00
Tamat SMA/sederajat	97,98	2,02	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	99,37	0,63	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	94,56	5,44	100,00
40% Menengah	98,02	1,98	100,00
20% Teratas	98,91	1,09	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	97,65	2,35	100,00
Perdesaan	95,13	4,87	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.5 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Karakteristik Demografi dan Tempat Persalinan, 2023

Karakteristik	Tempat Persalinan		
	Fasilitas Kesehatan	Bukan Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	91,85	8,15	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	80,73	19,27	100,00
Tamat SD/sederajat	83,12	16,88	100,00
Tamat SMP/sederajat	90,07	9,93	100,00
Tamat SMA/sederajat	94,31	5,69	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	97,04	2,96	100,00
Distribusi Pengeluaran			
40% Terbawah	88,76	11,24	100,00
40% Menengah	94,07	5,93	100,00
20% Teratas	96,67	3,33	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	95,28	4,72	100,00
Perdesaan	88,01	11,99	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.6 Persentase Pemuda Perempuan menurut Karakteristik Demografi dan Partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB), 2023

Karakteristik	Menggunakan Alat KB/Cara Tradisional			
	Pernah	Sedang	Tidak Pernah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	12,43	53,61	33,96	100,00
Kelompok Umur				
16-20 tahun	7,28	41,38	51,35	100,00
21-30 tahun	12,73	54,32	32,96	100,00
Status Disabilitas				
Disabilitas	15,62	48,27	36,12	100,00
Nondisabilitas	12,42	53,63	33,95	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak pernah sekolah/ Tidak tamat SD	10,83	49,97	39,20	100,00
Tamat SD/sederajat	13,73	61,21	25,06	100,00
Tamat SMP/sederajat	13,25	58,37	28,37	100,00
Tamat SMA/sederajat	11,71	50,82	37,47	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	11,52	44,14	44,34	100,00
Distribusi Pengeluaran				
40% Terbawah	12,52	60,47	27,01	100,00
40% Menengah	13,00	52,08	34,91	100,00
20% Teratas	10,92	40,18	48,90	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	12,37	50,62	37,01	100,00
Perdesaan	12,50	56,83	30,67	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.7 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Usia Kawin Pertama, 2023

Provinsi	Kelompok Umur				Jumlah
	≤18 Tahun	19-21 Tahun	22-24 Tahun	25-30 Tahun	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	13,71	29,18	30,57	26,54	100,00
Sumatera Utara	12,97	33,03	31,13	22,87	100,00
Sumatera Barat	13,24	27,19	30,62	28,95	100,00
Riau	14,79	32,93	28,67	23,62	100,00
Jambi	20,74	31,91	29,49	17,86	100,00
Sumatera Selatan	26,42	30,48	26,38	16,72	100,00
Bengkulu	21,43	36,50	26,08	15,99	100,00
Lampung	19,91	37,57	26,79	15,73	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,83	33,71	27,42	13,04	100,00
Kepulauan Riau	7,34	24,95	36,97	30,74	100,00
DKI Jakarta	8,90	26,98	37,15	26,98	100,00
Jawa Barat	23,81	34,79	26,64	14,76	100,00
Jawa Tengah	20,06	35,60	28,17	16,17	100,00
DI Yogyakarta	10,83	27,60	37,66	23,90	100,00
Jawa Timur	22,44	34,04	27,74	15,77	100,00
Banten	18,10	33,00	31,21	17,69	100,00
Bali	17,75	32,07	27,82	22,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,23	33,53	21,93	13,31	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,90	34,97	29,46	19,66	100,00
Kalimantan Barat	26,32	36,03	23,67	13,98	100,00
Kalimantan Tengah	31,60	35,01	20,60	12,79	100,00
Kalimantan Selatan	26,33	35,15	25,84	12,68	100,00
Kalimantan Timur	20,15	30,33	29,31	20,21	100,00
Kalimantan Utara	20,29	30,68	28,12	20,91	100,00
Sulawesi Utara	27,28	36,34	22,10	14,29	100,00
Sulawesi Tengah	26,15	32,82	21,87	19,16	100,00
Sulawesi Selatan	24,31	29,60	24,44	21,64	100,00
Sulawesi Tenggara	24,22	31,58	26,76	17,44	100,00
Gorontalo	25,12	34,43	24,68	15,77	100,00
Sulawesi Barat	25,20	33,89	22,82	18,09	100,00
Maluku	19,84	32,44	25,25	22,47	100,00
Maluku Utara	24,12	34,96	21,05	19,88	100,00
Papua Barat	26,06	33,45	24,81	15,68	100,00
Papua	27,43	37,76	23,36	11,45	100,00
Indonesia	21,19	33,57	27,68	17,56	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.8 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Pemuda menurut Provinsi dan Karakteristik, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	22,80	21,87	23,93	21,46	22,19
Sumatera Utara	22,23	21,67	23,06	21,38	21,96
Sumatera Barat	22,81	21,93	23,67	21,62	22,31
Riau	22,69	21,49	23,28	21,21	21,93
Jambi	21,50	21,26	22,95	20,45	21,32
Sumatera Selatan	22,03	20,35	22,43	20,05	20,89
Bengkulu	22,02	20,76	22,57	20,22	21,09
Lampung	21,88	20,91	22,95	20,20	21,18
Kep. Bangka Belitung	21,04	20,32	22,29	19,80	20,72
Kepulauan Riau	22,92	21,22	23,84	22,14	22,77
DKI Jakarta	22,54	-	23,73	21,96	22,54
Jawa Barat	21,22	20,01	22,77	19,97	20,91
Jawa Tengah	21,84	20,65	23,02	20,30	21,22
DI Yogyakarta	22,68	21,11	23,34	21,72	22,30
Jawa Timur	21,59	20,57	22,72	20,21	21,09
Banten	21,71	20,76	23,05	20,65	21,43
Bali	22,10	20,65	22,80	20,92	21,64
Nusa Tenggara Barat	20,82	20,15	22,26	19,45	20,47
Nusa Tenggara Timur	21,74	21,65	22,89	21,01	21,67
Kalimantan Barat	21,78	20,22	22,25	19,83	20,69
Kalimantan Tengah	20,89	19,87	22,03	19,30	20,29
Kalimantan Selatan	21,10	20,26	22,45	19,63	20,62
Kalimantan Timur	21,91	20,66	23,17	20,56	21,48
Kalimantan Utara	22,02	20,44	23,13	20,52	21,45
Sulawesi Utara	20,88	20,47	22,05	19,84	20,67
Sulawesi Tengah	21,69	20,69	22,46	20,11	20,99
Sulawesi Selatan	21,56	21,05	22,79	20,36	21,26
Sulawesi Tenggara	21,81	20,69	22,44	20,31	21,09
Gorontalo	21,41	20,60	22,31	20,00	20,89
Sulawesi Barat	21,06	20,89	22,53	20,03	20,92
Maluku	21,85	21,50	22,76	20,88	21,62
Maluku Utara	21,73	20,88	22,30	20,24	21,07
Papua Barat	21,83	20,42	22,04	20,18	20,89
Papua	21,18	20,21	21,76	19,68	20,47
Indonesia	21,70	20,73	22,83	20,38	21,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.9 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan menurut Provinsi dan Umur saat Melahirkan Pertama, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		Jumlah
	≤ 20 Tahun	21-30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,80	67,20	100,00
Sumatera Utara	32,84	67,16	100,00
Sumatera Barat	33,21	66,79	100,00
Riau	38,34	61,66	100,00
Jambi	45,33	54,67	100,00
Sumatera Selatan	53,35	46,65	100,00
Bengkulu	49,34	50,66	100,00
Lampung	46,95	53,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	55,10	44,90	100,00
Kepulauan Riau	23,67	76,33	100,00
DKI Jakarta	23,70	76,30	100,00
Jawa Barat	46,57	53,43	100,00
Jawa Tengah	44,82	55,18	100,00
DI Yogyakarta	26,81	73,19	100,00
Jawa Timur	44,19	55,81	100,00
Banten	38,19	61,81	100,00
Bali	39,17	60,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,05	43,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,11	60,89	100,00
Kalimantan Barat	54,37	45,63	100,00
Kalimantan Tengah	61,01	38,99	100,00
Kalimantan Selatan	50,94	49,06	100,00
Kalimantan Timur	43,70	56,30	100,00
Kalimantan Utara	43,67	56,33	100,00
Sulawesi Utara	57,69	42,31	100,00
Sulawesi Tengah	54,73	45,27	100,00
Sulawesi Selatan	44,20	55,80	100,00
Sulawesi Tenggara	48,18	51,82	100,00
Gorontalo	52,58	47,42	100,00
Sulawesi Barat	51,48	48,52	100,00
Maluku	46,42	53,58	100,00
Maluku Utara	56,10	43,90	100,00
Papua Barat	51,57	48,43	100,00
Papua	57,07	42,93	100,00
Indonesia	44,33	55,67	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.10 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (<2,5 kg) menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	
	(1)	(2)	(3)
Aceh	16,09	16,77	16,54
Sumatera Utara	10,68	10,33	10,52
Sumatera Barat	7,41	10,18	9,03
Riau	7,42	13,96	11,57
Jambi	10,29	16,26	14,52
Sumatera Selatan	10,05	13,11	12,10
Bengkulu	NA	13,60	12,22
Lampung	14,35	10,63	11,85
Kep. Bangka Belitung	6,45	16,22	10,62
Kepulauan Riau	12,66	NA	12,49
DKI Jakarta	10,28	-	10,28
Jawa Barat	11,57	11,47	11,55
Jawa Tengah	10,07	10,65	10,36
DI Yogyakarta	11,78	NA	10,57
Jawa Timur	12,26	11,75	12,02
Banten	13,56	19,21	15,38
Bali	11,24	12,50	11,60
Nusa Tenggara Barat	11,63	15,55	13,60
Nusa Tenggara Timur	20,74	13,48	14,91
Kalimantan Barat	6,26	16,44	13,10
Kalimantan Tengah	16,74	12,62	14,36
Kalimantan Selatan	10,37	10,28	10,32
Kalimantan Timur	13,75	22,81	16,98
Kalimantan Utara	19,50	6,11	13,89
Sulawesi Utara	12,91	7,48	10,37
Sulawesi Tengah	13,53	20,37	18,25
Sulawesi Selatan	13,37	17,89	15,90
Sulawesi Tenggara	16,27	12,56	13,93
Gorontalo	NA	19,19	15,82
Sulawesi Barat	20,62	11,80	13,29
Maluku	5,62	17,75	13,79
Maluku Utara	15,17	21,71	20,17
Papua Barat	30,23	10,98	18,13
Papua	13,95	21,20	17,80
Indonesia	11,69	13,13	12,37

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.11 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2023

Provinsi	Penolong Persalinan		Jumlah
	Tenaga Kesehatan	Tanpa Tenaga Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,54	NA	100,00
Sumatera Utara	96,70	3,30	100,00
Sumatera Barat	98,33	1,67	100,00
Riau	97,33	2,67	100,00
Jambi	97,56	2,44	100,00
Sumatera Selatan	97,09	2,91	100,00
Bengkulu	98,99	NA	100,00
Lampung	99,53	NA	100,00
Kep. Bangka Belitung	100,00	NA	100,00
Kepulauan Riau	98,17	NA	100,00
DKI Jakarta	100,00	NA	100,00
Jawa Barat	93,18	6,82	100,00
Jawa Tengah	99,46	NA	100,00
DI Yogyakarta	100,00	NA	100,00
Jawa Timur	99,13	0,87	100,00
Banten	91,30	8,70	100,00
Bali	100,00	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	99,31	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	92,64	7,36	100,00
Kalimantan Barat	92,94	7,06	100,00
Kalimantan Tengah	90,07	9,93	100,00
Kalimantan Selatan	95,90	4,10	100,00
Kalimantan Timur	99,29	NA	100,00
Kalimantan Utara	100,00	NA	100,00
Sulawesi Utara	96,66	3,34	100,00
Sulawesi Tengah	95,42	4,58	100,00
Sulawesi Selatan	98,91	1,09	100,00
Sulawesi Tenggara	93,87	6,13	100,00
Gorontalo	98,89	NA	100,00
Sulawesi Barat	96,61	3,39	100,00
Maluku	75,02	24,98	100,00
Maluku Utara	83,68	16,32	100,00
Papua Barat	78,86	21,14	100,00
Papua	83,19	16,81	100,00
Indonesia	96,46	3,54	100,00

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.12 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2023

Provinsi	Tempat Persalinan		Jumlah
	Fasilitas Kesehatan	Bukan Fasilitas Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,33	5,67	100,00
Sumatera Utara	89,78	10,22	100,00
Sumatera Barat	96,51	3,49	100,00
Riau	88,19	11,81	100,00
Jambi	82,98	17,02	100,00
Sumatera Selatan	86,84	13,16	100,00
Bengkulu	95,17	4,83	100,00
Lampung	97,36	2,64	100,00
Kep. Bangka Belitung	98,12	NA	100,00
Kepulauan Riau	96,88	3,12	100,00
DKI Jakarta	100,00	NA	100,00
Jawa Barat	86,45	13,55	100,00
Jawa Tengah	99,09	0,91	100,00
DI Yogyakarta	99,99	NA	100,00
Jawa Timur	97,85	2,15	100,00
Banten	86,85	13,15	100,00
Bali	100,00	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	97,09	2,91	100,00
Nusa Tenggara Timur	87,44	12,56	100,00
Kalimantan Barat	83,64	16,36	100,00
Kalimantan Tengah	68,99	31,01	100,00
Kalimantan Selatan	88,27	11,73	100,00
Kalimantan Timur	96,15	3,85	100,00
Kalimantan Utara	98,15	1,85	100,00
Sulawesi Utara	92,69	7,31	100,00
Sulawesi Tengah	89,30	10,70	100,00
Sulawesi Selatan	97,37	2,63	100,00
Sulawesi Tenggara	84,43	15,57	100,00
Gorontalo	96,39	3,61	100,00
Sulawesi Barat	92,48	7,52	100,00
Maluku	50,56	49,44	100,00
Maluku Utara	68,89	31,11	100,00
Papua Barat	69,73	30,27	100,00
Papua	76,43	23,57	100,00
Indonesia	91,85	8,15	100,00

Catatan:

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.13 Persentase Pemuda Perempuan menurut Provinsi dan Partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB), 2023

Provinsi	Partisipasi dalam Program KB			Jumlah
	Pernah	Sedang	Tidak Pernah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	13,20	45,14	41,66	100,00
Sumatera Utara	12,06	40,39	47,55	100,00
Sumatera Barat	13,71	40,81	45,47	100,00
Riau	15,93	44,33	39,74	100,00
Jambi	9,96	57,81	32,23	100,00
Sumatera Selatan	11,08	59,68	29,24	100,00
Bengkulu	11,54	56,41	32,05	100,00
Lampung	10,18	60,78	29,04	100,00
Kep. Bangka Belitung	13,72	54,95	31,33	100,00
Kepulauan Riau	17,23	33,60	49,18	100,00
DKI Jakarta	8,20	48,01	43,79	100,00
Jawa Barat	13,19	60,18	26,64	100,00
Jawa Tengah	12,88	53,50	33,62	100,00
DI Yogyakarta	9,26	47,56	43,17	100,00
Jawa Timur	11,81	57,36	30,84	100,00
Banten	12,59	58,40	29,01	100,00
Bali	10,63	46,94	42,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	18,16	55,81	26,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,72	43,65	44,63	100,00
Kalimantan Barat	11,45	59,36	29,19	100,00
Kalimantan Tengah	12,87	63,28	23,85	100,00
Kalimantan Selatan	17,81	65,22	16,97	100,00
Kalimantan Timur	10,63	50,37	39,00	100,00
Kalimantan Utara	15,46	42,93	41,60	100,00
Sulawesi Utara	8,49	58,01	33,50	100,00
Sulawesi Tengah	10,35	54,35	35,30	100,00
Sulawesi Selatan	13,82	46,47	39,71	100,00
Sulawesi Tenggara	13,66	41,95	44,39	100,00
Gorontalo	9,48	55,01	35,51	100,00
Sulawesi Barat	13,52	50,80	35,68	100,00
Maluku	12,41	34,99	52,60	100,00
Maluku Utara	12,21	46,91	40,88	100,00
Papua Barat	14,04	30,36	55,60	100,00
Papua	6,33	18,36	75,32	100,00
Indonesia	12,43	53,61	33,96	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.14 Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (<2,5 kg) menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	16,09	9,36	22,82	21,34	16,77	11,85	21,70	14,97	16,54	12,57	20,51	12,25
Sumatera Utara	10,68	6,67	14,70	19,17	10,33	7,19	13,48	15,53	10,52	7,91	13,13	12,66
Sumatera Barat	7,41	3,06	11,75	29,92	10,18	7,05	13,30	15,66	9,03	6,46	11,60	14,52
Riau	7,42	2,04	12,80	36,99	13,96	7,76	20,16	22,67	11,57	7,13	16,01	19,56
Jambi	10,29	2,23	18,35	39,95	16,26	10,24	22,29	18,90	14,52	9,61	19,42	17,23
Sumatera Selatan	10,05	2,04	18,07	40,66	13,11	8,97	17,26	16,12	12,10	8,27	15,94	16,15
Bengkulu	NA	NA	NA	51,61	13,60	8,06	19,14	20,77	12,22	7,59	16,84	19,32
Lampung	14,35	4,09	24,61	36,47	10,63	6,51	14,75	19,76	11,85	7,46	16,23	18,89
Kep. Bangka Belitung	6,45	2,50	10,39	31,19	16,22	8,59	23,85	24,00	10,62	6,51	14,72	19,74
Kepulauan Riau	12,66	3,82	21,49	35,62	NA	NA	NA	66,84	12,49	4,48	20,50	32,71
DKI Jakarta	10,28	3,93	16,62	31,50	NA	NA	NA	51,73	10,28	3,93	16,62	31,50
Jawa Barat	11,57	8,32	14,82	14,31	11,47	7,29	15,64	18,57	11,55	8,89	14,20	11,74
Jawa Tengah	10,07	7,35	12,79	13,78	10,65	8,15	13,15	11,96	10,36	8,51	12,21	9,10
DI Yogyakarta	11,78	2,26	21,29	41,22	NA	NA	NA	51,73	10,57	3,15	18,00	35,83
Jawa Timur	12,26	8,76	15,76	14,57	11,75	8,80	14,69	12,80	12,02	9,71	14,32	9,79
Banten	13,56	5,88	21,25	28,90	19,21	9,83	28,59	24,92	15,38	9,36	21,41	19,97
Bali	11,24	4,74	17,75	29,52	12,50	4,79	20,20	31,47	11,60	6,46	16,74	22,61
Nusa Tenggara Barat	11,63	5,43	17,83	27,19	15,55	9,39	21,70	20,19	13,60	9,22	17,99	16,45
Nusa Tenggara Timur	20,74	10,91	30,57	24,18	13,48	10,28	16,68	12,11	14,91	11,69	18,12	11,01
Kalimantan Barat	6,26	0,34	12,18	48,24	16,44	11,69	21,18	14,72	13,10	9,35	16,85	14,61
Kalimantan Tengah	16,74	7,66	25,82	27,67	12,62	6,85	18,39	23,31	14,36	9,29	19,42	18,00
Kalimantan Selatan	10,37	3,07	17,66	35,89	10,28	5,31	15,24	24,64	10,32	5,99	14,64	21,38
Kalimantan Timur	13,75	7,44	20,06	23,41	22,81	11,09	34,53	26,22	16,98	11,11	22,84	17,62
Kalimantan Utara	19,50	8,42	30,57	28,98	6,11	0,52	11,71	46,68	13,89	6,79	20,99	26,07
Sulawesi Utara	12,91	5,73	20,09	28,38	7,48	3,00	11,95	30,54	10,37	5,96	14,78	21,70
Sulawesi Tengah	13,53	6,34	20,73	27,11	20,37	14,74	26,00	14,10	18,25	13,71	22,79	12,69
Sulawesi Selatan	13,37	7,57	19,18	22,13	17,89	13,98	21,79	11,13	15,90	12,53	19,27	10,81
Sulawesi Tenggara	16,27	6,40	26,15	30,96	12,56	8,72	16,41	15,61	13,93	9,55	18,31	16,04
Gorontalo	NA	NA	NA	52,98	19,19	9,11	29,27	26,80	15,82	8,22	23,41	24,50
Sulawesi Barat	20,62	5,95	35,29	36,29	11,80	4,91	18,69	29,79	13,29	7,08	19,50	23,84
Maluku	5,62	1,23	10,02	39,87	17,75	10,79	24,71	20,00	13,79	8,91	18,66	18,04
Maluku Utara	15,17	3,33	27,01	39,81	21,71	14,68	28,73	16,52	20,17	14,13	26,21	15,29
Papua Barat	30,23	16,68	43,77	22,86	10,98	5,17	16,78	26,99	18,13	11,88	24,37	17,57
Papua	13,95	6,65	21,25	26,70	21,20	15,03	27,37	14,85	17,80	13,04	22,55	13,64
Indonesia	11,69	10,44	12,93	5,45	13,13	12,19	14,08	3,67	12,37	11,57	13,16	3,28

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.15 Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2023

Provinsi	Tenaga Kesehatan					Tanpa Tenaga Kesehatan				
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error		
(1)	(2)	Batas Bawah	Batas Atas	(5)	(6)	Batas Bawah	Batas Atas	(9)		
Aceh	99,54	99,09	99,99	0,23	NA	NA	NA	50,17		
Sumatera Utara	96,70	95,48	97,92	0,64	3,30	2,08	4,52	18,86		
Sumatera Barat	98,33	97,36	99,29	0,50	1,67	0,71	2,64	29,39		
Riau	97,33	95,19	99,48	1,12	2,67	0,52	4,81	40,98		
Jambi	97,56	95,91	99,20	0,86	2,44	0,80	4,09	34,41		
Sumatera Selatan	97,09	95,42	98,76	0,88	2,91	1,24	4,58	29,24		
Bengkulu	98,99	97,76	100,22	0,63	NA	NA	NA	61,88		
Lampung	99,53	99,04	100,03	0,26	NA	NA	NA	54,58		
Kep. Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00	0,00	NA	NA	NA	NA		
Kepulauan Riau	98,17	95,49	100,85	1,39	NA	NA	NA	74,68		
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	0,00	NA	NA	NA	NA		
Jawa Barat	93,18	91,13	95,23	1,12	6,82	4,77	8,87	15,34		
Jawa Tengah	99,46	98,89	100,02	0,29	NA	NA	NA	53,30		
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	0,00	NA	NA	NA	NA		
Jawa Timur	99,13	98,60	99,67	0,28	0,87	0,33	1,40	31,53		
Banten	91,30	87,40	95,20	2,18	8,70	4,80	12,60	22,85		
Bali	100,00	100,00	100,00	0,00	NA	NA	NA	NA		
Nusa Tenggara Barat	99,31	98,61	100,01	0,36	NA	NA	NA	51,61		
Nusa Tenggara Timur	92,64	90,56	94,72	1,15	7,36	5,28	9,44	14,44		
Kalimantan Barat	92,94	90,23	95,64	1,48	7,06	4,36	9,77	19,53		
Kalimantan Tengah	90,07	85,63	94,50	2,51	9,93	5,50	14,37	22,76		
Kalimantan Selatan	95,90	93,54	98,25	1,25	4,10	1,75	6,46	29,29		
Kalimantan Timur	99,29	98,42	100,15	0,44	NA	NA	NA	61,87		
Kalimantan Utara	100,00	100,00	100,00	0,00	NA	NA	NA	NA		
Sulawesi Utara	96,66	94,98	98,34	0,89	3,34	1,66	5,02	25,64		
Sulawesi Tengah	95,42	93,43	97,41	1,06	4,58	2,59	6,57	22,19		
Sulawesi Selatan	98,91	98,19	99,62	0,37	1,09	0,38	1,81	33,38		
Sulawesi Tenggara	93,87	91,09	96,65	1,51	6,13	3,35	8,91	23,17		
Gorontalo	98,89	96,71	101,06	1,12	NA	NA	NA	99,72		
Sulawesi Barat	96,61	94,01	99,21	1,37	3,39	0,79	5,99	39,19		
Maluku	75,02	68,64	81,40	4,34	24,98	18,60	31,36	13,03		
Maluku Utara	83,68	79,04	88,33	2,83	16,32	11,67	20,96	14,53		
Papua Barat	78,86	74,29	83,44	2,96	21,14	16,56	25,71	11,04		
Papua	83,19	78,57	87,80	2,83	16,81	12,20	21,43	14,01		
Indonesia	96,46	96,03	96,90	0,23	3,54	3,10	3,97	6,28		

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.16 Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2023

Provinsi	Fasilitas Kesehatan Kesehatan				Bukan Fasilitas Kesehatan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	94,33	92,33	96,34	1,09	5,67	3,66	7,67	18,07
Sumatera Utara	89,78	87,80	91,75	1,12	10,22	8,25	12,20	9,86
Sumatera Barat	96,51	95,20	97,82	0,69	3,49	2,18	4,80	19,16
Riau	88,19	83,84	92,53	2,51	11,81	7,47	16,16	18,77
Jambi	82,98	77,87	88,09	3,14	17,02	11,91	22,13	15,32
Sumatera Selatan	86,84	83,34	90,33	2,05	13,16	9,67	16,66	13,54
Bengkulu	95,17	92,81	97,54	1,27	4,83	2,46	7,19	25,02
Lampung	97,36	96,00	98,72	0,71	2,64	1,28	4,00	26,28
Kep. Bangka Belitung	98,12	95,78	100,47	1,22	NA	NA	NA	63,72
Kepulauan Riau	96,88	93,85	99,91	1,59	3,12	0,09	6,15	49,54
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	0,00	NA	NA	NA	NA
Jawa Barat	86,45	83,77	89,12	1,58	13,55	10,88	16,23	10,08
Jawa Tengah	99,09	98,34	99,85	0,39	0,91	0,15	1,66	42,43
DI Yogyakarta	99,99	99,96	100,01	0,01	NA	NA	NA	100,13
Jawa Timur	97,85	96,72	98,98	0,59	2,15	1,02	3,28	26,76
Banten	86,85	82,40	91,30	2,61	13,15	8,70	17,60	17,26
Bali	100,00	100,00	100,00	0,00	NA	NA	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	97,09	95,56	98,62	0,80	2,91	1,38	4,44	26,80
Nusa Tenggara Timur	87,44	84,47	90,40	1,73	12,56	9,60	15,53	12,05
Kalimantan Barat	83,64	80,07	87,21	2,18	16,36	12,79	19,93	11,14
Kalimantan Tengah	68,99	63,19	74,80	4,29	31,01	25,20	36,81	9,55
Kalimantan Selatan	88,27	84,45	92,09	2,21	11,73	7,91	15,55	16,61
Kalimantan Timur	96,15	93,49	98,82	1,41	3,85	1,18	6,51	35,35
Kalimantan Utara	98,15	97,02	99,28	0,59	1,85	0,72	2,98	31,11
Sulawesi Utara	92,69	88,97	96,41	2,05	7,31	3,59	11,03	25,96
Sulawesi Tengah	89,30	85,53	93,07	2,15	10,70	6,93	14,47	17,97
Sulawesi Selatan	97,37	96,03	98,70	0,70	2,63	1,30	3,97	25,82
Sulawesi Tenggara	84,43	80,72	88,14	2,24	15,57	11,86	19,28	12,16
Gorontalo	96,39	93,52	99,26	1,52	3,61	0,74	6,48	40,51
Sulawesi Barat	92,48	88,98	95,99	1,93	7,52	4,01	11,02	23,79
Maluku	50,56	42,84	58,28	7,79	49,44	41,72	57,16	7,96
Maluku Utara	68,89	62,58	75,19	4,67	31,11	24,81	37,42	10,34
Papua Barat	69,73	64,42	75,04	3,89	30,27	24,96	35,58	8,95
Papua	76,43	70,96	81,89	3,65	23,57	18,11	29,04	11,83
Indonesia	91,85	91,24	92,46	0,34	8,15	7,54	8,76	3,82

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

<https://www.bps.go.id>



Bab 8. Program Kepemudaan

https://www.bps.go.id



<https://www.bps.go.id>

Pemuda memiliki peran aktif sebagai ujung tombak generasi penerus dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kesejahteraan. Fungsi dan peran pemuda perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional di bidang kepemudaan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Pelayanan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diperlukan koordinasi strategis lintas sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda, meliputi: (i) peningkatan angka partisipasi pemuda melalui pendidikan; (ii) peningkatan penyadaran pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan; (iii) peningkatan kemudahan akses pendidikan pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di perdesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal; (iv) peningkatan kualitas kesehatan pemuda; (v) peningkatan daya saing wirausaha pemuda; (vi) peningkatan partisipasi pemuda pengembangan kepeloporan; dan (vii) peningkatan partisipasi pemuda pengembangan kepemimpinan.

Bab ini akan menjelaskan berbagai program kepemudaan yang dilaksanakan pemerintah untuk pembangunan kepemudaan di Indonesia. Umumnya program ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya yang merupakan program unggulan di bidang kepemudaan. Selain itu, terdapat program yang lebih spesifik terkait kepemudaan yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Sejatinya masih banyak lagi program-program kepemudaan yang terlaksana di Indonesia, tetapi difokuskan beberapa program kepemudaan

yang dilaksanakan pemerintah selama tahun 2023 yang bersifat pengembangan sebagai berikut:

Festival Pemuda Indonesia 2023

Festival Pemuda Indonesia 2023 dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2023 sebagai ajang untuk menjaga persatuan, kesatuan, serta membangun kebugaran di antara pemuda dalam lingkup organisasi kepemudaan dan kepramukaan. Festival Pemuda Indonesia 2023 dilaksanakan pada tanggal 10-15 Oktober 2023 di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Festival ini memperlombakan seni budaya dan olahraga dengan cabang yang dipertandingkan yakni *footsal*, bulu tangkis, tarik tambang, *gobak sodor* atau hadang, dan *bentengan*. Terdapat pula seminar, *talkshow*, acara keagamaan, dan festival UMKM sebagai puncak acara sekaligus penutupan Festival Pemuda Indonesia 2023. Selain sebagai ajang menjaga persatuan pemuda, festival ini juga bertujuan untuk meningkatkan Indeks Prestasi Pemuda dan membangun semangat kolaborasi antar organisasi kepemudaan yang bersinergi dengan Kemenpora.

Program Young Progressive Academy (YPA)

Program *Young Progressive Academy* (YPA) merupakan sebuah ruang belajar interaktif bagi pemuda Indonesia yang progresif mengenai berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang relevan bagi pemuda. Program ini merupakan program hasil kolaborasi antara Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK dengan *Frederich Ebert Stiftung* (FES). Pada tahun 2023, program ini telah memasuki gelombang kedua yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret. Peserta dari program ini ialah pemuda berusia antara 20 hingga 30 tahun yang aktif dalam berorganisasi. Program ini bertujuan untuk menciptakan orang muda Indonesia yang memerdekaan, adil, dan inklusif dengan cara menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan revolusi mental pada generasi muda.

Program Sekolah Harmoni Indonesia (SHI)

Sekolah Harmoni Indonesia (SHI) merupakan program yang menyoroti pentingnya toleransi dalam masyarakat pluralis dan peran Pancasila sebagai falsafah hidup atas keragaman budaya di Indonesia. SHI terbentuk dari hasil kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) serta Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia sampai dengan tahun 2024. Program SHI ini meliputi 7 kegiatan berupa lokakarya, siniar, kuliah publik, seminar daring, temu lintas komunitas, serta pemetaan terkait kekerasan, intoleransi, dan perundungan serta memetakan respons kepemudaan terhadap kekerasan, intoleransi dan perundungan. Hasil keluaran program SHI ini berupa ketokohan muda melalui karya kreator, inspirasi ketokohan dan ketokohan pemberdayaan pemuda perempuan serta keberdayaan pemuda untuk memberikan solusi pada daerah eks-konflik melalui pertemuan lintas komunitas dengan hasil berupa pemetaan kerentanan perilaku berisiko.

Program Sekolah Tanpa Advertensi Rokok (STAR)

Indonesia diperkirakan akan menghadapi puncak masa bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Terdapat agenda besar pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, sehingga pemerintah pun telah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai bonus demografi tersebut. Salah satunya ialah jumlah perokok anak di Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat. Sebagai upaya mengontrol prevalensi merokok pada anak, Yayasan Jantung Indonesia bersama dengan *World Heart Federation* menginisiasi program dalam membangun generasi sehat dan berdaya melalui program Sekolah Tanpa Advertensi Rokok (STAR) dengan sasaran anak-anak usia SMP. Program ini diadakan di lima kota, yakni Jakarta, Bogor, Surakarta, Palembang, dan Padang dengan menargetkan lima belas SMP. Program ini dilakukan dengan mengajak untuk menurunkan iklan rokok di warung-warung di sekitar lingkungan sekolah. Program ini bertujuan agar terwujud sekolah tanpa iklan, promosi, dan sponsor

produk rokok serta terciptanya kader penggerak perubahan pola hidup sehat dengan kampanye “Remaja Keren Tanpa Rokok”. Program ini dibuat juga untuk menciptakan kesadaran tentang bahaya rokok dan iklan rokok melalui konten di media sosial, dan membantu pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok muda di Indonesia.

Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait Pelayanan Kepemudaan

RAD merupakan inti dari keberhasilan program pembangunan pemuda dan kunci utama implementasi program kegiatan di lapangan, mengingat target sasaran berada di lapangan yaitu pemuda itu sendiri. Penyusunan RAD juga merupakan langkah awal kolaborasi dan sinergi antar OPD sebagai bentuk koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. RAD diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap daerah yang telah membuat pelayanan kepemudaan sebelum keluarnya Surat Kemendagri Nomor 400.3.5/9106/Bangda tanggal 18 Agustus 2023 tentang arahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan RAD pelayanan kepemudaan, Menpora memberikan penghargaan Anugerah RAD kepada delapan kepala pemerintah daerah dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kepala pemerintah daerah lainnya. Sebagai komitmen penyelenggaraan RAD pelayanan kepemudaan, Kemenpora bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menandatangani komitmen bersama dalam percepatan penyusunan RAD pelayanan kepemudaan pada Rakornas Kepemudaan dan Keolahragaan 2023.

Festival Film Pendek Moderasi Beragama 2023

Moderasi beragama menjadi salah satu nilai yang penting untuk ditanamkan di setiap insan bangsa Indonesia, terutama untuk pemuda yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Festival Film Pendek Moderasi Beragama tingkat pelajar tahun 2023 (FFPMB 2023) yang bekerja sama dengan Lembaga Dakwah

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Penyelenggaraan festival ini merupakan upaya untuk mendorong pemahaman dan penguatan moderasi beragama di kalangan pelajar. Sosialisasi moderasi beragama melalui film dapat menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat memahami moderasi beragama sebagai landasan yang kuat untuk harmoni sosial.

Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2021 telah menetapkan salah satu program prioritas yaitu revolusi mental bidang pencegahan bahaya destruktif anti narkoba dengan membentuk Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). Pelatihan KIPAN 2023 dilaksanakan secara luring di Universitas Negeri Semarang dan dihadiri oleh sebanyak 300 peserta. Sampai tahun 2023, kepengurusan KIPAN telah ada di 22 provinsi di Indonesia. Menpora Dito Ariotedjo mengharapkan kepengurusan KIPAN dapat tersebar di seluruh pelosok negeri dan dapat lebih berkontribusi untuk mengajak lingkungan menjauhi narkoba. Kontribusi ini dapat dilakukan lewat sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sehingga kader KIPAN diharapkan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan penggerak isu *parenting* untuk mendorong penguatan peran keluarga dalam pola pengasuhan yang menanamkan karakter integritas dan anti narkoba.

Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Peningkatan kewirausahaan pemuda penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan pemuda. Keberhasilan tersebut dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan lima domain yang diukur dalam indeks tersebut. Terlebih lagi, dari kelima domain tersebut yang capaiannya masih rendah adalah domain lapangan dan kesempatan kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan program Kuliah Kewirausahaan Pemuda Tahun 2023. Diharapkan dengan adanya program ini akan menumbuhkan minat dan kompetensi wirausaha pemuda yang manfaatnya akan terasa oleh masyarakat.

Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia Tahun 2023

Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia atau Kretivesia 2023 merupakan salah satu agenda tahunan yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai wadah untuk kelompok dan individu mengekspresikan kreativitas. Kretivesia 2023 digelar di Kota Surakarta pada 24 hingga 28 Agustus 2023. Kegiatan ini melombakan delapan sub ekonomi kreatif yang digandung pemuda, yakni film, musik, kuliner, fashion, kriya, grafika, teknologi informasi peranti lunak, dan teknologi perangkat keras. Acara ini juga diisi dengan *creative market* yang menampilkan produk sandang, pangan, seni, dan kerajinan tangan dari delegasi pemuda masing-masing provinsi. Acara ini juga dimeriahkan dengan *talkshow* dan pameran interaktif.

Program Peran dan Partisipasi Pemuda Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan moral serius yang dihadapi Indonesia. Untuk memutus mata rantai korupsi, perlu dilakukan penguatan moral antikorupsi kepada penerus bangsa dalam hal ini ialah pemuda Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dalam penindakan korupsi mengadakan program kelas antikorupsi untuk pemuda dan LSM. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan perilaku antikorupsi khususnya bagi pemuda Indonesia yang nantinya akan menjadi penentu masa depan Indonesia. Terlebih lagi, pada pemilu tahun 2024 sekitar 56 persen pemilih adalah generasi Z sehingga diharapkan dengan adanya kelas ini dapat menyadarkan generasi muda untuk dapat memilih orang-orang yang berintegritas. Kegiatan ini juga memberikan wawasan bagi pemuda agar berani melaporkan jika menemukan tindak korupsi, hal ini sebagai bentuk pemberantasan korupsi oleh pemuda Indonesia.

Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih)

Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan memberdayakan pemuda Indonesia agar berperan dan berkontribusi

penting dalam perbaikan kondisi lingkungan, khususnya untuk penanganan sampah yang menjadi persoalan di suatu daerah. Setiap tahunnya, Kementerian Pertanian akan melakukan pemilihan duta Pepelingasih secara berjenjang. Duta Pepelingasih adalah duta yang nantinya berkontribusi untuk menjaga lingkungan dan mengedukasi tentang lingkungan asri dan bersih kepada masyarakat.

Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS)

Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) merupakan suatu program kerja sama antara Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan wirausaha muda dan tenaga kerja yang handal di sektor pertanian. Sasaran program YESS adalah pemuda berusia 17-39 tahun yang berdomisili tetap atau memiliki NIK di 4 provinsi lokasi program YESS, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dengan total di 15 kabupaten. Terdapat empat program utama yang dilakukan oleh YESS, yakni hibah kompetitif, pelatihan, magang, serta program penumbuhan wirausahawan muda pertanian (PWMP). Tujuan utama dari program ini yaitu terwujudnya regenerasi pertanian, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan perdesaan, serta meningkatkan jumlah wirausahawan muda di bidang pertanian.

Program Maritim Muda Nusantara

Maritim Muda Nusantara (*Indonesian Maritime Youths*) adalah suatu organisasi kepemudaan nasional di bidang kemaritiman dalam bentuk perkumpulan. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 13 Desember 2018 bertepatan dengan Hari Nusantara di Jakarta, dengan ideologi dan gagasan untuk mendorong generasi muda menyadari perannya dalam membangun maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maritim Muda Nusantara didirikan dengan fokus utama untuk menyiapkan sumber daya manusia bidang kemaritiman yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu

mengedepankan kepentingan nasional. Selain itu, Maritim Muda Nusantara juga berfokus untuk mengembangkan IPTEK kemaritiman yang mutakhir, efektif, efisien, dan ramah lingkungan serta melakukan penguatan pada budaya maritim di Indonesia. Secara umum, program yang dilakukan oleh organisasi ini dapat dibagi ke dalam empat kelompok besar, yakni (1) data, riset, dan advokasi maritim; (2) sosial, pendidikan, dan kebudayaan maritim; (3) konservasi, olahraga, dan pariwisata bahari; serta (4) kewirausahaan dan inovasi teknologi maritim.

https://www.bps.go.id



Daftar Pustaka

https://www.bps.go.id



- Adioetomo, S.M. & Indrayanti, Ratna. 2018. 'Memasuki Dunia Kerja dan Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia' dalam Adioetomo, S.M. & Pardede, E.L. (ed.). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini. Depok: Rajawali Pers.
- Almendrala, Anna. 2016. "Here's Why Men Don't Like Going To The Doctor." https://www.huffpost.com/entry/why-men-dont-go-to-the-doctor_n_5759c267e4b00f97fba7aa3e.
- American Lung Association. 2023. "Tobacco Use Among Children and Teens." <https://www.lung.org/quit-smoking/smoking-facts/tobacco-use-among-children>.
- Andriani, Mutia., & Anwar, Samsul. 2018. "Analisis Penggunaan Metode Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Aceh Tahun 2016". Sriwijaya Journal of Medicine, 1(2). <https://doi.org/10.32539/sjm.v1i2.9>
- Anggaraini, Chintia. 2020. Haryanti, T. 2015. Analisis Pemuda NEET (*Not in Employment, Education or Training*) di Provinsi Sumatera Barat. Tesis: Universitas Andalas.
- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. 2023. Percepatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan. Diakses pada 8 November 2023 melalui <https://apeksi.id/percepatan-penyusunan-rencana-aksi-daerah-pelayanan-kepemudaan/>.
- Atmanti, Hartini Dwi. 2005. Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. Jurnal Dinamika Pembangunan vol. 2 No. 1 /JO 2005: 30- 39.
- Australian Institute of Health and Welfare. 2021. "Australia's Youth." <https://www.aihw.gov.au/getmedia/93cb84b1-d854-4ad1-a6d9-4574a3e7d895/australia-s-youth.pdf?v=20230903193839>.
- Ayo Sehat Kementerian Kesehatan RI. 2018. "Sudahkah Anda Mengetahui Hubungan Jamkesda, Jamkesmas, JKN, KIS, KJS Dan BPJS?" 2018. <https://ayosehat.kemkes.go.id/sudahkah-anda-mengetahui-hubungan-jamkesda-jamkesmas-jkn-kis-kjs-dan-bpjs>.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2018. Laporan Kinerja BKKBN 2018. Jakarta: BKKBN
- _____. 2019. Laporan Kinerja BKKBN 2019. Jakarta: BKKBN
- Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Pemuda Indonesia 2022. Jakarta: BPS.
- _____. 2022b. Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2021. Jakarta: BPS.
- _____. 2023. Buku 4 Konsep dan Definisi Susenas Maret 2023. Jakarta: Badan Pusat Staistik
- _____. 2023a. diakses melalui link <https://www.archive.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>

- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 2014. Potret Angkatan Kerja dan Pengangguran Kalimantan Tengah 2013. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Burns, A. August, Ronnie Lovich, Jane Maxwell, and Katharine Shapiro. 2023. *Where Women Have No Doctor, New Revised Edition 2023*. Hesperian.
- Centers for Disease Control and Prevention. 2021. "Health Effects of Cigarette Smoking." 2021.
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_cig_smoking/index.htm.
- _____. 2023. "Youth Data." *Smoking and Tobacco Use*. 2023.
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/youth_data/tobacco_use/index.htm.
- Crimmins, Eileen M, Hyunju Shim, Yuan S Zhang, and Jung Ki Kim. 2019. "Differences between Men and Women in Mortality and the Health Dimensions of the Morbidity Process." *HHS Public Access* 65 (1): 135–45.
<https://doi.org/10.1373/clinchem.2018.288332>.Differences.
- Dewi, P. Y. A. & Indrayani, L. 2021. Persepsi Orang Tua Siswa Terhadap Biaya Pendidikan. *Ekuitas : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 9 (1), 69-78.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. 2019. "Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan Kurang Mampu Dapat Berobat Ke Puskesmas." 2019.
<https://dinkes.deliserdangkab.go.id/pelayanan-kesehatan-bagi-masyarakat-miskin-dan-kurang-mampu-dapat-berobat-ke-puskesmas.html>.
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. 2012. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy* Eleventh Edition. Boston: Pearson Education, Inc.
- Eko. 2022, Desember 9. Program *Young Progresive Academy (YPA)* Kembali Digelar. Diambil kembali dari SCHOOLMEDIA News:
<https://news.schoolmedia.id/regional/Program-Young-Progresive-Academy-YPA-Kembali-Digelar-2228>
- Endalamaw, Akililu,, dkk. 2018. "Low Birth Weight and Its Associated Factors in Ethiopia: A Systematic Review and Meta-Analysi". *Italian Journal of Pediatrics*, 44(141).
<https://doi.org/10.1186/s13052-018-0586-6>
- Fajar, Rahmat, dan Gilang Akbar Prambadi. 2023. Kretivesia 2023 Jadi Upaya Kemenpora Sediakam Wadah Kreativitas. Gilang Akbar Prambadi.
<https://news.republika.co.id/berita/rzwl6q456/kretivesia-2023-jadi-upaya-kemenpora-sediakam-wadah-kreativitas>.
- Farhud, Dariush D. 2015. "Impact of Lifestyle on Health." *Iranian Public Health Association & Tehran University of Medical Sciences* 44 (11): 1442–44.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4703222/#B1>.

- Fianti, Rika, dkk. 2022. "Hubungan Usia pertama Menikah dengan Keluaran Kesehatan Reproduksi pada Wanita Usia Subur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Analisis Data ICMM Tahun 2016)". Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI). 5(10). <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i10.2655>
- Frederick Health. 2021. "*Dangers of Smoking at a Young Age.*" <https://www.frederickhealth.org/news/2021/august/dangers-of-smoking-at-a-young-age/>.
- Hadiyat, Y. D. 2014. Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). Jurnal Pekommas, 17(2), 81–90.
- Hailu, Lema D. & Kebede, Deresse L. 2018. "*Determinant of Low Birth Weight Among Deliveries at a Referral Hospital in Northern Ethiopia*". Hindawi BioMed Research International. <https://doi.org/10.1155/2018/8169615>
- Hossain, Sorif., dkk. 2022. "*Assesing the Determinants of Women's Age at First Marriage in Rural and Urban Areas of Bangladesh: Insight from Quantile Regression (QR) Approaches*". Journal of Population and Social Studies (JPSS), 30. <http://doi.org/10.25133/JPSSv302022.034>
- Husnah, Annisatul. 2019. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Seumur Hidup Di Indonesia". Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 1 (2) : 331 – 340.
- Imron, Ali, Habibah, Siti M., & Aziz, Udin K. 2019. "*Determinant Age at First Marriage Among Women in East Java*". Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 9(2). DOI: 10.20473/jbk.v9i2.2020.104–111
- Istighfariani, B. 2023, Februari 24. Kemenko PMK Persiapkan Program Kepemudaan di Tahun 2023 Melalui Sekolah Harmoni Indonesia. Diambil kembali dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-persiapkan-program-kepemudaan-di-tahun-2023-melalui-sekolah-harmoni-indonesia>
- Istighfariani, Bunga. 2023. Kemenko PMK Persiapkan Program Kepemudaan di Tahun 2023 Melalui Sekolah Harmoni Indonesia. 24 Februari 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-persiapkan-program-kepemudaan-di-tahun-2023-melalui-sekolah-harmoni-indonesia>.
- Johar, Meliyanni, Prastuti Soewondo, Retno Pujsubekti, Harsa Kunthara Satrio, and Ardi Adji. 2018. "*Inequality in Access to Health Care, Health Insurance and the Role of Supply Factors.*" Social Science & Medicine 213: 134–45. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.07.044>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-penggunaan-alat-kontrasepsi#:~:text=Pentingnya%20Penggunaan%20Alat%20Kontrasepsi%20%2D%20KB,dapat%20menciptakan%20keluarga%20sehat%20sejahtera>.

- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- _____. 2022. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 (Rev.1). Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2023. 10 Januari 2023.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46809/pemerintah-tetapkan-tiga-fokus-pembangunan-pemuda-dalam-rkp-2023/0/berita>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2023. Perluas Jangkauan, KIPAN DKI Jakarta Didapuk Jadi Agen Revolusi Mental. 13 Juli 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/perluas-jangkauan-kipan-dki-jakarta-didapuk-jadi-agen-revolusi-mental>.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. 2023. Buka Kick Off Kuliah Kewirausahaan Pemuda 2023, Menpora Dito Sebut Indikator IPP Penting untuk Mengukur Keberhasilan Pemuda. 9 Mei 2023.
<https://www.kemenpora.go.id/detail/3483/buka-kick-off-kuliah-kewirausahaan-pemuda-2023-menpora-dito-sebut-indikator-ipp-penting-untuk-mengukur-keberhasilan-pemuda>.
- _____. 2023. Buka KIPAN 2023, Menpora Dito Ajak Pemuda Jauhi Narkoba. 21 Juli 2023. <https://www.kemenpora.go.id/detail/3935/buka-kipan-2023-menpora-dito-ajak-pemuda-jauhi-narkoba>.
- _____. 2023. Diikuti Puluhan OKP, Festival Pemuda Indonesia 2023 Pertandingkan Olahraga Prestasi dan Rekreasi. 10 Oktober 2023.
<https://www.kemenpora.go.id/detail/4348/diikuti-puluhan-okp-festival-pemuda-indonesia-2023-pertandingkan-olahraga-prestasi-dan-rekreasi>.
- _____. 2023. Gubernur Ganjar Pranowo Salut dan Mendukung Program Kreativesia Gagasan Menpora Dito. 23 Mei 2023.
<https://deputi1.kemenpora.go.id/detail/276/gubernur-ganjar-pranowo-salut-dan-mendukung-program-kreativesia-gagasan-menpora-dito>.
- _____. 2023. Kemenpora Harap Festival Pemuda Indonesia 2023 Jadi Ajang Membangun Persatuan dan Kebugaran Pemuda Indonesia. 5 Oktober 2023.
<https://www.kemenpora.go.id/detail/4313/kemenpora-harap-festival-pemuda-indonesia-2023-jadi-ajang-membangun-persatuan-dan-kebugaran-pemuda-indonesia#:~:text=Festival%20Pemuda%20Indonesia%202023%20akan,Diikuti%20organisasi%20kepemudaan%20dan%20kepramukaan>.
- _____. 2023. Menpora Dito Harap Anugerah RAD Jadi Inspirasi Daerah Lain Dalam Pelayanan Kepemudaan. 23 Agustus 2023.

- <https://www.kemempora.go.id/detail/4101/menpora-dito-harap-anugerah-rad-jadi-inspirasi-daerah-lain-dalam-pelayanan-kepemudaan>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkembang. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- _____. 2021. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2021. Jakarta: Bappenas.
- Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi *Corona Virus Disease 2019*
- Khuzaimah, Nadia. & Karyana, Yayat. 2022. "Penerapan Partial Proportional Odds Model pada Kasus Usia Kawin Pertama Wanita". *Jurnal Riset Statistika (JRS)*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/jrs.v2i2.1219>
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2020. Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaku Usaha Dan Struktur Pasar Pada Sektor Jasa Rumah Sakit. <https://sirs.kemkes.go.id/fo/>.
- Mahumud, Rashidul A., Sultana, Marufa., & Sarker, Abdul R. 2017. "*Distribution and Determinants of Low Birth Weight in Developing Countries*". *Journal of Preventive Medicine & Public Health*, 50. <https://doi.org/10.3961/jpmph.16.087>
- Maknuni, J. 2020. Pengaruh Media Belajar *Smartphone* Terhadap Belajar Siswa Di Era Pandemi Covid-19. *Indonesian Education Administration and Leadership Journal (IDEAL)*, 2(2), 94–106. <https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/IDEAL>
- Maritim Muda Nusantara. 2022. Diambil kembali dari Maritim Muda Nusantara: <http://maritimmuda.id>
- Marphatia, Akanksha A., Ambale, Gabriel S., & Reid, Alice M. 2017. "*Women Marriage Age Matters for Public Health: A Review of the Broader Health and Social Implications in South Asia*". *Frontiers in Public Health*, 5. doi: 10.3389/fpubh.2017.00269
- Marphatia, Akanksha A., dkk. 2020. "*How Much Education is Needed to Delay Women's Age at Marriage and First Pregnancy?*". *Frontiers in Public Health*, 7. doi: 10.3389/fpubh.2019.00396
- Mubasyiroh, R., Tejayanti, Teti., & Senewe, Felly P. 2016. "Hubungan Kematangan Reproduksi dan Usia Saat Melahirkan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia Tahun 2010. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(2). <https://media.neliti.com/media/publications-test/107918-hubungan-kematangan-reproduksi-dan-usia-f92678de.pdf>

- Novrizaldi. 2022, Juni 9. Kemenko PMK Kerja Sama dengan FES Untuk Program Sekolah Harmoni Indonesia. Diambil kembali dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-kerja-sama-dengan-fes-untuk-program-sekolah-harmoni-indonesia#:~:text=Sekolah%20Harmoni%20Indonesia%20merupakan%20program,atas%20keragaman%20budaya%20di%20Indonesia>.
- Novrizaldi. Kemenko PMK Kerja Sama dengan FES Untuk Program Sekolah Harmoni Indonesia. 2022,, Juni 9. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-kerja-sama-dengan-fes-untuk-program-sekolah-harmoni-indonesia#:~:text=Sekolah%20Harmoni%20Indonesia%20merupakan%20program,atas%20keragaman%20budaya%20di%20Indonesia>.
- Nuraharjo, Aris W. Yuk, Ikut Festival Film Pendek Moderasi Beragama Tingkat Pelajar 2023. Disunting oleh Indah. 30 Juni 2023. <https://www.kemenag.go.id/nasional/yuk-ikut-festival-film-pendek-moderasi-beragama-tingkat-pelajar-2023-31GyQ>.
- OECD. 2013. "Average Length of Stay in Hospitals. "In *Health at a Glance 2013: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/health_glance-2013-36-en.
- Paramita, D.P. & Zuliyati, I.C. 2019. "Analisis Penggunaan Kontrasepsi pada PUS di Dusun Cawan dan Ngepek, Argodadi, Sedayu Bantul" dalam Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan dan Farmasi: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Pemanfaatan Produk dari Bahan Herbal di Indonesia. Yogyakarta: Elmatera.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Prasetya, Kadek Aris & Ernawati Pasaribu. 2019. Analisis Spasial Produktivitas Setengah Penganggur di Indonesia Tahun 2017. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 10, No. 2, Desember 2019.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. 2023. KPK Buka Kelas Antikorupsi untuk Pemuda dan LSM. 7 Agustus 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20230807-kpk-buka-kelas-antikorupsi-untuk-pemuda-dan-lsm>.
- Putri, Nining Aulia & Maria Montessori. 2021. "Adaptasi Sosial Perempuan Sebagai Kepala Keluarga". *Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X)* 4 (4) : 363-370. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i4.586>.

- Rasul, Afza., dkk. 2022. "Factors Associated with Female Age at First Marriage: an Analysis Using all Waves of the Pakistan Demographic and Health Survey". PLoS ONE, 17(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264505>
- Riska, Herliana & Nur Khasanah. 2023. "Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z". Indonesian Health Issue (E-ISSN: 2828-2809) 2 (1) : 48-53. <https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44/36>.
- Rofikoh, Widiastuti, YP., & Istioningsih. 2019. "Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang Kontrasepsi Hormonal dan Non Hormonal". Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 9(3). <https://doi.org/10.32583/pskm.9.3.2019.197-206>
- Sahli, Muhamad. & Indriani, Farikhah. 2020. "Analisa Faktor yang Berpengaruh terhadap Usia Kawin/Nikah Pertama Perempuan di Kabupaten Wonosobo". Jurnal Ilmiah Kesehatan, 10(2). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1520>
- Sehat Negeriku, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. 2021. "Pemerintah Upayakan Universal Health Coverage Bagi Masyarakat Indonesia." 2021. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201212/0135971/pemerintah-upayakan-universal-health-coverage-bagi-masyarakat-indonesia/>.
- Setiawan, W. 2017. Era Digital dan Tantangannya. Diakses melalui oai:eprints.ummi.ac.id:151.
- Singh, Mayank., Shekhar, Chander., & Shri, Neha. 2023. "Patterns in Age at First Marriage and Its Determinants in India: A Historical Perspective of Last 30 Years (1992-2021)". Population Health, 22. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101363>
- Sjafii, Achmad., dkk. 2019. "Analisis Data SDKI 2017: Determinan Umur Pertama Wanita Melahirkan di Jawa Timur dengan Pendekatan Analisis Survival" dalam Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional WidyaIswara BKKBN. Jakarta: BKKBN
- Sohibien, Gama P.D. & Yuhan, Risni J. 2019. "Determinan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia". Journal of Statistical Application and Computational Statistics, 11(1). <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v11i1.182>
- Soraya, Joice. 2022. Viktimologi Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan. Malang: Media Nusa Creative
- Sudira, P. 2016. Tvet Abad Xxi Filosofi, Teori, Konsep, Dan Strategi Pembelajaran Vokasional. Yogyakarta : UNY Press
- Taber, Jennifer M., Bryan Leyva, and Alexander Persoskie. 2014. "Why Do People Avoid Medical Care? A Qualitative Study Using National Data." Journal of General Internal Medicine 30 (3): 290–97. <https://doi.org/10.1007/s11606-014-3089-1>.

The Association for Young People Health. 2022. "Reasons to Invest in the Health of 10-24 Year Olds – What the Data Tell Us." 2022. <https://ayph.org.uk/reasons-to-invest-in-the-health-of-10-24-year-olds/>.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

UNFPA. 2019. *165 Million Reasons: A Call for INvestment in Adolescents and Youth in Latin America and the Caribbean*. Newyork.

United Nations. 1948. "Universal Declaration of Human Rights." 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Widiantara, Ade. & Yuhan, Risni J. 2019. "Pengaruh Variabel Sosial Ekonomi terhadap Perkawinan Usia Anak pada Wanita di Indonesia Tahun 2017". Statistika, 19(2). <https://doi.org/10.29313/jstat.v19i2.5205>

World Health Organization (WHO). 2018. *WHO Housing and Health Guidelines*. Switzerland: WHO

_____. 2019. *Adolescent Health The Missing Population in Universal Health Coverage*. Geneva. <https://doi.org/10.1002/9781444308051.ch15>.

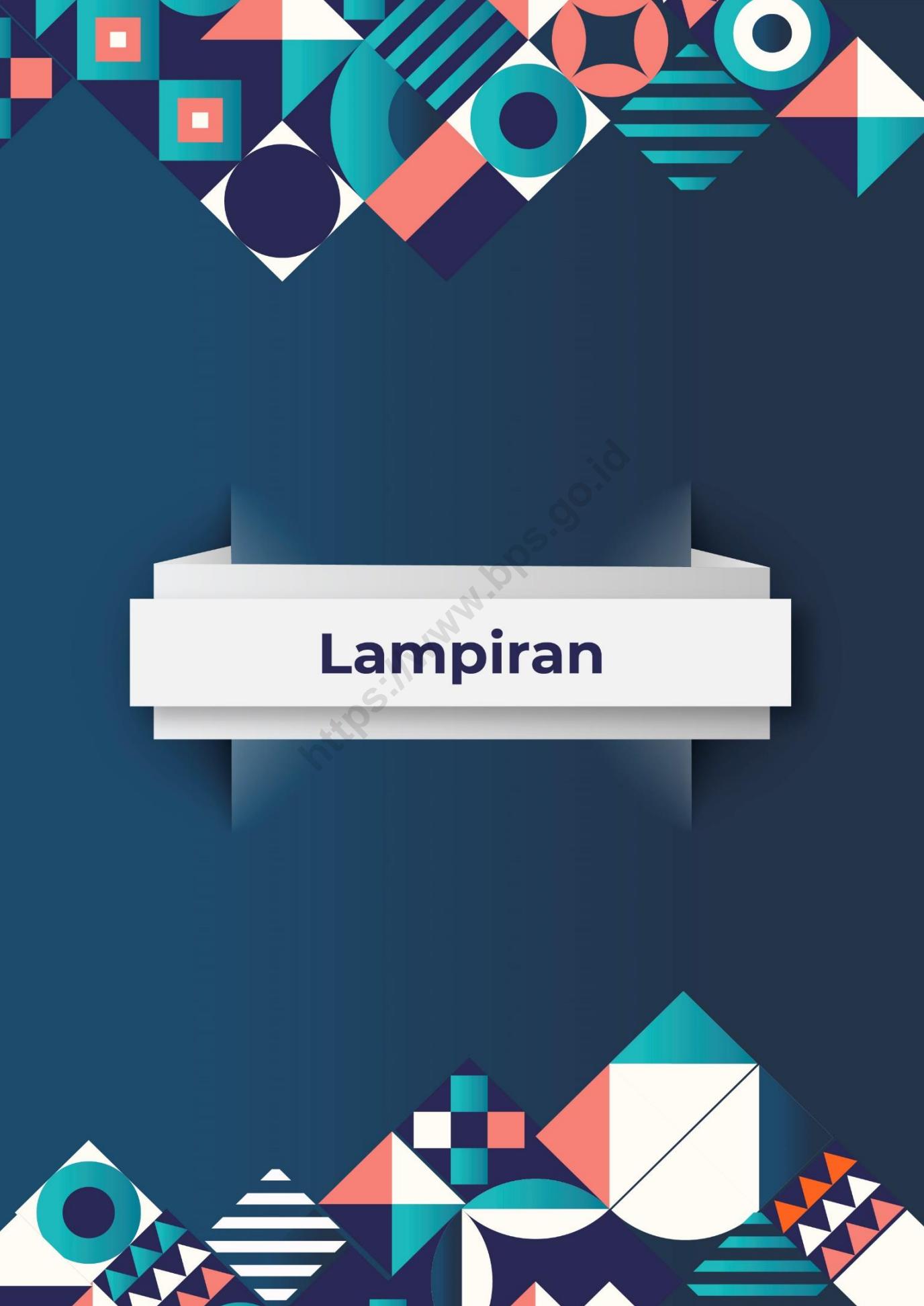
_____. 2023. *Reproductive Health in the South-East Asia Region*. <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/reproductive-health>

_____. 2023. "Tobacco." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>.

Yayasan Jantung Indonesia. 2023. "Generasi Emas, Bukan Generasi Cemas, Generasi Keren Tanpa Rokok: Program STAR (Sekolah Tanpa Advertensi Rokok) untuk Melindungi Anak-anak dari Dampak yang Disebabkan oleh Rokok." Siaran Pers, 2023.

Youth Enterpreneurship and Employment Support Services. 2021. Diambil kembali dari <https://hibah.yesskementan.org/>

Ziglio E, Currie C, and Rasmussen VB. 2004. "The WHO Cross-National Study of Health Behavior in School-Aged Children from 35 Countries: Findings from 2001-2002." The Journal of School Health 74 (6): 204–6. <https://doi.org/doi:10.1111/j.1746-1561.2004.tb07933.x>.



Lampiran

https://www.bps.go.id





VSEN23.K
Dibuat 1 set untuk
BPS Kab/Kota

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2023

RAHASIA

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT	
101	Provinsi
102	Kabupaten/Kota*)
103	Kecamatan
104	Desa/Kelurahan*)
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan
106	Nonnor Blok Sensus
107	Nonnor Kode Sampel
108	Nonnor Urt Bangunan Tempat Tinggal
109	Nonnor Urt Sampel Rumah Tangga
110	Nama Kepala Rumah Tangga
111	Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)
112	Koordinat Lokasi Rumah Tangga
	Latitude (Lintang) : <input type="text"/>
	Longitude (bujur) : <input type="text"/> T <input type="text"/> O <input type="text"/> S <input type="text"/> E

* Coret yang tidak perlu

SELAJAT PAGI/SANG/SORE/MAJAM, KAMI/SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA, SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN DAN PENGETULUAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU KAMI/SAYA AKAN MEWAHANCARA BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) JANNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASIAKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG? 2

Tidak bersedia → Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXIII Catatan. Lampirkan Berita Acara Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pengawas

BLOK II. KETERANGAN PENCACAHAN

KONSEP DAN DEFINISI

KONSEP DAN DEFINISI

Pertanyaan 203: Hasil Pencacahan Rumah Tangga

- Terisi lengkap: apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terlengkap dan memperoleh informasi secara lengkap.
- Terisi tidak lengkap: apabila petugas berhasil menemui rumah tangga, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pencacahan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden yang keluar rumah tangga tersebut tidak diperbolehkan memberi jawaban.
- Tidak ada ART: responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan, namun tidak ada ART (responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pencacahan).
- Respondent menolak: apabila responden menolak untuk diwawancara.
- Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada: apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terlapis sampai batas akhir masa pencacahan. Misalnya: rumah tangga pindah, kelar, blok, sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain.

Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang berfungsi jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus terentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrol/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.

Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini?

Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dan responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut.

Pertanyaan 605: Apakah Sedang/Pernah Mengikuti Program Pendidikan Prasekolah?

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pertulisan formal maupun nonformal.

Pertanyaan 607, 608, dan 609: Apakah Dapat Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana dalam Bahasa Sehari-Hari?

Dapat membaca dan menulis yang dimaksud adalah jika seseorang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf Latin, huruf Arab, atau huruf lainnya.

Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung subjek dan predikat, misalnya "saya membaca".

Pertanyaan 610: Apakah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket ABC)?

Bersekolah: apabila seseorang proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program keselamatan (Kenditkodus) maupun kementerian lainnya.

Pertanyaan 612: Apa Jenjang Pendidikan Tinggi yang Sedang/Pernah Dilukut?

Jenjang pendidikan tinggi yang sedang/pernah dilakukan terdiri dari proses belajar lembaga pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program keselamatan (Kenditkodus) maupun kementerian lainnya.

Pertanyaan 613: Apa Tingkat/Kelas Tinggi yang Sedang/Pernah Diduduki?

Tingkat/kelas tinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dialui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket ABC) di sekolah negeri maupun swasta.

KONSEP DAN DEFINISI

Tamat sekolah/satuan pendidikan adalah menyelesaikan pelajaran yang diandaikan dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket ABC) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat pelajaran/jazah. Sesorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.

Pertanyaan 614: Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki?

STTB adalah lembaran atau lenda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

a. Responen dikatakan memiliki rekening tabungan bank atas nama sendiri atau bersama-sama di Lombaga keuangan (perbankan, koperaasi)?

b. Keikutsertaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya.

Pertanyaan 703: Selama Seminggu Terakhir, Apa Saja Kegiatan yang Dilakukan (nama)?

Bekerja: adalah kegiatan melakukannya dengan maksud memperoleh atau mempertahankan penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu terakhir.

Sekolah: adalah kegiatan berskolaformal maupun sekolah informal (Paket ABC), baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur/cuti.

Mengurus rumah tangga: adalah kegiatan mengurus rumah tangga/tanggih/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan kerumah tanggaan, seperti memasak, mencuci, dsb. digolongkan sebagai mengurus rumah tangga.

Lainnya selain kegiatan pribadi: adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.

Pertanyaan 905: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2022, Apakah Pernah Merupakan Korban Kejadian Perdagangan, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya?

Korban kejadian adalah seseorang yang diri atau harfa bendanya selain seluruh terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/operdobaan tindak kejahatan.

Pertanyaan 1101: Jaminan Kesehatan Apa Saja yang Dimiliki (nama)?

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan: Peserta perorangan/Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan meliputi orang yang yang tergolong faktor miskin dan orang tidak mampu yang turutnya dibayar oleh pemernah.

Peserta bukan PBI terdiri atas:

a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu: a) Pegawai negeri sipil; b) Pegawai swasta; c) Anggota Polri; d) Pejabat negara; e) Pegawai negeri nonpedawai negeri; f) Pegawai swasta;

dan g) Pekerja yang tidak termasuk huruf f yang menemana upah.

b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan b) Pekerja yang tidak termasuk huruf yang bukan penerima upah;

c) Pekerja sebagaimana ditaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paing singkat 6 (enam) bulan.

c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas: a) Investor; b) Pemberi kerja; c) Penerima pensiun; d) Veteran; e) Peintis kemerdekaan; dan f) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN									
<p style="text-align: center;">(Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART)</p> <p>Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, 3, atau 4) APAKAH (nama) MEMILIKI/PERNAH NIKAH DARI KUA/ART Untuk KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (untuk pertakinan yang terakhir) (Kode)</p>									
No.	No. Urut Keluarga	No. Unt Ibu Kandung	Lihat Blok IV (Isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rumah tanga ini)	APAKAH (nama) MEMILIKI/NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN (NIK)?	Nomor Induk Kependudukan	Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK	Sumber Data Nomor Induk Kependudukan	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL?	Disisi dehi pengawas)
401	501	502	503	504	505	506	507	508	509
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kode 501: Kepemilikan Ekukul Akta Nikah									
<p>1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu</p>									
Kode 506: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK									
<p>1. Laki-laki Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3 2. Perempuan Jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu</p>									
Kode 508: Kepemilikan Akta Kelahiran									
<p>1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu</p>									

- Catatan:**
 1. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak sesuai format → pada empat digit terakhir 505 tuliskan 9998 dan pada 506 tuliskan kode 9. Kemudian tulis catatan di Blok XXIII. Catatan.
 2. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak Ingat/tidak memiliki catatan → pada empat digit terakhir 505 tuliskan 9998 pada empat digit terakhir dan pada 506 dan 507 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXIII. Catatan.

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN

No. Urut ART	Provinsi/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika lahir di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	Provinsi/NEGARA	Untuk ART Semua Umur		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas		Untuk ART Berumur 0-10 Tahun		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas	
				Jika pernah masih 605=	Jika pernah 1.2. atau 3) APA JENIS PENDIDIKAN PRASEKOLAH?	(Kode)	(Kode)	HURUF LATIN/ ARAB/ ALFABET? HAYAH? KANU, CIA, DLL.)	HURUF LATIN/ ARAB/ ALFABET? HAYAH? KANU, CIA, DLL.)	(Kode)	(Kode)
401	601	602	603			604	605	606	607	608	609
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode 605: Partisipasi Prasekolah

- Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2022/2023)
- Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2022/2023)
- Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2022/2023
- Tidak/pernah mengikuti pendidikan prasekolah

Kode 606: Jenis Prasékolah

- Taman Kanak-Kanak
- Bustanul Athfal
- Raudatul Athfal
- Sekolah PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BK/B/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.)
- Kelompok Bermain
- Taman Penitipan Anak

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN

No. Urut ART	APAKAH (nama) BERSEKOLAH? (emasuk di Sekolah Negeri ATAU SWASTA?) Kode =1 ke ART berikutnya/ Blok VII Kode=3→612	<i>Untuk ART berumur 5 tahun ke atas</i>		<i>Untuk ART berumur 5-30 tahun</i>		<i>Untuk ART berumur 5-24 tahun</i>		<i>Untuk ART yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (610 = 2 atau 3)</i>	
		APAKAH (nama) BERSEKOLAH (emasuk di Sekolah Negeri ATAU SWASTA?) (Kode)	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMEROLEH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)? (Kode)	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)? (Kode)	APAKAH (nama) YANG DITERIMA? (Kode)	SELAMA BULAN AGUSTUS 2022-FEBRUARI 2023 BERAPA JUMLAH UANG PIP YANG DITERIMA? (Kode)	Jika P.617 ≠ 0 Untuk PENERIMAAN BERAPA SEMESTER? (Kode)	APAKAH (nama) BERSKOLAH PADA TAHUN AJARAN SEBELUMNYA (2021/2022)? (Kode)	APAKAH (nama) YANG DILAKUKAN PADA JENANG WAKTU ITU? (Kode)
401	610	611	612	613	614	615	616	617	618
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode 612 dan 620: Jenjang Pendidikan dan Kode 614: Jazam/STTB

Partisipasi Sekolah

- Tidak/pernah bersekolah
- Masih bersekolah
- Tidak bersekolah lagi

Kode 613 dan 621: Tingkat/Kelas

- Jika pernah/sedang Kuliah Profesi,
kode 1
- Jika pernah/sedang Kuliah S2, kode 6
- Jika pernah/sedang Kuliah S3, kode 7

25. Tidak Punya
Ijazah SD
(khusus 614)

01. Paket A	07. SMP LB	13. SMA	19. D3
02. SD/LB	08. SMP	14. MA	20. D4
03. SD	09. MTs	15. SMK	21. S1
04. MI	10. SPM/PDF Wustha	16. MAK	22. Profesi
05. SPM/PDF Ula	11. Paket C	17. SPM/PDF Ula	23. S2
06. Paket B	12. SMLB	18. DI/D2	24. S3

BLOK VII. KETERANGAN KEPEMILIKAN TABUNGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN

No.	Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas APAKAH (nama) MEMILIKI REKENING TABUNGAN BAIK ATAS NAMA SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA DILEMBAGA KELUARGA, MIRKO, KEGADIAN, FINTECH, UANG ELEKTRONIK?)? 1. Ya 5. Tidak	DALAM SETIAP TERAKHIR APAKAH (nama) MENGGUNAKAN PRODUK/LAYANAN JASA KELUARGA (PERBANKAN, PASAR MODAL, LEMBAGA PEMBIAYAAN, ASURANSI, DANA PENSUIN, LEMBAGA KELUARGA, MIRKO, KEGADIAN, FINTECH, UANG ELEKTRONIK)? 1. Ya 5. Tidak	SELAMA SEMINGGU TERAKHIR APA SAI KEGIATAN YANG DILAKUKAN (nama)? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DARI KEGIATAN YANG DI AKUASI SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, KEGIATAN APAKAH YANG MENGGUNAKAN WAKTU TERBATAS? 1. BEKERJA → 706 2. SEKOLAH C. MENGURUS RUMAH TANGGA, D. LAINNYA SELAIN KEGIATAN PRIBADI X. TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN Jika X terpilih → 706	Untuk ART Umur 10 Tahun ke Atas					Untuk ART Umur 18 Tahun ke Atas				
					<i>Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (703= pilihan A terpilih atau 705=1)</i>					<i>Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (703= pilihan A terpilih atau 705=1)</i>				
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contoh-contoh lembaga jasa keuangan: a. Bank/bank konvensional dan syariah. b. Pasar modal: perusahaan efek/skurutes, manager investasi konvensional, manager investasi syariah, penyelenggara urusan dana konvensional, dan penyelenggara urusan dana syariah. c. Lembaga pembayaran: lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah, koperasi lembaga keuangan mikro dan syariah, BMT, Bank Wakaf Mikro, Pengadilan, perusahaan pembayaran dan syariah yang diwasi OJK. d. Perusahaan asuransi: perusahaan asuransi konvensional dan syariah.														
e. Dana pensiun: dana pensiun konvensional (Taspen, DPPK, DPLK) dan syariah (DPPK Syariah, DPLK Syariah, Unit Syariah DPPK, Unit Syariah DPLK). f. Lembaga keuangan mikro: lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah, koperasi lembaga keuangan mikro dan syariah, BMT, Bank Wakaf Mikro, FinTech, pinjaman online konvensional dan syariah yang diwasi OJK. i. Uang elektronik: Brizzi, Flazz, e-Money, Gopay, Ovo, dll.														
Kode 707: Status/Kedudukan dalam Pekerjaan (Jika 705=1), 707 tidak boleh berkode 5 atau 6)														
• Kartu Prakerja bukanlah kartu fisik, melainkan sebuah kode unik 16 angka yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pekerjaan. Nomor kartu prakerja diperoleh setelah mendapat bantuan buruh tetap/buruh dibayar														
1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas 6. Pekerja kelautan/lulus sebagai penerima kartu prakerja.														

BLOK VIII. KETERANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Urut ART	Dalam 3 bulan terakhir, apakah (name) menggunakan seluler (HP)/irkabel untuk keperluan komunikasi?	Dalam 3 bulan terakhir, berapa jumlah simcard aktif yang digunakan (name) pada HP lainnya, menurut provider operator berikut:	Dalam 3 bulan terakhir, apa saja jenis komputer yang digunakan (name)?	Dalam 3 bulan terakhir, apa (name) pernah menggunakan internet? (Pilih jawaban harus dibacakan)	Dalam 3 bulan terakhir, apa (name) pernah menggunakan internet? (Pilih jawaban harus dibacakan)	Dalam 3 bulan terakhir, apa (name) pernah menggunakan internet? (Pilih jawaban harus dibacakan)	Dalam 3 bulan terakhir, apa (name) pernah menggunakan internet? (Pilih jawaban harus dibacakan)	Dalam 3 bulan terakhir, apa (name) pernah menggunakan internet? (Pilih jawaban harus dibacakan)	Dalam 3 bulan terakhir, apa (name) pernah menggunakan internet? (Pilih jawaban harus dibacakan)	Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas
401	1. Ya 5. Tidak	801	802	803	804	805	806	807	808	811
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										812

- Menggunakan HP yang dimaksud tidak harus menggunakan HP yang dimiliki sendiri atau dibeli/dibayar sendiri oleh individu yang menggunakan.
- Memiliki/menggunakan HP apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki/mengguna HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir.
- Menggunakan internet: apabila meluangkan waktu untuk seseorang menggunakan internet sehingga ia dapat memanfaatkan atau memikmati fasilitas internet. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) internet. Sapa saja dimasukkan menggunakan meskipun hanya tinggal melanjutkan.
- Mengakses internet untuk niumburan misalnya download/main game, menonton tv, download/menonton film/video, radio, download gambar dan musik menggunakan internet.
- Pembuatan konten digital misalnya menyimpan dokumentasi menggunakan cloud storage (Google Drive, Dropbox, dll), menggunakan software yang diajarkan melalui internet untuk mengedit dokumen (teks, spreadsheet, presentasi), dll.
- Sedangkan pembelajaran Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) jika belajar TIK secara formal (di sekolah) atau nonformal (di teman/kursus/vlog/nama klinikum/nama tidak termasuk belajar otodidak. Misalnya, belajar aplikasi perkantoran (Microsoft Office/MS Word, MS Excel, dll.), pemrograman, robotik, dll.

BLOK IX. KETERANGAN BEPERGIAN DAN KORBAN KEJAHATAN

No.	SEJAK 1 JANUARI-31 DESEMBER 2022 APAKAH (nama) PERNAH BEPERGIAN KELUAR DARI LINGKUNGAN KESERIHALAN, URUT MINIMAL 3 JAM DI TEMPAT TUJUAN, TAKU UNTUK SEKOLAH ATAU BERERAJA? 1. Ya 5. Tidak → 905	Jika pernah bepergian (901=1) BERAPAKALI (nama) BEPERGIAN SELAMA PERIODE: 1 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2022? (Kali)	PADA KONDISI BERPERGIAN YANG TERAKHIR, APA MAKSUD UTAMA (nama) MEALKUKAN BEPERGIAN? 1. Ya 5. Tidak → Blok X	SEJAK 1 JANUARI-31 DESEMBER 2022, PERUHIA MENUADIKORBAN KEJAHATAN PENCURIAN, PENGANTUYAN,		BERAPAKALI (nama) MENUDIKORBAN KEJAHATAN DAN BERAPA KEJADIAN YANG DILAPORKAN KE POLISI? <i>(Jika ≥ 7 kejadian, Tulis 7)</i>		BERAPAKALI (nama) MENUDIKORBAN KEJAHATAN DAN BERAPA KEJADIAN YANG DILAPORKAN KE POLISI? <i>(Jika 907, 909, 911, 913 atau 9150)</i>	
				PENCURIAN	PENGANTUYAN	PENCURIAN DENGAN KERASAN	PENCURIAN DENGAN KERASAN	LAINNYA	
401	901	902	903	904	905	906	907	908	909
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kode 904: Maksud Utama Bepergian									
08. Mengunjungi teman/keluarga 09. Mudik/pulang kampung han raya 10. Olahraga/keseharian 11. Belanja/shopping 12. Lainnya									
Lingkungan keserihalan didefinisikan sebagai wilayah geografis (tidak harus berdekat-dekat) bagi seseorang melakukan untuk rutinitas kehidupanya/pekerjaannya. Misalnya rumah, kantor atau tempat kerja, pasar yang rutin dikunjungi, sekolah, taman yang rutin dikunjungi, fasilitas olahraga yang rutin dikunjungi, dan sebagainya.									
Bepergian rutin adalah bepergian ke tempat/tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.									
<p>Suatu peristiwa kejahanan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Korban kejahanan telah melaporkannya ke polisi. b. Orang lain melaporkan peristiwa kejahanan tersebut ke polisi. c. Polisi mengelahunya sendiri atau tertangkap tangan. <p>Laporan kepada polisi tidak harus dilakukan di kantor polisi.</p>									

BLOK X KETERANGAN GANGGUAN FUNGSIONAL (UNTUK ART BERUMUR 2 TAHUN KE ATAS)									
Isikan kode jika Umur ≥ 2 tahun atau Urut ART		APAKAH (nama) MENGLAMI KESULITAN/GANGGUAN PENGLIHATAN?		APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN BERJALAN/NAIK TANGGA?		APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN MENGERAKKAN TANGAN/JARI?		APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/GANGGUAN PERILAKU DAN/ATAU EMOSIONAL?	
No.	kode jika Umur < 2 tahun	1. Ya, sama sekali tidak bisa melihat	2. Ya, banyak kesulitan	3. Ya, sedikit kesulitan	4. Tidak mengalami kesulitan	5. Ya, sama sekali tidak bisa berjalan naik tangga	6. Ya, banyak kesulitan	7. Ya, sedikit kesulitan	8. Tidak mengalami kesulitan
401	1001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	1002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	1007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	1008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	1009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	1010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Disabilitas** adalah adanya gangguan/keterbatasan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.
- **Gangguan/keterbatasan fungsi** ditandai oleh kondisi ketidakmampuan atau kehilangan ataupun kelainan baik dari psikologis, fisikologis, maupun struktural atau fisiologis.
- Petugas tidak diperkenankan memulukan bahwa responden tidak mengalami disabilitas lemahnya berdasarkan apa yang dilihat secara kasat mata.
- Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain: kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/milikang ingatan/gangguan iwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan tangannya.
- Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan.

- **AsistenSI Rehabilitasi Sosial (ATENS)** yaitu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/ratua residenzial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan layak, dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, pelatihan/vokasional pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, assistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN

- Jaminan kesehatan yang dimiliki** adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembayaran kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.

• **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kelijuan tidak baik karena gangguan penyakit yang sening di dalam perut seperti panas, plek, dare, pusing, sakit kepala, maupun ketika penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kekelelahan, kumaniasik, atau kelihuan lainnya.

- **Jaminan Kesehatan yang dimiliki** adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan

Kelehan kesihatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesihatan atau perawatan kesihatan seperti: ke dokier, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.

balk karena gangguan penyakit yang sering di alami penodus seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karenanya akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Terganggu a pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari adalah tidak dapat melakukan kewajiban secara

Rawat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memerlukan diri dan mendapatkan penobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelajaran kesehatan modern atau tradisional tanpa normal (bekaka, sekolah, atau kerjatan sehan-hari) sebagaimana biasanya.

Menggunakan kesehatan untuk rawat jalan adalah bila biaya berobat jalan tangga menginap, termasuk mendangarkan pelugas kesehatan ke rumah.

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK

No. urut ART	Dalam setahun terakhir, di mana saja tempat (nama) dirawat inap? A. RS Pemerintah B. RS Swasta C. Praktik bidan D. Klinik/Praktik dokter bersama E. Puskesmas F. Praktik pengobatan tradisional/ alternatif G. Lainnya 1. Ya 5. Tidak 1206 ↘	Dalam setahun TERAKHIR, berapa hari (nama) dirawat inap?	JAMINAN KESEHATAN (nama) YANG DIGUNAKAN APA SAJA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKNI/JAMKESDA UNTUK RAWAT INAP?	Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas													
				SELAMA SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK (merokok menggunakan rokok elektrik?)						SELAMA SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEROKOK (merokok tembakau)							
401	1201	1202	1203	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1205	1206	1207	1208	1209
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Rawat inap adalah upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan meninggapi senjata atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan.
- Responden yang pernah rawat inap adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencatatan sedang menjalani rawat inap.
- Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap adalah bila biaya rawat inap anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibayai oleh perjaminan kesehatan.
- Jumlah hari adalah jumlah hari rawat inap dalam satu tahun terakhir.
- Merokok merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencatatan.
- Rokok tembakau meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu, lisong, pipa cangklong/linting/kawung yang disusupi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap shisha/water pipe.
- Penghitungan jumlah batang rokok rata-rata per minggu selama sebulan terakhir adalah jumlah rokok yang dinyaup selama sebulan dikali 7 dibagi 30.

PERTANYAAN	BALITA 1			BALITA 2			BALITA 3		
	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):
I. DPT-HB-HB LANJUTAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
m. CAMPAK-RUBELLA (MR) LANJUTAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—
n. MMR	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1405. APAKAH (<i>nama balita</i>) MENERIMA IMUNISASI DASAR, YANG TIDAK TERCATAT DALAM KARTU, TERMASUK IMUNISASI YANG DITERIMA SAAT FERAK IMUNISASI NASIONAL ? Lingkari kode 1 jika responden menyebutkan jenis imunisasi dasar (lihat pertanyaan 1404).	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404, jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00)	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404, jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00)	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404, jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00)	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404, jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00)	—	—	—	—	—
1405. APAKAH (<i>nama balita</i>) MENERIMA IMUNISASI DASAR, YANG TIDAK TERCATAT DALAM KARTU, TERMASUK IMUNISASI YANG DITERIMA SAAT FERAK IMUNISASI NASIONAL ? Lingkari kode 1 jika responden menyebutkan jenis imunisasi dasar (lihat pertanyaan 1404).	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	—	—	—	—	—
UNTUK BALITA YANG TIDAK MEMPUNYAI ATAU TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KARTU IMUNISASI									
1406. APAKAH (<i>nama balita</i>) PERNAH MENDAPAT IMUNISASI UNTUK KELINDUNGNYA DARI BERGAI PENYAKIT?	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	—	—	—	—	—
1407. APAKAH (<i>nama balita</i>) PERNAH MENDAPAT VAKSIN BCG UNTUK MENEGAH PENYAKIT TBC – BLSANYA DISINTIKKAN PADA LENGAN ATAU BAUDAN MEMBULUKAN BEKAS LUKA – ?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	—	—	—	—	—			
1408. APAKAH (<i>nama balita</i>) PERNAH MENDAPAT VAKSIN UNTUK MENEGAH PENYAKIT Polio – YANG "DITESKAN KE MULUT ATAU DISINTIKKAN PADA LENGAN/PAHU" – ?	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	—	—	—	—	—
1409. KAHAN VAKSIN Polio PERTAMA DITERIMA (<i>nama balita</i>) ATAU SETELAINNYA?	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	—	—	—	—	—			
1410. SUDAH BERAPA KALI (<i>nama balita</i>) MENDAPATKAN VAKSIN POLIO?	a. POLIO TETES b. POLIO SUNTIK (IPV) : _____ kali	a. POLIO TETES b. POLIO SUNTIK (IPV) : _____ kali	a. POLIO TETES b. POLIO SUNTIK (IPV) : _____ kali	a. POLIO TETES b. POLIO SUNTIK (IPV) : _____ kali	a. Polio Tetes b. Polio suntik (IPV) : _____ kali	a. Polio Tetes b. Polio suntik (IPV) : _____ kali	a. Polio Tetes b. Polio suntik (IPV) : _____ kali	a. Polio Tetes b. Polio suntik (IPV) : _____ kali	a. Polio Tetes b. Polio suntik (IPV) : _____ kali
1411. APAKAH (<i>nama balita</i>) PERNAH MENDAPAT VAKSIN DPT – YAITU SUNTIKAN DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENEGAH PENYAKIT TEtanus, BATUK REJAH, ATAU DIPERI? (Probing dengan menanyakan bahwa pemberian vaksin DPT kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan Hepatitis B)	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	—	—	—	—	—

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):
1412. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN DPT?	_____ kali	_____ kali	_____ kali
1413. APakah (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN HEPATITIS B – YATU SUNTIKAN DI PADAHATU BOONG – UNTUK MENEGAHKAN PENYAKIT HEPATITIS B? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin Hepatitis B kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan DPT)	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416
1414. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN IN HEPATITIS B?	_____ kali	_____ kali	_____ kali
1415. KAPAN VAKSINASI HEPATITIS B PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEMINGGU PERTAMA SETELAH KELAHIRAN ATAU SETELAH AHINYA?	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2
1416. APakah (nama balita) PERNAH MENDAPAT SUNTIKAN CAMPAK – RUEBELLA (MR) ATAU MMR – YAITU PADA UMUR 9 BULAN ATAU LEBIH – UNTUK MENEGAHKAN PENYAKIT CAMPAK? i. CAMPAK – RUEBELLA (MR)	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
ii. MMR	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
ASI DAN MPP-ASIDITANYAKAN UNTUK BADUTA (ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari '1401, berikan tanda centang (\)	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV
Balita berumur 0-23 bulan Balita berumur ≥ 24 bulan			
1417. A. APakah (nama baduta) PERNAH DISUSU/DIBERI AIR SUSU IBU (ASI)?	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419
B. LAMANYA PEMERIAN ASI:	B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan	B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan	B. _____ bulan I. _____ bulan II. _____ bulan

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV/402 dan 401):
1418. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISISI/DIBERI ASI?	Ya Tidak Tidak tahu	Ya Tidak Tidak tahu	Ya Tidak Tidak tahu
1419. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MENERIMA CAIRAN TERNAKU/CAIRAN YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH? a. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU RUBIK, SUSU SEGAR, UHT)? Jika "ya", isikan berapa kali/susu selain ASI dikonsumsi baduta.	a) <input type="checkbox"/> kali b) c)	a) <input type="checkbox"/> kali b) c)	a) <input type="checkbox"/> kali b) c)
1420. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN/MINUM? a. SEHELI, AKAR, DAN UMBI (NASI, JAGUNG, GADING, RASTA, ROTI/PANEKU, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL.)? b. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LANINYA)? c. PRODUK TURUNAN SUSU (YOGURT, KEJU, DLL.)? d. DAGING, IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DAGING/IKAN DALAM KALENG, DLL.)? e. TELOU (AYAM, TIK, PUYOH, DLL.)? f. BUAH DAN SAYUR SUMBER VITAMIN A (TERMASUK SAYURAN BERDAUN GELAP)? g. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAM, GAMEAS, ALPUKAT, JERUK, DLL.)? h. MAKANAN RINCIAN YANG GURIH, GORENGAN, MAKANAN MANIS (ES KRIM, PEMEREN, KUE KERING, CAKE, DLL.)?	a) b) c) d) e) f) g) h)	a) b) c) d) e) f) g) h)	a) b) c) d) e) f) g) h)
1421. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN PADAT, SETENGAH PADAT, ATAU LUNAK? Jika "ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.	Ya Tidak Tidak tahu	Ya Tidak Tidak tahu	Ya Tidak Tidak tahu
[Balita berikutnya/ Blok XV]		Tidak Tidak tahu	[Balita berikutnya/ Blok XV]
[Balita berikutnya/ Blok XV]		Tidak Tidak tahu	[Balita berikutnya/ Blok XV]

PERTANYAAN		PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pembenar Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401): — — tahun			
KETERANGAN TENTANG PENOLONG PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA (DITANYAKAN KEPADA SEMUA PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)				
BLOK XV. PENOLONG PERSALINAN				
1501. A. APAKAH (nama) PERNAH HAMIL?	A) Ya..... 1 Tidak... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya..... 1 Tidak... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya... 1 Tidak... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya... 1 Tidak... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI
B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT HAMIL PERTAMA?	B) ____ tahun	B) ____ tahun	B) ____ tahun	B) ____ tahun
1502. A. APAKAH (nama) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP?	A) Ya..... 1 Tidak... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya..... 1 Tidak... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya... 1 Tidak... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI	A) Ya... 1 Tidak... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI
B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG PERTAMA KALI?	B) ____ tahun	B) ____ tahun	B) ____ tahun	B) ____ tahun
1503. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR? yang terakhir?	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2
	PPK berikutnya/Blok XVI ←			
1504. A. DI MANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RSS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RSS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RSS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RSS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)		PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)		PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)		
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407):	
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELahirAN TERAKHIR?		— tahun		— tahun		— tahun	
Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):							
Dokter kandungan	1	Dokter kandungan	1	Dokter kandungan	1	Dokter kandungan	1
Dokter umum	2	Dokter umum	2	Dokter umum	2	Dokter umum	2
Bidan	3	Bidan	3	Bidan	3	Bidan	3
Perawat	4	Perawat	4	Perawat	4	Perawat	4
Tenaga kesehatan lainnya	5	Tenaga kesehatan lainnya	5	Tenaga kesehatan lainnya	5	Tenaga kesehatan lainnya	5
Dukun beranak/paraji	6	Dukun beranak/paraji	6	Dukun beranak/paraji	6	Dukun beranak/paraji	6
Lainnya	7	Lainnya	7	Lainnya	7	Lainnya	7
Tidak ada	8	Tidak ada	8	Tidak ada	8	Tidak ada	8
C. BERAPA BERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?							
< 2,5 kg	1	< 2,5 kg	1	< 2,5 kg	1	< 2,5 kg	1
≥ 2,5 kg	2	≥ 2,5 kg	2	≥ 2,5 kg	2	≥ 2,5 kg	2
Tidak ditimbang	5	Tidak ditimbang	5	Tidak ditimbang	5	Tidak ditimbang	5
Tidak tahu	8	Tidak tahu	8	Tidak tahu	8	Tidak tahu	8
1505. BERAPAA LAMA SETELAH KELahirAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALI DILETAKKAN DI ATAS DADA BU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?							
<1 jam setelah lahir	1	<1 jam setelah lahir	1	<1 jam setelah lahir	1	<1 jam setelah lahir	1
1-23 jam setelah lahir	2	1-23 jam setelah lahir	2	1-23 jam setelah lahir	2	1-23 jam setelah lahir	2
≥24 jam setelah lahir	3	≥24 jam setelah lahir	3	≥24 jam setelah lahir	3	≥24 jam setelah lahir	3
Tidak pernah	5	Tidak pernah	5	Tidak pernah	5	Tidak pernah	5
Tidak tahu	8	Tidak tahu	8	Tidak tahu	8	Tidak tahu	8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
 tahun tahun tahun
BLOK XVI. KELUARGA BERENCANA			
1601. APAKAH (nama/pasangan) PERNAH/SEDANG MENGGUNAKAN ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL UNTUK MENUNDA ATAU MENCEGAH KEHAMILAN?	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII
1602. ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL APA YANG SEDANG DIGUNAKAN?	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susu KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafagma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susu KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafagma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susu KB/implan 5 Pil 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafagma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11
1603. JIKA MENGGUNAKAN ALAT KB MODERN (1602 = 1-8), DI MANA (nama/pasangan) MEMPEROLEH (ALAT KB) TERAKHIR KALI?	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MUYAN 3 Polindes/Poskeudes 4 Posyandu/Pos KB/PPKB 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MUYAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKB 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MUYAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKB 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10

**BLOK XVII. AKSES TERHADAP MAKANAN
(DITANYAKAN PADA KTP/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama dan No. Urut pemberi informasi:.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN.				
DALAM SETAHUN TERAKHIR, APakah ADA SAAT DI MANA:				
1701. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APakah ANDA/ART LAINNYA KHAWATIR TIDAK AKAñ MEMILIKI CURUP MAKANAN UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	<input type="checkbox"/> keluarga (Isikan 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)	<input type="checkbox"/>	
1702. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APakah ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1703. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APakah ANDA/ART LAINNYA HANYA MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m ² (Bulatkan dalam meter persegi)
1704. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APakah ANDA/ART LAINNYA PERNAH MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERTENTU KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1705. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APakah ANDA/ART LAINNYA MAKAN LEBIH SEDIKIT DARIPADA SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1706. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APakah ANDA/ART LAINNYA KEPERLUAN MAKANAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1707. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APakah ANDA/ART LAINNYA MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Menolak menjawab 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1708. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APakah ANDA/ART LAINNYA TIDAK MAKAN SEHARIAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama dan No. Urut pemberi informasi:.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1801. BERAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN SENIS/ISTRUMAH INI?				
1802. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI?	Milik sendiri 1 Kontrak sewa 2 Bebas sewa 3 Dinas 4 Lainnya, tuliskan: 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	{ 1804 }
(Pilihan jawaban boleh dibacakan)				
1803. APA JENIS BURKI MILIK (SHM) ATAS NAMA ART ... 1	Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART ... 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemantapan tertulis 2	SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemantapan tertulis 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(Pilihan jawaban boleh dibacakan)	Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS) 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Surat bukti lainnya (Glink, Letter C, dll) 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tidak punya 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1804. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL?	<input type="checkbox"/> m ² (Bulatkan dalam meter persegi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1805. APakah KEPALA RUMAH TANGGAP PASANGAN-NYA/ANAKNYA MEMILIKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAATINI?	Ya 1 Tidak 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1806. APakah BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS?	Beton 1 Genteng 2 Seng 3 Asbes 4 Bambu 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(Pilihan jawaban boleh dibacakan)	Kayu/sirap 6 Jerami/juk/daun-daunan/umbia 7 Lainnya 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1807. APakah BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?	Tembok 1 Plesteran anyaman bambu/kayu 2 Kayu/papan 3 Anyaman bambu 4 Batang kayu 5 Bambu 6 Lainnya 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN

1808 APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?	Marmogranit..... Keramik..... Parkeet/Jarakke tempat/tanpa/pimpungan limbah/kotoran/tinja terdekat? Upin/segel/teraso Kayu/jepan Semen/bata merah Bambu..... Tanah..... Lainnya.....	1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6..... 7..... 8..... 9.....	B. [Jika 1810.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)]. BERAPAKA JARAKKE TEMPAT PEMAMUNGKAN LIMBAHKOTORAN/TINJA TERDEKAT? 1811 A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	< 10 m..... ≥ 10 m..... Tidak tahu..... Di rumah/kawasan dalam pagar rumah..... Di luar kawasan pagar rumah..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> menit 998
1809 A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUNGAH AIR BESAR DAN SIAPA SAJA YANG MENGGUNAKANNYA?	Ada, digunakan hanya ART sendiri..... Ada, digunakan bersama ART rumah tangga terentu..... Ada, di MCK komunal..... Ada, di MCK umum/ sepiapan menggunakan..... Ada ART tidak menggunakan..... Tidak ada fasilitas.....	1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6.....	B. (Jika 1809.A = 1, 2, atau 3) APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN? C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUJANGAN AKHR TINA?	{1810.A Leher angsa..... Plengsengan dengan tutup..... Plengsengan tanpa tutup..... Cempung/ciblik..... Tangki seplik..... IPAL..... Kolam sawah/sungai/danau/laut..... Lubang tanah..... Pantai/lataran lapang/kebun..... Lainnya.....
D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?	Tidak tahu..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> laluhan 98	1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6..... 7..... 8.....	E. DIANTAR 5 TAHUN TERAKHIR, BERAPA KALI TANGKI SEPTIK NI DIKOSONGAN/ DILAKUKAN PENYEDOTAN?	Tidak pernah..... Tidak tahu..... <input type="checkbox"/> kali (isikan 6, jika 6 kali atau lebih) 7..... 8.....
1810 A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air keranasi benneriek..... Air isi ulang..... Leding..... Sumur bor/pompa..... Sumur terindung..... Mata air terindung..... Mata air tak terindung..... Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi)..... Air hujan..... Lainnya.....	1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6..... 7..... 8..... 9..... 10..... 11.....	B. [Jika 1814.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)]. BERAPAKA JARAKKE TEMPAT PEMAMUNGKAN LIMBAHKOTORAN/TINJA TERDEKAT? 1815. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	< 10 m..... ≥ 10 m..... Tidak tahu..... Ya, di dalam rumah..... Ya, di luar rumah..... Tidak ada tempat cuci tangan..... Tidak ditunjukkan melihat.....

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN

B [Jika 1810.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)]. BERAPAKA JARAKKE TEMPAT PEMAMUNGKAN LIMBAHKOTORAN/TINJA TERDEKAT?	1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6..... 7..... 8..... 9.....	B. BERAPA, ANA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	Tidak tahu..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> menit 998
1811 A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	B BERAPA, ANA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	Dalam setahan terakhir apakah rumah tangga pernah mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam?	Tidak tahu..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ya..... 5
1812. DALAM SETAHAN TERAKHIR APAKAH RUMAH TANGGA PERNAH MENGAJAR MENGURANGKAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?	Dalam setahan terakhir apakah rumah tangga pernah mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam?	A. KERIH..... B. BERWARNA..... C. BERASA..... D. BERBUA..... E. BERBAU.....	Ya..... Tidak..... 1..... 5
1813. BAGAIMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM MENURUT ANDA?	1814. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDI/CUCIDLL?	Air keranasi benneriek..... Air isi ulang..... Leding..... Sumur bor/pompa..... Sumur terindung..... Mata air terindung..... Mata air tak terindung..... Air permukaan (sungai/ danau/waduk/kolam/irigasi)..... Air hujan..... Lainnya.....	Ya..... Tidak..... 1..... 5
1815. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	1816. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	B. [Jika 1814.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)]. BERAPAKA JARAKKE TEMPAT PEMAMUNGKAN LIMBAHKOTORAN/TINJA TERDEKAT?	1..... 2..... 3..... 8

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

2201. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL BERUPA.....	Ya	(II)	Tidak	5 → 2201.B	A orang BERAPA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL TERSEBUT?	(III)
A. JAMINAN PENISIUM/VETERAN	A.	1 → 2201.ii.A	5 → 2201.B	A orang	
B. JAMINAN HARI TUA	B.	1 → 2201.ii.B	5 → 2201.C	B orang	
C. JAMINAN/ASURANSI NECELAUKAN KERJA	C.	1 → 2201.ii.C	5 → 2201.D	C orang	
D. JAMINAN/ASURANSI KEMATIAN	D.	1 → 2201.ii.D	5 → 2201.E	D orang	
E. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)	E.	1 → 2201.ii.E	5 → 2201.F	E orang	
F. PESANGON PEMOTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	F.	1 → 2201.ii.F	5 → 2202	F orang	
2202. APAKAH RUMAH TANGGA INI MENERIMA KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)?	Ya, dapat menunjukkan kartu Tidak	1 5	2	1 5	1 5	
2203. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya Tidak	1 5	5 → 2205	1 5	1 5	
2204. A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATATU/ MENJADI PENERIMA PKH?	Ya Tidak	1 5	5 → 2205	1 5	1 5	
B. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN PKH?	Kantor Pos ATM Kantor Bank Agen Bank Pendamping, ketua kelompok	1 2	2	1 2	1 2	
C. DALAM SETAHUN TERAKHIR, UNTUK APA SAMA BANTUAN PKH DIPERGUNAKAN? ADALAGI?	Belanja Pangan Biaya Perubahan Biaya Pengobatan Biaya Perawatan Ibu Hamil .. Biaya Sekolah .. Pembayaran Hutang/Kredit .. Lainnya, tuliskan	1 2	3	4	5	
(Pilihlah jawaban boleh lebih dari satu yang dipilih)						
2205. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA LANSIA (60 TAHUN KE ATAS) YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL DARI PROGRAM ATENSI LANSIA?	Ya Tidak	1 5	Tuliskan No. Urut ART Lansia 1) 2) 3) 4) 5)	A B C D E F G		
2206. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ART BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH/BST?	Ya Tidak	1 5	Tuliskan No. Urut ART 1) 2) 3) 4)			

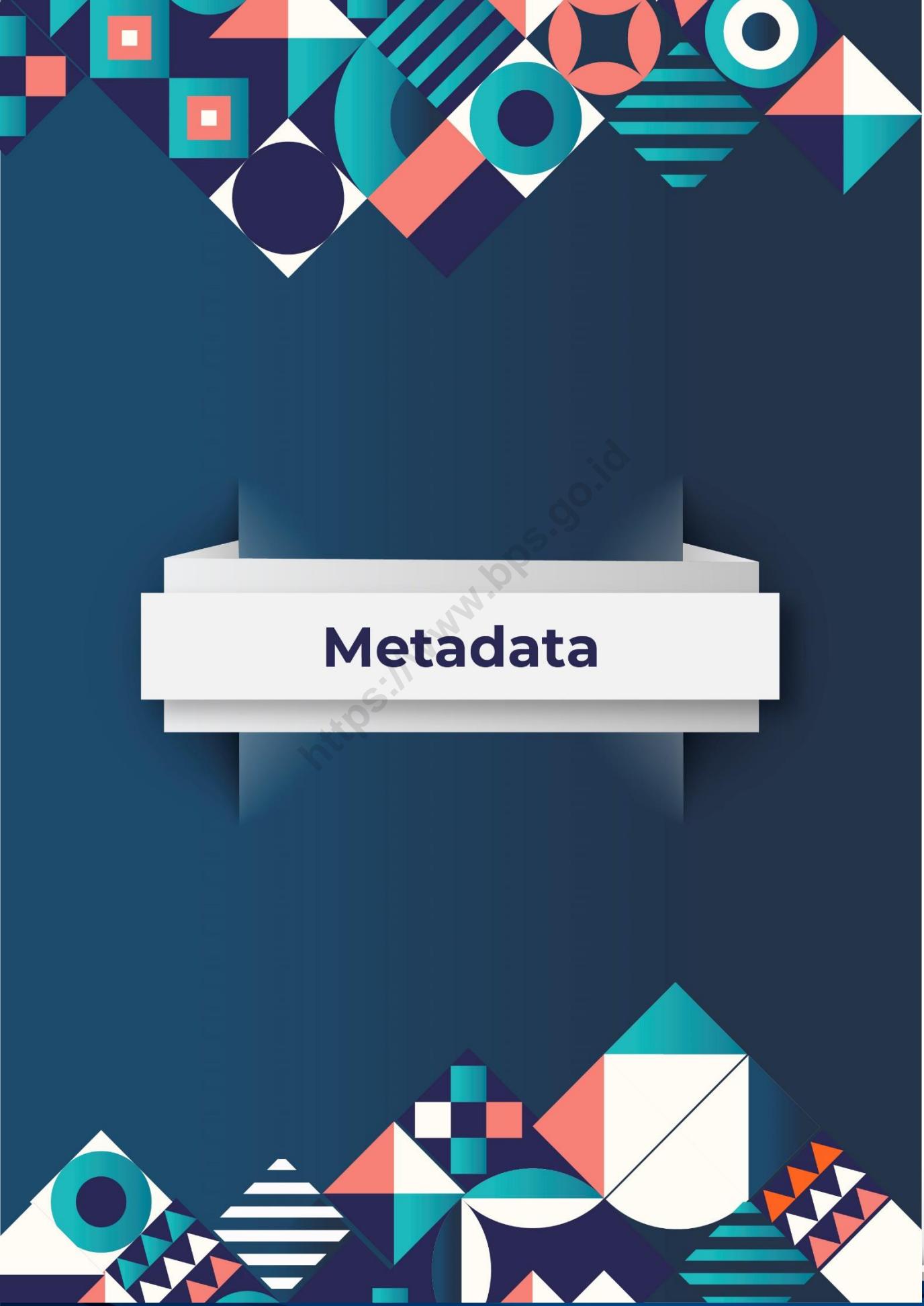
BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

2207. APAKAH RUMAH/TANGGA ANDA PERLU MEMERlUI PENERIMA BANTUAN PANGAN (BANTUAN PANGAN/NON TUNAI) (BPNT)/PROGRAM SEMBAKO?	Ya Tidak..... 1 5 → 2209	Bulan Februari' 2023 A) Ya Tidak 1 5 → Januari' 23	Bulan Januari' 2023 A) Ya Tidak 1 5 → Desember' 22	Bulan Desember' 2022 A) Ya Tidak 1 5 → November' 22	Bulan November' 2022 A) Ya Tidak 1 5 → 2209
2208. DALAM 4 BULAN TERAKHIR, SERTUKAN INFOMASI PEMBELIAn/PENGURIAN BANTUAN PANGAN.		B) Ya, tuliskan Rp. Tidak 1 5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan Rp. Tidak 1 5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan Rp. Tidak 1 5 → 2208.D	B) Ya, tuliskan Rp. Tidak 1 5 → 2208.D
A. APAKAH RUMAH/TANGGA MENERIMA BANTUAN PANGAN PADA 4 BULAN TERAKHIR?		C) Bulan D) Ya Tidak 1 5 → Januari' 23	C) Bulan D) Ya Tidak 1 5 → Desember' 22	C) Bulan D) Ya Tidak 1 5 → November' 22	C) Bulan D) Ya Tidak 1 5 → 2209
B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI BANTUAN YANG DITERIMA?		E) BERAS (i) Rp. (ii), Kg TELURAYAMRAS			
C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?		(i) Rp. (ii), Kg TELURAYAMRAS			
D. APAKAH RUMAH/TANGGA MEMANFAATKAN BANTUAN PANGAN TERSEBUT?		(i) Rp. (ii), Butir LAINNYA, tuliskan: No. Unit di VSEN23.KP: Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120	(i) Rp. (ii), Butir LAINNYA, tuliskan: No. Unit di VSEN23.KP: Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120	(i) Rp. (ii), Butir LAINNYA, tuliskan: No. Unit di VSEN23.KP: Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120	(i) Rp. (ii), Butir LAINNYA, tuliskan: No. Unit di VSEN23.KP: Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120
E. BERAPA NILAI/UMAH/KOMODITAS YANG DIBELI MENGGUNAKAN BANTUAN PANGAN TERSEBUT?		(iii), Butir LAINNYA, tuliskan: No. Unit di VSEN23.KP: Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120	(iii), Butir LAINNYA, tuliskan: No. Unit di VSEN23.KP: Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120	(iii), Butir LAINNYA, tuliskan: No. Unit di VSEN23.KP: Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120	(iii), Butir LAINNYA, tuliskan: No. Unit di VSEN23.KP: Tepung terigu 006 Daging ayam ras 059 Tempe 107 Pepaya 120
F. JIKA MEMBELI BERAS 2208.E nilai (Rp) dan kuantitas (Kg) beras ≠ 0, BAGAIMANA KUALITAS BERAS YANG DIBELI?		F) BAK CUKUP BURUK 1 2 3			
G. APAKAH ANDA DAPAT MENENTUKAN SENDIRI JENIS DAN KUANTITAS KOMODITAS YANG DIBELI?		G) Ya Tidak 1 5			
H. DI MANA TEMPAT MEMBELI KOMODITAS TERSEBUT?		H) Kios/Warung/toko Rumah Pangan kita Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan Kantor bank Lainnya 1 2 3 4 5	H) Kios/Warung/toko Rumah Pangan kita Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan Kantor bank Lainnya 1 2 3 4 5	H) Kios/Warung/toko Rumah Pangan kita Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan Kantor bank Lainnya 1 2 3 4 5	H) Kios/Warung/toko Rumah Pangan kita Kantor kelurahan/desa/ Kecamatan Kantor bank Lainnya 1 2 3 4 5

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

<p>2209. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI BERIKUT:</p> <p>(Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)</p>	<p>A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK (BLTT BBM) 1 5 B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) 1 5 C. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) 1 5</p>	<p>Ya 1 <i>Tuliskan No. Urut ART</i> 1) <input type="checkbox"/> ; 2) <input type="checkbox"/> ; 3) <input type="checkbox"/> ; 4) <input type="checkbox"/></p>
<p>2210. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH-TANGGA YANG NEMILIKI USHAHAWA MIRIRO ATAU KECIL?</p>	<p>Ya 5 Tidak 5</p>	<p>Perjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp 1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai Rp 15 miliar.
<p>B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN USAHA SEBAGAI BERIKUT:</p> <p>(Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)</p>	<p>(i) PEMBIAYAAN KEMERIAHAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) 1 5 (ii) PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIRRO (UM) 1 5 (iii) PROGRAM MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEHARTERA (PM MEKAER) 1 5 (iv) BANK WAFAK MIRRO (BWM) 1 5 (v) DANA BERGULIR OLEH LEMBAGA PENGELOLA DANA 1 5</p>	<p>Ya 1 <i>Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir</i></p> <p>(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGAN 1 5 (ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK 1 5 (iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA 1 5 (iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS 1 5 (v) BANTUAN RUTIN LAINNYA 1 5</p>
<p>2211. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH-TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?</p>	<p>Ya 1 → 2211 A. i.s.d. v Tidak 5 → 2211.B</p>	<p>Rp. —— • —— • ——</p>
<p>B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH-TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN TIDAK RUTIN?</p>	<p>Ya 1 → 2211.B. i Tidak 5 → Blok XXIII</p>	<p>Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir</p> <p>(i) BANTUAN TIDAK RUTIN 1 5</p> <p>Rp. —— • —— • ——</p>

BLOK XXIII. CATATAN					
Kunjungan I	: Tanggal:	Mulai:	<input type="checkbox"/> :	<input type="checkbox"/> :	Selsai:
Kunjungan II	: Tanggal:	Mulai:	<input type="checkbox"/> :	<input type="checkbox"/> :	Selsai:
<p>Kode 706: Lapangan Usaha (diisi oleh pengawas)</p> <p>01.Pertanian tanaman padi dan palawija 09. Pengadilan istrik, gos., usplar panas, dan udara dingin 02.Hortikultura 10. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan 03.Perkebunan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi 04.Perikanan 11. Konstruksi 05.Peternakan 12. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan 06.Kehutanan dan pertanian lainnya mobil dan sepeda motor 07.Pertambangan dan penggalian 13. Pengangkutan dan pengudangan 08.Industri pengolahan 14. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 15. Informasi dan komunikasi 16. Aktivitas tetapangan dan asuransi 17. Real estate 18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis 19. Aktivitas perwyaaan dan sewa guna tanpa hak opsi keterlaliatekijan, agen penjalanan, dan peruntujan usaha lainnya 20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 21. Pendidikan 22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial Keseian, hiburan, dan rekreasi 24. Aktivitas jasa lainnya 25. Aktivitas umum tangga sebagai memberi kerja 26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya</p>					
<p>Waktu selesaikan wawancara: <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/></p>					



Metadata



<https://www.bps.go.id>

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka kesakitan Pemuda	<p>Perbandingan antara jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.) dan mengalibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap total pemuda.</p> <p>Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang dimaksud adalah ketika seseorang tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena keluhan kesehatan.</p>	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengalihbatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari - hari}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
2	Angka Melek Huruf Latin atau huruf lainnya	Proporsi penduduk pemuda yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang dapat membaca dan menulis huruf latin/ huruf lainnya}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
3	Angka Partisipasi Sekolah Pemuda	Proporsi dari penduduk kelompok usia pemuda tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap total penduduk pemuda. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang sedang bersekolah termasuk pendidikan non formal}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
4	Percentase Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	<p>Perbandingan antara jumlah pemuda yang mempunyai keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.) dalam sebulan terakhir terhadap total penduduk lanjut usia.</p> <p>Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejauaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis.</p> <p>Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang diderita dalam waktu yang sudah cukup lama, menahan dan belum sembuh, biasanya digunakan untuk sakit yang sudah cukup lama atau menahun.</p>	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mempunyai keluhan kesehatan}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengobati sendiri}}{\text{Jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
6	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan memeriksakan diri dan mendapat pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat jalan}}{\text{Jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
7	Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra dan memeriksakan diri dan mendapat pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengobati sendiri dan rawat jalan}}{\text{Jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
8	Persentase Pemuda yang Tidak Melakukan Pengobatan dalam Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan upaya pengobatan, baik mengobati sendiri ataupun rawat jalan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang tidak berobat jalan dan mengobati sendiri}}{\text{Jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
9	Persentase pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan menurut Alasan Utama	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan rawat jalan karena alasan utama "X". 1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada sarana transportasi 3. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang tidak berobat jalan karena alasan "X" }}{\text{Jumlah pemuda yang tidak rawat jalan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Percentase Pemuda yang Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Tempat Rawat Jalan	Percentase penduduk berusia 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan melakukan rawat jalan di "X": 1. RS pemerintah 2. RS Swasta 3. Praktik dokter/bidan 4. Klinik/praktik dokter bersama 5. Puskesmas/pustu 6. UKBM 7. Praktik pengobatan tradisional/ alternatif lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat jalan di "X"} - \text{Jumlah pemuda yang tidak rawat jalan}}{\text{Jumlah pemuda yang tidak rawat jalan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
11	Percentase Pemuda yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir	Percentase penduduk berusia 16-30 tahun yang melakukan upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
12	Percentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Tempat Rawat Inap	Percentase penduduk berusia 16-30 tahun yang rawat inap di "X": 1. RS pemerintah 2. RS Swasta 3. Praktik bidan 4. Klinik/praktik dokter bersama 5. Puskesmas 6. Praktik pengobatan tradisional/ alternatif 7. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap di "X"} - \text{Jumlah pemuda yang rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
13	Percentase Pemuda menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki	Percentase penduduk berusia 16-30 tahun yang memiliki jaminan kesehatan "X": 1. BPJS PBI 2. BPJS Non-PBI 3. Jamkesda 4. Asuransi Swasta 5. Perusahaan/Kantor 6. Tidak Menggunakan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang memiliki "X"} - \text{Jumlah pemuda}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Persentase Pemuda yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang menggunakan minimal salah satu jaminan kesehatan sebagai berikut untuk rawat jalan: 1. BPJS PBI 2. BPJS Non-PBI 3. Jamkesda 4. Asuransi Swasta 5. Perusahaan/Kantor 6. Tidak Menggunakan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat jalan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
15	Persentase Pemuda yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang menggunakan minimal salah satu jaminan kesehatan sebagai berikut untuk rawat inap: 1. BPJS PBI 2. BPJS Non-PBI 3. Jamkesda 4. Asuransi Swasta 5. Perusahaan/Kantor 6. Tidak Menggunakan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
16	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan	Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang rawat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan "X". 1. BPJS PBI 2. BPJS Non-PBI 3. Jamkesda 4. Asuransi Swasta 5. Perusahaan/Kantor 6. Tidak Menggunakan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan jaminan kesehatan "X" untuk rawat jalan}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat jalan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Percentase Pemuda yang Rawat Inap menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan	Percentase penduduk berusia 16-30 tahun yang menggunakan minimal salah satu jaminan kesehatan sebagai berikut untuk rawat inap: 1. BPJS PBI 2. BPJS Non-PBI 3. Jamkesda 4. Asuransi Swasta 5. Perusahaan/Kantor 6. Tidak Menggunakan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan jaminan kesehatan "X" untuk rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
18	Percentase Pemuda yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir	Percentase penduduk berusia 16-30 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang merokok tembakau}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
19	Percentase Pemuda menurut Status Perkawinan: a. Belum Kawin b. Kawin c. Cerai Hidup/Cerai Mati	a. Perbandingan jumlah pemuda yang berstatus belum kawin terhadap seluruh jumlah pemuda b. Perbandingan jumlah pemuda yang berstatus kawin terhadap seluruh jumlah pemuda c. Perbandingan jumlah pemuda yang berstatus cerai hidup/cerai mati terhadap seluruh jumlah pemuda	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang berstatus belum kawin}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah pemuda yang berstatus kawin}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah pemuda yang berstatus cerai hidup atau cerai mati}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
20	Percentase Pemuda yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT)	Perbandingan jumlah pemuda yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) terhadap seluruh jumlah pemuda	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT)}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Persentase Pemuda menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga:	a. Perbandingan jumlah pemuda yang tinggal sendiri terhadap seluruh jumlah pemuda b. Perbandingan jumlah pemuda yang tinggal bersama keluarga terhadap seluruh jumlah pemuda b. Bersama Keluarga	$\frac{\text{jumlah pemuda yang tinggal sendiri}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah pemuda yang tinggal bersama keluarga}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
22	Persentase Penduduk Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/jazah	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan telefon seluler}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
23	Persentase Penduduk Pemuda Menurut Penggunaan Telepon Seluler	Perbandingan jumlah penduduk pemuda yang menggunakan telepon seluler terhadap seluruh penduduk pemuda	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
24	Persentase Penduduk Pemuda Menurut Penggunaan Komputer Seluler	Perbandingan jumlah penduduk pemuda yang menggunakan komputer terhadap seluruh penduduk pemuda	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan komputer}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
25	Persentase Penduduk Pemuda Menurut Akses Internet	Perbandingan jumlah penduduk pemuda yang mengakses internet terhadap seluruh penduduk pemuda	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengakses internet}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
26	Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan	Perbandingan antara pemuda yang memiliki rekening tabungan terhadap jumlah pemuda	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun yang memiliki rekening tabungan}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023
27	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni	Perbandingan antara pemuda yang tinggal di rumah layak huni terhadap jumlah pemuda	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun yang tinggal di rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023
28	Persentase Pemuda yang Bepergian	Perbandingan antara pemuda yang bepergian terhadap jumlah pemuda	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun yang bepergian}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	Perbandingan antara pemuda yang pernah menjadi korban kejahatan terhadap jumlah pemuda	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur } 16 - 30 \text{ tahun yang pernah menjadi korban kejahatan}}{\text{Jumlah penduduk berumur } 16 - 30 \text{ tahun}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023
30	Persentase Usia Kawin Pertama Pemuda	Perbandingan antara pemuda dengan usia kawin pertama (≤ 15 , $16 - 18$, $19 - 21$, $22 - 24$, atau $25 - 30$ tahun) terhadap jumlah pemuda pernah kawin	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur } 16 - 30 \text{ tahun dengan usia kawin pertama } (\leq 15, 16 - 18, 19 - 21, 22 - 24, \text{ atau } 25 - 30 \text{ tahun})}{\text{Jumlah penduduk berumur } 16 - 30 \text{ tahun pernah kawin}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023
31	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan	Perbandingan antara pemuda perempuan yang pernah melahirkan terhadap jumlah pemuda perempuan	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur } 16 - 30 \text{ tahun yang pernah melahirkan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur } 16 - 30 \text{ tahun}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023
32	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan dengan Berat Badan Bayi Saat Lahir	Perbandingan antara pemuda perempuan yang pernah melahirkan dengan berat badan bayi saat lahir ($< 2,5$ kg atau $\geq 2,5$ kg) terhadap jumlah pemuda perempuan yang pernah melahirkan	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur } 16 - 30 \text{ tahun yang pernah melahirkan dengan berat badan bayi saat lahir } (< 2,5 \text{ kg atau } \geq 2,5 \text{ kg})}{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur } 16 - 30 \text{ tahun yang pernah melahirkan}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023
33	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Tempat Persalinan	Perbandingan antara pemuda perempuan yang melahirkan menurut tempat persalinan (fasilitas kesehatan atau bukan fasilitas kesehatan) terhadap jumlah pemuda perempuan yang melahirkan	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur } 16 - 30 \text{ tahun yang pernah melahirkan menurut tempat persalinan (fasilitas kesehatan atau bukan fasilitas kesehatan)}}{\text{Jumlah penduduk berumur } 16 - 30 \text{ tahun yang pernah melahirkan}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023
34	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan menurut Penolong Persalinan	Perbandingan antara pemuda perempuan yang melahirkan menurut penolong persalinan (tenaga kesehatan atau tanpa tenaga kesehatan) terhadap jumlah pemuda perempuan yang melahirkan	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur } 16 - 30 \text{ tahun yang melahirkan menurut penolong persalinan (tenaga kesehatan atau tanpa tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah penduduk berumur } 16 - 30 \text{ tahun yang pernah melahirkan}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Persentase Pemuda Perempuan Pernah Kawin menurut Partisipasi Program Keluarga Berencana (KB)	Perbandingan antara pemuda perempuan yang pernah kawin menurut partisipasi program KB (pernah, sedang, atau tidak pernah) terhadap jumlah pemuda perempuan yang pernah kawin	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan pernah kawin berumur } 16-30 \text{ tahun menurut partisipasi program KB (pernah, sedang, atau tidak pernah)}}{\text{Jumlah penduduk berumur } 16-30 \text{ tahun yang pernah kawin}} \times 100\%$	Susenas Kor 2023
36	Rasio Jenis Kelamin	Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu	$\frac{\text{Jumlah penduduk laki - laki}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
37	Rata-Rata Jumlah Rokok yang Dihisap per Hari oleh Pemuda yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir	Jumlah rata-rata rokok yang dihisap per hari oleh penduduk berusia 16-30 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir.	$\frac{\text{Jumlah rokok yang dihisap per hari oleh pemuda yang merokok tembakau}}{\text{Jumlah pemuda yang merokok tembakau}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
38	Rata-Rata Rawat Inap	Lama Rata-rata hari penduduk berusia 16-30 tahun menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional	$\frac{\text{Jumlah lama hari rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret 2023
39	Rata-rata Sekolah Penduduk Pemuda	Lama (tahun) Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk umur 60 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.	$\frac{1}{\text{Jumlah penduduk}} \times \sum_{i=1}^{16-30 \text{ tahun}} \frac{\text{Lama sekolah pendidikan ke } i}{\text{yang berusia } 16-30 \text{ tahun}}$	Susenas Maret 2023

<https://www.bps.go.id>

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK



Jl. dr. Sutomo no. 6-8, Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4; fax: (021) 3857046
Homepage: <https://www.bps.go.id>; email: bps@bps.go.id

